SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas bersama yang salah satunya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan situasi dan dinamika hukum saat ini serta telah terjadi perubahan mendasar terkait dengan kebijakan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

http://jdih.banyumaskab.go.id/

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
i. BAB IX : PENUTUP

2. Ketentuan Pasal 4, dihapus.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

http://jdih.banyumaskab.go.id/

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Agustus 2021
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-144/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SETDA

SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta nasional yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan tahap RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 tahap ke-3 dan tahap ke-4.

Memasuki tahun kedua implementasi RPJMD, di awal tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada multi sektor. Selain sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat juga secara signifikan terdampak pandemi. Kondisi yang ditunjukan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi besar pada perekonomian di Kabupaten Banyumas seperti industri pengolahan, industri kecil, perdagangan,

http://jdih.banyumaskab.go.id/

UMKM, pertanian, dan pariwisata. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian Pandemi COVID-19.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Regulasi lainnya adalah regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan penyesuaian dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional.

Dasar perubahan RPJMD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, di dalam Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 juga disebutkan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan c) terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

http://jdih.banyumaskab.go.id/

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan daerah dan nasional, konsistensi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi RPJMD tersebut berupa rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD.

Menyikapi dengan adanya rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan perubahan RPJMD agar dapat lebih mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional, serta memberikan arah dalam perbaikan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 53

http://jdih.banyumaskab.go.id/

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah serta nasional yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan tahap RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 tahap ke-3 dan tahap ke-4.

Memasuki tahun kedua implementasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, di awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar dan multi sektor. Selain sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat juga secara signifikan terdampak pandemi. Kondisi ini ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi besar pada perekonomian di Kabupaten Banyumas seperti industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, UMKM, dan pariwisata,

serta meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian pandemi COVID-19.

Dinamika kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran juga turut mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Kebijakan lainnya secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah yaitu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika kebijakan nasional.

Dasar perubahan RPJMD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada pasal 342 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam permendagri tersebut; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan permendagri tersebut; dan c) terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar dimaksud meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Mengawali pelaksanaan perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan daerah dan nasional, konsistensi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, keselarasan antar dokumen perencanaan, kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-

indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan menyelaraskan/ mengintegrasikan perubahan kebijakan. Pada evaluasi RPJMD disajikan juga mengenai capaian indikator-indikator Hasil evaluasi RPJMD tersebut berupa rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD agar dapat lebih mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Selain itu, rekomendasi evaluasi RPJMD dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran nasional, serta memberikan arah dalam perbaikan kualitas dokumen perencanaan pembangunan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dilakukan perubahan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: 1)Penyusunan Rancangan Awal; 2)Konsultasi Publik; 3)Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Awal dengan DPRD; 4)Konsultasi Rancangan Awal dengan Provinsi; 5)Penyusunan Rancangan; 6)Musrenbang RPJMD perubahan; 7)Penyusunan Rancangan Akhir; 8)Penyusunan Raperda Perubahan Perda RPJMD; 9)Persetujuan Raperda Perubahan Perda RPJMD oleh Bupati dan DPRD; 10)Evaluasi Raperda Perubahan Perda RPJMD oleh Provinsi; dan 11)Penetapan Perubahan Perda RPJMD.

Perubahan RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang merupakan perencanaan tahunan daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
43. Surat Edaran Bersama 4 Menteri Tahun 2013 Menteri PPN / Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPPA Nomor 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012;050/4379A/SJ; SE/MPP-PA/11/2021 tentang

STRANAS PPRG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional penyusunan RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah maupun antar waktu/periode. RPJMD harus sinkron dan bersinergi antar daerah, waktu, ruang dan fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 khususnya tahap ke-3 dan tahap ke-4, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Keterkaitan/hubungan dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar lembaga pemerintah, maupun antar waktu dapat dilihat di Gambar 1.1.

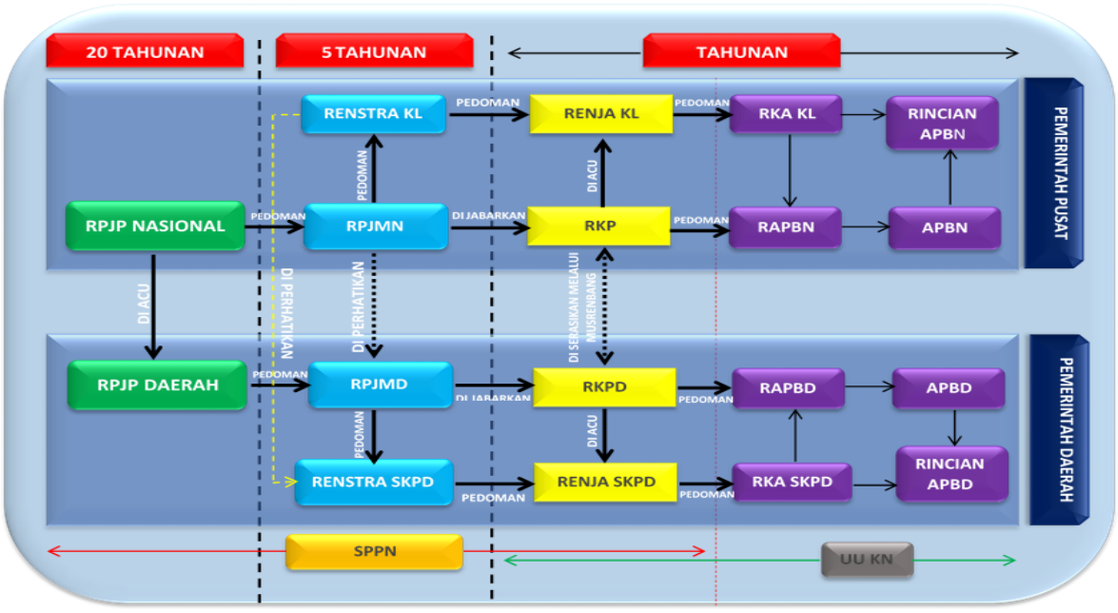

Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Keselarasan amanat dalam RPJPD Tahun 2005-2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024 dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dijabarkan sebagai berikut:

1.3.1. RPJMD dengan RPJMN tahun 2020-2024

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan RPJMN 2020-2024 menunjukan keselarasan visi RPJMN dengan visi RPJMD pada visi untuk mewujudkan wilayah yang maju dan mandiri. Ada satu misi RPJMN yang tidak terkait dengan RPJMD Kabupaten Banyumas karena misi tersebut adalah kewenangan pusat bukan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Keterkaitan misi RPJMD dengan misi RPJMN diuraikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJMN tahun 2020-2024

RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
Visi: "Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong"	**Visi:** "Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"
Misi:	**Misi:**
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia	2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.
7. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik

8. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 9. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	
10. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	-

1.3.2. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Banyumas

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 harus mempedomani RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah.

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2.
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025	RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023
Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari	Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri
1. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera	2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius
3. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
4. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing	1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
5. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari	5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

1.3.3. RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan wilayah penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 dengan visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
Visi: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi	**Visi:** Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri
Misi:	**Misi:**
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/kota	1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan	2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

1.3.4. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

1.3.5. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.3.6. RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. RTRW merupakan pedoman keruangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk membentuk struktur dan pola ruang wilayah. Kebijakan, strategi, dan indikasi program RTRW menjadi pedoman dalam penyusunan strategi dan program RPJMD. Indikasi program RTRW pada tahap pembangunan jangka menengah yang berkesesuaian dengan periode RPJMD yang disusun menjadi perhatian untuk menjadi program RPJMD, sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten, prioritas daerah, serta janji politik Bupati terpilih.

Beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam RTRW Kabupaten Banyumas tidak memiliki keterkaitan dengan program RPJMD dikarenakan perubahan kewenangan daerah terhadap beberapa urusan seperti urusan kehutanan dan energi sumber daya mineral. Kebijakan dan strategi yang tidak memiliki keterkaitan dengan program RPJMD antara lain: kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, strategi mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif, strategi mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana wisata, strategi mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan, dan strategi mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan.

1.3.7. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis,

menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penyusunan KLHS RPJMD agak berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainya. Dimana dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola.

Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJMD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa skenario KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas antara lain:

- Dibutuhkan upaya tambahan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin yang kembali meningkat dengan terjadinya pandemi COVID-19;
- Dibutuhkan upaya tambahan untuk meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan dan persentase rumah tinggal bersanitasi, serta rasio rumah layak huni yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan;
- Dibutuhkan upaya tambahan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB, PAD sektor pariwisata;
- Dibutuhkan upaya tambahan untuk menurunkan resiko bencana dan jumlah korban bencana;
- Dibutuhkan upaya tambahan untuk mempertahankan daya dukung air bagi kehidupan sejalan dengan peningkatan penduduk dan air untuk pertanian;
- Daya Dukung Lahan Terbangun (DDLB) Kabupaten Banyumas masih dalam kategori sedang mendekati baik, namun diperkirakan turun, beberapa kecamatan DDLB terlampaui atau buruk;
- Perkiraan timbulan sampah di Kabupaten Banyumas. sampai dengan 2023 mencapai 450.015 ton per tahun dengan asumsi peningkatan timbulan sampah tersebut berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk yang mencapai 0,94% per tahun. Untuk itu diperlukan upaya tambahan untuk pengelolaan sampah agar memenuhi pelayanan penanganan sampah;
- Peningkatan kebutuhan energi sebagai akibat peningkatan penduduk dan kegiatan berbanding lurus dengan peningkatan emisi GRK,

dengan demikian diperlukan upaya untuk mengendalikan peningkatan GRK.

Skenario pembangunan hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan nasional terutama dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ini juga disusun untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berupa penyesuaian program kegiatan dalam RPJMD, perbaikan indikator dan target, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta perbaikan pengukuran kinerja daerah dan OPD. Perubahan RPJMD juga memperhatikan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
b. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
c. Memberikan tolak ukur bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
d. Memberikan arah rencana pembangunan daerah jangka menengah untuk pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2022 dan 2023, dan Perubahan RKPD Tahun 2021.

1.5. Sistematika Penulisan RPJMD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini berisi tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejateraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah
Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bab ini berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah
Bab ini berisi tentang rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang alokasi belanja langsung untuk pendanaan pembangunan, dan rincian program perangkat daerah.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab ini berisi tentang penetapan indikator kinerja utama dan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bab IX Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perubahan RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Karakteristik geografi dan demografi wilayah merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta memetakan potensi pengembangan wilayah guna mendukung pembangunan daerah. Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik geografis sebagai berikut:

Lokasi strategis; Kabupaten Banyumas terletak pada persimpangan perhubungan lintas daerah, yaitu Jawa bagian timur dan barat, serta Jawa bagian utara dan selatan. Lokasi strategis Kabupaten Banyumas telah mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas, dan menjadikan Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas menjadi pusat pelayanan, tidak hanya bagi wilayah Kabupaten Banyumas tapi juga bagi kabupaten di sekitarnya. Berkembangnya kegiatan kawasan perkotaan Purwokerto meningkatkan mobilitas manusia dan barang, serta perputaran uang. Namun di sisi lain berkembangnya kawasan perkotaan Purwokerto berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan pada kawasan perkotaan, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian.

Wilayah relatif subur; Dataran rendah di wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar merupakan endapan gunung berapi yang potensial untuk budidaya pertanian tanaman pangan, sedangkan geografis perbukitan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tahunan dan tanaman perkebunan.

Potensial bagi pengembangan wisata alam; Kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas dengan bentang alam terdiri atas pegunungan/perbukitan, dan dataran rendah. Beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Sumbang yang sebagian wilayahnya berada di lereng gunung Slamet memiliki keindahan alam yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata.

Rawan bencana, kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas juga berkorelasi pada potensi bencana di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas.

Kondisi geografi Kabupaten Banyumas menggambarkan bahwa kondisi alam Kabupaten Banyumas mendukung bagi: 1).Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; 2). Pengembangan sektor pertanian baik tanaman pangan maupun perkebunan untuk ketersediaan pangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 3).Pengembangan pariwisata alam sebagai daya ungkit untuk kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan potensi wilayah tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor pembatas yang ada, antara lain daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap potensi bencana. Pengelolaan sumberdaya alam juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam agar tetap dapat memberikan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan struktur penduduk menurut umur dan rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Untuk dapat meraih peluang bonus demografi berbagai upaya perlu dilakukan mulai dari saat ini untuk menyiapkan penduduk yang berkualitas, mendorong investasi untuk menyediakan lapangan kerja, dengan tetap mengendalikan laju pertambahan penduduk.

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di sebelah barat daya Provinsi. Secara astronomis, Banyumas terletak antara 7o 15’ 05” -7o 37’ 10” Lintang Selatan dan antara 108o 39’ 17” – 109o 27’ 15” Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
- sebelah timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen
- sebelah selatan: Kabupaten Cilacap
- sebelah barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes

Gambar 2.1
Peta Kedudukan Kabupaten Banyumas dalam Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Banyumas, 2018

Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, 301 Desa, dan 30 Kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kota Purwokerto. Kabupaten Banyumas memiliki total luas wilayah 132.759 hektar. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok yang meliputi 7,93% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 10.534 hektar, dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 0,56% luas Kabupaten Banyumas atau sekitar 740 hektar. Luas dan persentase luas wilayah kecamatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lumbir	10	-	10.266	7,73%
2	Wangon	12	-	6.078	4,58%
3	Jatilawang	11	-	4.816	3,63%
4	Rawalo	9	-	4.964	3,74%
5	Kebasen	12	-	5.400	4,07%
6	Kemranjen	15	-	6.071	4,57%
7	Sumpiuh	11	3	6.001	4,52%
8	Tambak	12	-	5.203	3,92%
9	Somagede	9	-	4.011	3,02%
10	Kalibagor	12	-	3.573	2,69%
11	Banyumas	12	-	3.809	2,87%
12	Patikraja	13	-	4.323	3,26%
13	Purwojati	10	-	3.786	2,85%
14	Ajibarang	15	-	6.650	5,01%
15	Gumelar	10	-	9.395	7,08%
16	Pekuncen	16	-	9.270	6,98%
17	Cilongok	20	-	10.534	7,93%
18	Karanglewas	13	-	3.250	2,45%
19	Kedungbanteng	14	-	6.022	4,54%
20	Baturraden	12	-	4.553	3,43%
21	Sumbang	19	-	5.342	4,02%
22	Kembaran	16	-	2.592	1,95%
23	Sokaraja	18	-	2.992	2,25%
24	Purwokerto Selatan	0	7	1.375	1,04%
25	Purwokerto Barat	0	7	740	0,56%
26	Purwokerto Timur	0	6	842	0,63%
27	Purwokero Utara	0	7	901	0,68%
Jumlah		**301**	**30**	**132.759**	**100%**

Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka, 2020

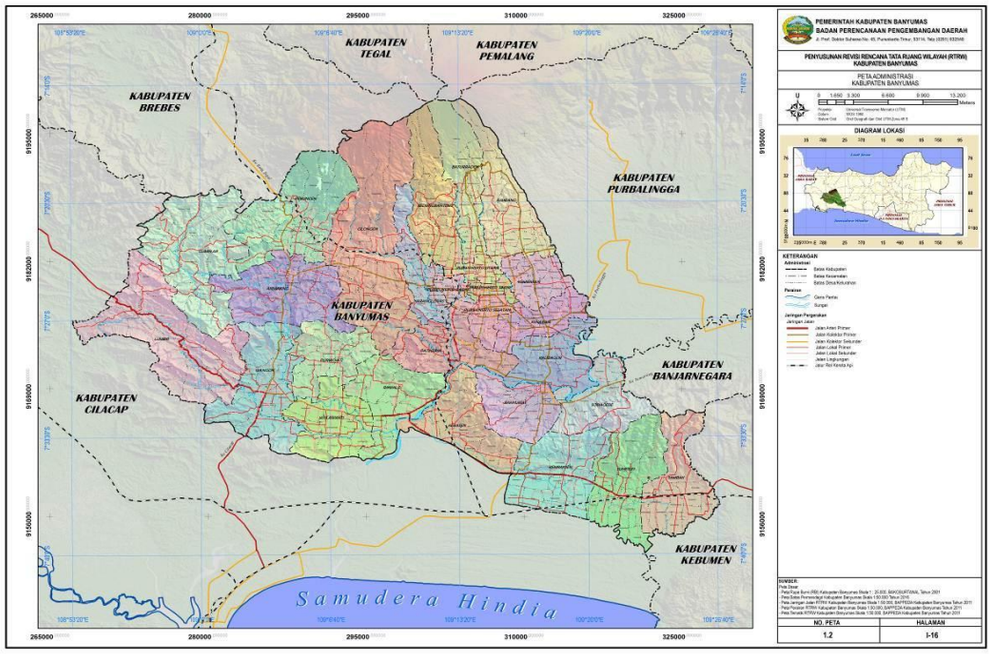

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Banyumas
Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Banyumas, 2018

2.1.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Banyumas sebesar 62,29% berada pada ketinggian 25-500 m dpl yaitu seluas 82.695,58 Ha. Wilayah dengan ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Gumelar berada pada 420 meter dpl. Sedangkan wilayah paling rendah terletak di Kecamatan Kemranjen, dengan ketinggian hanya 15 meter dpl.

Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan bentuk bentang alam dan penyebaran geografisnya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Pegunungan di sebelah utara atau daerah lereng Gunung Slamet dan daerah Pegunungan Serayu Selatan yang membujur hampir sepanjang wilayah kabupaten dan hanya dipisahkan oleh lembah di daerah Jatilawang.
2. Dataran rendah terletak di antara lereng Gunung Slamet dan Pegunungan Serayu Selatan; dan
3. Dataran rendah di sebelah Selatan Pegunungan Serayu Selatan, membujur dari arah Barat sampai dengan perbatasan Kabupaten Kebumen.

Daerah dataran potensial sebagai kawasan budidaya, sedangkan daerah perbukitan dengan faktor pembatas kemiringan dan ketinggian lahan diarahkan untuk kawasan konservasi.

2.1.1.3 Klimatologi

Sebagai daerah beriklim tropis, Kabupaten Banyumas hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sepanjang tahun 2020 terjadi curah hujan yang fluktuatif selama 145 hari dan beragam menurut bulan. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Nopember dengan 707 mm^3, sedangkan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 30 mm^3.

Tabel 2.2
Rata-rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Bulan	Curah Hujan (mm^3)	Hari Hujan
Januari	421	14
Februari	525	19
Maret	434	14
April	339	11
Mei	301	10
Juni	191	6
Juli	50	2
Agustus	30	1
September	81	3
Oktober	617	20
November	707	24
Desember	658	21

Sumber: Kabupaten Banyumas dalam Angka, 2021

2.1.1.4 Geologi

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, Zona Serayu dan Pegunungan Serayu Selatan. Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan Pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari Barat Laut–Tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas. Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur yang disebut zona Serayu. Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.Secara stratigrafi, Kabupaten Banyumas terdiri atas formasi 1) Endapan Aluvial/Aluvium, 2) Endapan Gunung Api, 3) Formasi Tapak, 4) Formasi Kumbang, 5) Formasi Halang, 6) Anggota Batugamping Formasi Halang, 7). Anggota Breksi Formasi Halang, dan 8) Formasi Rambatan.

Endapan aluvial atau aluvium menempati porsi yang cukup besar di wilayah Kabupaten Banyumas. Penyebarannya di bagian Selatan wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu di Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Rawalo, Jatilawang dan Wangon. Kawasan endapan aluvium ini merupakan kawasan yang subur.

Kondisi geologi Kabupaten Banyumas juga menyimpan potensi bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Bahan galian yang ada di Kabupaten Banyumas tersebar merata hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas. Potensi bahan galian yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Potensi Bahan Galian di Kabupaten Banyumas

No	Bahan Galian	Cadangan (Ton)	Penyebaran
1	Andesit	169.090.173,09	Kec. Baturaden, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Wangon, Pekuncen, Karang lewas, Kedungbanteng, Sumbang, Patikraja, dan Cilongok
2	Andesit Homblende	180.451,65	Kec. Kedungbanteng
3	Batu Tempel Adesit	150.536,67	Kec. Kedungbanteng dan Pekuncen
4	Diorit	35.900,00	Kec. Ajibarang & Purwojati
5	Granodiorit	11.566,978	Kec. Kedungbanteng
6	Basalt	21.511.646,08	Kec. Somagede, banyumas, Kebasen, Wangon, Lumbir, Jatilawang, Tambak, Kemranjen, Ajibarang, dan Rawalo
7	Batu Gamping	483.192.403,53	Kec. Ajibarang & Gumelar
8	Phospat	362.900,25	Kec. Ajibarang & Gumelar
9	Kaolin	2.400.000	Kec. Lumbir, Cilongok, Kalibagor, dan Gumelar
10	Pasir	11.597.363,54	S. Serayu, Logawa, Klawing, dan Tajum
11	Trass	560.000	Kec. Kedungbanteng dan Lumbir
12	Sirtu	5.846.340,57	S. Serayu, Logawa, Tajum, Banjaran, Cangkok, dan Krukut
13	Tanah Liat	45.487.328	Seluruh Kabupaten Banyumas
14	Tanah Urug	481.347,28	Seluruh Kabupaten Banyumas
15	Emas	9,6	Kec. Gumelar,Lumbir, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Kebasen, Rawalo, banyumas, Sumpiuh, Tambak dan Somagede.

Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi menggambarkan potensi sumber daya air yang meliputi distribusi, pergerakan dan kualitas sumber daya air. Kondisi hidrologi dipengaruhi oleh struktur tanah, topografi, geologi, geomorfologi dan curah hujan. Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi curah hujan, air permukaan (sungai dan mata air) dan air tanah. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m3/hari atau 16.591.564.830 m3/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya.

Kondisi hidrologi menyediakan potensi sumber daya air yang diperlukan oleh berbagai kegiatan budidaya manusia. Air tanah yang telah termanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah Purwokerto–Purbalingga dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 503.000.000 m3/tahun dan jumlah aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 10.000.000 m3/tahun; Cekungan Air Tanah Kroya jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 65.000.000 m3/tahun dan Cekungan Air Tanah Cilacap dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 43.000.000 m3/tahun.

Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimeneng, Serayu, Ijo, dan Tipar. Keempat DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber daya pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan. Namun demikian potensi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Banyumas tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki potensi air permukaan sedangkan potensi air tanah sulit untuk diperoleh seperti terdapat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Cilongok. Beberapa desa di wilayah Kabupaten Banyumas juga tidak berada pada cekungan air tanah dan memiliki kualitas air tanah yang kurang baik.

Berdasarkan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 potensi ketersediaan air permukaan dibandingkan dengan kebutuhan air untuk penduduk, irigasi pertanian dan industri maka menunjukkan bahwa daya dukung air Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 1,26 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kategori daya dukung air bersyarat atau sedang. Sebagian besar kecamatan memiliki status daya dukung air sedang atau bersyarat kecuali Kecamatan Jatilawang, Kalibagor, Karanglewas, Kembaran, Kemranjen, Patikraja, Rawalo, Sokaraja, Sumpiuh dan Tambak yang dalam kondisi terlampaui. Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang memiliki status daya dukung air kondisi baik karena nilainya lebih dari 3 adalah Kecamatan Gumelar dan Lumbir. Kecamatan dengan daya dukung air terlampaui berdasarkan identifikasi potensi ketersediaan dan kebutuhan disebabkan karena faktor tingginya kebutuhan air untuk pertanian terutama untuk pertanian lahan basah yang relatif besar, bahkan dibandingkan dengan potensi ketersediaan air permukaannya. Kondisi tersebut pada waktu tertentu dapat menyebabkan konflik kebutuhan antara air untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dengan kebutuhan pertanian. Untuk keberlanjutan daya dukung air dilakukan upaya-upaya konservasi sumber daya air dengan pembuatan biopori,

sumur resapan, dan konservasi mata air yang diawali dengan pendataan mata air.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08 % dibanding dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Berikut luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya.

Tabel 2.4
Luas Wilayah Kabupaten Banyumas Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2015–2019

No.	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Lahan Pertanian	85.187	101.554	102.420	101.272	100.712
	a. Lahan Sawah	32.600	32.528	32.163	31.943	31.915
	b. Lahan Pertanian Bukan Sawah	52.587	69.026	70.257	69.329	68.798
2.	Lahan Bukan Pertanian	47.572	31.205	30.339	31.487	32.047
	Total	132.759	132.759	132.759	132.759	132.759

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2016, Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2017-2020 Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, luas penggunaan lahan pertanian yang terdiri dari lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah mengalami penurunan tiap tahunnya, selama 3 tahun terakhir dari 102.420 Ha di tahun 2017 menjadi 101.272 di Tahun 2018 dan menurun kembali menjadi 100.712 di Tahun 2019, sedangkan luas lahan bukan pertanian semakin meningkat dari 30.339 Ha di tahun 2017 menjadi 31.487 Ha di Tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi 32.047 Ha di Tahun 2019. Hal ini diakibatkan karena terjadinya kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas. Kawasan terbangun umumnya digunakan untuk pembangunan perumahan/permukiman, industri serta jasa dan perdagangan, sementara Kabupaten Banyumas belum menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai salah satu instrument pengendalian alih fungsi lahan.

Dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas terdapat analisis daya dukung lahan terbangun (DDLB) untuk kepentingan pembangunan. Daya dukung lahan untuk kawasan terbangun mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun. DDLB Kabupaten Banyumas sebesar 2,69 termasuk daya dukung lahan permukiman sedang mendekati baik. Hal tersebut dimaksudkan bahwa di Kabupaten Banyumas masih memiliki daya tampung bangunan untuk pengembangan kegiatan terbangun. Jika dilihat DDLB pada setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas, kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk terdapat di seluruh kecamatan di kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan dan Purwokerto Utara, sedangkan untuk kategori bersyarat/sedang terdapat 15 kecamatan, untuk kategori baik terdapat 8 kecamatan.

Dalam rangka mempertahankan daya dukung lahan tahun 2022-2023 dilaksanakan program kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sehingga pemanfaatan ruang terutama lahan tidak melebihi daya dukungnya.

2.1.1.7 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 kondisi lingkungan hidup digambarkan oleh kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, kondisi sumber daya alam, bencana dan kerentanan perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, serta kemampuan penyediaan keanekaragaman hayati, merupakan muatan dasar KLHS. Hasil analisis kondisi lingkungan hidup menjadi bagian dari gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, yaitu analisis daya dukung dan daya tampung untuk pembangunan daerah.

Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan, dengan komposisi bobot untuk tata ruang adalah 30% untuk daya dukung lahan, 30% daya dukung air dan 40% untuk daya dukung pangan. Status daya dukung dalam kondisi baik jika nilainya di atas 3, dinyatakan bersyarat jika nilainya antara 1–3 dan buruk atau terlampaui jika kurang dari 1.

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan *(supportive capacity)* dan kapasitas tampung limbah *(assimilative capacity).*

Agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, maka perencanaan yang dikembangkan harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan budidaya masyarakat.

Perhitungan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas, menggunakan data utama yaitu peta tutupan lahan yang digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas 2018–2038 yang telah mendapatkan persetujuan dari BIG (Badan Informasi Geospasial) dan menjadi rujukan dalam analisis serta rencana tata ruang.

Berdasarkan ketiga perhitungan daya dukung yaitu DD air, DD pangan dan DD lahan bangunan di atas maka dapat disimpulkan untuk daya dukung lingkungan masing-masing kecamatan.

Tabel 2.5
Daya Dukung Lingkungan Kabupaten Banyumas

Kecamatan	DD Terbangun	DD Pangan	DD Air	DD Lingkungan	STATUS
	30%	40%	30%		
Ajibarang	2,49	1,04	1,40	1,58	Bersyarat
Banyumas	1,51	0,81	1,86	1,33	Bersyarat
Baturaden	3,78	1,35	2,68	2,48	Bersyarat
Cilongok	3,45	1,43	1,98	2,20	Bersyarat
Gumelar	5,66	1,38	3,76	3,38	Baik
Jatilawang	2,79	2,06	0,81	1,90	Bersyarat
Kalibagor	2,66	1,45	0,90	1,65	Bersyarat
Karanglewas	2,05	1,67	0,99	1,58	Bersyarat
Kebasen	2,76	1,15	1,26	1,66	Bersyarat
Kedungbanteng	4,32	1,77	2,37	2,72	Bersyarat
Kembaran	1,70	1,53	0,57	1,30	Bersyarat
Kemranjen	2,17	1,99	0,95	1,73	Bersyarat
Lumbir	5,33	1,43	4,76	3,60	Baik
Patikraja	2,86	1,86	0,92	1,88	Bersyarat
Pekuncen	4,07	1,78	1,31	2,33	Bersyarat
Purwojati	2,45	2,28	1,03	1,96	Bersyarat
Purwokerto Barat	0,77	0,29	1,47	0,79	Terlampaui
Purwokerto Selatan	0,85	0,20	1,45	0,77	Terlampaui
Purwokerto Timur	0,63	0,13	1,51	0,69	Terlampaui
Purwokerto Utara	0,85	0,52	1,41	0,89	Terlampaui
Rawalo	3,05	2,07	0,82	1,99	Bersyarat
Sokaraja	1,37	1,41	0,73	1,20	Bersyarat
Somagede	3,82	1,14	1,61	2,09	Bersyarat
Sumbang	2,54	1,81	1,54	1,95	Bersyarat
Sumpiuh	2,89	1,87	0,98	1,91	Bersyarat
Tambak	2,18	2,71	0,88	2,00	Bersyarat
Wangon	2,74	1,33	1,33	1,75	Bersyarat
KAB. BANYUMAS	2,69	1,42	1,26	1,75	Bersyarat

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Berdasarkan daya dukung lingkungan di atas menunjukkan bahwa kondisi daya dukung Kabupaten Banyumas adalah 1,75 atau dalam kategori sedang atau bersyarat. Ditinjau dari masing-masing kecamatan maka seluruh kecamatan Purwokerto baik barat, selatan, timur dan utara dalam kondisi terlampaui. Daya dukung lingkungan dengan status baik berada di Kecamatan Gumelar dan Lumbir.

Daya dukung terlampaui artinya secara administrasi wilayah tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan terutama pangan dan air sendiri, serta dari sisi lahan kepadatannya sudah sangat tinggi. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan akan air dan pangan di wilayah perkotaan akan tergantung dari wilayah lainnya di Kabupaten Banyumas. Jika dilihat dari sisi lahan terbangun maka model pembangunan vertikal harus menjadi pendekatan yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan permukiman maupun perdagangan jasa. Selain itu pengembangan kawasan perkotaan ke kecamatan sekitarnya juga menjadi upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi daya dukung lahan terbangun di kawasan perkotaan Purwokerto.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lingkungan diperlukan upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang,

pengendalian pencemaran dan pemulihan pencemaran, penyusunan kebijakan lingkungan hidup dan penegakan peraturan lingkungan hidup, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup (edukasi dan advokasi lingkungan hidup), serta penyediaan sumber daya manusia Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD).

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdiri atas: kawasan peruntukan pertanian, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan mineral, kawasan pertambangan panas bumi, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan permukiman. Rencana pola ruang yang menggambarkan distribusi peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Banyumas, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya sebagai acuan pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana gambar berikut:

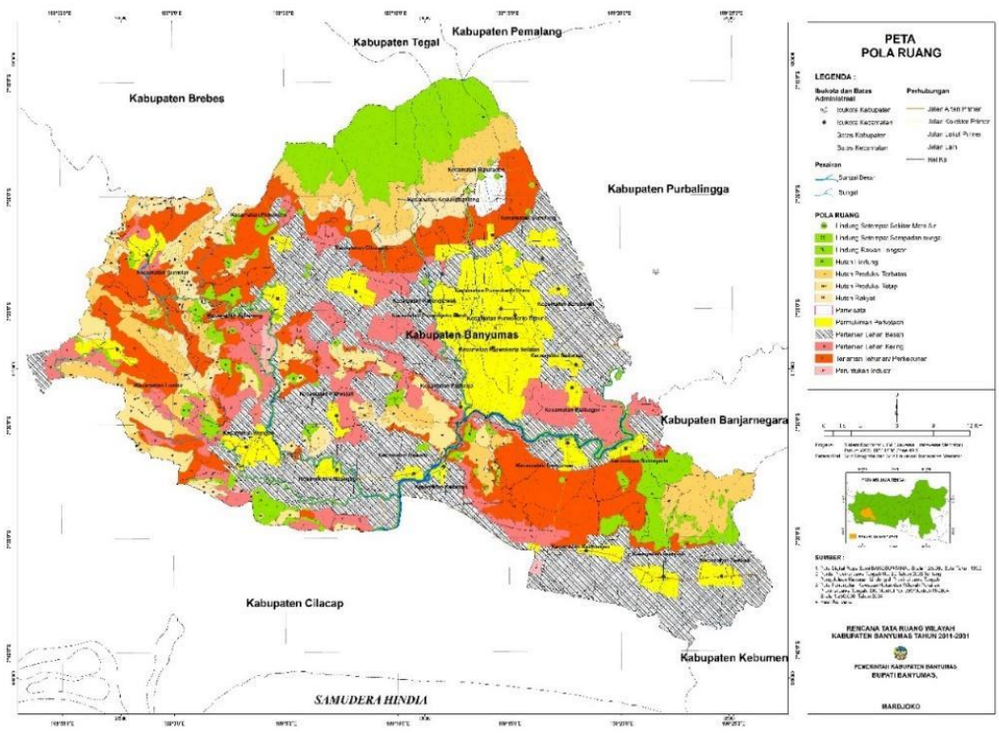

Gambar 2.3
Peta Pola Ruang
Sumber RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

Selanjutnya rencana struktur ruang sebagai acuan pengembangan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional adalah sebagaimana gambar berikut:

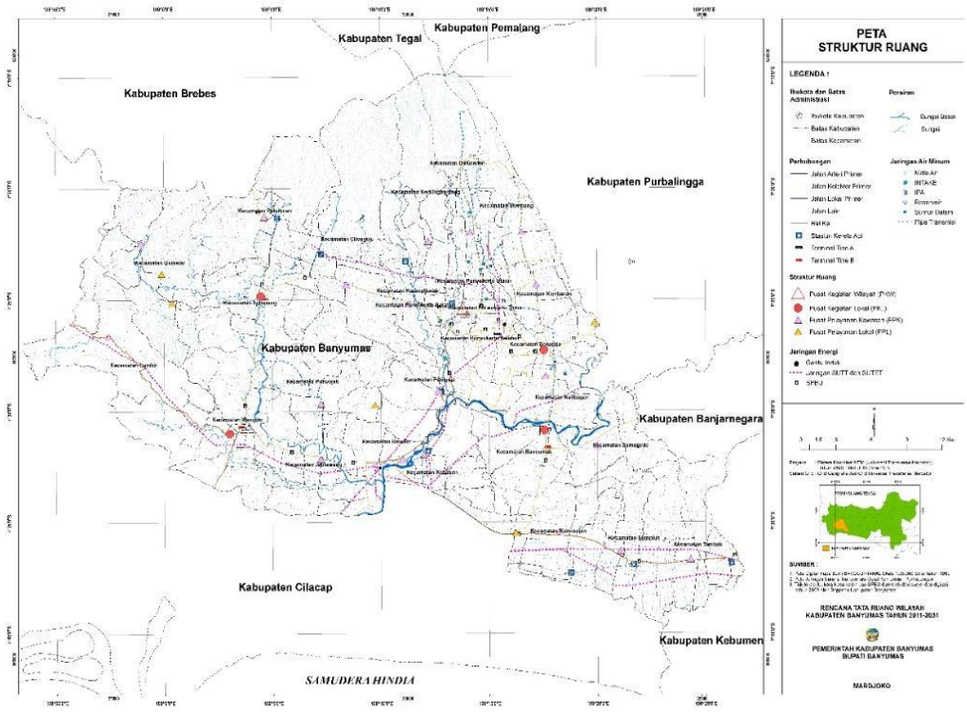

Gambar 2.4
Peta Struktur Ruang
Sumber RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas sebagai kawasan strategis provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 terdiri atas: kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas) dan kawasan pariwisata terpadu Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya; kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Gunung Slamet.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Jawa Tengah Perkotaan Purwokerto ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Pengembangan Wilayah merupakan kota utama di wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi.

Beberapa kota kecamatan mempunyai tingkat perkembangan wilayah dan tingkat konsentrasi kegiatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota kecamatan lainnya. Perkotaan tersebut meliputi: 1) perkotaan Ajibarang; 2) perkotaan Wangon; 3) perkotaan Sokaraja; 4) perkotaan Banyumas; dan 5) perkotaan Sumpiuh. Dalam perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas perkotaan tersebut akan dikembangkan

menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Lokal yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pengembangan PKL diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan pelayanan wilayah dalam lingkup lokal yang mampu menampung penduduk beserta aktifitasnya dalam kerangka mengurangi arus migrasi ke Kawasan Perkotaan Purwokerto sehingga diharapkan tercapai distribusi pelayanan dan pembangunan di setiap wilayah Kabupaten Banyumas secara seimbang.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga–Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang. Untuk mendukung pembangunan kawasan tersebut dilakukan pengembangan Kawasan Banjarnegara-Purbalingga- Banyumas-Cilacap-Kebumen (Kawasan Barlingmascakeb), Kawasan Pekalongan-Batang (Kawasan Petanglong), Kawasan Jepara-Kudus-Pati (Kawasan Wanarakuti), Kawasan Rembang-Blora (Kawasan Banglor), dan Kawasan Kota Surakarta Boyolali-Sukoharjo- Karanganyar-Wonogiri- Sragen-Klaten (Kawasan Subosukawonosraten). Sebagai pedoman percepatan pembangunan di kawasan tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang- Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo-Magelang- Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, dengan lampiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana Induk). Rencana Induk dimaksud berfungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan dan pedoman untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan kawasan dimaksud pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Kabupaten Banyumas merupakan bagian Kawasan Barlingmascakeb yang akan dikembangkan untuk mendukung dan memberikan nilai tambah dalam percepatan pembangunan ekonomi kawasan prioritas pengembangan Brebes-Tegal-Pemalang. Berdasarkan Perpres Nomor 79 tahun 2019 di Kabupaten Banyumas terdapat 7 Program/Proyek dalam strategis, yaitu: a. Pembangunan Waduk Kaliurip di Kecamatan Purwojati; b. Pembangunan Jembatan Kali Serayu yang menghubungkan Desa Pegalongan–Desa Mandirancan Kecamatan Patikraja; c. Pembangunan Anjungan Pelayanan Jalan (APJ); d. Pembangunan Fly over Tambaknegara; e. Pembangunan Fly over Veteran; f. Peningkatan Terminal Tipe A; g. Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis).

Selain program/proyek strategis tersebut dalam Perpres Nomor 79 juga terdapat program lintas kawasan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, yaitu: 1) Pembangunan Tol Pejagan-Cilacap, 2) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah, 3) Pengembangan amenitas pariwisata berbasis homestay/desa wisata, 4) Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM, 5) Pengembangan ekonomi berbasis pesantren, 6) Penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk, 7) Pengadaan alat kesehatan di 7 RS Provinsi, 8)

Pengembangan SDM bidang IPTEK, 9) Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman).

Kesiapan dan progres pelaksanaan proyek strategis tersebut sampai dengan tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

- Detail Engginering Design (DED) Anjungan Pelayanan Jalan telah disusun pada tahun 2018;
- Pembangunan Jembatan Kali Serayu Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja-Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen pada tahun 2021 masih proses pembangunan bangunan atas, pengaman bawah dan sebagian oprit jembatan dengan anggaran 18,5 Milyar dengan anggaran APBD. Usulan dukungan anggaran untuk akses jalan di tolak oleh Pemerintah Pusat dikarenakan akses jalan tersebut tidak masuk dalam proyek strategis Perpres 79 Tahun 2019. Konstruksi jembatan sebagian besar sudah ditangani dengan APBD dengan bantuan gelagar dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 10 Milyar;
- Pembangunan Fly Over Tambaknegara telah dikoordinasikan dengan Pemerintah namun masih belum ada gambaran trase, meskipun telah dilaksanakan uji tanah di sekitar lokasi oleh Kementrian PUPR. Sehingga belum bisa diputuskan langkah berikutnya. Tanpa trase berarti belum diketahui titik-titik sebagai acuan perhitungan pengadaan tanah dan seterusnya;
- Pembangunan Fly Over Veteran sudah terdapat usulan trase dari Kementrian Perhubungan, namun belum ada tindak lanjut, sehingga juga belum bisa melangkah lebih lanjut sebelum ada persetujuan trase;
- Tahun 2020 disusun dokumen pengadaan tanah embung Kaliurip. Paket pekerjaan tersebut sudah termasuk studi kelayakan embung Kaliurip. Selanjutnya tahun 2021 disusun dokumen UKL/ UPL dan proses pengadaan tanah.

Koordinasi dengan Pemerintah perlu terus dilakukan untuk mengoptimakan pelaksanaan proyek strategis dalam rencana induk. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memastikan program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung sudah ada dalam dokumen perencanaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan untuk pengembangan pada wilayah pengembangan Barlingmascakeb, khususnya di Kabupaten Banyumas melalui program/kegiatan antara lain: a) Peningkatan aksesibilitas kawasan melalui fasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan strategis, berupa pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Jendral Besar Soedirman Purbalingga, dan FGD reaktivasi jalur KA Purwokerto-Wonosobo; b) Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan (Trans Jateng) pada Koridor Purwokerto – Purbalingga; c) Peningkatan penyediaan air baku melalui pembangunan Waduk Kaliurip Kabupaten Banyumas.

Peningkatan aksesibilitas kawasan dengan pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman dan layanan transportasi masal Trans Jateng membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi barang dan jasa dari Kabupaten Banyumas. Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas dengan dukungan jasa akomodasi dan kemudahan akses dapat dikembangkan untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran).

Dalam industri pariwisata atau pameran MICE adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar, biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan.

Untuk mendukung pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman Pemerintah Kabupaten Banyumas mengintegrasikan pengembangan angkutan masal BTS yang dengan angkutan masal Trans Jateng yang dikembangkan Provinsi Jawa Tengah, khususnya Jalur Terminal Bulupitu-Kebondalem.

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana angin topan, dan kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi. Dalam perubahan RTRW Kabupaten Banyumas telah ditambahkan analisis mengenai kawasan rawan bencana kekeringan, namun tidak lagi memasukkan kawasan rawan bencana angin topan atau puting beliung.

Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana gerakan tanah baik karena kemiringan lahan maupun dilalui sesar/patahan, rawan bencana banjir, kekeringan, dan rawan letusan gunung berapi. Wilayah rawan bencana gerakan tanah atau sering lebih dikenal dengan longsor merupakan jenis bencana yang terdapat di hampir seluruh kecamatan. Hal ini terkait dengan kondisi fisik sebagian wilayah Kabupaten Banyumas yang berada pada tingkat kelerengan tinggi, serta adanya sesar atau patahan yang juga mempengaruhi kerawanan bencana gerakan tanah. Terkait dengan bencana alam lainnya juga terdapat wilayah yang rawan terhadap letusan gunung api yang bersumber dari Gunung Slamet. Terdapat 5 kecamatan yang berada di sekitar Gunung Slamet yaitu Kecamatan Baturraden, Karanglewas, Kedungbanteng, Purwokerto Utara dan Sumbang. Bencana alam lain di Kabupaten Banyumas adalah banjir dan kekeringan yang memiliki keterkaitan dengan iklim, yang masing-masing tersebar di 7 kecamatan dan 16 kecamatan. Wilayah yang tidak memiliki kerawanan bencana terdapat di 3 kecamatan berdasarkan pemetaan bencana yaitu Kecamatan Kembaran, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur.

Tabel 2.6
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Banyumas

KECAMATAN	Banjir	Gerakan Tanah	Sesar	Kekering an	Letusan Gunung Api
Ajibarang		√	√	√	
Banyumas	√	√			
Baturraden		√			√
Cilongok		√	√		
Gumelar		√		√	
Jatilawang		√		√	
Kalibagor	√			√	
Karanglewas		√	√		√
Kebasen	√	√	√	√	
Kedungbanteng		√			√

KECAMATAN	Banjir	Gerakan Tanah	Sesar	Kekering an	Letusan Gunung Api
Kembaran					
Kemranjen	√	√	√	√	
Lumbir		√		√	
Patikraja		√		√	
Pekuncen		√	√		
Purwojati		√	√	√	
Purwokerto Barat					
Purwokerto Selatan				√	
Purwokerto Timur					
Purwokerto Utara					√
Rawalo		√		√	
Sokaraja				√	
Somagede	√	√	√	√	
Sumbang					√
Sumpiuh	√	√	√	√	
Tambak	√	√		√	
Wangon		√	√	√	

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

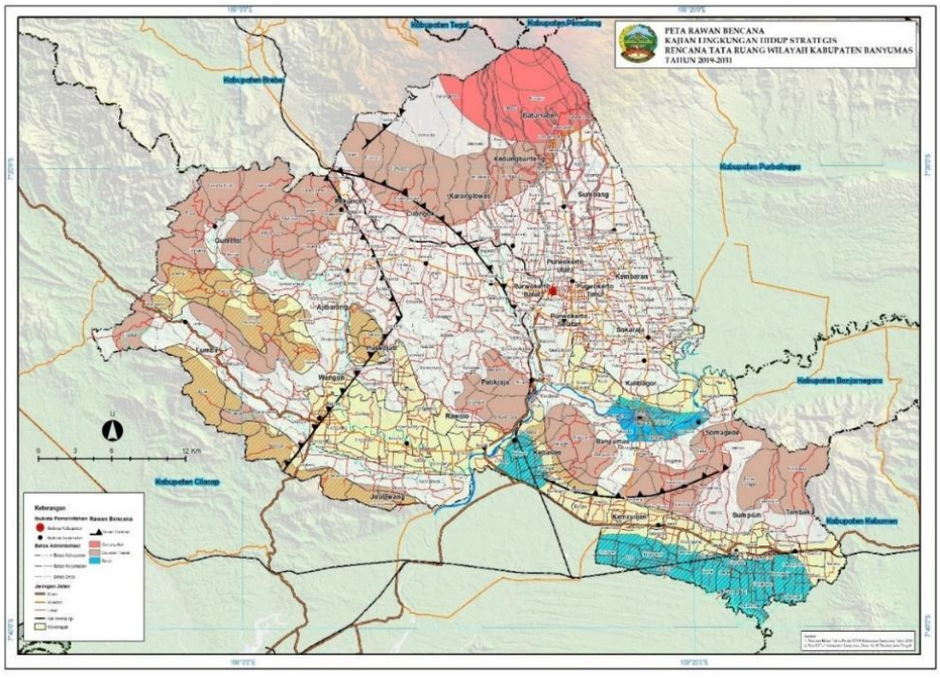

Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana Kabupaten Banyumas
Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Berdasarkan analisis dari Data Informasi Bencana Indonesia (http://dibi.bnpb.go.id/dibi/), Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan kejadian longsor, angin puting beliung dan banjir selama dua puluh tahun terakhir (1998-2019), dengan kejadian tertinggi untuk longsor sebanyak 167 kejadian, angin puting beliung 108 kejadian, dan banjir 63 kejadian. Adapun salah satu dampak signifikan dari kejadian bencana tersebut adalah jumlah rumah yang mengalami rusak berat karena kejadian bencana yang mengindikasikan kondisi mutu bangunan

yang kurang baik, yaitu 642 rumah karena longsor, 599 rumah karena banjir, dan 531 rumah karena angin puting beliung.

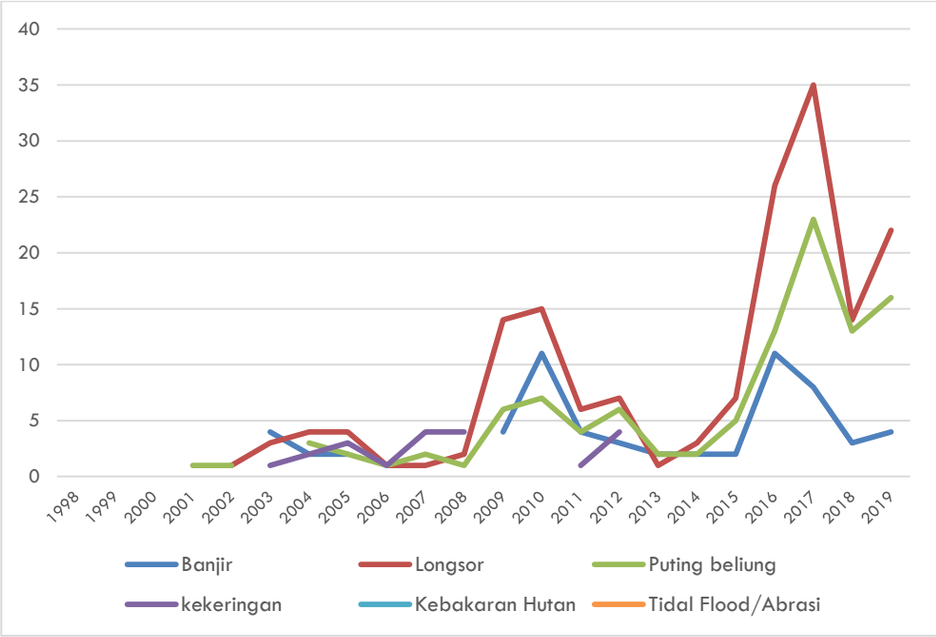

Gambar 2.6
Grafik Kejadian Bencana Kabupaten Banyumas 1998 – 2019
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Selanjutnya berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia, Kabupaten Banyumas memiliki indeks 207.2 yaitu kategori risiko tinggi, terdiri dari risiko tinggi terhadap banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kekeringan, dan kebakaran lahan dan hutan, dan risiko sedang terhadap cuaca ekstrem. Berdasarkan hasil pemodelan multi risiko bencana di Kabupaten Banyumas, setidaknya 51,785 % wilayah Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam risiko tinggi, 18,960% termasuk ke dalam risiko sedang dan 29,255% termasuk ke dalam risiko rendah terhadap bencana banjir dan tanah longsor (Gunadi et al, 2015). Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah 2016-2020, Kabupaten Banyumas memiliki potensi luasan bahaya banjir seluas 54,682 hektar dengan potensi kerugian 1,4 triliun rupiah dan potensi luasan bahaya cuaca ekstrem seluas 100,507 hektar, dengan potensi kerugian 5,8 triliun rupiah.

Beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas diidentifikasi sebagai wilayah rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Banyumas, Kalibagor, Kebasen, Tambak, Somagede, Sumpiuh, dan Kemranjen, sebagaimana gambar berikut:

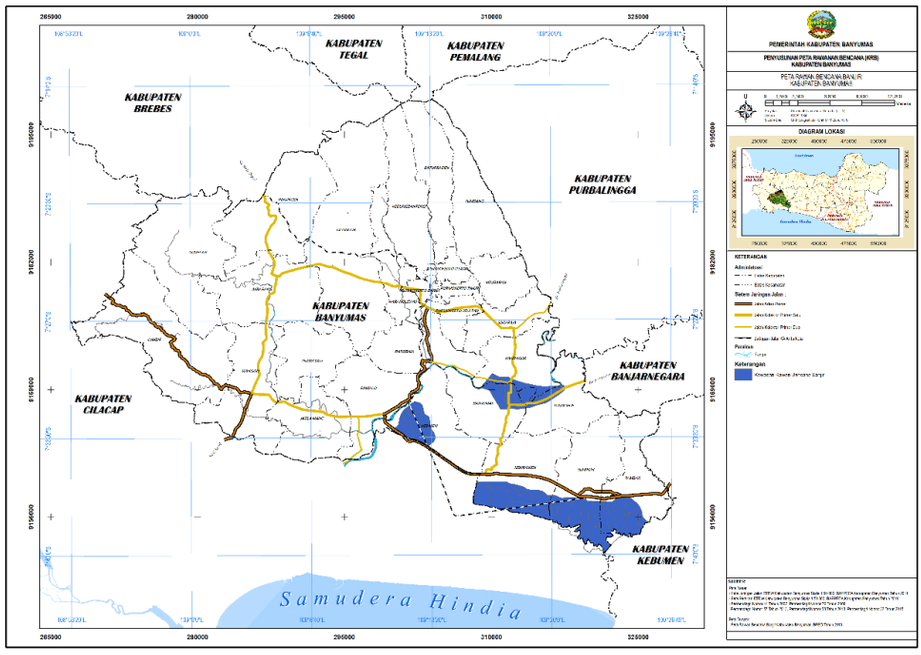

Gambar 2.7
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Banyumas
Sumber: Penyusunan RTRW Kabupaten Banyumas

Banjir yang terjadi di Kabupaten Banyumas terjadi karena topografi wilayah, pengaruh iklim dan karena kondisi drainase yang kurang optimal. Banjir di kawasan perkotaan diperburuk dengan banyaknya sampah yang masuk dan menumpuk di saluran air pembuangan. Beberapa kejadian banjir di Purwokerto lebih banyak disebabkan oleh permasalahan drainase yang secara teknis tidak mampu menampung hujan lebat serta banyaknya penumpukan sampah akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan. Selain itu juga meningkatnya kawasan terbangun yang tidak diikuti sistem pengelolaan drainase yang terintegrasi akan menimbulkan dampak genangan atau banjir lokal yang bisa terjadi baik di dataran tinggi maupun rendah.

Terkait dengan tingkat kerentanan terhadap iklim yang ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berikut tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.7
Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Banyumas

Kategori	Desa	Persen (%)
Tidak Rentan	21	6
Kurang Rentan	85	26
Agak Rentan	225	68

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Berdasarkan tabel di atas kategori agak rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori kerentanan terhadap perubahan iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

2.1.1.10 Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki kewajiban untuk menyusun inventarisasi GRK. Penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap sumber-sumber emisi GRK. Inventarisasi GRK Tahun 2020 memuat tingkat emisi GRK di Kabupaten Banyumas tahun 2019, dan status dan kecenderungan emisi selama 5 (lima) tahun terakhir (periode 2015-2019).

Inventarisasi GRK tahun 2020 berupaya mencakup seluruh sektor dan kategori yang penting dan signifikan menghasilkan emisi GRK di wilayah Kabupaten Banyumas dengan sumber data tahun 2019. Kabupaten Banyumas hanya dapat memenuhi 22 kategori dari 32 kategori berdasarkan aplikasi pada SIGNSMART, sedangkan 8 data dinyatakan tidak tersedia *(Not Applicable)*, 1 data tidak diestimasikan *(Not Estimated)* yaitu data konsumsi karbonat untuk industri makanan dan minuman di Kabupaten Banyumas, dan 1 data telah dimasukkan ke dalam kategori lainnya *(Including Elsewhere)* yaitu pada kategori Pembakaran Bahan Bakar di Sektor Lainnya (Pertanian, Perikanan, dll).

Hasil perhitungan tingkat emisi di Kabupaten Banyumas tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Banyumas Tahun 2019

NO.	SEKTOR	CO_2 Eq (Gg)
1.	Pengadaan dan Penggunaan Energi	1.663,03
2.	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	878,21
3.	Pertanian	841,28
4.	Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya	351,66
5.	Pengelolaan Limbah	180,33
	TOTAL	**3.914,51**

Sumber : Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020

Dari kelima sektor tersebut, dapat dilihat proporsi kontribusi emisi GRK pada grafik berikut ini:

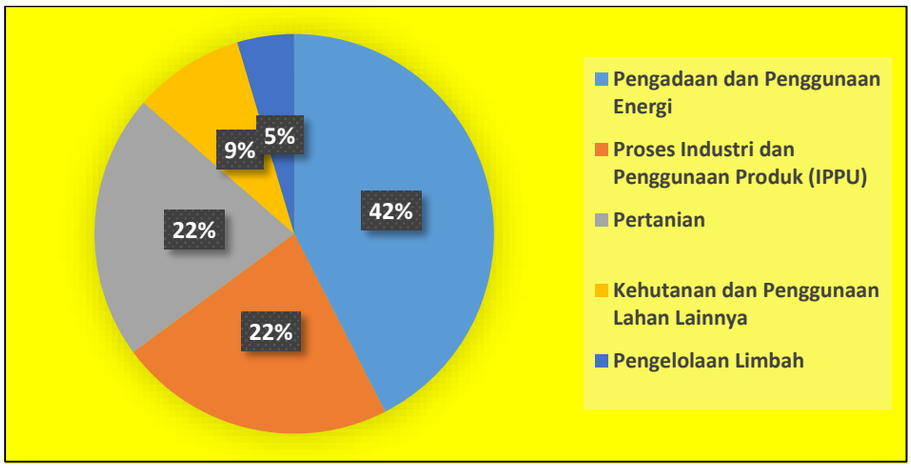

Gambar 2.8
Proporsi Emisi GRK per Sektor Penghasil Emisi di Kabupaten Banyumas Tahun 2019
Sumber : Diolah dari Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020

Status dan kecenderungan emisi GRK Kabupaten Banyumas pada tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Status Emisi GRK di Kab. Banyumas Tahun 2015-2019

No.	SEKTOR	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengadaan dan Penggunaan Energi	3.378,70	3.899,56	4.949,27	4.297,39	1.663,03
2.	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	77,45	836,65	1.051,65	642,71	878,21
3.	Pertanian	699,47	719,81	697,32	772,99	841,28
4.	Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya	-901,71	-67,26	1.639,27	1.794,21	351,66
5.	Pengelolaan Limbah	116,74	131,51	144,91	154,40	180,33
	TOTAL	**3.370,66**	**5.520,27**	**8.482,41**	**7.661,71**	**3.914,51**

Sumber : Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020

Gambaran status emisi tersebut disajikan pada grafik berikut ini.

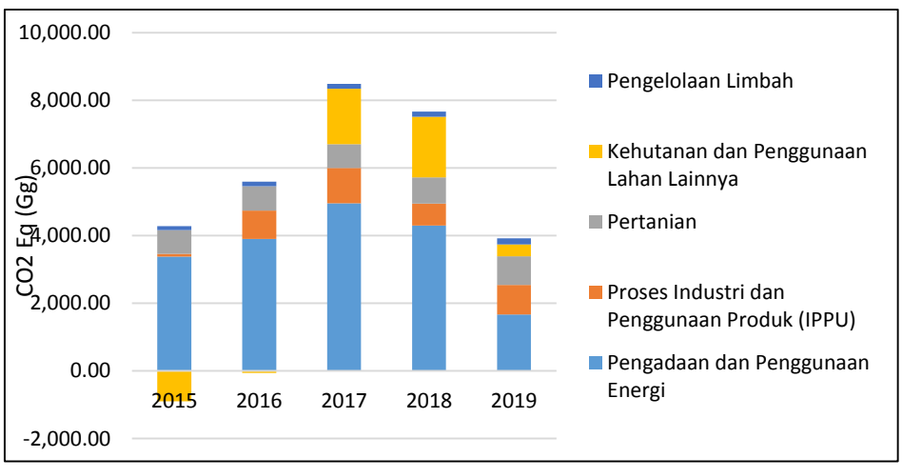

Gambar 2.9
Status Emisi GRK di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Sumber : Diolah dari Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi SIGNSMART, dapat diketahui tren emisi total GRK beserta kecenderungannya sebagaimana disajikan pada grafik sebagai berikut:

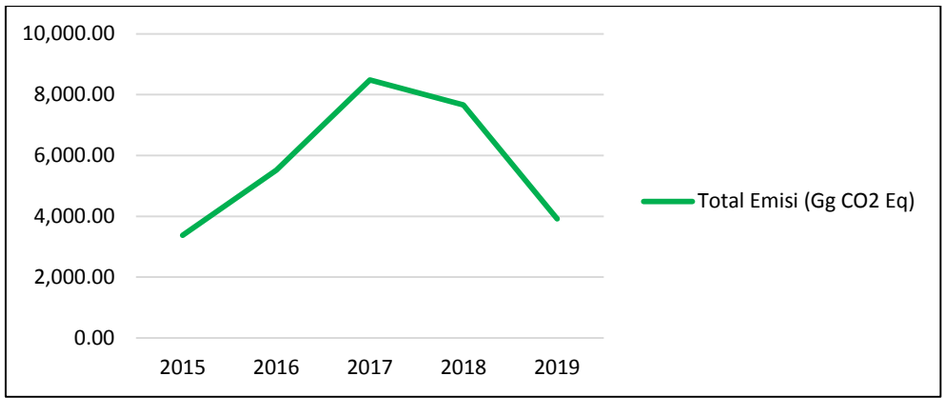

Gambar 2.10
Tren dan Kecenderungan Emisi GRK
di Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019
Sumber : Diolah dari Hasil Perhitungan pada Aplikasi SIGNSMART, 2020

Berdasarkan hasil kalkulasi emisi di Tahun 2020 ini, maka didapatkan hasil bahwa status emisi dan serapan GRK pada Tahun 2019 cenderung menurun jika dibandingkan dengan status emisi dan serapan pada Tahun 2016, 2017, dan 2018, namun demikian cenderung meningkat dibandingkan status emisi dan serapan pada Tahun 2015.

Berdasarkan analisis katagori kunci terhadap sub kategori berdasarkan IPCC 2006, terdapat 9 subkategori emisi yang menjadi kunci utama dan menyumbang hingga 95% dari total emisi GRK, baik pada analisa yang mencakup sektor *Land Use, Land Use Change and Forestry* (LULUCF), maupun analisa yang tidak mencakup sektor LULUCF, dengan 5 subkategori terbesar secara berturut-turut meliputi emisi pada Transportasi, Budidaya Padi, Industri Mineral – Proses Penggunaan Karbonat Lainnya, Industri Mineral – Produksi Semen, dan Industri Manufaktur dan Konstruksi. Penentuan kategori kunci ini diperlukan sebagai pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca.

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2020 sebesar 1.873.196 jiwa yang terdiri dari 945.119 laki-laki dan 928.007 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Cilongok sebanyak 131.753 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 39.840 jiwa.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020

No.	Jenis Kelamin	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2019*	2020*
1.	Laki-laki	824.717	831.816	838 798	845.732	928.093	945.119
2.	Perempuan	825.908	833.209	840 326	847.274	912.059	928.077
3.	Total	1.650.625	1.665.025	1 679 124	1.693.006	1.840.152	1.873.196

No.	Jenis Kelamin	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2019*	2020*
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,89	0,87	0,84	0.83		1,8

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2019-2020
**= berdasarkan data pendaftaran penduduk Dindukcapil Kabupaten Banyumas*

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.873.196 jiwa, maka rata–rata kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah 1.411 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Barat yaitu 7.462 jiwa/km2, dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Lumbir yaitu 525 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur.

Pemusatan penduduk di kawasan perkotaan perlu didukung dengan penyediaan permukiman dengan infrastruktur yang memadai untuk mencegah timbulnya permukiman liar dan permukiman kumuh. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk juga perlu dikendalikan karena keterbatasan daya dukung lingkungan kawasan perkotaan. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Banyumas
Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2
1.	Lumbir	102.66	53.865	525
2.	Wangon	60.78	88.514	1.456
3.	Jatilawang	48.16	72.235	1.500
4.	Rawalo	49.64	56.613	1.140
5.	Kebasen	53.99	70.971	1.315
6.	Kemranjen	60.71	77.188	1.271
7.	Sumpiuh	60.01	61.760	1.029
8.	Tambak	52.03	53.689	1.032
9.	Somagede	40.11	40.022	998
10.	Kalibagor	35.73	59.051	1.653
11.	Banyumas	38.09	56.312	1.478
12.	Patikraja	43.23	62.476	1.445
13.	Purwojati	37.86	39.840	1.052
14.	Ajibarang	66.53	108.407	1.629
15.	Gumelar	93.95	56.847	605
16.	Pekuncen	92.70	80.518	869
17.	Cilongok	105.34	131.753	1.251
18.	Karanglewas	32.48	69.338	2.135
19.	Kedungbanteng	60.22	92.466	1.535
20.	Baturraden	45.53	84.060	1.846
21.	Sumbang	53.42	96.231	1.801
22.	Kembaran	25.92	56.224	2.169
23.	Sokaraja	29.92	64.314	2.150
24.	Purwokerto Selatan	13.75	76.378	5.555
25.	Purwokerto Barat	7.40	55.220	7.462
26.	Purwokerto Timur	8.42	59.410	7.056

No	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2
27.	Purwokerto Utara	9.01	49.494	5.493
	Jumlah	1,327,59	1.873.196	1.411

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas tahun 2020

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah 47,96. Rasio ketergantungan menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung penduduk usia kerja, rasio ketergantungan 47,96 menggambarkan bahwa 2 orang pekerja (penduduk usia produktif) menanggung 1 orang anak/lansia (penduduk non produktif).

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki - Laki	Perempuan		
0-4	65.205	60.370	125.575	108,01
5–9	73.409	69.218	142.627	106,05
10–14	75.917	70.198	146.115	108,15
15-19	72.106	67.763	139.869	106,41
20-24	71.836	67.810	139.646	105,94
25-29	69.037	64.717	133.754	106,68
30-34	64.921	62.488	127.409	103,89
35-39	71.939	70.497	142.436	102,05
40-44	69.032	69.178	138.210	99,79
45-49	65.037	67.429	132.466	96,45
50-54	57.098	60.177	117.275	94,88
55-59	50.737	54.802	105.539	92,58
60-64	43.422	45.964	89.386	94,47
65-69	34.673	32.791	67.464	105,74
70-74	22.805	23.917	46.722	95,35
75+	37.945	40.758	78.703	93,10
Jumlah	945.119	928.077	1.873.196	101,84
0-14	214.531	199.786	414.317	107,38
15-64	635.165	630.825	1.265.990	100,69
65+	95.423	97.466	192.889	97,90
Angka Ketergantungan (%)			47,96	

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Dengan rasio ketergantungan yang terus menurun Kabupaten Banyumas akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah dampak transisi demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja. Suatu wilayah mengalami bonus demografi jika penduduk usia produktifnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Bonus demografi akan menjadi peluang bagi pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan daya saing bangsa, berkembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan negara.

Untuk dapat memanfaatkan peluang bonus demografi 4 prasyarat harus dipenuhi yaitu: penduduk harus berkualitas, penduduk produktif terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan di tingkat rumahtangga, dan meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan lapangan kerja, dan kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai tahun 2030.

Untuk melihat lebih rinci gambaran jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dapat dilihat pada piramida berikut:

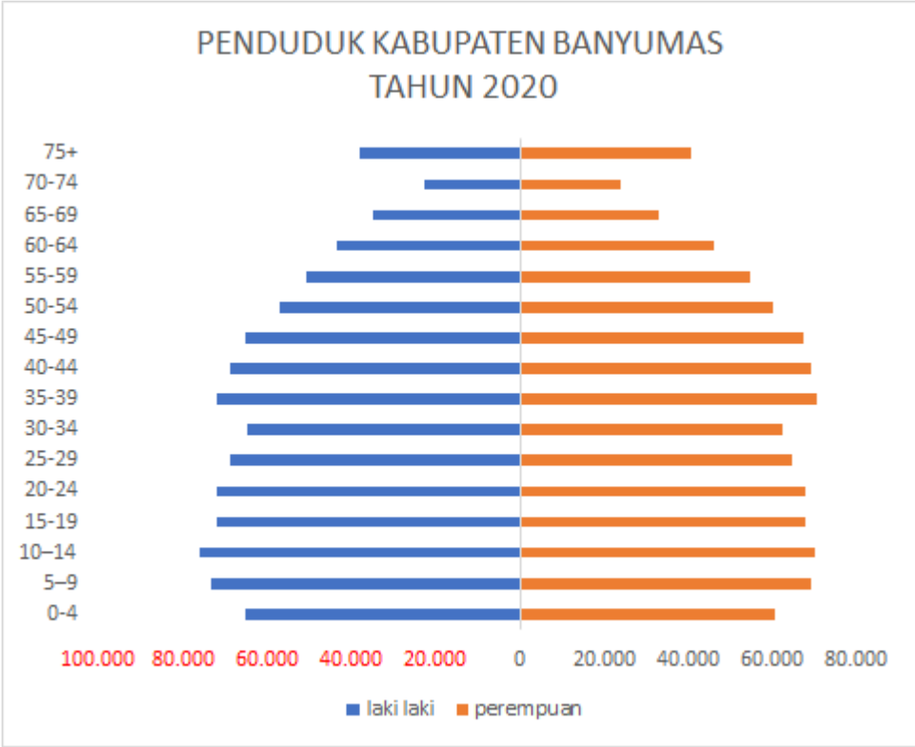

Gambar 2.11
Piramida Penduduk Kabpaten Banyumas Tahun 2020
Sumber : Dindukcapil Kabupaten Banyumas

Piramida di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk pada usia produktif antara 15–65 tahun cukup banyak bila dibandingkan usia tidak produktif yaitu usia 0-4 tahun ditambah dengan usia 65 tahun ke atas. Apabila penduduk produktif yang semakin banyak di banding jumlah yang tidak produktif maka Kabupaten Banyumas akan mengalami bonus demografi.

Untuk melihat gambaran jumlah penduduk dalam pekerjaan utamanya dan jenis kelamin pada tahun 2020 dapat dilihat pada diagram berikut:

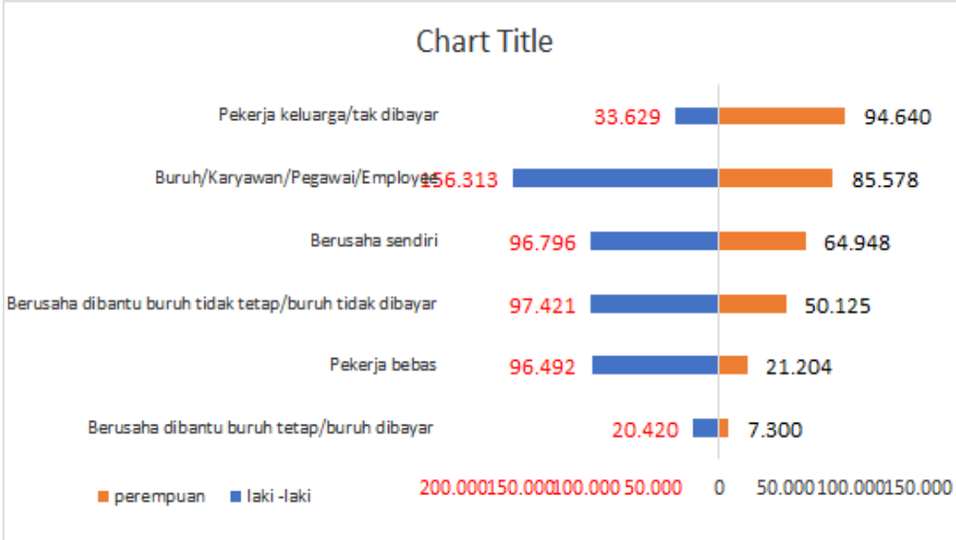

Gambar 2.12
Jumlah Penduduk Dalam Pekerjaan Utamanya dan Jenis Kelamin Tahun 2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Berdasarkan gambar tersebut lapangan pekerjaan di Kabupaten Banyumas masih didominasi penduduk laki-laki dari pada perempuan, dengan perbandingan sekitar 65% pekerja laki-laki dan 35% pekerja perempuan dari penduduk yang bekerja. Jika dikaitkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Banyumas sebesar 65%, pekerja perempuan hanya mendominasi untuk jenis perkerajaan utama yang lebih dikerjakan oleh perempuan yaitu pada pekerjaan keluarga/tak dibayar.

Untuk melihat gambaran jumlah penduduk dalam pekerjaan dengan pendidikan tertinggi dapat dilihat pada diagram berikut:

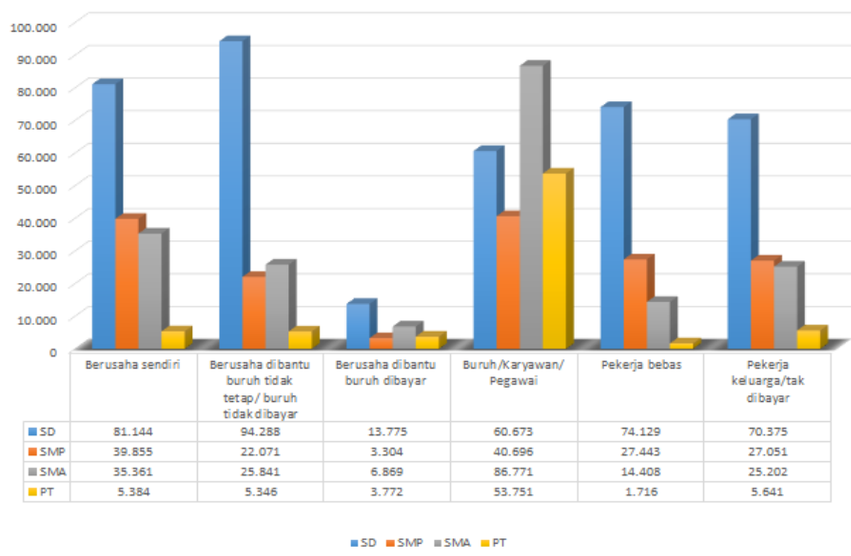

	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh dibayar	Buruh/Karyawan/ Pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga/tak dibayar
SD	81.144	94.288	13.775	60.673	74.129	70.375
SMP	39.855	22.071	3.304	40.696	27.443	27.051
SMA	35.361	25.841	6.869	86.771	14.408	25.202
PT	5.384	5.346	3.772	53.751	1.716	5.641

Gambar 2.13
Diagram Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Banyumas, 2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yang bekerja didominasi penduduk dengan tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD). Untuk lapangan pekerjaan yang dapat menampung tenaga kerja dengan jenjang pendidikan SMA adalah status pekerjaan sebagai Buruh/karyawan/pegawai.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun terjadinya pandemi COVID-19 telah berdampak pada penurunan kesejateraan masyarakat. Beberapa indikator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi antara lain pertumbuhan ekonomi yang menurun, serta peningkatan penduduk miskin dan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2015-2019 fluktuatif dengan trend lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Selama kurun waktu tersebut, capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah 6,45% tahun 2018 sementara terendah adalah 6,05% tahun 2016. Sedangkan di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Provinsi maupun Banyumas sendiri mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19 dengan capaian masing-masing sebesar -2,07% untuk Nasional, -2,65% Jawa Tengah dan –1,65% untuk Banyumas.

Kemiskinan di Kabupaten Banyumas cenderung menurun dalam dalam periode waktu 2015-2019. Pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya penduduk miskin dari 12,53% pada tahun 2019 menjadi 13,26% pada tahun 2020. Angka pengangguran juga meningkat, dari 4,17 pada tahun 2019 menjadi 6% pada tahun 2020.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,65%. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

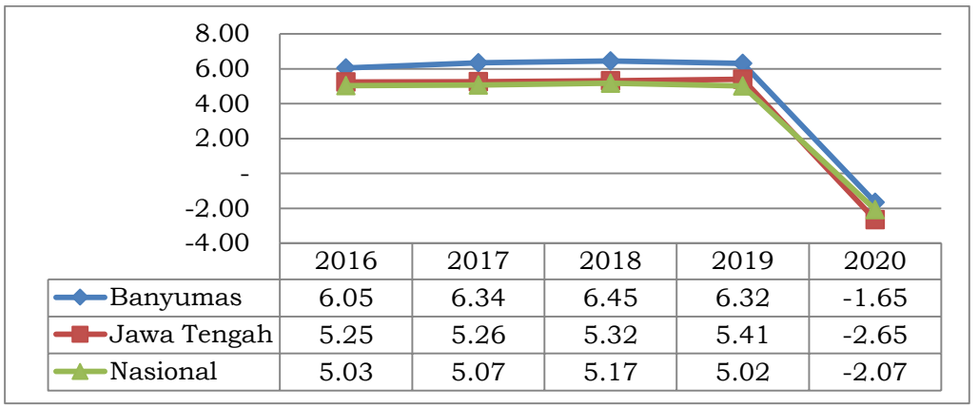

	2016	2017	2018	2019	2020
Banyumas	6.05	6.34	6.45	6.32	-1.65
Jawa Tengah	5.25	5.26	5.32	5.41	-2.65
Nasional	5.03	5.07	5.17	5.02	-2.07

Gambar 2.14
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas selama 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pandemi COVID-19 Tahun 2020 telah mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas. Meskipun belum tersedia data publikasi resmi, PDRB Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dengan melambatnya kegiatan ekonomi sebagai dampak pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Harga Berlaku Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	4.249,22	4.383,85	4.514,24	4.528,29	4.596,45
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	1.701,02	1.778,43	1.854,41	1.916,34	1.874,04
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	7.580,82	7.969,58	8.477,60	9.155,02	9.150,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	35,87	37,44	39,96	42,03	43,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	28,40	31,40	33,10	34,48	35,91
F	Konstruksi/ Construction	4.160,01	4.569,34	4.963,73	5.177,00	4.984,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5.502,26	5.754,68	6.170,05	6.670,47	6.423,63
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	1.280,50	1.360,43	1.448,39	1.563,88	1.065,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1.163,81	1.264,32	1.334,79	1.438,32	1.336,53
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1.955,85	2.250,92	2.464,76	2.754,12	3.134.35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance	1.015,91	1.071,35	1.114,07	1.161,89	1.180,39

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Activities					
L	Real Estate/ Real Estate Activities	812,54	880,34	929,39	980,32	976,69
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	96,14	103,37	112,04	123,34	116,85
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1.026,71	1.051,21	1.086,57	1.126,12	1.111,05
P	Jasa Pendidikan/ Education	1.536,36	1.651,94	1.791,43	1.936,53	1.931,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	308,79	336,29	368,29	395,10	426,04
R,S, T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	596,81	652,43	711,67	776,07	733,88
PDRB		**33.051,05**	**35.147,31**	**37.414,50**	**39.779,32**	**39.121,62**

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	5.794,07	5.993,76	6.351,39	6.470,10	6.681,39
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	2.351,20	2.533,40	2.854,73	2.983,61	2.990,22
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	10.285,88	11.084,84	12.143,97	13.301,27	13.618,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	37,92	42,80	47,24	49,74	50,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	31,52	35,07	37,16	39,37	43,32
F	Konstruksi/ Construction	5.212,69	5.844,85	6.613,48	7.123,21	6.883,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6.489,92	6.924,28	7.601,53	8.398,41	8.178,31
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	1.506,97	1.621,05	1.743,30	1.922,95	1.344,47

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1.403,71	1.540,44	1.645,17	1.795,06	1.671,23
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1.769,83	2.127,32	2.329,85	2.638,37	3.005,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1.370,84	1.507,59	1.609,03	1.700,08	1.731,55
L	Real Estate/ Real Estate Activities	918,74	1.015,79	1.094,93	1.176,50	1.180,17
M, N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	125,24	139,48	154,80	175,03	169,60
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1.379,67	1.453,27	1.527,19	1.609,66	1.609,99
P	Jasa Pendidikan/ Education	2.200,31	2.461,07	2.750,60	3.043,17	2.988,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	405,42	448,15	496,95	541,67	596,59
R,S, T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	733,00	812,82	894,81	980,66	938,33
PDRB		**42.016,94**	**45.585,98**	**49.896,13**	**53.948,86**	**53.681,12**

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Struktur ekonomi Kabupaten Banyumas tidak lagi didominasi oleh pertanian. Kontribusi lapangan usaha pertanian terus menurun mekipun masih dapat tumbuh. Pada masa pandemi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mampu bertahan dan tetap tumbuh untuk berkontribusi pada perekonomian daerah. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu sebesar 13,81 persen, dan pertumbuhan terendah ada pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar minus 31,84 persen.

Pertumbuhan PDRB secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		ADHK (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,85	3,17	2,97	0,31	1,51
B	Pertambangan dan Penggalian	4,06	4,55	4,27	3,34	-2,21
C	Industri Pengolahan	5,40	5,13	6,37	7,99	-0,05
D	Pengadaan Listrik & Gas	7,16	4,36	6,76	5,16	2,55
E	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan	2,08	10,54	5,43	4,17	4,15

Lapangan Usaha		ADHK (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Daur Ulang					
F	Konstruksi	11,26	9,84	8,63	4,30	-3,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,66	4,59	7,22	8,11	-3,70
H	Transportasi dan Pergudangan	5,97	6,24	6,47	7,97	-31,84
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,38	8,64	5,57	7,76	-7,08
J	Informasi dan Komunikasi	9,25	15,09	9,50	11,74	13,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,38	5,46	3,99	4,29	1,59
L	Real Estate	6,50	8,34	5,57	5,48	-0,37
M,N	Jasa Perusahaan	7,04	7,52	8,39	10,08	-5,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	1,34	2,39	3,36	3,64	-1,34
P	Jasa Pendidikan	5,82	7,52	8,44	8,10	-0,26
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	8,82	8,90	9,51	7,28	7,83
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,47	9,32	9,08	9,05	-5,44
PDRB		**6,05**	**6,34**	**6,45**	**6,32**	**-1,65**

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Selama tiga tahun terakhir lapangan usaha-lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Banyumas adalah lapangan usaha industri pengolahan, kemudian diikuti oleh lapangan usaha perdagangan, dan lapangan usaha konstruksi.

Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016-2020 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		ADHB (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,79	13,15	12,73	11,99	12,45
B	Pertambangan dan Penggalian	5,60	5,56	5,72	5,53	5,57
C	Industri Pengolahan	24,48	24,32	24,34	24,66	25,37
D	Pengadaan Listrik & Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
F	Konstruksi	12,41	12,82	13,25	13,20	12,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,45	15,19	15,28	15,57	15,23
H	Transportasi dan Pergudangan	3,59	3,56	3,49	3,56	2,50
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,34	3,38	3,30	3,33	3,11
J	Informasi dan Komunikasi	4,21	4,67	4,66	4,89	5,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	3,31	3,22	3,15	3,23
L	Real Estate	2,19	2,23	2,19	2,18	2,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,28	3,19	3,06	2,98	3,00
P	Jasa Pendidikan	5,24	5,40	5,51	5,64	5,57
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,96	0,98	1,00	1,00	1,11
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1,74	1,78	1,79	1,82	1,75
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Ditinjau dari aspek pengeluaran, PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2020 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yakni sebesar 66,82%, sedangkan pembentukan modal tetap bruto hanya

sebesar 36,44%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga selama kurun waktu lima tahun mengalami fluktuasi dari sebesar 70,48% tahun 2016 menurun terus sampai tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 66,82% di tahun 2020. Secara rinci data kontribusi PDRB Kabupaten Banyumas menurut pengeluaran selama kurun waktu lima tahun yakni mulai tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2016–2020

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (%)	70,48	69,44	67,66	66,72	66,82
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT (%)	1,16	1,16	1,16	1,20	1,20
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (%)	9,51	9,28	8,90	8,49	8,14
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	38,19	38,00	38,48	38,57	36,44
5	Perubahan Inventori (%)	0,24	0,32	0,38	0,33	0,32
6	Net Ekspor	-9,59	-8,20	-6,57	-5,32	-12,91
	PDRB Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2021

Besarnya pendapatan rata-rata penduduk atau PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas tahun 2020 menurun karena terdampak COVID-19. PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas tahun 2020 menurun dibandingkam tahun-tahun sebelumnya yang selalu mengalami peningkatan.

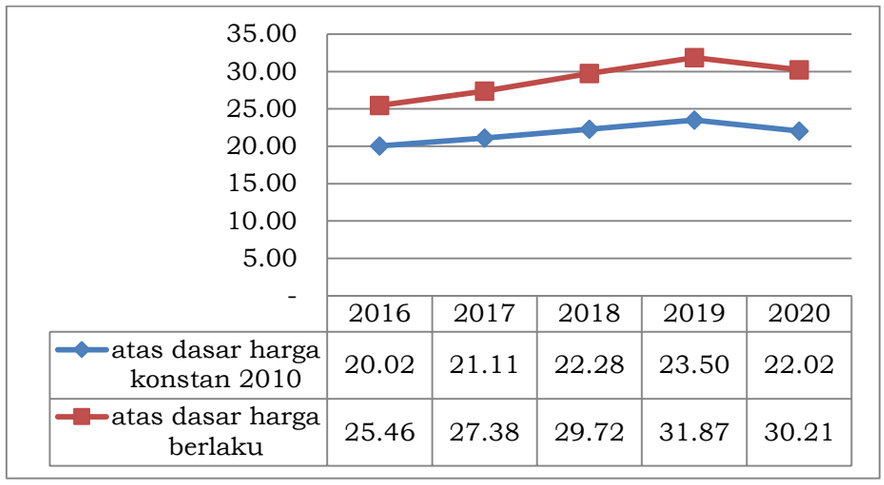

Gambar 2.15
PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 (juta rupiah)
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2017-2021

Seperti terlihat pada grafik dibawah ini, terlihat bahwa PDRB Perkapita Banyumas tahun 2020 sebesar 30,21 Juta Rupiah dan merupakan Kabupaten tertinggi kedua setelah Cilacap yang sebesar 54,01 Juta Rupiah dan jika dibandingkan dengan Jawa Tengah masih dibawah PDRB Perkapita Jawa Tengah yang sebesar 46,20 Juta Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Banyumas rata-rata berpendapatan 30,21 Juta Rupiah setahun dan masih merupakan Kabupaten dengan perkembangan perekonomian yang masih menjanjikan.

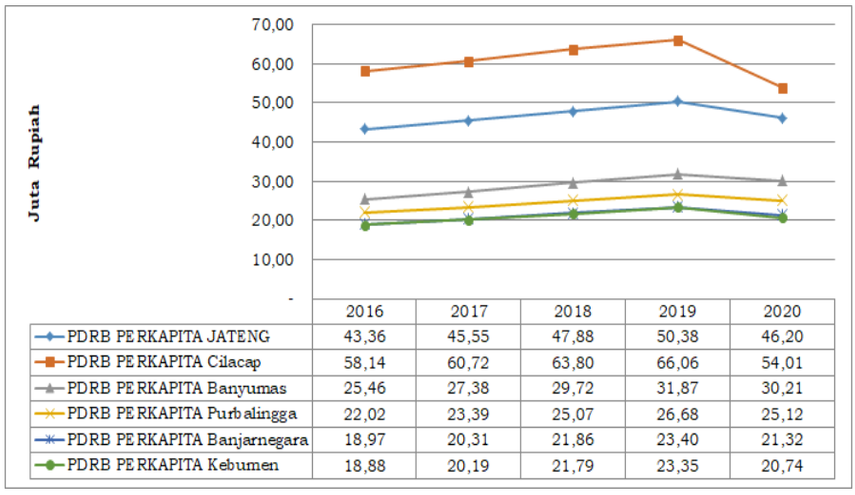

Gambar 2.16
PDRB per Kapita Jateng dan Kabupaten Barlingmascakeb
(juta rupiah)
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2017-2021

2.2.1.2 Inflasi

Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Laju inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukan perkembangan yang fluktuatif dengan trend mengalami penurunan dan searah dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara umum inflasi di Kabupaten Banyumas terkendali, barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat cukup tersedia dan terdistribusi dengan baik sehingga tidak terjadi gejolak harga yang signifikan mendorong inflasi yang tinggi.

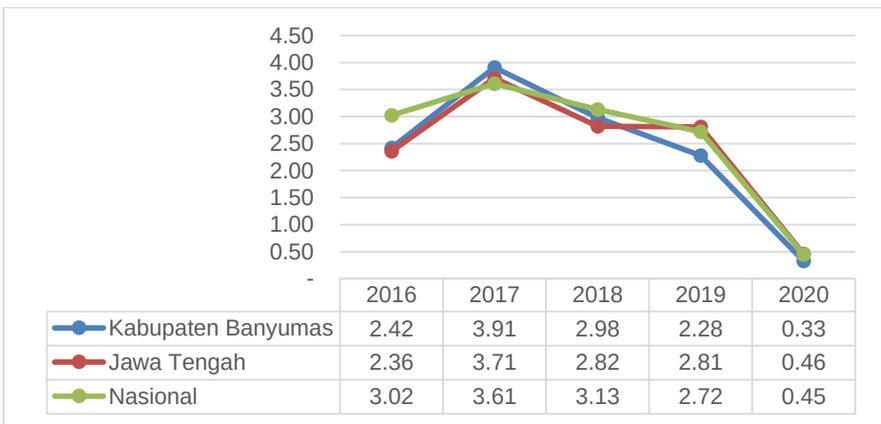

Gambar 2.17
Inflasi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
dan Nasional (%) Tahun 2016–2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2016-2020

Selama Januari-Juni 2020 inflasi di Kabupaten Banyumas relatif rendah, bahkan sempat mengalami delfasi sebesar -0,08% pada bulan April. Rendahnya inflasi dikuatirkan disebabkan karena merosotnya daya beli masyarakat sebagai dampak Pandemi COVID-19. Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan berbagai bentuk bantuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar perekonomian bergerak kembali.

2.2.1.3 Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin

Pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016–2020 telah mengalami penurunan meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020 meningkat sebesar 5,83% dari 12,53% pada tahun 2019 menjadi 13,26% pada tahun 2020. Perbandingan prosentase penduduk miskin kabupaten Banyumas dengan Kabupaten sekitar pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

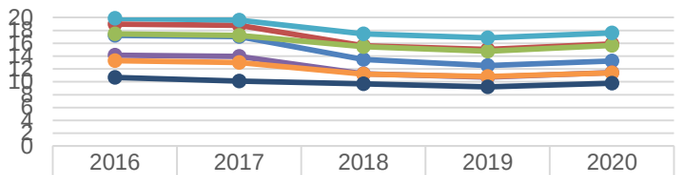

	2016	2017	2018	2019	2020
Banyumas	17.23	17.05	13.50	12.53	13.26
Purbalingga	18.98	18.80	15.62	15.03	15.90
Banjarnegara	17.46	17.21	15.46	14.76	15.64
Cilacap	14.12	13.94	11.25	10.73	11.46
Kebumen	19.86	19.60	17.47	16.82	17.59
Jawa Tengah	13.27	13.01	11.19	10.80	11.41
Nasional	10.70	10.12	9.66	9.22	9.78

Gambar 2.18
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Dalam periode 2016-2018 capaian indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas memenuhi target yang ditentukan dalam perencanaan daerah, sedangkan pada tahun 2019 hanya memenuhi 99,84% dari target. Dengan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 pemerintah dan pemerintah daerah mengubah target indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 dari 11,53% menjadi 12,53%.

Capaian indikator persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan target daerah pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

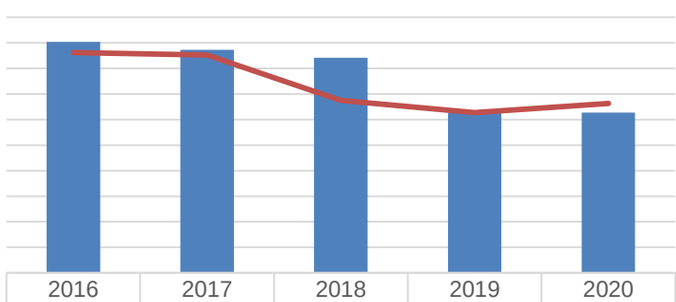

	2016	2017	2018	2019	2020
Target	18.06	17.45	16.84	12.51	12.53
Realisasi	17.23	17.05	13.50	12.53	13.26

Gambar 2.19
Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Jumlah Penduduk Miskin

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 jumlah penduduk miskin pada di Kabupaten Banyumas berfluktuasi, dengan kecenderungan menurun, sebagaimana gambar di bawah ini:

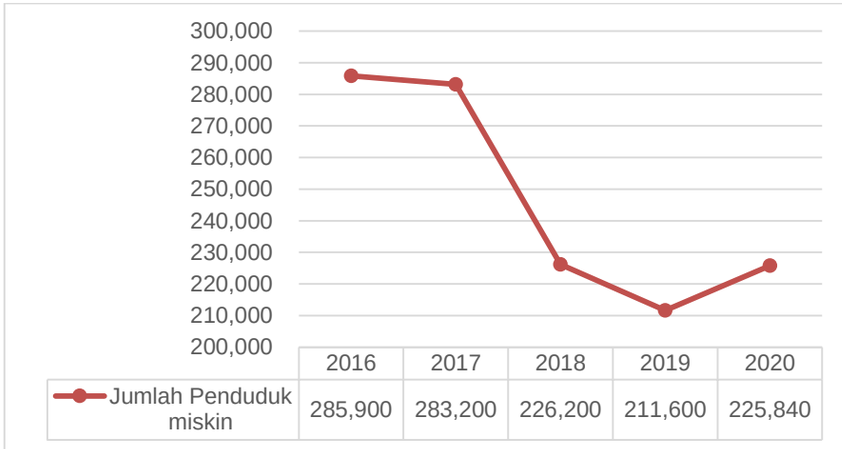

Gambar 2.20
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas tahun 2020 menempati peringkat ke-2 terendah dari 5 kabupaten. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin bertambah 14.190 jiwa dari 211.650 pada tahun 2019 menjadi 225.840 pada tahun 2020. Perbandingan persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan kabupaten sekitar pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020

	Cilacap	Banyumas	Purbalingga	Banjarnegara	Kebumen
Jumlah Penduduk Miskin	198.600	225.840	149.480	144.950	211.090
Persentase Penduduk Miskin	11.46	13.26	15.90	15.64	17.59

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Indek Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index–P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan semakin besar kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

Pada periode 2016-2020, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banyumas fluktuatif. Capaian indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2020 merupakan angka terendah. Dengan masih tingginya indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Banyumas masih cukup jauh untuk mendekati garis kemiskinan, agar dapat keluar dari garis kemiskinan.

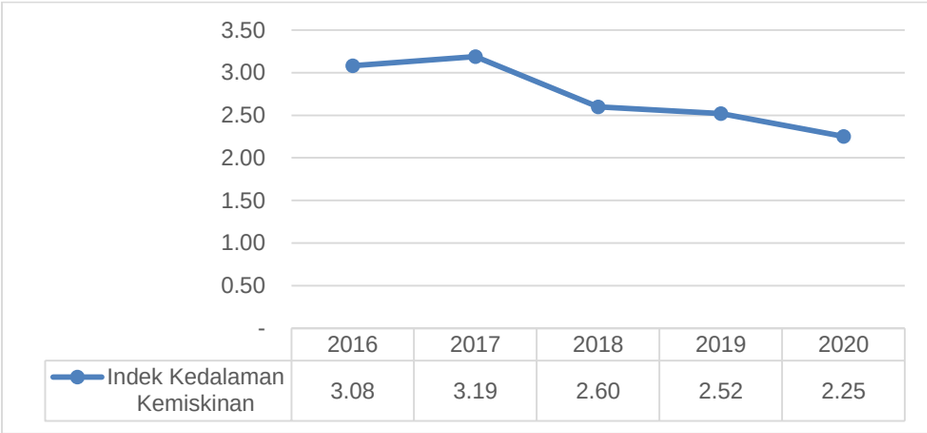

Gambar 2.21
Indek Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016–2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Indek Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan Kemiskinan *(Poverty Severity Index–P2)* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Artinya semakin tinggi nilai indeks, maka semakin lebar kesenjangan pendapatan di antara penduduk miskin itu sendiri.

Perkembangan indek keparahan kemiskinan Kabupaten Banyumas pada periode 2016-2020 fluktuatif. Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 merupakan angka tertinggi selama kurun waktu 2016-2020. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Banyumas dalam lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada grafik berikut ini:

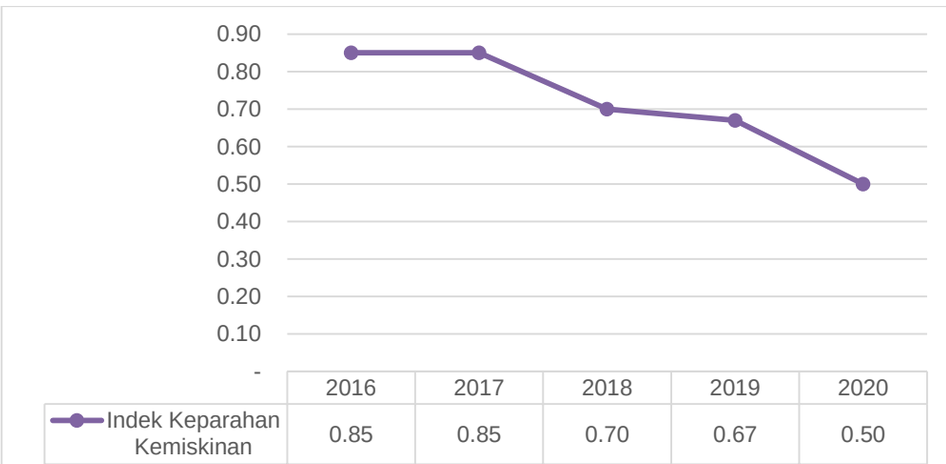

Gambar 2.22
Indek Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen, yaitu angka harapan hidup, yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia 2020, BPS, Desember 2020 dari tiga aspek pembangunan manusia kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan, namun dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 71,96 mengalami peningkatan sebesar 0,03 menjadi 71,98 pada tahun 2020. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori tinggi, dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Menurut UNDP, tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah (0 ≤ IPM < 60), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) dan kategori sangat tinggi (80 ≤ IPM ≤ 100).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 sebesar 71,96 mengalami peningkatan sebesar 0,03 menjadi 71,98 pada tahun 2020, termasuk dalam kategori tinggi, dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini berdasarkan kategori United Nations Development Programme (UNDP) yang mengelompokan tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah (0 ≤ IPM < 60), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) dan kategori sangat tinggi (80 ≤ IPM ≤ 100).

Tabel di bawah ini menunjukan IPM Kabupaten Banyumas dan kabupaten sekitarnya, Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020.

Tabel 2.19
IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya
Tahun 2016-2020

Kabupaten	Tahun					Pertumbuhan IPM				
	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018 2019	2019-2020
Cilacap	68,60	68,90	69,56	69,98	69,95	1,18	0,44	0,96	0,60	-0,04
Banyumas	70,50	70,75	71,30	71,96	71,98	0,86	0,35	0,78	0,92	0,03
Purbalingga	67,50	67,72	68,41	68,99	68,97	0,75	0,33	1,02	0,85	-0,03
Banjarnegara	65,50	65,86	66,54	67,34	67,45	1,24	0,55	1,03	1,20	0,16
Kebumen	67,40	68,29	68,8	69,60	69,81	0,75	1,32	0,75	1,16	0,03
Jawa Tengah	69,90	70,52	71,12	71,73	71,87	0,58	0,89	0,85	0,86	0,20

Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71.94	0,91	0,90	0,82	0,74	0,03

Sumber: BPS, 2020

Lebih rinci komponen IPM Kabupaten Banyumas tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Komponen IPM Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020 dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitar

Wilayah	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata-rata lama seklolah (Tahun)		Pengeluaran Disesuaikan (000)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Cilacap	73,52	73,73	12,49	12,50	6,93	6,97	10 .639	10. 440
Banyumas	73,55	73,72	12,82	12,85	7,42	7,52	11 .703	11. 448
Purbalingga	73,02	73,14	11,98	11,99	7,14	7,24	10 .131	9 .914
Banjarnegara	74,01	74,18	11,45	11,46	6,50	6,74	9 .547	9 .263
Kebumen	73,22	73,40	13,04	13,34	7,53	7,54	9. 066	8. 901
Jawa Tengah	74,23	74,37	12,68	12,70	7,53	7,69	11.102	10 .930
Nasional	71,34	71,47	12,95	12,98	8,34	8,48	11.299	11.013

Sumber: BPS, 2020

Dilihat dari komponen IPM Kabupaten Banyumas tahun 2020 pada komponen kesehatan, pendidikan mengalami peningkatan yang cukup baik namun pada komponen ekonomi (pengeluaran perkapita yang disusuaikan) mengalami penurunan dikarenakan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pengeluaran per kapita dan paritas daya beli masyarakat.

2.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka harapan lama sekolah *(Expected Years of Schooling*) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,85 tahun lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Jawa Tengah, namun lebih rendah dari capaian nasional. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

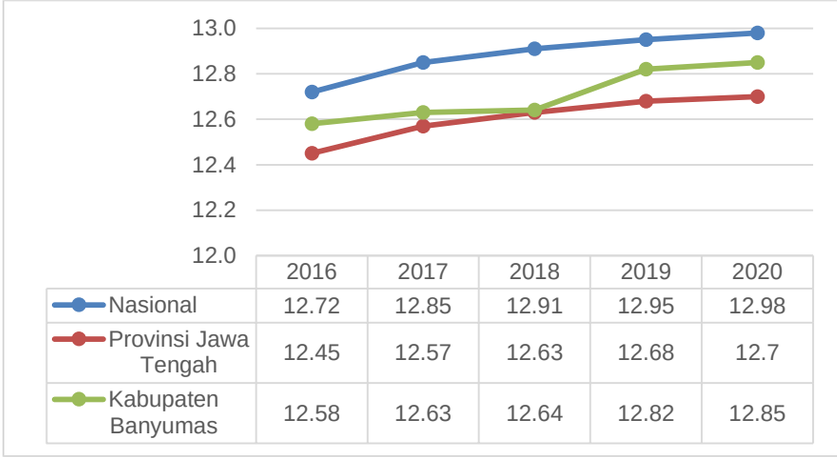

	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	12.72	12.85	12.91	12.95	12.98
Provinsi Jawa Tengah	12.45	12.57	12.63	12.68	12.7
Kabupaten Banyumas	12.58	12.63	12.64	12.82	12.85

Gambar 2.23
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kab. Banyumas
Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, 2020

2.2.2.3 Rata-rata Lama Sekolah

Selain angka harapan lama sekolah, indikator pendidikan yang digunakan untuk penghitungan IPM ialah rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/MYS). Indikator ini memberikan gambaran tentang rata- rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang digunakan UNDP dalam menghitung MYS dibatasi pada penduduk berusia 25 tahun ke atas. Batasan itu dimaksudkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga kurang tepat apabila dihitung MYS-nya.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal atau rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Batasan ini dimaksudkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah hingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yaitu 7,52 tahun lebih rendah dibanding rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah dan nasional pada tahun yang sama yaitu 7,69 untuk Provinsi Jawa Tengah dan nasional mencapai 8.48 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

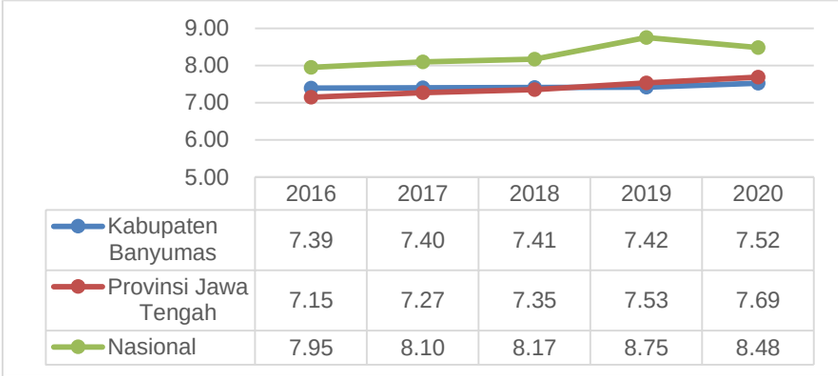

	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Banyumas	7.39	7.40	7.41	7.42	7.52
Provinsi Jawa Tengah	7.15	7.27	7.35	7.53	7.69
Nasional	7.95	8.10	8.17	8.75	8.48

Gambar 2.24
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, 2020

Rata-rata lama sekolah memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia, dengan asumsi bahwa semakin lama sekolah akan semakin banyak pengetahuan dan ketrampilan hidup yag dipelajari sehingga lebih bisa diterima di dunia kerja. Hal ini menjadi tantangan dan perhatian Pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, bidang tenaga kerja dan atau bidang lainnya untuk dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan penduduk di luar pendidikan formal, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Banyumas.

2.2.2.4 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup pada waktu lahir (Expectation of Life/Eo) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyumas 2020 usia harapan hidup di Kabupaten Banyumas adalah 73,72 tahun, dengan angka harapan hidup perempuan 75,55 tahun lebih tinggi dibanding laki-laki 71,80 tahun. Semakin tinggi usia harapan hidup mengindikasikan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

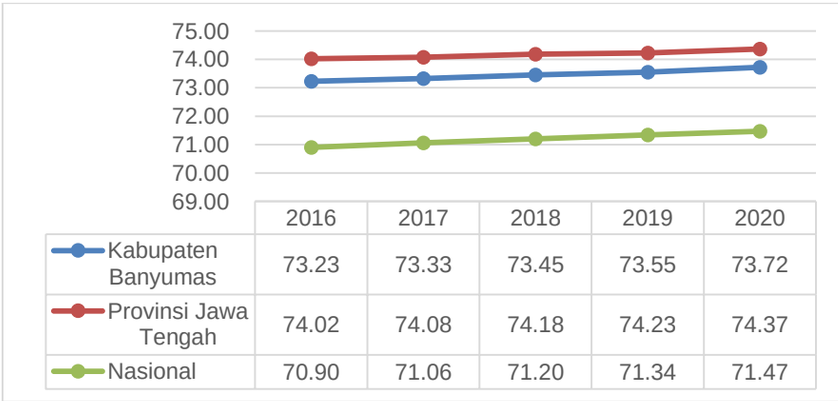

	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Banyumas	73.23	73.33	73.45	73.55	73.72
Provinsi Jawa Tengah	74.02	74.08	74.18	74.23	74.37
Nasional	70.90	71.06	71.20	71.34	71.47

Gambar 2.25
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, 2020

2.2.2.5 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non-makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan makin meningkat pula. Tetapi hubungan ini tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari tingkat kenaikan harga secara umum.

Besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Banyumas telah terjadi peningkatan selama periode 2016-2019, namun menurun di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM sangat sensitif sekali terhadap perubahan ekonomi yang sangat drastis, lain halnya dengan indikator pendidikan dan kesehatan yang dampaknya akan terlihat pada beberapa tahun berikutnya yakni sekitar 3 atau 4 tahun berikutnya. Jadi peningkatan paritas daya beli tersebut seiring dengan perbaikan ekonomi Kabupaten Banyumas yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita. Dengan turunya Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Banyumas tahun 2020 mempengaruhi pula penurunan pendapatan perkapita.

Adapun pengeluaran per kapita disesuakan pada kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

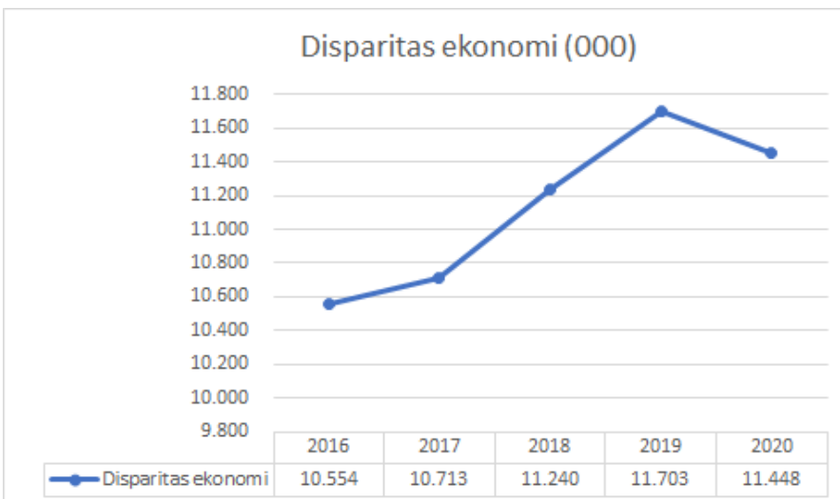

Gambar 2.26
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

2.2.2.6 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diawali dari lingkup keluarga melalui fase kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kecukupan asupan gizi, kesadaran dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran diri dalam deteksi dini penyakit.

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas yang dipengaruhi oleh status gizi ibu keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik menjelang kehamilan kejadian bebagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal daan obstetri. Terjadinya angka kematian ibu menujukan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri yang rendah pula.

Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2020 kembali naik menjadi 41,5 (11 kasus) dari sebesar 37,6 (10 kasus) pada tahun 2019. Upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's. Angka kematian ibu di Kabupaten Banyumas tahun 2016 s.d. 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

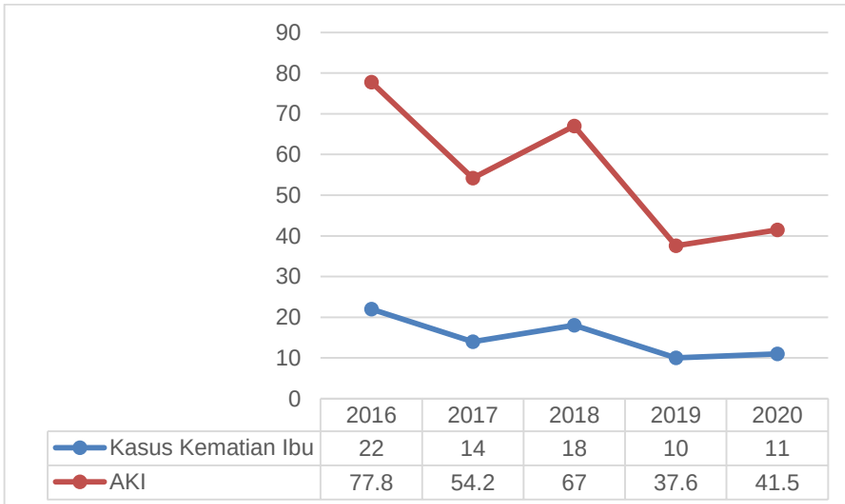

	2016	2017	2018	2019	2020
Kasus Kematian Ibu	22	14	18	10	11
AKI	77.8	54.2	67	37.6	41.5

Gambar 2.27
Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Kematian ibu juga dipengaruhi baik oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik (90 %) yang dikenal dengan Trias Klasik seperti perdarahan, infeksi dan preeklamsi, atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran dan selama nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan pemeriksaan ibu hamil (Ante Natal Care), pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga

kesehatan yang kompeten serta pelayanan nifas, dengan melalui beberapa pendekatan yaitu:

Pendekatan infrastruktur: pembangunan infra struktur kesehatan (Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes.); pembangunan infrastruktur jalan akses kesehatan; pembangunan infrastruktur pemukiman (Sanitasi: jambanisasi, air bersih, penataan lingkungan kumuh: Rumah Layak Huni).
Pendekatan sosial: pembinaan poyandu, pembinaan upaya kesehatan kerja, pembinaan desa siaga, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, pembina dan pemberdayaan kelompok masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat.
Pendekatan ekonomi: penyaluran hibah uang dana bergulir, program desa mandiri pangan, pembinaan UMKM, pembinaan produksi pangan rumah tangga.

2.2.2.7 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan gambaran kurangnya asupan gizi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki. Angka kematian bayi di Kabupaten Banyumas dalam periode tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Kondisi AKB di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21
Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kematian Bayi	
		Kasus	Per 1.000 kh
1	2016	239	8,4
2	2017	218	8,4
3	2018	208	7,2
4	2019	197	7,4
5	2020	187	7,06

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Untuk Penanganan Angka Kematian ibu pelaksnaannya lebih pada Kesehatan ibu hamil dimana terdapat pada SPM Kesehatan yaitu Pelayanan Kesehatan ibu hamil yang didukung dengan beberapa indicator seperti: Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan pelayanan balita sesuai standar, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan kunjugan ibu hamil K4, Cakupan pelayanan nifas, Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan pelayanan anak balita, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pelayanan ibu hamil K1, Angka Kematian Neonatal, Angka Kelangsungan Hidup bayi, Angka Kematian Bayi, dan Angka kematian balita.

Untuk melihat indikator capaian SPM Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sampai dengan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.22
Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018

No.	Indikator SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	-	-	-	96.16
4	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100	100	100	100	100
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	100	100	100
7	Cakupan kunjungan bayi	100	100	100	100	100
8	Cakupan kunjugan ibu hamil K4	100	100	100	100	100
9	Cakupan pelayanan nifas	100	100	100	100	100
10	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	100	100	100
11	Cakupan pelayanan anak balita	100	100	100	100	100
12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100	100	100
13	Cakupan pelayanan ibu hamil K1	100	100	100	100	100
14	Angka Kematian Neonatal	5,2	5,84	5,46	4,14	6,42
15	Angka Kelangsungan Hidup bayi	991,6	991,6	992,8	992,6	992,9
16	Angka Kematian Bayi	8,4	8,4	7,2	7,4	7,06
17	Angka kematian balita	10,16	8,97	8,94	9,17	8,95

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Capaian SPM Kesehatan pada pelayanan kesehatan ibu hamil sampai dengan tahun 2020 sudah cukup bagus dan untuk tetap meningkatkan kinerja pelayanan ini, pemerintah kabupaten banyumas tetap mendukung dalam perencanaan jangka menengah pada program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selama kurun waktu lima tahun terakhir TPT Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif yaitu sebesar 6% pada tahun 2020 naik dari sebelumnya 4,21% pada tahun 2019, dengan kecenderungan lebih rendah dibanding TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,48% dan nasional sebesar 7,07%. Semakin rendah TPT semakin baik, yang berarti menunjukkan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional digambarkan sebagai berikut:

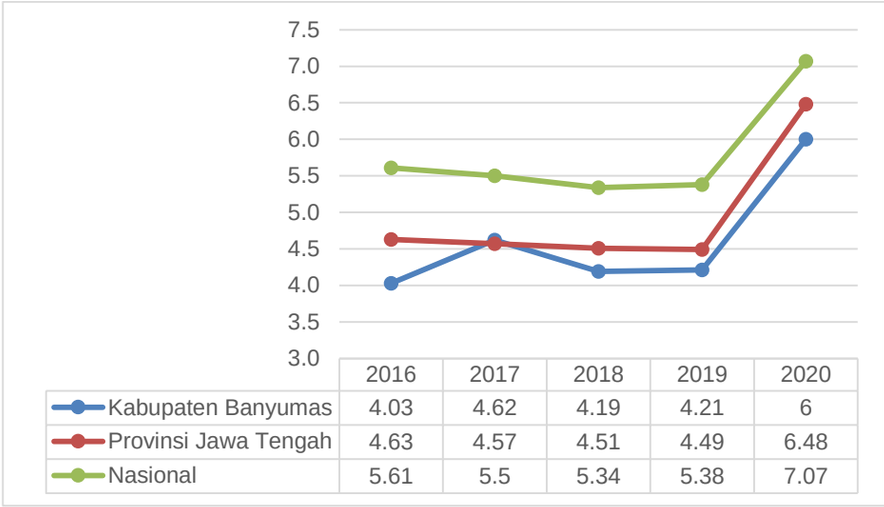

	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Banyumas	4.03	4.62	4.19	4.21	6
Provinsi Jawa Tengah	4.63	4.57	4.51	4.49	6.48
Nasional	5.61	5.5	5.34	5.38	7.07

Gambar 2.28
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)
Sumber : BPS, 2021

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Untuk menekan tingkat pengangguran tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengupayakan penciptaan berbagai lapangan kerja, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Untuk memperluas lapangan kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya mengembangkan kawasan industri. Beberapa kajian dan regulasi telah disusun untuk mendukung terwujudnya kawasan industri di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (2011-2031) yang masih berlaku hingga saat ini terdapat total luas kawasan peruntukan industri (KPI) kurang lebih 500 Ha yang berada tersebar di Kecamatan Ajibarang, Wangon, Sokaraja, dan Kemranjen. Dalam draf revisi RTRW direncanakan kawasan peruntukan industri bertambah menjadi kurang lebih 2.000 Ha, berada tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Wangon, Lumbir, Ajibarang, Jatilawang, Rawalo, dan Kalibagor. Kajian terkait pengembangan kawasan industri pada tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah menyusun Studi Kelayakan dan Masterplan Kawasan Industri.

Upaya lainnya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan antara lain melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan pengembangan UMKM, pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, dan pengembangan penelitian dan inovasi.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Penyelenggaraan pelayanan pemerintah merujuk pada Undang-undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal maka diatru melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk melihat sejauh mana capaian penyelengaraan pelayanan oleh pemerintah bisa dilihat pada indikator kinerja dari masing-masing bidang.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Perkembangan APK Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD/TK, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Angka Partisipasi Kasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	APK PAUD/TK	75,90	76,05	77,23	77.25	77,5*
2	APK SD/MI/Paket A	111.66	111.43	108.82	108.19	106,90
3	APK SMP/MTs/Paket B	77.97	90.95	86.79	82,88	85,04

*Sumber: * BPS Kabupaten Banyumas, 2020*

APK PAUD/TK

Angka partisipasi kasar PAUD/TK dan APK SMP/MTs/Paket B sampai dengan tahun 2020 belum mencapai 100%. Angka tersebut menunjukan bahwa belum semua anak usia PAUD mengikuti pendidikan jenjang PAUD. Belum optimalnya APK PAUD/TK perlu menjadi perhatian mengingat pentingnya pendidikan usia dini untuk mempersiapkan pendidikan anak ke jenjang pendidikan selanjutnya, membantu perkembangan emosional dan intelektual anak, dan membentuk kepribadian anak secara positif.

APK SD/MI

APK SD/MI Kabupaten Banyumas tahun 2016-2019 mengalami penurunan dari 111,48 di tahun 2016 menjadi 106,9%. Meskipun mengalami penurunan APK SD/MI masih di atas 100 %, ini menunjukan bahwa anak usia sekolah SD/MI di Kabupaten Banyumas telah masuk dalam pendidikan jenjang SD/MI.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar capaian APK SD/MI Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari APK Provinsi Jawa Tengah dan peringkat ketiga di wilayah Barlingmascakeb. Perkembangan APK SD/MI Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar, sebagaimana gambar berikut:

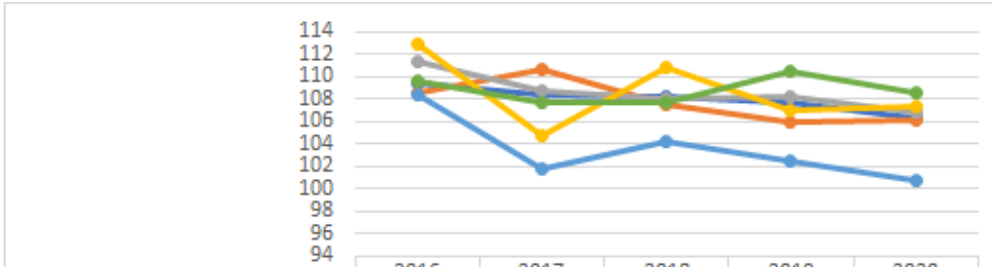

	2016	2017	2018	2019	2020
			SD/MI		
PROVINSI JAWA TENGAH	109,46	108,44	108,18	107,74	106,32
Kabupaten Cilacap	108,51	110,73	107,48	105,88	106,09
Kabupaten Banyumas	111,43	108,82	108,12	108,19	106,9
Kabupaten Purbalingga	112,87	104,69	110,88	107,03	107,29
Kabupaten Banjarnegara	108,39	101,72	104,27	102,48	100,69
Kabupaten Kebumen	109,57	107,74	107,72	110,42	108,57

Gambar 2.29
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)
Sumber : BPS, 2020

APK SMP/MTs

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B angka partisipasi kasar belum mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa terdapat anak yang tidak melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memperoleh manfaat dari bonus demografi di Kabupaten Banyumas. APK SMP/MTs Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari 90,95% pada tahun 2016 menjadi 85,04% pada tahun 2020. Capaian tahun 2020 tersebut di bawah APK Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,21% dan paling rendah dibanding Kabupaten sekitar. Capaian APK SMP/MTs Kabupaten Banyumas, wilayah kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

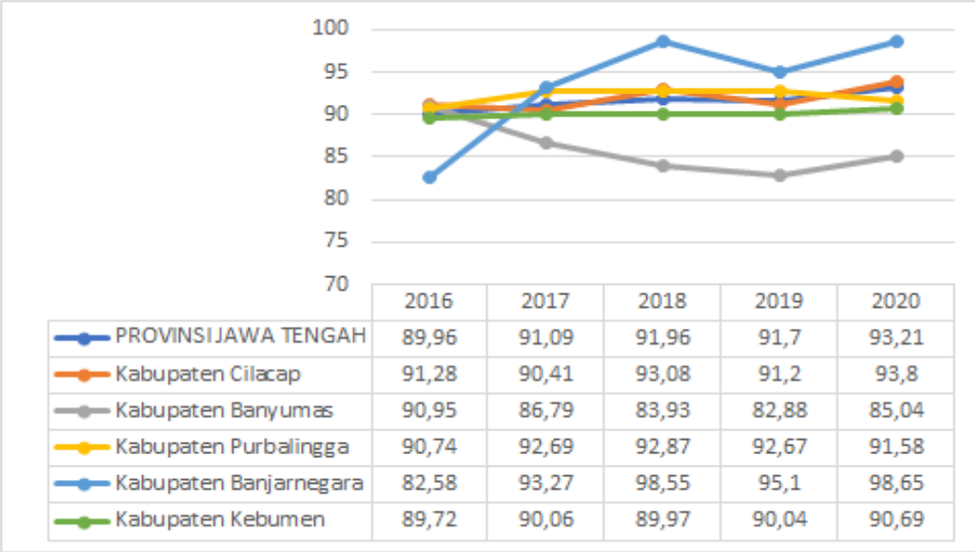

Gambar 2.30
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)
Sumber : BPS, 2020

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 fluktuatif. Angka partisipasi murni Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Angka Partisipasi Murni	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD/MI/Paket A (%)	98,86	98,75	98,27	98,77	98,54
2	APM SMP/MTs/Paket B (%)	83,01	81,41	80,21	80,73	81,23

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Banyumas dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari 98,86% di tahun 2016 menjadi 98,54% di tahun 2020. APM SD/MI tahun 2020 tersebut masih di atas APM SD/MI Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,77%, dan peringkat ke-2 dibandingkan dengan kabupaten sekitar.

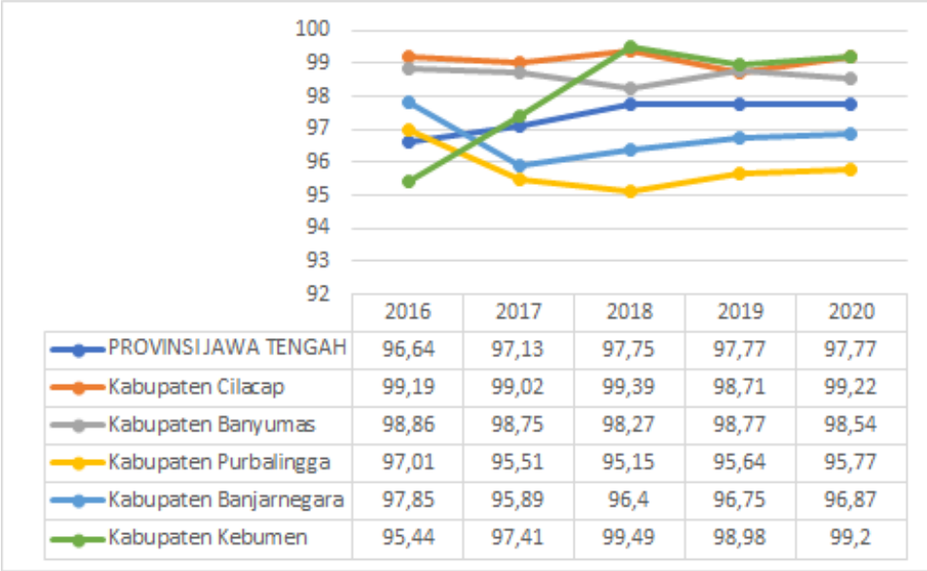

	2016	2017	2018	2019	2020
PROVINSI JAWA TENGAH	96,64	97,13	97,75	97,77	97,77
Kabupaten Cilacap	99,19	99,02	99,39	98,71	99,22
Kabupaten Banyumas	98,86	98,75	98,27	98,77	98,54
Kabupaten Purbalingga	97,01	95,51	95,15	95,64	95,77
Kabupaten Banjarnegara	97,85	95,89	96,4	96,75	96,87
Kabupaten Kebumen	95,44	97,41	99,49	98,98	99,2

Gambar 2.31
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)
Sumber : BPS, 2020

APM SMP/MTs Paket B

APM SMP/MTs Paket B Kabupaten Banyumas tahun 2016-2018 mengalami penurunan dari 83,01 pada tahun 2016 menjadi 81,23 pada tahun 2020. Angka ini lebih besar dari APM SMP/MTs/Paket B Provinsi Jawa Tengah dan peringkat ke-2 dibandingkan kabupaten sekitar.

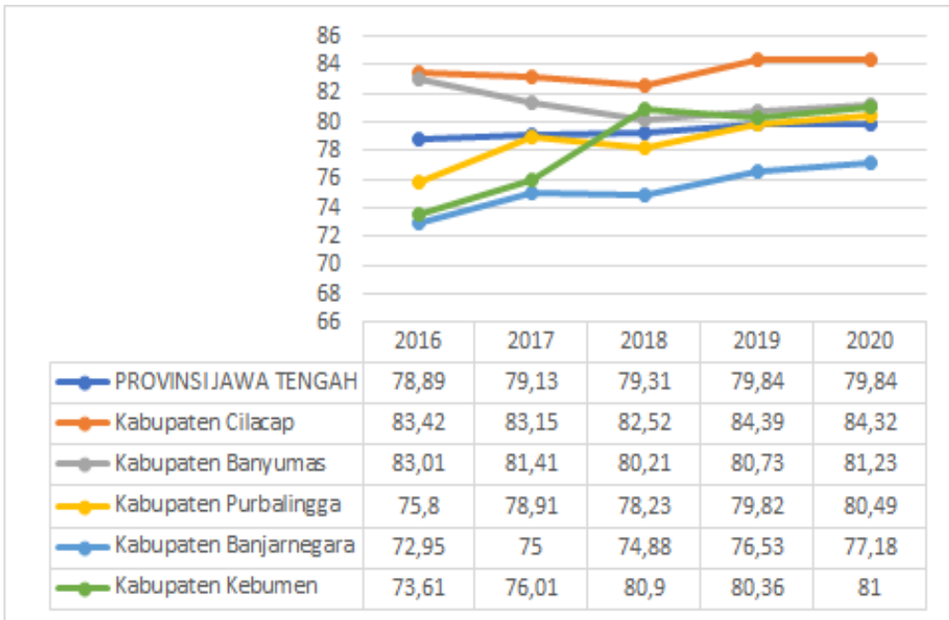

	2016	2017	2018	2019	2020
PROVINSI JAWA TENGAH	78,89	79,13	79,31	79,84	79,84
Kabupaten Cilacap	83,42	83,15	82,52	84,39	84,32
Kabupaten Banyumas	83,01	81,41	80,21	80,73	81,23
Kabupaten Purbalingga	75,8	78,91	78,23	79,82	80,49
Kabupaten Banjarnegara	72,95	75	74,88	76,53	77,18
Kabupaten Kebumen	73,61	76,01	80,9	80,36	81

Gambar 2.32
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Capaian APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B masih perlu perhatian dalam rangka pendidikan dasar sembilan tahun dan pembangunan sumber daya manusia.

Rasio Murid terhadap Guru

Untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Banyumas selain ketersediaan fasilitas pendidikan hal penting lainnya adalah peran guru. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Banyumas pada semua jenjang pendidikan cukup baik. Namun demikian dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun pada sampai dengan tahun 2019 perlu menjadi perhatian agar jumlah guru tetap memadai untuk pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan kondisi rasio murid terhadap guru selama kurun waktu 2016-2020 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Rasio Murid terhadap Guru Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI					
	Murid	170.332	172,209	173.377	171.541	169.889
	Guru	9.799	9,169	9.267	10.014	10.690
	Rasio Guru terhadap murid	17	19	18	17	15,89
2.	SMP/MTs					
	Murid	79.462	79,225	80.026	82.321	84.113
	Guru	4.390	4,198	4.277	4.446	4.646
	Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	18	19	18	19	18,10

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Rasio guru terhadap murid dihitung dengan jumlah guru secara keseluruhan baik yang PNS maupun yang non PNS. Apabila hanya dihitung dengan jumlah guru PNS maka jumlahnya sangat tidak memadai. Rasio murid terhadap guru di Kabupaten Banyumas baik pada jenjang SD maupun SMP sudah cukup bagus. Semakin kecil rasio murid terhadap guru artinya jumlah murid yang dilayani oleh seorang guru semakin kecil, sehingga diharapkan kualitas pengajaran dan perhatian guru terhadap muridnya semakin bagus.

Anak Tidak Sekolah

Anak Tidak Sekolah adalah anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang:

- tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat
- putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA)
- putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA)

Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah baru mendata anak putus sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP dan angka melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA.

Angka Putus Sekolah tingkat SD dan SMP Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Untuk angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2016 sebesar 0,033% turun pada

tahun 2017 sebesar 0,026 % dan naik di tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,040% dan menurun pada tahun 2020 sebesar 0,034% sedangkan untuk jenjang SMP/MTs angka putus sekolah mengalami penurunan, pada tahun 2016 anak putus sekolah SMP/MTs adalah berjumlah 0,166 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 0,102%.

Perkembangan Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.26
Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Banyumas

Angka Putus Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah siswa SD/MI	170,183	170,332	172,044	173,278	171,189
Jumlah siswa putus sekolah SD/MI	57	45	68	70	59
Angka Putus Sekolah SD/MI	0.033	0.026	0.040	0.040	0.034
Jumlah siswa SMP/MTs	79,949	79,462	79,333	79,179	80,045
Jumlah siswa putus sekolah	133	124	164	139	82
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.166	0.156	0.207	0.176	0.102

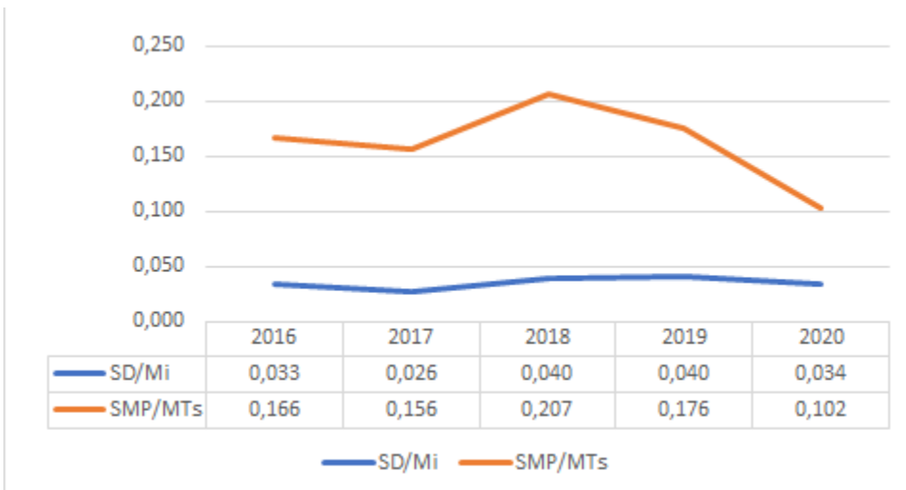

Gambar 2.33
Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020

Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas untuk tahun 2016 dan 2017 untuk jenajang SD/MI yang melanjutkan ke jenajng SMP/MTs sebesar 100% dan untuk tahun 2018 sebesar 101,48% , tahun 2019 sebesar 106,42% dimana disebabkan jumlah murid yang melanjutkan di jenjang SMP/MTs di kabupaten Banyumas ada yang berasal dari luar Kabupaten Banyumas dan di Tahun 2020 sebesar 100% dimana penurunan tersebut dikarenakan telah diterapkan sistem zonasi sekolah dalam wilayah abupaten/Kota di Jawa Tengah.

Untuk Angka melanjutkan pada jenang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yang fluktuatif di mana tahun 2016 sebesar 94,93% dan di tahun 2020 sebesar 96,2.

Tabel 2.27
Capaian Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Angka Melanjutkan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI ke SMP/MTs	100	100	101,48	106,4	100
2	SMP/MTs ke SMA/SMK/ MAN	94,93	92,47	96,10	96,36	96,2

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020

Kondisi Bangunan Sekolah

Kondisi Bangunan Sekolah jenjang SD

Kondisi bangunan sekolah jenjang SD dalam kondisi baik mengalami penurunan, dari tahun 2016 sebesar 82% menjadi sebesar 71,64% pada tahun 2020, kondisi rusak ringan mengalami kenaikan dari 13,8% pada tahun 2016 menjadi sebesar 19,69% pada tahun 2020 dan kondisi rusak berat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 4,5% menjadi sebesar 8,67% pada tahun 2020.

Rincian kondisi bangunan sekolah jenjang SD dari tahu 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabet berikut :

Tabel 2.28
Kondisi Bangunan Sekolah Jenjang SD di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 (%)

No	Kondisi Bangunan Sekolah SD	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	82	88,12	77,6	77,64	71,64
2	Rusak Ringan	13,8	9,43	18,7	18,68	19,69
3	Rusak Berat	4,5	2,45	3,7	3,68	8,67

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020

Kondisi Bangunan Sekolah jenjang SMP

Bangunan sekolah jenjang SMP dalam kondisi baik di Kabupaten Banyumas untuk mendukung proses belajar mengajar cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 98,06% menjadi 61,99% di tahun 2020, dengan kondisi rusak ringan mengalami kenaikan dari 0,47% pada tahun 2016 menjadi sebesar 33,47% pada tahun 2020 dan kondisi rusak berat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 1,47% menjadi sebesar 4,54% pada tahun 2020

Rincian kondisi bangunan sekolah jenjang SMP dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Kondisi Bangunan Sekolah Jenjang SMP di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020

No	Kondisi Bangunan Sekolah SD	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	98,06	98,57	97,58	97,58	61,99
2	Rusak Ringan	0,47	0,62	1,07	1,07	33,47
3	Rusak Berat	1,47	0,81	1,35	1,35	4,54

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan bidang kesehatan merupakan komponen penting untuk mendorong produktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila kondisi kesehatan manusia terjaga, maka dapat memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan upaya kesehatan dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Upaya pencegahan terhadap kejadian kesakitan dilakukan dengan promotif dan preventif. Sedangkan upaya kuratif dan rehabilitatif antara lain melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan perorangan maupun rujukan, serta pemenuhan cakupan tenaga medis dan paramedis untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Rasio Puskesmas

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas masih menangani kasus-kasus penyakit secara umum belum menangani kasus penyakit jiwa, dimana penanganan penyakit jiwa ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas. Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebanyak 79 unit dengan rasio sebesar 0,042, atau 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 23.711 penduduk. Standar pelayanan puskesmas per 1000 penduduk idealnya adalah 30.000 penduduk sehingga kondisi ketersediaan sarana prasarana puskesmas di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sudah terpenuhi.

Tabel 2.30
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

Uraian	2017	2018	2019	2019	2020
Jumlah Penduduk	1.665.025	1.679.524	1.693.006	1.840.152	1.873.196
Jumlah Puskesmas	39	39	39	39	40
Jumlah Puskesmas Pembantu	39	39	39	39	39
Jumlah Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu	78	78	78	78	79
Rasio Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk	0,047	0,046	0,046	0,046	0,042

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Banyumas terdapat 23 rumah sakit. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sebanyak 1.873.196 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah sebesar 0,0123, atau 1 rumah sakit di Kabupaten Banyumas melayani 81.443 jiwa.

Tabel 2.31
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	1.650.625	1.665.025	1.679.524	1.840.152	1.873.196
Jumlah Rumah Sakit	22	23	23	23	23
Rumah Sakit Umum	15	16	16	16	16
Rumah Sakit Khusus	7	7	7	7	7
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0133	0,0138	0,0137	0,0125	0,0123

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat didukung ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai indikator untuk mengkur ketersediaan tenaga kesehatan. Organisai kesehatan dunia (WHO) dalam laporannya pada tahun 2006 menyebutkan bahwa ambang batas rasio jumlah dokter, perawat dan bidan terhadap jumlah penduduk adalah 2,3 per 1000 penduduk.

Tabel 2.32
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	1.650.625	1.665.025	1.679.524	1.840.152	1.873.196
Jumlah Dokter	655	722	749	887	911
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0.40	0.43	0.45	0.48	0,49

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2020

Pada tahun 2020 jumlah dokter umum yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak 887 orang. Dengan demikian rasio dokter per 1.000 penduduk di tahun 2020 sebesar 0,47 atau 1 orang dokter di Kabupaten Banyumas melayani 2.128 penduduk. Rasio dokter per 1.000 penduduk sampai dengan tahun 2020 masih jauh dari standar WHO untuk pemenuhan tenaga dokter yang ideal.

Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Rasio perawat dan bidan per 1.000 penduduk di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 belum memenuhi standar WHO. Jika dibandingkan dengan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan target rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk dalam Rencana

Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025 hanya tenaga kefarmasian yang telah mencapai target. Berdasarkan dokumen tersebut target rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk pada tahun 2020 antara lain yaitu: perawat 1: 178, bidan 1: 70 , tenaga kefarmasian 1: 26, dan ahli gizi 1: 7.

Sesuai dengan Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, terutama dengan mengacu pada metode perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan pendekatan rasio terhadap nilai tertentu, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut: perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 75 per 100.000 penduduk, sanitarian 30 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 48 per 100.000 penduduk. Untuk Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 yang masih jauh dari peraturan diatas adalah tenaga ahli gizi dimana standarnya adalah 48 per 100.000 penduduk dan di Kabupaten Banyumas baru ada 7 ahli gizi dan untuk jumlah perawat di kabupaten banyumas sudah mencukupi dari ketentuan 1: 158 sudah mencapai 1: 178 per 100.000 penduduk

Tabel berikut menyajikan jumlah dan rasio perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan tenaga gizi di Kabupaten banyumas tahun 2018–2019.

Tabel 2.33
Jumlah dan Rasio Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, dan Tenaga Gizi Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Banyumas, 2019-2020

Uraian	2019			2020		
	Jumlah	Rasio per Satuan Penduduk	Rasio per 100.000 Penduduk	Jumlah	Rasio per Satuan Penduduk	Rasio per 100.000 Penduduk
Penduduk	1.840.152			1.873.196		
Perawat	2623	0,0014	142,54	3340	0,0018	178,30
Bidan	993	0,0005	53,96	1313	0,0007	70,09
Farmasis	345	0,0002	18,75	497	0,0003	26,53
Ahli Gizi	106	0,0001	5,76	132	0,0001	7,05

Sumber: Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2019-2020

Persentase Balita Gizi Buruk

Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, selain intervensi gizi terhadap bayi Pemerintah Daerah juga memberikan perhatian terhadap asupan gizi balita. Persentase gizi buruk di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016–2020 relatif kecil, dan telah mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 (17%). Persentase gizi buruk di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016–2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

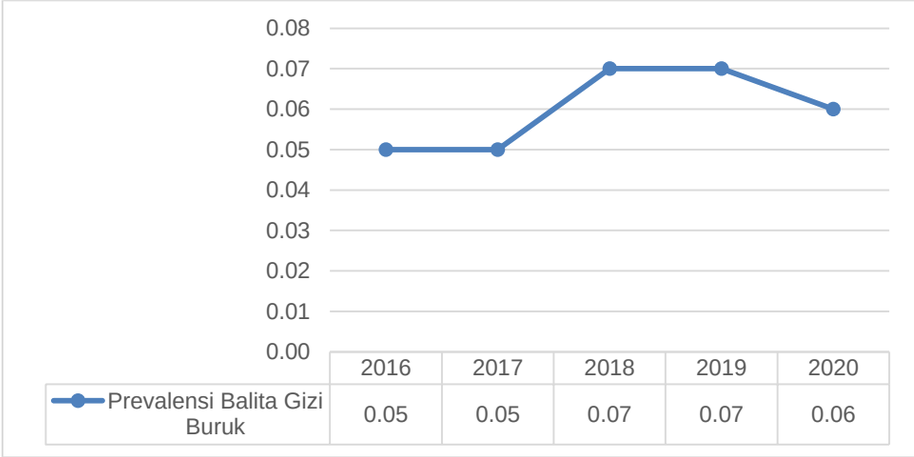

Gambar 2.34
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2020

Pravelensi Balita Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Prevelansi balita gizi kurang Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai mana gambar berikut ini:

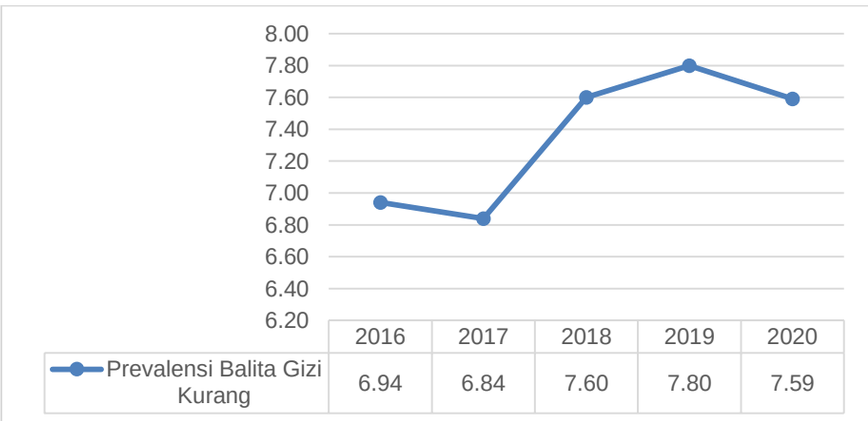

Gambar 2.35
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2020

Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016–2019 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat namun di tahun 2020 mengalami penurunan dengan angka 7,59 dimana terdapat penurunan sebesar 0,21 poin. Dengan menurunnya prevalensi balita gizi kurang akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Peningkatan zat gizi dapat meningkatkan pertumbuhan dan kemampuan berpikir balita yang akan menjadi sumber daya manusia penerus bangsa. Peluang bonus demografi akan optimal dengan banyaknya usia produktif yang disertai dengan kualitas sumber daya manusia.

Prevalensi Balita Stunting

Gizi buruk merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting. Kasus stunting di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 masih cukup tinggi sehingga Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan stunting di tingkat nasional dan provinsi. Pada tahun 2017-2020 kasus stunting mengalami penurunan dari 24,5 menjadi 14,21 %. upaya penurunan ini yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah implementasi gerakan hidup sehat, Intervensi Gizi Spesifik, Intervensi Gizi Sensitif dan Workshop Stunting Dan Strategi Komuniukasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting bagi masyarakat. Prosentase Kasus Stunting Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.34
Persentase Kasus Stunting Tahun 2016-2020

No	Tahun	% Stunting
		Balita 0-59 bulan
1	2016	24
2	2017	24,5
3	2018	20,4
4	2019	15,96
5	2020	14,21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan dengan pemberian ASI eksklusif. Perkembangan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan ini meningkat dari tahun 2016-2019, namun turun pada tahun 2020. Peningkatan pemahaman tentang inisiasi menyusui dini dan pentingnya ASI eksklusif pada ibu melahirkan perlu terus dilakukan. Tabel 2.35 menunjukkan kondisi pemenuhan ASI Ekslusif pada bayi usia 0-6 bulan.

Tabel 2.35
Cakupan Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif (%) Tahun 2016-2020

Tahun	Cakupan (%) ASI
2016	50,2
2017	51,9
2018	63,3
2019	66,1
2020	61,9

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Pemberian ASI Ekslusif dan asupan gizi seimbang pada balita merupakan salah satu upaya untuk membentuk SDM berkualitas. Hal tersebut sekaligus menjawab tantangan bonus demografi dalam mempersiapkan SDM sejak usia dini agar nantinya menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki daya saing.

Pola Penyakit

Penyakit menular dan tidak menular dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. kondisi penyakit baik

menular maupun tidak menular. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi penyakit menular dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.36
Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	CR TB (%)	HIV/AIDS	
					Kasus HIV	Kasus AIDS
2016	55,07	1,82	70,02	96	287	163
2017	33,35	1,49	70,1	96	231	125
2018	3,07	3,64	94,2	42,2	221	136
2019	11	5,9	104,40	87,03	327	321
2020	19,95	3,17	77,39	71,42	267	159

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Kabupaten Banyumas adalah: TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD cederung terus mengalami penurunan dari tahun 2016-2018 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019-2020. Untuk itu upaya pencegahan penyakit menular harus ditingkatkan. Kasus HIV pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 327 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 267. Kasus AIDS juga menurun dari tahun 2016-2017, naik pada tahun 2018-2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 159 kasus AIDS. , dengan demikian HIV/AIDS masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius, dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, dan kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang.

Sementara itu kasus positif COVID-19 sampai dengan 20 Januari 2021 adalah sebesar 4.193 terkonfirmasi positif, dengan 3031 orang berhasil sembuh, dan meninggal dunia 205 orang.

Di samping penyebab penyakit menular yang mengakibatkan kematian tidak disampingkan penyebab dari kematian adalah penyakit tidak menular (PTM). Kondisi penyakit tidak menular di Kabupaten Banyumas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Kondisi Penyakit Tidak Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2016–2020 (Persentase per jumlah penduduk)

Tahun	Jenis PTM (Prevalensi)	
	Diabetes Milletus	Hipertensi
2015	1,4	2015
2016	1,4	2016
2017	6,9	2017
2018	1,7	2018
2019	1,52	2019
2020	1,37	2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Beberapa faktor yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular antara lain kemajuan teknologi, mobilisasi penduduk, perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, dan konsumsi alkohol. Peningkatan PTM tidak saja menimbulkan dampak ekonomi tapi juga mengakibatkan penurunan produktifas karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker.

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini yang dilakukan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas guna meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga dengan mekanisme bantuan keuangan desa. Sampai dengan tahun 2020 telah ditetapkan 12 kecamatan ODF yaitu: Kecamatan Somagede, Lumbir, Gumelar, Wangon, Tambak, Sumpiuh, Banyumas, Cilongok, Jatilawang, Purwokerto Barat, Sokaraja, dan Kalibagor.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran strategis tidak hanya karena terdapat sub bidang yang terkait dengan pelayanan dasar namun juga perannya sebagai pendukung keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2021 yaitu Penguatan Perekonomian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dibutuhkan infrastruktur penggerak ekonomi yang berkualitas agar mampu mendukung produktivitas dan konektivitas wilayah.

Sumber Daya Air

Sistem jaringan irigasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung untuk mencapai ketahanan pangan dengan fungsi melayani ketersediaan air pada daerah irigasi. Jaringan irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, daerah irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Banyumas. Pembagian kewenangan dalam layanan penyediaan irigasi didasarkan pada luasan daerah irigasi dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Tabel 2.38
Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Banyumas

No	Kewenangan	Jumlah Daerah Irigasi	Luas (Ha)
1	Pusat	2	6.578
2	Provinsi Jawa Tengah	10	5.084
3	Kabupaten Banyumas	573	23.716
	Jumlah	585	35.378

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Kondisi jaringan irigasi menjadi faktor penting untuk ketahanan pangan dan mendukung pencapaian hasta krida Bupati terkait produksi padi, yaitu produksi padi 500.000 ton sampai dengan tahun 2023. Sejalan dengan hasta krida tersebut adalah hasta krida untuk peningkatan anggaran irigasi, sebagai upaya meningkatkan kondisi jaringan irigasi kabupaten. Kondisi jaringan irigasi kabupaten tahun 2016-2020 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.39
Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Uraian	Capaian (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten	620.933	620.933	641,081	641.081	641.081
Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	62,80	76,02	76,74	78,31	78,62
Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	37.2	23.98	23,26	21,69	21,38
Rusak ringan	22,7	15,34	14,86	13,67	13,50
Rusak Sedang	7,77	3,41	3,32	2,99	3,10
Rusak berat	6,73	5,23	5.08	5,04	4,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Untuk meningkatkan produktivitas padi Pemerintah Kabupaten Banyumas mengikuti Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Terpadu Partisipatif (IPDMIP). Program ini dirancang untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia, untuk mencapai swasembada beras, dimulai tahun 2017, dan akan selesai pada tahun 2022. Dengan mengikuti IPDMIP Kabupaten Banyumas memperoleh dukungan anggaran untuk pembangunan irigasi sebesar Rp.13.140.654.000,00 dari total anggaran sebesar Rp.28.746.634.752,00 pada tahun 2020. Sehingga anggaran pembangunan irigasi meningkat tajam sebesar 90,4% dari anggaran pembangunan irigasi tahun 2019 (Rp. 15.097.769.939.00). Anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi jaringan irigasi, perencanaan pengelolaan irigsasi dan pengutan kelembagaan irigasi, serta peningkatan kapasitas petani.

Tabel 2.40
Peningkatan Anggaran Irigasi dan Hasil Produksi Padi Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran irgasi (x1.000.000)	Produksi Tanaman Padi (ton)
1	2016	154.69,89	368.285,00
2	2017	228.48,41	363.562,00
3	2018	151.41,73	409.054,00
4	2019	150.97,76	368.957,25
5	2020	287.46,63	371.827,14

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2020

Program IPDMIP di Kabupaten Banyumas meliputi 7 daerah irigasi (DI) yang disepakati untuk memperoleh intervensi program (DI kesepakatan) yang meliputi DI Curug, DI Demong, DI Karangnangka, DI Jaganala, DI Kediri, DI Pandakraden, dan DI Danayuda dengan luas keseluruhan 3.105 Ha.

Dalam memenuhi kebutuhan suplai air baku, baik untuk irigasi maupun rumah tangga, komersial, dan industri, sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah membangun 10 dan merevitalisasi 5 sumber air baku (situ/telaga). Selain itu di Kabupaten Banyumas terdapat 1 embung yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 1 embung yang dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Sebaran embung di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar berikut:

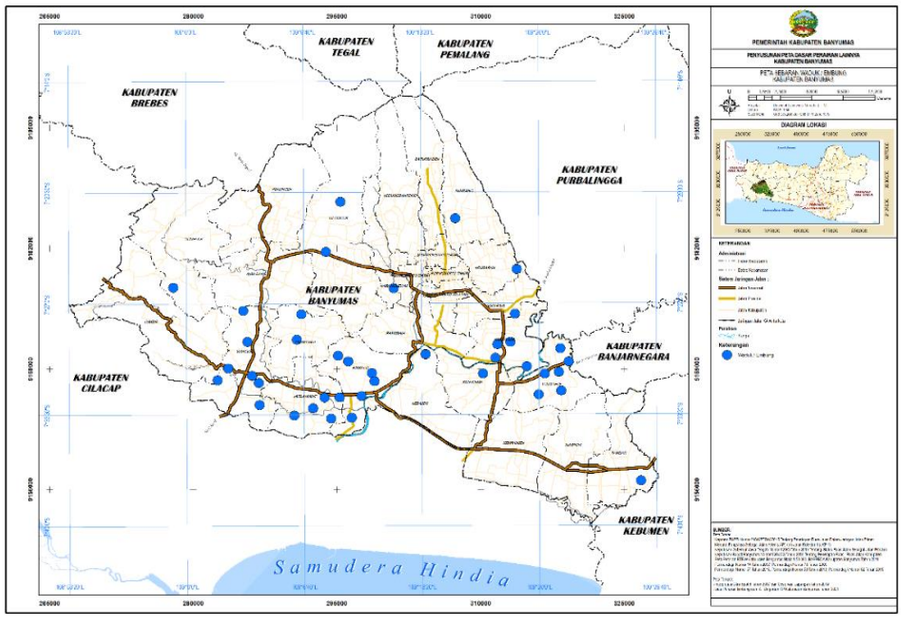

Gambar 2.36
Peta Sebaran Embung di Kabupaten Banyumas
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2020 diolah

Air Minum

Kewenangan kabupaten/kota dalam penyediaan air minum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten/kota. Penyediaan air dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat dan disediakan mandiri olah masyarakat. adalah sebagai pelaksana penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar warga negara guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sampai dengan tahun 2020 rumah tangga akses air minum baru menjangkau 75,45% dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.41
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Banyumas 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Persentase
1	2016	308,181	445,973	69.10
2	2017	322,466	457,145	70.54
3	2018	331,36	462,173	71.70
4	2019	337,253	467,257	72.18
5	2020	347,792	467,257	74.43

Sumber: Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2020

Salah satu tantangan dalam pemenuhan akses air minum layak di Kabupaten Banyumas adalah masih terdapat wilayah rawan kekeringan,

terutama dikarenakan ketiadaan sumber air baku, di mana sebagian wilayah rawan kekeringan berada di luar cadangan air tanah.

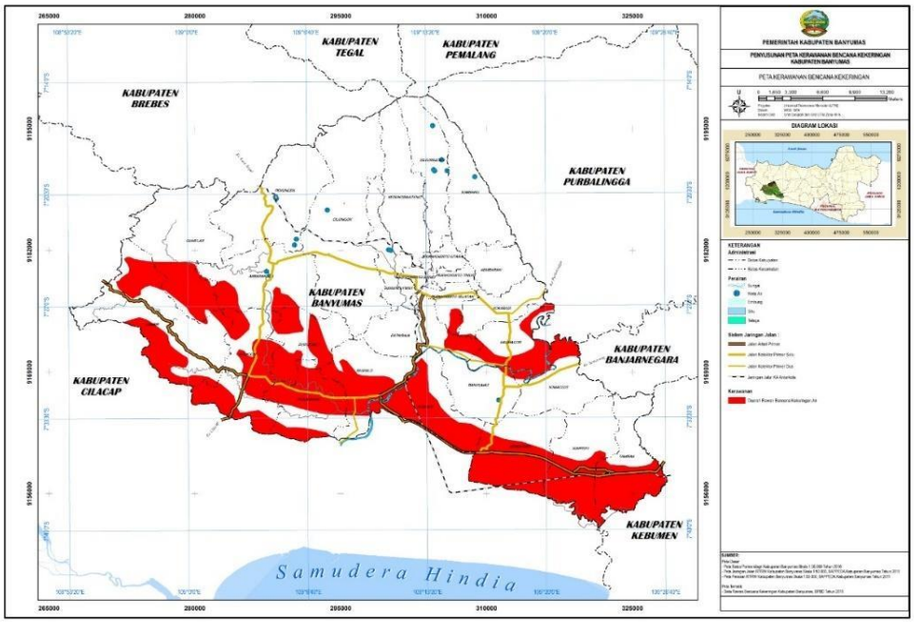

Gambar 2.37
Peta Kerawanan Bencana Kekeringan
Sumber: Penyusunan Peta Kerawanan Bencana Kekeringan Kabupaten Banyumas

Berdasarkan analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan data yang disesuaikan, rata-rata perubahan proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak perkotaan dan perdesaan adalah 2,29% per tahun. Tanpa upaya keras tambahan Kabupaten Banyumas tidak dapat mencapat target SDGs akses menyeluruh air minum (100%) pada tahun 2030.

Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Cakupan akses air minum belum seluruhnya memenuhi kriteria aman sebagaimana TPB.

Air Limbah

Berdasarkan data monitoring dan evaluasi sanitasi total berbasis masyarakat Kementrian Kesehatan sampai dengan tahun 2020 rumah tangga berakses sanitasi di Kabupaten Banyumas baru mencapai 88,45%. Capaian tersebut hanya berdasakan akses jamban yang merupakan bagian kecil dari sistem pengelolaan air limbah. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Banyumas masih perlu peningkatan pengelolaan lumpur tinja. Kabupaten Banyumas hanya memiliki 1 instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang memerlukan revitalisasi. Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menata kembali pengelolaan air limbah, mulai dari kelembagaan hingga infrastruktur pendukungnya.

Instalasi pengolahan lumpur tinja yang ada saat ini seluas 0,25 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak 23 m3/hari. Kegiatan penyedotan tinja masih belum optimal yaitu sebanyak ± 250 KK/tahun.

Sedangkan untuk sarana angkut/truk tinja masih terbatas yaitu 2 unit milik Pemerintah Kabupaten Banyumas dan 4 unit yang terdaftar milik swasta.

Perkembangan capaian rumah tangga berakses sanitasi berdasarkan stbm.org adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah KK Data aktual ter-entry / Data di BPS)	Kemajuan								
			JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses Progres
1	2016	480421/475688	253720	53.05	19157	4.01	33371	7.42	174173	35.51	64.49
2	2017	492702/475688	285090	57.76	29026	5.75	50977	10.37	127609	26.12	73.88
3	2018	491040/475688	305521	61.55	34437	6.57	62224	12.25	88858	19.63	80.37
4	2019	502023/475688	337400	66.02	32937	6.64	66584	13.27	65102	14.07	85.93
5	2020	513902/475688	348776	67.53	35006	6.92	73930	14.32	56190	11.23	88.77

Sumber: **http://monev.stbm.kemkes.go.id/monev**, *2020*

Jalan

Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 620/302/Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas Sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten menambah panjang jalan kabupaten yang semula sepanjang 804,784 Km menjadi 1.508 Km. Penambahan tersebut berasal dari ruas jalan desa yang menghubungkan antar desa yang kemudian diserahkan kewenangannya menjadi jalan kabupaten. Namun demikian jalan tersebut memiliki jenis permukaan yang berbeda-beda. Berikut jalan kabupaten berdasarkan permukaannya dan gambar jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.43
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan
Tahun 2020 (Km)

Total Panjang Jalan	Aspal/Penetrasi/ Macadam	Hotmix	Perkerasan Beton	Telford/ kerikil	Tanah /Belum Tembus
1.508,00	707,482	558,630	31,830	197,033	13,025

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

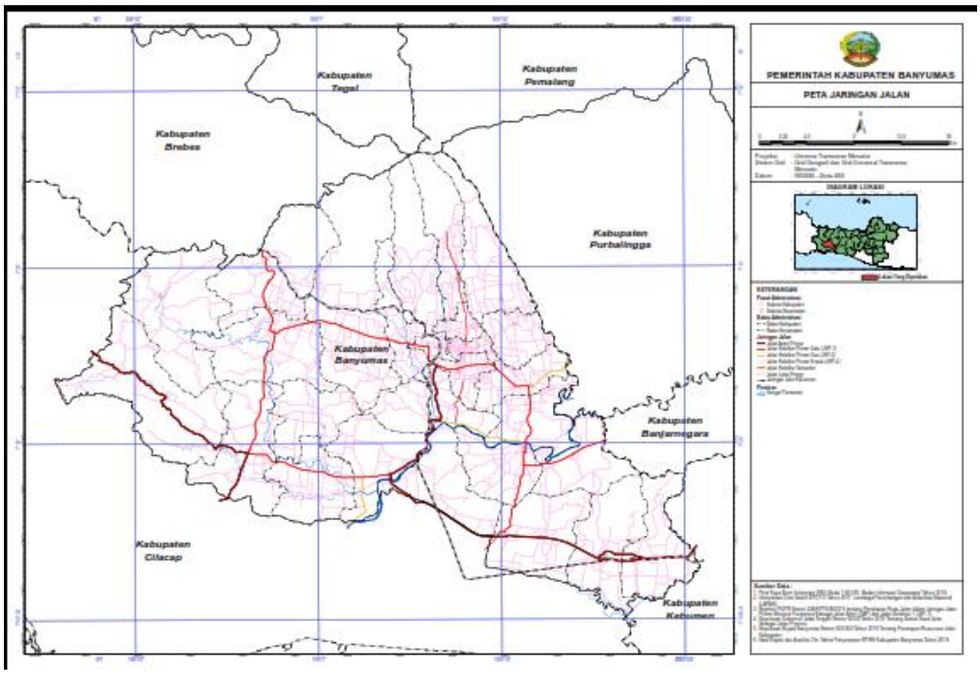

Gambar 2.38
Peta Jaringan Jalan Kabupaten Banyumas
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan tahun 2020 terus berupaya meningkatkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Banyumas. Peningkatan kondisi jalan dan jembatan menjadi prioritas untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Di Kabupaten Banyumas terdapat 915 jembatan dengan total panjang 7.665,57 m. Jembatan kondisi baik dapat dilihat apabila keempat komponen konstruksi dalam kondisi baik. Kondisi konstruksi jembatan di Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.44
Kondisi Jembatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Konstruksi	Kondisi (Ruas)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak	Rusak Berat
Bangunan Atas	756	15	79	40	25
Bangunan Bawah	765	17	82	37	14
Pondasi	770	73	-	41	31
Lantai	694	19	124	59	19
Kondisi Secara Umum	720	18	138	0	39

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Tabel 2.45
Data Jembatan di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Lebar

Kriteria Lebar Jembatan	Kondisi (Ruas)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
Jembatan < 2.5 M (Sangat Sempit)	47	0	9	0	47	56
Jembatan 2.5 < 3.5 M (Sempit)	78	8	15	4	78	105
Jembatan 3.5 < 5 M (Sedang)	264	5	57	24	264	350
Jembatan > 5 (Lebar)	331	5	57	11	331	404
JUMLAH	720	18	138	39	720	915

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Tabel 2.46
Kondisi Jalan di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Uraian	Capaian (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan Kabupaten (km)	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	30,28%	34,96%	35,47%	37,87%	47,52%
	456,615 km	527,259 km	534,927 km	571,032 km	716,511 km
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	21,42%	20,95%	23,53%	25,83%	28,76%
	323,007 km	315,887 km	354,765 km	389,525 km	433,731 km
Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	48,30%	44,09%	41,00%	36,30%	23,72%
	728,378 km	664,854 km	618,308 km	547,440 km	357,758 km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Jasa Konstruksi

Dalam rangka pelaksanaan sub urusan jasa konstruksi Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Dalam kurun waktu 2018-2020 telah memberikan pelatihan sertifikasi kompetensi kepada 804 tenaga terampil konstruksi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.47
Sertifikasi/Pelatihan Tenaga Konstruksi Tahun 2018-2020

No	Jenis Sertifikasi	KODE UNIT KOMPETENSI	2018	2019	2020
1	Tukang Pasang Batu (Tukang Bangunan Umum)	TA 005	181	480	
2	Pelaksana Jembatan	TS044		19	
3	Pelaksana Jalan	TS045		42	
4	Pelaksana Saluran Irigasi	TS031			25
5	Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung	TS051			24
6	Supervisor K3	TL010			33
7	Bimbingan Teknis Administrasi Teknis Penyedia Jasa				
	Jumlah		181	541	82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Tata Ruang

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kebupaten. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya adalah:

1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
3. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
6. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut, tata ruang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, rencana tata ruang menjadi pedoman dalam menentukan lokus suatu rencana pembangunan. Rencana pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan rencana pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, lokasi peruntukannya telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas. Beberapa contoh diantaranya adalah pengembangan obyek Wisata Baturraden yang berada pada peruntukan Kawasan Pariwisata, pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto yang berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, pembangunan dan pengembangan beberapa pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang seluruhnya berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, pembangunan dan pengembangan beberapa Puskesmas yang seluruhnya berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, rencana pembangunan perkantoran Pemda terpadu yang lokasi rencana pada peruntukan Permukiman Perkotaan, dan lain sebagainya.

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kabupaten Banyumas juga diterapkan dalam pemberian izin-izin pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh pemeritah provinsi, pusat, swasta maupun masyarakat. Beberapa contohnya antara lain adalah pembangunan Kebun Raya Baturraden yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berada pada peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, pembangunan pabrik semen oleh

perusahaan swasta di Kecamatan Ajibarang berada pada peruntukan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan pusat perbelanjaan berupa Mal yang dilaksanakan oleh swasta pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, pengembangan perumahan oleh developer yang seluruh perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas berada pada peruntukan Kawasan Permukiman Perkotaan, dan lain sebaginya.

Perangkat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kabupaten Banyumas telah memiliki regulasi rencana tata ruang melalui Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, dan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039.

Sebagai salah satu regulasi yang diacu dalam proses perizinan, Rencana Tata Ruang memiliki peranan yang sangat penting. Perda RTRW Kabupaten Banyumas saat ini masih dirasa kurang memadai dalam acuan perizinan berinvestasi, karena sifat dan skalanya yang masih makro dan belum detail menunjukan zona sesuai kondisi eksisting lapangan. Pengembangan kawasan peruntukan industri dalam Perda RTRW saat inipun belum mampu menarik banyak investor karena lahannya yang kurang diminati. Di sisi lain, laju alih fungsi lahan pertanianpun masih cukup tinggi, hal ini dikarenakan RTRW Kabupaten Banyumas yang sifatnya makro tersebut secara hukum masih memiliki celah dalam penafsiran pemanfaatan lahan pertanian maupun permukiman.

Untuk mengatasi beberapa hal ditas sangat diperlukan regulasi yang sifatnya lebih rinci, dalam hal ini adalah RDTR. Penyusunan RDTR di Kabupaten Banyumas harus diperbanyak untuk memberikan kepastian hukum peruntukan tata ruang pada setiap kawasan. Revisi Perda RTRW Kabupaten Banyumas sebagai upaya penyempurnaan Perda RTRW yang sekarang berlaku, saat ini sudah dilaksanakan dan masih berproses di tingkat provinsi.

Sebagai upaya mendukung pertumbuahan ekonomi melalui penanaman investasi di Kabupaten Banyumas, optimalisasi pengembangan kawasan peruntukan industri dan pengendalian alih fungsi lahan, revisi RTRW dan penetapan RDTR sebagai acuan perizinan perlu dilaksanakan percepatan, agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Banyumas dan mendukung kawasan pengembangan prioritas nasional, khususnya Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dukungan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan kebutuhan perumahan masih terbatas, terutama dalam penyediaan akses kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi antara lain: penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG), penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan PSU perumahan, serta sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Banyumas terdapat backlog rumah sebanyak 153,904 unit. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas 2020 yang disusun dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 89,59% rumah tangga di Kabupaten Banyumas telah memiliki rumah. Meskipun tingkat kepemilikan rumah tinggi, dari aspek kelayakan masih terdapat rumah tidak layak huni dan rumah tanpa akses air minum dan sanitasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah dilaksanakan identifikasi permukiman kumuh yang ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan keputusan Bupati tersebut luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Banyumas adalah 115,7 Ha. Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu tujuan SDGs/TPB yaitu Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan.

Salah satu parameter kumuh adalah banyaknya rumah layak huni. Rasio rumah layak huni menjadi indikator SDGs/TPB Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan, Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta merata kawasan kumuh.

Jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 adalah 116.677 unit. Sampai dengan tahun 2020 sudah tertangani 90.833 unit RTLH yang belum ditangani. Tingginya penduduk miskin merupakan akar permasalahan tingginya jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas. Penduduk miskin memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produktivitas sehingga penghasilan juga rendah, serta kepemilikan aset.

Tabel 2.48
Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni dan Lingkungan Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio rumah layak huni (%)	88,12	88,70	76,30*	78,47*	78,76
2.	Persentase Lingkungan Pemukiman kumuh perkotaan (%)	6,52	6,34	8,69*	7,84*	7,8

Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2020
* : Terdapat perubahan data dasar

2.3.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan serta perlindungan masyarakat yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Indikator untuk mengukur ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat antara lain cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas). Jumlah Linmas di Kabupaten Banyumas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.49
Jumlah Linmas di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2020

Linmas	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Laki-laki (orang)	10.276	10.296	10.320	10.320
Perempuan (orang)	147	151	149	149
Jumlah (orang)	10.423	10.447	10.469	10.469

Sumber: Data dan Informasi Kabupaten Banyumas, 2017-2020

Upaya menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Ketentraman, keteritban, dan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum bertujuan untuk: menciptakan

suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tenteram, tertib dan teratur, mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta menanggulangi dan meniadakan adanya gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.

Penanggulangan bencana

Dalam hal wilayah kebencanaan Kabupaten Banyumas memiliki potensi bencana antara lain gunung berapi, tanah longsor, dan puting beliung. Berdasarkan analisis kajian lingkungan hidup startegis RPJMD Kabupten Banyumas tahun 2018-2023, 50,71% luas wilayah Kabupaten Banyumas berada pada jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana kelas rendah, dan 51,53% luas wilayah berada pada jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir bencana kelas rendah. Dari analisis tersebut diketahui kerentanan desa-desa di Kabupaten Banyumas terhadap perubahan iklim yaitu: bahwa 6 desa pada kategori tidak rentan, 85 desa kurang rentan, dan 225 agak rentan. Hal ini memberikan gambaran resiko bencana di wilayah Kabupaten Banyumas, Kondisi wilayah yang rawan bencana tersebut belum didukung dengan ketersediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB).

Kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas terkait Peningkatan Mitigasi bencana, meliputi: Sosialisasi kebencanaan pada masyarakat; Penayangan iklan layanan kebencanaan melalui media elektronik, radio, website; Pemasangan EWS dan rambu evakuasi; Latihan dan simulasi kebencanaan; Penyusunan dokumen rekontijensi banjir, longsor, erupsi gunung berapi; Kerjasama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Daerah/Kabupaten pada daerah perbatasan. Terkait dengan penanganan darurat bencana dilakukan melalui pelayanan penanganan darurat dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Penanganan pasca bencana dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana dan pemulihan kembali dampak bencana/pasca bencana. Dalam rangka peningkatan pelayanan, Badan Penanggulangan bencana menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan stakeholder dalam penanggulangan bencana, penyediaan kebutuhan peralatan yang memadai dan kompetensi sumber daya manusia penanggulangan bencana.

Seluruh kinerja penanggulangan bencana sesuai dengan SPM sudah dilaksanakan 100% namun pada rasio pengurangan resiko bencana baru mencapai 30%, persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana 3,7%, dan persentase SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana baru mencapai 25%.

Rincian kinerja bidang penanggulangan bencana Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Kinerja Kebencanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat (%)	100	100	100	100	100

Rasio pengurangan risiko bencana (%)	29	29	30	30	30
Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100
Informasi peta rawan bencana (%)	100	100	100	100	100
Prosentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana (%)	0	0	0	0	3,7
Persentase SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (%)	25	25	25	25	25
Prosentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat (%)	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Banyumas, 2020

Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran

Penangan kebakaran dilaksanakan oleh Unit Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Unit Pemadam Kebakaran memiliki tugas untuk pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan penanggulangan kebakaran.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas menjadi tantangan dalam pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran. Unit Pemadam Kebakaran memiliki beberapa pos pelayanan di beberapa kecamatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya. Pos Pemadam Kebakaran tersebut berada di Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, dan Kecamatan Wangon.

Kinerja Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 telah tercapai 100 % hanya Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Dimana wilayah Kabupaten Banyumas yang cukup luas dan baru terdapat 4 wilayah pos pemadam kebakaran.

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan kebakaran di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bencana Kebakaran (%)	53	39,83	100	100	100
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100	100	100	100	100
3	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) (%)	39,83	39,83	39,83	53,11	53

Sumber: Satpol PP Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.1.5. Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dan diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial diantaranya kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS) untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial, advokasi, dan sinergi untuk mendukung penanganan permasalahan sosial.

Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau sesuai Permensos Nomor 16 Tahun 2019 disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu permasalahan sosial di Kabupaten Banyumas. Secara umum jumlah PPKS menurun hanya ada kenaikan sedikit pada jumlah lanjut usia terlantar. Meskipun demikian kedepan penanganan kasus penyandang masalah sosial tetap menjadi prioritas, sebab berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Perkembangan jumlah PMKS atau yang sekarang disebut dengan PPKS Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Perkembangan Jumlah PMKS/PPKS di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Jumlah PMKS/PPKS	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar (orang)	221	244	90	72	17
2	Anak terlantar (orang)	895	1030	559	504	94
3	Anak nakal (orang)	29	57	69	18	6
4	Anak jalanan (orang)	93	61	61	65	7
5	Anak cacat (orang)	1310	1252	938	891	778
6	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) (orang)	2686	3389	2819	2333	716
7	Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan (orang)	5	4	5	4	
8	Lanjut Usia terlantar (orang)	2623	3974	2643	2667	1033
9	Penyandang Cacat (orang)	5116	5288	5670	5639	2702
10	Tuna Susila (orang)	220	238	72	74	9
11	Pengemis (orang)	140	139	131	111	22
12	Gelandangan (orang)	20	20	156	90	15
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA (orang)	29	17	24	22	15

No	Jumlah PMKS/PPKS	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
14	Korban Bencana Alam (orang)	148	204	103	97	9
15	Komunitas Adat Terpencil (KK)	2	1	0	0	0
16	Pemulung (orang)	389	464	287	249	136
17	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) (orang)	4	3	0	0	0
18	Korban Trafficking (orang)	6	0	5	4	6
19	Fakir Miskin (orang)	-	-	-	-	101234
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (orang)	-	-	-	-	6
21	Korban Bencana Sosial (orang)	-	-	-	-	0
22	Kelompok Minoritas / Waria (orang)	-	-	-	-	0
23	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) (orang)	-	-	-	-	97
24	Korban Tindak Kekerasan (orang)	-	-	-	-	1
25	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) (orang)	-	-	-	-	3
26	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (orang)	-	-	-	-	5
	Jumlah (orang)	15,952	18,402	15,650	14,859	105,293

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2020

Jumlah PMKS/PPKS tahun 2016-2019 sebanyak 14.859 dengan 18 komponen dan di tahun 2020 sebanyak 105.293 dengan 26 komponen sesuai dengan hasil Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) atau sekarang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Jawa Tengah kenaikan jumlah PMKS/PPKS di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 dikarenakan adanya tambahan komponen perhitungan PMKS/PPKS.

Peran masyarakat dan lembaga masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial ditunjukan dengan bertambahnya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, yang hingga tahun 2020 meningkat menjadi 25 panti.

Tabel 2.53
Sarana Sosial di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	15	23	23	25	25
2	Rumah Singgah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinsospermades Kabupaten Banyumas, 2019

Sinergi dalam penanganan masalah sosial antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai tanggung jawab sosial diwujudkan dalam Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis (Pattas Sosial Mitra Kurir Langit). Pattas Sosial Mitra Kurir Langit dilatarbelakangi permasalahan kemiskinan yang kompleks dan jumlah penduduk miskin yang tinggi di Kabupaten Banyumas. Kemiskinan kerap kali menghalangi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Sosial

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat inovasi penanganan permasalahan sosial berbasis kemitraan.

Pattas Sosial Mitra Kurir Langit ini bertujuan untuk memberikan pendampingan secara cepat, tanggap, dan tuntas kepada warga miskin yang menderita sakit kronis. Inovasi ini melayani dari kendala maupun hambatan penyiapan administrasi kependudukan, jaminan kesehatan, biaya saat menunggu di rumah sakit, biaya transportasi ambulans, biaya rumah singgah pasien, pendampingan sosial dan psikososial, kebutuhan dasar makan minum, serta pendampingan pasca-perawatan dari rumah sakit.

Inovasi pelayanan sosial tersebut menumbuhkembangkan relawan sosial dan komunitas sosial di masyarakat untuk meningkatkan kepeduliannya membantu warga miskin. Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman warga miskin untuk mengurus administrasi kependudukan, kesehatan, transportasi, akses bantuan sosial, rumah singgah pasien, dapat dibantu oleh anggota Pattas Sosial Mitra Kurir Langit.

Masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan Pattas Sosial Mitra Kurir Langit sangat terbantu dari sisi biaya pengobatan, transportasi ambulans, perawatan pada pasca rumah sakit dan kebutuhan dasar lainnya. Keberhasilan inovasi ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerima manfaat penderita sakit kronis sebanyak 127 orang pada tahun 2018, yang awalnya hanya sebanyak 15 orang tahun 2016 dan 80 orang pada tahun 2017. Indikator sinergitas dalam inovasi ini terus meningkat dengan bertambahnya jumlah anggota pada posisi April 2019 sebanyak 139 anggota.

Permasalahan sosial lainya di Kabupaten Banyumas adalah banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki keterampilan dan pekerjaan tetap menyebabkan mereka belum mandiri, sehingga kerap memilih untuk mengemis atau mengamen di jalan. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Banyumas menciptakan inovasi pelayanan publik Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses atau Gendis. Melalui program Gendis, penyandang disabilitas diberi bekal keterampilan, dibina hingga menjadi mandiri dan memiliki jiwa wirausaha. Dimulai sejak tahun 2016, Gendis memberikan pembinaan dan bimbingan keterampilan.

Pembekalan keterampilan ini merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan diskriminasi dalam peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang selama ini menyebabkan pengangguran. Selain itu, dengan adanya peran dari pihak swasta, organisasi masyarakat, serta paguyuban penyandang disabilitas yang diajak sinergi dan kolaborasi, maka dapat mengeliminasi cara pandang yang tidak benar terhadap penyandang disabilitas. Gendis menjadi wadah bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk dapat mempercepat penanganan permasalahan dari penyandang disabilitas dalam usia produktif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Penduduk Usia Kerja (PUK)

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka). Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, akan tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru umumnya lebih lambat. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat terserap oleh lapangan kerja. Ketidakseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran. Jumlah penduduk usia kerja (PUK) di Kabupaten Banyumas selama periode 2016-2020, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.54
Banyaknya Penduduk Usia Kerja Menurut
Karakteristik Ketenagakerjaan Kabupaten Banyumas, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja	NA	823 279	863.224	868.553	877.555
Bekerja	NA	785 231	827.086	832.017	824.866
Pengangguran	NA	38 048	36.138	36.536	52.689
Bukan Angkatan Kerja	NA	439 640	415.642	425.859	438.944
Sekolah	NA	107 632	98.634	92.940	94.202
Mengurus Rumah Tangga	NA	262 746	265.411	278.936	282.836
Lainnya	NA	69 262	51.597	53.983	61.906
Jumlah			1.278.866	1.294.412	1.316.499

Sumber: BPS, 2016-2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja *(labor supply)* untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. TPAK Kabupaten Banyumas pada periode 2016 hingga 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif, sebagaimana gambar berikut:

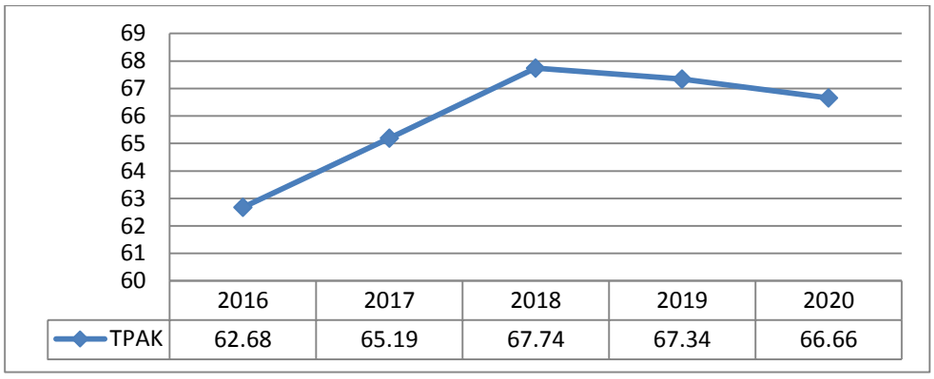

Gambar 2.39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Penduduk usia kerja atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Banyumas tahun 2020 tercatat sebanyak 1.316.499 jiwa. Dari jumlah tersebut, 66,66 persen merupakan penduduk angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) sedangkan sisanya sebesar 33,34 persen merupakan penduduk bukan angkatan kerja (bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). TPAK Kabupaten Banyumas tahun 2020 menunjukkan angka 66,66 persen yang artinya bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 67 orang termasuk penduduk yang aktif secara ekonomi. Jika dipilah menurut jenis kelamin, hasil Sakernas 2020 menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan yaitu 81,78 untuk laki-laki dan 51,74 untuk perempuan.

Dalam urusan Tenaga Kerja, terdapat permasalahan dimana besaran pencari kerja terdaftar dan ditempatkan masih rendah dimana pada tahun 2020 sebesar 48,75% menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 71,02%. Dimana tahun 2020 terdapat 10.559 pencari kerja dan di tahun 2019 terdapat sebanyak 14.972 pencari kerja. Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan perjanjian kerjasama juga masih ada dengan capaian tahun 2020 sebesar 54,54% dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 75%. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Banyumas harus melakukan refocusing anggaran untuk menangani pandemi tersebut. Sehingga banyak program dan kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target yang sudah ditetapkan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten bidang tenaga kerja meliputi sub urusan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Untuk melaksanakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Kabupaten Banyumas telah memiliki Balai Latihan Kerja untuk pelaksanaan pelatihan antara lain: pelatihan menjahit, las, teknisi handphone, otomotif sepeda motor, prosesing hasil pertanian/pembuatan aneka kue, menjahit garmen, tata rias pengantin, dan tata kecantikan.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

Capaian pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas dapat diketahui dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender.

Nilai IPG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2016-2020 selalu mengalami peningkatan. IPG Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 88,27 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 92,18 dan berada di peringkat ke-4 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Hal ini menunjukan lebih kecil peran perempuan di Kabupaten Banyumas walaupun setiap tahun mengalami peningkatan.

Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas, Kabupaten lain dan Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan pada grafik di bawah ini.

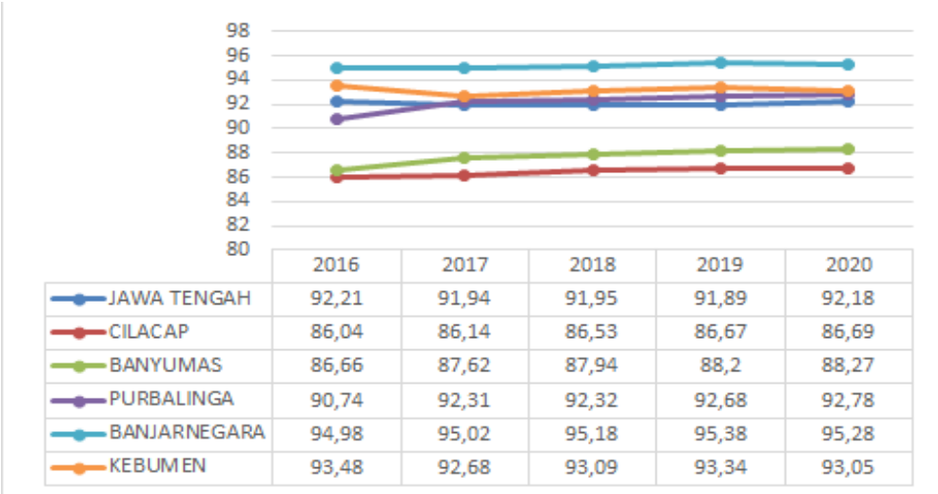

	2016	2017	2018	2019	2020
JAWA TENGAH	92,21	91,94	91,95	91,89	92,18
CILACAP	86,04	86,14	86,53	86,67	86,69
BANYUMAS	86,66	87,62	87,94	88,2	88,27
PURBALINGA	90,74	92,31	92,32	92,68	92,78
BANJARNEGARA	94,98	95,02	95,18	95,38	95,28
KEBUMEN	93,48	92,68	93,09	93,34	93,05

Gambar 2.40
Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas, Kabupaten Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
Sumber : BPS, Tahun 2020

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG mempunyai kegunaan untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan.

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2015–2019 mengalami fluktuasi. IDG Kabupaten Banyumas di tahun 2019 sebesar 71,92 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 72,18 Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Jawa Tengah, IDG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-2 dari 4 kabupaten. Capaian IDG Jawa Tengah dengan Kabupaten Banyumas dapat digambarkan pada grafik dibawah ini:

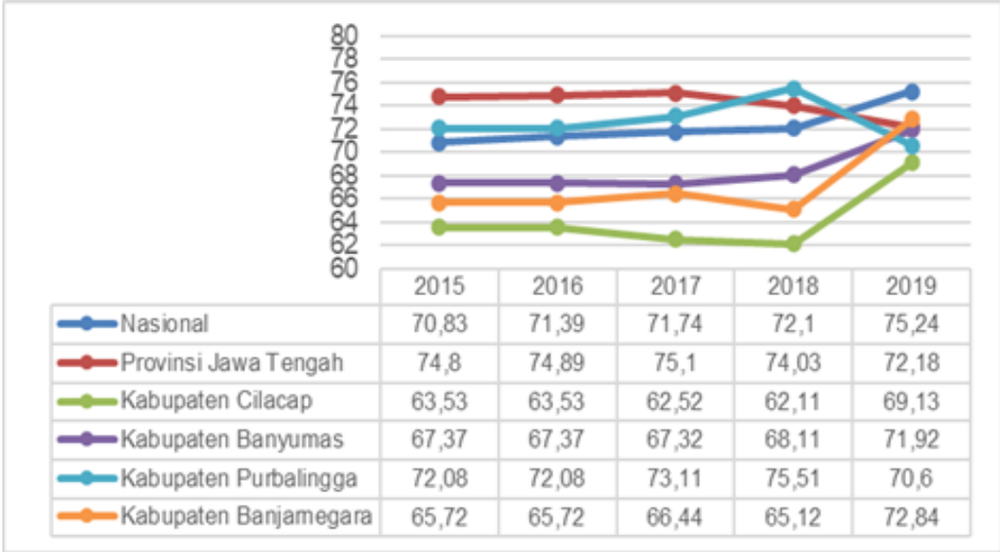

Gambar 2.41
Capaian IDG Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten sekitar di Barlingmascake Tahun 2015–2019
Sumber : BPS, 2019

Nilai IDG yang masih rendah disebabkan beberapa permasalahan antara lain rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas cenderung meningkat. Banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Banyaknya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2020 (kasus)

No.	Kecamatan	Kekerasan Terhadap Perempuan				Kekerasan Terhadap Anak			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Lumbir	-	-	-	-	-	1	1	
2	Wangon	-	-	1	1	2	1	1	3
3	Jatilawang	-	-	-	-	-	2	2	
4	Rawalo	-	-	-	-	1	-	-	5
5	Kebasen	-	-	1	-	2	-	1	1
6	Kemranjen	-	-	-	-	-	-	2	
7	Sumpiuh	1	-	-	-	-	2	7	3
8	Tambak	-	-	-	-	2	1	1	1
9	Somagede	-	-	-	-	-	1	1	1
10	Kalibagor	1	-	-	1	2	5	2	1
11	Banyumas	-	3	-	-	2	5	3	-
12	Patikraja	-	1	1	1	-	3	2	2
13	Purwojati	-	-	1	-	-	1	-	2
14	Ajibarang	-	-	-	-	1	2	4	1
15	Gumelar	-	-	-	-	-	4	2	-
16	Pekuncen	-	-	-	1	1	3	2	3

No.	Kecamatan	Kekerasan Terhadap Perempuan				Kekerasan Terhadap Anak			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
17	Cilongok	-	-	-	1	1	3	5	3
18	Karanglewas	1	3	2	-	2	17	1	1
19	Kedungbanteng	-	-	-	1	-	4	-	2
20	Baturraden	-	1	1	2	3	12	6	5
21	Sumbang	-	2	3		-	10	1	3
22	Kembaran	2	2	3	1	-	4	2	1
23	Sokaraja	2	3	1	2	2	5	3	6
24	Purwokerto Selatan	-	3	2	-	6	7	7	5
25	Purwokerto Barat	2	2	-	1	-	10	7	5
26	Purwokerto Timur	1	1	1	2	1	4	2	2
27	Purwokerto Utara	3	1	1	3	1	5	4	6
	Jumlah	13	22	18	17	29	112	71	62

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Untuk penanganan korban kekerasan di Kabupaten Banyumas telah terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten sebanyak 27 unit.

2.3.2.3. Pangan

Kabupaten Banyumas telah menyusun regulasi ketahanan pangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Tujuan penyelenggaraan Ketahanan Pangan adalah a) meningkatkan produksi pangan Daerah; b) meningkatkan keanekaragaman pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi masyarakat; c) mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d) mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang rawan pangan dan gizi; e) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan; f) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, higienis dan bergizi seimbang; g) meningkatkan kesejahteraan bagi petani, peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan h) melindungi dan mengembangkan produksi pangan dan industri pengolahan pangan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi: perencanaan pangan, kelembagaan, ketersediaan pangan, cadangan pangan, keterjangkauan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, sistem informasi pangan, penelitian dan pengembangan pangan, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas masih banyak upaya yang harus dilakukan, terutama terkait perencanaan pangan,

pembentukan cadangan pangan daerah, penanganan daerah rawan pangan, serta pengembangan sistem informasi pangan dan gizi.

Sesuai peraturan daerah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah yang meliputi pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah. Kabupaten Banyumas belum memiliki cadangan pangan pemerintah daerah. Cadangan pangan yang ada di Banyumas baru ada yang dikelola masyarakat sebanyak 30 lumbung pangan dan yang dikelola Lembaga Usaha Pangan sebanyak 11 lumbung pangan dengan kapasitas rata2 40 ton beras, sedangkan pemerintah memiliki gudang cadangan pangan pemerintah dengan kapasitas 100 ton beras namun belum beroperasi.

Ketersediaan pangan mencerminkan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat sebagai produksi daerah dengan mempertimbangkan penggunaan untuk bibit/benih, industri, kehilangan/susut, ekspor dan stok ditambah impor dan Kabupaten. Produktivitas tanaman pangan utama untuk ketersediaan pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.56
Produksi Tanaman Pangan Utama Kabupaten Banyumas

No	Produksi (Ton)	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanaman Padi	384.942,84	388.194,34	370.946,91	409.053,81	368.957,25	371.827,51
2	Tanaman Jagung	19.498,04	18.422,81	25.992,20	25.397,44	34.052,33	31.784,58
3	Tanaman Kedelai	1.628,00	712,43	1.562,01	3.426,95	1.124,06	298,51

Sumber: Dinpertan KP Kabupaten Banyumas, 2020

Hasil analisis daya dukung pangan/indeks daya dukung lahan untuk pangan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 1,42 dengan kondisi surplus 76.304 ton. Sebagian besar daya dukung pangan di Kabupaten Banyumas dalam kondisi sedang atau bersyarat. Terdapat 5 kecamatan yang masuk dalam status terlampaui yaitu 4 kecamatan Purwokerto dan Kecamatan Banyumas yang mana kebutuhan lebih besar dari ketersediaannya. Kecamatan paling tinggi yang memiliki nilai daya dukung pangan adalah Kecamatan Tambak dengan nilai 2,71. Daya dukung pangan tersebut dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Banyumas, dengan rumus jumlah produksi beras per tahun dibagi dengan jumlah konsumsi beras per tahun.

Kawasan pertanian di Kabupaten Banyumas mencakup Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 32.310 Ha dan Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 13.623 Ha. Kawasan lahan basah

terdapat di wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, dan Kecamatan Wangon. Sementara itu kawasan lahan kering terdapat di Wilayah Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Tambak. Dengan potensi tersebut diharapkan hasta krida Bupati Banyumas untuk peningkatan produksi padi akan dapat terwujud.

Pemenuhan pangan tidak hanya dilihat pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

Dalam Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100).

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Skor pola pangan harapan Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 sebagaiman gambar berikut:

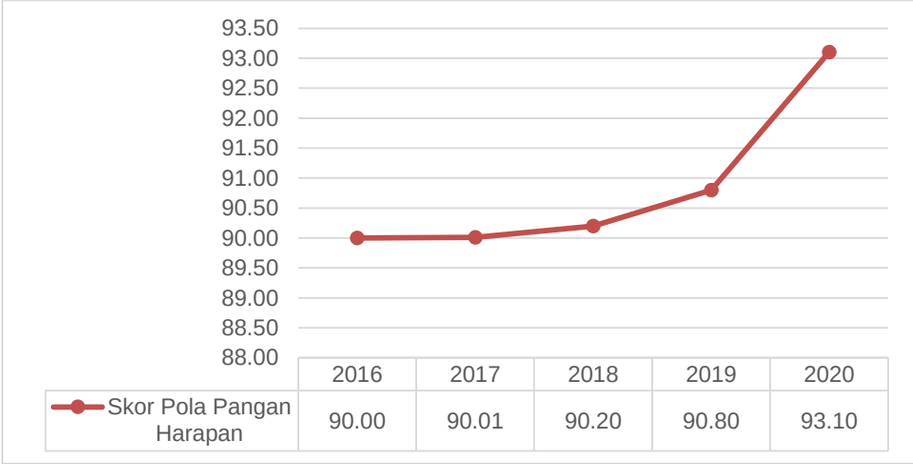

Gambar 2.42
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2016 – 2020
Sumber: Dinas Pertanian dan KP Kab. Banyumas, 2020

2.3.2.4. Pertanahan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan fokus pada penataan penguasanaan tanah milik pemerintah Kabupaten Banyumas. Namun demikian bukan berarti Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak mendukung Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2014-2019 berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas diwujudkan dengan menyediakan peralatan dan sumber daya.

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilatarbelakangi banyaknya sengketa atas tanah dikarenakan belum adanya kepastian hukum atas tanah. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah menjadi perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa PTSL.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu sertifikat tesebut dapat menjadi modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

Kabupaten Banyumas mempunyai luas wilayah 132.759 Ha dengan jumlah bidang tanah kurang lebih 1.076.945 (NOP tahun 2019)

bidang. Dari jumlah tersebut bidang tanah yang terdaftar baru 426.385 bidang (40 %), dan belum terdaftar sebanyak 650.560 bidang (60%). PTSL menjadi program strategis untuk meningkatkan pendaftaran bidang tanah.

Tabel 2.57
Perkembangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Banyumas

	2017	2018	2019
Peta Bidang Tanah (PBT)	24.066	61.400	83.000
Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT)	21.500	50.150	59.000

Sumber: Kantor ATR/BPN Kabupaten Banyumas 2020

Tahun 2020 PTSL di Kabupaten Banyumas mentargetkan 80.000 peta bidang tanah, dan 79.000 SHAT. Jumlah peta bidang tanah tersebut terdiri dari 10.000 partisipatif dan 70.000 bidang non partisipatif. Untuk SHAT terdiri atas 8.750 bidang SHAT Partisipatif, dan SHAT Non Partisipatif 70.250 bidang, pada 58 desa dan 19 kecamatan. Dengan target tersebut Kabupaten Banyumas menjadi wilayah dengan target PTSL terbesar di Jawa Tengah. Diharapkan pada tahun 2023 semua bidang tanah sudah terdaftar atau bersertifikat, dengan target per tahun atau kurang lebih 156.685 bidang per tahun.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas ditunjukan dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pada tahun 2020 terdapat metode analisis IKLH baru yang berbeda dengan yang digunakan pada tahun 2019. Tabel berikut membandingkan target dan hasil analisis kualitas lingkungan hidup dengan 2 metode yang berbeda.

Tabel 2.58
Target dan Realisasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020

Indikator	2019			2020		
	Target	Realisasi metode awal	Realisasi metode baru	Target	Realisasi metode awal	Realisasi metode baru
IKA	54.20	34.67	38.67	54.40	59.33	49.33
IKU	83.10	82.71	82.71	83.20	85.07	85.07
IKTL	56.50	73.52	38.52	56.50	66.81	42.32
IKLH	63.79	64.62	55.85	63.88	70.04	62.27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, 2021

Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banyumas tahun 2020 dengan metode baru adalah 62.27, hal ini berarti bahwa kualitas lingkungan hidup dalam kategori cukup baik.

Selanjutnya berdasarkan kajian KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 status lingkungan Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 2.59
Status Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN
A	**KAPASITAS DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP**		
A.1	Daya Dukung Air Permukaan	• Kebutuhan air (domestik, industri dan pertanian) mencapai 1.031,41 juta m^3/tahun • Potensi ketersediaan air permukaan sebesar 1.303,19 juta m^3/tahun • Daya Dukung Air Permukaan sebesar 1,26 dengan status sedang (bersyarat)	• Secara total masih mencukupi, beberapa daerah yang rendah di Kembaran, Sokaraja, Rawalo, Jatilawang dan Tambak • Adanya ancaman kekeringan di musim kemarau pada pertanian dan masyarakat di kecamatan yang DDAir rendah • Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi sampai 2023 • Keterbatasan ketersediaan air berpengaruh pada kualitas sanitasi masyarakat serta produktivitas pertanian
A.2	Daya Dukung Pangan Pokok	• Produksi beras 256.639 ton/tahun • Kebutuhan mencapai 180.335 ton beras • Daya Dukung Pangan Pokok 1,42 dalam status sedang (bersyarat)	• Ketersediaan pangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kab. Banyumas dan masih memiliki cadangan • Meskipun ada kecenderungan penurunan daya dukung pangan sampai 2023 tetapi tetap surplus • Kawasan perkotaan Purwokerto dan Kec. Banyumas memiliki DD Pangan rendah karena rendahnya lahan pertanian
A.3	Daya Dukung Lahan Terbangun	• Daya Dukung Lahan Terbangun 2,69 dengan status sedang • Kawasan perkotaan dalam kondisi rendah	• Masih banyaknya kawasan hutan dan daerah pegunungan yang menjadi kawasan lindung • Masih tersedia kawasan pengembangan lahan terbangun di luar perkotaan • Kecenderungan turun pada tahun 2023
A.4	Daya Dukung Lingkungan	• Komposisi 30% DD Air + 30% DD Terbangun + 40% DD Pangan • Daya Dukung Lingkungan 1,75 dalam kondisi sedang	• Kondisi daya dukung lingkungan mencerminkan kebutuhan dasar di Kabupaten Banyumas dapat dipenuhi dari sumber daya yang dimiliki • Distribusi peran dan fungsi kawasan (perkotaan dan perdesaan) menunjukkan perbedaan daya dukung per kecamatan • Berdasarkan skenario RTRW akan terjadi penurunan daya dukung lingkungan pada 2023 meskipun masih dalam kondisi sedang

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN
B	**KINERJA LAYANAN ATAU JASA EKOSISTEM**		
B.1	JE Penyedia Pangan	• 26% dalam kondisi rendah (di kawasan gunung dan perkotaan) • 42% dalam kondisi tinggi (di kawasan DAS Serayu dan kawasan pertanian lahan basah)	Ruang yang sesuai untuk menyediakan pangan dalam kondisi masih mampu menyediakan pasokan pangan untuk kebutuhan masyarakat dan memiliki cadangan
B.2	JE Penyedia Air	• 25% dalam kondisi rendah sehingga sulit menampung dan menyimpan air (pada kawasan terbangun) • 46% dalam kondisi tinggi dapat menyimpan dan menyediakan air tanah dan permukaan	Kelas dalam jasa ekosistem penyedia air menunjukkan tinggi rendahnya kapasitas penyimpanan air permukaan dan air tanah. Penggunaan air bawah tanah secara berkelanjutan menjadi alternatif pemenuhan air baku
B.3	JE Pengatur Iklim	• 21% dalam kondisi rendah pada kawasan perkotaan • 61% dalam kondisi tinggi pada kawasan hutan di Gunung Slamet dan kawasan perbukitan dengan tutupan kebun campur	Tinggi dan rendahnya kawasan yang berfungsi sebagai pengaturan iklim menunjukkan kualitas tutupan vegetasi lahan yang berdampak iklim mikro
B.4	JE Pengaturan Tata Air dan Banjir	• 27% dalam kondisi rendah pada kawasan perkotaan dan kawasan dengan lereng tinggi • 38% dalam kondisi tinggi pada kawasan hutan, kebun campur, dan badan air yang memiliki fungsi menampung atau menyerap air	Pada kawasan yang berfungsi sebagai pengaturan tata air dan banjir kelas rendah menyebabkan air melimpah pada musim hujan (banjir) dan langka pada musim kemarau (kekeringan)
B.5	JE Perlindungan Pencegahan Bencana	• 28% dalam kondisi rendah terutama pada kawasan terbangun dan • 44% dalam kondisi tinggi pada kawasan hutan	Ruang perlindungan pencegahan bencana yang rendah mengakibatkan wilayah menjadi rawan terhadap bencana alam terutama jenis bencana hidro-meteorologi
B.6	JE Pemurnian Air	• 21% dalam kondisi rendah pada kawasan perkotaan/terbangun • 68% dalam kondisi tinggi pada hutan, kawasan kebun campur dan badan air	Ruang pemurnian air yang rendah menyebabkan kemampuan purifikasi air polutan secara alami menjadi rendah dan menurunkan kualitas air permukaan dan tanah
B.7	JE Pengurai Limbah	• 21% dalam kondisi rendah pada kawasan padat perkotaan • 68% dalam kondisi tinggi di kawasan hutan dan kebun campur	Rendahnya kawasan dengan fungsi pengurai limbah menyebabkan kemampuan alam untuk meremediasi berbagai polutan rendah yang menyebabkan pencemaran air dan tanah
B.8	JE Kualitas Udara	• 21% dalam kondisi rendah terutama di kawasan perkotaan • 60% dalam kondisi tinggi terutama pada kawasan hutan dan kebun campur	Rendahnya kawasan yang dapat menyediakan kualitas udara yang baik mengindikasikan rendahnya tutupan vegetasi lahan yang mampu mempurifikasi polusi udara
B.9	JE Pendukung Biodiversity	• 23% dalam kondisi rendah pada kawasan terbangun terutama di pusat kota • 53% dalam kondisi tinggi pada hutan, kawasan kebun campur dan pertanian	Kawasan pendukung biodiversity yang rendahnya menunjukkan tingkat biodiversity yang rendah dan kemampuan yang rendah juga dalam memproduksi bahan obat-obatan alami
C	**SUMBER DAYA ALAM**		
C.1	Pertanian	• Ancaman pengurangan lahan sawah untuk kebutuhan pengembangan lahan terbangun dan infrastruktur	Penurunan lahan sawah berdampak menurunnya produksi pangan yang pada

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN
		• Kontribusi pertanian secara luas terhadap PDRB terus menurun dari 13,15% pada tahun 2017 menjadi 11,99% pada 2019. Kontributor terbesar ke-4 setelah industri, perdagangan dan konstruksi • Pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian juga menurun dari 3,17 pada 2017 menjadi 0,31 pada 2019	akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah dan nasional
C.2	Sumber Daya Air	• Sumber air permukaan dari Sungai Serayu, Logawa, dan sungai besar lainnya serta mata air yang berada di kawasan pegunungan. • Peningkatan beban cemar dan sedimentasi menurunkan daya tampung air permukaan dan kualitas sumber daya air	Potensi air permukaan sangat besar di Kabupaten Banyumas, tetapi tantangannya adalah pada kelestarian sumber daya air tersebut yaitu sedimentasi dan pencemaran air yang keduanya menyebabkan kualitas dan kuantitasnya tidak dapat terjaga
C.3	Sumber Daya Mineral	• Potensi besar sumber daya mineral untuk bahan galian antara lain adalah andesit, basalt, tanah liat, tanah urug dan emas • Persebaran potensi sumber daya mineral pada kawasan pegunungan dan perbukitan	Pemanfaatan sumber daya mineral tanpa izin atau mengabaikan reklamasi mengakibatkan peningkatan lahan kritis yang berisiko terhadap peningkatan rawan bencana
D	**RISIKO LINGKUNGAN HIDUP**		
D.1	Kualitas Lingkungan Hidup	• Indeks Kualitas Air dalam kondisi kurang baik yaitu 59,33 • Indeks Kualitas Udara dalam kondisi sangat baik yaitu 85,07 • Indeks Kualitas Tutupan Lahan dalam kategori baik yaitu 66,81 • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam kondisi baik yaitu 70,04	• Indeks kualitas air yang kurang baik menunjukkan bahwa kualitas air permukaan dan tanah yang perlu mendapat perhatian sebagai sumber air baku. • Indeks kualitas tutupan lahan yang baik menunjukkan masih terjaganya luas hutan. • Indeks kualitas udara yang sangat baik menunjukkan kontributor polusi udara yang rendah
D.2	Persampahan	• Total timbulan sampah mencapai 850 ton per hari dari rumah tangga (40% berupa anorganik) dan 10 – 15 ton dihasilkan dari non rumah tangga • Volume sampah yang tertangani di kawasan perkotaan telah mencapai lebih dari 90% • Pengurangan sampah telah mencapai 21,4% • TPA yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung sampah, sehingga dibutuhkan TPA baru	• Peningkatan layanan sampah mengakibatkan kapasitas tampung sampah pada TPA makin terbatas. • Perlu adanya perencanaan baru untuk TPA dengan konsep dikelola/dikurangi
D.3	Risiko Bencana	• Data IRBI Banyumas memiliki indeks 207,2 dalam kategori risiko tinggi terhadap banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung api, kekeringan, serta kebakaran lahan dan hutan • Memiliki jalur patahan yang rawan erosi dan gerakan tanah • Rawan bencana gunung api di kawasan Gunung Slamet • Rawan banjir di daerah dataran rendah dan rawan genangan di kawasan perkotaan	• Jenis bencana erosi dan gerakan tanah merusak infrastruktur dan bangunan permukiman serta berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung • Peningkatan banjir dan kekeringan mengancam kegiatan pertanian

NO.	SUMBER DAYA ALAM/ DDTLH	STATUS	KETERANGAN
5	**KERENTANAN DAN KAPASITAS ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM**		
5.1	Kerentanan Perubahan Iklim	● 225 desa (68%) dalam kondisi agak rentan terhadap kapasitas adaptasi perubahan iklim (SIDIK) ● Ancaman perubahan iklim dalam bentuk cuaca ekstrem dan pergeseran musim berdampak pada peningkatan rawan bencana banjir, longsor dan kekeringan	● Kondisi agak rentan masuk dalam kategori sedang dalam kapasitas adaptasi perubahan iklim dengan variasi bencana banjir, longsor dan kekeringan ● Pergeseran iklim dan cuaca ekstrem meningkatkan potensi bencana dan gagal panen di pertanian
5.2	Ruang Terbuka Hijau	● RTH berada di kawasan perkotaan belum mencapai 20% ● Target RTH dalam tata ruang mencapai 30% dengan komposisi 20% publik dan 10% pada lahan privat	Keterbatasan ruang terbuka hijau berdampak pada kawasan resapan air, kawasan penyerap polusi udara serta terbatasnya ruang-ruang sosial bagi masyarakat di kawasan perkotaan
6	**KETAHANAN DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI**		
6.1	Kondisi Keanekaragaman Hayati	● Indeks keanekaragaman tinggi ada di Lumbir, Rawalo, Baturraden, Kalibagor dan Patikraja ● Indeks keanekaragaman hayati rendah di perkotaan ● Penurunan keanekaragaman hayati antara lain disebabkan oleh pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan bahan hayati dan lahan untuk pengembangan pertanian serta kegiatan pembangunan lainnya.	● Ancaman penurunan keanekaragaman hayati dapat mengganggu bahan hayati dan pangan ● Gangguan pada ekosistem di kawasan pertanian menyebabkan ancaman serangga dan tikus pada permukiman penduduk yang dapat mengancam kesehatan masyarakat
6.2	Sebaran Jasa Ekosistem Penyedia Biodiversity	● 23% dalam kondisi rendah pada kawasan terbangun terutama di pusat kota ● 53% dalam kondisi tinggi pada hutan, kawasan kebun campur dan pertanian	Kawasan pendukung biodiversity yang rendahnya menunjukkan tingkat biodiversity yang rendah dan kemampuan yang rendah juga dalam memproduksi bahan obat-obatan alami

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Berdasarkan status lingkungan tersebut disusun beberapa alternatif skenario lingkungan hidup. Untuk mempertahankan daya dukung air permukaan dapat dilakukan 1) Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian; dan 2) Meningkatkan penangkapan air melalui pembangunan embung dan waduk. Untuk mendukung upaya tersebut dilaksanakan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), serta program pengelolaan sumber daya air (SDA).

Untuk mewujudkan peningkatan layanan sampah perlu diupayakan untuk mereduksi sampah di tingkat sumber dengan menerapkan bank sampah dan TPS 3R, mengembangkan TPST dan pembangunan TPA sebagai penampungan residu melalui program pengelolaan sampah dan program peningkatan pendidikan, pelatihan

dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, serta program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran penting, dikarenakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil terkait dan menjadi akses kepada pelayanan publik lainnya. Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas tempat perekaman data kependudukan ada di tiap kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK. Upaya pelayanan akte kelahiran dengan sistem jemput bola ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Karena meskipun pelayanan tersebut gratis bagi sebagian masyarakat terutama yang jauh dari ibu kota Kabupaten memiliki akte kelahiran memerlukan biaya tinggi.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, untuk menekan penyebaran virus tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang selama ini memberikan pelayanan dengan tatap muka dan online sejak tanggal 18 Maret 2020 hanya memberikan pelayanan online. Administrasi kependudukan yang dilayani secara online meliputi semua layanan administrasi kependudukan yaitu: akta kelahiran, akta kematian, KTP elektronik, kartu identitas anak (KIA), kartu keluarga, perpindahan ke luar, kedatangan, dan sinkronisasi data untuk BPJS, bank, dan sebagainya.

Namun demikian tidak semua penduduk Kabupaten Banyumas dapat memanfaatkan pelayanan kependudukan secara online, sehingga belum semua penduduk yang wajib KTP dapat memiliki KTP. Pada tahun 2020 cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengalami penurunan dari 99,80% pada tahun 2029 menjadi 96,94%. Cakupan penerbitan akta kelahiran mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 87,36% menjadi 97,15% pada tahun 2020. Demikian juga dengan Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%) yang hampir 100 % di tahun 2020 yaitu sebesar 98,33 (mengalami kenaikan dari 98,11% pada tahun 2019).

Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK dan SDM di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60

Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk yang wajib KTP	1.527.297	1.551.071	1.337.689	1.374.934	1.403.957
2	Capaian IKM Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				86,31	86,46
3.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	80,02	81,55	98,19	99,80	96,94
,4.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	86,60	89,01	84,52	87,38	97,15
5.	Jumlah Keluarga (KK)	655.515	636.101	586.247	603.844	618.937
6.	Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%)	94,85	95,37	97,90	98,11	98,33
7	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	84,04	86,6	89.01	84,52	93,15

Sumber : Dinpendukcapil Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemberdayaan masyarakat desa meliputi program/kegiatan:

a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran, penyuluhan, dan Pendampingan Desa;
b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa; yang dilakukan dengan pengembangan paralegal, bantuan hukum, advokasi kebijakan, pengembangan akuntabilitas sosial, pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan Desa, dan pengembangan jurnalisme warga;
c. penguatan kelembagaan Desa dinamis yang dilakukan melalui ketahanan sosial masyarakat Desa dan perdesaan, kaderisasi masyarakat Desa, advokasi kewenangan dan regulasi Desa, konsolidasi partisipasi masyarakat Desa, dan penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial;
d. penguatan budaya Desa adaptif dilakukan melalui pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan, pengembangan Desa inklusif dan desa adat, swakelola Pembangunan Desa, pemajuan kebudayaan Desa, pemberdayaan masyarakat adat, Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pembinaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Banyumas meliputi fasilitasi kerja sama antar desa, pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembangunan kesehatan adalah posyandu. Posyandu merupakan bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehtan dasar meliputi KB, KIA, Gizi, imunisasi, penanggulangan diar dan ISPA. Jumlah posyandu di Kabupaten Banyumas tahun 2020 adalah 2530 dengan posyandu aktif sebanyak 1992 atau 78,7%.

Upaya pemberdayaan masyarakat lainnya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong pengembangan bumdes di 301 desa di Kabupaten Banyumas. Sampai dengan 2020 telah terbentuk 251 bumdes dengan klasifikasi 142 unit bumdes dasar, 91 unit bumdes tumbuh, dan 6 unit bumdes berkembang. Dari 251 Bumdes di Kabupaten Banyumas yang sudah teregistrasi di Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi sebanyak 223 Bumdes. Kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.61
Capaian kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu (unit)	-	-	-	-	2530
2	Jumlah Posyandu aktif (unit)	-	-	-	-	1992
3.	Prosentase Posyandu aktif (%)	-	-	-	-	78,7
,4.	Jumlah Bumdes (unit)	124	178	190	239	296
5.	Jumlah bumdes dasar (unit)	124	174	184	142	117
6.	Jumlah bumdes tumbuh (unit)	0	4	4	91	153
7	Jumlah bumdes berkembang (unit)	0	0	2	6	23
8	Jumlah bumdes Maju (unit)	0	0	0	0	3
9	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk (kawasan)	NA	NA	2	2	3

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Struktur penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2020 didominasi kelompok usia produktif sebagai sumber daya pembangunan. Kabupaten Banyumas diperkirakan akan mengalami bonus demografi sekitar tahun 2030. Untuk dapat mewujudkan bonus demografi salah satu faktor penting adalah pengedalian penduduk.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keluarga Berencana telah disiapkan petugas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana).

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menentukan rasio PLKB dengan kelurahan/desa adalah 1:2 artinya 1 PLKB melayani 2 desa. Rasio PLKB dengan desa/Kelurahan di tahun 2019 adalah 2,76 artinya 1 PLKB mendampingi 2–3 Desa/kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PLKB di Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan target SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu 2016-2020 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif	250.652	254.357	229.288	243.562	233.481
2	Cakupan peserta KB aktif (%)	77,92	78,59	74,93	75,47	73,67
3	Jumlah peserta KB baru	41,703	37,263	37.934	31.222	26.781
4	Unmeetneed KB	32.022	30.505	38.241	40.629	42.155
5	Persentase Drop Out (DO) KB	11,2	15,16	17,95	7,39	15,13
6	Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)	33,7	29,6	33,6	34	32,2
7.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	60,37	66,88	68,58	70,5	62,13
8.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1,72	1,21			
9.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,86	0,84	6,27	2,64	1,8
10.	Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	42,84	41,9	40,81	39,11	37,48
	Persentase keluarga Pra Sejahtera (%)	20,68	22,26	21,42	20,68	19,94
	Persentase keluarga Pra Sejahtera I (%)	18,43	19,67	19,39	18,43	17,54
11.	Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB	100	100	100	100	100
12	Rasio Akseptor KB	77,92	78,59	74,93	75,47	73,67
13.	Jumlah PIK	63	77	94	95	109
14.	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1
15.	Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang)	2,09	2,2	4,08	4,08	3,8
16.	Rasio PPKBD dengan Desa/Kelurahan (orang)	1	1	1	1	1
17.	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,17	2,3	2.72	2.09	2,29

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.2.9. Perhubungan

Pembangunan bidang perhubungan ditujukan untuk mencapai sasaran meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang perhubungan. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi merupakan upaya mendukung permukiman yang layak dan berkelanjutan, mendorong produktiitas daerah dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas, korban, dan nilai kerugian akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyumas tahun 2018-2020 cenderung meningkat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.63
Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas, Korban dan Nilai Kerugiannya di Wilayah Kabupaten Banyumas

Kondisi	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah Kecelakaan	940	1,050	1,574
Korban Meninggal	220	224	217
Korban Luka Berat	1	7	1
Korban Luka Ringan	1,030	1,149	1,765
Kerugian Material (ribu rupiah)	609,790,000	685,580,000	952,820,000

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2020

Banyaknya titik rawan kecelakaan di Kabupaten Banyumas menjadi penyebab banyaknya kecelakaan lalu lintas. Di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 28 titik rawan kecelakaan, baik pada status jalan kabupaten, provinsi dan nasional.

Tabel 2.64
Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Banyumas dan Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas

NO	Nama Jalan	2018			2019			2020			STATUS JALAN
		MD	LB	LR	MD	LB	LR	MD	LB	LR	
1	Jl. Raya Ajibarang - Gumelar	3	0	10	3	0	6	1	0	14	KABUPATEN
2	Jl. Jend. Sudirman Sokaraja	1	0	8	1	0	17	3	0	13	KABUPATEN
3	Jl. Mentri Supeno, Sokaraja	2	0	8	2	0	10	2	0	14	KABUPATEN
4	Jl. Gatot Subroto Purwokerto	0	0	6	5	0	9	2	0	10	KEBUPATEN
5	Jl. Gatot Subroto Sokaraja -	4	0	20	4	0	30	5	0	31	PROVINSI
6	Jl. Raya Patikraja - Kaliori	7	0	19	0	0	8	2	0	25	PROVINSI
7	Jl. Raya Purwokerto - Pegalongan Gunung Tugel	2	0	8	3	0	6	4	0	16	PROVINSI
8	Jl. Ajibarang - Purwokerto	8	0	39	26	0	114	6	0	45	NASIONAL
9	Jl. Raya Ajibarang - Wangon	8	0	54	5	0	11	8	0	49	NASIONAL
10	Jl. Jend.Sudirman Purwokerto	3	0	24	7	0	52	8	0	18	NASIONAL
11	Jl. Raya Sumpiuh - Buntu	11	0	25	0	2	49	6	0	15	NASIONAL
12	Jl. Raya Banyumas -	5	0	15	9	0	45	5	0	21	NASIONAL
13	Jl. Raya Sumpiuh - Tambak	10	0	11	1	0	8	11	0	42	NASIONAL
14	Jl. Raya Lumbir - Wangon	9	0	30	1	0	6	7	0	39	NASIONAL
15	Jl. Raya Baturaden	9	0	37	3	0	21	1	0	27	NASIONAL
16	Jl. Raya Rawalo - Jatilawang	5	0	9	13	0	38	2	0	7	NASIONAL
17	Jl. Raya Wangon - Jatilawang	10	0	22	5	0	14	4	0	21	NASIONAL
18	Jl. Raya Cilongok - Purwokerto	11	0	21	0	0	17	6	0	16	NASIONAL
19	Jl. Raya Wangon	0	0	0	11	0	51	2	0	3	NASIONAL
20	Jl. Letjend.Suprapto Sokaraja	3	0	19	1	0	0	8	0	33	NASIONAL
21	Jl. Raya Ajibarang - Bumiayu	1	0	11	3	0	6	8	0	31	NASIONAL
22	Jl. Raya Suparjo Rustam	6	0	10	3	0	20	1	0	16	NASIONAL
23	Jl. Patikraja - Rawalo	5	0	34	0	0	4	1	0	18	NASIONAL
24	Jl. Raya Banyumas -	1	0	14	5	0	6	3	0	22	NASIONAL
25	Jl. Raya Wangon - Cilacap	5	0	10	0	0	1	3	0	28	NASIONAL
26	Jl. Patikraja - Purwokerto	2	0	15	1	1	7	4	1	14	NASIONAL
27	Jl. Yos Sudarso	2	0	6	6	0	15	0	0	9	NASIONAL
28	Jl. Gerilya Purwokerto	1	0	13	2	0	15	1	0	16	NASIONAL

NO	Nama Jalan	2018			2019			2020			STATUS JALAN
		MD	LB	LR	MD	LB	LR	MD	LB	LR	
	Jumlah	115	0	419	102	3	500	95	1	490	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2021

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang urusan perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pencapaian sasaran pembangunan perhubungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas yang perkembangannya dari tahun 2016-2020 ditunjukan tabel berikut:

Tabel 2.65
Jumlah Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Sarana dan prasarana lalu lintas (unit)	Kebutuhan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terminal*)	8	3	3	3	3	3
2	Halte	100	21	28	53	56	56
3	LPJU	102.743			19.047	19.847	20.886
4	Rambu Lalu Lintas (unit)	10.276	4.290	4.766	5.166	5.700	5.899
5	Rambu (pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) (unit)	1.685	421	441	449	447	497
6	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit)	84	58	61	62	64	
7	Warning Lamp (unit)	311	149	155	166	189	190
8	Marka Jalan (m2)	59.940	29.970	38.932	45.868	47.662	48.862

*) kebutuhan terminal di Kabupaten Banyumas sesuai RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2020

Jumlah sarana prasarana lalu lintas terus bertambah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, namun demikian jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan riil sarana prasarana lalu lintas di lapangan.

Bangunan Terminal tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai SK Bupati Banyumas Nomor 480/324 Tahun 2016 yaitu terminal Ajibarang dan Terminal Wangon telah memenuhi sebagian besar standar pelayanan penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015.

Tabel 2.66
Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan
Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada Terminal Wangon dan
Terminal Ajibarang Kabupaten Banyumas

No.	Jenis Pelayanan	Tolok Ukur Indikator Terminal Tipe C	Terminal Wangon		Terminal Ajibarang	
			Ketersediaan	Kondisi	Ketersediaan	Kondisi
1	Keselamatan					

No.	Jenis Pelayanan	Tolok Ukur Indikator Terminal Tipe C	Terminal Wangon		Terminal Ajibarang	
			Ketersediaan	Kondisi	Ketersediaan	Kondisi
	a. Lajur Pejalan Kaki	Tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Ada	Baik	Ada	Baik
	b. Fasilitas jalan	Tersedia fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, penerangan jalan, pagar)	Ada	Baik	Ada	Baik
	c. Jalur Evakuasi	Tersedia jalur evakuasi	Ada	Baik	Ada	Baik
	d. Alat Pemadam Kebakaran	Tersedia alat pemadam kebakaran	Ada	Baik	Ada	Baik
	e. Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Tersedia pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Ada	Baik	Ada	Baik
2	Keamanan					
	a. Fasilitas Keamanan	Tersedia pos keamanan	Ada	Baik	Ada	Baik
	b. Media pengaduan gangguan keamanan	Tersedia stiker pada tempat yang strategis dan mudah	Ada	Baik	Ada	Baik
	c. Petugas Keamanan	Minimal 1 (satu) petugas berseragam	Ada	-	Ada	-
3	Kehandalan / Keteraturan		-	-	-	-
4	Kenyamanan					
	a. Ruang tunggu	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari area terminal	Ada	Rusak sedang	Ada	Rusak sedang
	b. Toilet		Ada	Rusak sedang	Ada	Rusak sedang
	c. Fasilitas peribadatan/ mushola	3 orang (laki-laki atau perempuan)	Ada	-	Ada	Baik
	d. Ruang terbuka hijau	Tersedia ruang terbuka hijau Tersedia tempat sampah	Ada	Baik	Ada	Baik
	e. Rumah makan	Tersedia fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan	Ada	Rusak sedang	Ada	Rusak parah
	f. Fasilitas dan Petugas Kebersihan	Tersedia fasilitas dan Petugas Kebersihan	Ada	Baik	Ada	Baik
	g. Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	-	-	-	-
	h. Area merokok (smoking area)	Tersedia smoking area	Tidak ada	-	Tidak ada	-
	i. Drainase	tersedia drainase yang memadai				
	j. Lampu penerangan ruangan	tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi	Ada	-	Ada	-
5	Kemudahan / Keterjangkauan					

No.	Jenis Pelayanan	Tolok Ukur Indikator Terminal Tipe C	Terminal Wangon		Terminal Ajibarang	
			Ketersediaan	Kondisi	Ketersediaan	Kondisi
	a. Letak jalur pemberangkatan	Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap & teratur	Ada	-	Ada	-
	b. Letak jalur kedatangan	Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap & teratur	Ada	-	Ada	-
	c. Informasi Pelayanan	Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca	-	-	-	-
		Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh penggunajasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	-	-	-	-
	d. Informasi angkutan lanjutan	Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca	-	-	-	-
	e. Tempat naik/turun penumpang	Tinggi platform sama dengan tinggi lantai bus	-	-	-	-
	f. Tempat Parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tersedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia	Ada	Baik	Ada	Baik
6	Kesetaraan					
	Ruang ibu menyusui	Tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas menyusui dan bayi lengkap untuk ibu	Ada	Baik	Ada	Rusak sedang

Sumber: DInhub Kabupaten Banyumas, 2021

Kelaikan kendaraan juga menjadi aspek penting untuk keselamatan dan keamanan transportasi. Dalam aspek kelaikan kendaraan, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tambahan alat pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan layanan pengujian kendaraan yang sudah dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Kementerian Perhubungan. Namun dengan Pandemi COVID-19 anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan pandemi. Penambahan alat pengujian kendaraan bermotor akan dapat memberikan pelayanan yang memadai bagi kendaraan bermotor yang wajib diuji di wilayah Kabupaten Banyumas dan wilayah sekitar, sehingga dapat menjadi sumber PAD bagi Kabupaten Banyumas.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan ketersediaan angkutan jalan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.67
Jumlah penumpang Angkutan Umum, Trayek, dan Uji KIR di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penumpang angkutan umum (orang)					
	Bus AKAP	2.802.568	2.688.073	1.238.867	1.124.467	1.053.037
	Bus AKDP	1.393.122	1.380.106	1.300.302	1.220.502	1.105.257
	Mikrobus	2.240.150	2.170.452	244.695	161.801	220.226
	Angkota/Angkudes	1.185.413	1.303.104	153.513	139.556	122.810
2	Jumlah trayek angkutan umum (unit)					
	AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	570	570	566	582	323
	AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	70	70	70	96	39
	AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi)	90	90	90	85	28
	AJAP (Antar Jemput antar Provinsi)	16	16	16	16	17
	Angkutan Kota	344	344	332	332	328
	Angkutan Desa	506	506	486	888	621
	Taksi	170	170	170	170	160
3	Rasio ijin trayek	0,056	0,064	0,066	0,068	0,071
4	Jumlah angkutan wisata (unit)	104	104	104	118	52
5	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	13.486	13.199	13.019	11.626	15.585
6	Jumlah Uji KIR angkutan umum :					
	Mobil penumpang umum	261	321	233	217	43
	Mobil Bus	3.203	3.217	2.955	2.533	1.601
	Mobil Barang	22.909	22.719	21.183	18.610	12.114
	Mobil Gandengan	209	186	158	103	41

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2020

Data jumlah penumpang angkota/angkudes mulai tahun 2018 hanya dihitung dari jumlah penumpang yang masuk/keluar melalui terminal tipe C yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas, sehingga data menurun sangat signifikan.

Pada tahun 2020 jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Banyumas adalah 15.585 unit, yang terdiri atas mobil penumpang umum, bus, mobil barang, dan mobil gandengan. Dari jumlah tersebut yang telah melakukan uji adalah 43 unit mobil penumpang umum, 1.601 unit bus, 12.114 unit mobil barang, dan 41 mobil gandengan. Sebanyak 1.785 unit kendaraan wajib uji tidak melakukan uji kendaraan/tidak melakukan uji kendaraan di Kabupaten Banyumas.

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Jumlah trayek angkutan umum pada tahun 2020 ikut terdampak pandemi sehingga jumlahnya mengalami penurunan. Untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan meningkatkan konektivitas wilayah Dinas Perhubungan akan mengembangkan angkutan sungai dan angkutan massal perkotaan melalui program *Buy The Service* (BTS).

Penyelenggaraan angkutan sungai merupakan upaya pemanfaatan potensi Sungai Serayu sebagai jalur transportasi dan hibah pemerintah untuk pengembangan angkutan sungai. Selain untuk memberikan alternatif moda transportasi, angkutan sungai menjadi dukungan bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas.

Program *Buy The Service* (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal perkotaan dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisne lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing bekerjasama dengan Kementrian Perhubungan. Program BTS dilatarbelakangi permasalahan kemacetan serta tidak tertatanya sistem transportasi publik yang baik sehingga menyebabkan pemborosan, permasalahan lingkungan kerugian ekonomi, hingga kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain angkutan massal perkotaan merupakan *public goods*, sehingga Pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Jalur BRT yang dikembangkan meliputi: 1) Pasar Pon – Ajibarang, 2) Terminal Notog Patikraja – Baturaden, dan 3) Terminal Bulupitu - Terminal Kebondalem. Jalur Terminal Bulupitu - Terminal Kebondalem diintegrasikan dengan Trans Jateng Koridor Purwokerto-Purbalingga. Operasional BTS akan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dipilih melalui mekanisme lelang.

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Kewenangan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.

Petunjuk pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Lingkup Peraturan Gubernur tersebut diantaranya adalah Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID. Kelembagaan PPID pada Pemerintah Kabupaten Banyumas diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan melalui website http://ppid.banyumaskab.go.id. Informasi yang tersedia meliputi: a) Informasi Harga Pasar, b) Informasi Produk Hukum, c) Informasi Layanan Pengadaan Barang secara elektronik, d) Informasi Aduan, dan e) Informasi Keuangan Daerah.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan penilaian terhadap Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 di kabupaten/kota,

meliputi muatan atau content dari website PPID dan visiting ke desk layanan informasi, serta jawaban kuesioner. Hasil penilaian tersebut PPID Kabupaten Banyumas menjadi salah satu pemerintah daerah di Jawa Tengah yang dinilai memiliki tata kelola informasi publik yang dengan kategori menuju informatif dengan nilai 88.62 pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Award 2019.

Kewenangan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik meliputi unsur-unsur: tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan dan audit TIK.

Infrastruktur komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Banyumas secara umum disediakan oleh swasta dan BUMN, telah menjangkau sebagian besar wilayah. Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pelayanan publik berbasis elektronik, baik dalam penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat maupun pelayanan publik lainnya. Dengan pelayanan publik berbasis elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan, kecepatan serta keterbukaan pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memiliki infrastruktur pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.68
Fasilitas Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah
1	Website milik pemerintah daerah	357
2	Perangkat Daerah terhubung FO	27
3	Aplikasi pemerintah daerah (dalam e-office)	60
4	Pusat Data Terstandar	1
5	Smart Room	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, 2021

Untuk mendukung penerapan SPBE 27 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah terhubung dengan fiber optic dan infrastruktur komunikasi dan informatika lain yang disediakan oleh penyedia layanan.

Peran BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika telah memperluas akses terhadap ponsel dan internet. Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas Tahun 2020, pada tahun 2020, pengguna ponsel/komputer telah mencakup 81,42% anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas, dan 57,60 % anggota rumah tangga anggota rumah tangga di Kabupaten Banyumas telah mengakses internet.

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan koperasi di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan jumlah koperasi selama kurun waktu 2016-2020, dari 544 unit pada tahun 2016 meningkat menjadi 558 unit pada tahun 2020. Persentase koperasi aktif juga mengalami peningkatan, dari sebesar 77,02% pada tahun 2016 menjadi 80,65% pada tahun 2020. Namun demikian, persentase koperasi tidak sehat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 69,96 menjadi 71,56% pada tahun 2020. Banyaknya koperasi yang tidak sehat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menjadikan koperasi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk itu diperlukan usaha keras dan juga pengawasan serta pembinaan agar koperasi sehat di Kabupaten Banyumas terus meningkat jumlahnya. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas SDM bidang perkoperasian dimana koperasi yang ada diikutkan dalam pendidikan dan latihan perkoperasian serta para pembina koperasi juga dipahamkan ketika melakukan penilaian koperasi. Perkembangan koperasi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Perkembangan Capaian Kinerja Koperasi Tahun 2016–2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Koperasi (unit)	544	546	546	554	558
2.	Persentase koperasi aktif (%)	77,02	77,29	80,22	80,51	80,65
3.	Koperasi Kategori Sehat (%)	30,07	30,09	29,22	28,92	28,44
4.	Koperasi Kategori tidak Sehat (%)	69,93	69,91	70,78	71,08	71,56

Sumber : Dinakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, 2020

Peran dan perkembangan koperasi berkaitan erat dengan sektor usaha mikro kecil di Kabupaten Banyumas. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil (UMK) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Dalam hal ini pemberdayaan UMK, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan UMK yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job).

Pertumbuhan usaha mikro kecil di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari tumbuhnya unit UMK dan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMK. Rata-rata setiap unit usaha mempekerjakan 1-3 orang pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas, terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja,

penggunaan bahan baku lokal dan perekonomian daerah. Sebagian besar hasil produksi UMK masih dipasarkan di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Banyumas masih terkendala dalam hal perijinan usaha dan permodalan, ketrampilan manajemen dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha. Keterbatasan tersebut menjadikan perkembangan omset usaha dan keuntungan yang diperoleh sebagian besar UMK masih kecil, dengan realisasi peningkatan omzet baru mencapai 1,06% belum mencapai target 2020 sebesar 3% atau baru tercapai 35,33% dan target akhir RPJMD sebesar 6% atau baru tercapai 17,67%.

Jumlah anggota UMKM yang memperoleh fasilitas permodalan usaha di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2019 sebanyak 9.205 orang anggota UMKM. Meningkat pada tahun 2020 sebanyak 9.674 orang anggota UMKM atau sebesar11,18% dari total UMKM tahun 2020 sebesar 86.545 UMKM. Sebagian besar UMKM memperoleh program Pemerintah melalui Kredit Usah Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Karena masih banyaknya UMKM yang belum memperoleh fasilitas permodalan tersebut, maka diperlukan peran pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM.

Dalam kegiatan usahanya usaha mikro, kecil dan menengah juga menghadapi tantangan dalam peningkatan mutu dan pemasaran produk UMK. Perkembangan UMK dan jumlah tenaga kerja terserap di Kabupaten Banyumas tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)	66.689	66.973	85.948	86.228	86.645
2.	Jumlah tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (orang)	95.955	95.955	126.986	128.188	128.952
3.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang telah memiliki ijin usaha (unit)	6.720	6.720	6.720	8.653	19.865
4.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang telah memperoleh fasilitas permodalan usaha (orang)	7.184	8.020	8.539	9.205	9.674

Sumber : Dinakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, 2020

Pandemi COVID-19 menghambat kegiatan usaha, namun di sisi lain juga memunculkan usaha mikro baru akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja. Dukungan pemerintah dalam peningkatan UMK di Kabupaten Banyumas sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi wilayah.

2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal di daerah menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran. Keberadaan penanam modal (investor)

dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas. Jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Banyumas kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Nilai investasi dan tenaga kerja yang terserap mengalami perkembangan fluktuatif.

Tabel 2.71
Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah investor (PMDN/ PMA)	1.041	102	183	210	413
2.	Jumlah investasi (Juta Rp)	455.696,15	583.401,95	625.635,30	761.621,39	1.077.955,78
3.	Jumlah tenaga kerja terserap (orang)	12.683	1.079	1.406	4.688	4.568
4.	Rasio daya serap tenaga kerja	12,18	10,58	7,68	22,32	11,06

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, 2020.

Kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Banyumas menentukan daya saing Kabupaten Banyumas. Dari data lima tahunan (2016-2020) di atas menunjukkan volatilitas pola investasi yang masuk ke Kabupaten Banyumas. Meskipun secara besaran dana mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun dari jumlah investor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan posisi Kabupaten Banyumas yang semakin kompetitif, atau semakin menarik bagi investor-investor besar. Investasi besar memang diperlukan untuk menyerap banyak tenaga kerja, sehingga minimal dua hal bisa tereduksi, yaitu kemiskinan dan masalah migrasi penduduk ke kota besar untuk mencari pekerjaan.

Proses pelayanan perizinan di DPMPPTSP Kabupaten Banyumas sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dari 1-10 hari pada tahun 2016 menjadi 1-7 hari pada tahun 2017 dan 2019. Saat ini seluruh daerah sedang menyederhanakan proses perizinan, dengan asumsi semakin sederhana proses, maka waktu pelayanan akan semakin cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu berupaya meningkatkan pelayanan perizinan melalui inovasi-inovasi, khususnya yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi serta penyederhanaan prosedur.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata memberikan pembinaan kepada organisasi kepemudaan yang ada, dan memfasilitasi pemuda berprestasi untuk mengikuti kompetisi kepemudaan.

Pembangunan di bidang olahraga menunjukkan perkembangan yang cukup dan menggembirakan. Organisasi olahraga di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2016-2020, tercatat sebanyak 202 buah. Fasilitas olahraga berupa prasarana lapangan olahraga di Kabupaten Banyumas cukup tersedia, untuk jumlah lapangan olahraga tercatat pada tahun 2016-2020 tercatat 657.

Perkembangan jumlah organisasi pemuda, organisasi olahraga dan jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.72
Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga dan Lapangan Olahraga Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda (unit)	143	143	143	143	145
	Organisasi kesiswaan (OSIS) (unit)	304	304	304	304	304
	Organisasi Mahasiswa (BEM) (unit)	11	11	11	11	11
	Organisasi KNPI (unit)	1	1	1	1	1
	Organisasi kepramukaan (gudep)	2.606	2.606	2.606	2.606	2.608
2.	Jumlah organisasi pemuda yang telah dibina					
	Organisasi kesiswaan (OSIS) (unit)	304	304	304	304	304
	Organisasi mahasiswa (BEM) (unit)	11	11	11	11	11
	Organisasi KNPI (unit)	1	1	1	1	1
	Organisasi kepramukaan (gudep)	2.606	2.606	2.606	2.606	2.608
3.	Jumlah organisasi olahraga (organisasi)	202	202	202	202	200
4.	Jumlah lapangan olahraga (lapangan)	657	657	657	657	657

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2020.

Selain beberapa indikator di atas, urusan kepemudaan dan olahraga masih menyimpan berbagai kinerjanya yang bisa mencerminkan kinerjanya yaitu peningkatan perolehan medali di tingkat provinsi dan nasional tahun 2020 sebesar 1,25% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 8,52%. Cakupan pembinaan atlet muda atau pelajar tahun 2020 sebesar 1,56% dan ini juga menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,43%.

2.3.2.14. Statistik

Urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan guna menyediakan publikasi data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Penyusunan data statistik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah adalah statistik sektoral. Data statistik sektoral senantiasa dilakukan update setiap tahunnya, namun demikian data yang diproduksi belum melalui proses validasi data sebagaimana ketentuan penyelenggaraan satu data. Statistik sektoral Kabupaten Banyumas disusun dalam buku Data dan Informasi Kabupaten Banyumas dan dipublikasikan melalui website Pemerintah Kabupaten Banyumas (www.banyumaskab.go.id), guna memenuhi informasi statistik yang transparan dan murah.

Ketersediaan data statitik dasar dan khusus disediakan oleh Badan Pusat Ststistik (BPS) Kabupaten Banyumas, meliputi antara lain Kabupaten Banyumas Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat diperoleh pada website http://banyumaskab.bps.go.id/.

Guna mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi dan meningkatkan pelayanan statistik diperlukan sistem informasi/aplikasi program interface (API) untuk mengintegrasikan sistem informasi yang ada di masing masing organisasi perangkat daerah.

2.3.2.15. Persandian

Untuk keamanan data dan informasi merupakan kebutuhan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas yang mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Keamanan SPBE merupakan bagian dari arsitektur SPBE. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, dimana masyarakat dapat mengakses segala jenis informasi termasuk data dan informasi dari pemerintah diperlukan pengamanan data pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE. Sampai dengan tahun 2020, 27 OPD di Kabupaten Banyumas telah menggunakan layanan keamanan informasi. Dari 56 OPD (29 dinas/badan dan 27 kecamatan) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas baru 43% yang menggunakan layanan keamanan data dan informasi.

Untuk pemenuhan standard keamaan informasi dilaksanakan audit keamanan data ISO 27001. Dinas komunikasi dan informatika sebagai pengelola data dan informasi telah mampu memenuhi standarisasi keamanan data ISO 27001. Namun untuk standarisasi pusat data/data center tahun 2019 tidak dilaksanakan audit dikarenakan data center di Kabupaten Banyumas dalam tahap pengembangan.

2.3.2.16. Kebudayaan

Sebagai tonggak penunjang berdirinya kebudayaan nasional di Indonesia, kebudayaan daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan terkait eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang muncul antara lain semakin melunturnya nilai-nilai serta penghargaan terhadap kebudayaan daerah itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan semakin lunturnya minat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal adalah minimnya usaha pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah, serta menguatnya gempuran budaya asing yang masuk melalui saluran teknologi informasi yang semakin bebas dan cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengantisipasi permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa program kegiatan yang mengarah kepada pembinaan, pelestarian dan juga pembangunan sarana prasarana penyelenggaraan kebudayaan lokal beserta dengan unsur yang terbentuk di dalamnya.

Dalam rangka melestarikan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan penyelenggaran festival seni dan budaya yang rutin digelar setiap tahun. Penyelenggaran festival seni dan budaya antara lain menampilkan pagelaran kesenian buncis karawitan, calung dan macapat, serta beberapa kebudayaan lain seperti wayang kulit, lengger dan kesenian kenthongan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat cukup signifikan, namun kualitas pelaksanaannya masih

perlu ditingkatkan. Tema maupun isi setiap festival perlu dipertajam, sehingga jelas perbedaan antara masing-masing festival. Pemasaran untuk setiap event tersebut juga perlu dikoordinasi dengan lebih baik lagi, sehingga benar-benar mampu menarik wisatawan seluas-luasnya.

Dukungan pemerintah dalam rangka memberikan ruang untuk mengekpresikan bentuk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan pembangunan dan penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya berupa Gedung Kesenian Sutedja. Selain itu beberapa taman juga dilengkapi dengan panggung sehingga sekaligus dapat digunakan untuk kegiatan budaya.

Dalam rangka menjaga serta melestarikan beberapa benda bersejarah, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya. Selama kurun waktu 5 tahun 2015-2019 tercatat terdapat 59 benda bersejarah, berupa benda, situs dan Kawasan cagar budaya telah mendapatkan tindakan pelestarian/konservasi.

Pembinaan terhadap unsur kebudayaan dan seni juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Hingga tahun 2020 jumlah kelompok group kesenian di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 2.508 kelompok. Jumlah kelompok group kesenian yang mendapat pembinaan diupayakan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 sebanyak 201 kelompok group kesenian telah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Peningkatan porsi pembinaan penting sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk kesenian, pembinaan juga penting untuk merawat komitmen dan semangat para pelaku seni.

Kinerja bidang kebudayaan pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73
Kinerja Kebudayaan Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	5	24	24	25	306
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	6	6	6	6	6
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	59	59	59	59	60
4.	Jumlah group kesenian (kelompok)	1.633	1.633	1.633	1.717	2.508
5.	Jumlah group kesenian yang telah dibina (kelompok)	157	157	157	200	201
6.	Jumlah seniman (orang)					
	Penari	1.529	1.529	1.529	8.520	8.525
	Pemain teater	900	900	900	7.400	7.405
	Pelukis	112	112	112	112	112
	Pemusik	5.983	5.983	5.983	6.300	6.300

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.2.17. Perpustakaan

Sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu pengetahuan, perpustakaan mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan bangsa agar tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2016-2020

telah memiliki 919 perpustakaan yang terdiri dari 1 perpustakaan daerah, 5 perpustakaan keliling, 820 perpustakaan sekolah, 53 perpustakaan desa, 4 perpustakaan rumah ibadah, 19 taman bacaan masyarakat dan 17 perpustakaan perguruan tinggi. dimana jumlah ini menurun dari tahun 2016 sebesar 1191 perpustakaan dimana jumlah yang paling besar adalah penurunan perhitungan perpustakaan sekolah dimana mulai tahun 2018 jenjang pendidikan SMA sudah bukan kewenangan Kabupaten sehingga kinerja perpustakaan jenjang SMA/SMK/MAN tidak lagi wewenang Kabupaten, dari Jumlah pengunjung perpustakaan daerah terus meningkat dari tahun 2016-2019 namun di tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan daerah mengalami penurunan dari 1.332.667 pengunjung di tahun 2019 menjadi 587.339 pengunjung atau turun sekitar 44,07% ini dikarenakan di tahun 2020 terjadi bencana Covid 19 sehingga mulai bulan April 2020 Perpustakaan daerah dan perpustakaan lainnya di Kabupaten Banyumas di tutup dan tidak ada pengunjung

Dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah selain penambahan koleksi buku, juga dilakukan penambahan fasilitas berupa internet gratis, serta fasilitas Wi fi/Hot Spot secara gratis/free acces. Selain itu Perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas akan menggunakan sistem otomasi dalam hal layanan pencarian katalog buku. Capaian indikator Urusan Perpustakaan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74
Kinerja Bidang Perpustakaan Tahun 2016-2020

No.	Kondisi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan (unit)	1.191	1.191	897	897	919
	Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
	Perpustakaan keliling	4	4	6	6	5
	Perpustakaan Sekolah	1073	1073	798	798	820
	Perpustakaan Desa	52	52	53	53	53
	Perpustakaan Rumah ibadah	4	4	4	4	4
	Taman Bacaan Masyarakat	44	44	18	18	19
	Perustakaan Perguruan Tinggi	13	13	17	17	17
2.	Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah (orang)	9.181	12.795	15.403	17.396	17361
3.	Jumlah peminjam buku perpustakaan Daerah pertahun (orang)	69.341	77.638	36.308	32.865	4.594
4.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun (orang)	925.127	942.182	1.009.646	1.332.677	587.339
5.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	55.334	59.313	53.164	56.407	61.335

Sumber : Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas, 2020

Tabel 2.75
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016 - 2020

No.	Nama	Pengujung Th.2016	Pengujung Th.2017	Pengujung Th.2018	Pengujung Th.2019	Pengujung Th.2020
1.	Perpustakaan Daerah	59.620	61.100	63.244	80.030	51.806
2.	Perpustakaan keliling	23.200	29.408	25.338	20.535	-
3.	Perpustakaan Sekolah SD	32.200	33.352	137.227	268.084	140.918
4.	Perpustakaan SMP	234.400	236.315	248.612	369.588	300.510
5.	Perpustakaan SMA	224.565	225.860	227.210	101.894	78.540
6.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	342.500	347.121	296.787	481.246	14.141
7.	Taman Bacaan Masyarakat	8.642	9.026	11.228	11.300	1.424
Jumlah seluruh		925.127	942.182	1.009.646	1.332.677	587.339

Sumber: Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan kerasipan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dan perlu adanya penyeragaman dan penyamaan persepsi dari masing-masing institusi dalam menyusun dan mengorganisir kearsipan, untuk menunjang tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Perbup Nomor 190 Tahun 2005 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Perbup Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun pedoman penataan dan klasifikasi arsip sebagai acuan seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan kearsipan. Selanjutnya pada tahun tahun 2009 diterapkan Sistem Pengelolaan Arsip secara baku sesuai dengan pedoman sebanyak organisasi perangkat daerah dan UPTD serta Arsip di Pemerintahan Desa. Dukungan sumberdaya manusia yang memadai dan kompeten di bidang pengelolaan kearsipan diharapkan penyelenggaraan kearsipan akan optimal. Untuk peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan selama periode tahun 2015-2017 telah dilaksanakan Bintek Pengelolaan Kearsipan, yang jumlah pesertanya bertambah setiap tahun. Sampai dengan tahun 2017, 850 orang telah ada mengikuti Bintek Pengelolaan Kearsipan.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengorganisasian data dan arsip, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah memiliki inisiatif dengan melakukan penarikan arsip dari instansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keterlambatan dan resiko hilang dari arsip-arsip yang ada.

Pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan 28 SKPD di Kabupaten Banyumas, sedangkan SKPD Kecamatan, UPT Puskesmas, Unit Pendidikan Kecamatan dan Pemerintahan Desa belum dilakukan pengelolaan arsip secara baku di karenakan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Kinerja Bidang Kearsipan Kabupaten Banyumas dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut. Kepemilikan Depo arsip 1 buah, Tenaga arsip sampai dengan tahun 2020 berjumlah 2 orang dimana untuk pengelolaan arsip statis dan dinamis di 29 OPD di Kabupaten Banyumas, Nilai Penyelenggaraan Kearsipan sudah cukup bagus dengan nlai 86 di tahun 2020. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 115 orang. Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar 40%. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2020 sebesar 14,5%, Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip sebesar 14,5% Audit Kearsipan sebanyak 8 SKPD .

Rincian capaian indikator kinerja Pengelollan kearsipan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Kinerja Kearsipan Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No	Kinerja	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Depo Arsip	Unit	-	-	1	1	1
2.	Tenaga Arsiparis Tingkat Trampil	Orang	2	2	2	2	2
3.	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	NA	52	67	75	86
4.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	85	100	54	205	115
5.	Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas	%	1,88	2,09	8,13	27,82	40
6.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	9,1	14,54	5,5	10,92	14,5
7.	Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip	%	9,1	14,54	5,5	10,92	14,5
8.	Fasilitasi Penataan Arsip pada SKPD	SKPD	5	NA	10	30	25
9.	Audit Kearsipan	SKPD	NA	NA	NA	10	8
10.	Penyusunan Buku Pedoman Kearsipan	Buku	1	1	1	1	1
11.	Penyusutan Arsip	SKPD	NA	NA	1	NA	NA

Sumber: Dinas Arpusda Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.3.Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Banyumas terdiri dari perikanan tangkap yang berasal dari perairan sungai (perairan umum) dan perikanan budidaya. Luas perikanan tangkap di Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah seluas 1.293 ha, dan luas perikanan budidaya seluas 424,50 ha. Luas lahan perikanan yang ada, sangat berpengaruh terhadap jumlah

produksi dan nilai produksinya. Produksi perikanan di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2016-2020, mengalami trend peningkatan, pada tahun 2016 mencapai 10.859 ton dan di tahun 2020 mencapai 11.850,15 ton.

Konsumsi ikan (kg/Kpt/th.) mengalami peningkatan selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 konsumsi ikan mencapai 21,05 kg/Kpt/th. Potensi perikanan Kabupaten Banyumas yang bertumpu pada perikanan budidaya ini menjadikan tingkat konsumsi ikan rendah karena penduduk agak kesulitan memperoleh ikan dengan harga yang terjangkau.

Banyaknya ikan yang ditebar diperairan umum selama kurun waktu 2016-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif mulai dari 408.000 ekor tahun 2016 menjadi 275.000 turun di tahun 2020. Hal ini dikarenakan tahun 2020 terkena dampak refocusing anggaran.

Perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Banyumas, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan (ton)	10.859,15	11.010,09	11.121,00	11.670,24	11.850,15
2	Konsumsi Ikan (kg/Kpt/th.)	13,78	13,85	14,33	21,00	21,05
3	Penebaran Ikan di perairan umum (ekor/th.)	408.000	756.460	515.000	210.000	275.000

Sumber : Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2020.

Produksi perikanan yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas sebagian dilakukan pengolahan melalui unit-unit usaha yang dimiliki masyarakat. Jumlah usaha pengolahan ikan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 ada sebanyak 168 unit usaha dan di tahun 2020 hanya sebanyak 139 dikarenakan pandemi covid-19 maka banyak usaha pengolahan ikan yang tidak beroperasi. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan sekaligus mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, dilakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan.

2.3.3.2. Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam jenisnya, umumnya mudah dijangkau karena didukung sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa obyek wisata yang belum tergarap secara optimal dan membutuhkan investasi untuk pengembangannya. Berbagai potensi pariwisata tersebut yaitu : Baturraden, Taman Rekreasi Nirwana Manggala, Bendung Gerak Serayu, Wana Wisata, Pancuran Pitu, Pancuran Telu, Goa Sarabadak, Telaga Sunyi, Curug Cipendok, Curug Ceheng, Pemandian Kalibacin, Museum BRI.

Untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas disusun kajian *One District One Destination* (ODOD) konsep pengembangan pariwisata berbasis kawasan, dan kajian revitalisasi Kota

Lama Banyumas. Selain itu untuk mendukung wisata Sungai Serayu Dinas Perhubungan mengembangkan angkutan sungai yang tidak hanya memberi pilihan moda transportasi juga diharapkan akan mendukung pariwisata di kawasan yang terhubung.

Pengembangan pariwisata dengan model ODOD ini merupakan Strategi yang memiliki prinsip bahwa pengembangan destinasi wisata haruslah meliputi kawasan yang merupakan kumpulan desa atau kecamatan di mana masyarakat secara bersama sama mengembangkan satu karekter atau tema produk pariwisata tertentu yang mewakili identitas bersama kawasan. Kajian ODOD dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pariwisiata perwilayah pengembangan pariwisata Kabupaten Banyumas, menyusun kriteria penentuan destinasi unggulan di setiap perwilayahan, mengidentifikasi destinasi wisata di setiap perwilayahan, menentukan destinasi unggulan dan prioritas di setiap perwilayahan, dan menyusun strategi pengembangan destinasi unggulan dan prioritas di setiap perwilayahan.

Kabupaten Banyumas telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyumas (RIPPARKAB) Tahun 2018-2033 yang menetapkan Perwilayahan Kawasan Pengembangan Pariwisata meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Berbeda dengan RIPPARKAB hasil dari kajian ODOD adalah penentuan destinasi-destinasi unggulan prioritas. Destinasi unggulan prioritas tersebut yaitu Bukit Pangonan Indah dan Wisata Kota Lama Banyumas yang berada di Kawasan Banyumas Selatan, Taman Bale Kemambang di Kawasan Banyumas Tengah, Hutan Pinus Limpakuwus di Kawasan Banyumas Timur, Gua Alam Darmakradenan dan Pesona Desa Cikakak di Kawasan Banyumas Barat, dan Wisata Dirgantara/Watu Kumpul yang terletak di Kawasan Banyumas Utara.

Strategi pengembangan destinasi wisata unggulan prioritas dengan pendekatan konektivitas yang berupa: a. Kawasan Banyumas Selatan: pengembangan 2 jalur wisata yaitu Kota Lama-Curug Song-Bukit Cikawak dan Kota Lama-Curug Gemawang-Bukit Pangonan-Wisata Sentana-Bukit Mahameru b. Kawasan Banyumas Timur: pengembangan jalur Hutan Wisata Limpakuwus-Embung Siton-Lorong Blothong c. Kawasan Banyumas Tengah: pengembangan jalur Taman Bale Kemambang-Wisata Edukasi SMKN 3-Tugu Gada Rujak Polo-Embung Bersole d. Kawasan Banyumas Barat: jalur Curug Wanasuta-Kawasan Gua Alam Darmakradenan-Pesona Desa Cikakak-Wisata Pertapan Gerduren e. Kawasan Banyumas Utara: pengembangan jalur wisata Watu Kumpul-Germanggis-Makam Syekh Makhdum Wali-Wisata Air Watu Tumpang. Strategi yang terperinci untuk pengembangan destinasi wisata unggulan dan prioritas membutuhkan kajian yang terpisah-pisah untuk setiap kawasan mengingat perbedaan permasalahan pengembangan pariwisata yang ada di setiap kawasan.

Kajian Pengembangan Kota Lama Banyumas dilatarbelakangi potensi wisata sejarah dan budaya di Kawasan Kota Lama Banyumas. Sejarah dan karakter budaya Banyumas dapat dikemas menjadi daya tarik bagi wisata. Tahapan kajian pengembangan Kota Lama Banyumas meliputi inventarisasi cagar budaya beserta informasinya, penyusunan konsep restorasi dan revitalisasi cagar budaya, pembuatan infrastruktur pendukung, dan konsep pemasaran wisata Kota Lama Banyumas.

Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan, dengan kunjungan obyek wisata terbanyak pada obyek wisata Baturraden.

Di tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis dikarenakan pembatasan kegiatan untuk pencegahan pandemi COVID-19 Tempat wisata di tutup pada akhir bulan Maret 2020 dan baru dibuka kembali pada awal triwulan III tahun 2020 dengan sejumlah protokol kesehatan di antaranya pembatasan jumlah pengunjung dan pembelian tiket wisata on line.

Dilihat dari lamanya waktu berkunjung, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara hanya satu hari, tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2016-2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan, sehingga dapat lebih lama membelanjakan uangnya di Kabupaten Banyumas.

Jumlah wisatawan, lama tinggal dan hotel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	2.013.992	2.111.861	2.363.002	3.580.743	1.866.157
2.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	2.013.544	2.111.367	2.362.794	3.580.485	1.866.083
3.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	448	494	208	258	74
4.	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1	1	1	1	1
5.	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	1	1	1	1	1
6.	Hotel (buah) - Hotel bintang - Hotel non bintang	 10 172	 4 211	 4 211	 15 168	 16 168
7.	SDM Pariwisata tersertifikasi (orang)	NA			40	40

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2020

Selain beberapa indikator kinerja tersebut, indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD juga sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap kemandirian anggaran daerah. Oleh karena itu dibawah ini perlu ditampilkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

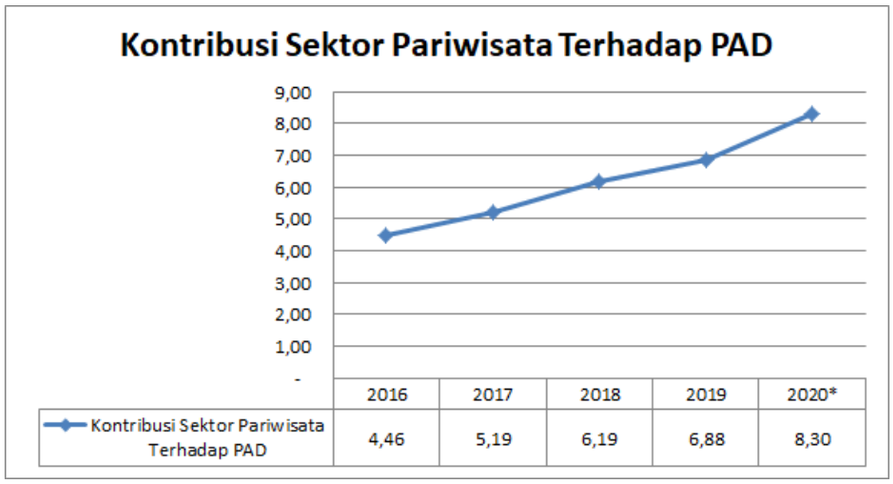

Gambar 2.43
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Kabupaten Banyumas Tahun 2016 – 2020
Sumber: Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2020

Infrastruktur pendukung seperti perhotelan sudah cukup memadai di Kabupaten Banyumas. Wisatawan tidak akan kesulitan dalam menemukan akomodasi karena beragamnya jenis hotel yang tersedia. Semua indikator pada tabel di atas menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, kecuali indikator lama tinggal wisatawan (dalam negeri dan mancanegara) yang tidak meningkat dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang menjelaskan fenomena tersebut. Pertama, minimnya informasi destinasi wisata di Kabupaten Banyumas, atau meskipun ada tetapi hanya sebatas memberi informasi, belum memasarkan. Kedua, belum adanya paket-paket wisata yang terintegrasi di setiap kawasan wisata, misalnya dari apa produk atau destinasi unggulannya, estimasi durasi waktu kunjungan dan perjalananya, moda transportasi yang melayani, dan sebagainya. Ketiga, masih kurangnya alternatif produk wisata jadi yang layak jual. Sejauh ini pariwisata di Kabupaten Banyumas masih bertumpu pada wisata alam. Potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan heritage belum tergarap maksimal.

2.3.3.3. Pertanian

Komoditi pertanian Kabupaten Banyumas meliputi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya (jagung dan kedelai), tanaman hortikultura dan perkebunan. Produksi dan produktivitas komoditi pertanian Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.79
Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Urusan Pertanian
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar:					
	Produktivitas padi sawah (ton/ha)	5.75	5,57	5,80	-	-
	Produktivitas padi gogo (ton/ha)	4.97	4,38	3,57	-	-

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Produktivitas Tanaman Padi (ton/ha)	-	-	-	5.71	5,81
	Produktivitas jagung (ton/ha)	5.75	5,92	6,50	7,50	6,12
	Produktivitas kedelai (ton/ha)	1,35	1,53	1,34	1,28	1,25
2.	Produksi Hortikultura:					
	Durian (ton)	3.094,8	5.286,9	12.751,4	15.559,6	6.159,18
	Pisang (ton)	28.021,3	27.447,3	27.749,5	30.781,4	31.375,6
	Cabe Merah (ton)	4.632	1.568,9	1.724,9	1.376,2	2.000
3.	Produksi Tanaman Perkebunan :					
	Cengkeh (ton)	304,28	310,41	484,16	495.36	523,02
	Kelapa Dalam (ton)	12.727,41	13.283,89	13.905,12	14.108.96	14.330,93
	Kelapa Deres (ton)	43.938,68	54.730,5	53.408,86	54.985,38	55.884,43
	Cakupan bina kelompok tani (%)	54,58	74,00	38,55	76.05	80,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Banyumas 2020

Komoditas peternakan utama di Kabupaten Banyumas meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba, selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami perkembangan fluktuatif dimana untuk populasi ayam ras petelur merupakan populasi yang mengalami kenaikan tertinggi kurun waktu 2020 sebesar 83.992 ekor jika dibandingkan tahun 2019. Perkembangan populasi ternak, produksi hasil ternak, angka kesakitan dan kematian ternak di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80
Populasi Ternak, Produksi Hasil Ternak, Angka Kesakitan dan Kematian Ternak Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Populasi Produksi komoditas Peternakan Utama					
	Sapi Potong	12.805	13.460	14.350	14.461	15.253
	Sapi Perah	3.172	2.366	2.279	2.287	2.427
	Kerbau	1.260	1.248	1.279	1.295	1.334
	Kambing	227.124	161.282	165.646	166.101	175.835
	Domba	22.213	13.234	15.190	17.097	17.269
	Ayam Ras Petelur	1.577.825	1.413.592	1.396.358	1.399.852	1.483.844
	Ayam Ras Pedaging	10.054.844	7.868.549	8.208.000	11.741.324	11.706.950
	Ayam Buras / Kampung	1.320.970	1.545.064	1.053.940	1.071.354	1.189.202
	Itik	186.357	249.385	142.061	145.135	150.940
2.	Produksi Daging (ton)	19.255,100	19.471,48	19.994,06	22.405,297	21.786.989
	Sapi	3.739,1	2.891,818	3.064,99	2.674.440	1.699.930
	Kerbau	4,3	2,710	-	-	-
	Kambing	1.733,2	1.379,288	1.127,06	813.362	556.092
	Domba	103,2	103,013	91,68	852.872	74.955
	Babi	87,8	86,064	72,27	11.880	45.210
	Ayam Buras / Kampung	1.525,7	1.189,699	1.127,62	3.141.234	700.789
	Ayam Pedaging	11.754,6	13.407,404	14.144,51	14.025.377	18.189.697
	Itik	307,2	411,485	365,93	64.840	130.592
	Kelinci	-	-	-	197.346	22.989
	Burung Puyuh	-	-	-	13.567	23.023
	Angsa	-	-	-	-	4.390
	Entog	-	-	-	584.773	330.738

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Merpati	-	-	-	25.516	8.585
3.	Produksi Susu (liter):	5.272.222	5.594.690	3.628.600	3.710.518	3.898.029
	Sapi Perah	5.192.222	5.520.183	3.572.900	3.658.567	3.862.424
	Kambing	80.000	74.507	55.700	51.951	35.605
4.	Produksi Telur (ton)	17.764,600	16.910,415	16.126,93	17.917,31	18.095,95
	Ayam Ras	15.286,8	13.725,655	13.558,52	15.265,76	16.217,61
	Ayam Buras	777,3	909,100	777,68	576,28	685,22
	Itik	1.700,5	2.275,5	1.790,73	1.443,78	997,45
	Burung Puyuh	-	-	-	294,99	108,13
	Entog	-	-	-	336,50	87,52
5.	Angka Kesakitan Ternak (Morbiditas)					
	Ternak Besar (%)	14,52	14,50	14,07	14,06	14.06
	Ternak Kecil (%)	1,43	1,41	1,41	1,41	1.40
	Ternak Unggas (%)	0,53	0,51	0,5	0,5	0.49
6.	Angka Kematian Ternak (Mortalitas)					
	Ternak besar (%)	2,1	2,0	1,9	1,9	1.80
	Ternak Kecil (%)	4,5	4,3	4,2	4,2	4.10
	Ternak Unggas (%)	0,25	0,23	0,22	0,22	0.22

Sumber : Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2020

Di dalam urusan pemerintahan bidang Pertanian, terdapat sub urusan Kesehatan Hewan dan Masarakat Veteriner yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Beberapa kinerjanya adalah sebagai berikut:

Pemotongan Ternak di Rumah Potong Hewan (RPH)

Pemotongan hewan ternak mempunyai risiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging yang mengancam dapat kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Untuk menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ternak yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan: 1) pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama); 2) b.pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (post-mortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit *zoonotik* ke manusia; dan 3) pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan *zoonosis* yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Kabupaten Banyumas telah memiliki beberapa unit RPH yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Untuk RPH Kembaran dan Purwokerto Timur sudah tidak beroperasi lagi dan digabung menjadi RPH Tambaksari. RPH Banyumas tutup dan menjadi PUSKESWAN. RPH Purwokerto Barat tutup tahun 2020, sehingga RPH yang beroperasi di Banyumas hanya ada 6 RPH. Jumlah pemotongan hewan di RPH adalah sebagai berikut:

Tabel 2.81
Jumlah Pemotongan Hewan di RPH Tahun 2016-2020

NO	RPH	PEMOTONGAN (ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cilongok	1.496	1.739	1.766	1.980	12
2	Ajibarang	2.771	2.578	2.588	2.319	709
3	Sumpiuh	1.312	1.752	1.961	1.918	7
4	Sokaraja	4.734	5.194	4.362	3.431	413
5	Wangon	4.347	4.412	4.063	1.852	268
6	Tambaksari	-	-	3.198	2.975	2.384
7	Banyumas	114	-	-	-	-
8	Kembaran	90	4.561	-	-	-
9	Purwokerto Timur	5.434	-	-	-	-
10	Purwokerto Barat	2.084	2.087	1.830	292	-
	JUMLAH	22.382	22.323	19.768	14.767	3.793

Dinkanak Kabupaten Banyumas, 2020

Jumlah pemotongan hewan ternak dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Untuk tahun 2020 jumlahnya sebesar 3.793 ekor dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga permintaan terhadap daging menurun.

Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan dapat meningkat secara optimal telah dibentuk Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Puskeswan merupakan unit pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas (UPTD) pada Dinas Perikanan dan Peternakan dalam kewenangan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. UPTD Puskeswan mempunyai tugas berupa: a) pelaksanaan penyehatan hewan; b) pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; c) pelaksanaan epidemiologik; d) pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; e) pemberian pelayanan jasa veteriner.

Untuk kasus penyakit hewan yang ditangani UPTD Puskeswan Kabupaten Banyumas tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82
Penanganan Penyakit Hewan

Tahun	Kasus Penyakit Hewan yang ditangani		
	Sapi	Kambing/Domba	Jumlah
2019	5.458	2.770	8.228
2020	4.241	2.071	6.312
JUMLAH	9.699	4.841	14.540

Dinkanak Kabupaten Banyumas, 2020

Produksi Benih di Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar (BPBAT)

Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. tugas BPBAT meliputi: a) penyediaan benih dan calon induk

yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; b) percepatan pengembangan teknologi pembudidayaan ikan; c) pembudidayaan ikan guna penyediaan benih dan calon induk; d) pemberian edukasi teknis pembudidayaan ikan

Sesuai tugas tersebut BPBAT memberikan pelayan publik berupa pelayanan penjualan hasil produksi benih dan calon induk ikan air tawar, pelayanan tekhnologi perikanan, magang mahasiswa, prakerin siswa SMU, pelayanan edukasi bagi anak PAUD, TK, hingga SD dan SMP.

Komoditas yang dihasilakan BPBAT adalah benih dan calon induk ikan gurami, nilem, nila, tawes, mas dan ikan koi, dengan jumlah produksi sebagai berikut:

Tabel 2.83
Produksi Benih Ikan BPBAT Kabupaten Banyumas

	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Benih (ekor)	5.795.130	5.047.902	4.875.508	6.224.300	6.986.800

Sumber: Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.3.4. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki fungsi strategis dalam perekonomian daerah, merupakan salah satu penyumbang terbesar PDB Kabupaten Banyumas, terutama dari pengembangan perdagangan lokal dan regional, perdagangan skala kecil dan menengah. Kegiatan perdagangan di Kabupaten Banyumas telah dapat meningkatkan aktivitas roda perekonomian daerah. Di bawah ini, merupakan gambar dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Banyumas yang sangat berfluktuatif. Dan merupakan sektor kedua terbesar dalam kontribusinya terhadap PDRB Banyumas setelah sektor industri pengolahan. Sehingga diharapkan sektor perdagangan ini setiap tahunnya tetap memberikan kontribusi yang besar.

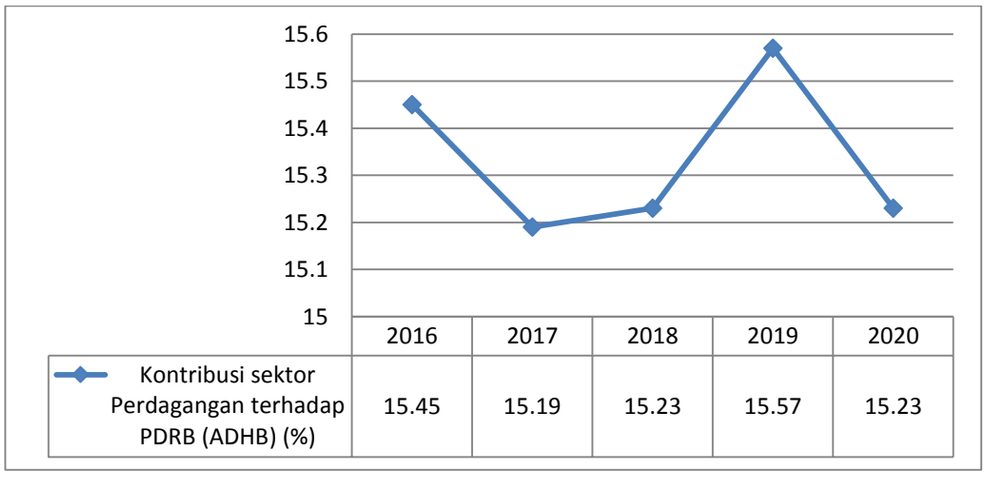

Gambar 2.44
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Banyumas
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Nilai ekspor komoditas utama di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Dimana komoditas utama ekspor Kabupaten Banyumas adalah kayu olahan, minyak atsiri dan gula kelapa kristal.

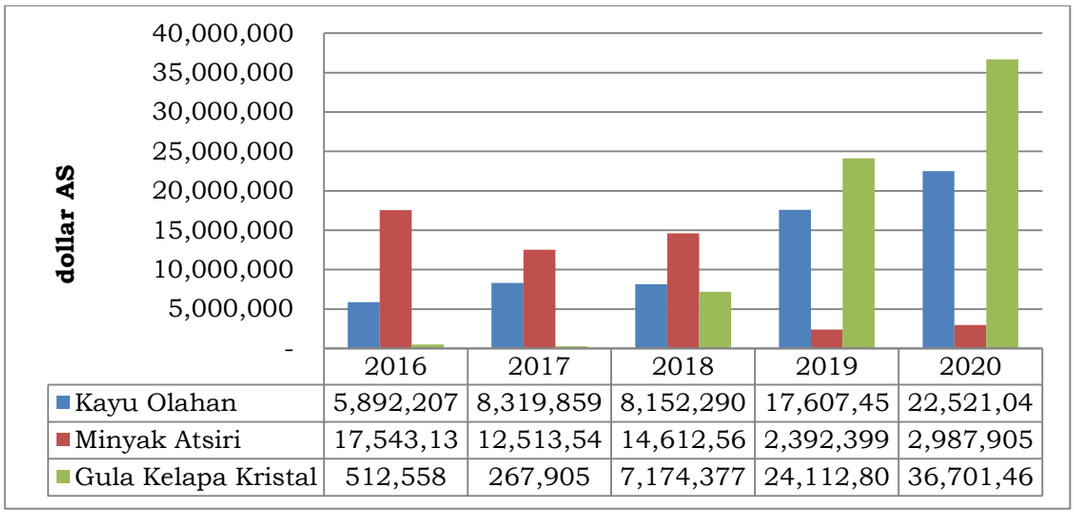

	2016	2017	2018	2019	2020
Kayu Olahan	5,892,207	8,319,859	8,152,290	17,607,45	22,521,04
Minyak Atsiri	17,543,13	12,513,54	14,612,56	2,392,399	2,987,905
Gula Kelapa Kristal	512,558	267,905	7,174,377	24,112,80	36,701,46

Gambar 2.45
Nilai Ekspor Komoditas Utama Menurut Komoditas
Tahun 2016-2020
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2020

Sarana dan prasarana perdagangan, terutama pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2016-2020 menunjukkan peningkatan. Perkembangan ini memberikan implikasi pada meningkatnya kegiatan perekonomian daerah, terutama digerakan oleh meningkatnya kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat. Perkembangan sarana prasarana Perdagangan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.84
Capaian Kinerja Bidang Perdagangan di Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasar modern (minimarket/ supermarket/ swalayan) (unit)	99	99	101	101	101
2	Jumlah pasar tradisional (unit)	26	26	25	25	26
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	140	1.118	718	70	96

Sumber : Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2020.

. Jumlah pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sebanyak 26 unit meningkat 1 pasar yaitu pasar Proliman yang tadinya berstatus pasar desa menjadi pasar yang dikelola Pemerintah Daerah. Pasar tradisional dibangun dalam rangka menampung perdagangan eceran dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari, untuk itu perlu mendapatkan fasilitasi pengembangan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Jumlah pasar modern di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan dari 99 unit tahun 2016 menjadi 101 unit pada tahun 2020

dan 2 pusat perbelanjaan yang terdapat di Purwokerto Selatan dan Purwokerto Timur. Untuk pasar modern tersebut tersebar di pusat-pusat perkembangan perekonomian dan sepanjang jalur utama perekonomian daerah.

Cakupan bina kelompok pedagang mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2016 sebanyak 140 kelompok sedangkan di tahun 2020 sebesar 96 kelompok atau meningkat 26 kelompok jika dibandingkan dengan tahn 2019.

2.3.3.5. Perindustrian

Berkembangnya industri memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan penanaman modal, penggunan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangannya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Banyumas relatif cukup baik terutama industri menengah dan industri kecil dan mikro. Iklim usaha di Kabupaten Banyumas yang semakin membaik mendorong tumbuhnya industri. Pertumbuhan industri juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan jumlah industri di Banyumas tahun 2020 hanya terdapat pada industri kecil seperti yang terlihat pada Tabel 2.85 di bawah ini. Dengan pertumbuhan industri di tahun 2020 hanya sebesar 0,03% atau mengalami penurunan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Gambaran perkembangan industri dan tingkat penyerapan tenaga kerja terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85
Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Perindustrian
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Unit Industri	42.320	42.530	43.182	43.910	43.921
a.	Industri besar (unit)	6	6	6	6	6
b.	Industri menengah (unit)	77	77	77	77	77
c.	Industri kecil (unit)	42.237	42.447	43.099	43.827	43.839
d.	Industri mikro (non formal) (unit)	-	-	-	-	
2.	Jumlah tenaga kerja yang terserap pada unit industri					
a.	Industri besar (orang)	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
b.	Industri menengah (orang)	5.949	5.949	5.949	5.949	5.949
c.	Industri kecil (orang)	92.500	97.065	97.065	98.080	98.251
3.	Pertumbuhan Industri	0,37	0,50	1,53	1,69	0,03
4.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	745	820	699	70	153

Sumber: Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.3.6. Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian kewenangan urusan pemerintahan bidang transmigrasi ditujukan bagi kabupaten tujuan transmigrasi. Kabupaten Banyumas sebagai daerah pengirim hanya memfasilitasi pelayanan transmigrasi untuk masyarakat yang berminat mengikuti

transmigrasi. Tugas ini dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, khususnya Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas. Pelayanan transmigrasi meliputi: pendaftaran dan seleksi calon transmigran, identifikasi dan legitimasi calon transmigran, publikasi calon transmigran, pemberangkatan calon transmigran, dan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi.

2.3.4. Fokus Layanan Pendukung

2.3.4.1. Fungsi Administrasi Pemerintahan

Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diukur dengan indek reformasi birokrasi oleh KemenPan RB, terhadap dua komponen pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:

Komponen Pengungkit, terdiri dari: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata laksana, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas pelayanan Publik.

Komponen Hasil, terdiri dari: Nilai Akuntabilitas Kinerja, Survey Internal Integritas Organisasi, Survey Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, Survey Eksternal Pelayanan Publik.

Nilai Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas tahun 2020 menunjukan hasil baik atau “B”, dengan nilai 69,07. Namun demikian masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan penataan birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, antara lain:

- Penyusunan Road map reformasi birokrasi agar diselaraskan dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2025;
- Mengoptimalkan fungsi Tim Reformasi Birokrasi melalui pertemuan secara berkala membahas kemajuan reformasi birokrasi, serta mengkomunikasikan dan memastikan penerapannya sampai ke OPD;
- Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang menjawab isu-isu strategis terkait masalah reformasi birokrasi tingkat OPD;
- Mengoptimalkan implementasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan melakukan secara berkala untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Meningkatkan pengetahuan terhadap assessor PMPRB Pemerintah Kabupaten Banyumas tentanng kondisi ideal yang diharapkan pada masing-masing area perubahan;
- Mewujudkan budaya kerja positif dengan menugaskan agen perubahan dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan agen perubahan;
- Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan mindset terhadap para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis secara keseluruhan serta

melakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala.

2.3.4.2. Fungsi Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan organisasi perangkat daerah yang menunjang/memberikan fasilitasi kepada anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah DIY berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2018 mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Peran Sekretariat DPRD menjadi strategis untuk menjembatani komunikasi yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum daerah guna menunjang program-program pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, ada tiga indikator kinerja Sekretariat DPRD, yaitu: tersedianya RKT pada setiap Alat Kelengkapan DPRD, tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD), dan terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD.

Penyusunan RKT oleh Sekretariat harus melibatkan Alat Kelengkapan DPRD. Selanjutnya untuk program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) sudah tersusun dan terintegrasi.

2.3.4.3. Fungsi Pengawasan

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

Jumlah temuan pengawasan terus mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 562 menjadi 282 pada tahun 2020. Dari 282 temuan tersebut 128 temuan pengawasan telah selesai ditindaklanjuti, dan 32 temuan pengawasan dalam proses tindak lanjut, 122 jumlah temuan pengawasan belum di tindaklanjuti. Jumlah pengaduan masyarakat terkait pengawasan pada tahun 2020 sebanyak 6 kasus, dan kesemuanya telah ditindaklanjuti. Secara rinci kinerja di bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Kinerja Pengawasan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah temuan pengawasan (temuan)	562	777	507	485	282
2.	Jumlah temuan pengawasan yang telah selesai ditindaklanjuti (temuan)	476	639	385	220	128
3.	Jumlah temuan pengawasan yang dalam proses tindak lanjut (temuan)	86	73	29	25	32
4.	Jumlah temuan pengawasan belum ditindaklanjuti (temuan)	0	65	93	240	122
5.	Jumlah rekomendasi	562	777	507	485	282
6.	Jumlah rekomendasi selesai ditindaklanjuti	476	306	385	220	128
7.	Jumlah rekomendasi dalam proses tindaklanjut	86	88	29	25	32
8.	Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti	0	0	93	240	122
9.	Jumlah pengaduan masyarakat (kasus)	5	9	8	9	6
10.	Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti (kasus)	5	9	8	9	6
11	Level kapabilitas APIP	NA	2	2	3	3
12	Nilai Maturitas SPIP	NA	3	3	3	3,075

Sumber : Inspektorat Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.5.Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1. Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP yang dimaksud adalah bahwa laporan keuangan telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, selain itu juga pemerintah Kabupaten Banyumas dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan

baik. Opini tersebut menunjukan kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyumas terus membaik.

Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Banyumas masih rendah. Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali melakukan identifikasi potensi PAD dan menentukan target realisasinya. Dari sisi kelembagaan dibentuk Badan Pendapatan daerah Kabupaten banyumas yang ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati banyumas Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Dengan dibentuknya BAPENDA diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah.

Capaian persentase Belanja Pendidikan (20%) dari tahun 2015-2019 rata-rata mencapai 37%, hal ini melebihi target Kabupaten/Nasional sebesar 20%. Namun bila dilihat alokasi per tahunnya dalam kurun waktu tersebut persentase belanja pendidikan mengalami penurunan. Persentase Belanja Kesehatan (10%) dari tahun 2015-2019 juga melebihi target sebesar 10%, rata-rata belanja kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2015-2019 adalah sekitar 17%.

Proporsi belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Banyumas dari tahun 2015-2019 rata-rata lebih dari 60%. Belanja tidak langsung yang terlalu besar berarti belanja pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat semakin kecil. Meskipun dalam belanja tidak langsung terdapat komponen belanja bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial kepada masyarakat, proporsi belanja tidak langsung yang terlalu bisa menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas kurang memihak kepada masyarakatnya.

Tabel 2.87
Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%			6.06	16	0,8
2	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	18,16	17,64	15	19,99	20,07
3	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100
4	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		34,86% : 65,14%	27,04% : 72,96%	59,34% : 40,66%	58,04% : 41,96 %	64,01% : 35,99%
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	20,09%	15,34%	20,62	16,41	16,41
6	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	37,25%	34,18%	38,43	33,02	33,02
7	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100	100	100	100
8	Persentase SILPA	%	13,43%	11,94%	10,64%	8,08%	7,86%

Sumber : Bapenda dan BKAD Kabupaten Banyumas, 2020

2.3.5.2. Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Untuk mendukung tugas tersebut telah dikembangkan aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan aplikasi monitoring dan evaluasi perencanaan, penilaian SAKIP, dan penganggaran. Dengan kebijakan Pemerintah untuk penggunaan SIPD Kementrian Dalam Negeri perencanaan perlu melakukan banyak penyesuaian dengan berbagai perubahan kebijakan yang terjadi.

Perkembangan kinerja selama 5 tahun sebagai data dukung bidang perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88
Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	1	1	1	1
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	1	1	1	1
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP	1	1	1	1	1
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	86,70	81,38	100	100	100

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2020

Kinerja fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2015–2019 telah melaksanakan amanat perencanaan dengan tersususnnya dokumen Perda RPJPD, RPJMD, Perbub RKPD dan Penjabaran Program RKPD ke dalam RKPD sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten. Banyumas.

2.3.5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian aparatur sipil negara (ASN), mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

Aparatur sipil negara merupakan aset bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan tingkat pendidikan lebih dari 60% ASN di Kabupaten Banyumas telah memiliki jenjang pendidikan D IV, S1, S2, dan S3. Jumlah ASN Kabupaten Banyumas menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 2.89
Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyumas
Tahun 2020

Jenjang pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	196	7	203	1,72
SLTP	329	29	358	3,03
SLTA	1.063	452	1.515	12,83
D.I	11	13	24	0,20

D.II	70	46	116	0,98
D.III	303	1.009	1.312	11,11
Sarmud	3	2	5	0,04
D.IV	47	132	179	1,52
S-1	2.927	4.660	7.587	64,25
S-2	335	171	506	4,28
S-3	3	1	4	0,03
Jumlah	5.287	6.522	11.809	100,00

Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas, 2020

Pada tahun 2020 aparatur sipil negara di Kabupaten Banyumas dengan tingkat pendidikan S1 merupakan jumlah terbanyak yaitu 7.587 orang (64,25%). Urutan kedua adalah ASN dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 1.515 orang (12,83%), dan urutan ke tiga adalah ASN dengan tingkat pendidikan D.III sebanyak 1.312 orang (11,11%).

Berdasarkan golongan kepangkatan ASN Kabupaten Banyumas selalu mengalami perubahan dikarenakan karena kenaikan pangkat regular, pilihan atau penyesuaian pendidikan. Jumlah ASN menurut golongan di Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.90
Jumlah ASN Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Jumlah PNS Daerah menurut golongan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PNS	14.981	13.306	12.539	12.551	11.809
Golongan I	494	403	354	333	292
Golongan II	2.608	2.567	2.240	2.186	1.999
Golongan III	6.259	5.627	5.576	6.056	5.923
Golongan IV	5.620	4.709	4.369	3.976	3.595

Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas, 2020

Sampai tahun 2020 ASN di Kabupaten Banyumas yang paling banyak adalah golongan III sebanyak 5.923 orang (50,16%) sedangkan urutan kedua adalah golongan IV sebanyak 3.595 orang (30,44%) dan urutan ketiga adalah golongan II sebanyak 1.999 orang (16,93%) dan yang terakhir golongan I sebanyak 292 orang (2,47%).

Untuk memenuhi standar kompetensi aparatur sipil negara harus terus mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada negara dan masyarakat. Pendidikan dan latihan adalah upaya untuk pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, yaitu melalui diklat pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan struktural. ASN Kabupaten Banyumas yang telah mengikuti diklat dan lulus, serta memiliki seritifikasi kompetensi tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat

No.	Indikator	Capaian kinerja setiap tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	ASN yang telah mengikuti diklat	983	371	573	573	600
2.	ASN yang telah lulus diklat	983	371	572	572	600
	Jumlah ASN	15.428	14.981	13.306	12.539	12.551
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6,37	2,48	4,31	4,57	4,78

Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas, 2019.

Untuk tahun 2020 tidak diselenggarakan diklat bagi ASN Kabupaten Banyumas dikarenakan kondisi Pandemi COVID -19.

Pengelolaan data kepegawaian di Kabupaten Banyumas telah menggunakan sistim informasi manajemen data kepegawai (SIMPEG). SIMPEG juga digunakan untuk pelayanan proses kepegawaian *paperless/less paper* yang akan diterapkan secara bertahap. Kinerja bidang kepegawaian lainnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Disiplin ASN, Mutasi, Promosi, dan Keterisian SIMPEG Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Disiplin ASN	Orang	31	23	11	15	11
2	Jumlah Mutasi	Orang	5713	209	210	75	52
3	Jumlah pensiun ASN	Orang	2174	573	685	829	698
4	Jumlah Promosi Jabatan Struktural	Orang	1239	200	350	861	122
5	SIMPEG (Entry Update data Pegawai)	Orang	13.656	13.500	12.539	12.551	11.809

Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas Tahun 2020

2.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Banyumas menunjukan kinerja yang baik. Indikator yaitu Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD maupun RPJMD. Tahun 2020 disusun Rencana Induk Kelitbangan (RIK) untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatannya di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya RIK akan diintegrasikan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Pelayanan Izin Penelitian

Sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyumas, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas melaksanakan pelayanan izin penelitian. Proses izin penelitian ini dimulai dengan proses pernohonan rekomendasi penelitian kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya rekomendasi tersebut sebagai bahan pertimbangan Bappedalitbang dalam menerbitkan izin penelitian.

Selanjutnya mulai Tahun 2019, pelayanan izin penelitian dilaksanakan oleh Mall Pelayanan Publik (MPP) di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DMPPPTSP) Kabupaten Banyumas, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas No. 503/0010/2019 tanggal 3 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik.

Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA)

Salah satu tugas dan fungsi pemerintah adalah pelayanan penelitian dan pengembangan daerah yaitu pelayanan penelitian dan pengembangan karya cipta krenova agar kreativitas dan inovasi masyarakat dapat dimanfaatkan secara ekonomi dan sosial. Lomba Krenova merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada para mitra dan inovator baik perorangan maupun kelompok yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Lomba Krenova diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan telah dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Beppedalitbang Kabupaten Banyumas pada Tahun 2017 telah membentuk suatu Sistem dalam bidang pelayanan litbang terpadu bernama SABERINA (Satuan Bersama Pengembangan Inovasi Daerah), yaitu adalah sistem bergeraknya seluruh lembaga/organisasi dan perorangan dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan litbang secara terpadu untuk karya cipta krenova dalam mengakses pembiayaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatannya.

Berikut data peserta dan inventarisasi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Banyumas Lomba Krenova:

Tabel 2.93
Jumlah Peserta Lomba Krenova Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Peserta Lomba Krenova (inovasi)	128	28	53	58	64

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2020

Tabel 2.94
Kondisi Perkembangan Hasil Karya Cipta Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2019

No.	Inovasi	Penjelasan Pemanfaatan	Tahun Krenova
1	Pompa Hidram	Dimanfaatkan masyarakat Desa Kotayasa untuk memenuhi kebutuhan airnya	2012
2	Bel Otomatis Sekolah	Dimanfaatkan oleh banyak sekolah di Kabupaten Banyumas maupun diluar Kabupaten Banyumas	2013
3	All About Hydrogen	Dimanfaatkan di beberapa bengkel di Purwokerto	2016
4	Alusi	Diamnfaatkan dalam pembangunan perumahan di Kecamatan Patikraja	2016
5	Ezycon	Diamnfaatkan dalam pembangunan perumahan di Kecamatan Patikraja	2017
6	Srayer aspalt	Telah digunakan oleh sebagian besar pelaksana pembangunan jalan di Kabupaten Banyumas	2017
7	Batik Kluwung Sumunar	Telah dilakukan penjualan melalui galeri batik di SMA Sokaraja	2017
8	Magic Starter	Sedang dalam uji coba untuk diterapkan pada motor produksi China oleh Djoko Motor Purwokerto	2017
9	Avipodes	Dimanfaatkan untuk pembuatan profil Desa, seperti di Desa Kalisari Cilongok	2017
10	Clay Tepung	Melaksanakan pelatihan di berbagai organisasi	2017
11	Sulam Ngapak	Sudah mencapai ekspor	2019
12	Pemanfaatan Limbah	Penjualan lokal di Sekitar Lumbir	2019

	Kayu		
13	Mesin Uap/Boiler	Dimanfaatkan untuk pembuatan Cincau hitam, nata de coco, dan olahan lainnya di Banyumas	2019
14	Subur/Pupuk Organik dari sampah	Penjualan Lokal di sekitar Tambak	2019
15	ASR	Telah terjual di bahkan sampai ke Kalimantan	2019
16	Kopi KJN	Penjualan Lokal di sekitar Wangon	2019
17	EGROTEK	Penjualan Lokal di sekitar Purwokerto	2019

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2019

2.3.6. Fungsi Pemerintahan Umum

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah adalah meliputi:

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Kinerja pada pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Banyumas pada jumlah unjuk rasa sampai dengan tahun 2020 sebanyak 24 kali menurun dari tahun 2019 berjumlah 47 kali. Prosentase Pemilih yang menyalurkan suaranya pada pemilu pada tahun 2019 sebesar 78,8% dimana seharusnya prosentase tersebut 100% dimana Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu (orang) sama Jumlahnya dengan jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya pada pemilu (100%) Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan cukup tinggi sampai dengan 2020 sebesar 87,8%.

Tabel 2.95
Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unjuk rasa (kali)	54	47	47	47	24
2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu (orang)	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	1.350.981	1.373.769	Tidak ada Pemilu
3.	Jumlah pemilih	Tidak	Tidak	1.086.983	1.082.627	Tidak

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	yang menyalurkan hak suaranya pada pemilu.	ada pemilu	ada pemilu			ada Pemilu
4.	Prosentase Pemilih yang menyalurkan suaranya pada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	74,74	78,8	Tidak ada pemilu
5.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	2	2
6.	Kegiatan pembinaan politik daerah	7	7	7	7	7
7.	Jumlah LSM Yang Aktif	114	122	134	159	180
8.	Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	84,5	82,9	84,3	86,4	87,8

2.3.7. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayah di Kabupaten Banyumas dengan pelaksanaan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan dengan indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik. Sampai dengan tahun 2020 IKM Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas sebesar 81,46% meningkat dari tahun 2019 sebesar 74,14%.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah disesuaikan dengan ketersediaan data di Kabupaten Banyumas terdiri atas pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, angka kriminalitas, dan angka ketergantungan.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk. Untuk tahun 2019 persentase pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Banyumas lebih besar daripada pengeluaran untuk non makanan. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk non makanan penduduk Banyumas mengalami fluktuasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.96

Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan	52,04	49,75	50.19	52.31	51,08

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2017 & 2018

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Infrastruktur Jalan dan Irigasi

Panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas di luar jalan desa dan jalan lingkungan adalah 1.716,886 km, dengan prosentase kewenangan jalan terdiri atas jalan kewenangan Kabupaten Banyumas sebesar 87,83%, jalan kewenangan Nasional sebesar 10,24%, dan sisanya merupakan jalan kewenangan Provinsi sebesar 1,93%.

Kondisi jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.97
Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Kondisi Ruas Jalan						Total Panjang (km)
Baik		Sedang		Rusak		
km	%	km	%	km	%	km
679,15	45,04%	348,31	23,10%	480,54	310,87%	1.508,000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2020

Kondisi jalan merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu peningkatan kondisi jalan kabupaten terus diupayakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, prioritas provinsi, dan nasional untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor: 14/PRT/M/2015 kewenangan pengelolaan daerah irigasi Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi 573 daerah irigasi dengan luas areal 23.716 Ha, dan panjang jaringan 641.081 m meliputi jaringan irigasi primer dan sekunder. Jaringan irigasi tersebut sepanjang 502.016 m dengan kondisi baik, dan 139.065,5 m dengan kondisi rusak. Selengkapnya kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.98
Kondisi Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				Total Panjang
	Baik		Rusak		
	M	%	M	%	m
Primer	285.877	74,48%	97.945	25,52%	383.822
Sekunder	218.156	84,80%	39.103	15,20%	257.259
Jumlah	504.033	78,62%	137.048	21,38%	641.081

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2019

Untuk mendukung Hasta Krida Bupati Banyumas terpilih pengembangan pertanian, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi, jaringan irigasi menjadi kegiatan prioritas pada tahun-tahun yang akan datang.

2.4.2.2. Infrastruktur Perhubungan

Kebutuhan terminal di Kabupaten Banyumas berdasarkan arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 terdiri atas 1 terminal tipe A, 2 terminal tipe B, dan 5 terminal tipe C. Infrastruktur terminal yang ada di Kabupaten Banyumas terdiri atas 1 unit Terminal Tipe A dan 2 unit Terminal Tipe C. Terminal tipe C yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/324/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Wangon dan Terminal Penumpang Ajibarang sebagai Terminal Penumpang Tipe C.

Dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2019-2023 ditargetkan penambahan 1 terminal Tipe C di Sokarja. Pembangunan terminal Tipe C tersebut untuk memberi pelayanan akses transportasi masyarakat yang ada di wilayah untuk melakukan aktivitasnya serta untuk mendukung pengembangan transportasi masal yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai wilayah jalur utama lintasan kereta api, yaitu lintas jalur Utara dengan jalur Selatan di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 1 stasiun besar yaitu Stasiun Besar Purwokerto dan beberapa dan stasiun-stasiun kecil lainnya.

Tabel 2.99
Fasilitas Infrastruktur Perhubungan di Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah	Lokasi
1	Perhubungan Darat		
	Jumlah Terminal Kelas A (unit)	1	Purwokerto
	Jumlah Terminal Kelas B (unit)	-	-
	Jumlah Terminal Kelas C (unit)	2	Wangon, Ajibarang
2	Perkeretaapian		
	Jumlah Stasiun	8	Purwokerto, Notog, Kebasen, Karangsari, Legok, Karanggandul, Sumpiuh, Kemranjen, dan Tambak

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2020.

Selain infrastruktur dasar, jalan dan perhubungan keberadaan fasilitas wilayah lainnya juga memberi dukungan bagi investasi, antara lain keberadaan fasilitas keuangan dan akomodasi. Berdasarkan data BPS (update sampai dengan tahun 2016) di Kabupaten Banyumas terdapat 64 bank umum (terdiri atas kantor cabang dan kantor cabang pembantu) dan 41 BPR (terdiri atas Kantor Pusat dan Kantor Cabang), 206 hotel bintang maupun non bintang, dan 744 restoran.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Kestabilan keamanan diperlukan agar kegiatan usaha yang dilakukan akan

berkembang dan memberikan keuntungan bagi investor dan mendatangkan devisa sebagai sumber pendapatan daerah.

Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, cenderung naik dari tahun 2016 sebesar 1,830 mejadi 2,454 pada tahun 2018, dan menurun di tahun 2019 sebesar 2,266 di tahun 2019 dan 1,730 di tahun 2020. Perkembangan kriminalitas selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100
Jumlah Kriminalitas Tahun 2016–2020

No	Variabel	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kriminalitas	Kasus	453	448	643	930	638
2.	Jumlah Kriminalitas tertangani	Kasus	302	347	412	417	324
3	Prosentase Kasus Kriminalitas tertangani	%	66,67	77,46	64,07	44,84	50,78
4	Angka Kriminalitas	Angka per 10.000 penduduk	1,830	2,084	2,454	2,266	1,730

Sumber: Polres Banyumas tahun 2020

Dengan meningkatnya angka kriminalitas ini akan mempengaruhi iklim investasi di Kabupaten Banyumas dan angka kriminalitas yang tertangani juga masih belum tercapai sehingga perlu kerja keras dalam penanganan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Banyumas.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Sedangkan rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas tahun tahun 2016-2020 cenderung menurun. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas adalah 47,96 artinya bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 47 penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan penduduk ini lebih banyak disumbangkan oleh kelompok produktif (15–64 tahun) yang mencapai 67,6% dari total jumlah penduduk Kabupaten Banyumas. Tingginya jumlah penduduk produktif menjadi perhatian bagi kemajuan pembangunan.

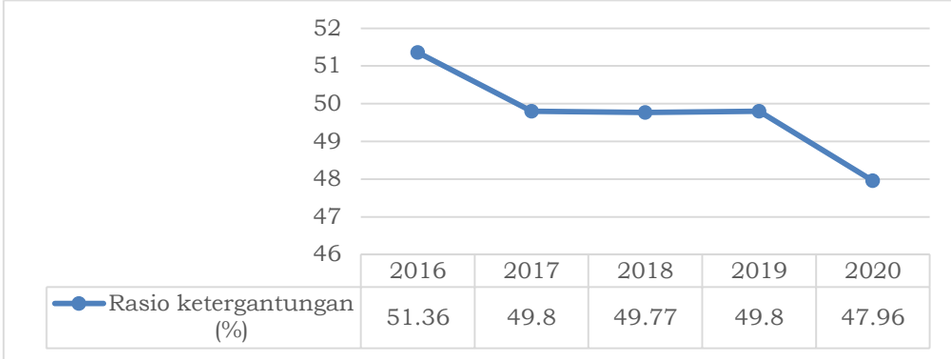

Gambar 2.46
Rasio Ketergantungan Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2016 s.d 2020

2.5. Kondisi Capaian Kinerja Daerah

2.5.1. Kondisi Capaian Kinerja Hasta Krida

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam delapan Misi yang pelaksanaannya dituangkan dalam program Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja Hasta Krida Bupati selama 2 tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 2.101
Gambaran Umum Capaian Kinerja Hasta Krida Bupati

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan	SKPD Penanggung Jawab
1	Pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall Pelayanan Publik	103 Perizinan dari 17 Instansi	210 Perizinan dari 26 Instansi	-	2021 : 214 perizinan 2022 : 214 perizinan 2023 : 214 perizinan Target akhir: 214 perizinan	Indikator : Jumlah jenis perizinan pada Mal Pelayanan Publik	DPMPTSP
2	Mewujudkan 92.000 paket	107.328 Paket	102.509 Paket	-	2021 : 92.000 paket beasiswa per	Indikator : Jumlah paket beasiswa	Dindik, Bag Kesra Setda

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan	SKPD Penanggung Jawab
	beasiswa				tahun 2022 : 92.000 paket beasiswa per tahun 2023 : 92.000 paket beasiswa per tahun Target akhir : 276.000 per 3 tahun		
3	Program wajib belajar: Angka Harapan lama Sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah	12,82 7,42	12,85 7,52	2021 : 13,23 2022 : 13,38 2023 : 13,53 2021 : 7,60 2022 : 7,65 2023 : 7,70	2021 : 12,87 2022 : 12,89 2023 : 12,81 Target akhir : 12,81 2021 : 7,53 2022 : 7,54 2023 : 7,55 Target akhir : 7,55	Indikator : Angka Harapan Lama Sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah	Dindik
4	Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan	144,44/39 Puskesmas	148,2/40 Puskesmas	151/41 Puskesmas	2021 : 100 % 2022 : 100 % 2023 : 100 % Target akhir:100%	Indikator : Persentase jangkauan pelayanan kesehatan	Dinkes
5	Program 1 Desa 3 Sarjana	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana	3 sarjana/ desa	2021 : 1 sarjana per desa per tahun 2022 : 2 sarjana per desa per tahun 2023 : 3 sarjana per desa per tahun Target akhir : 3 sarjana per desa per 3 tahun	Indikator : Bantuan pendidikan untuk calon sarjana per desa per tahun 2021 : Rp. 900 jt @ 6 juta (target per tahun 301 org unt 301 desa, dengan 5,4M Penetapan Perbup • Calon penerima dari basis DTKS • Mahasiswa tugas akhir • Berdasarkan usulan • Bantuan langsung ke rekening calon penerima • Penerima melaporkan ke Pemda • Bantuan untuk penunjang perkuliahan (SPP), biaya hidup dan tugas akhir 1 semester Rp. 3 juta	Bag Kesra Setda
6	Peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 Ton	10.047 Ton	12.000 Ton	30,000 Ton	2021 : 13.000 ton 2022 : 14.000 ton 2023 :	Indikator : Jumlah gula kelapa terekspor	Dinperindag

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan	SKPD Penanggung Jawab
					15.000 ton Target akhir : 15.000 ton		
7	Peningkatan teknologi safety belt penderes, durian dll	74 unit	210 unit	240 unit	2021 : 220 unit 2022 : 230 unit 2023 : 240 unit Target akhir : 240 unit	Indikator : Jumlah savety belt untuk petani	Dinpertan
8	Produksi padi 500.000 Ton/Tahun	368.957,25 Ton	371.827,51 Ton	500,000 Ton/Th	2021 : 373.000 ton 2022 : 374.000 ton 2023 : 375.000 ton Target akhir : 375.000 ton	Indikator : Produksi Padi	Dinpertan
9	Mengembangkan desa wisata	8 desa wisata	15 desa wisata	14 Desa	2021 : 15 desa 2022 : 15 desa 2023 : 16 desa Target akhir : 16 desa	Indikator : Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan	Dinporabudpar
10	Menciptakan 3.000 enterpreneur muda	700 Orang	62 Orang	3.000 Orang	2021: 200 org/th 2022: 200 org/th 2023: 200 org/th Target akhir : 600 org/3 th	Indikator : Pelatihan untuk calon enterpreneur	Dinakerkop UKM
11	Investasi berbasis padat karya	583 M	1.008 M	275 M	2021 : 500 M/th 2022 : 545 M/th 2023 : 600 M/th Target akhir : 1.645 M/3 th	Indikator : Jumlah investasi daerah	DPMPTSP
12	Membangun kawasan industri (Kawasan peruntukan Industri)	5 Kawasan (KPI)	Target : 5 Kawasan (KPI) Realisasi : 4 KPI	6 Kawasan (KPI) Perda lama 4 KPI Perda Baru 6 KPI	2021 : 5 KPI 2022 : 5 KPI 2023 : 5 KPI Target akhir : 5 KPI	Indikator : Jumlah KPI yang ditetapkan	Dinperkim, Dinperindag, DPU
13	Peningkatan anggaran irigasi	- 0,29%	Target : 6 % Realisasi : 20,10%	9 %	2021 : 7 % 2022 : 8 % 2023 : 9 % Target akhir : 9 %	Indikator : Persentase Peningkatan anggaran irigasi primer/sekunder	DPU, Bappedalitbang, BKAD
		3,292 Milyar rupiah	2,368 Milyar rupiah	-	2021 : 5 % 2022 : 6 % 2023 : 7 % Target akhir : 7%	Peningkatan Anggaran irigasi tersier/ perpompaan/ air dangkal/ air dalam	Dinpertan, Bappeda litbang, BKAD
14	Peningkatan jalan hotmix 570 Km	114,56 Km (kum)	166,68 Km (non kum) 52,12 Km (kum)	570 Km	2021 : 195 km (non kum) 28,32 Km (kum) 2022 : 220 km (non kum) 25 Km (kum) 2023 : 245 km (non kum) 25 Km (kum)	Indikator : panjang jalan yang di hotmix	DPU

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan	SKPD Penanggung Jawab
15	Membangun pasar desa	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana	-	2021 : - 2022 : 1 kebijakan 2023 : 1 kebijakan Target akhir : 1 kebijakan 2021 : 2 pasar desa 2022 : 4 pasar desa 2023 : 6 pasar desa Target akhir : 6 pasar desa	Indikator : jumlah kebijakan yang disusun terkait dengan pembangunan pasar desa Indikator : jumlah pembangunan pasar desa yang masuk dalam perencanaan desa	Setda bag Pemerintahan Dinsospermasdes BKAD
16	Pengembangan desa wisata	8 desa wisata	15 desa wisata	14 Desa	2021 : 15 desa 2022 : 15 desa 2023 : 16 desa Target akhir : 16 desa	Indikator : Jumlah Desa wisata yang dikembangkan	Dinporabud par
17	Pengembangan UMKM	0,33 %	2,71 %	0,33 %	2021 : 0,242% 2022 : 0,248 2023 : 0,253% Target akhir : 0,253 %	Indikator : Persentase pertumbuhan Usaha Mikro	Dinakerkop UKM
18	Bantuan untuk marbot masjid	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana		2021 : 465 org/th 2022 : 465 org/th 2023 : 465 org/th Target akhir : 465 org/th	Indikator : Bantuan untuk marbot dan rumah ibadah lainnya Keterangan : Total masjid 331 desa (masjid jami), dan 134 rumah ibadah lainnya Target 2021 sudah bisa berjalan, masuk dalam APBD, dg (SK Bupati penerima bantuan, bansos insentif)	Bag Kesra Setda
19	KBS untuk santri pesantren	100 Santri	70 Santri	-	2021 : 100 % 2022 : 100 % 2023 : 100 % Target akhir: 100%	Indikator : Cakupan pelayanan dasar pada pesantren (Setiap santri pada pesantren setempat dilayani kesehatan dasarnya di puskesmas setempat)	
20	KBS, KBP, Tunjangan makan untuky atim piatu	Belum Terlaksana	750 anak yatim piatu dari 27 kec terfasilitasi	-	2021 : ● KBS untuk yatim piatu 100 % ● KBP untuk yatim piatu 100 % ● Tunjangan makan untuk yatim piatu 500 paket 2022 : ● KBS untuk yatim	Indikator : ● KBS untuk yatim piatu 100 % ● KBP untuk yatim piatu 100 % ● Jumlah anak panti asuhan yang menerima paket bantuan	

No.	Capaian Hasta Krida	2019	2020	Target Akhir RPJMD (Sebelum)	Usulan Retargeting Akhir RPJMD (Sesudah)	Indikator Perubahan /Keterangan	SKPD Penanggung Jawab
					piatu 100 % ● KBP untuk yatim piatu 100 % ● Tunjangan makan untuk yatim piatu 500 paket 2023 : ● KBS untuk yatim piatu 100 % ● KBP untuk yatim piatu 100 % ● Tunjangan makan untuk yatim piatu 500 paket	tunjangan makan Keterangan : ● KBS yatim piatu (masuk dalam KBS secara keseluruhan) ● KBP yatim piatu (masuk dalam KBS secara keseluruhan) ● Jumlah anak panti asuhan yang menerima paket bantuan	

2.5.2. Kondisi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan selama 2 tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 2.102
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
A.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**				
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12.63	12,85	Tahun	Belum melampaui target 2020 (13,08 tahun), belum mencapai target akhir RPJMD (13,15 tahun)
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7.4	7.52	Tahun	Belum melampui target 2020 (7,55 tahun), belum mencapai target akhir RPJMD (7,70 tahun)
3	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	73.33	73.72	Tahun	telah mencapai target 2020 (73,63 tahun) namun belum mencapai target akhir RPJMD (73,93 tahun)
4	Indeks Gini	NA	NA		NA
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	NA	NA		NA
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70.75	71.98		Belum mencapai target 2020 (72,55) dan belum mencapai target akhir RPJMD (74,35)
7	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	100	100	%	Sesuai target
8	PDRB per kapita	31,87	30,21	juta rupiah	Belum mencapai target 2020 (33 juta rupiah) dan belum mencapai target akhir RPJMD (38,655 juta rupiah)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
9	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	63	71,43	%	Melampaui target 2020 (64%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
10	Persentase penduduk miskin	12,53	13.26	%	Belum mencapai target 2020 (11,53%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (8,56%)
11	Persentase Penguatan cadangan pangan	75	81,97	%	Melampaui target 2020 (80%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (86%)
12	Persentase penurunan penduduk miskin	0.4	-0.73	%	Belum mencapai target 2020 (0,98%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (4,94%)
13	Persentase Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi)	6,32	-1,65	%	Belum mencapai target 2020 (6,45%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (6,65%)
14	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	7,99	-0,05	%	Melampaui target 2020 (5,82%) dan target akhir RPJMD (5.86%)
15	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	8,11	-3,70	%	NA
16	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	0,31	1,51	%	Belum Mencapai Target 2020 (3,58%) dan Belum Mencapai Target Akhir RPJMD (4,03%)
17	Skor Pola Pangan Harapan	90,8	93,1		Melampaui target 2020 (91), dan melampaui target akhir RPJMD (91,6)
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,34	66,66	%	Belum Mencapai Target 2020 (66,49%) dan Belum Mencapai Target Akhir RPJMD (67,71)
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.62	6	%	Belum mencapai target 2020 (4,23%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (3,76%)
B,	**Aspek Daya Saing**				
1	Angka Kriminalitas	599	638	Kasus	Sudah mencapai target 2020 (792) dan belum mencapai target akhir RPJMD (950)
2	Indeks Daya Saing Infrastruktur	NA	64	%	Belum mencapai target 2020 (80,01%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (82,56%)
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,08	0		NA
4	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	NA	5,65	%	Melampaui target 2020 (5%), belum mencapai target akhir RPJMD (15%)
5	Rasio Ketergantungan	49,8	41,85	%	Melampaui target 2020 (49%), dan target akhir RPJMD (49%)
C,	**Aspek Pelayanan Umum**				
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Cakupan penerbitan akta kelahiran	80	97,15	%	Melampaui target 2020 (97%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94	96,94	%	Belum mencapai target 2020 (97%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	81,83	86,46		Belum mencapai target 2020 (87,89%) belum mencapai target akhir RPJMD (89,12%)
4	Persentase instansi pengguna data kependudukan yang melakukan perjanjian kerja sama	100	100	%	Sesuai target
5	Persentase kecamatan yang update database kependudukan	100	100	%	Sesuai target
6	Persentase ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	100	100	%	Sesuai target
7	Persentase pemohon akta kelahiran yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
8	Persentase pemohon akta kematian yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
9	Persentase pemohon akta perkawinan yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
10	Persentase pemohon Kartu Identitas Anak yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
11	Persentase pemohon Kartu Keluarga yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
12	Persentase pemohon KTP-Elektronik yang terlayani	100	100	%	Sesuai target
13	Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	%	Sesuai target
14	Rasio bayi berakte kelahiran	86	93,15	%	
15	Rasio pasangan berakte nikah	100	100	%	Sesuai target
	Administrasi Pemerintahan				
16	Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya	NA	0	%	belum terlaksana
17	Indeks Kepuasan DPRD	80	100	%	Melampaui target 2020 (81%), belum mencapai target akhir RPJMD (84%)
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	74,14	81.46	%	Belumi target 2020 (82,88), belum mencapai target akhir RPJMD (86)
19	Indek Reformasi Birokrasi	68.76	69.07		Melampaui target 2020 (68), belum mencapai target akhir RPJMD (75)
20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73,84	74,96		Telah mencapai target 2020 (74). Dan belum mencapai target akhir RPJMD (80)
21	Nilai Evaluasi LKJIP Sekretariat Daerah	73.92	86.705		Melampaui target 2020 (73,92) dan target akhir RPJMD (73,95)
22	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiapb Alat-Alat Kelengkapan DPRD	NA	5	Doku-men	Sesuai target

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
23	***Energi dan sumber daya mineral***				
	Kearsipan				
24	Nilai penyelenggaraan Kearsipan	52	86	Nilai	Melampaui target 2020 (172), dan melampaui target akhir RPJMD (77)
25	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	100	90	Orang	Belum mencapai target 2020 (185 orang). Dan belum mencapai target akhir RPJMD (1.120 orang)
26	Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas	NA	40	%	Sesuai target 2020 (40%), belum mencapai target akhir RPJMD (90%)
27	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	NA	14.5	%	Sesuai target 2020 (14,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (36,4%)
28	Persentase unit kerja/ OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar	NA	14,5	%	Sesuai target 2020 (14,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (36,4%)
	Kebudayaan				
29	Persentase jenis kesenian yang dilestarikan	11,32	66,04	%	Melampaui target 2020 (50,94%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
30	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	72,73	0	%	NA
31	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	32,87	72,72	%	Melampaui target 2020 (47,47%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
32	Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati	28	36	%	Belum mencapai target 2020 (44%) dan target akhir RPJMD (100%)
	Kehutanan				
	Kelautan dan perikanan				
33	Konsumsi Ikan	14,5	21,05	kg/kapita/tahun	Melampaui target 2020 (14,53%) dan target akhir RPJMD (14,83%)
34	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	2,74	5,7	%	Melampaui target 2020 (2%), belum mencapai target akhir RPJMD (10%)
35	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	4,53	2,07	%	Melampaui target 2020 (1,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,5%)
36	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5,05	1,52	%	Sesuai target 2020 (1,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,5%)
37	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	3,56	2,63	%	Melampaui target 2020 (1,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,5%)
38	Produksi olahan hasil perikanan	170,2	188,5	Ton	Melampaui target 2020 (177,1 ton) belum mencapai target akhir RPJMD (903,4 Ton)
39	Produksi Perikanan Budidaya	10167	10931,4	Ton	Melampaui target 2020 (10.559 Ton), belum mencapai target akhir RPJMD (53.597 Ton)
40	Produksi Perikanan Tangkap	902,85	926,55	Ton	Melampaui target 2020 (898 Ton), belum mencapai target akhir RPJMD (4.560 Ton)
	Kepegawaian				

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
41	Indeks Profesionalitas ASN	82,79	67,48		Belum mencapai target 2020 (83,4) dan target akhir RPJMD (83,7)
42	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	189	193	jabatan	Melampaui target 2020 (189 jabatan) dan target akhir RPJMD (189 jabatan)
43	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	31	30	jabatan	Belum mencapai target 2020 (31 jabatan) dan belum mencapai target akhir RPJMD (31 jabatan)
44	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	40	91	%	Melampaui target 2020 (91%), belum mencapai target akhir RPJMD (95%)
	Kepemudaan dan Olah Raga				
45	Persentase organisasi pemuda yang aktif	NA	100	%	Melampaui target 2020 (56%) dan target akhir RPJMD (71%)
46	Persentase pertumbuhan pemuda berprestasi	NA	-23,33	%	Belum mencapai target 2020
	Kesehatan				
47	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO	70	70,59	%	Sesuai target
48	Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk)	< 0.05	0		Tidak ada kejadian malaria
49	Angka Kelangsungan Hidup bayi	991,57	992,9		Melampaui target 2020 (991,8) dan target akhir RPJMD (992,1)
50	Angka kematian balita	9,2	8,95		Belum mencapai target 2020 (8,8) dan target akhir RPJMD (8,2)
51	Angka Kematian Bayi	7,4	7,06		Melampaui target 2020 (8,01) dan target akhir RPJMD (7,9)
52	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	37,6	41.5		Melampaui target 2020 (67,5) dan target akhir RPJMD (66,5)
53	Angka Kematian Neonatal	5.84	6,42		Belum memenuhi target 2020 (5,25) dan target akhir RPJMD (4,5)
54	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	73.33	73.72	Tahun	Melampaui target 2020 (73,63 tahun), belum mencapai target akhir RPJMD (73,93 tahun)
55	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	%	Sesuai target
56	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	100	100	%	Sesuai target
57	Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	100	100	%	Sesuai target
58	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	%	Sesuai target
59	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	10	16,62	%	Melampaui target 2020 (11,5%) dan target akhir RPJMD (13%)
60	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	100	81,3	%	Belum melampui target RPJMD
61	Cakupan komplikasi kebidanan yang	100	100	%	Sesuai target

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	ditangani				
62	Cakupan kunjugan ibu hamil K4	100	100	%	Sesuai target
63	Cakupan kunjungan bayi	100	100	%	Sesuai target
64	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	100	%	Sesuai target
65	Cakupan pelayanan anak balita	100	100	%	Sesuai target
66	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100	100	%	Sesuai target
67	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit)	100	100	%	Sesuai target
68	Cakupan pelayanan ibu hamil K1	100	100	%	Sesuai target
69	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	%	Sesuai target
70	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada pondok pesantren	NA	100	%	Sesuai target
71	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	%	Sesuai target
72	Cakupan pelayanan nifas	100	100	%	Sesuai target
73	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100	100	%	Sesuai target
74	Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK	NA	100	%	Sesuai target
75	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	%	Sesuai target
76	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	100	73.37	%	Belum memenuhi target RPJMD
77	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	NA	98,22	%	Sesuai target
78	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	%	Sesuai target
79	Cakupan Puskesmas	144	148	%	Belum memenuhi target RPJMD
80	Cakupan Puskesmas Pembantu	11.78	11,78	%	Sesuai target
81	Case Fatality Rate DBD (%)	5,9	3,2	%	Sesuai target
82	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Ajibarang	76.78	82.58		Belum memenuhi target 2020 (83) dan target akhir RPJMD (85)
83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Banyumas	76.78	79		Melampaui target 2020 (76), belum mencapai target akhir RPJMD (85)
84	Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	NA	83,29		Sudah melampui target e akhir RPJMD (79)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
85	Non AFP rate per 100,000 penduduk	>= 2	1.71		Sesuai target
86	Penderita diare yang ditangani	100	100	%	sesuai target
87	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	60,61	%	Belum memenuhi target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
88	Persentase balita gizi kurang mendapatkan PMT	100	76.05	%	Belum memenuhi target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
89	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	%	Sesuai target
90	Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	NA	6.87	%	Belum mencapai target 2020 (4%) dan target akhir RPJMD (3%)
91	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100	99.67	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
92	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	26.05	61.99	%	Melampaui target 2020 (56%), belum mencapai target akhir RPJMD (65%)
93	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	68.18	80	%	Melampaui target 2020 (77,27%), belum mencapai target akhir RPJMD (86,36%)
94	Persentase Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	NA	100	%	Belum mencapai target 2020 (75%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
95	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa 10% untuk Bidang Kesehatan	5	59,8	%	Melampaui target 2020 (15%) dan target akhir RPJMD (30%)
96	Persentase Fasyankes primer / sekunder yang memberikan pelayanan sesuai standar	NA	100	%	Sesuai target
97	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	%	Sesuai target
98	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	%	Sesuai target
99	Persentase Jaminan Kesehatan Nasional	71.21	83.14	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
100	Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga	18.5	59.26	%	Melampaui target 2020 (22,5%) dan target akhir RPJMD (35%)
101	Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM	100	100	%	mudah mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
102	Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	50	100	%	Melampaui target 2020 (70%), sesuai target akhir RPJMD 100%)
103	Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat 10 %	100	100	%	Sesuai target
104	Persentase Kecamatan yang mencapai Rumah	79.6	80	%	sesuai target

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	Tangga sehat 76,5%				
105	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	80	80	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
106	Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	100	50	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
107	Persentase kunjungan neonatus lengkap dengan MTBM	100	50	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
108	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	NA	99.63	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
109	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	NA	100	%	Sesuai target
110	Persentase orang terdeteksi dini infeksi Hepatitis B	1.82	1	%	Sesuai target
111	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	100	100	%	sesuai target
112	Persentase orang usia 15 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	NA	39.86	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
113	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	35.91	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
114	Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN	95	100	%	Sudah mencapai target akhir RPJMD (95%)
115	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	NA	91.97	%	Belum mencapai target 2020 (100%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
116	Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100%	100	100	%	sesuai target
117	Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	5	12	%	Belum mencapai target 2020 (66%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
118	Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat	25	27	%	Belum mencapai target 2020 (53%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
119	Persentase puskesmas melaksanakan STBM	100	100	%	Sesuai target
120	Persentase Puskesmas Terakreditasi	95	100	%	sesuai target
121	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	65	65	%	Sesuai target 2020 (65%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
122	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar	85	85	%	Sesuai target 2020 (85%), belum mencapai target akhir RPJMD (95%)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
123	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang layak	73.33	88.45	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
124	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	65	20	%	Belum mencapai target 2020 (65%) dan target akhir RPJMD (95%)
125	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	NA	41.16	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
126	Prevalensi anemia pada ibu hamil	NA	13.38	%	Melampaui target 2020 (20%) belum mencapai target akhir RPJMD (10%)
127	Prevalensi balita stunting	24.5	14,21	%	Melampaui target 2020 (17%) belum mencapai target akhir RPJMD (14%)
128	Prevalensi Gizi Buruk	0.06	0.06	%	Melampaui target 2020 (0,07%) belum mencapai target akhir RPJMD (0,05%)
129	Prevalensi gizi kurang	7.6	7,59	%	Melampaui target 2020 (7,7%) dan target akhir RPJMD (7,4%)
130	Prevalensi HIV / AIDS (%) dari total populasi	0.17	0.14	%	Sesuai target
131	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita mencapai 9,5%	NA	3.9	%	Melampaui target 2020 (72%) dan target akhir RPJMD (80%)
132	Prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun	13.31	3,53	%	Melampaui target 2020 (12,1%) dan target akhir RPJMD (11,8%)
133	Prevalensi tekanan darah tinggi	26.3	14.45	%	Melampaui target 2020 (38,5%) dan target akhir RPJMD (37,9%)
134	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat antimalaria yang tepat	100	100	%	Sesuai Target
135	Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	70.1	77.4	%	Sesuai target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (85%)
136	Proporsi penduduk dengan asupan minimal < 2.100 Kkal/hari	NA	74.7	%	Belum mencapai target 2020 (70%) dan target akhir RPJMD (64%)
137	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	75	88,47	%	Sesuai target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (85%)
138	Rasio dokter per satuan penduduk	0.14	0,03	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (0,2)
139	Rasio posyandu per satuan balita	20.29	21,8		Sudah mencapai target 2020 (20,5) dan target akhir RPJMD (20,7)
140	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0.02	0,02		Sudah mencapai target akhir RPJMD (0,02)
141	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.01	0,012	Rasio	Sudah mencapai target 2020 (0,01) dan target akhir RPJMD (0,01)
142	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.35	0,05	%	Sudah mencapai target akhir RPJMD (0,04)
143	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	%	Tidak ada kejadian malaria

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
144	Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100,000 penduduk)	3	4,43		Belum mencapai target akhir RPJMD (2)
145	Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100,000 penduduk)	168	278		belum mencapai target 2020 (164) dan target akhir RPJMD (158)
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat				
146	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	53	100	%	Sudah mencapai target 2020 (60%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (75%), namun perlu di retargeting karena kekeliruan perhitungan target di awal.
147	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	100	100	%	Sesuai target
148	Indeks Demokrasi	NA	72		Belum mencapai target 2020 (79.30), dan belum mencapai target akhir RPJMD (86)
149	Informasi peta rawan bencana	NA	100	%	Sesuai target
150	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan Perkada	100	100	%	Sesuai target
151	Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	NA	3,7	%	Belum mencapai target 2020 (37,04%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
152	Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat	100	100	%	Sesuai target
153	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100	100	%	Sesuai target
154	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	%	Sesuai target
155	Persentase lembaga keagamaan aktif	NA	10	%	Belum mencapai target 2020 (60%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (70%)
156	Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	%	Sesuai target
157	Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP	NA	100	%	Sesuai target
158	Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada	74	78	%	Melampaui target 2020 (75%), sesuai target akhir RPJMD (78%)
159	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100	100	%	Sesuai target
160	Persentase penanganan pelanggaran PERDA	90	100	%	Sesuai target
161	Persentase penegakan perda	90	100	%	Sesuai target

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
162	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	NA	100	%	Sesuai target
163	Persentase penurunan angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM	NA	0	%	Melampaui target, tidak terdapat konflik
164	Persentase penurunan konflik SARA	NA	50	%	Melampaui target tager 2020 (5) dan Target akhir RPJMD (25)
165	Persentase penurunan konflik sosial	NA	0,19	%	Belum mencapai target 2020 (5%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (25%)
166	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	12	15	%	Belum mencapai target 2020 (42,3%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (66,7%)
167	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	%	Sesuai target
168	Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	NA	5	%	Belum mencapai target 2020 (30%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (45%)
169	Rasio pengurangan resiko bencana	NA	30		Belum mencapai target tahun 2020 (35) dan target akhir RPJMD (55)
170	Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik	70	78	%	Melampaui target 2020 (75%) dan target akhir RPJMD (75%)
171	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	100	%	Sesuai target
172	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100	53	%	Belum mencapai target tahun 2020 dan target RPJMD (100%) serta perlu retargeting karena kekeliruan perhitungan target di awal.
	Keuangan				
173	Kontribusi PAD terhadap APBD	15	17	%	Melampaui target 2020 (15%), belum mencapai target akhir RPJMD (18%)
174	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	100	100	%	Sesuai target
175	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	0,37	0,36		Sesuai target 2020 (0,37) dan belum mencapai target akhir RPJMD (0,41)
176	Persentase belanja kesehatan (10%)	12	12	%	Sesuai target
177	Persentase belanja pendidikan (20%)	29	29	%	Sesuai target
178	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	100	100	%	Sesuai target
179	Persentase SILPA	11.94	4,8	%	Melampaui target 2020 (6,6%) tapi belum mencapai target akhir RPJMD (3,94%)
	Komunikasi dan Informatika				
180	Indeks Sistem	NA	3,09		Melampaui target 2020 (2,9)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				dan belum mencapai target akhir RPJMD (3,5)
181	Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	8	8		Belum mencapai target 2020 (peringkat 4) dan target akhir RPJMD (peringkat 2)
182	Persentase aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	10	40	%	Sesuai target 2020 (40%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
183	Persentase SDM yang melek IT	10	40	%	sesuai target 2020 (40%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
184	Rasio Lapak aduan publik berbasis IT	NA	100	%	sesuai target
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
185	Persentase koperasi aktif	80,51	80,6	%	Sudah melampaui target 2020 (76,5%) dan target akhir RPJMD (77,25%)
186	Persentase koperasi sehat	29,12	22,24	%	Belum mencapai target 2020 (30,25%) dan target akhir RPJMD (31%)
187	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	0,39	1,73	%	Melampaui target 2020 (1,34%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (1,98%)
188	Persentase Pertumbuhan UMKM	0,34	0,484	%	Melampaui target 2020 (0,47%) dan target akhir RPJMD (0,47%)
189	Persentase Pertumbuhan UMKM dan IKM	0,34	0,34	%	Belum mencapai target 2020 (0,46%) dan target akhir RPJMD (0,46%)
	Lingkungan Hidup				
190	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	NA	0	Dokume n	Belum mencapai target 2020 (1 dokumen) dan target akhir RPJMD (1 dokumen)
191	Indeks Kualitas Air (IKA)	46,94	59,33		Melampaui target 2020 (54,4) dan target akhir RPJMD (55)
192	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	NA	70,04		Melampaui target 2020 (63,88) dan target akhir RPJMD (64,15)
193	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	NA	70,04		Melampaui target 2020 (56,5) dan target akhir RPJMD (56,5)
194	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,72	85,07		Melampaui target 2020 (83,2) dan target akhir RPJMD (83,5)
195	Integrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	NA	0	Dokume n	Belum mencapai target akhir RPJMD (1 dokumen)
196	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	74	73,42		Melampaui target 2020 dan target akhir RPJMD (72)
197	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah KabupatenKota lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupatenkota	NA	100	%	Sesuai target
198	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	NA	52	%	Sesuai target 2020 (52%), belum mencapai target akhir RPJMD (58%)
199	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	NA	22	%	Sesuai target 2020 (22%), belum mencapai target akhir RPJMD (27%)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
200	Persentase jumlah sampah yang tertangani	54	97	%	Sesuai target 2020 (97%), belum mencapai target akhir RPJMD (99%)
201	Timbulan sampah yang ditangani	54	97	%	Sesuai target 2020 (97%), belum mencapai target akhir RPJMD (99%)
	Pangan				
202	Indeks Ketahanan Pangan	NA	79,27		Melampaui target 2020 (74,01) dan target akhir RPJMD (74,04)
203	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	90	109,12	%	Melampaui target 2020 (95%) dan target akhir RPJMD (97%)
204	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	70	98,39	%	Melampaui target 2020 (94,43%) dan target akhir RPJMD (97,43%)
205	Persentase Penguatan cadangan pangan	70	81,97	%	Melampaui target 2020 (80%), belum mencapai target akhir RPJMD (86%)
206	Stabilitas harga dan pasokan pangan	95	80	%	Belum mencapai target 2020 (97%) dan target akhir RPJMD (100%)
207	Tingkat ketersediaan energi	91	91,52	%	Belum mencapai target 2020 (93%) dan target akhir RPJMD (96%)
208	Tingkat ketersediaan protein (%)	91	81,26	%	Belum mencapai target 2020 (93%) dan target akhir RPJMD (96%)
	Pariwisata				
209	Jumlah kunjungan wisatawan	3.580.743	1.866.157	wisatawan	Belum mencapai target 2020 (3.134.193 wisatawan) dan target akhir RPJMD (16.598.729 wisatawan)
210	Persentase pertumbuhan desa wisata	NA	107	%	Melampaui target 2020 (64,29%) dan target akhir RPJMD (100%)
211	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	NA	-61,85	%	Belum mencapai target 2020 (5,86%) dan target akhir RPJMD (48,48%)
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
212	Persentase advice planning yang dikeluarkan sesuai tata ruang	100	100	%	Sesuai target
213	Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	57,7	66,7	%	Belum mencapai target 2020 (66,7%) dan target akhir RPJMD (75,7%)
214	Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik	71,8	78,98	%	Melampaui target 2020 (74,05%) dan target akhir RPJMD (78,8%)
215	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	75,39	79,01	%	Melampaui target 2020 (73,1%) dan target akhir RPJMD (77,6%)
216	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	71,03	45,04	%	Belum mencapai target 2020 (53,06%) dan target akhir RPJMD (68,06%)
217	Persentase kenaikkan anggaran irigasi	0	90,4	%	Melampaui target 2020 (6%)dan target akhir RPJMD

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
					(9%)
218	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	99,979	99,982	%	Sesuai target 2020 (99.982%) dan belum mencapai taget akhir RPJMD (99,985%)
219	Persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	0	0	%	Belum ada target di 2019 dan 2020
220	Persentase kinerja perencanaan teknis dan kinerja pembinaan jasa konstruksi	NA	50.47	%	Melampaui target 2020 (30,23%), belum mencapai target akhir RPJMD (67,65%)
221	Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	0,021	0.018	%	Sesuai target 2020 (0,018) dan me;ampaui target akhir RPJMD (0,015%)
222	Persentase peningkatan jalan hotmix	NA	29,07	%	Belum mencapai target 2020 (40%) dan target akhir RPJMD (100%)
223	Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	NA	85,8	%	Belum mencapai target 2020 (86,71%) dan target akhir RPJMD (91,24%)
224	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,71	0,45		Belum mencapai target 2020 (0,53%) dan target akhir RPJMD (0,68%)
225	Rasio jaringan irigasi	37,69	38,55		Melampaui target 2020 (37,69) dan target akhir RPJMD (37,69%)
226	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	NA	0,81971		Sesuai target 2020 (0,81971) dan belum mencapai target akhir RPJMD (0,88659)
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
227	Indeks Desa Membangun	0.66	0.6988		Telah mencapai target 2020 (0,674) dan target akhir RPJMD (0,694)
228	Kelembagaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang terbentuk	0	2	lembaga	Ssuai target 2020, belum memenuhi target akhir RPJMD (10 lembaga)
229	Kelulusan sarjana per desa	NA	0	Orang	Belum terlaksana
230	Persentase Bumdes yg meningkat stratanya	NA	9.3	%	Melampaui target 2020 (7%), belum mencapai target akhir RPJMD (37%)
231	Persentase desa dengan administrasi baik	NA	100	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD 100%
232	Persentase desa yang menghasilkan produk unggulan	NA	60	%	Telah Mencapai target akhir RPJMD (50%)
233	Persentase desa yang meningkat prasarananya	NA	2.3	%	Belum mencapai target 2020 (2,66%) dan target akhir RPJMD (13,29%)
234	Persentase desa yg telah mengembangkan/ memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk usaha perdesaan	NA	0	%	Belum mencapai target 2020 (2,66%) dan target akhir RPJMD (3,32%)
235	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2014	NA	100	%	Sesuai target

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
236	Persentase PKK aktif	100	100	%	Sesuai target
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				
237	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	%	Sesuai target
238	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	%	Sesuai target
239	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	%	Sesuai target
240	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	%	Sesuai target
241	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	%	Sesuai target
242	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	%	Sesuai target
243	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	%	Sesuai target
244	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,62	88,27		NA
245	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,32	71,92		Sudah melampui target 2020 67,5
246	Nilai Kabupaten Layak Anak	426	528		NA
247	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	49	49	%	Sesuai target
248	Preferensi kekerasan pada anak perempuan	36,89	4	%	Melampaui target 2020 (33,11%) dan target akhir RPJMD (29,32%)
249	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	18	11	Orang	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (11 orang)
250	Rasio anak korban kekerasan	0,011	0,012	%	Belum mencapai target 2020 (0,009%) dan target akhir RPJMD (0,006%)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
251	Rasio KDRT	0,0019	0,0031	%	Belum mencapai target 2020 (0,0016%) dan target akhir RPJMD (0,0013%)
	Penanaman Modal				
252	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	77,23	89,5		Melampaui target 2020 (87) dan belum mencapai target akhir RPJMD (90)
253	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Publik=MPP)	NA	89,5		Melampaui target 2020 (80), dan target akhir RPJMD (83)
254	Nilai Investasi Daerah	583	1077	Milyar Rupiah	Melampaui target 2020 (260 M), dan target akhir RPJMD (275 M)
255	Nilai investasi di kawasan industri	NA	0	Milyar Rupiah	Belum ada target di 2019 dan 2020
256	Persentase penanganan pengaduan	100	100	%	Sesuai target
257	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	2	41,54	%	Melampaui target 2020 (2%) dan target akhir RPJMD (10)
258	Prosentase pengaduan yang ditangani	40	100	%	Sesuai target
	Pendidikan				
259	Angka Kelulusan (AL) SD / MI / Paket A	100	100	%	Sesuai target
260	Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs / Paket B	99,99	100	%	Sesuai target
261	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	104,39	100	%	Sesuai target
262	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP / MTs/ Paket B ke SMA/SMK/MA/ Paket B	92,47	96,2	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
263	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	99,71	99,71	%	Sudah mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
264	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs / Paket B (13-15 tahun)	99,64	99,64	%	Sudah mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
265	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A	0,040	0.034	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
266	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs / Paket B	0,176	0	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
267	Angka rata-rata Nilai UASBN SD	92,47	65,7	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
268	Angka rata-rata Nilai UN SMP	92,47	88,29	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
269	APK PAUD/RA/ Sederajat	92,47	77.5	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
270	APK SD/MI/Paket A	92,47	106.9	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
271	APK SMP/MTs/Paket B	92,47	85.04	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
272	APM SD/MI/paket A	92,47	98.54	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
273	APM SMP/MTs/Paket B	92,47	81.23	%	Belum mencapai target 2020 (96,4%) dan target akhir RPJMD (97%)
274	Jumlah penerima beasiswa SD (akademis dan non akademis)	NA	86.246	pelajar	sesuai target 2020 (87547), belum mencapai target akhir RPJMD (92000 pelajar)
275	Jumlah penerima beasiswa SMP	NA	37.456	pelajar	Belum mencapai target
276	Persentase kepala satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target
277	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target
278	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki sertifikat pendidik	100	100	%	Sesuai target
279	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang	100	100	%	Sesuai target
280	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target
281	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki sertifikat pendidik	99	100	%	Sesuai target
282	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	100	%	Sesuai target
283	Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target
284	Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100	100	%	Sesuai target
285	Persentase pendidik PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain,	100	100	%	Sesuai target

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	atau psikologi				
286	Persentase pendidik PAUD memiliki sertifikat profesi guru PAUD	100	100	%	Sesuai target
287	Persentase pendidik SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target
288	Persentase pendidik SD memiliki sertifikat pendidik	99	100	%	Sesuai target
289	Persentase pendidik SMP memiliki ijazah minimal S1DIV	100	100	%	Sesuai target
290	Persentase pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik	100	100	%	Sesuai target
291	Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi	9	10	%	Sudah melampaui target 2020 (9,09%) dan target akhir RPJMD (7,14%)
292	Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/Dikmas Berprestasi	9	6	%	Belum mencapai target 2020 (8,33%) dpe target akhir RPJMD (6,83%)
293	Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi	12	13	%	Sesuai target 2020 (13%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
294	Persentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi	17	14	%	Sesuai target 2020 (14%) belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
295	Persentase Peningkatan Siswa SD Berprestasi	9	0	%	Belum mencapai target 2020 (9%) dan target akhir RPJMD (67%)
296	Persentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi	12	3	%	Belum mencapai target 2020 (12,5%), dan target akhir RPJMD (51,43%)
297	Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki tenaga penunjang lainnya	100	100	%	Sesuai target
298	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	16	18	%	Sesuai target 2020 (18%),dan belum mencapai target akhir RPJMD (25%)
299	Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya	80	100	%	Sesuai target
300	Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi	100	100	%	Sesuai target
301	Persentase satuan pendidikan SMP memiliki tenaga penunjang lainnya	100	100	%	Sesuai target
302	Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi	93,36	95,87	%	Sudah melampaui target 2020 (95%) dan target akhir RPJMD (100%)
303	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	77,64	71,64	%	Belum mencapai target 2020 (86,5%) dan target akhir RPJMD (88%)
304	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs	97,58	61,99	%	Belum mencapai target 2020 (89%) dan target akhir

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	kondisi bangunan baik				RPJMD (90,5%)
305	Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester	100	100	%	Sesuai target
306	Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester	100	100	%	Sesuai target
307	Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	100	100	%	Sesuai target
308	Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun	100	100	%	Sesuai target
309	Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	100	100	%	Sesuai target
310	Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	100	100	%	Sesuai target
311	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	100	100	%	Sesuai target
312	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	100	100	%	Sesuai target
313	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	100	100	%	Sesuai target
314	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	100	100	%	Sesuai target
315	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal	100	100	%	Sesuai target

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	SMA/sederajat				
316	Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki jasah minimal S1/DIV	100	100	%	Sesuai target
317	Pesentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki sertifikat pendidik	100	100	%	Sesuai target
318	Rasio Guru terhadap murid PAUD	19,3	18		Sesuai terget 2020 (18), belum mencapai target akhir RPJMD (15)
319	Rasio Guru terhadap murid SD	18,86	15,89		Sesuai target 2020 (15,89) dan belum mencapai target akhir RPJMD (19,17)
320	Rasio Guru terhadap murid SMP	19,52	18,1		Sesuai target 2020 (18,1) dan belum mencapai target akhir RPJMD (19,57)
	Pendidikan dan Pelatihan				
321	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0,083	0,09	%	Belum mencapai target 2020 (0,064%), belum mencapai target akhir RPJMD (0,378%)
	Penelitian dan Pengembangan				
322	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	NA	66,67	%	Melampaui target 2020 (62%), belum mencapai target akhir RPJMD (70%)
	Pengawasan				
323	Indeks Persepsi Korupsi	3,38	3,73		Melampaui target 2020 (3,5%), belum mencapai target akhir RPJMD (3,75%)
324	Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan	NA	94	%	Melampaui target 2020 (78%), belum mencapai target akhir RPJMD (85%)
325	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan	60	42	%	Belum mencapai target 2020 (72%) dan target akhir RPJMD (78%)
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
326	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19 tahun) per 1000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)	0,41	1,36	%	Belum mencapai target 2020 (0,28%) dan target akhir RPJMD (0,24%)
327	Angka Kelahiran Total TFR	2,31	0	Orang	Target tahun 2020 (2,28) dan target akhir RPJMD (2,25)
328	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	75,25	73,67	%	Belum mencapai target 2020 (76,39%) dan target akhir RPJMD (76,89%)
329	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	57	79,99	%	Melampaui target 2020 (69%) dan target akhir RPJMD (70%)
330	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	78,81	76,27	%	Belum mencapai target 2020 (81,31%) dan target akhir RPJMD (82,81%)
331	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	57	80,92	%	Melampaui target 2020 (59%) dan target akhir RPJMD 60%)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
332	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	5770	6815	Orang	Melampaui target 2020 (5606 orang) dan target akhir RPJMD (5550 orang)
333	Jumlah kebijakan (Perda /Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	NA	0	aturan	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD yaitu 1 aturan
334	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,87	1,8	%	Belum mencapai target 2020 (0,85%), dan target akhir RPJMD (0,82%)
335	Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	47	74,64	%	Belum mencapai target 2020 (46,8%) dan target akhir RPJMD (46,5%)
336	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	36,75	44,3	%	Melampaui target 2020 (39%) dan target akhir RPJMD (42%)
337	Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	17	23	%	Belum mencapai target 2020 (25%) dan target akhir RPJMD (35%)
338	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	6	8	%	Sesuai target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (10%)
339	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	70	35,73	%	Belum mencapai target 2020 (70%) dan target akhir RPJMD (74%)
340	Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB	100	100	%	Sesuai target
341	Rasio Akseptor KB	73	73,67	%	Melampaui target 2020, belum mencapai target akhir RPJMD (74%)
342	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	%	Sesuai target
343	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,8	1,4	anak	Melampaui target 2020 (2,5 anak) dan target akhir RPJMD (2,3 anak)
	Perdagangan				
344	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	1118	96	Kelompok	Melampaui target 2020 (54 kelompok), belum mencapai target akhir RPJMD (270 kelompok)
345	Jumlah Gula Kelapa Terekspor	6000	12.233,82	Ton	Melampaui target 2020 (12.000 ton), belum mencapai target akhir RPJMD (30.000 ton)
346	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	22.691.050	47.459.487,67	$ USD	Melampaui target 2020 ($US 20 juta) dan target akhir RPJMD ($US 20 juta)
347	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	4,44	8,11	%	Sudah Melampaui Target 2020 (4,48%) dan Target akhir RPJMD (4,52%)
	Perencanaan				
348	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan	100	100	%	Sesuai target

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
	dokumen penganggaran perangkat daerah				
349	Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD	61,51	44,03	%	Belum mencapai target 2020 (70%) dan target akhir RPJMD (85%)
350	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	NA	100	%	Melampaui target 2020 (91%) dan target akhir RPJMD (95%)
351	Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan	NA	91,67	%	Melampaui target 2020 (91%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (95%)
	Perhubungan				
352	Persentase ketersediaan terminal	37,5	37,5	%	Belum mencapai target 2020 (50 %) dan target akhir RPJMD (62,5%)
353	Persentase pemasangan rambu-rambu	36	43	%	Sesuai target 2020 (43%), belum memenuhi target akhir RPJMD (48%)
354	Prosentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan	39	52	%	Sesuai target 2020 (52%), belum memenuhi target akhir RPJMD (60%)
355	Rasio ijin trayek	0,064	0,071		Sesuai target 2020 (0.071), belum memenuhi target akhir RPJMD (0.077)
	Perindustrian				
356	Cakupan bina kelompok pengrajin	662	153	Kelompok	Melampaui target 2020 (66 kelompok), dan belum mencapai target akhir RPJMD (331 kelompok)
357	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	0,39	1,73	%	Melampaui target 2020 (1,34%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (331 kelompok)
358	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	5,78	7,99	%	Sudah Melampaui target 2020 (5,82%) dan target akhir RPJMD (5,86%)
	Perpustakaan				
359	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	27.636	37.364	judul buku	Melampaui target 2020 (36.390 judul buku) dan target akhir RPJMD (36.540 judul buku)
360	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	59.313	61.335	Buku	Melampaui target 2020 (56.250 buku), belum mencapai target akhir RPJMD (61.344 buku)
361	Persentase jumlah perpustakaan terbina	5,55	30,64	%	Melampaui target 2020 (26,38%), belum mencapai target akhir RPJMD (47,22%)
362	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat	2,8	37,25	%	Melampaui target 2020 (2,88%) dan target akhir RPJMD (2,93%)
363	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah	4,8	3,56	%	Belum mencapai target 2020 (5,93%), belum mencapai target akhir RPJMD (7,89%)
364	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	NA	0,48	Rasio	Melampaui target 2020 (0,053) dan target akhir RPJMD (0,053)
365	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan	NA	609	Orang	Belum mencapai target 2020 (1.083 orang) belum mencapai target akhir RPJMD (1.365 orang)
	Persandian				

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
366	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	0	43	%	Sesuai target 2020 (43%), belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
367	Standarisasi Keamanan Data ISO 27001	3	17	anek	Sesuai target
368	Standarisasi pusat data/data center	3	17	anek	Sesuai target
	Pertanahan				
369	Persentase luas tanah milik Pemkab yang bersertifikat	NA	50,33	%	Melampaui target 2020 (38,51%) dan target akhir RPJMD (39,47%)
	Pertanian				
370	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Peternakan	NA	2	%	Sesuai target 2020 (2%), belum mencapai target akhir RPJMD (10%)
371	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	6,19	4,99	%	Melampaui target 2020 (3%), belum mencapai target akhir RPJMD (15%)
372	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	NA	-1.36	%	Belum mencapai target 2020 (1%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (5%)
373	Produksi Daging	19.471	23.429,99	Ton	Melampaui target 2020 (22.357 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (115.241 ton)
374	Produksi olahan hasil peternakan	NA	545,61	Ton	Melampaui target 2020 (520.21 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (2.654,06 ton)
375	Produksi Susu	5.594.500	4.015.464	Liter	Melampaui target 2020 (3.860.000 liter) dan belum mencapai target akhir RPJMD (19.897.000 liter)
376	Produksi tanaman Cabai	1570	2.000	Ton	Melampaui target 2020 (1.832,5 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (9.244,05 1 ton)
377	Produksi tanaman cengkeh	310	523,02	Ton	Melampaui target 2020 (489.97 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (2.950,17 ton)
378	Produksi tanaman Durian	4.862,4	6.159,18	Ton	Belum mencapai target 2020 (9.879,02 ton), dan target akhir RPJMD (49.648,07 ton)
379	Produksi tanaman Jagung	13006	31.784,58	Ton	Melampaui target 2020 (13.400 ton), dan belum mencapai target akhir RPJMD (67.677 ton)
380	Produksi tanaman Kedelai	1562,01	298,51	Ton	Belum mencapai target 2020 (1.609,34 ton), dan belum mencapai target akhir RPJMD (8.128,00 ton)
381	Produksi tanaman kelapa dalam	13.284	14.330,93	Ton	Melampaui target 2020 (14.174,53 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (71.563,81 ton)
382	Produksi tanaman kelapa deres	54.731	55.884,43	Ton	Melampaui target 2020 (55.388,89 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (279.792,09 ton)
383	Produksi tanaman kopi	142	183,04	Ton	Melampaui target 2020 (146,34 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (739,11 ton)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
384	Produksi tanaman lada	58,77	90,22	Ton	Melampaui target 2020 (60,55 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (305.81 ton)
385	Produksi tanaman Padi	375.000	371.827,14	Ton	Belum mencapai target 2020 (425.000 ton), belum mencapai target akhir RPJMD (22.500.000 ton)
386	Produksi tanaman pala	25,97	54,45	Ton	Melampaui target 2020 (41,62 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (221.60 ton)
387	Produksi tanaman Pisang	20.510,8	31.375,6	Ton	Melampaui target 2020 (27.599,79 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (139.066,13 ton)
388	Produksi tanaman tembakau	14	77,26	Ton	Melampaui target 2020 (14.56 ton) dan target akhir RPJMD (73.53 ton)
389	Produksi Telur	16.910,4	18.309,74	Ton	Melampaui target 2020 (17.724 ton) dan belum mencapai target akhir RPJMD (91.361 ton)
390	Produktivitas tanaman Jagung	5,92	6,12	ton / ha	Belum mencapai target 2020 (6,46 ton/ha), belum mencapai atrget akhir RPJMD (6,6 ton/ha)
391	Produktivitas tanaman Kedelai	1,53	1,25	ton / ha	Belum mencapai target 2020 (1,38 ton/ha), dan belum mencapai target akhir RPJMD (1,43 ton/ha)
392	Produktivitas tanaman Padi	5,57	5,81	ton / ha	Belum mencapai target 2020 (5,89 ton/ha), belum mencapai atrget akhir RPJMD (6,25 ton/ha)
393	Rasio jumlah petani pengguna safety belt	NA	0,25	%	Sesuai target 2020 (0,25%), belum mencapai target akhir RPJMD (1%)
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
394	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	NA	78,76	%	Sesuai target 2020 (78,76%) dan melampaui target akhir RPJMD (77,58%)
395	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	NA	53,6	%	Belum mencapai target 2020 (53,77%) dan target akhir RPJMD (59,84%)
396	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	NA	100	%	Melampaui target 2020 (81,48%) dan target akhir RPJMD (96,30%)
397	Jumlah IPAL Komunal	58	72	Unit	Sesuai target 2020 (72),dan belum mencapai target akhir RPJMD (87 unit)
398	Persentase areal kawasan kumuh	NA	20,187	%	Belum mencapai target 2020 (20,23%) dan target akhir RPJMD (20,19%)
399	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	NA	11,38	%	Belum mencapai target 2020 (11,48%) dan target akhir RPJMD (11,63%)
400	Persentase lingkungan pemukiman kumuh kawasan perkotaan	NA	7,8	%	Melampaui target 2020 (8,16%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (7,84%)
401	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	NA	85,2	%	Melampaui target 2020 (85,17%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (88,17%)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
402	Persentase penanganan permukiman kumuh	NA	0,44	%	Belum mencapai target 2020 (6,09%) dan target akhir RPJMD (9,75%)
403	Persentase permukiman yang tertata	7,98	9,32	%	Belum mencapai target 2020 (9,45%) dan target akhir RPJMD (9,09%)
404	Persentase rumah sehat sesuai standar	75,37	78,76	%	Melampaui target 2020 (76,81%) dan target akhir RPJMD (77,58%)
405	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	75,33	88,45	%	Melampaui target 2020 (86%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (92%)
406	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	NA	75,45	%	Melampaui target 2020 (73,37%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (77,08%)
407	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	NA	1,26	%	Belum mencapai target 2020 (1,34%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (0)
408	Rasio permukiman layak huni	NA	79,813	%	Belum mencapai target 2020 (79,82%) dan target akhir RPJMD (80,10%)
409	Rasio rumah layak huni	NA	78,76	%	Melampaui target 2020(78,34%), belum mencapai target akhir RPJMD (83,95%)
410	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	NA	35,33		Belum mencapai target 2020 (39,42%) dan target akhir RPJMD (46,18%)
	Sosial				
411	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	NA	35,94	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
412	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	NA	18,41	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
413	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	NA	100	%	Sesuai target
414	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	%	Sesuai target
415	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	%	Sesuai target
416	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	NA	19,12	%	Belum mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD (100%)
417	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	33	%	Melampaui target 2020 (21,47%), dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Satuan	Intepretasi
		2019	2020		
418	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	NA	0	%	Belum mencapai target 2020 (8,33%) dan target akhir RPJMD (41,67%)
419	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9,44	15,66	%	Belum mencapai target 2020 (39,58%) dan target akhir RPJMD (60,18%)
420	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	NA	26,91	%	Belum mencapai target 2020 (100%) dan target akhir RPJMD (100%)
421	Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial	43,19	57,26	%	Melampaui target 2020 (51,51), dan target akhir RPJMD (51,67%)
422	Persentase PMKS/PPKS yang tertangani	43,49	57,36	%	Melampaui target 2020 (52,15), dan target akhir RPJMD (52,33%)
	Statistik				
423	Persentase Data Informasi dan Statistik Yang Terpublikasi dengan baik	100	100	%	Sesuai target
	Tenaga Kerja				
424	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	NA	9,38		Sudah melampaui target 2020 (6,16%) dan target akhir RPJMD (6,16%)
425	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	49,58	48,75	%	Belum mencapai target 2020 (57%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (63%)
426	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	NA	54,54	%	Belum mencapai target 2020 (80%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%)
	Transmigrasi				
427	Persentase transmigran yang ditempatkan	100	0	%	Sesuai target

Untuk analisis pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB/SDGs, dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 capaian tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB/SDGs dikelompokan dalam 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB);
3. Indikator TPB tidak ada target dalam RPJMD daerah tetapi tercapai (TTC);
4. Indikator TPB tidak ada target dalam RPJMD dan belum tercapai (TTT);
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA); dan
6. Indikator TPB tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD).

Jumlah indikator TPB di Kabupaten Banyumas adalah 222 indikator, meliputi 16 tujuan TPB. Tujuan 14 “Konservasi dan

pemanfataan sumber daya laut, samudera dan maritim" tidak sesuai karakteristik Kabupaten Banyumas dan juga bukan merupakan kewenangan kabupaten. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan dalam RPJMD dan mencapai target nasional telah mencapai 28% (62 indikator) dari total 222 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten. Berikut proporsi capaiannya sebagaimana tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.103
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR	SS	SB	TTC	TTT	NA	TKD
T01	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	24	10	6	2	3	3	0
T02	Menghilangkan kelaparan, pencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	11	3	1	6	1	0	0
T03	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	34	9	1	10	9	5	0
T04	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	15	5	4	5	0	1	0
T05	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	14	5	2	2	0	5	0
T06	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	18	5	4	1	5	2	1
T07	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	2	0	0	0	0	1	1
T08	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	19	4	3	3	4	5	0
T09	Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	13	2	0	4	0	3	4

No	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR	SS	SB	TTC	TTT	NA	TKD
T10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	11	1	2	2	0	3	3
T11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan	13	2	1	3	2	1	4
T12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	5	0	0	1	0	4	0
T13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	2	0	0	1	1	0	0
T14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	0	0	0	0	0	0	0
T15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfataan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	4	0	0	1	3	0	0
T16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	21	12	2	1	1	5	0
T17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	16	4	1	4	5	1	1
	JUMLAH	**222**	**62**	**27**	**46**	**34**	**39**	**14**
			28%	**12%**	**21%**	**15%**	**18%**	**6%**

Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2023, 2020

Keterangan :
SS = Dilaksanakan dalam RPJMD dan telah mencapai target
SB = Dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum mencapai target
TTC = Belum terdapat dalam RPJMD tetapi mencapai target
TTT = belum terdapat dalam RPJMD dan belum mencapai target
NA = Belum ada data

TKD = Tidak sesuai dengan Konteks Daerah

Dari 208 indikator TPB yang menjadi wewenang dan relevan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan **89 indikator** dalam RPJMD, sebanyak 62 indikator (28%) di antaranya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017, sisanya yaitu 27 indikator (12%) belum mencapai target nasional yang ditetapkan. Sebanyak 80 indikator (36%) terdapat data dari OPD tetapi belum menjadi indikator dalam RPJMD, dimana 46 indikator (21%) telah tercapai sesuai target nasional. Sisanya 53 indikator (24%) tidak terdapat data dengan rincian 14 indikator tidak sesuai karakteristik Kabupaten Banyumas dan sisanya 39 indikator tidak ditemukan data dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pengkategorian capaian indikator TPB bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Banyumas pada periode RPJMD. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang memiliki indikator SB, TTT, dan NA yang menunjukkan banyaknya indikator TPB yang belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional (SS) juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut. Berikut grafik capaian TPB Kabupaten Banyumas.

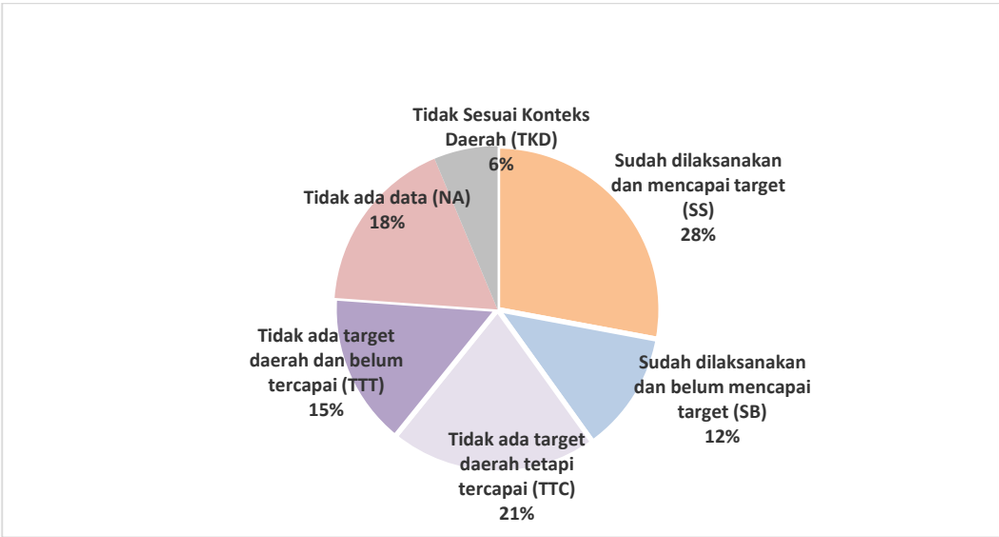

Gambar 2.47
Komposisi Capaian Indikator TPB Kabupaten Banyumas 2020
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

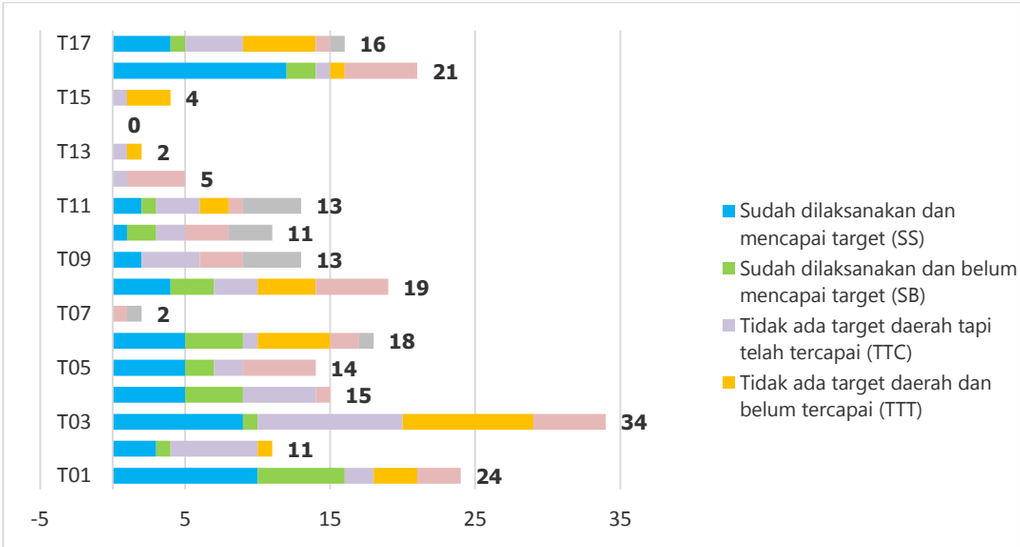

Gambar 2.48
Rincian Capaian Indikator TPB Kabupaten Banyumas 2020

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, 2020

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Banyumas terhadap target nasional, maka terdapat 4 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

- Tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dengan total indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 18 indikator (52%) telah mencapai target dan 11 indikator (32%) belum mencapai target dan sisanya 5 indikator belum memiliki data.
- Tujuan 1 yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun dengan indikator yang dinilai sebanyak 24 indikator dan sebanyak 12 indikator (50%) telah mencapai target nasional, 9 indikator (37%) belum mencapai target dan sisanya 3 indikator belum memiliki data.
- Tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator dengan capaian yang telah mencapai target sebanyak 13 indikator (61%), 3 indikator (14%) belum mencapai target dan sisanya 5 indikator belum memiliki data.

Hampir seluruh tujuan telah memiliki indikator dengan capaian melebihi target nasional, meskipun proporsinya berbeda-beda. Sedangkan tujuan yang belum memiliki indikator dalam kelompok tercapai adalah tujuan 7 yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua yang belum memiliki indikator yang mencapai target nasional karena keterbatasan data yang dimiliki untuk bauran energi terbarukan. Meskipun secara kewenangan data tersebut ada di pusat melalui Kementerian ESDM tetapi indikator tersebut didorong untuk dijalankan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan produksi dan penggunaan energi terbaharukan sesuai potensi dan kewenangan masing-masing wilayah. Khusus untuk tujuan 14 melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk

pembangunan berkelanjutan tidak masuk dalam analisis karena tidak sesuai dengan kewenangan dan konteks Kabupaten Banyumas.

Hasil analisis pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2019 disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 2.104
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	17,05	13,5	12,53	SB	BAPPEDA LITBANG
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	Jaminan Kesehatan (BPJS, Jamkesda)	100	NA	100	SS	DINKES
1.3.1. (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	72,74	NA	100	SS	DINAKER KOP UKM
1.3.1. (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	9,44	NA	98,36	SS	DINSOS PERMAS DES
1.3.1. (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan sosial		27 Kec	27 Kec	SS	DINSOS PERMA DES
1.4.1. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	Meningkat menjadi 70%	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	100	100	100	SS	DINKES

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	di fasilitas kesehatan.		yang memiliki kompetensi kebidanan					
1.4.1. (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	SS	DINKES
1.4.1. (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49		70	75,48	TTC	DINKES
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	70,54	69,51	74,49	SB	DINPER KIM
1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Persentase rumah tinggal bersanitasi	64,5	82,88	87,79	SB	DINPER KIM
1.4.1. (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,75	98,27	98,77	SS	DINDIK
1.4.1. (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,41	80,21	80,73	SB	DINDIK
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	Cakupan penerbitan akta kelahiran		90,0	93,0	SS	DINDUK CAPIL
1.4.1. (k)	Persentase rumah tangga	Meningkat	Persentase rumah	93,01	NA	99,74	TTT	DPU

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	menjadi 100%	tangga pengguna listrik					
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Korban bencana alam dan bencana sosial (KK)	226			TTT	BPBD
1.5.1. (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah		4			SB	BPBD
1.5.1. (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%			SS	BPBD
1.5.1. (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%			SS	BPBD
1.5.1. (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450		200			SB	BPBD
1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	Desa tangguh bencana			207,2	TTT	BPBD
1.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun					NA	BPBD
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan	ada		Belum ada	Ada	Ada	TTC	BPBD

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	daerah.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	Anggaran untuk program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				NA	BKAD
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10%)				NA	BKAD
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		6%	6%	TTC	DINPER TAN KP
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pad a anak balita.	Menurun menjadi 17%	Prevalensi balita gizi kurang	5,6	0,07	0,07	SS	DINKES
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada	Menurun	Penanganan daerah rawan pangan	27	62	63	SB	DINPER TAN KP

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.							
2.1.2. (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		6%	6%	TTC	DINPER TAN KP
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun			20,4	15,96	TTC	DINKES
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%			20,4	15,96	TTC	DINKES
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	Persentase balita gizi buruk/kurang gizi	5,6	0,07	0,07	SS	DINKES
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%		73,41	NA	16,53	TTC	DINKES
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%		51,84	NA	66,05	TTC	DINKES
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/	Konsumsi ikan		90,2	90,8	TTT	DINPER TAN KP

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
		tahun						
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat		100,30	100,33	107,00	SS	DINPERTAN KP
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	54,16	67,87	37,62	SS	DINKES
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	100	SS	DINKES
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	100	SS	DINKES
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	8,28	8,94	9,18	SB	DINKES
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	5,03	5,81	4,14	TTC	DINKES
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8,43	7,84	7,41	SS	DINKES
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	SS	DINKES

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,22	0,15	TTC	DINKES
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	148,2	168	341,8	SS	DINKES
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	Angka kejadian Malaria	3			TTT	DINKES
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300		Endemis malaria	Endemis Rendah	Endemis Rendah	TTT	DINKES
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat		0	0,9	1,9	TTC	DINKES
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun		37			TTT	DINKES
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi		termasuk			TTT	DINKES
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.		terdapat kasus filariasis			TTT	DINKES
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%		3,28			TTC	DINKES
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%		26	17	33	TTT	DINKES
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun		13,31	12,29	8,42	TTC	DINKES

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun					NA	DINSOS PERMAS DES
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280		Belum ada	Belum ada	Belum ada	TTT	DINKES
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%					NA	DINSOS PERMAS DES
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun					NA	DINSOS PERMAS DES
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%		97,12	75,39	74,9	TTC	DPPKB P3A
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	97,12	75,39	74,9	TTC	DPPKB P3A
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35,74	37,38	42,54	TTC	DINKES
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility	Menurun menjadi 38	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000		0,32	0,0	TTC	DINKES

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	Rate/ASFR).		perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)					
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	Total Fertility Rate (TFR)		2,30	2,10	TTC	DINKES
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%		9,43			SS	DINKES
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan		100	87	TTT	DINKES
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	Persentase penduduk berdasarkan jaminan kesehatan	100	NA	100	SS	DINKES
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun					NA	DINKES
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun		3,28			TTT	DINKES
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat					NA	DINKES
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,23	0,35	0,26	SS	DINKES
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat					NA	DINDIK
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%			99	100	TTC	DINDIK
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs	Meningkat			93	93,36	TTC	DINDIK

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	berakreditasi minimal B.	menjadi 81%						
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	Angka partisipasi kasar	108,82	108,12	108,19	SB	DINDIK
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	Angka partisipasi kasar	103,5	89	80,5	SB	DINDIK
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Angka rata-rata lama sekolah		7,45	7,72	SB	DINDIK
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	Angka partisipasi kasar	77,23	77,25	77,31	SS	DINDIK
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		81,45	99,32	TTC	DINAKER KOP UKM
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	APM SD/MI/ SEDERAJAT	98,75	98,27	98,77	SS	DINDIK
4.5.1*			APM SMP/MTs/ SEDERAJAT	81,41	80,21	80,73	SB	DINDIK
4.5.1*			APM SMA/SMK/MA/ SEDERAJAT	60,91	61,49	62,25	TTC	DINDIK
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,32	99,32	100	SS	DINDIK
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99,87	99,32	100	SS	DINDIK

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat			85,55	85,63	TTC	DINDIK
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat		89,95		100	SS	DINDIK
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16					NA	DPPKB P3A
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Rasio KDRT	0,019	0,009	0,008	SS	DPPKB P3A
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%		36,89	35,63	34,37	SB	DPPKB P3A

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun					NA	DPPKB P3A
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100			SS	DPPKB P3A
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun		5720	5663	SS	DPPKB P3A
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	Rata-rata usia kawin pertama wanita				NA	DPPKB P3A
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)				NA	DPPKB P3A
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen	Meningkat	Proporsi kursi yang diduduki perempuan	18	18	22	SS	DPPKB P3A

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		di DPR					
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat			49	49	TTC	BKDD
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat					NA	DPPKB P3A
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	9,43			SS	DPPKB P3A
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	79,81	70	45,8	SB	DPPKB P3A
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	67,63	75	79	TTC	DINKOM INFO
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	70,54	69,51	74,49	SB	DINPER KIM
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik			34,67	34,67	TTT	DPU

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	70,54	69,51	74,49	SB	DINPER KIM
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat					NA	DINPER KIM
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	Persentase rumah tinggal bersanitasi		82,88	87,79	SB	DINPER KIM
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)				87	TTT	DINPER KIM
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Menurun				87	TTT	DINPER KIM
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota .		11			SB	DINPER KIM
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat					NA	DINPER KIM
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota		Ada	Ada	Ada	SS	DINPER KIM

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	(IPLT).							
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat		76,72%			TTT	DINPER KIM
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	Peningkatan Indeks Kualitas Air				TKD	DLH
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	Peningkatan Indeks Kualitas Air	46,94	52	59,33	SS	DLH
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada		Belum ada	Belum ada	Belum ada	TTT	DLH
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada		ada	ada	ada	TTC	BAPPEDA LITBANG
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS		51			SS	DPU
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	Dokumen RPDAST	ada	ada	ada	SS	DPU
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada		ada	ada	ada	SS	DPU
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	10-16%					NA	DLH
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)					TKD	
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	Pertumbuhan PDRB	6,05	5	6,32	SS	BAPPEDA LITBANG

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	PDRB per Kapita	25,47	29,00	31,00	SB	BAPPEDA LITBANG
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	4,48	4,52	4,78	TTC	BAPPEDA LITBANG
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat			34,3	33,91	TTT	DINAKER KOP UKM
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%		30,81	65,7	66,09	TTC	DINAKER KOP UKM
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat					NA	DINAKER KOP UKM
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%					NA	DINAKER KOP UKM
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat		8.303	10.938	11.875	SS	DINAKER KOP UKM
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	Tingkat pengangguran terbuka	5,5	4,19	4,21	SS	DINAKER KOP UKM
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun				28,22	TTT	DINAKER KOP UKM
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat			57	71,2	TTC	DINAKER KOP UKM
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	3,38	3,3	3,33	SB	DINPORA BUDPAR
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan	Meningkat	Kunjungan wisata	498	498	258	SB	DINPORA

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	mancanegara.	menjadi 20 juta (skala nasional)						BUDPAR
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	Kunjungan wisata	2.111.367	2.362.002	2.562.654	SS	DINPORA BUDPAR
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	PAD sektor pariwisata			12,735 M	TTT	DINPORA BUDPAR
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat				5,31	TTT	DINPORA BUDPAR
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat					NA	DPMP2 TSP
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)					NA	DPMP2 TSP
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat					NA	DINAKER KOP UKM
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	1000 Km (skala nasional)		0			TKD	
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambah 3.258 Km					TKD	
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	3			TKD	
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	24 pelabuhan (skala nasional)	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	3			TKD	
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	24,48	24,35	24,66	SS	DINPERIN DAG
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	24,48	24,35	24,66	SS	DINPERIN DAG
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat		12,82%	18,83%	19,71%	TTC	DINPERIN DAG

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat					NA	DINPERIN DAG
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat					NA	DINPERIN DAG
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat					NA	BAPPEDA LITBANG
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,34	80	90	TTC	DINKOM INFO
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon	67,63	75	79	TTC	DINKOM INFO
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,34	64	68	TTC	DINKOM INFO
10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	Indeks Gini	0,32	0,3132	0,3132	SS	BAPPEDA LITBANG
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	17,05	13,5	12,53	SB	BAPPEDA LITBANG
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)					TKD	
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)					NA	DINSOS PERMAS DES
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa		15			SB	DINSOS PERMAS DES
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan	Meningkat					TKD	

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	ekonomi di daerah tertinggal.							
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurun menjadi 14%	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan				TKD	
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun					NA	DINSOS PERMAS DES
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87					NA	BAPPEDA LITBANG
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	tidak ada		Belum ada	Ada	Ada	TTC	BAPPEDA LITBANG
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	72,74	NA	100	TTC	DINAKER KOP UKM
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	Rasio rumah layak huni		76,3	77,24	SB	DINPER KIM
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)					TKD	
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	5 metropolitan (skala nasional)					TKD	

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada		Ada	Ada	Ada	TTC	BAPPEDA LITBANG
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada					TKD	
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana	226			TTT	BPBD
11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%				207,2	TTT	BPBD
11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada		ada	Ada	Ada	SS	BPBD
11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun					NA	BPBD
11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		60	92	SS	DLH
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Meningkat/ada					TKD	
11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		2	2,026	TTC	DLH
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada			Ada	Ada	TTC	BPBD

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Jumlah limbah B3 yang dikelola				NA	DLH
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		20	22	TTC	DLH
12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat					NA	DLH
12.7.1. (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat					NA	DLH
12.8.1. (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat					NA	BAPPEDA LITBANG
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada			Ada	Ada	TTC	BPBD
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Korban bencana dan bencana sosial (KK)	226			TTT	BPBD
15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	11,60%	15,79%	15,79%	TTC	DLH
15.3.1. (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis		25		TTT	DLH

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada		belum ada	belum ada	belum ada	TTT	BAPPEDA LITBANG
15.9.1. (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat		belum ada	belum ada	belum ada	TTT	DLH
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun		6	12	4	TTC	KESBANG POL
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun					NA	KESBANG POL
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun			677	930	TTT	KESBANG POL
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat					NA	KESBANG POL
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	Rasio KDRT	0,019	0,009	0,008	SS	DPPKB P3A
16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	100%	100%	SS	DPPKB P3A

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
			pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu					
16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun					NA	DPPKB P3A
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0					NA	INSPEKTO RAT
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat		83	100	100	SS	BKAD
16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Opini BPK	WTP	100	100	SS	BKAD
16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50%		Nilai Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat baik	SS	BAPPEDA LITBANG
16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi 80%		Ada		100	SS	SETDA
16.6.1. (d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai	Meningkat menjadi:		63,79	66,68	68,97	SS	SETDA

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	Indek Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45%						
16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%			98	98	SS	SETDA
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	18	18	22	SB	DPPKB P3A
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	49	49	49	SS	BKPSDM
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	Rasio bayi berakta kelahiran		92	93	SS	DINDUK CAPIL
16.9.1. (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	Cakupan penerbitan akta kelahiran	89	92	93	SS	DINDUK CAPIL
16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki	Meningkat	Rasio bayi berakta		92	93	SS	DINDUK

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
	akta kelahiran.	menjadi 85%	kelahiran					CAPIL
16.10.2. (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat					NA	DINKOM INFO
16.b.1. (a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	tidak ada		tidak ada	tidak ada	tidak ada	SB	BAPPEDA LITBANG
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	Persentase PAD terhadap pendapatan	19,24	19,85		SS	BKAD
17.1.1. (a)	Persentase PAD terhadap pendapatan	Meningkat		19,2	19,85	19,19	TTT	BKAD
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat		6,24	6,37		TTC	BKAD
17.6.2. (b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6%	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,34	80	90	TTC	DINKOM INFO

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
		populasi						
17.6.2. (c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,34	80	90	TTT	DINKOM INFO
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	29,34	80	90	TTT	DINKOM INFO
17.8.1. (a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%					TKD	
17.17.1. (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada		Belum ada	Belum ada	Belum ada	TTT	BAPPEDA LITBANG
17.17.1. (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada			100	100	TTC	BAPPEDA LITBANG
17.18.1. (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat		98,67	100	100	SS	BPS
17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat		86,67	86,67	90	SB	BPS

NO. INDIKA-TOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	INDIKATOR RPJMD	2017	2018	2019	STATUS TPB	OPD
17.18.1. (c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat					NA	BPS
17.18.1. (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat			46	169	TTC	BAPPEDA LITBANG
17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada		Belum ada	Belum ada	Belum ada	TTT	DINDUK CAPIL
17.19.2. (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat		10200	21634	41878	SS	BPS
17.19.2. (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat		98,67	99,73	100	SS	BPS

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kondisi Perekonomian Global, Nasional dan Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi global sejak tahun 2019 telah mengalami penurunan akibat perang dagang Amerika Serikat dengan China. Perlambatan ekonomi pada tahun 2020 pun diperburuk oleh menyebarnya virus corona yang saat ini telah menjangkiti 213 negara. Selain itu, proses pemulihan pun akan memakan waktu lebih lama dari yang dibayangkan. Revisi proyeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi, investasi, ekspor dan impor yang kian tertekan hampir di seluruh negara di dunia. Pasalnya, banyak negara dunia yang mengalami disrupsi di dalam aktivitas perekonomian domestik akibat pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan untuk menekan angka persebaran COVID-19, dan investasi swasta cenderung tertahan lantaran perusahaan cenderung menunda belanja modal ditengah ketidakpastian yang tinggi. Pandemi ini pun tak membuat negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang atau berbagai negara maju lainnya tangguh dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang harus merasakan kontraksi minus pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terkontraksi minus 2,07 persen.

Memburuknya kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Meskipun pemerintah pusat telah berusaha keras mendorong kinerja perekonomian melalui stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi, namun akibat belitan wabah COVID-19 sejak Maret 2020 hingga Desember 2020 yang menyebabkan dilakukan banyak pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi.

Berbagai kebijakan, baik pada sisi fiskal yang dengan terus menerus melakukan upaya pemulihan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, serta dukungan dari pembiayaan diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Realisasi APBN Tahun 2020 secara keseluruhan maupun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mengalami akselerasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia terus mendorong momentum pemulihan ekonomi ini dengan berbagai kebijakan yang ada. Penyerapan belanja APBN 2020 dan program PEN terus akan diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat COVID-19. Program untuk menjaga daya beli masyarakat akan diteruskan, juga dukungan bagi aktivitas dunia usaha.

Untuk memastikan agar tren pemulihan ekonomi yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan, perlu dukungan dari masyarakat.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Terdapat beberapa dampak yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah diantaranya jumlah perusahaan di Jawa Tengah sebanyak 318 perusahaan seperti garmen, tekstil, meubel yang ikut terdampak; jumlah pekerja PHK sebanyak 7.880 orang dan dirumahkan 45.650 orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan perekonomian diantaranya kebijakan New Normal (perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan) yang mulai diterapkan pada awal bulan Juni 2020 yang cukup berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi *year on year* yang awalnya terkontraksi sebesar minus 5,91 persen pada triwulan II 2020 menjadi minus 3,34 persen pada triwulan IV.

Secara keseluruhan, akibat dililit wabah COVID-19 maka kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar minus 2,65 persen (y-on-y) atau mengalami pertumbuhan minus terendah dalam 22 tahun terakhir sejak krisis ekonomi dan politik tahun 1998.

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4.119,93 ribu orang (11,84 persen), bertambah sebanyak 440,53 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3.679,40 ribu orang (10,58 persen). Demikian pula dengan jumlah pengangguran terbuka yang juga mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran pada Agustus 2020 sebanyak 1,21 juta orang (6,48 persen), mengalami kenaikan sekitar 396 ribu orang dibanding Agustus 2019 yang sebanyak 0,82 juta orang (4,44 persen).

3.2. Kondisi Perekonomian Daerah

Multiplier efek dari pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Banyumas. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas pada 21 April 2021, multiplier efek dari pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 mempengaruhi kondisi

perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Banyumas. Perekonomian Banyumas untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 mengalami kontraksi sebesar -1,65 persen *(y-on-y)* setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha dengan kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -33,15 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam tercatat pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -6,18 persen. Struktur ekonomi Banyumas tahun 2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 25,37 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 66,89 persen.

Sebelas kategori lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya enam kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -31,84 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *School From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -5,44 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,08 persen. Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 13,81 persen seiring meningkatnyakebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.

Pertumbuhan ekonomi Banyumas pada Tahun 2020 yang tercatat -1,65 persen merupakan andil dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang menyumbang kontraksi ekonomi sebesar -1,25 persen; diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar -0,62 persen; konstruksi sebesar -0,48 persen; dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -0,26 persen. Tekanan kontraksi ekonomi Banyumas tertahan oleh andil positif dari lapangan usaha informasi dan komunikasi yang menyumbang pertumbuhan sebesar 0,96 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,17 persen; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,08 persen.

Struktur PDRB Banyumas menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku selama tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan sebesar 25,37 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,23 persen; Konstruksi sebesar 12,82 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,45 persen.

Dari tujuh belas lapangan usaha, kategori Informasi dan Komunikasi tumbuh paling cepat dibandingkan tahun 2019 yang naik 2,07 poin menjadi 13,81 persen. Percepatan pertumbuhan ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap paket data untuk menunjang pelaksanaan *Work From Home* dan *Study From Home* serta agenda meeting dan conference yang dilakukan secara daring, disamping peningkatan akses informasi terhadap berita online yang menyangkut COVID-19.

Dari sisi pengeluaran ekonomi Banyumas tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,65 persen, disebabkan terkontraksinya seluruh komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Komponen PMTB terkontraksi paling dalam sebesar -6,18 persen dan komponen impor terkontraksi sebesar -4,54 persen. Namun komponen impor barang dan jasa sebagai komponen pengurang PDRB, sehingga kontraksi pada komponen ini berfungsi sebagai penahan laju kontraksi PDRB agar tidak lebih dalam.

Komponen lainnya yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) dan mengalami kontraksi. Masing-masing komponen, secara berurutan mencatat kontraksi sebesar -4,26 persen, -2,16 persen dan -1,21 persen. Penundaan berbagai proyek pembangunan baik dari swasta maupun pemerintah karena pandemi COVID-19 dan pengalihan belanja pemerintah menyebabkan tertekannya pertumbuhan komponen PMTB dan komponen PKP.

Pandemi COVID-19 juga sangat berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat di Banyumas. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Banyumas mencapai 225.840 orang, bertambah sebanyak 14.240 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2019 yang berjumlah 211.600 orang. Demikian pula dengan jumlah pengangguran yang juga mengalami peningkatan. Jumlah pengangguran pada tahun 2020 sebanyak 52.689 orang, mengalami kenaikan sekitar 16.153 orang dibanding tahun 2019 yang sebanyak 36.536 juta orang.

3.3. Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolan Keuangan Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mulai tahun 2021 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 2 menyebutkan ruang lingkup Keuangan Daerah diantaranya meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; dan kekayaan daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas secara umum yang diterapkan dalam APBD dapat ditinjau dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu Tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
(Rp. Milyard)

No.	Uraian	Th. 2016			Th. 2017			Th. 2018			Th. 2019			Th. 2020		
		Target RPJMD (2013-2018)	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD (2013-2018)	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi
1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**386,51**	**450,49**	**541,42**	**511,34**	**520,86**	**619,70**	**630,77**	**586,34**	**648,33**	**636,51**	**636,51**	**686,81**	**715,38**	**729,89**	**668,21**
1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	113,90	118,05	147,36	123,95	123,95	199,61	200,20	173,35	211,55	208,90	208,90	229,38	212,18	275,50	208,65
1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	21,69	22,45	27,31	23,91	26,48	27,69	29,81	28,27	32,45	32,17	32,17	32,64	32,17	31,98	23,71
1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	11,72	13,81	12,42	14,11	14,11	13,54	24,77	12,47	24,79	13,81	13,81	12,91	15,42	13,50	15,80
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	239,20	296,18	354,34	349,37	356,32	378,86	375,99	372,26	379,54	381,63	381,63	411,88	455,61	408,91	420,05
2.	**Dana Perimbangan**	**1.425,02**	**1.602,42**	**1.869,10**	**2.042,41**	**2.055,69**	**1.868,37**	**1.917,84**	**1.917,84**	**1.894,41**	**2.003,43**	**2.003,43**	**1.940,35**	**2.119,77**	**2.046,99**	**1.854,29**
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya	76,64	63,10	57,70	45,61	60,65	45,04	53,76	53,76	42,91	42,25	42,25	28,66	60,93	42,14	49,47
2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.277,83	1.398,54	1.398,54	1.398,54	1.525,15	1.373,97	1.373,97	1.373,97	1.373,97	1.442,33	1.442,33	1.437,04	1.528,74	1.461,11	1.306,92
2.3.	Dana Alokai Khusus (DAK)	70,55	140,78	412,85	598,26	469,88	449,36	490,11	490,11	477,53	518,85	518,85	474,66	530,10	543,73	497,91
3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**716,80**	**791,29**	**442,45**	**411,84**	**491,68**	**733,19**	**712,11**	**752,83**	**723,19**	**788,03**	**788,03**	**807,77**	**877,72**	**791,69**	**807,68**
Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)		**2.528,33**	**2.844,20**	**2.852,97**	**2.965,58**	**3.068,22**	**3.221,26**	**3.260,72**	**3.257,00**	**3.265,93**	**3.427,96**	**3.427,96**	**3.434,93**	**3.712,87**	**3.568,57**	**3.330,19**

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, BAPENDA Kab. Banyumas dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021.

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu Tahun 2016-2020 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan kontribusi terbesar pada komponen Dana Perimbangan. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, realisasi pendapatan daerah cenderung fluktuatif dan di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19. Penurunan utamanya pada PAD dan sumber PAD yang mengalami penurunan yaitu untuk penerimaan Pajak Daerah seperti Pajak Hotel, Restoran, Pajak hiburan dan Pajak Parkir, dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penerapan *social distancing* dan *physical distancing*, belum optimal penerimaan tersebut karena persoalan ketidaktransparan dalam pelaporan dari pengelola dan menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak akibat terdampak pandemi COVID-19, serta kurang optimalnya kegiatan *door to door* dan razia pada masa pandemi. Penerimaan pajak penerangan jalan juga mengalami penurunan disebabkan adanya pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik dan pembebasan biaya beban atau *abonemen*.

Sumber PAD lainnya yang juga mengalami penurunan yaitu dari retribusi daerah. Penurunan ini antara lain dikarenakan adanya penerapan *social distancing* dan *physical distancing* sehingga berdampak pada menurunnya jumlah pasien pada Balai Kesehatan Masyarakat, penggunaan aula/asrama/gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penurunan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penurunan penjualan benih, tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata, pembatasan kegiatan pada pengujian kayu, serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat COVID-19.

Sementara itu, dari komponen Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah realisasi terhadap target RPJMD cenderung berfluktuasi. Hal ini disebabkan kedua komponen tersebut merupakan sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang tidak dapat dipastikan besarannya dan dalam penyusunan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagaimana amanat peraturan perundangan diasumsikan sama dengan tahun berjalan.

Tabel 3.2.
Proposi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020 (Persen)

No.	Uraian	Th. 2016			Th. 2017			Th. 2018			Th. 2019			Th. 2020		
		Target RPJMD (2013-2018)	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD (2013-2018)	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15,29	15,84	18,98	17,24	16,98	19,24	19,34	18,00	19,85	18,57	18,57	19,99	19,27	20,45	20,07
2.	Dana Perimbangan	56,36	56,34	65,51	68,87	67,00	58,00	58,82	58,88	58,01	58,44	58,44	56,49	57,09	57,36	55,68
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	28,35	27,82	15,51	13,89	16,02	22,76	21,84	23,11	22,14	22,99	22,99	23,52	23,64	22,19	24,25
Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BAPENDA Kab. Banyumas, 2021.

Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas kurun waktu Tahun 2016-2020 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Selama kurun waktu tersebut, Dana Perimbangan menempati porsi terbesar dengan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 58,74 persen diikuti Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 21,64 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 19,63 persen. Sumber pendapatan utama PAD Kabupaten Banyumas berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Walaupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber PAD yang paling besar namun pendapatan yang di dapat dari BLUD (RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang) tersebut digunakan kembali untuk belanja oleh BLUD tersebut.

3.3.1.2. Belanja Daerah

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Kinerja belanja daerah Tahun 2016-2020 terinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3.
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
(Rp. Milyard)

No.	Uraian	Th. 2016			Th. 2017			Th. 2018			Th. 2019			Th. 2020		
		Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi
1.	**Belanja Tidak Langsung**	**1.935,89**	**2.190,91**	**1.890,94**	**2.061,75**	**2.267,16**	**1.903,45**	**2.063,09**	**2.056,96**	**1.944,83**	**2.166,93**	**2.166,93**	**2.024,93**	**2.189,81**	**2.209,35**	**1.976,90**
1.1.	Belanja Pegawai	1.655,65	1.700,56	1.365,11	1.652,84	1.610,20	1.231,07	1.368,23	1.369,94	1.274,58	1.429,88	1.429,88	1.312,83	1.767,82	1.456,02	1.255,17
1.2.	Belanja Hibah	29,00	13,64	24,84	33,80	25,57	53,34	71,54	69,05	77,23	48,40	48,40	40,86	73,50	41,35	72,04
1.3.	Belanja Bantuan Sosial	6,50	13,74	13,28	5,72	11,22	11,67	20,18	16,51	14,97	17,03	17,03	13,86	18,72	24,74	6,02
1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13,56	14,39	9,69	14,79	14,80	14,77	23,00	20,16	19,31	24,11	24,11	25,04	25,24	30,75	26,16
1.5.	Belanja Bantuan Keuangan	226,77	443,56	477,30	349,61	601,38	591,14	576,13	577,30	558,61	639,51	639,51	631,81	300,00	651,50	536,51
1.6.	Belanja Tidak Terduga	4,41	5,00	0,72	5,00	4,00	1,47	4,00	4,00	0,13	8,00	8,00	0,53	4,53	5,00	81,01
2.	**Belanja Langsung**	**592,72**	**975,23**	**1.011,91**	**951,43**	**1.156,08**	**1.297,24**	**1.528,96**	**1.415,29**	**1.374,23**	**1.584,44**	**1.454,44**	**1.432,62**	**1.781,83**	**1.534,57**	**1.272,24**
Jumlah Belanja Daerah (1+2)		**2.528,61**	**3.166,13**	**2.902,85**	**3.013,18**	**3.423,24**	**3.200,69**	**3.592,05**	**3.472,25**	**3.319,06**	**3.751,36**	**3.621,36**	**3.457,55**	**3.971,65**	**3.743,92**	**3.249,14**

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021.

Selama kurun waktu tahun 2016-2019, belanja daerah Kabupaten Banyumas rata-rata mengalami kenaikan. Tahun 2020 belanja daerah mengalami penurunan dikarenakan menurunya pendapatan daerah sebagai dampak dari pandemi COVID 19. Apabila dilihat dari realisasi masing-masing komponen belanja daerah dapat dijelaskan bahwa komponen belanja pegawai kurun waktu 2016-2023 di bawah target RPJMD. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi jumlah pegawai pada tahun bersangkutan. Untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga kurun waktu 2016-2023 tumbuh fluktuatif dari target RPJMD.

Belanja Bantuan Keuangan fluktuatif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah. Tahun 2020 bantuan keuangan meningkat dari target RPJMD Tahun 2018-2023. Belanja bantuan keuangan tersebut diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan pola padat karya, peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai respon upaya pengurangan dampak pandemi COVID-19.

Belanja Tidak Terduga tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bersumber dari *refocussing* belanja. Hal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kenaikan Belanja Tidak Terduga diperuntukkan bagi penanganan Pandemi COVID-19 yang penggunaanya diarahkan utamanya untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial dengan sasaran masyarakat terdampak COVID-19.

Demikian pula dengan belanja langsung tahun 2020 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan menurunnya pendapatan dan pengalihan sebagian belanja langsung menjadi belanja tidak terduga untuk penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Dengan kondisi demikian, maka pada belanja langsung tahun 2020 dilakukan adaptasi penyesuaian pola kerja sesuai dengan protokol COVID-19, refocussing dan realokasi belanja, agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sehingga kinerja pembangunan utamanya pada pelayanan, kesehatan dan perekonomian dapat tetap baik.

3.3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

a. Penerimaan Pembiayaan

Selama pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, penerimaan pembiayaan fluktuatif berasal dari Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan dana Bergulir) pada tahun 2018 dan pemanfaatan SiLPA yang didasarkan atas hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

b. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan selama kurun waktu 2018-2023 utamanya terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Pemberian Pinjaman Daerah). Pada Tahun 2020 pengeluaran pembiayaan tidak dialokasikan dikarenakan pengalihan pendanaan untuk Belanja Tidak Terduga guna penanganan dampak pandemi COVID-19.

Pembiayaan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020
(Rp. Milyard)

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Th. 2016			Th. 2017			Th. 2018			Th. 2019			Th. 2020		
		Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi	Target RPJMD	Penetapan APBD	Realisasi
1.	**Penerimaan Pembiayaan**															
1.1.	SILPA	68,69	340,93	461,71	50,00	376,02	389,74	382,32	254,00	382,32	360,00	230,00	290,35	301,26	200,00	242,71
1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	1,50	6,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan dana Bergulir)	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**18,00**	**340,93**	**461,71**	**51,50**	**382,02**	**389,74**	**382,32**	**254,00**	**388,44**	**360,00**	**230,00**	**290,35**	**301,26**	**205,00**	**242,71**
2.	**Pengeluaran Pembiayaan**															
2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	(19,00)	22,08	4,00	(24,50)	25,73	48,49	(36,25)	43,18	34,10	(34,10)	23,44	39,74	(28,15)	28,15
2.2.	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Pemberian Pinjaman Daerah)	-	-	-	-	(2,50)	-	2,50	(2,50)	1,78	2,50	(2,50)	1,58	2,74	(1,50)	1,37
2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Pengeluaran Investasi Non Pemerintah	-	-	-	-	-	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**18,00**	**(19,00)**	**22,08**	**4,00**	**(27,00)**	**27,99**	**50,99**	**(38,75)**	**44,96**	**36,60**	**(36,60)**	**25,02**	**42,49**	**(29,65)**	**29,52**
Jumlah Pembiayaan Netto		**-**	**321,93**	**439,62**	**47,50**	**355,02**	**361,74**	**331,32**	**215,25**	**343,48**	**323,40**	**193,40**	**265,33**	**258,78**	**175,35**	**213,19**

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021.

3.3.2. Analisis Kesehatan Keuangan Daerah

Analisis kesehatan keuangan daerah ini diadopsi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Alat pengukuran ini memotret kondisi "kesehatan fiskal" antar pemerintah daerah (Pemda) dengan berdasarkan beberapa rasio sederhana, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi dan struktur hutang.

3.3.2.1. Analisis Pendapatan Daerah Perkapita

Pendapatan Daerah Per Kapita Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemda. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Perkapita Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukan kondisi yang membaik dari tahun 2016 sampai tahun 2020, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhanya sedikit melambat dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan pendapatan daerah. Gambaran pendapatan per kapita Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Tabel Pendapatan Daerah Perkapita Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp.)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per kapita (Rp.000)
2016	2.852.968.390.191	1.650.625	1.728,42
2017	3.221.258.052.894	1.665.025	1.934,66
2018	3.265.926.651.861	1.679.124	1.945,02
2019	3.434.925.995.303	1.693.006	2.028,89
2020	3.330.186.788.242	1.806.347	1.843,60

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.2. Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah dihitung dari rasio PAD dengan total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. Namun demikian, peningkatan rasio ini dapat

bermakna negatif jika sumber PAD adalah pendapatan bunga yang menunjukkan besarnya dana pemerintah daerah yang disimpan di bank dan tidak dibelanjakan. Kondisi kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu 2016-2020 meningkat. Tahun 2020 kemandirian keuangan meningkat dibandingkan tahun 2019, namun diikuti dengan penurunan pendapatan asli daerah yang akhirnya berdampak terhadap penurunan pendapatan daerah sebagai dampak pandemi COVID-19. Secara lebih terinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6.
Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Kemandirian Keuangan
2016	2.852.968.390.191	541.418.386.912	18,98
2017	3.221.258.052.894	619.701.627.380	19,24
2018	3.265.926.651.861	648.326.914.035	19,85
2019	3.434.925.995.303	686.805.512.326	19,99
2020	3.330.186.788.242	668.211.148.299	20,07

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.3. Ruang Fiskal

Indikator ini menunjukkan seberapa besar keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Banyumas, kondisi Ruang Fiskal di Banyumas kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Mendasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengakibatkan meningkatnya pendanaan untuk belanja pegawai. Ruang fiskal daerah tahun 2016-2020 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.7.
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan (Rp.)	Pendapatan Hibah (Rp.)	Dana Alokasi Khusus (Rp.)	Dana Otsus/Penyesuaian/ Darurat (Rp.)	Belanja Pegawai (Rp.)	Ruang Fiskal (%)
2016	2.852.968.390.191	14.075.240.800	412.853.809.576	205.450.575.000	1.365.106.607.402	29,99
2017	3.221.258.052.894	175.521.251.417	449.360.479.699	53.859.923.000	1.231.069.947.011	40,71
2018	3.265.926.651.861	169.332.334.519	477.533.051.326	34.250.000.000	1.274.582.003.301	40,12
2019	3.434.925.995.303	167.439.942.427	474.659.908.721	44.828.869.000	1.312.828.039.831	41,78
2020	3.330.186.788.242	182.105.101.820	497.906.166.804	39.577.682.000	1.255.169.826.604	40,70

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.4. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kurun waktu tahun 2016-2020, kondisi kemampuan mendanai belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum baik karena seluruh pengeluaran dapat dibiayai. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8.
Tabel Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp.)	Penerimaan Pembiayaan (Rp.)	Total Penerimanan (Rp.)	Total Belanja (Rp.)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp.)	Total Pengeluaran (Rp.)	Kemandirian (%)
2016	2.852.968.390.191	461.705.862.364	3.314.674.252.555	2.902.853.581.862	22.084.000.000	2.924.937.581.862	1,13
2017	3.221.258.052.894	389.736.670.693	3.610.994.723.587	3.200.686.516.259	27.992.500.000	3.228.679.016.259	1,12
2018	3.265.926.651.861	388.439.356.857	3.654.366.008.718	3.319.060.759.043	44.959.920.000	3.364.020.679.043	1,09
2019	3.434.925.995.303	290.345.329.675	3.725.271.324.978	3.457.550.201.497	25.016.000.000	3.482.566.201.497	1,07
2020	3.330.186.788.242	242.705.123.481	3.572.891.911.723	3.249.141.935.364	29.519.500.000	3.278.661.435.364	1,09

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.5. Belanja Modal

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah keseluruhan. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Kondisi rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 berfluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal dari tahun 2016-2020 yang tertinggi yaitu untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan. Tahun 2020 belanja modal mengalami penurunan signifikan dikarenakan adanya pengalihan alokasi penganggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Kondisi kualitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9.
Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Modal (Rp.)	Total Belanja (Rp.)	Kualitas Belanja Modal (%)
2016	400.832.864.576	2.902.853.581.862	13,81
2017	472.485.470.290	3.200.686.516.259	14,76
2018	525.416.939.614	3.319.060.759.043	15,83
2019	478.797.497.271	3.457.550.201.497	13,85
2020	363.470.409.584	3.249.141.935.364	11,19

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021.

3.3.2.6. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Semakin membaiknya kualitas belanja daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) dalam APBD, sehingga terjadi peningkatan Belanja Langsung, terutama Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, terkait dengan layanan publik yang dapat mendorong roda perekonomian daerah. Periode tahun 2016-2020 kualitas belanja pegawai di Kabupaten Banyumas cenderung fluktuatif, dimana rata-rata sebesar 40,09 persen selama 5 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Tabel Kualitas Belanja Pegawai Kabupaten Banyumas
Pada Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Pegawai (Rp.)	Total Belanja (Rp.)	Kualitas Belanja Pegawai (%)
2016	1.365.106.607.402	2.902.853.581.862	47,03
2017	1.231.069.947.011	3.200.686.516.259	38,46
2018	1.274.582.003.301	3.319.060.759.043	38,40
2019	1.312.828.039.831	3.457.550.201.497	37,97
2020	1.255.169.826.604	3.249.141.935.364	38,63

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.7. Tax Ratio

Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan

untuk mengetahui perkiraan besaran porsi pajak dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya *tax ratio* bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak *(tax burden)* yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya *tax burden* terkait dengan *ability to pay*, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. *Tax burden* terkait pula dengan keadilan. *Tax ratio* sebesar 0,39 persen pada tahun 2020 masih belum menggambarkan kondisi kepatuhan membayar pajak. Perhitungan *tax ratio* sesuai kewenangan Kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak PBB perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sehingga perluasan basis pajak masih di perlukan. Indikasi penyebab rendahnya angka *tax ratio* daerah diantaranya belum optimalnya unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak yang masih perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui rincian tax ratio Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.11.
Tax Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Tahun	Y Pajak (Rp.)	PDRB (Rp.)	Tax Ratio (%)
2016	147.356.151.979	42.016.940.500.000	0,35
2017	199.612.331.442	45.585.979.730.000	0,44
2018	211.550.291.844	49.896.126.750.000	0,42
2019	229.377.285.773	53.948.860.050.000	0,43
2020	208.645.380.657	53.682.118.370.000	0,39

Sumber : Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2021

3.3.2.8. Perkembangan Neraca Daerah

Neraca Pemerintah Daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

a. Aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang. Pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 menunjukkan flutuatif. Aset diklasifikasikan menjadi:

   1. Aset Lancar merupakan kas dan setara kas yang siap digunakan dan tidak terikat penggunaannya serta aset lainnya yang dapat segera diubah menjadi kas dan setara kas dalam jangka waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pertumbuhan aset lancar fluktuatif pada Tahun 2016-2020, pada Tahun 2017-2019 menurun dan pada Tahun 2020 meningkat kembali. Penurunan terjadi pada pos kas dan setara kas yang berisi sisa saldo kas yang berada pada Rekening Kas Umum Daerah dan penempatan deposito daerah serta pada pos persediaan pada SKPD yang menandakan pengadaan barang habis pakai, langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan tidak banyak menghasilkan sisa persediaan.

2. Investasi Jangka Panjang berupa investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Banyumas berupa penyertaan modal pada BUMD/BUMN. Pertumbuhan Investasi Jangka Panjang pada Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banyumas menambah pembiayaan penyertaan modal pada BUMD.
3. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang dimilik pemerintah daerah yang secara aktif digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pertumbuhan aset tetap Tahun 2016-2020 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah daerah berupa pengadaan dan pembangunan infrastruktur baru atau perbaikan yang menambah nilai aset tetap.
4. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan atau dibatasi penggunaannya, dkhususkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam sat tahun anggaran. Dana cadangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan pada Tahun 2016-2017 yang digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
5. Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lainnya (barang yang diusulkan penghapusan) yang mengalami peningkatan.

b. Kewajiban pada neraca menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas nilainya cukup signifikan. Walaupun kewajiban cukup siginifikan masih dapat tertutup dengan nilai aktiva yang dibayar pada tahun berikutnya.

c. Ekuitas pada neraca menginformasikan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih anara aset dan kewajiban pemerintah daerah atau dapat dikatakan sebagai hak residual pemerintah daerah atas aktiva pemerintah setelah dikurangi semua kewajiban. Untuk mengetahui rincian Neraca Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.12.
Neraca Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1.	**Aset**					
1.1.	**Aset Lancar**	**497.361.930.629,86**	**480.266.308.100,03**	**421.131.968.060,98**	**393.503.349.043,84**	**450.804.921.753,17**
1.1.1.	Kas	398.675.479.688,40	383.054.327.899,40	291.001.753.539,23	243.492.888.706,00	295.086.103.313,00
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-			-
1.1.3.	Piutang	66.192.101.864,69	62.635.247.775,86	83.920.296.532,28	104.782.136.234,25	105.394.102.577,71
	Piutang Pendapatan	122.522.035.870,22	121.786.731.317,22	159.946.912.399,35	183.419.387.107,50	187.921.289.789,50
	Piutang Lain-lain	-	-	-	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(56.329.934.005,53)	(59.151.483.541,36)	(76.026.615.867,07)	(78.637.250.873,25)	(82.527.187.211,79)
1.1.4.	Beban Dibayar di Muka	10.000.000,00	37.024.767,00	56.972.500,00	33.450.000,00	56.021.004,17
1.1.5.	Persediaan	32.484.349.076,77	34.539.707.657,77	46.152.945.489,47	45.194.874.103,59	50.268.694.858,29
1.2.	**Investasi Jangka Panjang**	**214.646.152.155,02**	**255.365.693.134,17**	**304.217.687.975,82**	**339.715.998.092,87**	**378.325.392.053,97**
1.2.1.	Investasi Non Permanen	6.636.842.673,70	8.790.378.320,85	4.217.375.329,50	5.486.264.507,55	6.356.763.406,65
	Dana Bergulir	8.850.313.631,00	11.108.813.631,00	7.231.396.285,00	8.825.605.435,00	10.220.282.762,00
	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(2.213.470.957,30)	(2.318.435.310,15)	(3.014.020.955,50)	(3.339.340.927,45)	(3.863.519.355,35)
1.2.2.	Investasi Permanen	208.009.309.481,32	246.575.314.813,32	300.000.312.646,32	334.229.733.585,32	371.968.628.647,32
1.3.	**Aset Tetap**	**4.272.597.175.495,92**	**4.584.300.038.851,92**	**5.574.971.557.300,92**	**5.323.888.752.221,15**	**5.548.937.845.924,09**
1.3.1.	Tanah	2.334.569.556.143,00	2.380.053.882.103,00	3.034.902.309.299,00	3.111.132.568.046,00	3.163.257.002.332,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	701.438.053.913,45	829.487.321.107,45	914.531.634.533,45	999.660.908.976,13	1.107.278.625.911,13
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.292.414.298.767,56	1.436.733.903.153,56	1.576.643.570.027,56	1.615.403.164.161,56	1.718.790.176.492,56
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.560.706.689.442,00	1.755.817.176.064,00	2.125.880.392.701,00	2.336.298.143.598,00	2.523.120.152.801,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	101.790.062.138,36	103.571.579.201,36	109.033.835.397,36	102.399.853.759,86	108.539.801.887,86
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	12.622.707.788,00	8.778.565.923,00	20.233.549.923,00	46.779.359.223,00	48.949.644.437,00
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(1.730.944.192.696,45)	(1.930.142.388.700,45)	(2.206.253.734.580,45)	(2.887.785.245.543,40)	(3.120.997.557.937,46)
1.4.	**Dana Cadangan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4.1.	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.5.	**Aset Lainnya**	**143.608.723.415,00**	**143.845.341.931,00**	**119.543.839.116,00**	**169.544.316.154,82**	**118.237.419.304,79**
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	111.200.000,00	111.200.000,00	-	-	-
1.3.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	117.951.191.565,00	117.951.191.565,00	117.951.191.565,00	97.060.888.565,00	61.877.241.715,00
1.3.4.	Aset Tidak Berwujud	-	428.282.284,00	488.232.775,00	322.499.375,00	271.262.772,00
1.3.5.	Aset Lain-lain	32.044.340.740,00	31.725.812.972,00	10.847.931.208,00	132.331.217.370,82	105.165.119.528,50
1.3.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.498.008.890,00)	(6.371.144.890,00)	(9.743.516.432,00)	(60.170.289.156,00)	(49.076.204.710,71)
	Jumlah Aset	**5.128.213.981.695,80**	**5.463.777.382.017,12**	**6.419.865.052.453,72**	**6.226.652.415.512,68**	**6.496.305.579.036,02**

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
2.	**Kewajiban**					
2.1.	**Kewajiban Jangka Pendek**	**39.369.582.708,34**	**40.163.426.452,34**	**47.584.450.428,00**	**48.022.508.588,25**	**55.245.963.960,00**
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	257.360.504,00	292.620.830,00	467.202.961,00	543.554.646,00	524.042.513,00
	Utang Bunga	-	-	-	-	-
	Utang Pajak	-	-	-	-	-
2.2.2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	10.500.000.000,00	5.000.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
2.2.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	1.459.484.647,34	1.322.204.363,34	1.468.880.768,00	1.160.892.742,25	453.131.465,00
2.2.4.	Utang Beban	27.152.737.557,00	33.548.601.259,00	30.516.311.240,00	34.804.861.200,00	37.127.158.668,00
2.2.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	3.632.055.459,00	13.200.000,00	5.641.631.314,00
2.2.	**Kewajiban Jangka Panjang**	**11.000.000.000,00**	**6.500.000.000,00**	**-**	**-**	**-**
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	11.000.000.000,00	6.500.000.000,00	-	-	
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-			
	Jumlah Kewajiban	**50.369.582.708,34**	**46.663.426.452,34**	**47.584.450.428,00**	**48.022.508.588,25**	**55.245.963.960,00**
3.	**Ekuitas**					
	Jumlah Ekuitas	**5.077.844.398.987,00**	**5.417.113.955.564,78**	**6.372.280.602.025,72**	**6.178.629.906.924,43**	**6.441.059.615.076,02**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		**5.128.213.981.695,34**	**5.463.777.382.017,12**	**6.419.865.052.453,72**	**6.226.652.415.512,68**	**6.496.305.579.036,02**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021

3.3.2.9. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermaanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas menggunakan:

a. Rasio lancar (*Current Ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan Kewajiban Lancar (utang jangka pendek). Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Rasio lancar (*Current Ratio*) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan namun masih pada nilai positif, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban lancarnya. Untuk mengetahui rincian *Current Ratio* Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.13.
***Current Ratio* Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020**

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	Ratio (%)
2016	497.361.930.629,86	39.369.582.708,34	12,63
2017	480.266.308.100,03	40.163.426.452,34	11,96
2018	421.131.968.060,98	47.584.450.428,00	8,85
2019	393.503.349.043,84	48.022.508.588,25	8,19
2020	450.804.921.753,17	55.245.963.960,00	8,16

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021

b. Rasio Kas (*Cash Ratio*) membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio kas Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 fluktuatif tahun 2016-2019 mengalami penurunan dan tahun 2020 mengalami kenaikan, walaupun terjadi penurunan tetapi rasio ini masih dalam kategori aman artinya Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat memenuhi/melunasi semua kewajibannya. Untuk mengetahui rincian *Cash Ratio Kabupaten* Banyuma tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.14.
***Cash Ratio* Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020**

Tahun	Kas (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	Ratio (%)
2016	398.675.479.688,40	39.369.582.708,34	10,13
2017	383.054.327.899,40	40.163.426.452,34	9,54
2018	291.001.753.539,23	47.584.450.428,00	6,12
2019	243.492.888.706,00	48.022.508.588,25	5,07
2020	295.086.103.313,00	55.245.963.960,00	5,34

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021.

c. Rasio Cepat (*quick ratio*) membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban. Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dengan cepat, semakin tinggi nilai rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah. Rasio cepat Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020 menurun. Walaupun mengalami penurunan masih menunjuk-kan angka positif, hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas keuangan tinggi sehingga dapat memenuhi semua kewajibannya dengan cepat. Untuk mengetahui rincian *Quick Ratio* Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.15.
***Quick Ratio* Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020**

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.)	Persediaan (Rp.)	Kewajiban Lancar (Rp.)	Ratio (%)
2016	497.361.930.629,86	32.484.349.076,77	39.369.582.708	11,81
2017	480.266.308.100,03	34.539.707.657,77	40.163.426.452	11,10
2018	421.131.968.060,98	46.152.945.489,47	47.584.450.428	7,88
2019	393.503.349.043,84	45.194.874.103,59	48.022.508.588	7,25
2020	450.804.921.753,17	50.268.694.858,29	55.245.963.960	7,25

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021

3.3.2.10. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu pemerintah daerah dikatakan solvable apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan insolvable. Rasio Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan kenaikan yang signifikan pada Tahun 2016-2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Walaupun ratio tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memenuhi seluruh kewajibannya masih sangat *solvable*. Untuk mengetahui rincian Rasio Solvabilitas Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.16.
Rasio *Solvabilitas* Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Tahun	Total Aktiva (Rp.)	Total Kewajiban (Rp.)	Ratio (%)
2016	5.128.213.981.695,80	50.369.582.708,34	101,81
2017	5.463.777.382.017,12	46.663.426.452,34	117,09
2018	6.419.865.052.453,72	47.584.450.428,00	134,92
2019	6.226.652.415.512,68	48.022.508.588,25	129,66
2020	6.496.305.579.036,02	55.245.963.960,00	117,59

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021

3.3.2.11. Rasio Laverage

Rasio Utang (leverage) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam mebuat keputusan pemberian kredit. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage yaitu Rasio utang terhadap ekuitas *(Total Debt to Equity Ratio/DER).* DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang *(over–laveraged)* dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar. Rasio DER pada Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan trend penurunan Tahun 2017-2019 dan kenaikan pada Tahun 2020, walaupun mengalami penurunan dan kenaikan rasio menunjukkan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai aktiva atau kekayaan yang tinggi untuk membayar semua kewajibannya dengan modal yang telah dimiliki. Untuk mengetahui rincian *DER* Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.17.
Debt to Equity Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2020

Tahun	Total Kewajiban (Rp.)	Total Ekuitas (Rp.)	Ratio (%)
2016	50.369.582.708,34	5.077.844.398.987,00	0,01
2017	46.663.426.452,34	5.417.113.955.564,78	0,01
2018	47.584.450.428,00	6.372.280.602.025,72	0,01
2019	48.022.508.588,25	6.178.629.906.924,43	0,01
2020	55.245.963.960,00	6.441.059.615.076,02	0,01

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyumas, 2021

3.4. Kerangka Pendanaan

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022-2023 disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun 2016-2020 dan penetapan tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 utamanya dari sektor pajak disusun mendasarkan pada proyeksi penerimaan pada tahun 2021, trend realisasi pendapatan 10 tahun terakhir, asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5 persen dan asumsi bahwa tahun 2022 masuk dalam fase *recovery*. Sedangkan target proyeksi PAD tahun 2023 menggunakan asumsi seperti yang digunakan pada tahun 2022 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen serta optimis bahwa tahun 2023 kondisi sudah normal kembali. Untuk Tahun 2021-2023 PAD diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 104,70 milyar atau 14,80 persen.

Guna pencapaian target PAD tahun 2022 dan 2023 akan dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya :

a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.

c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan SKPD/OPD Penghasil.
d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
e. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya *ekstensifikasi* pendapatan daerah melalui:

a. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
b. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah.
d. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Selain itu, dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut pemerintah untuk berinovasi dalam pembiayaan program-program pembangunan melalui kolaborasi dengan sektor swasta utamanya untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Mulai tahun 2021, struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah pada perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022–2023 diarahkan untuk:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta ketahanan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
4. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundangan diantaranya untuk fungsi pendidikan; fungsi kesehatan; dan infrastruktur.

Struktur belanja daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 125,29 milyar atau 3,30 persen, struktur Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 130,61 milyar atau 5,16 persen. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/ Anggota DPRD, dan Pegawai ASN dan PPPK yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Tahun 2021-2023 belanja pegawai diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 123,13 milyar atau 7,98 persen, kenaikan tersebut dikarenakan adanya rencana penerimaan CPNS dan PPPK untuk Kabupaten Banyumas, dan untuk *acrees* 2,5% yang digunakan anata lain untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kenaikan tunjangan PNS dan PPPK.
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol COVID-19 dalam pelaksanaan *New Nomal*. Belanja Barang dan Jasa. Untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 1,73 milyar atau 0,19 persen, hal ini dikarena diperkirakan adanya kenaikan kebutuhan dan harga atas barang/jasa pada tahun yang akan datang, seperti kenaikan kebutuhan barang/jasa terkait pendemi COVID-19 dan biaya jasa Non PNS yang setiap tahunnya naik dengan adanya kenaikan UMR untuk Wilayah Kabupaten Banyumas.
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 3,93 milyar atau 5,75 persen yang digunakan untuk hibah kepada KPU dan Bawaslu sebagai dana cadangan untuk penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati periode 2023-2028 , Belanja hibah antara lain digunakan untuk bantuan operasional PAUD dan TK, SD, MI dan SMP, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, Ponpes, PMI, Pramuka, organisasi olahraga/KONI, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik.
   d. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengangaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hubah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas. Belanja Bantuan Sosial, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 1,23 milyar atau

7,23 persen. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat yang terkena dampak COVID-19 maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. Belanja Modal, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 6,44 milyar atau 2,10 persen, penurunan terjadi dikarena pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas yang rencananya akan menerima pinjaman PEN dari pemerintah Pusas yang peruntukannya untuk Belanja Modal untuk peningkatan fasilitas Pariwisata Baturraden dengan tujuan akan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas.

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :

   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
      1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
      2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
      3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

   Belanja Tidak Terduga, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan menurun rata-rata sebesar minus Rp. 17,50 milyar atau minus 43,75 persen, penurunan tersebut diharapkan bahwa Pendemi COVID-19 sudah berkurang, mereda, bahwa sudah tidak ada lagi.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja Transfer, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 18,63 milyar atau 2,94 persen.

   Belanja transfer tahun dirinci atas jenis:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Belanja Bagi Hasil, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 1,69 milyar atau 4,89 persen. Meningkatnya dana transfer diperkirakan karena adanya

penerimaan CPNS dan PPPK untuk Kabupaten Banyumas dan diharapkan ada penambahan dana transfer yang ditujukan untuk Pemerintah Desa/kelurahan.

b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja Bantuan Keuangan, untuk Tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar Rp. 16,94 milyar atau 2,83 persen, proyeksi peningkatan tersebut di proyeksikan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi akan memberiakn bantuan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pemulihan Ekonomi (UMKM) dan untuk pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan.

5. Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 diproyeksikan bersumber dari Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat pada tahun 2021 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada tahun berkenaan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada sampai dengan tahun 2023, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian *(prudential)* berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlau, dan pada tahun 2023 dikeluarkan juga untuk Angsuran Pokok Pinjaman PEN Daerah dan pemberian pinjaman daerah yang akan dibayarkan pada tahun berkenaan.

Untuk lebih jelasnya maka Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.18.
Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	URAIAN	Tahun 2021 *) (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**660.211.444.038**	**773.871.785.788**	**869.618.580.432**
1.1.	Pajak Daerah	217.887.970.118	312.710.291.463	370.528.048.749
1.2.	Retribusi Daerah	27.035.624.320	35.491.448.485	62.778.734.697
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.400.000.000	13.735.000.000	14.078.375.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	401.887.849.600	411.935.045.840	422.233.421.986
2.	**Pendapatan Transfer**	**2.573.114.612.000**	**2.804.277.321.493**	**2.927.065.254.194**
2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.319.870.101.000	2.524.044.411.310	2.633.159.320.102
2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	253.244.511.000	280.232.910.183	293.905.934.092
3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**193.754.809.000**	**198.515.001.450**	**203.414.652.563**
3.1.	Pendapatan Hibah	29.503.209.000	30.777.250.000	32.512.197.000
3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentun Peraturan Perundang-Undangan	164.251.600.000	167.737.751.450	170.902.455.563
	Jumlah Pendapatan Daerah	**3.427.080.865.038**	**3.776.664.108.731**	**4.000.098.487.189**
4.	**Belanja Operasi**	**2.499.065.694.768**	**2.718.284.823.115**	**2.760.284.816.572**
4.1.	Belanja Pegawai	1.516.288.924.638	1.727.213.367.988	1.762.541.034.170
4.2.	Belanja Barang dan Jasa	887.861.262.074	888.403.452.995	891.322.452.995
4.3.	Belanja Bunga	10.900.000.000	10.900.000.000	12.090.000.000
4.4.	Belanja Hibah	67.569.521.050	74.482.639.000	75.427.466.120
4.5.	Belanja Bantuan Sosial	16.445.987.006	17.285.363.132	18.903.863.287
5.	**Belanja Modal**	**586.424.819.264**	**449.934.796.369**	**573.537.671.597**
6.	**Belanja Tidak Terduga**	**40.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
7.	**Belanja Transfer**	**625.024.989.458**	**647.525.489.247**	**662.275.999.020**
7.1.	Belanja Bagi Hasil	33.970.901.458	34.650.319.487	37.343.325.870
7.2.	Belanja Bantuan Keuangan	591.054.088.000	612.875.169.760	624.932.673.150
	Jumlah Belanja Daerah	**3.750.515.503.490**	**3.820.745.108.731**	**4.001.098.487.189**
	Surplus / (Defisit)	**(323.434.638.452)**	**(44.081.000.000)**	**(1.000.000.000)**

No.	URAIAN	Tahun 2021 *) (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023

				(Rp.)
8.	**Penerimaan Pembiayaan**	**373.780.638.452**	**95.581.000.000**	**80.100.000.000**
8.1.	SILPA	170.780.638.452	94.581.000.000	79.100.000.000
8.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000	-	-
8.3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
9.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**50.346.000.000**	**51.500.000.000**	**79.100.000.000**
9.1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	25.000.000.000	15.000.000.000
9.2.	Penyertaan Modal Daerah	28.846.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
9.3.	Pengeluaran Angsuran Pokok Pinjaman PEN Daerah	-	-	37.600.000.000
9.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Pembiayaan Netto	**323.434.638.452**	**44.081.000.000**	**1.000.000.000**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**-**	**-**	**-**

Sumber : Bappedalitbang, BAPENDA dan BPKAD Kab. Banyumas, 2021.
*Keterangan : *) Perubahan RKPD 2021.*

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Gambaran kondisi Kabupaten Banyumas yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2023. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan tidak bisa diperkirakan dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.

4.1. Telaah RPJPD 2005-2025

Sesuai dengan visinya, maka tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyumas tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan masyarakat Banyumas yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, serta Lestari. Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembangunan tersebut dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 harus mempedomani RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten banyumas Tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat (2020-2024) dari RPJPD Kabupaten Banyumas sesuai misi-misi adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera

1. Kependudukan
   - Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kependudukan;
   - Peningkatan pegaturan distribusi (insentif dan disinsentif) penduduk sesuai Perda Tata Ruang Wilayah;
   - Peningkatan efektivitas dan efisiensi program Keluarga Berencana.
2. Pendidikan
   - Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun;
   - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
   - Pengembangan kurikulum;
   - Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi setempat dalam pembangunan kualitas SDM.
3. Kesehatan
   - Pemberdayaan masyarakat daam pencegahan penyakit menular;
   - Peningkatan kualitas pelayanan Poliklinik Perdesaan;
   - Peningkatan pelayanan bidan dan bidan desa secara menyeluruh;
   - Peningkatan budaya hidup sehat masyarakat.
4. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

- Peningkatan kualitas balai pelatihan kerja industri, jasa dan pertanian;
- Pengurangan pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri;
- Peningkatan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja.

5. Penanggulangan Kemiskinan
   - Melanjutkan pelaksanaan program Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan;
   - Melanjutkan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)
   - Melanjutkan pengembangan jaringan kemitraan penanggulangan kemiskinan.
6. Pemberdayaan Perempuan
   - Melanjutkan peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam segala kegiatan pembangunan.

Misi 2 : Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri

1. Ekonomi
   - Melanjutkan perkuatan operasional ekonomi kerakyatan;
   - Melanjutkan perkuatan manajemen lembaga ekonomi kerakyatan
2. Perdagangan
   - Melanjutkan pengembangan pusat-pusat perdagangan baik lokal maupun regional;
   - Melanjutkan pengembangan jaringan distribusi wilayah;
   - Melanjutkan peningkatan pelayanan pengembang-an usaha distribusi baik lokal maupun regional.
3. Pariwisata
   - Peningkatan pelayanan angkutan wisata ke obyek-obyek wisata;
   - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan obyek dan atraksi wisata;
   - Pengembangan pengelolaan kawasan wisata Banyumas Selatan secara terpadu (wisata alam dan wisata budaya);
   - Melanjutkan pengembangan Paket Wisata Regional;
   - Melanjutkan peningkatan publikasi dan promosi wisata tingkat regional, nasional maupun internasional.
4. Pertanian
   - Peningkatan produktivitas perluasan daerah irigasi teknis;
   - Melanjutkan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian lahan basah;
   - Melanjutkan pengembangan kualitas produk agropolitan;
   - Melanjutkan pengembangan manajemen agrowisata;
   - Melanjutkan pengembangan agroindustri.
5. Industri
   - Melanjutkan pengembangan industri pengolahan produk pertanian;
   - Melanjutkan pengembangan kuantitas dan kualitas produk industri rumah tangga.
6. Koperasi
   - Melanjutkan pengembangan koperasi produksi industri rumah tangga.
7. Pertambangan dan Energi
   - Melanjutkan pelayanan mekanisasi penambangan galian golongan C;
   - Melanjutkan pengembangan listrik mikro hidro;
   - Melanjutkan pengembangan bioenergi.
8. Pengarusutamaan Gender
   - Meningkatkan Nilai IDG yang masih rendah

- Meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif,
- Meningkatkan sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga).

Misi 3 : Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing

1. Kependudukan
   - Melanjutkan pengembangan Manajemen Sistem Informasi kependudukan;
2. Kualitas SDM
   - Melanjutkan peningkatan pelayanan dalam peningkatan pendidikan ke luar negeri;
   - Melanjutkan penguasaan teknologi informatika.
3. Politik, hukum dan pemerintahan
   - Mempertahankan situasi politik yang kondusif;
   - Peningkatan kualitas, fungsi dan peran Legislatif;
   - Peningkatan pelaksanaan good governance;
4. Sarana dan Prasarana Wilayah
   - Peningkatan kondisi jalur prasana dan sarana transportasi ke pusat-pusat kegiatan masyarakat;
   - Pembangunan jaringan prasarana dan sarana irigasi;
   - Pengembangan pembangunan mikro hidro;
   - Melanjutkan peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi.
5. Olahraga dan kebudayaan
   - Melanjutkan peningkatan pelayanan peranserta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olah raga;
   - Melanjutkan peningkatan pelayanan peranserta masyarakat dalam pengembangan budaya khas Banyumas;
   - Peningkatan pelayanan peranserta masyarakat dalam perlindungan benda cagar budaya.

Misi 4 : Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari

1. Keberlanjutan pembangunan
   - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
   - Penyusunan Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
   - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahapan berikutnya;
   - Penetapan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahapan berikutnya.
2. Lingkungan hidup
   - Melanjutkan antisipasi bencana alam di kawasan rawan bencana;
   - Melanjutkan peningkatan pelayanan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
   - Melanjutkan pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan terasering di area belum terbangun;
   - Melanjutkan pemberdayaan masyarakat dalam penanaman pohon di area konservasi.

3. Penataan ruang wilayah
   - Melanjutkan pemberdayaan masyarakat di dalam pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
   - Melanjutkan evaluasi dan revisi perda tentang RDTR Kawasan Perkotaan secara periodik;
   - Melanjutkan pemberdayaan masyarakat di dalam penyusunan Neighbourhood Development.

4.2. Telaah RPJMN 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat dari RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 merupakan penerjemahan dari visi-misi dan janji Presiden-Wakil Presiden terpilih. Sehingga dalam penyusunannya perlu memperhatikan dokumen tersebut. Sebagai kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi sebelumnya maka dalam periode 5 tahun mendatang maka visi yang dirumuskan adalah “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya mewujudkan visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ditempuh dengan sembilan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Agenda prioritas pembangunan nasional dijabarkan menjadi 7 agenda sebagai berikut:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 menghadapi tantangan Perekonomian yaitu:

1. Ketidakpastian Global
   Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat sepanjang 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

2. Pertumbuhan Ekonomi stagnan
   Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring belum optimalnya transformasi struktural.

   Faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Jika tidak diatasi saat ini, rendahnya kualitas SDM akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit untuk beralih ke manufaktur berteknologi tinggi. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

3. Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat
   Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun, akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di tengah kondisi keuangan global yang ketat.
4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
   Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, di pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui fin-tech, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia.

RPJMN 2020-2024 telah mengidentifikasi beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan nasional, termasuk berpengaruh terhadap Kabupaten Banyumas, antara lain Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perumahan.

Dalam rangka mencapai sasaran ekonomi makro pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM.

Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di setiap wilayah diharapkan selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan karakteristik wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pulau Jawa – Bali tetap menjadi wilayah yang memiliki porsi (share) terbesar dalam perekonomian didorong oleh pergeseran struktur ekonomi ke sektor jasa dengan tetap mempertahankan pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Pergeseran struktur ekonomi ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pulau Jawa - Bali yang lebih stabil sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang. Salah satu parameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diperhatikan Kabupaten Banyumas adalah Kawasan Rawan Bencana dan Ketersediaan Air. Kerusakan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kelangkaan air baku juga mulai terjadi pada beberapa wilayah lainnya dikarenakan dampak dari perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia. Saat ini ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan RPJMN 2020-2024 menunjukan keselarasan visi RPJMN dengan visi RPJMD pada visi untuk mewujudkan wilayah yang maju dan mandiri. Ada satu misi RPJMN yang tidak terkait dengan RPJMD Kabupaten Banyumas karena misi tersebut adalah kewenangan pusat bukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Sasaran RPJMN 2020-2024 Tahun 2020-2024

Sasaran	Tahun 2020-2024
Pertumbuhan ekonomi (%) untuk Jawa	5,9
Tingkat kemiskinan (%)	6,0 – 7,0
Tingkat Pengangguran (%)	3,6 – 4,3

Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, sebagaimana diuraikan di dalam Bab 3 RPJMN 2020-2024, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Jawa-Bali dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan dengan lokasi antara lain adalah Kabupaten Banyumas. Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah

Pembangunan program/kegiatan/proyek strategis yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyumas sebagai keberlanjutan implementasi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

a. Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)
b. Pengurangan risiko krisis kesehatan
c. Peningkatan Jalan Banyumas - Klampok, Kab. Purbalingga
d. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
e. Pengendalian Penggunaan Dana Desa

f. Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa Tahun 2020
g. Desa Digital (P3PD)
h. Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
i. Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes
j. BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa

4.3. Telaah Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, merupakan pedoman percepatan pembangunan kawasan dengan lampiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana Induk). Berdasarkan Rencana Induk terdapat 7 usulan program/kegiatan di Kawasan Barlingmascakeb yang ada di Wilayah Kabupaten Banyumas untuk mendukung pengembangan kawasan Brebes-Tegal- Pemalang. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menyelaraskan program/kegiatan pengembangan kawasan Barlingmascakeb dan usulan program/kegiatan lintas Kawasan yang ada di Kabupaten Banyumas dengan program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 antara lain melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Penyelarasan Program/Kegiatan sesuai Perpres 79 Tahun 2019 dengan Program Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	Program/Kegiatan Perpres 79 Tahun 2019	Program Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
	Pengembangan Kawasan Barlingmascakeb	
1	Pembangunan Waduk Kaliurip di Kecamatan Purwojati	· Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2	Pembangunan Jembatan Kali Serayu yang menghubungkan Desa Pegalongan–Desa Mandirancan Kecamatan Patikraja	· Program Penyelenggaraan Jalan
3	Pembangunan Anjungan Pelayanan Jalan (APJ)	· Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4	Pembangunan Fly over Tambaknegara	· Program Penyelenggaraan Jalan
5	Pembangunan Fly over Veteran	
6	Peningkatan Terminal Tipe A	· Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
7	Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis)	. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Lintas Kawasan	
8	Pembangunan Tol	· Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)·
	Pejagan-Cilacap, Kab.	· Program Penyelenggaraan Jalan
	Brebes, Kab. Cilacap	· Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	dan Kab. Banyumas	
9	Bantuan Stimulan	· Program Pengembangan Perumahan
	Perumahan Swadaya	
	(BSPS) Jawa Tengah	
10	Pengembangan	· Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No.	Program/Kegiatan Perpres 79 Tahun 2019	Program Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
	amenitas pariwisata	· Program Pemasaran Pariwisata
	berbasis homestay/desa	
	wisata	
11	Pengembangan ekonomi	· Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	berbasis koperasi dan	· Program Pengembangan UMKM
	UMKM	
13	Penanggulangan dan	· Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat·
	pencegahan stunting	· Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	dan gizi buruk	· Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

4.4. Telaah RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan wilayah penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 dengan visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

4.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas secara umum menunjukan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun begitu terdapat isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian bersama untuk dapat diatasi secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Prosedur penyusunan KLHS RPJMD selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan KLHS sebagai "rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program". Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan ketentuan perundangan, Kepala

Daerah terpilih menyusun RPJMD yang diawali dengan penyusunan KLHS RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan penyusunan KLHS untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainya. Dimana dalam proses penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program (KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPMD.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodasi isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, hukum dan tata kelola. Melalui kegiatan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas 2018–2023 ini diharapkan akan terwujud pembangunan di Kabupaten Banyumas yang sejahtera, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Kajian ini juga diharapkan dapat memperkuat substansi perencanaan daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional.

Isu strategis pembangunan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas mempertimbangkan indikator TPB yang membutuhkan upaya tambahan. Selain itu juga mempertimbangkan skenario kondisi lingkungan terutama daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hasil perumusan skenario menunjukkan indikator TPB belum tercapai sampai dengan tahun 2023 merupakan indikator yang perlu upaya tambahan setelah dipadankan dengan aspek lain terutama aspek lingkungan. Indikator yang belum tercapai perlu menjadi prioritas dalam dokumen KLHS agar dapat memenuhi target pada masa yang akan datang. Berikut adalah permasalahan dan perumusan isu strategis yang didasarkan pada indikator TPB yang belum tercapai serta yang akan terdata sampai dengan akhir 2023 serta permasalahan kondisi sumber daya dan lingkungan hidup Kabupaten Banyumas. Berikut adalah uraian permasalahan dan isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS RPJMD di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan telaah terhadap permasalahan dari capaian TPB yang membutuhkan upaya tambahan serta pendataan indikator yang belum terdapat data, maka dihasilkan 10 isu strategis. Selain itu dalam kegiatan uji publik untuk mendapatkan masukan dari stakeholder untuk isu strategis juga telah ditambahkan terutama dalam identifikasi permasalahan lingkungan hidup. Secara garis besar isu yang muncul dalam kegiatan uji publik adalah status lingkungan hidup Kabupaten Banyumas yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air, rawan bencana longsor, serta ancaman terhadap kegiatan pertanian. Berikut adalah isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas berdasarkan kelompok pilar.

1. Pilar Sosial : (1) Kualitas derajat kesehatan masyarakat; (2) Kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan; (3) Penanggulangan warga pra-sejahtera dan perlindungan sosial; (4)Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. Pilar Ekonomi : (5) Pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi;

3. Pilar Lingkungan : (6) Peningkatan kualitas sumber daya air dan sanitasi; (7) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (8)Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim;
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola : (9) Tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat; (10) Keamanan dan ketertiban wilayah.

Skenario rekomendasi penyempurnaan KLHS merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi umum Kabupaten Banyumas, serta indikator kinerja daerah maupun indikator dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas 2018 – 2023. Secara rinci rekomendasi KLHS untuk dokumen RPJMD sebagai berikut:

- Mengurangi korelasi antara KLHS dan SDGs yang merupakan bagian terintegrasi dengan penyusunan RPJMD dalam latar belakang.
- Menambahkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta menambahkan data capaian indikator SDGs yang sesuai dengan kondisi daerah diutamakan untuk indikator yang tidak masuk dalam Indikator Makro, Indikator Outcome/Program dan Indikator Renstra.
- Menambahkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Banyumas yang meliputi analisis share Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi untuk melihat tingkat kemandirian daerah.

Menambahkan uraian dalam isu strategis dari hasil KLHS yang meliputi isu strategis berdasarkan muatan PP 46 tahun 2016 tentang kondisi lingkungan hidup serta isu strategis terkait dengan capaian SDG's untuk masing-masing pilar.

4.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas telah diselaraskan dengan permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada indikator TPB serta kondisi sumber daya dan lingkungan hidup, baik yang belum tercapai maupun yang perlu upaya untuk mencapai target akhir Kabupaten Banyumas tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terkait pelaksanaan capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2020 diidentifikasi beberapa indikator kinerja utama bupati tidak dapat tercapai dengan adanya kondisi terdampak pandemi COVID 19 sehingga target menjadi terlalu tinggi untuk dicapai pada akhir periode RPJMD antara lain sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   Capaian IPM Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 70.75 meningkatmenjadi 71.98 pada tahun 2020, namun belum dapat mencapai target 2020 yaitu sebesar 72,55 serta perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 74,35. Target IPM menjadi terlalu tinggi karena dengan adanya pandemi COVID 19 berdampak pada

pencapaian komponen IPM yaitu angka harapan hidup, yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Dari tiga aspek pembangunan manusia, kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan, namun dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk non pangan mengalami penurunan yaitu dari 52,31% pada tahun 2019 turun menjadi 51,08% di tahun 2020. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu tumbuh hanya 0,02 persen dari sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,92%.

2. Persentase penduduk miskin

   Capaian penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 17.05% menurun menjadi 13.26% pada tahun 2020, namun belum dapat mencapai target 2020 yaitu sebesar 11,53% atau baru tercapai 80% serta perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 8,56% karena baru tercapai 45,09%. Target penurunan persentase penduduk miskin menjadi terlalu tinggi karena dengan adanya pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya penduduk miskin dari 12,53% pada tahun 2019 menjadi 13,26% pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 5,83%.

3. Pertumbuhan Ekonomi

   Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,65% tercapai minus 25.58% dari target tahun 2020 atau minus 24.81% dari target akhir RPJM. Dengan melihat kondisi ini maka Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi sejalan dengan perubahan target pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

   Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Selama kurun waktu 2016-2019 Tingkat pengangguran terbuka fluktuatif cenderung naik dari 4,03 menjadi 4,21, dan kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi sebesar 6 atau tercapai 40,43% dari target akhir RPJM 3,76%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Dengan adanya pandemi yang diperkirakan masih berdampak lama dan membutuhkan waktu dalam pemulihannya, maka diperlukan penyesuaian target TPT menjadi sebesar 4,5%.

5. Angka Kriminalitas

   Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, naik sampai tahun 2018 dan kemudian menurun sampai dengan tahun 2020. Sedangkan jumlah kriminal terus meningkat dari kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2019 dan mmulai menurun di tahun 2020, dengan persentase kasus kriminal yang tertangani fluktuatif cenderung menurun, sehingga perlu

upaya lebih keras untuk menekan dan menanganinya, karena stabilitas keamanan menjadi faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Dengan Namun dikarenakan indikator yang digunakan dalam RPJM adalah angka kriminalitas sedangkan target yang digunakan merupakan jumlah kasus kriminalitas, maka perlu penyesuaian rumusan target terhadap indikator angka kriminalitas melihat kondisi umum dan capaiannya.

Tabel 4.4.
Permasalahan dan Penyesuaian target Indikator Daerah dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Satuan	Target dan Penyesuaian target							
			2021	penyesuaian target	2022	penyesuaian target	2023	penyesuaian target	Akhir RPJMD	penyesuaian target
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,15	**72,18**	73,75	**72,38**	74,35	**72,58**	74,35	**72,58**
2	Persentase penduduk miskin	%	10,54	**12,51**	9,55	**11,76**	8,56	**11,00**	8,56	**11,00**
3	Pertumbuhan Ekonomi / Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6,5	**4,1**	6,6	**4,5**	6,65	**5**	6,65	**5**
4	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pnddk	823	**1,656**	891	**1,586**	950	**1,516**	950	**1,516**
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,06	**5,75**	3,93	**5**	3,76	**4,5**	3,76	**4,5**

Sedangkan permasalahan-permasalahan yang dirumuskan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas per bidang urusan dapat jelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Permasalahan Berdasarkan Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Banyumas Per Bidang Urusan

1.	**Pendidikan** ● *Angka harapan lama sekolah belum optimal* Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,85 tahun walaupun lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Jawa Tengah, namun lebih rendah dari capaian nasional. AHLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap

	bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas, sehingga Harapan Lama Sekolah sebesar 12,85 diasumsikan sampai dengan D-1. • *Angka rata-rata lama sekolah belum optimal* Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yaitu 7,52 tahun lebih rendah dibanding rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah dan nasional pada tahun yang sama yaitu 7,69 untuk Provinsi Jawa Tengah dan nasional mencapai 8.48 tahun. Rata-rata lama sekolah memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia, dengan asumsi bahwa semakin lama sekolah akan semakin banyak pengetahuan dan ketrampilan. • *Angka partisipasi kasar (APK) SMP belum optimal.* APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung meningkat, dengan capaian di tahun 2020 sebesar 85,64% atau tercapai 91,44% terhadap target 2020 dan tercapai 85,9% terhadap target akhir RPJM. Namun dibandingkan dengan capaian kabupaten lain di Barlingmascakeb dan provinsi yang diatas 90%, maka capaian kabupaten Banyumas masih sangat rendah, sehingga masih perlu perhatian dalam rangka pendidikan dasar sembilan tahun dan pembangunan sumber daya manusia. • *Angka partisipasi murni (APM) SD dan SMP belum optimal.* APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumas tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung meningkat. Hanya pada tahun 2020 APM SD mengalami sedikit penurunan dari sebesar 98,77 di tahun 2019 menjadi sebesar 98,54 di tahun 2020 atau tercapai 99,64% dari target tahun 2020 atau 99,59% dari target akhir RPJMD, sehingga masih perlu perhatian untuk dapat tercapai APM 100% • *Masih tingginya anak putus sekolah* Angka Putus Sekolah tingkat SD dan SMP Kabupaten Banyumas Banyumas tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Untuk angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2016 sebesar 0,033% turun pada tahun 2017 sebesar 0,026 % dan naik di tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,040% dan menurun pada tahun 2020 sebesar 0,034% dari targe ttahun 2020 sebesar 0,00032% dan target akhir RPJM sebesar 0,00025%. Demikian pula dengan angka putus sekolah untuk jenjang SMP/MTs yang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,166 menjadi sebesar 0,102% di tahun 2020, dengan target tahun 2020 sebesar 0,0025% dan target akhir RPJM sebesar 0,0020%. Pencapaian angka putus sekolah baik SD/MI maupun SMP/MTs sangat rendah lebih dari minus 1000%, karena target angka putus sekolah yang terlalu rendah disebabkan perumusan yang tidak sesuai perhitungan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target untuk perencanaan selanjutnya.

	• *Kondisi bangunan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs masih belum optimal* Belum semua bangunan sekolah baik SD/MI dan SMP / MTs dalam kondisi baik. Capaian realisasi tahun 2020 bangunan sekolah SD / MI dalam kondisi baik baru sebesar 71,64% sedang bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik baru 61,99%.
2.	**Kesehatan** • *Angka Usia Harapan Hidup (UHH)* Angka Usia Harapan Hidup tahun 2020 sebesar 73.72 melampaui target 2020 sebesar 73,63 namun masih belum memenuhi target akhir RPJMD sebesar 73,93 dan masih lebih rendah dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah sebesar 74,37, sehingga (UHH) di Kabupaten Banyumas masih harus ditingkatkan. • *Belum terpenuhinya sarana, prasarana pelayanan dan sumber daya kesehatan* Puskesmas dan Rumah Sakit mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peran Puskesmas, Rumah Sakit dan jaringannya sebagai institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terlibat langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sarana dan Prasarana yang ada di Puskesmas dan Rumah Sakit belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan kesehatan . Jumlah Puskesmas sebanyak 40 dan Rumah Sakit sebanyak 23 belum mampu menjangkau pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas. • *Rasio tenaga kesehatan pada tenaga ahli gizi belum memadai* Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada te naga ahli gizi sebesar 1 : 7 per 100.000 penduduk, dimana standarnya 48 tenaga ahli gizi. • *Angka kesakitan dan kematian masih tinggi* *Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi* Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi sasaran prioritas pembangunan Kesehatan. Upaya Penurunan AKI tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan / SDG's, Angka Kematian ibu selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020 fluktuatif cenderung menurun sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 37,62 namun kembali naik di tahun 2020 sebesar 41,50. • *Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi*

	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Banyumas dalam periode tahun 2016-2020 cendrung mengalami penurunan, yaitu dari angka 8,49 di tahun 2016 menjadi 7,06 di tahun 2020, namun masih menjadi permasalahan karena melihat jumlah kematian bayi di Kabupaten Banyumas masih termasuk tinggi yaitu sebanyak 187 kasus di tahun 2020, paling tinggi dibandingkan Kabupaten lain di Barlingmascakeb. • *Masih adanya kematian balita, Perlunya menurunkan Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (*TPB)* Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Banyumas dalam periode tahun 2017-2019 cendrung mengalami peningkatan, yaitu dari angka 8,28 di tahun 2017 menjadi 9,2 di tahun 2019, dan menurun menjadi 8,95 pada tahun 2020. Walaupun demikian upaya menurunkan angka kematian balita di Kabupaten Banyumas masih diperlukan selain juga untuk menekan angka kematian balita di tingkat Provinsi. • Kasus balita gizi kurang, stunting, dan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Banyumas dari tahun 2016–2019 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yaitu 6,94 di tahun 2016 menjadi 7,80 di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 3,90 di tahun 2020. Walaupun demikian upaya menurunkan kasus balita gizi kurang di Kabupaten Banyumas masih diperlukan selain untuk menekan balita gizi kurang di tingkat Provinsi. Tahun 2018, prevalensi stunting Kabupaten Banyumas masih diatas rata-rata Jawa Tengah yaitu sebesar 24,43%. Hal ini yang mendorong permasalahan stunting patut menjadi perhatian untuk segera dituntaskan. Kasus stunting di Kabupaten Banyumas ditahun 2020 tercapai sebesar 14,12% dibawah target prevalensi stunting di Jawa Tengah pada tahun 2023 yaitu dibawah 20% dan target Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 17%, namun masih belum mencapai target akhir Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sebesar 14% dan dari 301 desa ada beberapa desa yang memiliki kasus stunting tinggi. Untuk Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) tahun 2020 tercapai sebesar 6.87% belum mencapai target 2020 sebesar 4% dan target akhir RPJMD sebesar 3%, serta dari 301 desa ada beberapa desa dengan kasus BBLR tinggi. Untuk itu perlu upaya tambahan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita untuk mencapai tujuan TPB. • *Masih tingginya prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)* Meskipun capaian prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 58 telah melampaui target akhir RPJM 158, akan tetapi sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Juni

	tahun 2020, jumlah penderita tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Banyumas tertinggi keempat di Jawa Tengah yaitu sebanyak 1.334 penderita setelah Kabupaten Brebes yakni 1.840 penderita, Kabupaten Tegal sebanyak 1.500 penderita, dan Kabupaten Cilacap sebanyak 1.447 penderita. Sehingga permasalahan prevalensi tuberculosis diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin. ● *Belum optimalnya Jaminan Kesehatan Nasional* Capaian Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2020 baru tercapai 83,14% dari target akhir RPJM 100%. ● *Perlunya meningkatkan layanan upaya kesehatan jiwa di tingkat Puskesmas (*TPB)* Layanan kesehatan jiwa di Kabupaten Banyumas masih ditangani oleh RSUD, sementara di Puskesmas belum tersedia, sehingga perlu diupayakan layanan kesehatan jiwa di Puskesmas untuk lebih menjangkau pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan TPB. ● *Perlunya melakukan deteksi dini untuk penyakit tekanan darah tinggi (*TPB)* Capaian prevalensi tekanan darah tinggi tahun 2020 sebesar 5,66% sudah melampaui target akhir RPJM sebesar 37,9%, namun kematian akibat tekanan darah tinggi masih cukup tinggi, sehingga perlunya upaya deteksi dini untuk penyakit darah tinggi guna tercapai tujuan TPB.
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** ● *Masih kurangnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik* Dari Panjang jalan kabupaten adalah 1.508 km, dalam kondisi baik baru mencapai 45,04 %, kondisi sedang 23,10 %, dan kondisi rusak 31,87%. Dengan demikian panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik+kondisi sedang) adalah 68,14%. Kondisi jalan baik tersebut belum mencapai target 2020 sebesar 53,06% dan belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 68,06%. Sedangkan dari 914 jembatan dengan total panjang 7.665,57 m, baru 75,82% dalam kondisi baik. Sehingga diperlukan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Realisasi peningkatan jalan hotmix pada tahun 2020 sepanjang 166,68 km, merupakan upaya pencapaian target akhir hasta krida peningkatan jalan hotmix 570 km. Namun dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan dan pemulihan pandemi COVID 19 mengakibatkan pencapaian target yang belum terpenuhi menjadi terkendala, sehingga dibutuhkan penyesuaian target untuk pemenuhannya. ● *Masih terdapat kerusakan pada irigasi kabupaten* Panjang irigasi kabupaten tahun 2020 adalah 641.081, Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

	adalah 78,31 %. Walaupun telah melampaui target tahun 2020 sebesar 73,1% dan target akhir RPJMD sebesar 77,6%, namun panjang jaringan irigasi kabupaten kondisi rusak masih sebesar 21,69%. • *.Belum memadainya rencana tata ruang sebagai perangkat perijinan investasi* Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 masih belum memadai sebagai perangkat perijinan,sementara perubahan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 masih dalam proses dan Rencana Detail Tata Ruang yang telah diperdakan baru RDTR Kawasan perkotaan Purwokerto, sedangkan kawasan strategis lainnya belum memiliki rencana detail tata ruang. Perijinan investasi perlu percepatan agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Banyumas, juga untuk mendukung kawasan pengembangan prioritas nasional, khususnya Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. • *Tingginya alih fungsi lahan pertanian* Luas lahan pertanian bukan sawah pada tahun 2019 seluas 68.798 Ha sedangkan lahan pertanian sawah pada tahun 2019 seluas 31.915Ha. Lahan pertanian bukan sawah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, sedangkan lahan pertanian sawah setiap tahun selalu mengalami penurunan. Oleh karena itu alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Banyumas masih relatif tinggi. Hal ini dapat diakibatkan karena terjadinya kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas. Kawasan terbangun umumnya digunakan untuk pembangunan perumahan/permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. • *Belum optimalnya pengembangan kawasan peruntukan industri* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (2011-2031) yang masih berlaku hingga saat ini terdapat total luas kawasan peruntukan industri (KPI) kurang lebih 500 Ha yang berada tersebar di Kecamatan Ajibarang, Wangon, Sokaraja, dan Kemranjen. Dalam draf revisi RTRW direncanakan kawasan peruntukan industri bertambah menjadi kurang lebih 2.000 ha, tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Wangon, Lumbir, Ajibarang, Jatilawang, Rawalo, dan Kalibagor. Kawasan peruntukan industri realisasinya baru terdapat 4 KPI, sedangkan targetnya sampai dengan 2023 sebanyak 5 KPI. Sehingga pengembangan kawasan peruntukan industri ini masih perlu untuk dikembangkan lagi demi mencapai target. • *Masih rendahnya bangunan pemerintah dalam kondisi baik* Salah satu aspek pendukung pelayanan publik adalah bangunan gedung yang baik. Target indikator persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik

	pada tahun 2020 sebesar belum tercapai 66,7%. Pencapaian tahun 2020 hanya mencapai 66,6%. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas bangunan pemerintah kondisi baik agar dapat menunjang kenyamanan kebutuhan pegawai dalam bekerja. • *Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (*TPB)* Air minum merupakan kebutuhan dasar yang menjadi hak seluruh masyarakat. Akses terhadap layanan air minum layak dan berkelanjutan merupakan salah satu indikator SDGs/TPB Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Target 1.4 Memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar, dan Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Sampai dengan tahun 2020 rumah tangga akses air minum baru menjangkau 75,45% dari seluruh rumah tangga, belum memenuhi akses menyeluruh terhadap air minum sebagai kebutuhan dasar. • *Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (*TPB)* Akses terhadap layanan sanitasi juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan indikator SDGs/TPB Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Target 1.4 Memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar, dan Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Rumah tangga dengan akses terhadap layanan sanitasi (air limbah) sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 88,45%. • *Masih rendahnya fasilitas IPLT daerah* Kabupaten Banyumas memiliki 1 IPLT yang perlu direvitalisasi fisik dan kelembagaan pengelolaannya agar dapat memberikan pelayanan yang yang optimal. Peningkatkan kualitas pengelolan IPLT merupakan indikator SDGs/TPB Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Target 6.3 Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang

	aman secara global. ● *Perlunya mengembangkan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala perkotaan, kawasan dan komunal (*TPB)* Penurunan kualitas air karena peningkatan beban cemar dan keterbatasan daya dukung lahan terutama di kawasan perkotaan memerlukan upaya penyediaan air limbah domestik komunal.
4.	**Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman** ● *Berkembangnya lingkungan permukiman kumuh perkotaan* Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah dilaksanakan identifikasi permukiman kumuh yang ditetapkan menjadi Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 660/630 Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan keputusan Bupati tersebut luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Banyumas adalah 115,7 Ha. Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu tujuan SDGs/TPB yaitu Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya pemerintah dalam mengatasi lingkungan permukiman kumuh perkotaan. ● *Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH)* Salah satu parameter kumuh adalah banyaknya rumah layak huni. Rasio rumah layak huni menjadi indikator SDGs/TPB Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan, Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta merata kawasan kumuh. Jumlah RTLH di Kabupaten Banyumas berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 adalah 116.677 unit. Sampai dengan tahun 2020 sudah tertangani 90.833 unit RTLH yang belum ditangani.
5.	**Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** ● *Masih belum optimalnya Tingkat Waktu Tanggap (Responsive Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) kabupaten* Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air / penyemprotan air pertama). Tingkat waktu tanggap di Kabupaten Banyumas sesuai dengan target tahun 2020 dan target akhir RPJM 100%, dengan realisasi tahun 2020 tercapai 100%. Namun sebenarnya terdapat kekeliruan

	target tingkat waktu tanggap dan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten banyumas, dimana seharusnya tingkat waktu tanggap tahun 2020 baru mencapai 53% menurun dari tahun 2019 sebesar 53,11%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 (60%) dan target akhir RPJMD (75%) dan masih dibawah standar nasional sebesar 75%, sehingga masih perlu ditingkatkan. Sedangkan Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten banyumas di tahun 2020 seharusnya sebesar 100 %, sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Banyumas telah tercapai 100%. • *Penanganan Gangguan keamanan ketertiban antara lain Penanganan kasus kriminalitas belum optimal (*TPB)* Persentase kasus kriminalitas tertangani di Kabupaten Banyumas sebesar 50,78% dihitung berdasarkan jumlah kasus kriminalitas tertangani (sebesar 324 kasus) terhadap jumlah kriminalitas (638 kasus). Jika dibandingkan dengan tahun 2019 angka kriminalitas tahun 2020 lebih rendah atau menurun, namun angka tersebut menunjukan bahwa tindak kriminalitas di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi, karena jumlah tersebut belum dihitung per 10.000 penduduk. Perhitungan angka kriminalitas per 10.000 penduduk sebesar 1,730 menunjukkan bahwa dari 10.000 penduduk Kabupaten Banyumas ada 1,730 kasus kriminal. Hal ini termasuk relatif kecil. • *Belum optimalnya Rasio pengurangan Resiko Bencana (IRB) (*TPB)* Rasio pengurangan resiko bencana di Kabupaten Banyumas sebesar 30% belum mencapai target tahun 2020 sebesar 35% dan target akhir RPJMD sebesar 50%.
6.	**Kesatuan Bangsa dan Politik** • *Belum optimalnya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu* Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada sebesar 78%. Angka tersebut sudah melampaui target 2020 yaitu 75% dan sudah sesuai dengan target akhir RPJMD yaitu 78%, namun perlu diupayakan 100% pemilih pemula dapat memberikan hak pilihnya pada pemilu / pemilukada.
7.	**Sosial** • *Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau sekarang disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memerlukan salah satu permasalahan sosial di Kabupaten Banyumas. Jumlah PMKS di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebanyak 105.293 PMKS/PPKS. Secara umum jumlah PMKS/PPKS menurun. Kedepan penanganan kasus PMKS/PPKS tetap menjadi prioritas, sebab berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masyarakat

	• *Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (*TPB)* Presentase penduduk dibawah garis kemiskinan masih tinggi yaitu sebesar 13,26% pada tahun 2020, naik 0,735% dari tahun 2019 sebesar 12,52%. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,41% dan Nasional sebesar 9,78% • *Belum optimalnya penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti di tahun 2020 sebesar 26,91%. Angka tersebut masih jauh dari target 2020 dan target akhir RPJMD yaitu sebesar 100%. Sehingga perlu dilakukan upaya demi terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas di luar panti. • *Belum optimalnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial* Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial hanya mencapai 15,66%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 yaitu sebesar 39,58% dan belum mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 60,18%. Oleh karena itu diperlukan upaya agar penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial dalam penerimaan jaminan sosial dapat optimal dan mencapai target.
8.	**Tenaga Kerja** • *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih rendah* Capaian TPAK yang masih rendah ini dibuktikan dengan data pada tahun 2020 sebesar 66,66% menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 67,34%. TPAK Kabupaten Banyumas tahun 2020 menunjukkan angka 66,66 persen yang artinya bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 67 orang termasuk penduduk yang aktif secara ekonomi. Menurunnya TPAK ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap angkatan kerja. Sehingga diperlukan usaha agar tingkat partisipasi angkatan kerja dapat meningkat kembali. • *Tingkat pengangguran terbuka yang relatif masih tinggi* Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Selama kurun waktu 2016-2019 Tingkat pengangguran terbuka fluktuatif cenderung naik dari 4,03 menjadi 4,21, dan kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi sebesar 6 atau tercapai 40,43% dari target akhir RPJM 3,76%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19 berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. Dengan adanya pandemi yang diperkirakan masih

	berdampak lama dan membutuhkan waktu dalam pemulihannya, maka diperlukan penyesuaian target TPT menjadi sebesar 4,5%. • *Masih rendahnya besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan* Capaian besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 48,75%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 sebesar 57% dan belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 63%. Capaian tersebut dirasa masih rendah, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan besarab pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan. • *Masih rendahnya penyelesaian kasus dengan perjanjian kerjasama* Capaian penyelesaian kasus dengan perjanjian kerjasama tahun 2020 sebesar 54,54%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 (80%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (100%). Capaian tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, sehingga diperlukan usaha yang lebih dalam penyelesaian kasus dengan perjanjian kerjasama ini.
9.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** • *Kesetaraan gender masih kurang, ditunjukkan dengan IPG dan IDG yang masih rendah* Nilai IPG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2016-2020 selalu mengalami peningkatan. IPG Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 88,27 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 92,18 dan berada di peringkat ke-4 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Hal ini menunjukan lebih kecil peran perempuan di Kabupaten Banyumas walaupun setiap tahun mengalami peningkatan. Sedangkan IDG Kabupaten Banyumas di tahun 2019 sebesar 71,92 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 72,18. Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar di Jawa Tengah, IDG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-2 dari 4 kabupaten. Hal tersebut menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga). • *Masih adanya kekerasan terhadap anak dan perempuan serta perlu meningkatkan layanan komprehensif terhadap korban kekerasan (*TPB)* Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 cenderung menurun, namun tidak signifikan. Pada tahun 2020 masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan sebanyak 17 kasus, dan kekerasan terhadap anak yang terlaporkan sebanyak 62 kasus. Sehingga perlu ditingkatkan layanan komprehensif terhadap korban kekerasan.
10.	**Pangan**

	• *Konsumsi protein perkapita penduduk Kab. Banyumas masih dibawah standar angka kecukupan gizi nasional* Ditunjukkan dengan tingkat ketersediaan protein Kab. Banyumas tahun 2020 sebesar 81,26%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 (93%) dan target akhir RPJMD (96%). Dengan tingkat ketersediaan protein yang terpenuhi diharapkan dapat meningkatkan konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Banyumas yang masih berada dibawah standar angka kecukupan gizi nasional. • *Masih terdapat Daerah Rawan Pangan* Ditunjukkan dengan capaian persentase penanganan daerah rawan pangan tahun 2020 sebesar 71,43%. Angka tersebut sudah melampaui target 2020 sebesar 64%, namun belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 100%. Sehingga perlu ditingkatkan lagi upaya untuk penanganan daerah rawan pangan sampai mencapai target 100%. • *Belum adanya cadangan pangan pemerintah yang dikelola Kabupaten* Berdasarkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah yang meliputi pengadaan, pengelolaan, penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah. Kabupaten Banyumas belum memiliki cadangan pangan pemerintah daerah. Serta tidak ditemukan data terkait cadangan pangan pemerintah yang dikelola Kabupaten.
11.	**Pertanahan** • *Masih terdapat lahan yang belum bersertifikat* Penataan penguasanaan tanah milik diperlukan untuk mewujudkan tertib admnisrasi dan kepastian hukum atas tanah. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah menjadi perhatian pemerintah. Kabupaten Banyumas mempunyai luas wilayah 132.759 Ha dengan jumlah bidang tanah kurang lebih 1.076.945 (NOP tahun 2019) bidang. Dari jumlah tersebut bidang tanah yang terdaftar baru 426.385 bidang (40 %), dan belum terdaftar sebanyak 650.560 bidang (60%). Lahan yang belum bersertifikat masih cukup tinggi, sehingga perlu penataan penguasaan tanah milik supaya lahan yang belum bersertifikat dapat berkurang.
12.	**Lingkungan Hidup** • *Timbulan sampah yang didaur ulang masih rendah* Total timbulan sampah di Kabupaten Banyumas mencapai 850 ton per hari dari rumah tangga (40% berupa anorganik) dan 10–15 ton dihasilkan dari non rumah tangga. Volume sampah yang tertangani di kawasan perkotaan telah mencapai lebih dari 90%, dan pengurangan sampah melalui 3R baru mencapai 22%. Sehingga perlu adanya upaya untuk mengelola timbulan sampah yang didaur ulang agar dapat dikelola dengan baik.

	• *TPA yang ada sudah tidak mampu menampung sampah* Peningkatan layanan sampah mengakibatkan kapasitas tampung sampah pada TPA makin terbatas. TPA yang ada saat ini sebanyak 2 unit yaitu TPA Kaliori dan dan TPA Tipar Kidul sudah tidak mampu menampung sampah, sehingga dibutuhkan TPA baru. • *Masih kurangnya RTH publik* RTH yang berada di kawasan perkotaan belum mencapai 20%. Keterbatasan ruang terbuka hijau berdampak pada kawasan resapan air, kawasan penyerap polusi udara serta terbatasnya ruang-ruang sosial bagi masyarakat di kawasan perkotaan. Sehingga perlu dilakukan pengadaan RTH yang lebih baik agar kualitas lingkungan perkotaan tetap terjaga. • *Menurunnya daya dukung air* Analisis KLHS kebutuhan air (domestik, industri dan pertanian) di Kabupaten Banyumas mencapai 1.031,41 juta m3/tahun. Potensi ketersediaan air permukaan sebesar 1.303,19 juta m3/tahun. Daya Dukung Air Permukaan sebesar 1,26 dengan status sedang (bersyarat). Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi sampai 2023. pada kawasan pertanian di wilayah kecamatan yang DDAir rendah terdapat ancaman kekeringan di musim kemarau. Keterbatasan ketersediaan air berpengaruh pada kualitas sanitasi masyarakat serta produktivitas pertanian. • *Perlunya peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada desa yang berada pada kategori cukup rentan.* Tingkat kerentanan perubahan iklim desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem adalah sebagai berikut: 21 desa/kelurahan tidak rentan, 85 desa/kelurahan kurang rentan dan 225 agak rentan. Berdasarkan data tersebut kategori agak rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori kerentanan terhadap perubahan iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. • *Perlunya penurunan Emisi GRK* Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan energi dan kegiatan industri, perubahan lahan pertanian, peternakan, serta kegiatan manusia lainnya, maka di masa yang akan datang emisi GRK diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Perkiraan Emisi GRK di Tahun 2023 di Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil proyeksi mencapai 2.857.582 Ton CO2e atau naik sebesar 27% selama 8 tahun atau rata-rata naik 3,5% per tahun. Maka diperlukan upaya demi menurunkan emisi GRK ini. • *Penurunan keanegkaragaman hayati* Ditunjukkan dengan ndeks keanekaragaman yang rendah di

	perkotaan. Penurunan keanekaragaman hayati antara lain disebabkan oleh pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan bahan hayati dan lahan untuk pengembangan pertanian serta kegiatan pembangunan lainnya. Kabupaten Banyumas belum memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
13.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** • *Masih belum optimalnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* Capaian IKM Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 sebesar 86,46. Angka tersebut belum mencapai target 2020 (87,89%) dan belum mencapai target akhir RPJMD (89,12%). Rasio bayi berakte kelahiran di tahun 2020 baru mencapai 93,15%, cakupan penerbitan KTP pada tahun 2020 baru tercapai 96,94 % dan cakupan penerbitan Akta Kelahiran sebesar 97,15 dari target akhir RPJM sebesar 100%. Oleh karena itu perlu dilakukan pengoptimalan kembali dalam pelayanan pendaftaram penduduk dan pencatatan sipil.
14.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** • *Belum optimalnya desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna untuk usaha pedesaan* Teknologi tepat guna belum sepenuhnya dmanfaatkan oleh masyarakat desa, dibuktikan dengan persentase desa yang telah mengembangkan/memanfaatkan teknologi tepat guna untuk perdesaan belum ada sama sekali, dari target 2,66% di tahun 2020 dan target akhir RPJM sebesar 3,32%. Oleh karena itu, inovasi teknologi tepat guna perlu ditingkat kan dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkreasi. • *Masih rendahnya kelembagaan kawasan perdesaan yan g terbentuk* Capaian Pembangunan Capaian pembangunan kawasan kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas tahun 2020 baru terbentuk 2 kelembagaan, memenuhi target tahun 2020 namun namun belum memenuhi atau masih perlu upaya keras untuk memenuhi target akhir RPJMD sebanyak 10 lembaga. Sehingga perlu ditingkatkan pembangunan kawasan perdesaan dengan memberikan sosialisasi, pelatihan atau pembinaan pada masyarakat kawasan perdesaan. • *Belum optimalnya Desa dengan administrasi yang baik* Dari 301 desa di Kabupaten Banyumas, baru 11% yang telah melaksanakan administrasi dengan baik, belum mencapai 100% target tahun 2020 dan target akhir RPJM. • *Belum optimalnya Kelulusan Sarjana per Desa* Dari target hasta krida 1 desa 3 sarjana, dengan direncanakan

	memberikan bantuan pendidikan untuk calon sarjana per desa per tahun dengan target per tahun 301 orang untuk 301 desa, belum dapat dilaksanakan, karena baru disusun regulasinya untuk mendukung dalam pelaksanaannya. • *Perlunya meningkatkan sstatus desa maju mandiri (*TPB)* Indeks Desa Membangun tahun 2020 sebesar 0,699 dengan status berkembang, telah tercapai target 2020 (0,674), namun belum mencapai target RPJMD (0,694). Sehingga perlu peningkatan status IDM menjadi maju dan mandiri, dengan dukungan partisipasi segenap masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk mewujudkannya.
15.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** • *Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun* Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun belum mencapai target RPJMD. Capaian tahun 2020 sebesar 73,67% sedangkan target 2020 sebesar 76,39%. Oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi mengenai pemakaian alat kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, mengingat rendahnya wawasan masyarakat terutama kaum perempuan mengenai alat kontrasepsi. • *Belum optimalnya tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan KB dan alat kontrasepsi metode modern atau Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (*TPB)* Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, belum mecapai target RPJMD. Realisasi Tahun 2020 sebesar 35,73% dari target tahun 2020 sebesar 70 % , target akhir RPJMD sebesar 74 %. Sehingga perlu diadakan sosialisasi mengenai pemakaian alat kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, mengingat rendahnya wawasan masyarakat terutama kaum perempuan mengenai alat kontrasepsi.
16.	**Perhubungan** • *Belum terpenuhinya sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Banyumas* Jumlah sarana prasarana lalu lintas terus bertambah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun demikian jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan riil sarana prasarana lalu lintas di lapangan, antara lain kebutuhan Halte/ Shelter bus baru diantaranya halte dan marka untuk pemenuhan prasarana dalam rangka pengembangan angkutan umum massal dengan konsep Buy The Service (BTS). Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Banyumas. Program BTS dilatarbelakanPermasalahan kemacetan terutama kawasan perkotaan serta tidak tertatanya sistem

	transportasi publik yang baik menyebabkan pemborosan, permasalahan lingkungan kerugian ekonomi, hingga kecelakaan lalu lintas sehingga diperlukan angkutan massal • *Belum tercapainya ketersediaan terminal yang memadai* Kebutuhan terminal di Kabupaten Banyumas berdasarkan arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 terdiri atas 1 terminal tipe A, 2 terminal tipe B, dan 5 terminal tipe C. Infrastruktur terminal yang ada di Kabupaten Banyumas terdiri atas 1 unit Terminal Tipe A dan 2 unit Terminal Tipe C. Terminal tipe C yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/324/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Wangon dan Terminal Penumpang Ajibarang sebagai Terminal Penumpang Tipe C. Sehingga ketersediaan terminal yang memadai belum memenuhi kebutuhan yaitu sebanyak 8 terminal. • *Belum maksimalnya persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor* Jumlah Kendaraan Wajib Uji pada tahun 2020 adalah 15.585 unit terdiri atas mobil penumpang umum, bus, mobil barang, dan mobil gandengan. Dari jumlah tersebut yang telah melakukan uji adalah 43 unit mobil penumpang umum, 1.601 unit bus, 12.114 unit mobil barang, dan 41 mobil gandengan. Sebanyak 1.785 unit kendaraan wajib uji tidak melakukan uji kendaraan/tidak melakukan uji kendaraan di Kabupaten Banyumas.

17.	**Komunikasi dan Informatika** • *Belum optimalnya SDM yang melek IT* Persentase SDM yang melek IT tahun 2020 sebesar 30%, meningkat 20% dibandingkan tahun 2019. Namun belum mencapai target 2020 sebesar 40% dan belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 100%. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan SDM yang melek IT, seperti dengan mengadakan pelatihan keterampilan. • *Belum tercapainya target peringkat tingkat keterbukaan informasi publik* Target peringkat 4 tingkat keterbukaan informasi public di Jawa Tengah tidak tercapai, karena capaian 2020 masih sama dengan capaian 2019 yaitu sebesar 8, serta belum mencapai target akhir RPJMD yaitu peringkat 2. Berdasarkan pembahasan dalam rangka penilaian SAKIP pada perubahan RPJMD indikator terkait diubah menjadi nilai keterbukaan informasi publik. • *Masih terdapat OPD yang belum terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo* Sampai dengan 2020 baru 27 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas telah terhubung dengan fiber optic yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung penerapan SPBE. Oleh karena itu akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo perlu ditingkatkan agar perangkat daerah yang belum terhubung dapat terhubung. Sehingga semua OPD dapat terhubung dengan fiber optic.
18.	**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** • *Masih banyaknya koperasi yang tidak sehat* Persentase koperasi tidak sehat sebesar 71,50% dari total koperasi aktif sebesar 450 koperasi dan koperasi yang terdaftar sebesar 558. Banyaknya koperasi yang tidak sehat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menjadikan koperasi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk itu diperlukan usaha keras dan juga pengawasan serta pembinaan agar koperasi sehat di Kabupaten Banyumas terus meningkat jumlahnya. • *Masih rendahnya UMKM yang bersertifikat halal* Untuk meningkatkan kualitas produk UMKM yang menjadi tuntutan masyarakat salah satunya adalah sertifikat halal yang dimiliki oleh UMKM terhadap produknya. Di tahun 2019 dan 2020 terdapat masing-masing 10 UMKM yang bersertifikat halal. Sehingga capaian kinerja baru sebesar 20% (dari total jumlah UMKM bersertfikat halal selama lima tahun sebanyak 100 UMKM) • *Akses permodalan bagi UMKM masih kurang* Jumlah anggota UMKM yang memperoleh fasilitas permodalan usaha di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2019 sebanyak 9.205 orang anggota UMKM. Meningkat pada tahun 2020 sebanyak 9.674 orang anggota

	UMKM atau sebesar11,18% dari total UMKM tahun 2020 sebesar 86.545 UMKM. Sebagian besar UMKM memperoleh program Pemerintah melalui Kredit Usah Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Karena masih banyaknya UMKM yang belum memperoleh fasilitas permodalan tersebut, maka diperlukan peran pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan akses permodalan bagi UMKM. • *Persentase pertumbuhan usaha mikro belum didukung data usaha Mikro yang aktif* Capaian persentase pertumbuhan usaha mikro tahun 2020 sebesar 0,615% sudah mencapai target 2020 dan target akhir RPJMD sebesar 0,47%, namun data usaha mikro yang aktif belum tersedia. Sehingga diperlukan ketersediaan data usaha mikro yang aktif. • *Masih rendahnya omzet Usaha mikro yang dibina* Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Banyumas masih terkendala dalam hal perijinan usaha dan permodalan, keterampilan manajemen dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha. Keterbatasan tersebut menjadikan perkembangan omset usaha dan keuntungan yang diperoleh sebagian besar UMK masih kecil, dengan realisasi peningkatan omzet baru mencapai 1,06% belum mencapai target 2020 sebesar 3% atau baru tercapai 35,33% dan target akhir RPJM sebesar 6% atau baru tercapai 17,67%.

19.	**Penanaman Modal** • *Masih rendahnya Investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas* Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 413, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu 210. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1.041 maka jumlah investor tahun 2020 sangat menurun dan dinilai cukup rendah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas harus selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan melalui inovasi-inovasi, khususnya yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi serta penyederhanaan prosedur. • *Belum optimalnya Investasi berbasis padat karya yang didukung oleh data.* Realisasi investasi di Kabupaten Banyumas meningkat dari 583 Milyar pada tahun 2019 menjadi 1.008 Milyar pada tahun 2020, melampaui target tahun 2020 sebesar 26 0Milyar dan target akhir RPJM sebesar 275 Milyar, namun realisasi investasi ini belum menyediakan data investasi yang berbasis padat karya untuk mendukung misi kelima Bupati. Sehingga perlunya upaya meningkatkan investasi yang berbasis padat karya dengan didukung data. • *Masih belum adanya investasi di kawasan industri* Investasi di kawasan industri belum ada realisasi di tahun 2019 dan 2020, karena target investasi di kawasan industri ada pada RPJM tahun 2022. Untuk memperluas lapangan kerja, Pemerintah Kabupaten Banyumas memang berupaya mengembangkan kawasan industri. Namun Kabupaten Banyumas belum ada penetapan kawasan industri, baru ada penetapan kawasan peruntukan industri (KPI) sebanyak 5 KPI. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (2011-2031) yang masih berlaku hingga saat ini terdapat total luas kawasan peruntukan industri (KPI) kurang lebih 500 Ha yang berada tersebar di Kecamatan Ajibarang, Wangon, Sokaraja, dan Kemranjen. Dalam draf revisi RTRW direncanakan kawasan peruntukan industri bertambah menjadi kurang lebih 2.000 Ha, berada tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Wangon, Lumbir, Ajibarang, Jatilawang, Rawalo, dan Kalibagor.
20.	**Kepemudaan dan Olahraga** • *Belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional* Capaian perolehan medali tingkat provinsi dan Nasional tahun 2020 sebesar 1,25% dari target akhir RPJM sebesar 100%. • *Masih belum optimalnya cakupan pembinaan atlet muda atau pelajar dan cakupan pelatih yang bersertifikasi*

	Capaian cakupan pembinaan atlet muda/pelajar tahun 2020 sebesar 1,6% dari target akhir RPJM 18,75%. Sedangkan capaian cakupan pelatih yang bersertifikat level dasar pada tahun 2020 tercapai sebesar 23% dari target akhir RPJM 100%.
21.	**Persandian** • *Belum semua perangkat daerah menggunakan layanan k eamanan informasi* Dari 56 Perangkat Daerah (29 dinas/badan, 27 kecamatan) di Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas, tercapai 43% yang telah menggunakan layanan keamanan data dan informasi, mencapai target 2020, namun perlu diupayakan agar perangkat daerah yang menggunakan layanan keamanan data dan informasi dapat mencapai target akhir RPJMD sebesar 100%.
22.	**Statisik** • *Belum tervalidasinya data informasi dan statistik daerah yang tersedia* Data statistik sektoral senantiasa dilakukan update setiap tahunnya, namun demikian data yang diproduksi belum melalui proses validasi data sebagaimana ketentuan penyelenggaraan satu data. Guna mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi dan meningkatkan pelayanan statistik diperlukan sistem informasi/aplikasi program interface (API) untuk mengintegrasikan sistem informasi yang ada di masing masing organisasi perangkat daerah.
23.	**Kebudayaan** • *Belum optimalnya revitalisasi dan inventarisasi karya budaya* Capaian persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sampai dengan 2020 sebesar 72,73% dari target akhir RPJM sebesar 100%. Sehingga masih perlu dilakukan usaha untuk dilaksanakannya revitalisasi dan inventarisasi karya budaya • *Masih rendahnya penetapan cagar budaya dan pelestarian budaya dengan SK Bupati* Capaian persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati pada tahun 2020 sebesar 36%, belum mencapai target 2020 yaitu 44%, dan harus ditingkatkan hingga mencapai target akhir RPJMD yaitu sebesar 100%.
24.	**Perpustakaan** • *Masih rendahnya jumlah perpustakaan terbina* Persentase jumah perpustakaan terbina tahun 2020 sebesar 30,64, belum mecapai target akhir RPJMD sebesar 47,22. Oleh karena itu perlu ditingkatkan perpustakaan yang harus terbina dari suatu seleksi yang sistematis dan terarah disesuaikan dengan tujuan, rencana, dan anggaran yang tersedia. Mengingat bahwa perpustakaan mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan

	bangsa agar tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. • *Menurunnya ratarata jumlah pengunjung perpustakaan daerah/ kurangnya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah* ersentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah ditahun 2020 sebasar 3,56 belum mencapai target RPJMD tahun 2020 sebesar 5,93 dan target akhir RPJMD sebesar 7,89. Oleh karena itu diperlukan upaya dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah dengan penambahan koleksi buku, penambahan fasilitas berupa internet gratis, serta fasilitas Wi fi/Hot Spot secara gratis/free acces, dan peningkatan SDMnya. Selain itu Perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas akan menggunakan sistem otomasi dalam hal layanan pencarian katalog buku. Hal tersebut dilakukan dengan harapan pengunjung perpustakaan akan meningkat.
25.	**Kearsipan** • *Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah* Pengelolaan arsip secara baku di tahun 2020 baru mencapai 14,5%, belum mencapai target akhir RPJMD 86,4%. Pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan 28 SKPD di Kabupaten Banyumas, sedangkan SKPD Kecamatan, UPT Puskesmas, Unit Pendidikan Kecamatan dan Pemerintahan Desa belum dilakukan pengelolaan arsip secara baku. Maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai demi tercapainya keoptimalan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah. • *Belum optimalnya pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas* Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas ditahun 2020 sebesar 40 % masih belum memenuhi target akhir RPJMD sebesar 90%. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan melakukan peningkatan kualitas SDM dan peningkatan layanan keperpustakaan menggunakan elektronik atau online agar pengelolaan lebih mudah dan terstruktur.

26.	**Kelautan dan Perikanan** • *Belum optimalnya produksi perikanan.* Perikanan di Kabupaten Banyumas terdiri dari perikanan tangkap yang berasal dari perairan sungai (perairan umum) dan perikanan budidaya. Luas perikanan tangkap di Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah seluas 1.293 ha, dan luas perikanan budidaya seluas 424,50 ha, sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi dan nilai produksinya. Produksi perikanan di Kabupaten Banyumas dari tahun 2015-2020 mengalami tren peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 10.710 ton, meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 11.857,95 ton melebihi dari target tahun 2020 sebesar 103,19% namun masih perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 58.157ton atau baru tercapai sebesar 20%. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan produksi perikanan sekaligus mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, dilakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan. • *Masih belum maksimalnya produksi olahan hasil perikanan.* Produksi perikanan yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas sebagian dilakukan pengolahan melalui unit-unit usaha yang dimiliki masyarakat. Jumlah usaha pengolahan ikan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 ada sebanyak 168 unit usaha dengan produksi olahan sebanyak 170,2 ton dan meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 188,5 ton atau tercapai 106,44% dari target tahun 2020, namun masih perlu upaya keras untuk mencapai target akhir sebesar 903,4 ton atau baru tercapai sebesar 20,32%.
	• *Konsumsi ikan masyarakat Banyumas masih jauh dari angka Provinsi Jawa Tengah dan nasional.* Konsumsi ikan (kg/Kpt/th.) mengalami peningkatan selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2019 konsumsi ikan mencapai 14,33 kg/Kpt/th. Namun demikian capaian ini jauh dari pola konsumsi harapan sebesar 31,40 kg/kapita/tahun. Potensi perikanan Kabupaten Banyumas yang bertumpu pada perikanan budidaya ini menjadikan tingkat konsumsi ikan rendah karena penduduk agak kesulitan memperoleh ikan dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut terjadi karena permintaan ikan yang tinggi, sedangkan ketersediaan produksi ikan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Banyumas. Oleh karena itu produksi perikanan perlu untuk ditingkatkan lagi.
27.	**Pariwisata** • *Rata-rata lama tinggal wisatawan masih rendah* Dilihat dari lamanya waktu berkunjung, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara hanya satu hari, tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2015-2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di

	Kabupaten Banyumas memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan, sehingga dapat lebih lama membelanjakan uangnya di Kabupaten Banyumas. • *Jumlah kunjungan wisata masih rendah (*TPB).* Jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis pada tahun 2020 dikarenakan pembatasan kegiatan untuk pencegahan pandemi COVID-19 dimana tempat wisata sempat di tutup dan dibuka kembali pada awal triwulan III tahun 2020 dengan sejumlah protokol kesehatan di antaranya pembatasan jumlah pengunjung dan pemberlakuan pembelian tiket wisata on line. Diharapkan pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas dapat tertangani dengan baik, agar masyarakat tidak khawatir lagi jika ingin berkunjung ke tempat wisata. Hal tersebut tentunya dengan diimbangi peningkatan sarana prasarana tempat wisata agar pengunjung semakin tertarik untuk berkunjung. • *Kurangnya optimalisasi peningkatan promosi pariwisata* Infrastruktur pendukung di Kabupaten Banyumas seperti perhotelan sudah cukup memadai dengan jumlah hotel terus meningkat dari tahun 2018 sebanyak 4 namun masih kurang optimalnya promosi pariwisata sehingga minim informasi destinasi wisata dan paket-paket wisata yang terintegraisi di Kabupaten Banyumas, masih bertumpunya wisata Banyumas pada wisata alam serta masih kurangnya alternatif produk wisata jadi yang layak jual, dan belum tergarapnya secara maksimal potensi kekayaan budaya. Oleh karena itu promosi pariwisata Banyumas perlu digencarkan lagi, misalnya dengan melalui media online seperti pembuatan video yang dipromosikan melalui media sosial tentunya dengan menggandeng anak muda yang memiliki ketertarikan akan pariwisata dan mempunyai relasi yang banyak, maka promosi pariwisata akan lebih efektif dan diharapkan pengunjung akan meningkat. • *Kurangnya SDM kepariwisataan yang bersertifikasi* Capaian persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi sebesar 73% dari target akhir RPJM sebesar 100%. Di tahun 2019 dan 2020 terdapat masing-masing 40 SDM yang bersertifikasi atau dengan kata lain sampai tahun 2020 terdapat 80 SDM pariwisata yang bersertfikasi. Sehingga masih diperlukan upaya dengan mengadakan pelatihan keterampilan dan uji sertifikasi terhadap SDM pada sektor pariwisata. Hal tersebut dilakukan agar SDM yang tersedia dapat meningkatkan kualitasnya sehingga kualitas kepariwisataan di Kabupaten Banyumas bisa meningkat.
28.	**Pertanian** • *Produktivitas komoditas pertanian belum maksimal* Produktivitas komoditas pertanian yang belum maksimal tersebut ditandai dengan presentase peningkatan produksi tanaman pertanian yang hanya sebesar -1.39%. Angka tersebut bahkan belum mencapai target 2020 sebesar 1%

	dan belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 5%. • *Penurunan luas lahan pertanian mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan* Luas lahan pertanian Kabupaten Banyumas mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2017-2020 yang menyebutkan bahwa penggunaan luas lahan pertanian selalu meningkat tiap tahunnya. Dari data tersebut disebutkan penggunaan lahan pertanian pada tahun 2015 seluas 85.187 Ha, 2016 seluas 101.554 Ha, 2017 seluas 102.420 Ha, 2018 seluas 101.272 Ha, dan 2019 seluas 100.712. Hal ini dapat diakibatkan karena terjadinya kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas. Faktor tersebutlah yang dapat mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan Kabupaten Banyumas. • *Masih belum maksimalnya populasi ternak, antara lain populasi ternak besar (Sapi Potong, Kerbau, dan Sapi Perah) perkembangannya sangat lambat dan menurunnya populasi ayam ras potong dan ayam ras petelur* Populasi ternak besar yang belum maksimal diantaranya adalah sapi potong, kerbau, dan sapi perah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat data dari Dinkannak Kabupaten Banyumas tahun 2019 yang menampilkan data populasi sapi potong pada tahun 2015 sebanyak 13.316 ekor, 2016 sebanyak 12.805 ekor, 2017 sebanyak 13.460 ekor, 2018 sebanyak 14.350 ekor, dan 2019 sebanyak 14.461 ekor. Populasi sapi perah tahun 2015 sebanyak 2.570 ekor, 2016 sebanyak 3.172 ekor, 2017 sebanyak 2.366 ekor, 2018 sebanyak 2.279 ekor, dan 2019 sebanyak 2.287 ekor. Sedangkan populasi kerbau tahun 2015 sebanyak 1.375 ekor, 2016 sebanyak 1.260 ekor, 2017 sebanyak 1.248 ekor, 2018 sebanyak 1.279 ekor, dan 2019 sebanyak 1.295. Dari data-data tersebut disimpulkan bahwa populasi ternak tiap tahunnya mengalami fluktuasi dan cenderung naik namun tidak signifikan, sehingga perkembangannya sangat lambat. Begitupula dengan populasi ayam ras potong dan ayam ras petelur. • *Masih rendahnya beberapa produksi komoditas tanaman pertanian serta kurangnya pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Perkebunan)* Berdasarkan data bahwa masih rendahnya beberapa produksi komoditas tanaman pertanian masih -1.39 belum mencapai terget pada tahun 2020 (1%),belum mencapai target akhir RPJMD (5%) sehingga mempengaruhi terhadap kurangnya pengembangan pada Poduksi sedangkan berdasarkan data produktivitas tanaman pangan utama kabupaten banyumas pada tahun 2016-2020 pada produktivitas tanaman jagung 2016 sebanyak 5.75 , 2017 sebanyak 5,92 , 2018 sebanyak 6,50 ,2019 sebanyak 7,50

	,2020 sebanyak 6,12. Dan bahan pangan utama lokal lainnya perhektar produktivitas kedelai tahun 2016 sebanyak 1,35 , 2017 sebanyak 1,53 ,2018 sebanyak 1,34 , 2019 sebanyak 1,28 , 2020 sebanyak 1,25 sehingga dikabupaten banyumas untuk produktivitas masih rendah karna kurangnya tanaman pertanian serta kurangnya tanaman pangan. • *Masih Kurangnya Hasil Pertanian untuk mendukung Kedaulatan Pangan* Kedaulatan pangan sangat didukung oleh hasil dari pertanian. Namun, Kabupaten Banyumas presentase peningkatan produksi tanaman pertanian masih sangat rendah, yaitu hanya mencapai -1.39%. Angka tersebut belum mencapai target 2020 dan masih jauh dari target akhir RPJMD sebesar 5%. Sehingga hasil pertanian masih harus ditingkatkan lagi demi mencapai kedaulatan pangan. • *Rendahnya minat kelompok tani terlatih yang menerapkan tekhnologi* Berdasarkan data bahwa cakupan bina kelompok tani di kabupaten banyumas tahun 2015-2019 mengalami perkembangan rata-rata yang fluktuatif dimana ditahun 2015 mencapai angka 41,81 orang ,2016 sebanyak 54,58 orang , 2017 sebanyak 74,00 orang, 2018 sebanyak 38,55 orang dan ditahun 2019 mencapai angka sebanyak 76.05 dimana cakupan bina kelompok tani masih kurang sehingga capaian kinerja dalam bidang urusan pertanian yang menerapkan teknologi masih rendah. • *Masih belum optimal peningkatan kapasitas tenaga penyuluh* Capaian persentase jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti training peningkatan kapasitas tenaga penyuluh sebanyak 104 orang dari target akhir RPJM sebanyak 610 orang atau tercapai sebesar 17,05%. • *Belum optimalnya penerapan teknologi dan kemampuan SDM dalam upaya peningkatan produksi peternakan dan penurunan angka kesakitan* Upaya peningkatan produksi peternakan dan penurunan angka kesakitan masih sulit untuk dilaksanakan karena penerapan teknologi dan kemampuan SDM yang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang bersumber dari Dinkannak Kabupaten Banyumas dari tahun 2015-2019 yang terdiri dari angka kesakitan ternak besar masih diangka kisaran 14 setiap tahunnya, ternak kecil masih diangka kisaran 1,4 setiap tahunnya, dan ternak unggas diangka kisaran 0,5 setiap tahunnya. Kondisi tersebut membuktikan bahwa belum adanya penurunan angka kesakitan ternak yang signifikan. Sehingga perlu dilakukan pengoptimalan dalam penerapan teknologi dan kemampuan SDM.
29.	**Perdagangan** • *Masih rendahnya jumlah gula kelapa terekspor* Jumlah gula kelapa terekspor sebesar 12.233,82 ton tahun

	2020 meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 10.047 ton. Gula kelapa yang terekspor tahun 2020 sudah mencapai target 2020, namun belum mencapai target akhir RPJMD sebesar 80.000 ton. Sehingga harus dilakukan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan jumlah gula kelapa terkespor. • *Cakupan bina kelompok pedagang masih rendah* Capaian bina kelompok pedagang sebesar 96 kelompok di tahun 2020, di tahun 2019 sebesar 70 kelompok dengan target 270 kelompok di tahun 2023. Capaian tersebut masih jauh dari target akhirnya, sehingga perlu dilakukan upaya dalam pembinaan kelompok pedagang dengan melakukan pendataan secara menyeluruh dan kemudian diadakan pembinaan secara merata kepada kelompok pedagang Kabupaten Banyumas..
30.	**Perindustrian** • *Cakupan bina kelompok pengrajin masih rendah* Capaian bina kelompok pengrajin tahun 2020 sebanyak 153 kelompok, di tahun 2019 sebesar 70 kelompok dengan target tahun 2023 sebesar 331 kelompok. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya dalam pembinaan kelompok pengrajin dengan melakukan pendataan secara menyeluruh dan kemudian diadakan pembinaan secara merata kepada kelompok pengrajin Kabupaten Banyumas.
31.	**Transmigrasi**
32.	**Administrasi Pemerintahan** • *Belum optimalnya Indek reformasi birokrasi* Indek Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebesar 69,07 telah melampau target tahun 2020 sebesar 68 namun belum mecapai target akhir RPJMD sebesar 75. Diharapkan tetap diupayakan untuk meningkatkan reformasi birokrasi di Kabupaten Banyumas. • *Masih belum optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Banyumas tahun 2020 sebesar 60,2 belum mecapai target RPJMD tahun 2020 sebesar 74 dan target akhir RPJMD sebesar 80.
33.	**Keuangan** • *Penerimaan PAD belum optimal* Persentase PAD terhadap pendapatan tercapai 20,07% dari target RPJM tahun 2020 sebesar 19,27%. Namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 sebesar 668,203 Milyar belum mencapai target RPJMD tahun 2020 sebesar 715,379 Milyar, sehingga perlu dilakukan peningkatan perolehan PAD dengan menggali potensi potensi PAD. • *Penerimaan pajak untuk PAD belum optimal (*TPB)* Rasio penerimaan pajak terhadap PAD pada tahun 2020 adalah sebesar 31,22%. Penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 208,616 Milyar belum mencapai target RPJM tahun 2020 sebesar 212,181 Milyar, sehingga perlu dilakukan

	peningkatan perolehan pajak untuk PAD dengan menggali potensi pajak daerah. • *Persentase SILPA masih tinggi* SILPA tahun 2020 masih tinggi sebesar 242,705 Milyar, atau 8,24% dari APBD.
34.	**Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan** • *Belum optimalnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan potensi jabatan* Untuk memenuhi standar kompetensi aparatur sipil negara perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui diklat-diklat teknis, fungsional, dan Dikpim. Namun tahun 2019 jumlah ASN yang mengikuti diklat hanya sebanyak 600 ASN sedangkan jumlah ASN yang ada di Kabupaten Banyumas sebanyak12.551 ASN. Untuk tahun 2020 bahkan tidak diselenggarakan diklat bagi ASN Kabupaten Banyumas dikarenakan kondisi Pandemi COVID -19.
35.	**Pengawasan** • *Tidak tersedia data Indek Persepsi Korupsi (IPAK) di tingkat Kabupaten (*TPB)* Penilaian anti korupsi di Kabupaten dapat dilihat dari Nilai survey eksternal persepsi korupsi yang terdapat dalam komponen penilaian Reformasi Birokrasi, dimana pencapaian tahun 2019 sebesar 3,73 naik menjadi 3,85 di tahun 2020 dari skala tertinggi 4. • *Belum optimalnya Kapabilitas APIP* Kapabilitas APIP tahun 2020 baru tercapai sebesar 2 atau 62,5% dari target tahun 2020 sebesar 3,2 dan baru tercapai 54,05% dari target akhir RPJM sebesar 3,7. • *Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan* Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang terselesaikan tahun 2020 sebesar 42% atau baru tercapai 58,33% dari target 72%, menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 60%, dan baru tercapai 53,85% dari target akhir RPJM sebesar 78%. Sehingga perlu dioptimalkan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP. • *Belum optimalnya tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan* Persentase tindak lanjut temuan BPK yang terselesaikan tahun 2020 sebesar 94% melampaui target akhir RPJM sebesar 85%, namun perlu diupayakan semua temua temuan BPK ditindaklanjuti hingga 100%.

36.	**Perencanaan Pembangunan** • *Belum optimalnya kualitas rencana pembangunan daerah* Aspek kualitas dokumen perencanaan masih perlu disesuaikan dengan aspek penilaian penghargaan pembangunan daerah, dimana aspek inovasi masih perlu peningkatan dan menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan.
37.	**Penelitian dan Pengembangan** • *Kurangnya penelitian dan pengembangan yang ditindak-lanjuti sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah.* Penelitian serta Pengembangan untuk inovasi masih belum menjadi bahan kebijakan pembangunan daerah. • *Masih kurangnya pemanfaatan hasil Kelitbangan* Hasil Kelitbangan berupa kajian dan hasil karya cipta kreativitas dan Inovasi daerah. Capaian 7 buah hasil kreativitas dan inovasi (krenova)yang dimanfaatkan tahun 2019 dari 58 peserta krenova masih perlu dioptimalkan. Walaupun ada peningkatan peserta krenova pada tahun 2020 menjadi 64 peserta. Demikian pula terhadap pemanfaatan hasil kajian atau penelitian.
36.	**Kecamatan** • *Masih kurang optimalnya IKM Kecamatan* Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan masih rendah, rata-rata IKM kecamatab di tahun 2020 sebesar 81,46 masih perlu peningkatan pelayanan kepada mayarakat

**) hasil anaisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023*

4.7. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan.

Karakteristik isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang telah mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, dapat melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif,

Pemerintah Daerah mampu meraih peluang-peluang penting, serta mampu mengantisipasi ancaman yang tidak dikenali.

Sumber informasi bagi perumusan isu strategis bisa diperoleh dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain), kebijakan skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan. Informasi tersebut merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang sigiifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Penentuan isu strategis pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan keselarasan dengan isu-isu global, nasional, maupun regional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, isu strategis RPJMN, isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta isu strategis RPJPD Kabupaten Banyumas.

Isu Global, Nasional dan Regional

Semakin terbukanya negara-negara di dunia menyebabkan perubahan-perubahan yang terjadi di suatu kawasan regional maupun global akan mempengaruhi domestik negara-negara tersebut. Hal ini didukung oleh semakin lancar dan efisiennya fasilitas transportasi dan informasi yang memperlancar hubungan antar Negara. Dengan demikian, perubahan di suatu kawasan dapat dengan mudah mempengaruhi perubahan kondisi suatunegara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- **Globalisasi**

Globalisasi merupakan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Proses Globalisasi terjadi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dipengaruhi juga oleh perdagangan internasional. Karena berkaitan erat dengan faktor ekonomi dan sosial budaya, tentunya globalisasi juga memiliki dampak di bidang ekonomi dan sosial budaya, yaitu meluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia, sehingga tidak jelas lagi batas yang membedakan pengetahuan dan budaya yang satu dengan yang lain dan tidak ada batas untuk mendapatkan akses terhadap suatu pengetahuan dan budaya dari negara lain.

- **Globalisasi ekonomi.** Globalisasi perekonomian ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terjadi karena tarif ekspor atau impor yang terlalu tinggi

sehingga membuat harga barang tidak kompetitif. Bisa juga hambatannya berupa politik dagang yang diberlakukan suatu negara untuk melindungi produksi dalam negeri.

Contoh globalisasi ekonomi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara adalah globalisasi Informasi. Ada empat sektor di Indonesia yang mengalami dampak globalisasi ekonomi, yaitu sektor ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja.

Sisi positifnya, Indonesia dapat mengalami pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor yang dapat diperdagangkan, serta industri nasional yang lebih kompetitif. Dari sisi negatifnya, hal ini dapat merusak kenyamanan publik. Globalisasi membuat sektor ekonomi tradisional mulai ditinggalkan dan berubah menjadi sektor ekonomi modern. Masyarakat sudah mulai merasa bahwa pasar-pasar tradisional mulai tertinggal sehingga membawa dampak pada kebijakan pelaku ekonomi yang mengikuti globalisasi.

- **Globalisasi sosial budaya**. Dampak positif dari globalisasi sosial budaya yaitu modernisasi. Modernisasi merupakan perubahan dan perkembangan sesuatu yang belum maju menjadi maju**.** Modernisasi ini tidak hanya berlaku pada teknologi, tapi juga berlaku pada pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan.
- **Globalisasi secara fisik** ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala internasional serta cabang-cabangnya. Dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan serta kesenjangan sosial.

- **Industrialisasi Dan Revolusi Industri 4.0**

Industrialisasi merupakan proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan, bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama. Dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Industrialisasi telah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi modern dan pesatnya peningkatan pendapatan masyarakat.

Beberapa dampak positif industrialisasi:

1. Peningkatan pendapatan nasional
   Industrialisasi memungkinkan negara-negara mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang dan meningkatkan kuantitas dan kualitas akan barang-barang yang diproduksi suatu perusahaan, sehingga membuat kontribusi lebih besar pada produk nasional bruto atau Gross National Product (GNP).
2. Standar hidup yang lebih tinggi
   Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga, sehingga ketika produktivitas lebih tinggi maka pendapatan individu meningkat.
3. Stabilitas ekonomi

Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan yang terbatas dan fluktuatif akan produk pertanian dan bahan mentah didukung ketidakpastian alam akan menghambat kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi yang terhambat mengarah pada ekonomi yang tidak stabil atau tidak aman.

4. Peningkatan neraca pembayaran
   Industrialisasi mengubah pola perdagangan luar negeri di dalam suatu negara. Peningkatan ekspor barang-barang manufaktur lebih menguntungkan dalam valuta asing. Pada saat yang sama memproses bahan mentah di dalam negeri akan membatasi impor barang sehingga menghemat devisa. Dampak orientasi ekspor dan substitusi impor dari industrialisasi membantu meningkatkan neraca pembayaran.

5. Menstimulasi kemajuan sektor lain
   Industrialisasi mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya. Perkembangan pada satu industri berdampak pada pengembangan dan perluasan industri terkait.
6. Peningkatan peluang kerja
   Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja di industri skala kecil dan besar. Industri menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.
7. Spesialisasi pekerja lebih besar
   Industrialisasi membuka jalan pada tenaga kerja khusus atau tenaga kerja ahli untuk lebih dikenal. Pembagian kerja ini meningkatkan produk nilai marjinal tenaga kerja. Tenaga kerja khusus lebih menguntungkan. Pendapatan sektor pekerja di industri rata-rata akan lebih tinggi daripada pekerja di sektor pertanian.

Sedangkan dampak negatif industrialisasi antara lain:

1. Urbanisasi
   Orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik, kibatnya, populasi penduduk di kota meningkat.
2. Pencemaran lingkungan
   Proses industrial dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia hingga punahnya spesies baik tanaman maupun hewan akibat eksploitasi.
3. Kesenjangan pendapatan
   Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orag-orang yang mengendalikan sumber daya modal.

- **Revolusi Industri 4.0**

Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia, menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar karena menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru.

- **Sustainable Development Goals (SDGs)**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

- **Pandemi COVID-19**

Pandemi COVID-19 merupakan keadaan darurat dan luar biasa yang diakibatkan oleh Virus Corona. Peningkatan kasus COVID-19 tengah terjadi di sejumlah negara karena semakin meluasnya penularan virus corona varian baru, Delta. Faktor utama yang menyebabkan angka kasus-kasus COVID-19 di sejumlah negara meningkat, yaitu faktor pertama, meningkatnya pergerakan, aktivitas, dan interaksi penduduk. Jika kita mengambil parameter transportasi publik dan tempat kerja (perkantoran dan pabrik), secara konsisten terlihat bahwa peningkatan jumlah kasus selalu didahului oleh peningkatan aktivitas dan pergerakan manusia. Kedua, faktor varian baru virus corona. Munculnya varian-varian baru dengan daya tular tinggi dan kemampuan menembus sistem imun *(immune evasiveness)* memberi kontribusi signifikan dalam gelombang penularan terbaru yang jauh lebih tinggi daripada gelombang-gelombang sebelumnya.

Pandemi COVID-19 yang melanda secara global di seluruh dunia sejak akhir Desember 2019 memberikan guncangan cukup besar terhadap perekonomian dunia. Akibatnya ekonomi global mengalami kontraksi yang cukup parah di tahun 2020. Perekonomian negara maju diperkirakan akan menyusut, yang disebabkan terjadinya gangguan permintaan dan penawaran, perdagangan, serta keuangan dalam negeri. Sementara ekonomi negara berkembang mengalami kontraksi sepanjang 2020, dan berakibat pada penurunan pendapatan per kapita yang akan membawa jutaan orang menjadi miskin. Tekanan pandemi COVID-19 ini terutama paling terasa di negara-negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas dan pembiayaan eksternal.

Sementara pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dan Pasifik mengalami kontraksi sepanjang 2020. Ekonomi regional Asia Timur dan Pasifik telah dipengaruhi pandemi melalui faktor domestik maupun eksternal. Kebijakan lockdown yang mahal secara ekonomis, tetapi dibutuhkan mengakibatkan kontraksi tajam dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan shutdown domestik, pengurangan aktivitas pariwisata, gangguan terhadap perdagangan dan manufaktur, hingga spillover dari pasar keuangan terjadi di negara-negara wilayah Asia Timur dan Pasifik ini.

Kondisi perekonomian Indonesia termasuk Jawa Tengah, di tahun 2020 juga mengalami pelambatan. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen, dan ekonomi Jawa Tengah terkontraksi sebesar 2,65 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh perekonomian global yang melambat, berimbas terhadap harga-harga komoditas, serta konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut berakibat pada bertambahnya penduduk miskin Indonesia pada tahun 2020. Dampak lainnya akibat terjadinya kontraksi ekonomi secara global dari sisi penyelenggaraan pemerintahan adalah menurunnya kapasitas fiskal karena pendapatan negara dan daerah juga menurun.

Pandemi COVID-19 ini merupakan goncangan yang sulit diantisipasi. Tidak ada yang memperkirakan pandemi terjadi dan bahkan belangsung dalam waktu yang lama, bahkan sampai hari ini belum dapat diperkirakan kapan pandemi akan berakhir. Kondisi ini memberikan dampak yang besar di semua sektor utamanya sektor sosial, kesehatan, dan ekonomi. Sejauh mana dampak yang besar tersebut bisa diredam tergantung pada kombinasi efektivitas dua respon kebijakan yaitu respon kebijakan kesehatan, dan respon kebijakan mitigasi dampak sosial ekonomi.

Kondisi pandemi yang belum dapat diprediksikan kapan akan berakhir mendorong pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah harus terus intensif melakukan program kegiatan penanganan COVID-19, terutama penyiapan jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Termasuk juga mendorong kebijakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara dan daerah, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah sampai dengan tingkat pemerintah kabupaten/kota.

Isu Strategis Pembangunan Daerah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, terutama kondisi terkini yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas saat ini sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

1. Kualitas Sumberdaya Manusia

Isu strategis nasional yaitu sumber daya manusia baik di bidang pendidikan dan kesehatan, sejalan dengan isu strategis daerah yaitu kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 sebesar 71,96 menjadi 71,98 di tahun 2020.

Upaya peningkatan pembangunan sumber daya manusia antara lain didorong oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat; derajat kesehatan masyarakat; pengendalian pertumbuhan penduduk; kualitas hidup perempuan, anak serta pemuda.

Isu strategis yang berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Paska terjadinya bonus demografi yang diproyeksikan terjadi di Jawa Tengah sampai dengan sepuluh tahun ke depan adalah terjadinya penuaan penduduk (population aging) dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan. Potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Komitmen Peningkatan derajat pendidikan masyarakat adalah upaya untuk mendukung pencapaian tujuan dalam sasaran Global SDGs/TPB Tujuan 4 Menjamin Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Mempromosikan Belajar Sepanjang Hayat serta tujuan SDGs/TPB

pertama tanpa kemiskinan target keempat yaitu memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap akses pelayanan dasar, dalam hal ini adalah pendidikan serta pencapaian Tujuan 5 Mencapai Keseteraan Gender Dan Memperdayakan Kaum Perempuan.

Peningkatan derajat pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah yang menunjukkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal diukur dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) baik PAUD, SD/MI maupun SMP/Mts serta indikator Harapan Lama Sekolah yang menunjukkan kualitas sistem pendidikan di berbagai jenjang baik formal maupun non formal/kesetaraan dan mengurangi Angka Putus Sekolah (APS). Secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Banyumas masih belum optimal di semua jenjang pendidikan dimana kondisinya belum mencapai 100%.

Sedangkan isu strategis nasional karakter bangsa dimana masih rendahnya budaya literasi masyarakat sejalan dengan isu daerah terkait dengan derajat pendidikan masyarakat yang didorong oleh peningkatan budaya baca masyarakat dengan indikator Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat, dimana pada masa pandemi COVID 19 aktivitas membaca lebih mengarah pada pemanfaatan teknologi melalui internet, maka berdampak pada kunjungan ke perpustakaan menjadi sangat menurun. Untuk itu digitasi perpustakaan menjadi sangat diperlukan.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah untuk mendukung pencapaian Tujuan Global SDGs/TPB ke-3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) didorong dengan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang dapat diukur dengan penurunan angka kesakitan dan kematian masyarakat. Angka kesakitan dan kematian masyarakat dapat diturunkan antara lain dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan meliputi keterjangkauan layanan maupun kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Terjadinya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pelayanan kesehatan sehingga mengancam status kesehatan masyarakat. Penularan dan penyebaran virus COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kelompok lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, namun juga menjadi ancaman bagi kelompok usia produktif. Faktor penyebabnya adalah meningkatnya risiko penyakit tidak menular penyerta yang bersifat kronis yang menyerang orang usia produktif

Sampai dengan Tahun 2020, beberapa layanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas belum memenuhi kondisi yang ideal, diantaranya adalah jumlah/rasio dokter spesialis dan tenaga medis, rasio rumah sakit per satuan penduduk, serta rasio poliklinik per satuan penduduk, angka kematian ibu, Prevelansi gizi buruk, prevalansi stunting.

Pembelajaran dari pandemi COVID-19 adalah bagaimana mendorong penguatan pembangunan sektor kesehatan dengan penguatan sistem kesehatan daerah dalam rangka penguatan ketahanan

kesehatan (health security) melalui pengendalian penyakit, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pandemi ini diproyeksikan masih akan berlangsung di tahun 2021, maka pengendalian penyebaran COVID-19 terus diupayakan dengan tetap menjaga perilaku 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara bertahap serta meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan.

Pengendalian pertumbuhan penduduk yang diukur dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk didalamnya adalah kualitas hidup perempuan yang diukur dengan Indek Pembangunan Gender (IPG), kualitas hidup anak yang dapat dilihat dari bagaimana Kabupaten memberikan ruang yang layak untuk anak dengan Nilai Kabupaten Layak Anak.

2. Ketersediaan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur merupakan isu nasional yang juga menjadi isu daerah ketersediaan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur juga merupakan upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDG's/TPB ke-9 yaitu Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi serta Tujuan SDG's/TPB ke-11 Menjadikan Kota dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan.

Beberapa infrastruktur dasar selain yang menjadi pendorong bagi pencapaian tujuan DGS's/TPB dan mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti jaringan jalan, irigasi; Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman seperti air bersih, sanitasi, dan permukiman; Infrastruktur Perhubungan yang mendukung konektivitas dan pelayanan transportasi.

Kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sebesar 45,04 %. Untuk jaringan irigasi dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2020 baru mencapai 79,01%. Guna mencukupi kebutuhan air untuk areal pertanian seluas 23.716 Ha terdapat jaringan irigasi sepanjang 641,081 km.

Kondisi lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2020 masih diangka 7,8%, masih lebih tinggi dari target universal access sebesar 0%. Sedangkan untuk kondisi rumah layak huni meskipun terus meningkat tetapi baru mencapai 85,2 % pada tahun 2020.

Sedangkan dari sisi pelayanan air bersih dan sanitasi adalah upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDGs/TPB ke-6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua. Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2019 baru mencapai 87,79% dan cakupan rumah tangga bersanitasi baru mencapai 88,45% pada tahun 2020. Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi tersebut masih lebih

rendah dari target universal access sebesar 100% cakupan akses air bersih dan 100% cakupan akses sanitasi pada tahun 2020.

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus berupaya melalui program dan kegiatan untuk meningkatkan jumlah maupun kualitas berbagai sarana dan prasarana baik berupa jaringan jalan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, pemukiman serta transportasi sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan eknonomi yang lebih mantap. Namun demikian akibat adanya kebijakan pengalihan anggaran pemerintah untuk penanganan COVID-19 berakibat pada terhentinya beberapa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas. Termasuk juga tertundanya pembangunan infrastruktur strategis di Banyumas yang mendukung pada proyek strategis nasional. Tertundanya pembangunan infrastruktur ini juga berdampak pada berkurangnya lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.

3. Pengembangan Potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Pengembangan potensi daerah merupakan upaya untuk mendorong pencapaian Tujuan SDG's/TPB ke-Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Insklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua serta pencapaian tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara.

Perekonomian Kabupaten Banyumas sangat terdampak pandemi COVID-19 di tahun 2020, termasuk pada sektor unggulan Kabupaten Banyumas (industri pengolahan, perdagangan dan jasa). Terjadinya pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor tenaga kerja, dimana kesempatan berusaha atau bekerja masyarakat menjadi berkurang karena banyak usaha yang tidak beroperasi sehingga pemanfaatan tenaga kerja berkurang baik jumlah atau waktunya.

Penurunan aktivitas usaha sektor perekonomian di masa pandemi COVID-19 juga ditunjukkan dengan menurunnya aset, omset, penurunan pendapatan para pelaku usaha terutama di bidang pertanian akibat penurunan daya beli masyarakat, penurunan penjualan produk pertanian dan produk olahan pertanian, penurunan pasokan, ketidakpastian harga, pembatasan mobilitas pelaku usaha dan petani, pembatasan distribusi sarana produksi pertanlan dan produksi hasil pertanian; pembatasatas kunjungan di sektor pariwisata, pembatasan transportasi dan tertundanya pembangunan infrastruktur.

Isu penting dalam peningkatan daya saing dan kesempatan berusaha diantaranya adalah meningkatkan peluang wirausaha, usaha kerakyatan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi terutama pada sektor-sektor perekonomian yang cukup bertahan di masa pandemi COVID-19 seperti sektor koperasi, Usaha Mikro, dan Industri Kecil dengan mendorong peningkatan usahanya melalui online atau jasa antar.

Permasalahan pengembangan potensi daerah adalah belum teridentifikasinya seluruh potensi Kabupaten Banyumas yang ada agar

dapat dikembangkan secara optimal, terarah, terencana dan berkelanjutan agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengembangan usaha mikro merupakan salah satu potensi daerah yaitu dalam hal pembiayaan modal usaha, sumber daya manusia dan kurang memiliki kemampuan manajerial serta promosi produk yang kurang menarik.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berupaya menumbuhkembangkan melalui program dan kegiatan yang mendorong dan meningkatkan koperasi dan usaha mikro kecil serta pengembangan aktifitas ekonomi kreatif dan pariwisata

4. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu nasional dan daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Kabupaten Banyumas mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung sasaran Tujuan pertama dalam sasaran Global SDGs/TPB dimana Pada Tahun 2030, mengurangi setidak-tidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasioanal.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 Persentase penduduk miskin justru mengalami kenaikan. Meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang memberi dampak multisektoral. Pada tahun 2019 angka kemiskinan Kabupaten Banyumas sebesar 12,53%. Sedangkan tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas sebesar 5,83% sehingga angka kemiskinan menjadi 13,26%. Hal ini menunjukan adanya tingkat kenaikan angka kemiskinan tahun 2020 terhadap tahun 2019 sebesar 5,83%. Dengan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 pemerintah dan pemerintah daerah mengubah target indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 dari 11,53% menjadi 12,53%. Dengan jumlah penduduk yang besar maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas juga tinggi. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas tahun 2020 menempati peringkat ke-2 terendah dari 5 kabupaten. Namun dari sisi jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin bertambah 14.190 jiwa dari 211.650 pada tahun 2019 menjadi 225.840 pada tahun 2020.

Isu kemiskinan penduduk Kabupaten Banyumas terkait akses pelayanan dasar antara lain akses rumah layak, pangan, pendidikan dan kesehatan dan juga kesempatan berusaha dan bekerja, aspek ketrampilan dan produktivitas kelompok serta belum terintegrasinya sasaran program dan kegiatan serta lokasi intervensi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Hal lain yang mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran adalah peningkatan akses ekonomi.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas.

Komitmen Kabupaten Banyumas untuk menurunkan pengangguran adalah dalam rangka mendukung sasaran Tujuan kedelapan dalam sasaran Global SDGs/TPB yaitu mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir TPT Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif, dengan kecenderungan lebih rendah dibanding TPT Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Semakin rendah TPT semakin baik, hal ini berarti jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas tahun 2019 sebesar 4,17% sedangkan tahun 2020 adalah sebesar 6%. Kenaikan tingkat pengangguran ini juga dikarenakan dampak COVID-19 yang mengakibatkan adanya pengurangan tenaga kerja ataupun Pemutusan Hubungan Kerja di banyak perusahaan serta pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi COVID-19.

Tantangan pengurangan pengangguran adalah bagaimana meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang didukung dengan kebijakan penanaman modal yang sehat dan kompetitif dan saling menguntungkan, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan di Kabupaten Banyumas dipersepsikan dengan Ketahan Pangan. Dimana upayanya adalah meningkatkan ketersediaan pangan dengan inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan serta agrobisnis. Komitmen Peningkatan Pertanian untuk mendukung Kedaulatan Pangan adalah upaya untuk mendukung pencapaian tujuan dalam sasaran Global SDGs/TPB Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Banyumas dalam hal ini adalah ketersediaan pangan hasil produksi padi dan palawija utamanya adalah mencukupi kapasitas produksi padi dengan target kapasitas sebesar 500.000 ton per tahun. Sedangkan untuk mencapai target tersebut masih banyak kendala yang harus diatasi antara lain karena sempitnya kepemilikan lahan, menurunnya kesuburan tanah, ketersediaan air irigasi, serangan OPT, iklim yang tidak menentu dan kurang menguntungkannya budidaya padi dibandingkan dengan budidaya hortikultura.

Produksi tanaman padi Kabupaten Banyumas belum bisa mencapai kapasitas yang ditargetkan dapat dilihat dari pencapaian produksi tahun 2020 372.180,14 ton walaupun naik dibanding produksi tahun 2019 sebesar 368.957,25. Namun angka tahun 2020 masih dibawah tahun

2018 sebesar 390.000 ton. Sementara produksi tanaman kedelai terus menurun terlihat di tahun 2020 turun drastis yaitu sebesar 270.78 ton dibandingkan tahun 2019 sebesar 1562,01 ton dan tahun 2018 sebesar 1578 ton.

Pemakaian pupuk kimia yang belum terkendali menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak dan berkurang kesuburan pada lahan pertanian. Hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan produksi dan produktivitas hasil pertanian cenderung menurun.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana terus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis, dengan dukungan kebijakan dan ketersediaan sarana produksi terutama pupuk dan benih unggul serta alat mesin pertanian yang lengkap serta masalah alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan perawatan infrastruktur sebagai faktor yang mendukung akses dan distribusi sarana produksi pertanian serta pemasaran.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu yang mendapat perhatian cukup serius dalam proses pembangunan, baik di tingkat regional maupun nasional yaitu isu terkait lingkungan hidup dan bencana meliputi penurunan kualitas lingkungan hidup, kerusakan tutupan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan air, dan kelangkaan energi, bahkan isu tingkat global, terutama untuk pencapaian Tujuan SDG's/TPB ke-6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua, dalam hal ini terkait dengan pencapaian Indeks Kualitas Air, kemudian terkait dengan penanganan sampah mendorong pencapaian Tujuan SDG's/TPB ke-11 Menjadikan Kota dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan dan tujuan SDG's/TPB ke-12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan, serta upaya mengurangi permasalahan dampak emisi gas rumah kaca untuk mendorong pencapaian Tujuan ke-13 Mengatasi Langkah Segera Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya serta Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Pelestarikan dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan. Apalagi dengan banyaknya kejadian bencana alam yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia yang disebabkan karena permasalahan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak dikelola dengan baik serta akibat dampak perubahan iklim serta ditingkatkan juga dalam peningkatan penanganan bencana dimana Kabupaten Banyumas adalah termasuk daerah rawan bencana.

Belum adanya regulasi terkait sumber mata air di Kabupaten Banyumas menyebabkan pengelolaan sumber daya alam menjadi belum maksimal, salah satunya dalam mengelola kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 20% dari luas wilayah perkotaan dan 10% RTH Privat di Perkotaan, Radius 200 meter dari mata air harus dilindungi dan perbukitan sebagai daerah konservasi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banyumas tahun 2019 adalah 64,62 sedangkan tahun 2020 adalah 74. Nilai IKLH tersebut menggambarkan kualitas lingkungan Kabupaten Banyumas tahun 2020 cukup baik. Jika dilihat dari tiap komponen IKLH, yang terdiri dari Indeks Kualitas Air = 59,33, Indeks Kualitas Udara = 85,07

dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan = 70,04, kualitas air di Kabupaten Banyumas rendah. Hal ini sejalan dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang menunjukan daya dukung air di Kabupaten Banyumas telah banyak menurun sehingga diperkirakan wilayah Kabupaten Banyumas akan mengalami defisit air pada tahun 2030 jika tidak melakukan upaya konservasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Sementara dari sisi kualitas sungai-sungai yang melintas di kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas memiliki kandungan minyak dan lemak, colifecal dan coliform melebihi ambang batas, yang diduga kontribusi pencemarannya dari buangan sampah dan masukan limbah rumah tangga serta kotoran makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Sungai Serayu yang melintas di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat indikasi pencemaran dari kegiatan pertanian terutama pestisida yang diindikasikan dengan klorin bebas yang melebih ambang batas baku mutu.

Permasalahan lingkungan lain yang masih perlu perhatian adalah pengelolaan sampah. Pelayanan penanganan sampah masih terpusat pada kawasan perkotaan. Untuk itu perlu ditingkatkan peran dan kesadaran mayarakat dalam pengelolaan sampah melalui pengelolaan berbasis masyarakat

7. Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis nasional karakter bangsa yaitu masih rendahnya inovasi, dan kreativitas sejalan dengan isu strategis daerah. Dimana tekanan di berbagai sektor ini termasuk di sektor ekonomi membuat semua pihak untuk berpikir secara kreatif dan inovatif agar dapat lepas dari keterpurukan. Banyak cara diupayakan secara inovatif agar perekonomian tetap berjalan namun protokol kesehatan juga tetap bisa diterapkan. Hal penting yang perlu direspon saat pandemi adalah inovasi yang dapat membantu Indonesia keluar dari kondisi ketidakpastian. Dalam menciptakan kondisi ekosistem yang kondusif agar inovasi dapat berjalan dengan baik diperlukan peran pemerintah. Pemerintah, lanjutnya, berperan dalam menciptakan regulasi yang dapat mendukung perkembangan inovasi.

Inovasi dilaksanakan di berbagai sektor, inovasi ini salah satunya untuk menjembatani bagaimana sektor kehidupan tetap berjalan tetapi aman terhadap resiko penyebaran virus corona. Prinsip yang utama untuk dijadikan dasar inovasi adalah “contactless” atau tidak adanya kontak langsung. Segala macam bisnis dijalankan dengan tanpa kontak atau minimal mengurangi adanya kontak sebagai contoh dengan e-comerse. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat tajam, 91 persen selama pandemi. Sementara, penetrasi pengguna internet juga melonjak 73,7 persen.

Pemerintah Kabupaten Banyumas masih perlu banyak melaksanakan inovasi dalam hal pelayanan publik untuk mendukung Misi ke 1 Bupati Banyumas yaitu Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik. Beberapa contoh Inovasi dalam Pelayanan masyarakat yang telah diaplikasikan antara lain pelayanan di Puskesmas terkait dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk mengurangi kematian ibu dan anak, upaya pelayanan Sosial oleh Dinas Kesehatan

yang Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis, pelayanan dan fasilitasi terhadap Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinsospermasdes, pelayanan Pendidikan dengan berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah SD dan SMP, serta upaya pelayanan perijinan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik ditambah dengan pelayanan Perizinan dengan Perjanjian dan Pengiriman melalui Kantor Pos serta dan kendaraan keliling yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dan tentunya masih diperlukan inovasi pelayanan publik lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam upayanya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, upaya pemerintah juga adalah dengan memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, meningkatkan kapasitas ASN, dan menjaga kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan isu strategis nasional terkait Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan.

Terkait dengan isu tata kelola pemerintahan telah menjadi bahasan dalam SDG's / TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan serta Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global.

Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, Meningkatnya birokrasi yang kapabel, Meningkatnya pelayanan publik yang prima antara lain Pelayanan Pemerintah daerah dalam memberikan akses informasi publik dan pelayanan aduan masyarakat menjadi indikator dalam pencapaiannya.

Peningkatan birokrasi yang bersih dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Nilai AKIP Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah 74.96 atau BB sementara Indek Reformasi Birokrasi tahun 2020 adalah 69,07 atau B. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah perlu adanya road map Reformasi Birokrasi, Peningkatan profesionalisme aparatur, pengembangan kompetensi SDM aparatur; keterbukaan dan transparansi informasi; pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah berbasis inovasi dan IT serta komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

Selain itu juga diperlukan kapasitas fiskal yang besar terutama untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Salah satu isu strategis tata kelola pemerintahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJP Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025. Pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata

kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing Daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah, peningkatan peran dan daya saing pemuda serta peningkatan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara lain terkait kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan isu strategis Nasional

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai arah kebijakan pembangunan pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 khususnya periode RPJMD ketiga yang mengamanatkan untuk dilakukan pengusulan pembentukan Kota Purwokerto, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan beberapa upaya agar dapat memenuhi persyaratan baik secara admninitrasi maupun secara teknis untuk pengusulan pembentukan Kota Purwokerto.

Keterkaitan dan keselarasan isu strategis daerah dengan isu strategis Provinsi, Nasional maupun dengan isu strategis dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDG's dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6.
Keterkaitan Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2018-2023	Isu Strategis TPB/SDG'S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023
					PILAR EKONOMI	
8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	2.Ekonomi	8.Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi	3. Pengembangan Potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat
10.Kesenjangan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	6.Kesenjangan wilayah				
2.Pangan dan Gizi		5.Kedaulatan pangan dan energi		6.Ketahanan pangan		5. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2018-2023	Isu Strategis TPB/SDG'S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023
					PILAR SOSIAL	
1.Kemiskinan		1.Penanggulangan Kemiskinan		1. Kemiskinan	Penanggulangan warga pra-sejahtera dan perlindungan sosial	4.Kemiskinan dan Pengangguran
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	2.Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia		5. Kualitas SDM		1.Kualitas Sumberdaya Manusia
3.Kesehatan				4. Kesehatan	Kualitas derajat kesehatan masyarakat	
4.Pendidikan				3. Pendidikan	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan	
5.Gender				7.Kesetaraan gender dan jaminan sosial	Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2018-2023	Isu Strategis TPB/SDG'S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023
					PILAR LINGKUNGAN	
9.Infrastruktur 11.Kota dan Permukiman 6.Air bersih dan sanitasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		3.Sarana dan prasarana 6.Pertanahan dan penataan ruang	2.Akses terhadap infrastruktur permukiman (air minum dan sanitasi), perumahan, dan energi	Peningkatan kualitas sumber daya air dan sanitasi	2.Ketersediaan Infrastruktur
12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 14. Sumberdaya kelautan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	4. Beberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	7.Sumber daya air dan lingkungan hidup	14.Penurunan daya dukung lingkungan 13.Penurunan lahan pertanian mengancam produksi pangan pokok dan daya dukung pangan	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2018-2023	Isu Strategis TPB/SDG'S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023
15.Ekosistem daratan 7. Energi 13.Perubahan iklim				12.Resiko bencana dan keretanan terhadap perubahan iklim	Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim	
					PILAR HUKUM & TATA KELOLA	
16.Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan		5. Ketertiban dan keamanan 1. Sosial budaya dan kehidupan beragama		Keamanan dan ketertiban masyarakat	

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional/ Agenda Nasional (Rpjmn)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2018-2023	Isu Strategis TPB/SDG'S dalam KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023
17.Kemitraan global		7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	4.Tata pemerintahan , politik dan hukum 8. Ilmu pengetahuan dan teknologi	10.Tata kelola pemerintahan 11.Rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan 9. Akses penduduk terhadap teknologi dan informasi	Tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat	7. Tata Kelola Pemerintahan

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Visi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu

"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatian keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai

tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

5.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi yang pelaksanaannya dituangkan dalam program Hasta Krida, yaitu:

1. **Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik**

   Misi ini dilaksanakan melalui Hasta Krida pertama yaitu Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah dengan pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. **Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**

   Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan, serta pembangunan kepemudaan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu pelaksanaanya melalui Hasta Krida kedua yaitu mewujudkan 92 paket beasiswa, 1 desa 3 sarjana, program wajib belajar, serta peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan.

3. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**

   Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mendukung Misi ini dilaksanakan melalui Hasta Krida ketiga yaitu pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton, dan penerapan *safety belt* penderes, durian.

4. **Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan**

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama, melalui Hasta Krida keempat yaitu Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan untuk mewujudkan produksi padi 500.000 ton/tahun.

5. **Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**

   Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan dunia usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Misi ini dilaksanakan dengan Hasta Krida kelima yaitu memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, menciptakan 3.000 *enterpreneur* muda, investasi berbasis padat karya, dan membangun kawasan industri.

6. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**

   Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman. Salah satu pelaksanaan Misi ini adalah dengan Hasta Krida keenam yaitu pembangunan infrastruktur merata dan memadai untuk mewujudkan peningkatan anggaran irigasi, peningkatan jalan hotmix 570 km, dan membangun pasar desa.

7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal**

   Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Misi ini dilaksanakan dengan Hasta Krida ketujuh yaitu menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM.

8. **Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.**

   Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, serta peningkatan peran dan daya saing pemuda, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi ini didukung dengan pelaksanaan Hasta Krida kedelapan yaitu gerakan memakmurkan pesantren dan masjid dengan mewujudkan bantuan untuk Marbot masjid, KBS untuk santri pesantren, serta KBS, KBP dan tunjangan makan untuk yatim piatu.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerjanya. Penyesuaian Indikator dan Target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dapat dijelaskan dalam Tabel 5.1.

Selanjutnya penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2021-2023 diuraikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.1.
Penyesuaian Indikator dan Target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020		Target Akhir RPJMD	Capaian RPJM		Target Kinerja						Penyesuai-an Target Akhir RPJMD	Keterangan
			Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi		Tahun 2020 (%)	Target akhir RPJMD (%)	2021	Penyesuai-an target 2021	2022	Penyesuaian target 2022	2023	Penyesuai-an target 2023		
1	Indek Reformasi Birokrasi		66,00	68,76	68	69,07	75	90.79	83,72	70		73		75			tetap
2	PDRB per kapita	juta rupiah	31,115	31,870	33,000	30,000	38,655	96,58	82,45	34,885	**32,332**	36,770	**33,725**	38,655	**35,513**	**35,513**	Penyesuaian target
3	Indeks Ketahanan Pangan		74,00	73,99	74.01	79,27	74,04	107,11	107,06	74,02		74,03		74,04			Tetap
4	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	%	2	21,74	2	41,54	2	2.077	415,4	2		2		2			Tetap
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		63,79	64,62	63.88	70,04	64,15	109,64	109,18	63,97		64,06		64,15			Tetap
6	Pertumbuhan Ekonomi / Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6,4	6,32	6,45	-1,65	6,65	-25,58	-24,81	6,5	**4,1**	6,6	**4,5**	6,65	**5**	**5**	Penyesuaian target
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,95	71,96	72,55	71,98	74,35	99,21	96,81	73,15	**72,18**	73,75	**72,38**	74,35	**72,58**	**72,58**	Penyesuaian target
8	Persentase penduduk miskin	%	12,51	12,53	11,53	13,26	8,56	85	45,09	10,54	**12,51**	9,55	**11,76**	8,56	**11,00**	**11,00**	Penyesuaian target
9	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pnddk	731 (kasus)	894 (kasus)	792	620	950	121,72	134,74	823	**1,656**	891	**1,586**	950	**1,516**	**1,516**	Penyesuaian formulasi dan target
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,36	4,17	4,23	6	3,76	58.16	40,43	4,06	**5,75**	3,93	**5**	3,76	**4,5**	**4,5**	Penyesuaian target

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020		Target Akhir RPJMD	Capaian RPJM		Target Kinerja						Penyesuai-an Target Akhir RPJMD	Keterangan
			Target	Reali-sasi	Target	Reali-sasi		Tahun 2020 (%)	Target akhir RPJMD (%)	2021	Penyesuai-an target 2021	2022	Penyesua ian target 2022	2023	Penyesuai-an target 2023		
11	Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	80,01	65,48	80,01	78	82,56	97,49	94,48	82,25	-	82,41	-	82,56	-	-	Penyesuaian indikator, formulasi dan target
	Persentase Kinerja Infrastruktur	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**73,75**	**-**	**83,46**	**-**	**88,01**	**88,01**	**pengganti**
12	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	%	2	51,53	5,86	-61,85	6,35	-1055.46	-127.58	5,48	-	5,48	-	6,35	-	-	Penyesuaian indikator, formulasi dan target
	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**-**	**5**	**-**	**7**	**7**	**pengganti**
13	Indeks Gini		0,308	0,310	0,307	NA	0,304	NA	NA	0,306		0,305		0,304			Tidak tersedia data
14	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		0,3416	0,560	0,3376	NA	0,3256	NA	NA	0,3336		0,3296		0,3256			
15	Nilai Tukar Petani (NTP)		100,83	104,05	101.3 3	NA	102,86	NA	NA	101,84		102,35		102,86			
16	Indeks Demokrasi		77,83	72,00	79,30	72	86	NA	NA	80,31		84,54		86			
17	Persentase penurunan konflik sosial	%	5	0,7	5	0,19	25	3,8	0,76	5		5		5			Menjadi indikator sasaran daerah / indikator OPD
18	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	%	-	-	5	5,65	15	113	37,67	5		10		15			
19	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	32,87	32,87	47,47	72,72	100	153,19	72,72	68,68		85,29		100			

Tabel 5.2.
Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas
Tahun 2021-2023 Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
1	Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik	1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indek Reformasi Birokrasi	-		-	-		70,00	73,00	75,00	75,00
						1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100
								2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		76,00	78,00	80,00	80,00
								3	Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi		3,86	3,87	3,88	3,88
								4	Nilai Maturitas SPIP	level	2	2	3	3
						2	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,10	3,20	3,30	3,30
								6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		95	96	97	97
						3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	7	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	.	81	82	83	83
2	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-		-	-		72,18	72,38	72,58	72,58
						4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,54	7,55	7,55
								9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	12,89	12,91	12,91
						5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,73	73,83	73,93	73,93

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
						6	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	11	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,84	0,83	0,82	0,82
						7	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87,65	87,66	87,67	87,67
								13	Nilai Kabupaten Layak Anak		600	625	650	650
		3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	3	Persentase penduduk miskin	-		-	-	%	12,51	11,76	11,00	11,00
						8	Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	14	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100
								15	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	%	86,17	87,17	88,17	88,17
								16	Persentase penanganan korban bencana	%	100	100	100	100
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	4	Pertumbuhan Ekonomi	-		-	-	%	4,1	4,5	5,0	5,0
						9	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan	17	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	4,49	4,51	4,52	4,52
								18	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,83	5,85	5,86	5,86

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
						10	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	19	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	%	2,26	3,11	3,91	3,91
				5	PDRB per Kapita	-		-	-	juta rupiah	32,332	33,725	35,513	35,513
4	Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan	5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	6	Indeks Ketahanan Pangan	-		-	-		74,02	74,03	74,04	74,04
						11	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	20	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	96	96	97	97
5	Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan	6	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	7	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	-		-	-	%	2	2	2	10
						12	Meningkatnya investasi daerah	21	Nilai investasi daerah	Milyar Rupiah	500	545	600	600
				8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-		-	-	%	5,75	5,00	4,50	4,50
						13	Meningkatnya kesempatan berusaha	22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,66	66,67	66,68	66,68

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
				9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		-	-		63,97	64,06	64,15	64,15
						14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup	23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		63,97	64,06	64,15	64,15
								24	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	%	24	26	27	27
						15	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	25	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99,983	99,984	99,985	99,985
						16	Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	26	Indeks Resiko Bencana		185	180	175	175
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit	7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	10	Persentase Kinerja Infrastruktur	-		-	-	%	73,75	83,46	88,01	88,01
						17	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai	27	Persentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	84,40	86,29	88,20	88,20
								28	Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan	%	66,67	91,67	100	100

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
	pembangunan							29	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	70,19	72,43	75,84	75,84
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal	8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	11	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	-		-	-	%	4	5	7	7
						18	Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	30	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	5,48	5,48	6,35	6,35
								31	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	5	10	15	15
						19	Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	32	Persentase Koperasi Sehat	%	28,88	30	31,11	31,11
								33	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,244	0,249	0,254	0,254
8	Mewujudkan tatanan masyarakat	9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya,	12	Angka Kriminalitas	-		-	-	per 10,000 penduduk	1,656	1,586	1,516	1,516

No.	Misi	No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir
	yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius		agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat			20	Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram	34	Persentase kriminalitas yang tertangani	%	5	5	5	25
						21	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	35	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	68,68	85,29	100	100
						22	Meningkatnya peran dan daya saing pemuda	36	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	2,59	2,94	3,27	3,27

Tabel 5.3.
Penyelarasan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 Dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 terhadap Target SDG's / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Misi / Indikator Tujuan/Indikator Sasaran Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Target			Keterangan Indikator	Goals SDGs/ Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi
			2021	2022	2023				
1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik							Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat		
Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	BKD	%	100	100	100	Indikator Sasaran Bupati	16.6.1 (a)	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP
Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja	Setda	Indek	7,15	7,15	7,15	Indikator Sasaran Bupati	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan							Target 1.2. Pada Tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi		
Persentase penduduk miskin	BPS	%	12,76	12,26	11,76	Indikator Tujuan Bupati	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat Kemiskinan
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan							Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun		
*I*ndeks Pembangunan Gender (IPG)	BPS	%	87,65	87,66	87,67	Indikator Sasaran Bupati	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD

Misi / Indikator Tujuan/Indikator Sasaran Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Target			Keterangan Indikator	Goals SDGs/ Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi
			2021	2022	2023				
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan							Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional		
Persentase penduduk miskin	BPS	%	12,76	12,26	11,76	Indikator Tujuan Bupati	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan							Target 17.1. Penguatan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya		
PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	34.885	36.770	38.655	Indikator Tujuan Bupati	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadapPDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDM menurut sumbernya
Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	BPS	%	4,49	4,51	4,52	Indikator Sasaran Bupati	17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan							Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara kurang berkembang		
Pertumbuhan Ekonomi / Persentase Pertumbuhan PDRB	BPS	%	4,1	4,5	5,0	Indikator Tujuan Bupati	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB
PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	34,885	36,77	38,655	Indikator Tujuan Bupati	8.1.1. (a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan							Target 2.1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang		

Misi / Indikator Tujuan/Indikator Sasaran Kabupaten	Sumber Data	Satuan	Target			Keterangan Indikator	Goals SDGs/ Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi
			2021	2022	2023				
							tahun		
Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Dinpertan dan KP	%	96	96	97	Indikator Sasaran Bupati	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishmen)	Ketersediaan pangan utama beras (ton)
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan							Target 8.3. Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Dinakekop UKM	%	66,66	66,67	66,68	Indikator Sasaran Bupati	8.3.1. (a)	Presentase Tenaga kerja formal.	Presentase Tenaga kerja formal
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Dinakekop UKM	%	0,244	0,249	0,254	Indikator Sasaran Bupati	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	BPS	%	6,00	5,00	4,50	Indikator Tujuan Bupati	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rumusan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Rumusan Strategi dan Keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2021

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	**Misi / Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat					**Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat**				
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara	• Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan. • Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompet ensi.	1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	• Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah • Optimalisasi pencapaian reformasi birokrasi dalam Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensiMeningkatkan kapasitas ASN dan melakukan penataan ASN sesuai kompetensi

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
									• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan dengan menyediakan SDM terlatih dan sarana prasarana kearsipan yang memadai agar mendorong pengelolaan arsip secara baku, tertib perizinan penggunaan arsip serta perlindungan dan penyelamatan arsip • Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan sesuai rencana induk dengan meningkatkan implementasi kajian strategis dan inovasi daerah • Meningkatkan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD • Meningkatkan Pengelolaan PAD • Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah (TPB 16)

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
		2	Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah	• Meningkatkan sistem pengendalian kebijakan daerah, pengawasan, dan pencegahan KKN di lingkungan pemerintah					• Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengoptimalkan kapabilitas APIP dan mendorong OPD menerapkan SPIP
		3	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	• Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada sub komponen: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan upaya pemekaran wilayah • Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan pelibatan aktif masyarakat dan tenaga ahli dalam proses perencanaan dan penganggaran. • Meningkatkan kualitas, sinergitas dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah menggunakan e-planning dan e-budgeting.			2	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	• Optimalisasi pengelolaan e-Goverment dengan meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral, layanan informasi publik serta keamanan data dan sistem informasi (TPB 16)

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan, dan mendorong seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan arsip secara baku dengan menyediakan SDM terlatih dan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai. • Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam hal perencanaan, pertanggungjawaban maupun pelaporan. • Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.					
		4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu	• Meningkatkan penerapan standar pelayanan, dan meningkatkan kompetensi petugas dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perijinan. • Mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan secara terpadu, dan dengan penerapan standar pelayanan			3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	• Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi • Meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (TPB 1)

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				· Mengembangan sistem jaringan komunikasi dan informatika · Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi government					• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan jangkauan pelayanan publik untuk mendukung kesiapan pemekaran wilayah (TPB 16) • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat serta penataan desa
Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan					**Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**				
1	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	• Mendorong partisipasi seluruh anak usia sekolah untuk bersekolah dengan penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu dan optimalisasi pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah. • Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar sesuai standar nasional. • Meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dengan mendorong akreditasi sekolah	1	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	• Meningkatkan akses pendidikan (TPB 4) • Meningkatkan kualitas pendidikan (TPB4) • Meningkatkan promosi minat baca dan peningkatan layanan perpustakaan dengan pemenuhan standar nasional

RPJMD 2018-2023				Perubahan RPJM 2018-2023			
Misi / Tujuan		Sasaran	Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran	Strategi
			• Meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan sesuai kebutuhan, terutama ruang kelas, perpustakaan, laboratorium. • Memberikan bantuan pendidikan untuk penyelesaian program sarjana • Meningkatkan promosi minat baca dan peningkatan layanan perpustakaan dengan pemenuhan standar nasional.				
		2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Meningkatkan status gizi masyarakat serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular • Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, meningkatkan kompetensi petugas kesehatan, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai.			2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Menurunkan angka kematian dan kesakitan dengan meningkatkan status gizi masyarakat dan perbaikan kualitas faskes (TPB 3) • Meningkatkan Ratio Dokter melalui perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK yang baik serta mengembangkan mutu dan kompetensi SDMK serta pemberian ijin praktek tenaga kesehatan (TPB 3)
			• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.				• Memenuhi sediaan farmasi dan alat kesehatan serta terawasinya kualitas makanan dan minuman

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
									• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan untuk meningkatkan rasio desa siaga aktif mandiri dan posyandu mandiri
2	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dan anak. • Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan standar			4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	• Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, perlindungan perempuan serta kualitas keluarga (TPB 5) • Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak (TPB 5)
		4	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	• Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.			3	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	• Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (TPB 3)
		2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa	• Meningkatkan perlindungan bagi penduduk miskin, dan mendorong penumbuhan usaha ekonomi produktif penduduk miskin.	2	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	1	Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	• Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman layak huni dengan Pencegahan timbulnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu (TPB 11)

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	**Misi / Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**
				• Meningkatkan pengembangan kewirausahaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial non produktif					• Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan serta rehabilitasi sosial (TPB 1)
		3	Meningkatnya penanganan bencana	• Meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana.					• Meningkatkan penanganan korban bencana dengan penyediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana (TPB 11)
Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan					**Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**				
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	1	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	• Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, dan penerapan teknologi budidaya pertanian, • Meningkatkan penyediaan sarana produksi budidaya, optimalisasi pembenihan ikan, serta meningkatkan keterampilan pembudidaya ikan dalam penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) komoditas unggulan perikanan	1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	2	Menurunnya ketimpangan pendapatan	• Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, penerapan teknologi budidaya pertanian komoditas unggulan pertanian • Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian dan hasil peternakan agar memiliki nilai tambah ekonomi. • Meningkatkan pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dan pembinaan terhadap petani penderes agar menerapkan standar keselamatan. • Meningkatkan jumlah pelaku ekspor gula kelapa • Meningkatkan kualitas dan jumlah produk gula kelapa sesuai standar ekspor • Meningkatkan keselamatan petani penderes dengan safety belt					
		2	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa	• Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas produk • Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar tradisional dan meningkatkan kerjasama			1	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan	• Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya saing baik harga maupun kualitas produk • Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar tradisional dan meningkatkan kerjasama

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				perdagangan.					perdagangan
				• Meningkatkan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).					
Misi 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan					**Misi 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan**				
1	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	• Meningkatkan produksi padi dengan penyediaan saprodi, penggunaan teknologi pertanian, dan pembinaan kelompok tani secara berkelanjutan. • Mendorong sinergi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dalam penyediaan bahan pangan. • Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga/pelaku usaha distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok. • Meningkatkan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan lahan untuk penyediaan bahan pangan lokal.	1	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	• Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan meningkatkan sumber daya ekonomi, diversifikasi dan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan (TPB 2) • Meningkatkan kualitas SDM dan sarpras pendukung produksi pertanian dan peternakan • Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengawasan perikanan serta nilai tambah olahan hasil perikanan (TPB 14) • Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian, peternakan dan perikanan agar memiliki nilai tambah

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	**Misi / Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**
				• Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan irigasi serta penerapan teknologi tepat guna sektor pertanian • Memfasilitasi penyediaan lumbung pangan dan jalan usaha tani • Membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian					ekonomi dengan mengoptimalkan diversifikasi usaha, meningkatkan produksi dan olahan hasil, akses petani terhadap teknologi, modal, dan pasar
Misi 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan					**Misi 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**				
1	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	1	Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya	• Mengembangkan kawasan peruntukan industri Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, khususnya kawasan industri • Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi. • Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK), dan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK).	1	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	1	Meningkatnya investasi daerah	• Meningkatkan minat investasi melalui promosi, pengendalian pelaksanaan, dan pengembangan iklim investasi dengan pemenuhan infrastruktur penunjang investasi dan mendorong pengembangan kawasan peruntukan industri
							2	Meningkatnya kesempatan berusaha	• Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK), dan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) (TPB 10)

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
		2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	• Meningkatkan penyediaan rencana tata ruang berupa RDTR dan RTBL serta mengintensifkan pengendalian dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana peruntukannya. • Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kawasan peruntukan industry dan kawasan industri • Mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup • Mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau			3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup	• Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (TPB 12) • Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu (TPB 11)
							4	Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	• Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan penumbuhan desa tangguh bencana (TPB 13) • Mengurangi resiko bencana (TPB 13)
							5	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	• Meningkatkan penyediaan rencana tata ruang berupa RDTR dan RTBL serta mengintensifkan pengendalian dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana peruntukannya • Penertiban lahan yang belum bersertifikat antisipasi alih fungsi lahan (TPB 15)
Misi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan					**Misi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**				

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	**Misi / Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	• · Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat • Mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase • Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu • Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan • Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah dengan membangun terminal penumpang • Meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air • Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta penataan saluran drainase, revitalisasi jaringan irigasi dan embung. • Membangun pusat kantor pemerintahan	1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai	• Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan, meningkatkan kualitas jalan, jembatan dan irigasi serta bangunan pelengkap jalan dan jembatan (TPB 9) • Meningkatkan penyediaan infrastruktur air minum aman dan berkelanjutan (TPB 1) • Meningkatkan kualitas serta penataan kawasan dan bangunan pemerintah • Meningkatkan penyediaan infrastruktur sanitasi (TPB 1) • Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman (TPB 11) • Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Meningkatkan penataan lingkungan permukiman kumuh, dan penyediaan sarana sanitasi dan air minum. • Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu • Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM dan manajemen transportasi umum yang terintegrasi. • Meningkatkan dukungan pembiayaan infrastruktur jalan dan irigasi dari dana di luar APBD kabupaten • Melakukan penyusunan regulasi untuk pembiyaan infrastruktur melalui anggaran desa					
Misi 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal					**Misi 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal**				
1	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.	1	Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	• Mengembangkan destinasi wisata yang memiliki keunikan/kekhasan, memberdayakan pelaku jasa wisata profesional dalam pengembangan paket wisata, dan memberdayakan kelompok sadar wisata. • Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata.	1	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.	1	Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	• Meningkatkan daya tarik wisata dengan mendorong pemasaran serta pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif (TPB 8)

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mendorong pengembangan industri kreatif pada usaha yang pertumbuhannya masih rendah • Menumbuhkembangkan usaha kreatif pemula (start up), dan mendorong pemasaran produk ekonomi kreatif di tingkat nasional maupun global • Meningkatkan kuantitas dan kapabilitas kelompok sadar wisata desa • Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.					
		2	Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM melalui pemanfaatan IPTEK	• Mengembangkan ketrampilan pelaku UMKM, IKM, koperasi dan pengembangan pasar desa dan usaha ekonomi perdesaan berbasis potensi sumberdaya lokal • Meningkatkan promosi, jumlah pelatihan, akses permodalan, dan akses pemasaran untuk wirausaha muda.			2	Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan pemanfaatan serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya • Memantapkan kelembagaan koperasi meningkatkan pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan serta pengawasan Koperasi

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Meningkatkan sinergi dan kerjasama antara lembaga perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan industri dan UMKM • Melakukan penyusunan rencana induk kelitbangan (RIK)					• Meningkatkan kualitas Usaha kerakyatan dengan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro (TPB 8)
Misi 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius					**Misi 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius**				
1	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1	Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara	• Mewujudkan Gerakan Memakmurkan Pesantren, Masjid serta tempat-tempat ibadah lainnya dengan memberikan bantuan untuk marbot masjid dan penjaga tempat ibadah lainnya serta layanan kesehatan untuk santri pesantren • Meningkatkan pemberian bantuan layanan kesehatan dan pendidikan, tunjangan makan untuk anak yatim/yatim piatu dan berkebutuhan khusus/Difabel • Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. • Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat	1	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1	Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram	• Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara (TPB 16) • Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat • Peningkatan kualitas fasilitasi pelayanan keagamaan dengan memakmurkan Pesantren, Masjid serta tempat-tempat ibadah lainnya serta meningkatkan peran forum komunikasi,dialog, dan diskusi antar umat beragam

RPJMD 2018-2023					Perubahan RPJM 2018-2023				
Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi	Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Meningkatkan penegakan Perda/ Perbup dengan mengoptimalkan pelaksanaan patroli dan operasi yustisi dengan melibatkan lembaga terkait.					• Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan penegakan Perda/ Perbup dan mengoptimalkan pelayanan keamanan masyarakat
				• Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda dan pengembangan prestasi dan karakter pemuda. • Meningkatkan prestasi olahraga dengan meningkatkan kompetensi pelatih dan pembinaan atlet, serta membudayakan olahraga pada masyarakat			2	Meningkatnya peran dan daya saing pemuda	• Meningkatkan daya saing keolahragaan, kepramukaan dan kepemudaan
		2	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	• Melestarikan seni dan budaya dengan memfasilitasi aktualitasi nilai adat dan tradisi masyarakat, serta memfasilitasi pementasan seni budaya. • Meningkatkan pelestarian/revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya.			3	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	• Meningkatkan pelestarian budaya dengan fasilitasi, pelestarian dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya

6.2. Strategi dan Arah Pengembangan Wilayah

6.2.1 Arah Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah di Kabupaten Banyumas ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Banyumas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang berbasis pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa didukung pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara regional Provinsi Jawa Tengan, Kabupaten Banyumas telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan strategis provinsi dengan sudut kepentingan ekonomi Barlingmascakeb yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Dalam kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Barlingmascakeb merupakan bagian dari pengembangan poros selatan-selatan dan poros pengembangan utara-selatan. Poros selatan-selatan bertujuan untuk dapat meningkatkan ekonomi dan pembangunan wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan poros utara-selatan dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah antara pantura dan pansela.

Kabupaten Banyumas merupakan bagian Kawasan Barlingmascakeb yang akan dikembangkan untuk mendukung dan memberikan nilai tambah dalam percepatan pembangunan ekonomi kawasan prioritas pengembangan Brebes-Tegal-Pemalang. Berdasarkan Perpres Nomor 79 tahun 2019 di Kabupaten Banyumas terdapat 7 Program/Proyek dalam strategis dan program lintas kawasan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas.

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a. pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi;
b. pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
c. pengembangan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa berskala lokal dan regional;
d. pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu;
e. pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya sebagai pendukung potensi wilayah;
f. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung;
g. pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
i. meningkatkan akses dan peluang investasi kawasan budidaya dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah.

6.2.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Berdasarkan rencana pengembangan struktur ruang, secara hirarki sistem perkotaan Kabupaten Banyumas terdiri atas pusat kegiatan dan fungsi pelayanan. Pusat kegiatan meliputi:

a. Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW di Perkotaan Purwokerto. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW di Perkotaan Purwokerto dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan meliputi:

    1. Kecamatan Purwokerto Utara;
    2. Kecamatan Purwokerto Timur;
    3. Kecamatan Purwokerto Selatan;
    4. Kecamatan Purwokerto Barat;
    5. sebagian Kecamatan Sumbang;
    6. sebagian Kecamatan Baturaden;
    7. sebagian Kecamatan Kedungbanteng;
    8. sebagian Kecamatan Kembaran;
    9. sebagian Kecamatan Karanglewas;
    10. sebagian Kecamatan Sokaraja; dan
    11. sebagian Kecamatan Patikraja.

b. Pusat Kegiatan Lokal atau PKL PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Banyumas meliputi:

    1. Perkotaan Banyumas. PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan dan kesehatan di Kecamatan Banyumas.
    2. Perkotaan Ajibarang. PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten di Kecamatan Ajibarang.
    3. Perkotaan Sokaraja. PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten, dan industri di Kecamatan Sokaraja.
    4. Perkotaan Wangon. PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri di Kecamatan Wangon

c. Pusat Pelayanan Kawasan atau PPK. PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK di Kabupaten Banyumas meliputi:

    1. perkotaan Jatilawang;
    2. perkotaan Sumpiuh;
    3. perkotaan Patikraja;
    4. perkotaan Baturaden;
    5. perkotaan Cilongok;
    6. perkotaan Lumbir;
    7. perkotaan Gumelar;
    8. perkotaan Pekuncen;
    9. perkotaan Purwojati;
    10. perkotaan Rawalo;
    11. perkotaan Kemranjen;
    12. perkotaan Tambak;
    13. perkotaan Sumbang;
    14. perkotaan Kembaran;
    15. perkotaan Karanglewas;

16. perkotaan Kebasen;
17. perkotaan Somagede;
18. perkotaan Kedungbanteng; dan
19. perkotaan Kalibagor.

Pusat pusat kegiatan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumasl. Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan jaringan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan ptasarana energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya yang terdiri dari sistem persampahan, sistem jaringan air limbah, sistem jaringan drainase, jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi, dan sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial.

Strategi pengembangan struktur ruang Kabupaten Banyumas dilakukan antara lain melalui:

a. mendorong pengembangan pusat kegiatan di kawasan perkotaan berskala regional;
b. mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala kecamatan atau beberapa desa;
d. mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antar desa;
e. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang;
f. mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan;
g. mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah meliputi terminal penumpang dan terminal barang;
h. mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif;
i. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah;
j. meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
k. meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu;
l. mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana wisata;
m. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi kereta api;
n. mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase; dan
o. mengembangkan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

6.2.3 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung di Kabupaten Banyumas, baik dalam konteks internal wilayah maupun regional, harus membentuk suatu kesatuan yang secara sinergis memberikan perlindungan dari daerah hulu hingga hilir tanpa dibatasi oleh batasan-batasan administratif.

Fokus perwujudan kawasan lindung diarahkan pada kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi serta kawasan lindung lainnya. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a. menetapkan kawasan lindung sesuai fungsinya;
b. mengembalikan fungsi hutan lindung yang mengalami kerusakan;
c. membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung;
d. mempertahankan dan melestarikan kawasan resapan air;
e. mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber air baku;
f. melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
g. membatasi kegiatan pariwisata pada radius pengamanan kawasan pada kawasan perlindungan setempat;
h. mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau;
i. meningkatkan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagai tempat wisata, dan obyek penelitian;
j. mengembangkan tanaman konservasi di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
k. mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana.

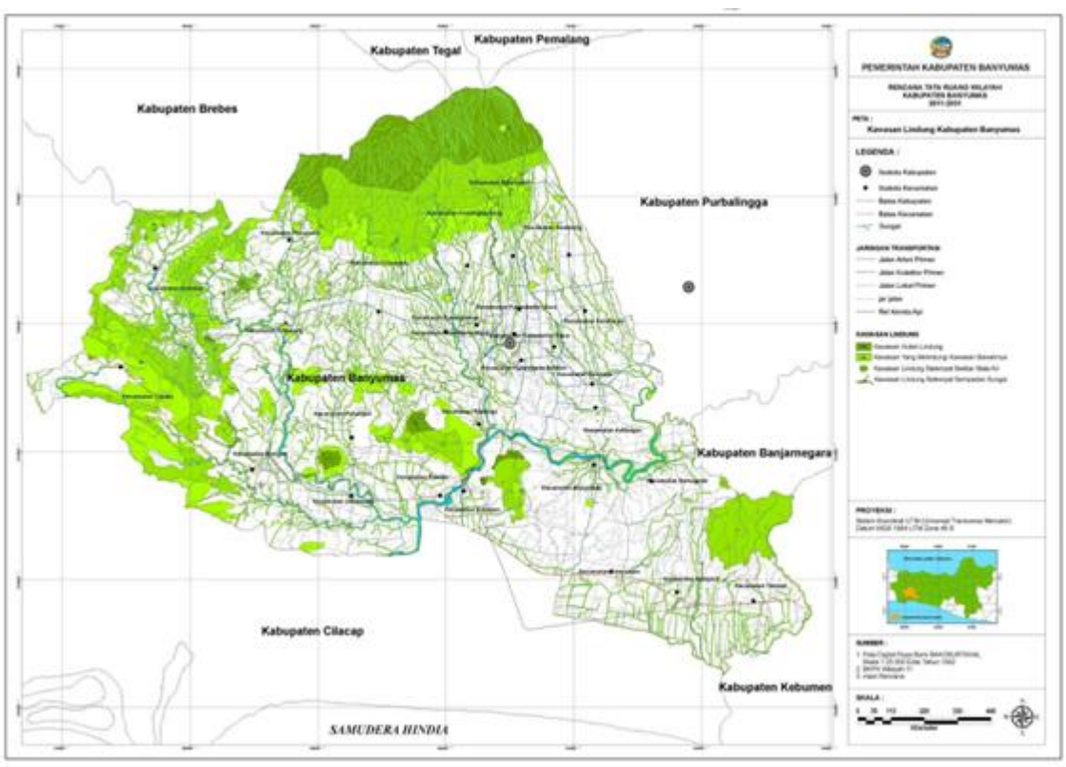

Gambar 6.1.
Kawasan Lindung Kabupaten Banyumas
Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

6.2.4 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Alokasi pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan budidaya dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek. Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang yang optimal maka alokasi pemanfaatan ruang memperhatikan asas kelestarian, kesesuaian dan kemanfaatan. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Asas kesesuaian bertujuan untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal.

Fokus perwujudan kawasan budidaya diarahkan pada kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya. Pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutandilakukan melalui strategi sebagai berikut:

a. menetapkan kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup;
c. mengembangkan kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan dan fungsi sosial;
d. mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan;
e. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan;
f. mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan;
g. mengembangkan kawasan peruntukan industri pada jalur ansportasi regional dan nasional;
h. mengembangkan dan memberdayakan industri berbasis bahan baku lokal dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan hasil tambang;
i. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu;
j. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
k. mengembangkan kawasan pertanian;
l. mengembangkan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah beririgasi teknis;
m. mengembangkan kawasan agropolitan dan sistem agribisnis pertanian;
n. mengembangkan sektor peternakan dan perkebunan;
o. mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata;
p. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
q. mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata;
r. mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat;
s. mengembangkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala regional, lokal, dan lingkungan;

t. mendorong fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala nasional;
u. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa; dan
v. mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi kawasan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta industri.

6.2.5 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis merupakan kawasan yang secara spesifik berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan penataan ruang. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh kawasan yang dipandang penting bagi aspek kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional. Sedangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan ditujukan untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

Pendekatan penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan dan visi misi Kabupaten Banyumas meliputi Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Strategis Bidang Sosial dan Budaya, Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi, dan Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas:

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan Agropolitan MANGGAMAS dan Kawasan Strategis Pariwisata Lereng Gunung Slamet dan Sekitarnya; dan

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Gunung Slamet.

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Kabupaten Banyumas terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
   - kawasan Perkotaan Purwokerto;
   - kawasan agropolitan;
   - kawasan minapolitan; dan
   - kawasan perbatasan.
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya,

meliputi:

- kawasan Kota Lama Banyumas;
- kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon;
- kawasan Desa Tradisional di Desa Plana, Kecamatan Somagede; dan
- kawasan Budaya Tradisional Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Pariwisata Baturraden.
d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Gunung Slamet.

Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan strategis Kabupaten Banyumas sesuai dengan penetapannya dilakukan melalui:

a. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
c. mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
d. membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
e. menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan luasan lahan pada kawasan minapolitan;
f. melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan;
g. memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan;
h. mengendalikan kegiatan sesuai tujuan pemanfaatan kawasan dalam wilayah kerja pertambangan panas bumi dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan;
i. memanfaatkan kawasan bagi penelitian dan pendidikan yang berbasis lingkungan hidup;
j. mempertahankan keanekaragaman hayati pada kawasan suaka alam dan hutan lindung; dan
k. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan Gunung Slamet yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.

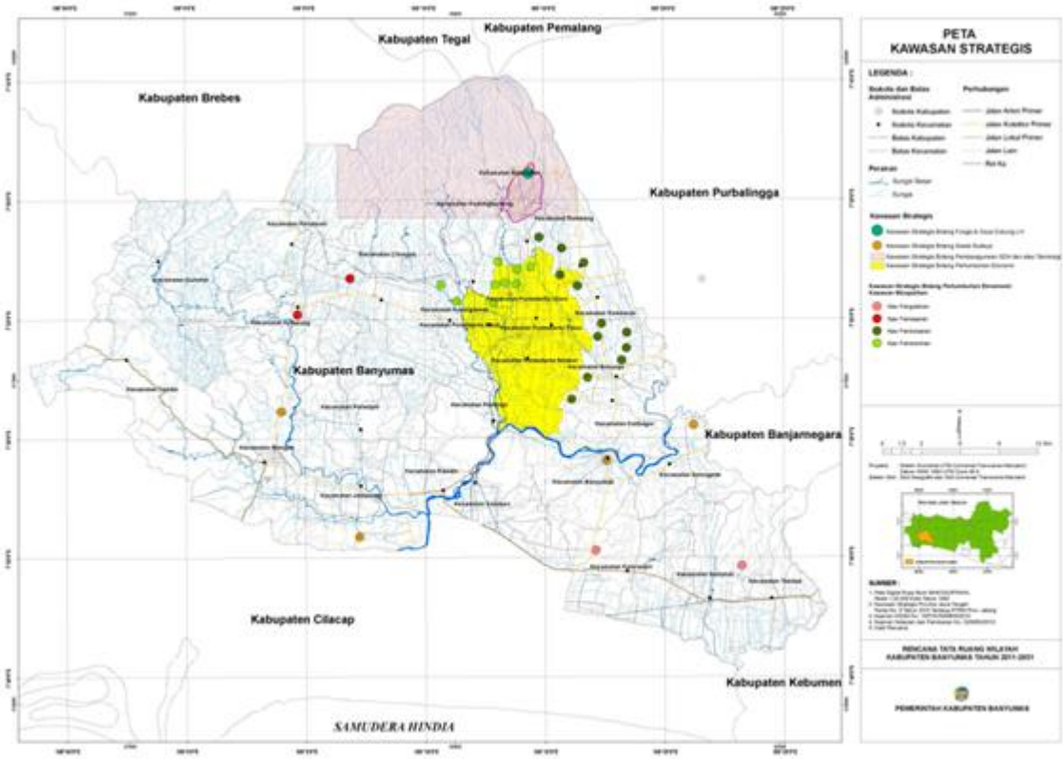

Gambar 6.2.
Kawasan Strategis Kabupaten Banyumas
Sumber: RTRW Kabupaten banyumas Tahun 2011-2031

6.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada masing-masing tema/fokus disusun prioritas pembangunan yang akan ditangani.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

Arah Kebijakan							
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Perubahan Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Perubahan Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Perubahan Tahun 2023**
Tema: Peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperluas pelayanan dasar, memantapkan kondusifitas wilayah serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Tema: Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal, dan Penguatan Kemandirian Pangan	Tema : Penguatan Perekonomian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Tema: Peningkatan Daya Saing Potensi Daerah untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Masyarakat	Tema: Penguatan Daya Saing Menuju Daerah yang Maju dan Mandiri	Tema: Peningkatan Perekonomian Daerah didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia	Tema: Perwujudan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Adil-Makmur	Tema: Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Kabupaten Banyumas yang Maju, Adil dan Mandiri
Prioritas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik 2. Penurunan kemiskinan dan pengangguran 3. Peningkatkan keterjangkauan jaminan kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial 4. Peningkatan keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penuntasan Wajib Belajar Pendidikan	Prioritas 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan ketersedian dan kualitas infrastruktur 3. Pengurangan disparitas pendapatan masyarakat 4. Pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 5. Peningkatan produktivitas	Prioritas 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pemenuhan infrastruktur dasar 3. Pengembangan dan pemerataan kegiatan ekonomi masyarakat 4. Pengembangan model program-program penanggulangan kemiskinan	Prioritas 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi 3. Pengembangan Potensi Daerah dan pemerataan kegiatan ekonomi masyarakat 4. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran untuk	Prioritas 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 2. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung investasi. 3. Pengembangan teknologi untuk kegiatan ekonomi masyarakat 4. Optimalisasi model program-program penanggulangan kemiskinan	Prioritas **1.** Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13) 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan (TPB 1 dan 10) 3. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia (TPB 3, 4 dan 5)	Prioritas 1. Penguatan kualitas sumber daya manusia menuju *smart people* dengan pemanfaatan teknologi informasi 2. Pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah 3. Pemanfaatan tekhnologi dalam pengembangan produk unggulan daerah, sehingga mampu	Prioritas 1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta ketahanan bencana (TPB 2, 8, 12 dan 13) 2. Pemantapan Percepatan penanggulangan kemiskinan (TPB 1 dan 10) 3. Pemantapan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah (TPB 6, 9 dan 11)

Arah Kebijakan							
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Perubahan Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Perubahan Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Perubahan Tahun 2023**
Dasar 9 tahun 5. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 6. Pengurangan ketimpangan akibat disparitas pendapatan masyarakat 7. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha 8. Peningkatan peran koperasi, industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah 9. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan 10. Pengembangan pariwisata 11. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 12. Pengurangan resiko bencana dan peningkatan kelembagaan penanggulangan bencana	pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan 6. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	5. Pemantapan produktivitas pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan 6. Pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup 7. Pemantapan tata kelola pemerintahan	Mengurangi Kesenjangan 5. Pengelolaan lingkungan hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana 6. Pemantapan tata kelola pemerintahan	5. Diversifikasi produk pertanian dan nilai tambah hasil pertanian 6. Pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup 7. Pengembangan *smart goverment* dalam peningkatan kualitas pelayanan publik	4. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah (TPB 6, 9 dan 11) 5. Pengembangan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (TPB 16)	meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat 4. Penerapan model program penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya lokal 5. Optimalisasi produk pertanian untuk kesejahteraan masyarakat 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan 7. Penguatan *smart goverment* dalam perbaikan kualitas pelayanan publik	4. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia (TPB 3,4 dan 5) 5. Perwujudan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (TPB 16) 6. Peningkatan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal (TPB 8) 7. Peningkatan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme

Arah Kebijakan							
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Perubahan Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Perubahan Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Perubahan Tahun 2023**
							dan religius

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyumas disusun dengan mendasarkan pada program unggulan Bupati - Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023. Secara ringkas daftar program prioritas pembangunan daerah yang akan mendukung masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3
Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati dan Program Pembangunan Daerah

Misi	Penjabaran Hasta Krida	Rincian Penjabaran Hasta Krida	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas 2019-2020	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas 2021-2023
1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik	1. Banyumas Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah	• Pengembangan Lapak Publik Untuk mendukung Mall Pelayanan Publik	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	2. Pendidikan dan Kesehatan	• Mewujudkan 92 Paket Beasiswa • Program Wajib Belajar • Program 1 Desa 1 Sarjana • Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	3. Pengembangan Agrobisnis Unggulan	• Peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton • Penerapan teknologi safety belt penderes, durian dll	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri Program Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan	Program Pengembangan Ekspor
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan	4. Banyumas Pelopor Kedaulatan Pangan	• Produksi padi 500.000 ton/tahun	Program Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan	5. Memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja	• Menciptakan 3.000 enterprener muda • Investasi berbasis padat karya • Membangun kawasan industri	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumber Daya,	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga

Misi	Penjabaran Hasta Krida	Rincian Penjabaran Hasta Krida	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas 2019-2020	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas 2021-2023
			Sarana dan Prasarana Daerah Program Peningkatan Investasi di Kawasan Industri Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan kerja.	Kerja
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan	6. Pembangunan Infrastruktur merata dan memadai	• Peningkatan anggaran irigasi • Peningkatan jalan hotmix 570 km	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Penyelenggaraan Jalan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal	7. Menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif	• Pengembangan desa wisata • Pengembangan UMKM • Membangun pasar desa	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sistem Inovasi dan Kreativitas	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Umkm Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Administrasi Pemerintahan Desa
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.	8. Gerakan memakmurkan pesantren dan masjid	• Bantuan untuk marbot masjid • KBS untuk santri pesantren • KBS, KBP dan tunjangan makan untuk yatim piatu	Program Sosial Keagamaan Program Pembinaan Keagamaan Program Pelayanan, Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Sedangkan program pembangunan daerah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan yang mendukung visi Bupati - Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023, masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 6.4
Program Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023 Pendukung Visi-Misi Bupati

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Indek Reformasi Birokrasi	-		-	-		70.00	73.00	75.00	75.00			
				1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	1	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKAD
															BAPENDA
													2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BKAD
													3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BKAD
													4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA
						2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		76.00	78.00	80.00	80.00	5	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETWAN
															BAPPEDA LITBANG
															BKPSDM
															DINARPUSDA
															SETDA
													6	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SETWAN
													7	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA LITBANG
													9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
													10	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA LITBANG
													11	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINARPUSDA
													12	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM
													13	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA
													14	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA LITBANG
													15	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	DINARPUSDA
													16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN	DINARPUSDA

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
														ARSIP	
						3	Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi		3.86	3.87	3.88	3.88	17	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INSPEKTORAT
													18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
						4	Nilai Maturitas SPIP	level	2	2	3	3	19	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA
													20	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA LITBANG
													21	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
				2	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3.10	3.20	3.30	3.30	22	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DINKOMINFO
													23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINKOMINFO
													24	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINKOMINFO

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
						6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		95	96	97	97	25	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINKOMINFO
													26	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINKOMINFO
				3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	7	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	.	81	82	83	83	27	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN
													28	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
													29	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
													30	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DINSOSPERMASDES
													31	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINDUKCAPIL
													32	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINDUKCAPIL

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													33	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINDUKCAPIL
													34	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINDUKCAPIL
													35	PROGRAM PENATAAN DESA.	DINSOSPERM ASDES
													36	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN
													37	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINSOSPERM ASDES
													38	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
													39	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN
													40	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINSOSPERM ASDES
2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-		-	-		72.18	72.38	72.58	72.58			
				4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	8	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.53	7.54	7.55	7.55	41	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINDIK
													42	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINDIK

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
						9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.87	12.89	12.91	12.91	43	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINARPUSDA
													44	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINARPUSDA
													45	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINDIK
				5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.73	73.83	73.93	73.93	46	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD AJIBARANG
															DINKES
															RSUD BANYUMAS
													47	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINKES
															RSUD BANYUMAS
															RSUD AJIBARANG
													48	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RSUD AJIBARANG
															DINKES
															RSUD BANYUMAS
													49	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINKES

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													50	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKES
				6	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	11	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.84	0.83	0.82	0.82	51	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPPKBP3A
													52	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DPPKBP3A
													53	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DPPKBP3A
													54	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DPPKBP3A
				7	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87.65	87.66	87.67	87.67	55	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA.	DPPKBP3A
													56	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DPPKBP3A
													57	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DPPKBP3A
													58	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DPPKBP3A

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
						13	Nilai Kabupaten Layak Anak		600	625	650	650	59	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DPPKBP3A
													60	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DPPKBP3A
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	3	Persentase penduduk miskin	-		-	-	%	12.51	11.76	11.00	11.76			
				8	Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	14	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	51.57	51.62	51.66	51.66	61	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOSPERM ASDES
													62	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOSPERM ASDES
													63	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOSPERM ASDES
													64	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINSOSPERM ASDES
													65	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOSPERM ASDES
													66	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINSOSPERM ASDES
						15	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	%	86.17	87.17	88.17	88.17	67	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINPERKIM
													68	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN	DINPERKIM

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
														PERMUKIMAN KUMUH	
						16	Persentase penanganan korban bencana	%	100	100	100	100	69	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINPERKIM
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	4	Pertumbuhan Ekonomi	-		-	-	%	4.1	4.5	5.0	5.0			
				9	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan	17	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	4.49	4.51	4.52	4.52	70	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINPERINDAG
													71	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINPERINDAG
													72	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINPERINDAG
													73	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINPERINDAG
													74	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINPERINDAG
													75	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINPERINDAG
													76	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINPERINDAG

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
						18	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5.83	5.85	5.86	5.86	77	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINPERINDAG
													78	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINPERINDAG
													79	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	DINPERINDAG
				10	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	19	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	%	2.26	3.11	3.91	3.91	80	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINKANNAK
													81	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINKANNAK
													82	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINKANNAK
													83	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINKANNAK
													84	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINPERTAN KP
													85	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	DINKANNAK

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
														MASYARAKAT VETERINER	
													86	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINKANNAK
													87	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINKANNAK
															DINPERTAN KP
													88	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINKANNAK
															DINPERTAN KP
													89	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINPERTAN KP
													90	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	DINKANNAK
		5	PDRB per Kapita	-		-	-	juta rupiah	32.332	33.725	35.513	35.513			
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	6	Indeks Ketahanan Pangan	-		-	-		74.02	74.03	74.04	74.04			
				11	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	20	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	96	96	97	97	91	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINPERTAN KP
													92	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINPERTAN KP
													93	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINPERTAN KP
													94	PROGRAM PENGELOLAAN	DINPERTAN KP

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
														SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
													95	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINPERTANKP
6	Perwujudan kawasan peruntukan industri dan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	7	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	-		-	-	%	2	2	2	10			
				12	Meningkatnya investasi daerah	21	Nilai investasi daerah	Milyar Rupiah	500	545	600	600	96	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
													97	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
													98	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
													99	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
													100	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP
		8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-		-	-	%	5,75	5.00	4.50	4.50			
				13	Meningkatnya kesempatan berusaha	22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66.66	66.67	66.68	66.68	101	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DINAKERKOPUKM

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
														KABUPATEN/KOTA	
													102	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAKERKOP UKM
													103	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAKERKOP UKM
													104	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAKERKOP UKM
													105	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAKERKOP UKM
													106	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAKERKOP UKM
		9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-		-	-		63.97	64.06	64.15	64.15			
				14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup	23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		63.97	64.06	64.15	64.15	107	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
													108	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH
													109	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													110	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH
													111	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DLH
													112	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH
													113	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH
													114	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH
						24	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	%	24	26	27	27	115	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
				15	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	25	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99.983	99.984	99.985	99.985	116	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINPERKIM
													117	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINPERKIM
				16	Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim	26	Indeks Resiko Bencana		185	180	175	175	118	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD
													119	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	10	Persentase Kinerja Infrastruktur	-		-	-	%	73.75	83.46	88.01	88.01			
				17	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai	27	Persentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	84.40	86.29	88.20	88.20	120	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINPERKIM
													121	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINPERKIM
													122	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN.	DINPERKIM
													123	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINPERKIM

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
						28	Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan	%	66.67	91.67	100	100	124	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINHUB
													125	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINHUB
													126	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINHUB
						29	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	70.19	72.43	75.84	75.84	127	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPU
													128	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPU
													129	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DLH
													130	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DPU
													131	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPU

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													132	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINPERKIM
													133	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPU
													134	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINPERKIM
													135	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPU
													136	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DPU
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	11	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	-		-	-	%	4	5	7	7			
				18	Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	30	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	5.48	5.48	6.35	6.35	137	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINPORABUD PAR
													138	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINPORABUD PAR
													139	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINPORABUD PAR
						31	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	5	10	15	15	140	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINPORABUD PAR

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
				19	Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	32	Persentase Koperasi Sehat	%	28.88	30	31.11	31.11	141	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAKERKOP UKM
													142	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAKERKOP UKM
													143	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAKERKOP UKM
													144	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAKERKOP UKM
													145	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINAKERKOP UKM
						33	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0.244	0.249	0.254	0.254	146	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAKERKOP UKM
													147	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAKERKOP UKM
9	Meningkatkan	12	Angka	-		-	-	per	1,656	1,586	1,516	1,516			

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
	aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat		Kriminalitas					10.000 pendu duk							
				20	Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram	34	Persentase kriminalitas yang tertangani	%	5	5	5	25	148	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	KESBANGPOL
													149	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SATPOL PP KESBANGPOL
													150	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATPOL PP
													151	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	KESBANGPOL
													152	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
													153	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	KESBANGPOL
													154	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL
													155	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESBANGPOL
				21	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	35	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	68.68	85.29	100	100	156	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINPORABUD PAR
													157	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DINPORABUD PAR
													158	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINPORABUD PAR
													159	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINPORABUD PAR
													160	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINPORABUD PAR

No.	Tujuan	No.	Indikator Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	No.	Program	SKPD
				22	Meningkatnya peran dan daya saing pemuda	36	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	2.59	2.94	3.27	3.27	161	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINPORABUD PAR
													162	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINPORABUD PAR
													163	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINPORABUD PAR
													164	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINPORABUD PAR

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dicantumkan seluruh program baik yang bersifat strategis maupun operasional dan kinerjanya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target kinerja. Program strategis (Program pembangunan daerah) menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan, sedangkan program operasional murni menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Seluruh program yang tercantuk akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Penganggaran program perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

KAPASITAS RIIL / BELANJA	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
Kapasitas Riil Keuangan	**3.521.866.285.183**	**3.780.741.188.731**	**3.820.175.730.388**
Jumlah Belanja Daerah	**3.521.866.285.183**	**3.780.741.188.731**	**3.820.175.730.388**
Belanja Operasi	**2.625.051.619.039**	**2.565.718.382.458**	**2.600.608.604.011**
Belanja Pegawai	1.611.074.344.783	1.717.001.013.892	1.751.341.034.170
Belanja Barang dan Jasa	887.861.262.074	748.208.428.553	749.046.240.427
Belanja Bunga	10.900.000.000	11.270.000.000	10.090.000.000
Belanja Hibah	67.569.521.050	74.482.639.728	75.227.466.125
Belanja Bantuan Sosial	16.445.987.006	14.756.300.284	14.903.863.286
Belanja Modal	**586.424.819.264**	**562.497.317.025**	**564.291.127.345**
Belanja Tidak Terduga	**40.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
Belanja Transfer	**625.024.989.458**	**647.525.489.247**	**650.275.999.032**
Belanja Bagi Hasil	33.970.901.458	34.650.319.487	35.343.325.876
Belanja Bantuan Keuangan	591.054.088.000	612.875.169.760	614.932.673.155

Sumber : Bappedalitbang, BAPENDA dan BPKAD Kab. Banyumas, 2020

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2018-2023 terbagi menjadi 2 periode sebagai bentuk implementasi adanya regulasi Permendagri Nomor 90 Tahun

2019, yaitu tahun 2019 dan 2020, serta tahun 2021, 2022 dan 2023. Untuk tahun 2019-2020, rencana program prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam 4 urusan dan 37 urusan bidang/sub bidang, dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan Sedangkan untuk tahun 2021-2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

I. Periode Tahun 2019-2020

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Program prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Untuk mencapai indikator program yaitu: APK PAUD/RA/ Sederajat; Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi; Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alatmewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester; PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester; Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun; Rasio Guru terhadap murid PAUD.

Program diarahkan pada: Orientasi dan Koordinasi Penyelenggaraan PAUD Terpadu Holistik Integratif; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Kalibagor; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Purwokerto; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Ajibarang; Operasional Tim Manajemen BOP Kabupaten; Bantuan Biaya Operasional PAUD (BOP); Pembinaan Pendidikan Keluarga/Pokja Pendidikan Keluarga; Peningkatan Sarana Prasarana PAUD; Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat, PAUD Bertprestasi dan Gebyar PAUD; FasilitasBunda PAUD; Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Purwokerto; Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Ajibarang; Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Kalibagor; Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Kalibagor; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Purwokerto; Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Ajibarang; Operasional SKB Purwokerto; Operasional SKB Kalibagor; Operasional SKB Ajibarang; Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Ajibarang; Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Purwokerto; Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Kalibagor; Akreditasi Lembaga PAUD dan

Dikmas/PokjaAkreditasi Lembaga PAUD dan Dikmas; Bintek Pengembangan APE PAUD dan Pembelajaran PAUD Terpadu; Implementasi Pengarus utamaan Gender; Workshop Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas; Peningkatan Mutu Pendidikan Dikmas dan Kursus; Operasional TK Negeri Pembina 1 Purwokerto; Operasional TK Negeri Pembina 2 Purwokerto; Operasional TK Negeri Pembina Kober; Operasional TK Negeri Pembina Purwojati; Pengadaan Sarana Prasarana SKB (DAK); Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK); Bintek Penanganan ABK PAUD; Fasilitasi dan Visitas Sarpras PAUD dan Dikmas; Fasilitasi Program da PAUD dan Bindikel; Pembinaan Mutu Kelembagaan Dikmas dan Kursus; Fasilitas Dikmas dan Kursus; Fasilitasi Program da PAUD dan Bindikel; Fasilitasi Gugus PAUD dan PKG PAUD; Pendampingan Pelaksanaan DAK Bidang PAUD dan Dikmas; Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan; Bintek Akreditasi dan Standarisasi Lembaga Dikmas dan Kursus; Operasional Tim Manajemen BOP Kesetaraan.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A; Angka rata-rata Nilai UASBN SD; APK SD/MI/Paket A; Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi; Persentase Peningkatan Siswa SD Berprestasi; Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi; Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik.

Program diarahkan pada: Operasional Tim Managemen BOS SD; Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD; Pembangunan Prasarana SD; Rehabilitasi Prasarana SD; Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB; Penyelengaraan Lomba-Lomba Siswa dan Sekolah SD/SDLB; Penyelenggaraan Kurikulum 2013 SD; Penyelenggaraan Akreditasi SD; Fasilitasi Program Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat SD; Pembangunan Ruang Kantor, Ruang Belajar, dan Ruang Penunjang Lain SD; Pembangunan/Rehabilitasi Talud/Pagar Keliling SD; Pengadaan Sarana Pendidikan SD; BOS SD; Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK); Operasional Penyaluran Beasiswa SD.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat

Untuk mencapai indikator program yaitu : Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs/Paket B (13-15 tahun) ; Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B; Angka rata-rata Nilai UN SMP 59; APK SMP/MTs/Paket B; APM SMP/MTs/Paket B; Persentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi; Persentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi; Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi; Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik; Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester.

Program diarahkan pada: Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK); Operasional SMPN (71 SMPN); Penyusunan Perencanaan, DED, dan Pengawasan Jenjang SMP; Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SMP; Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP; Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP/MTs; Penyelenggaraan Lomba-lomba Siswa dan Sekolah SMP; Implementasi Kurikulum 2013 SMP/MTs; Rehabilitasi Ruang Kantor, Ruang Belajar, dan Ruang Penunjang Lain SMP; BOS SMP; OPERASIONAL/PELAKSANAAN AKREDITASI SMP/MTs; Gebyar Pendidikan Inklusi SMP; Manajemen/Pengelolaan Sekolah (SMP Negeri/Swasta); Pembinaan Kesiswaan SMP; Operasional Penyaluran Beasiswa SMP; Peningkatan Manajemen Sekolah SMP; Operasional Tim Manajemen BOS SMP.

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah; Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah; Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi; Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya; Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki ijasah minimal S1/DIV.

Program diarahkan pada: Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti; Pelaksanaan Sertifikasi, Penilaian Angka Kredit dan Pembinaan Ketenagaan; Penyelenggaraan Lomba Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal; Penilaian Kinerja dan Penyiapan Calon Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan; Peningkatan Kompetensi Pamong Belajar dan Penilik.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Tingkat capaian nilai LKJiP 83 Angka.

Program diarahkan pada: Penanganan Anak Putus Sekolah; Bangub Pendidikan; Gebyar Pendidikan Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus); Manajemen Pendataan Pendidikan; Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru; Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan; Pengadaan Tanah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; Bintek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Satuan Pendidikan.

6. Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Tingkat capaian koordinasi Koordinator Pendidikan Kecamatan; Program diarahkan pada. Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan (27 kecamatan).

b. Kesehatan

Program prioritas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Untuk mencapai indikator program yaitu: Angka Kematian Bayi; Angka Kematian Neonatal; Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan; Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.

Program diarahkan pada: Jaminan Persalinan (DAK); Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; Penguatan Puskesmas PONED (DAK Penugasan).

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan.

Program diarahkan pada: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) BKMIA, BKMM, BKPM (DAK); Bantuan Operasional Kesehatan pada 41 Puskesmas (DAK); Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (DAK).

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan; Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar; Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar.

Program diarahkan pada: Pengadaaan obat, perbekalan kesehatan dan reagen; Bantuan Operasional Kesehatan Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Distribusi Obat dan E-Logistik); Peningkatan Sarana Prasarana kefarmasian, obat dan perbekalan kesehatan serta operasional DAK Kefarmasian (DAK Farmasi); Operasional Unit Perbekalan Kesehatan dan Kefarmasian (UPKF); Pembinaan pengawasan obat, makanan dan minuman dan bahan berbahaya.

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri; Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga; Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS; Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat.

Program diarahkan pada: Pengembangan Media Promosi Kesehatan; Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan Bidang Kesehatan.

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan; Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin; Prevalensi balita stunting; Prevalensi gizi kurang .

Program diarahkan pada: Peningkatan Status Gizi Masyarakat; Stunting (DAK); BOK Stunting (DAK).

6. Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM; Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat; Persentase puskesmas melaksanakan STBM .

Program diarahkan pada: Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Untuk mencapai indikator program yaitu: Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO; Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk) < 0.05; Angka (notifikasi semua kasus TBC yang diobati (Case Notification Rate/ CNR) per seratus ribu penduduk; Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi; Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI); Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA; Cakupan pengobatan semua kasus TBC (% Case Detection Rate / CDR) yang diobati; Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar; Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC; Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Persentase pasien TBC yang mengetahui status HIV; Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ; Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Prevalensi tekanan darah tinggi; Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS; Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100.000 penduduk); Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk).

Program diarahkan pada: Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2); Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML); Peningkatan Imunisasi; Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah; Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; Pengendalian Penyakit (DAK).

8. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio dokter persatuan penduduk; Rasio tenaga medis persatuan penduduk.

Program diarahkan pada: Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan; Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan; Penyelenggaraan pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan; Pengadaan Tanah Puskesmas.

9. Program Pelayanan Kesehatan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin; Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK; Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan; Persentase Fasyankes primer/sekunder yang memberikan pelayanan sesuai standar; Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN; Persentase Puskesmas Terakreditasi .

Program diarahkan pada: Pengembangan Jamkesda; Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA); Pelayanan Kesehatan Rujukan; Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; Akreditasi Puskesmas; Peningkatan Mutu FKTP dan Akreditasi Labkesmas; Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM); Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai Kesehatan Penyakit Paru-paru Masyarakat (BKPM); Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA); Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Labkesmas; Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; Penambahan Operasional Labkesmas; Penambahan Operasional Puskesmas Purwojati; Penambahan Operasional Puskesmas Purwokerto Barat; Penambahan Operasional BKMIA; Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; Penambahan Operasional Puskesmas; Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; Penambahan Operasional Puskesmas Kecamatan.

10. Program peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya

Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan Puskesmas; Cakupan Puskesmas Pembantu; Rasio Puskesmas persatuan penduduk.

Program diarahkan pada: Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas; Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya (DAK Kesehatan Dasar); Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan rumah dinas; Pengadaan sarana dan prasarana Balai Kesehatan, Klinik dan Laboratorium kesehatan.

11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit).

Program diarahkan pada: Peningkatan Sarana Prasarana Balai Kesehatan Paru Masyarakat; Pengadaan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh Instalasi (DAK Rujukan); Pengadaan peralatan kesehatan di seluruh Instalasi dari Dana APBD; Pengadaan Peralatan Kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh instalasi dari dana APBD (ProvinsiRehabilitasi Gedung Thalasemia; Pengadaan tanah untuk pengembangan Rumah Sakit; Pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata/Indra; Pembangunan Gedung rawat Jalan Tahap 2 dari APBD; Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan Jantung dan Paru dari Dana DBHCHT.

12. Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan; Persentase SIK Fasyankes yang terintegrasi .

Program diarahkan pada: Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.

13. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

Untuk mencapai indikator program yaitu: Nilai Evaluasi SAKIP; Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan; Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Bagian Administrasi; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Penunjang; Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Medis .

Program diarahkan pada: Pelayanan Kesehatan dan pendukung Pelayanan Kesehatan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Presentase panjang jalan ditingkatkan kondisinya; Presentase panjang jalan yang terbangun.

Program diarahkan pada: Pembangunan dan peningkatan jalan 7 Wilayah; Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan/Jembatan; Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur Jalan/Jembatan (Bantuan Gubernur); Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan; Pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan.

2. Program Pembangunan turap/talud/brojong

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Panjang bangunan pengaman di daerah kritis di badan sungai.

Program diarahkan pada Perkuatan Tebing SDA dan Irigasi.

3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Presentase panjang jalan yang dipelihara.

Program diarahkan pada: Pemeliharaan Rutin Jalan; Pemeliharaan Berkala Jalan; Pemeliharaan Rutin Jalan 7 Wilayah; Perencanaan Teknis Bidang Pemeliharaan Jalan/ Jembatan; Pemberdayaan Forum Masyarakat Peduli Jalan; Inspeksi Jalan; Sosialisasi Sempadan Jalan.

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan air irigas untuk pertanian rakyat pada sistemirigasi yang sudah ada; Persentase luas irigasi kabupaten yang dilakukan rehabilitasi.

Program diarahkan pada: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Dana Alokasi Khusus Bidang SDA dan Irigasi; Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur SDA dan Irigasi (Bantuan Gubernur); Pembangunan dan Pengembangan Irigasi; Pengadaan tanah untuk pembangunan irigasi; Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; Pemeliharaan ringan jaringan irigasi 7 Wilayah; Pemberdayaan GP3A; Perencanaan Teknis Bidang SDA dan Irigasi; Pengelolaan IPDMIP Kabupaten Banyumas.

5. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah embung dalam kondisi baik.

Program diarahkan pada: Pembangunan embung/situ; Rehabilitasi embung/situ/mata air; Pengadaan tanah untuk pembangunan embung/situ.

6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah kelompok masyarakat peduli sungai yang aktif.

Program diarahkan pada: Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur SDA dan Irigasi; Inspeksi SDA dan Irigasi; Pembinaan Masyarakat Peduli Sungai.

7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina/Persentase jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina. Program diarahkan pada Pembinaan Jasa Konstruksi.

8. Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penambahan jumlah jembatan.

Program diarahkan pada: Pembangunan dan Penggantian Jembatan Kabupaten; Pengadaan tanah untuk pembangunan Jembatan; Pembangunan bangunan pengaman jembatan Kabupaten.

9. Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jembatan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jembatan kabupaten yang dipelihara.

Program diarahkan pada: Rehabilitasi Jembatan; Pengadaan bahan konstruksi Jembatan; Pemeliharaan Rutin Jembatan 7 Wilayah.

10. Program Pembangunan Bangunan pelengkap jalan/jembatan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penambahan panjang trotoar dan drainase.

Program diarahkan pada: Pembangunan Trotoar/ Saluran Drainase/Gorong-Gorong Jalan; Pembangunan Bangunan pelengkap jalan/jembatan; Pemeliharaan Trotoar/Drainase/ Gorong-gorong Jalan; Pemeliharaan Bangunan pelengkap jalan/jembatan.

11. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang tertangani.

Program diarahkan pada: Pembangunan Gedung Milik Pemkab Banyumas; Pemeliharaan Gedung Milik Pemkab Banyumas; Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor Kecamatan; Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor Kelurahan; Perencanaan Teknis Bidang Tata Bangunan.

12. Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase bangunan pemerintah yang ber-IMB.

Program diarahkan pada: Inventarisasi Bangunan; Pelayanan Operasional Rekomtek Bangunan; Inspeksi Gedung Pemerintah.

13. Program Peningkatan Perencanaan Teknis

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina/Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.

Program diarahkan pada: Perencanaan Teknis DPU; Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Penataan Ruang; Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase panjang drainase yang dibangun.

Program diarahkan pada Pemeliharaan Drainase; Pembangunan Drainase.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio rumah layak huni; Cakupan ketersediaan rumahlayakhuni; Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau; Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU.

Program diarahkan pada: Fasilitasi Peningkatan Kualitas Perumahan; Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Pengembangan Perumahan; Fasilitasi Penyediaan/Pembangunan Perumahan dan PSU Perumahan; Peningkatan dan Pemeliharaan PSU Perumahan; DAK Bidang Perumahan dan Permukiman; Pendamping DAK Bidang Perumahan dan Permukiman.

2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan; Persentase rumah tinggal beraksessanitasi; Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik.

Program diarahkan pada: 1. Pendamping Operasional Program PAMSIMAS; 2. Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Penyehatan Lingkungan; 3.Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Air Bersih; 4.Pembangunan/ Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Air Limbah; 5. Pembangunan dan Pengelolaan IPLT; 6. Pendamping Operasional Program Sarpras Air Limbah; 7. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman; 8. DAK Bidang Sanitasi; 9. Pendamping DAK Bidang Sanitasi; 10.DAK Bidang Air Minum; 11. Pendamping DAK Bidang Air Minum; 12. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan; 13. Program Hibah sAIIG.

3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Asosiasi Pengelola Sarana Air Minum dan Sarana Air Limbah yang aktif .

Program diarahkan pada: Pembinaan dan Fasilitasi BP SPAM; Pembinaan dan Fasilitasi BP SPALD.

4. Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio permukiman layak huni; Persentase lingkungan pemukiman kumuh Kawasan perkotaan; Persentase penanganan permukiman kumuh; Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan; Persentase areal Kawasan kumuh; Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk.

Program diarahkan pada: Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum; Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan; Perencanaan Teknis, Pendataan dan Operasional Bidang Pengembangan Permukiman; Pendamping Operasional KOTAKU; Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kawasan Permukiman; Pembangunan/ Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase wilayah kecamatan/desa yang kondisi nyaman; Persentase konflik sosial yang terselesaikan.

Program diarahkan pada: Operasional Crisis Centre (Tim terpadu); Pembekalan dan Pemantapan Fungsi Jaring Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing; Silaturahmi Muspida dengan Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.

2. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; Persentase lembaga keagamaan aktif.

Program diarahkan pada: Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat; Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa; Orientasi ketahanan bangsa, nilai-nilai nasionalisme dan Bela Negara; Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan; Fasilitasi Ormas dan LSM; Fasilitasi FKUB; Pembinaan Aliran Kepercayaan dan Umat Beragama.

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada.

Program diarahkan pada: Fasilitasi Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik; Sarasehan Demokrasi.

4. Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penanganan pelanggaran PERDA; Jumlah warga negara yang memperoleh layanana kibat dari penegakan hukum PERDA dan Perkada.

Program diarahkan pada: Penyuluhan peraturan-peraturan daerah yang mengandung sanksi hukum; Pengawasan perijinan; Pemantauan dan pengawasan cukai illegal; Penegakan Produk

Hukum Daerah; Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran produk hukum daerah.

5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum; Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP; Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP .

Program diarahkan pada: Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala missal; Pengamanan terpadu; Patroli ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; Penjagaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Daerah; Penegakan Disiplin PNS.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas).

Program diarahkan pada: Pemberdayaan anggota linmas dalam penanggulangan bencana dan ketertiban masyarakat; Operasional dan Pembinaan SATLINMAS; Penyelenggaraan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas.

7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten; Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK); Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Program diarahkan pada: Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran; Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; Operasional UPT Pemadam Kebakaran; Pembangunan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat; Rasio pengurangan resiko bencana; Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap .

Program diarahkan pada: Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam; Posko siaga dan penanganan darurat bencana; Bimbingan teknis penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana; Pengembangan desa tangguh bencana; Pengembangan Forum Resiko Bencana; Bintek SAR dan latihan

gabungan penyelamat, evakuasi dan penanganan darurat; Sosialisasi dan fasilitasi simulasi penanganan darurat bagi pelajar; Dana Siap Pakai (DSP) pada Tahap Tanggap Darurat Bencana; Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana; Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana; Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam; Penyusunan Perencanaan Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; Rencana kontigensi bencana longsor; Pembangunan Sarana dan Prasarana Antisipasi Bencana.

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kecamatan yang telah memiliki petarawan bencana; Informasi petarawan bencana.

Program diarahkan pada: Pembuatan Peta Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Banyumas.

f. Sosial

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase PMKS non potensial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS potensial yang telah berusaha/bekerja; Persentase PMKS yang berubah sikap perilakunya; Persentase PMKS yang mendapat perlindungan; Persentase anak yatim dan berkebutuhan khusus/difabel yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; Persentase penyandang disabilitas yang meningkat fungsi fisiknya; Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; Persentase PMKS yang tertangani; Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar; Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya; Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat; Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap; Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial; Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti; Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti; Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti; Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti; Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

Program diarahkan pada: Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana; Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; Penyusunan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK ke panti rehab social; Pengiriman anak nakal, remaja rawan narkoba dan anak terlantar ke panti rehab social; Fasilitasi orang terlantar (PGOT) dan Fasilitasi penguburan jenazah terlantar; Fasilitasi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migrant; Fasilitasi kegiatan operasional dan sarana Tagana; Penanganan Pasca Bencana dan Penyelesaian Permasalahan Sosial Lainnya; Pelatihan satuan tugas kaji bencanan/gladi lapang penanggulangan bencana dan sosialisasi dampak sosial dan penanganan bencana; Sosialisasi Pendampingan Sosial dan Pendampingan Psikososial Korban Bencana Alam; Pencegahan dan Penanganan Bencana Sosial; Pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal dan pelatihan keterampilan bagi remaja sekolah dari keluarga tidak mampu; Sosialisasi prosedur pengangkatan anak dan proses pelayanan adopsi; Pembinaan dan pelatihan lansia potensial bermasalah sosial ekonomi; Fasilitasi Operasional dan Sarana Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyumas; Fasilitasi Permakanan dan Minuman bagi Lansia Non Potensial dan Balita Terlantar; Pemenuhan sarana dan prasarana perawatan para penyandang disabilitas dan trauma; Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma potensial; Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; Pembinaan dan Bimbingan Keterampilan bagi Anak dan Remaja di Panti Asuhan; Pemenuhan sarana dan prasarana panti sosia; Pemberdayaan eks penyandang penyakit social; Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang; Keserasian Sosial; Failitasi Pelayanan Publik Bidang Sosial.

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase lembaga masyarakat yang aktif berperan dalam pembangunan; Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Program diarahkan pada: Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha; Pembinaan Karang Taruna, PSM dan Saka Bina Sosial; Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan PSKS; Penyusunan Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; Fasilitasi Perijinan Pengumpulan Sumbangan Sosial; Peningkatan Kepasitas *(Capacity Building)* Petugas dan Pedamping Sosial. Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemberdayaan PMKS lainnya.

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Fakir Miskin (FM) yang telah berusaha bekerja; Persentase Lanjut Usia Miskin/ terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Program diarahkan pada: Assesment Psikososial dan Advokasi serta Bimbingan Sosial Bagi Fakir Miskin; Operasional dan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH); Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan monitoring dan evaluasi serta bimbingan lanjut bagi penanganan fakir miskin; Fasilitasi manajemen bagi fakir miskin dan sosialisasi peningkatan kebutuhan dasar yang layak; Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat daerah kumuh; Fasilitasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; Pemberdayaan Masyarakat pada komunitas adat terpencil.

4. Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase masyarakat dan generasi muda yang sadar akan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; Nilai kondisi TMP terhadap standar nasional.

Program diarahkan pada: Pembinaan nilai-nilai kesetia kawanan sosial bagi generasi muda; Perbaikan dan perawatan Taman Makam Pahlawan; Sarasehan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, pembinaan bagi keluarga pahlawan perintis dan veteran dan pembinaan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi veteran.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (17 Urusan Bidang)

a. Tenaga Kerja

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan.

Program diarahkan pada: Pelatihan Otomotif; Pelatihan Elektronik Atau Handphone; Pelatihan Prosesing Hasil Pertanian; Pelatihan Menjahit; Pelatihan Las; Pelatihan Tata Rias Pengantin; Pelatihan Kejuruan Menjahit Garmen; Operasional UPT BLK; Pelatihan Ulat Sutra; Pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase lowongan kerja yang terpenuhi.

Program diarahkan pada: Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan; Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan; Penyebarluasan Informasi Bursa

Tenaga Kerja; Pendataan Jumlah Penganggur; Identifikasi Lowongan Kerja; Fasilitasi AKAD/AKL; Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja.

3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia (P3MI) yang procedural.

Program diarahkan Pada: Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja; Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan; Fasilitasi AKAN dan penyelesaian CTKI/TKI.

4. Program Perlindungan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase perusahaan yang melaksanakan ketentuan UMK; Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun; Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama.

Program diarahkan Pada: Monitoring UMK dan THR, usulan dan sosialisasi UMK; Pembinaan Struktur Skala Upah dan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja; Pencegahan, Fasilitas dan Penyuluhan Tata cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Pembinaan Sarana Industrial dan Outsourching dan May Day; Pelatihan Penguatan Organisasi Buruh.

5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Untuk mencapai indikator program yaitu: Presentase koperasiaktif.

Program diarahkan pada: Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; Pembinaan dan pengawasan koperasi; Penilaian Kesehatan koperasi.

6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina.

Program diarahkan pada: Fasilitasi Pendampingan Pinjaman dana bergulir; Perencanaan UMKM dan Pengembangan OVOP Kabupaten Banyumas; Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah; Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengawasan Usaha Kecil dan Menengah; Fasilitasi pengembangan inkubatorteknologi dan bisnis; Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; Sosialisasi HALAL kepada Usaha Mikro Kecil Menengah.

b. Transmigrasi

1. Program Pengembangan dan PenempatanTransmigrasi

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase transmigran yang ditempatkan.

Program diarahkan pada: Peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sector dalam rangka pengembangan Kawasan transmigrasi; Pendaftaran, seleksi, pembekalan dan pemberangkatan calon transmigran umum.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Untuk mencapai indikator program yaitu: Jumlah kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan) 32 kelompok; Rasioanak korban kekerasan; Preferensi kekerasan pada anak perempuan.

Program diarahkan pada: Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas perlindungan khusus anak; Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

2. Program Penguatan Pengarusutamaan Gender

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kelembagaan PUG yang aktif; Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan; Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG.

Program diarahkan pada: Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan Gender (KKG); Advokasi dan Evaluasi PUG; Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak.

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio perempuan korban kekerasan; Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sesuai standar; Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah; Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 24 0rang; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit; Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum ; Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan; Rasio KDRT.

Program diarahkan pada: Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A); Penyelengaraan Gerakan Sayang Ibu dan PP ASI; Pelaksanaaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah; Pembinaan Organisasi Perempuan.

d. Pangan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Cadangan Pangan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Stabilitas harga dan pasokan pangan; Tingkat ketersediaan energi; Tingkat ketersediaan protein; Persentase Penanganan daerah rawan pangan.

Program diarahkan Pada: Penanganan daerah Rawan Pangan; Pendukunga TNI (TMMD) untuk Pertanian; Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan; Pengembangan cadangan pangan Daerah.

2. Program Peningkatan Pola Pangan Harapan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Konsumsi protein; Konsumsi Energi; Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

Program diarahkan pada: Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan; Penyusunan Pola Pangan Harapan; Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

e. Pertanahan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase luas tanah milik Pemkab yang bersertifikat.

Program diarahkan pada: Fasilitasi Administrasi Pertanahan; Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum.

f. Lingkungan Hidup

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah sampah yang tertangani; Persentase cakupan area pelayanan

persampahan; Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R; Timbulan sampah yang ditangani.

Program diarahkan pada: Perencanaan Teknis Bidang Kebersihan dan Persampahan; Penyusunan Laporan Periodik Sampah; Pembangunan Gedung UPT KP, TPS dan TPST di Kabupaten Banyumas; Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Persampahan; Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Fasilitasi Program Kota Adipura; Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana UP TPST.

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase RTH publik; Persentase RTH layak anak

Program diarahkan pada: Pembangunan/Pengembangan RTH di Kabupaten Banyumas; Perencanaan Teknis Pertamanan; Pemeliharaan Taman se-Kabupaten Banyumas.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan; Persentase kegiatan monitoring/pengawasan kegiatan pelakuusaha dan/atau kegiatan.

Program diarahkan pada: Pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kepada Masyarakat; Fasilitasi kegiatan dalam rangka memperingati Hari-hari Lingkungan Hidup; Pembinaan dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata; Pemantauan Kualitas Lingkungan; Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Lingkungan Hidup.

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pembangunan sumur resapan dan pengadaan alat biopori; Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan biomassa.

Program diarahkan pada: Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air; Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem; Penyusunan informasi kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa; Pemetaan Sumber Mata Air; Pemetaan Lahan Kritis.

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase dokumen lingkungan yang diterbitkan; Persentase sengketa lingkungan hidup yang ditangani; Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kota lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten kota.

Program diarahkan pada: Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan; Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Fasilitasi/Sosialisasi pengelolaan Lingkungan Hidup; Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); Inventarisasi Gas RumahKaca (GRK); Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD); Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

6. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Purwokerto yang ditangani.

Program diarahkanpada: Operasional UPKP Wilayah Purwokerto.

7. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Banyumas

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Banyumas yang ditangani. Program diarahkan pada: Operasional UPKP Wilayah Banyumas.

8. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajibarang

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Ajibarang yang ditangani.

Program diarahkan pada: Operasional UPKP Wilayah Ajibarang.

9. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wangon

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Wangon yang ditangani. Program diarah kanpada: Operasional UPKP Wilayah Wangon.

10. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpiuh

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Sumpiuh yang ditangani. Program diarahkan pada: Operasional UPKP Wilayah Sumpiuh.

11. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sejumlah sampah di wilayah Kembaran yang ditangani. Program diarahkan pada: Operasional UPKP Wilayah Kembaran.

12. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA/TPST

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi fisik program; Persentase realisasi keuangan program; Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota.

Program diarahkan pada: Operasional PemeliharaanKebersihan/ Persampahan UPT TPST.

13. Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi fisik program; Persentase realisasi keuangan program.

Program diarahkanpada: Operasional UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.

g. Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi Adminduk

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kecamatan yang update database kependudukan; Persentase ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten.

Program diarahkan pada: Operasional SIAK Secara Terpadu; Pembinaan, Pengendalian, Pengolahan dan Penyajian Data Penduduk.

2. Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pemohon Kartu Keluarga yang terlayani; Persentase pemohon KTP-Elektronik yang terlayani; Persentase pemohon Kartu Identitas Anak yang terlayani; Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk; Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK; Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Program diarahkan pada: Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan; Peningkatan Pelayanan Peristiwa Kependudukan; Pengadaan Ribbon Printer; Pengadaan Blanko Kartu Identitas Anak; Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK); Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil.

3. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase instansi pengguna data kependudukan yang melakukan perjanjian kerjasama.

Program diarahkan pada: Penataan arsip dan dokumen pencatatan sipil; Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

4. Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pemohon akta kelahiran yang terlayani; Persentase pemohon akta kematian yang terlayani; Persentase pemohon akta perkawinan yang terlayani; Rasio bayi berakte kelahiran; Rasio pasangan berakte nikah; Cakupan penerbitan akta kelahiran.

Program diarahkan pada: Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil; Pelayanan Perkawinan Pencatatan Sipil.

h. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase desa yang terpelihara kelestarian adatnya; Persentase desa yang menghasilkan produk unggulan; Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM; Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK; Persentase LPM aktif; Persentase LPM berprestasi; Persentase PKK aktif .

Program diarahkan pada: Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan; Pembinaan Kelembagaan Posyandu; Fasilitas PKK; Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui kearifan lokal; Fasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Banyumas.

2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase aparatur desa yang meningkat kapasitasnya dalam membentuk kawasan perdesaan .

Program diarahkan pada: Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Untuk mencapai indikator program yaitu: Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017); Kelembagaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang terbentuk 2 lembaga; Persentase kader pemberdayaan masyarakat desa yang meningkat kapasitasnya; Raperda kawasan perdesaan yang tersusun; Kelulusan sarjana per desa.

Program diarahkan pada: Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Desa; Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pendampingan Masyarakat Desa; Fasilitasi perencanaan pembangunan parsitipatif dan pembangunan kawasan pedesaan; Fasilitasi dan Pelatihan pembentukan BKD/ BKAD pengelola dan pengembang potensi desa pendukung pembentukan kawasan perdesaan.

4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase desa yang membentuk Bumdes; Persentase Bumdes yang meningkat stratanya; Persentase Pasar Desa yang terbangun; Persentase petani tembakau/cengkih yang dapat meningkatkan kuantitas/kualitas produksi.

Program diarahkan pada: Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Pedesaan;

Pembinaan Lingkungan Sosial (Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Pada Pelaku Usaha Ekonomi Produktif).

5. Program Peningkatan Partisispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase desa yang meningkat prasarananya; Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Program diarahkan pada: Fasilitas TMMD dan Bhakti TNI; Pendampingan Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan.

6. Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase desa yang telah mengembangkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat desa; Persentase desa yang telah mengembangkan/memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk usaha perdesaan; Persentase kecamatan yang telah membentuk posyantek antar desa; Persentase desa yang telah membentuk Posyantek desa.

Program diarahkan pada: Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Pedesaan; Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat; Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

7. Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase aparatur desa yang terbina; Persentase desa dengan administrasi baik.

Program diarahkan pada: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemdes; Pembinaan Administrasi Desa; Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan Penyelesaian Aset Desa; Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

i. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB; Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan; Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB; Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk; Rata-rata jumlah anak perkeluarga; Rasio Ketergantungan.

Program diarahkan pada: Fasilitasi kelompok masyarakat peduli KB; Pengadaan Sarana, Pengolahan dan Pelaporan data/Informasi Program KKBPK; Pelayanan KIE Program KKBPK;

Pembinaan bagi petugas dan Kader tentang Program KKBPK; Bantuan Operasional KB.

2. Program Pelayanan Keluarga Berencana

Untuk mencapai indikator program yaitu : Rasio Akseptor KB; Angka Kelahiran Total TFR; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun 5606 orang; Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi; Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 4; Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB ; Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun ; Angka kelahiran remaja (perempuanusia 15-19 tahun) per 1000 perempuanusia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun).

Program diarahkan pada: Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR); Peningkatan kapasitas dan kelembagaan KRR; Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB; Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan; Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Di masyarakat; Pengadaan Sarana mobilitastim KB Keliling (DAK).

j. Perhubungan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase berfungsinya fasilitas kelengkapan jalan dengan baik.

Program diarahkan pada: Operasional Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan; Pemeliharaan Halte Bus; Rehabilitasi/Perbaikan Terminal Tipe C; Operasi dan Pemeliharaan/Perbaikan LPJU; Pendataan LPJU; Retrovit dan Meterisasi LPJU; Pengadaan Mobil Tangga.

2. Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio ijin trayek.

Program diarahkan pada: Perencanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas; Fasilitasi Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Operasional Perizinan Angkutan; Fasilitasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran; Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ KabupatenBanyumas; Pembinaan Jasa Usaha Angkutan Umum; Penyusunan Masterplan Angkutan Umum Di Kabupaten Banyumas; Penyusunan Dokumen Evaluasi Trayek dan Kebutuhan Angkutan Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Banyumas; Operasional Bus Sekolah.

3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan; Persentase ketersediaan terminal; Persentase pemasangan rambu-rambu; Presentase berfungsinya APJ yang terpasang dengan baik.

Program diarahkan pada: Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan; Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas; Pengadaan dan Penggelaran Marka Jalan; Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan; Pengadaan Alat Pengaman Pengguna Jalan; Pengadaan Fasilitas Pendukun LLAJ; Pembangunan Halte Bus; Pembangunan Rest Area; Pembangunan Terminal Type C; Pengembangan LPJU; Pembangunan Shelter/Halte Bus Aglomerasi Koridor Purwokerto–Purbalingga; Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Terminal Purwokerto; Bantuan Keuangan Pembangunan Terminal Tipe C (Bantuan Gubernur); Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK).

4. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas; Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunya istandar keselamatan sesuai UU LLAJ.

Program diarahkan pada: Pengadaan ATCS; Pengadaan Trafficlight; Kajian Manajemen dan RekayasaLalu Lintas Perlintasan Sebidang KA; Trafficlight Responsive ATCS; Pengadaan Sarana Derek; Pembinaan Keselamatan LLAJ; Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan; Operasional Pengawasan, Pengamanan, Pengaturan, Penertiban dan Pengendalian LL (P5LL); Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor; Operasional dan Pemeliharaan/Perawatan ATCS; Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Keselamatan Lalu Lintas; Pembinaan Usaha Perbengkelan dan Kendaraan Tak Bermotor; Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan; Penertiban Parkir.

5. Program Peningkatan Kelaikan Pengeoperasian Kendaraan Motor

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor.

Program diarahkan pada: Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor; Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor; Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor; Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor (DAK).

6. Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan.

Program diarahkan pada: Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Terminal Bus Purwokerto; Operasioanal Terminal Tipe C; Operasioanal Perparkiran; Operasional Terminal

Angkutan Pedesaan dan Perkotaan Di Bulupitu; Operasional UPTD Sarana dan Prasarana.

k. Komunikasi dan Informatika (6 Program)

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan E-Government

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Perangkat Daerah yang mengelola system informasi secara baik.

Program diarahkan pada: Fasilitasi Pengembangan Aplikasi; Pengembangan Ekosistem E-Government; Penyelenggaraan Tata Kelola E-Government; Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic.

Program diarahkan pada: Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data; Pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet, Web Hosting dan Updating Data Website; Pengembangan Data Center, NOC dan Data Recovery Center.

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas.

Program diarahkan pada: Pemberdayaan SDM Masyarakat Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi; Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat dan Diseminasi Informasi; Kegiatan Non Fisik dalam rangka TMMD.

4. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Perangkat Daerah yang memberikan aksesin formasi publik; Rasio Lapak aduan public berbasis IT.

Program diarahkan pada: Pengelolaan Opini dan Aduan; Penyebarluasan Informasi Layanan Publik; Penyelenggaraan PPID; Updating Monitoring Website; Informasi Layanan Cukai; Operasional Videotron; Penerbitan Tabloid Pemda; Pembuatan Konten Media Informasi; Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

l. Penanaman Modal

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Untuk mencapai indikator program yaitu: Jumlah Investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas.

Program diarahkan pada: Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan investasi pemerintah dan dunia usaha; Penyelenggaraan Promosi Investasi; Fasilitasi Penanaman Modal; Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanaman Modal.

2. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP).

Program diarahkan pada: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Ekonomi; Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pembangunan; Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesra dan Lingkungan Hidup.

3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasaranan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Jumlah sektor potensi investasi yang tergali potensi peluang investasi .

Program diarahkan pada: Penyusunan Buku Profil/Peluang Investasi Daerah; Penyediaan Gerai Investasi; Kajian Rencana Umum Penanaman Modal.

4. Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penanganan pengaduan.

Program diarah kanpada: Sosialisasi Penanaman Modal; Penyelesaian Aduan Perizinan; Peningkatan Pelayanan Perizinan.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase organisasi pemuda yang aktif.

Program diarah kanpada: Pembinaan Organisasi Kepemudaan; Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan; Fasilitasi Pemuda; Penyusunan Peraturan Kepemudaan.

2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pertumbuhan wirausaha muda.

Program diarahkan pada: Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda.

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sarana prasarana kepemudaan yang tersedia .

Program diarahkan pada: Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemuda; Pembangunan Gedung Pemuda (APBN).

4. Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga

Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan pelatih bersertifikasi level dasar; Cakupan pelatih bersertifikasi level.

Program diarahkan pada: Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan; Penyusunan Peraturan Keolahragaan.

5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Untuk mencapai indikator program yaitu: Cakupan pembinaan atlet muda/pelajar; Persentase cabang olahraga yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional; Persenta sepeningkatan perolehan medalitingkat Provinsi dan Nasional

Program diarahkan pada: Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; Pemassalan Olah raga bagi Mahasiswa dan Masyarakat; Pengembangan Olahraga Rekreasi.

6. Program Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah venue olahraga yang sesuai standart.

Program diarahkan pada: Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga; Operasional GOR Satria; Pembangunan Lapangan Indoor Tenis (APBN).

n. Statistik

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase keterisian Daftar Informasi Publik; Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah.

Program diarahkan pada: Penyusunan Data dan Informasi Kabupaten Banyumas; Penyelenggaraan Statitistik Sektoral Kabupaten Banyumas; Pengembangan Sistem Interoperabilitas.

o. Persandian

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan Informasi

Untuk mencapai indikator program yaitu: Standarisasi Keamanan Data ISO 27001 17 anek.

Program diarahkan pada: Penanganan Keamanan Informasi Audit TIK; Pemeliharaan Peralatan Sandi Dan Telekomunikasi; Pembangunan Dan Pemeliharaan Repeater Telekomunikasi; Optimalisasi Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi.

p. Kebudayaan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi.

Program diarahkan pada: Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati.

Program diarahkan pada: Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala dan Museum; Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesenian; Penyusunan Peraturan Kebudayaan; Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK).

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jenis kesenian yang dilestarikan; Persentase jenis kesenian yang dipentaskan.

Program diarahkan pada: Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah; Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah; Pembuatan Karya Cetak dan Karya Rekam Budaya Daerah; Gelar Budaya; Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya.

q. Perpustakaan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Indek Kepuasan Masyarakat IKM Layanan Perpustakaan; Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah; Persentase sejumlah perpustakaan terbina.

Program diarahkan pada: Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan; Penyediaan, Pengolahan, Pemeliharaan sarana dan prasarana pustaka; Layanan Perpustakaan Keliling; Pengembangan Budaya Literasi dan Minat Baca.

r. Kearsipan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Untuk mencapai target indikator pada: Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas; Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar.

Program diarahkan pada: Pembinaan Kearsipan di Unit Kerja/OPD; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kearsipan; Pembenahan Kearsipan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan (6 Urusan Bidang)

a. Kelautan dan Perikanan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Produksi Perikanan Budidaya; Persentase Kelompok Budidaya bersertifikat; Peningkatan jumlah kelompok yang naik kelas.

Program diarahkan pada: Pengembangan Perikanan Budidaya; Pengembangan Sarpras dan kawasan Perikanan; Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan; Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten); Pengadaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kelompok pengolah dan pemasaran Poklahsar hasil perikanan yang terbina ; Persentase Kelompok Usaha Perikanan bersertifikat; Peningkatan angka konsumsi ikan; Produksi olahan hasil perikanan.

Program diarahkan pada: Pengembangan Minabisnis Perikanan; Peningkatan Daya Saing Hasil Produksi Perikanan; Peningkatan Gemar ikan.

3. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

Untuk mencapai indikator program yaitu: Produksi Perikanan Tangkap 898 Ton; Jumlah Perairan Umum yang terRestocking ikan 20 lokasi.

Program diarahkan pada Pengembangan Perikanan Perairan Umum.

4. Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase peningkatan produksi benih ikan; Produksi calon induk gurame.

Program diarahkan pada: Operasional UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar.

b. Pariwisata

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase peningkatan promosi pariwisata.

Program diarahkan pada: Pelaksanaan Promosi Pariwisata; Penyelenggaraan Festival Pariwisata.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase tingkat layanan destinasi wisata.

Program diarahkan pada: Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata; Pengamanan Gabungan Obyek-Obyek Wisata; Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK); Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan (DAK); Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas Pariwisata (DAK); Operasional UPT Purwomas; Operasional UPT Lokawisata Baturraden.

3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase peningkatan SDM kepariwisataan yang bersertifikasi.

Program diarahkan pada: Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata; Pengembangan Ekonomi Kreatif.

c. Pertanian

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kelompok tani terlatih yang menerapkan tekhnologi. Program diarahkan pada: Pengembangan Mekanisasi Pertanian; Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian; DAK Pertanian.

2. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian

Untuk mencapai indikator program yaitu: Jumlah Produksi Hasil olahan produk pertanian. Program diarahkan pada Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian.

3. Program Perlindungan Tanaman

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penurunan serangan OPT. Program diarahkan pada: Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

4. Program Pengembangan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Produksi tanaman kelapa deres 55.388.89 Ton; Produksi tanaman kelapa dalam 14.174.53 Ton; Produksi tanaman kopi 1434 Ton; Produksi tanaman pala 462 Ton; Produksi tanaman lada 655 Ton; Produksi tanaman cengkeh 4897 Ton; Produksi tanaman tembakau Ton; Rasio jumlah petani pengguna safety belt.

Program diarahkan pada Pengembangan Perkebunan Tanaman Tahunan; Pengembangan Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah; Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan; Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau.

5. Program Pengembangan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Untuk mencapai indikator program yaitu: Produksi tanaman Durian 9.879.020 Ton; Produksi tanaman Pisang 27.599.790 Ton; Produksi tanaman Cabai 1.832.500 Ton; Produksi tanaman Padi 425.000 Ton; Produksi tanaman Jagung 13.400 Ton; Produksi tanaman Kedelai 1.609.340 Ton;Produktivitas tanaman Padi 89 Ton/ha; Produktivitas tanaman Jagung 46 Ton/ha; Produktivitas tanaman Kedelai 38 Ton/ha.

Program diarahkan pada Pengembangan Pertanian Hortikultura; Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan.

6. Program Penyediaan Benih Pertanian

Untuk mencapai indikator program yaitu: Jumlah komoditas pertanian yang dibuat perbenihan 3 jenis. Program diarahkan pada: Operasional UPT Balai Benih Pertanian.

7. Program PemberdayaanPetani dan Penyuluh Pertanian

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penyuluh pertanian terlatih. Program diarahkan pada: Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian; Penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan; Pengembangan balai penyuluhan kecamatan; Pengembangan kemampuan petani dan lembaga petani; Pengembangan kelembagaan petani IPDMIP.

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penurunan Angka kesakitan Ternak Besar; Persentase penurunan Angka kesakitan ternak Kambing dan Domba; Persentase penurunan Angka kesakitan ternak ayam; Persentase penurunan Angka kematian ternak Ternak Besar; Persentase penurunan Angka kematian ternak Kambing dan Domba; Persentase penurunan Angka kematian ternak ayam.

Program diarahkan pada: Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Kesehatan Veteriner; Pembangunan/Rehabilitasi Sarana prasarana PUSKESWAN; Pembangunan Rehabilitasi sarana prasrana RPH.

9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Populasi Sapi Potong 15.224 Ekor; Populasi Sapi Perah 2.418 Ekor; Populasi Kambing 175.734 Ekor; Populasi Domba 16.115 Ekor; Populasi Ayam Buras 1.118.125 Ekor; Populasi ayam Pedaging 8.707.867 Ekor; Populasi Ayam Petelur 14.813.940 Ekor; Populasi Itik 150.713 Ekor.

Program diarahkan pada: Pembinaan dan Pengembangan Peternakan; Pembangunan Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak; Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan.

10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kelompok ternak terlatih yang menerapkan teknologi.

Program diarahkan pada: Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna.

11. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) hasil peternakan yang terlatih; Persentase kelompok usaha peternakan berijin; Produksi olahan hasil peternakan 520.210 Ton.

Program diarahkan pada: Pengembangan Agribisnis Peternakan; Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

12. Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kenaikan ketersediaan bibit hijauan pakan ternak yang unggul; Persentase kenaikan ketersediaan bibit sapi perah.

Program diarahkan pada: Operasional UPT Perbibitan Ternak dan HPT.

13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Pelayanan Kesehatan Hewan.

Program diarahkan pada: Operasional UPT Puskeswan.

14. Program Penyediaan Daging Ternak ASUH

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pengawasan pemotongan ternak di RPH. Program diarahkan pada Operasional UPT Rumah Potong Hewan.

d. Perdagangan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri**

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Industri Kecil dan Menengah yang diikutkan dalam pameran; Persentase usaha perdagangan yang dibina dan diawasi.

Program diarahkan pada: Promosi Dagang dan Industri; Pasar Murah; Sosialisasi Perijinan di Sektor Perdagangan; Monitoring Harga; Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Pengawasan dan Pengendalian Pendaftaran Perijinan di Bidang Usaha Dagang; Fasilitasi Pameran Tingkat Lokal Maupun Nasional (DBHCHT); Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor (DBHCHT).

2. **Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan.

Program diarahkan pada: Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki lima dan Asongan.

3. **Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian**

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang.

Program diarahkan pada: Pelayanan Tera / Tera Ulang; Pengadaan sarana dalam mendukung pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK); Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

4. **Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan**

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pasar yang sudah direvitalisasi; Persentase penerimaan PAD dariretribusi pelayanan pasar.

Program diarahkan pada: Revitalisasi Pasar Tradisonal; Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Trasdisional yang dikelola pemerintah Daerah; Intensifikasi Pemungutan PAD; Revitalisasi Pasar (DAK).

5. **Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I**

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I; Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I. Program diarahkan pada: Operasional UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I.

6. **Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II**

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II; Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II. Program diarahkan pada: Operasional UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II.

7. Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat; Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat. Program diarahkan pada: Operasional UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat.

8. Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur; Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur. Program diarahkan pada: Operasional UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur.

e. Perindustrian

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina.

Program diarahkan pada: Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri; Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha Ekonomi Produktif (DBHCHT); Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Swasta; Pembinaan Pengendalian Usaha Industri.

2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menguasai teknologi industri. Program diarahkan pada: Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.

3. Program Penataan Struktur Industri

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai daya saing.

Program diarahkan pada: Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri; Fasilitasi Industri Ramah Lingkungan bagi IKM Batik di Kabupaten Banyumas (DBHCHT).

D. Penunjang Urusan Pemerintahan (7 urusan sub bidang)

a. Administrasi Pemerintahan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (Setda)

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi fisik program; Persentase realisasi keuangan program.

2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah.

3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan sesuai SOP.

Program diarahkan pada: Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; Kajian Peraturan Perundangan Daerah.

4. Program Informasi dan Layanan Hukum

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase produk hukum daerah yang disampaikan kepada masyarakat; Persentase kasus-kasus hukum yang ditangani

Program diarahkan pada: Publikasi produk hukum daerah, pengadaan literatur hukum dan Pengelolaan JDIH; Penyuluhan hukum dan HAM; Penanganan perkara-perkara hokum; Forum Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM; Fasilitasi pelayanan bantuan hukum non litigasi; Pembinaan keluarga sadar hukum.

5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dilaksanakan secara efektif; Persentase perangkat daerah yang mempunyai pelayanan public berkualitas; Persentase Kinerja Setda yang berkinerja baik; Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja.

Program diarahkan pada: Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah; Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; Peningkatan Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi; Pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Setda.

6. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media spanduk sambutan Bupati dan media relasilainnya.

Program diarahkan pada: Analisis Media dan Informasi; Pengelolaan Data Kehumasan; Kemitraan Dengan Media Massa dan Penyelenggaraan Press Room.

7. Program Pelayanan Keprotokolan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase terlaksananya penyelenggaraan acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/WaBupati/Sekretaris Daerah yang sesuai dengan SOP. Program diarahkan pada Pelayanan Keprotokolan.

8. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu Persentase jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunannya .

Program diarahkan pada: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah; Pengendalian infrastruktur.

9. Program Perumusan Kebijakan Dan Pembinaan Bidang Perekonomian

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable; Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang sesuai ketentuan yang berlaku .

Program diarahkan pada: Penyelenggaraan posko terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru; Fasilitasi dan Koordinasi di bidang pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup serta pengendalian pupuk bersubsidi; Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan di Bidang perhubungan, pariwisata, perindustrian perdagangan Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM; Fasilitasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan TPKAD Kabupaten Banyumas; Pembinaan BUMD dan lembaga keuangan mikro dan KUR; Fasilitasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

10. Program Pembinaan Keagamaan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi; Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya.

Program diarahkan pada: Amaliyah Ramadhan; Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan; Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji; Fasilitasi STQ, MTQ, MHQ dan pengembangan tilawatil Quran.

11. Program Kesra

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah fasilitasi dan layanan kebijakan daerah di bidang kesra yang sesuai ketentuan yang berlaku; Persentase perumusan kebijakan di bidang ocialkan kepemudaan dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang difasilitasi; Persentase Perumusan kebijakan di bidang social kesehatan keluarga berencana penanganan bencana alam dan kecelakaankerja yang difasilitasi .

Program diarahkan pada: Fasilitasi dan perumusan kebijakan bidang sosial, kesehatan, keluarga berencana, kejadian bencana alam dan kecelakaan kerja; Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penyelenggaraan PHBN serta Hari Jadi Kabupaten Banyumas.

12. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil; Persentase Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadaan barang jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyumas.

Program diarahkan pada: Layanan pengadaan barang dan jasa; Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; Layanan pengadaan secara elektronik.

13. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindak lanjuti; Penyampaian LKPJ LPPD yang tepat waktu; Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Persentase jumlah titik topo nimi yang diusulkan pembakuan nama ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Persentase jumlah fasilitasi kegiatan otonomi daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program diarahkan pada: Fasilitasi Pemerintahan Umum; Penyusunan LKPJ BupatiBanyumas Dan LPPD KabupatenBanyumas; Fasilitasi Penamaan Rupa Bumi; Fasilitasi Dan Perumusan Kebijakan Kerjasama Daerah; Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dan Kelurahan; Fasilitasi Otonomi Daerah.

14. Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuaidengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014.

Program diarahkan pada: Fasilitasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintaahan Desa; Fasilitasi Kebijakan Penataan Desa. Penegasan Batas Desa dan Penetapan Status Desa.

15. Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi.

Program diarahkan pada: Profil, Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD; Fasilitasi Kerja Pimpinan DPRD.

16. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD dan Sekretariat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase materi bintek yang di aplikasikan dalam tusi anggota dewan.

Program diarahkan pada: Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD dan Kesekretariatan.

17. Program Fasilitasi Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda.

Program diarahkan pada: Perencanaan Produk Hukum; Fasilitasi Rapat-rapat Paripurna dan Badan Musyawarah; Dokumentasi Produk Hukum; Penyusunan Konsep Produk hukum.

18. Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD

Untuk mencapai indikator program yaitu: Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu; Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah; Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu; Persentase pengaduan yang di tindak lanjuti.

Program diarahkan pada: Fasilitasi Komisi dan Badan Kehormatan; Fasilitasi Tenaga Ahli, Hearing dan Reses DPRD; Penyusunan dan Evaluasi Penganggaran.

19. Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan (di 27 Kecamatan)

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik; Persentase pembayaran PBB di kecamatan; Persentase Linmas terbina; Pembangunan sarana prasarana yang terbangun; Desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik; Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif.

Program diarahkan pada: Fasilitasi Penyelengaraan Pelayanan Kecamatan (27 kecamatan); Fasilitasi Intensifikasi PBB (27 kecamatan); Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan (27 kecamatan); Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan (27 kecamatan); Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Kelurahan (30 Kelurahan); Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (30 Kelurahan); Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes (23 Kecamatan); Pembangunan Sarana dan Prasarana (30 Kelurahan).

b. Perencanaan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang perencanaan umum pembangunan daerah. Program diarahkan pada: Analisis dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Prasarana Wilayah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW; Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang infra struktur dan prasarana wilayah.

Program diarahkan pada: Analisis Perencanaan Raperda RTR Di Kab Banyumas; Analisis Perencanaan Kebijakan Prasarana Dan Pengembangan Wilayah; Perencanaan Dan Pengelolaan Program IPDMIP Kabupaten Banyumas; Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas; Analisis Perencanaan Kebijakan Permukiman Wilayah; Analisis Perencanaan Dan Pengelolaan Pamsimas (Panitia Kemitraan); Perencanaan teknis penataan ruang.

3. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang ekonomi.

Program diarahkan pada: Analisis Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dan Pengembangan Dunia Usaha/Lembaga; Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian. Perikanan. dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas; Pengembangan FEDEP.

4. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang pemerintahan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.

Program diarahkan pada: Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial; Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan; Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas (TKPKD).

5. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan system informasi profil daerah yang lengkap.

Program diarahkan pada: Penyusunan Profil Daerah/SIPD; Pengembangan Kebijakan Sistem Perencanaan. Monitoring dan Evaluasi.

6. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD.

Program diarahkan pada: Monitoring. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

c. Keuangan (9 Program)

Program akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi jumlah pendapatan daerah yang meliputi PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah; bagi hasil kabupaten/kota dan desa.

Program diarahkan pada: intensifikasi pajak daaerah; optimalisasi sumber-sumber pendapatan non pajak; penyelesaian piutang pajak daerah; penatausahaan pendapatan; pemeriksaan dan pelaporan pajak daerah.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Wajib Pajak yang memiliki NPWPD ; Persentase obyek pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pajak Daerah

Program diarahkan pada: Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak; Optimalisasi Pelayanan Wajib Pajak; Penilaian Penetapan Keberatan Dan Pengurangan Pajak Daerah.

3. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Realisasi anggaran kas OPD sesuai target; Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu; Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung.

Program diarahkan pada: Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kas Daerah; Optimalisasi Pelayanan Belanja Langsung; Optimalisasi Pelayanan Belanja Tidak Langsung; Pembinaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah.

4. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase perangkat daerah yang administrasi asetnya baik.

Program diarahkan pada: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Aset; Administrasi Barang Daerah; Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang.

5. Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketepatan waktu penetapan APBD; Persentase DPA OPD yang sesuai ketentuan yang berlaku; Persentase belanja pendidikan; Persentase belanja kesehatan

Program diarahkan Pada: Pendampingan Bantuan Hibah, Sosial Dan Bantuan Keuangan; Penyusunan Perubahan KUA/PPAS/APBD dan KUA/PPAS /APBD; Penyusunan Standar Satuan Harga dan ASB; Monitoring Pelaksanaan APBD; Optimalisasi Penerimaan dan Belanja Transfer.

6. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu.

Program diarahkan pada: Pengembangan Sistem dan Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyelanggaraan Akutansi; Pembinaan Keuangan BLUD; Pengadaan dan Pemeliharaan Jaringan Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

7. Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keuangan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase tingkat kepatuhan pembayaran tagihan LPJU imbal jasa PD BPR BKK; Persentase tingkat kepatuhan penyampaian LPJ keuangan.

Program diarahkan pada: Penyediaan Jasa Listrik dan Jasa Transaksi Keuangan Daerah; Fasilitasi MPTP-TGR; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan.

d. Kepegawaian

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ASN yang berkinerja baik; Persentase ASN yang memperoleh hukuman disiplin tingkat berat.

Program diarahkan pada: Pembinaan dan Penyelesaian masalah PNS; Penghargaan ASN; Penilaian Kinerja ASN; Bintek penyelesaian permasalahan Kepegawaian.

2. Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai informasi; Persentase data ASN yang akurat.

Program diarahkan pada: Pemrosesan Pensiun dan Penataan PNSD; Pengadaan Pegawai; Pengelolaan arsip CPNS Dan PNS; Akurasi Data Pegawai.

3. Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persenta sejumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan.

Program diarahkan pada: Pemetaan PNS Potensial Untuk menduduki JPTP dan jabatan administras; Perumusan Konsep Pola Karir PNS; Pemprosesan jabatan tinggi pratama dan jabatan administrasi; Pemrosesan kenaikan pangkat.

e. Pendidikan dan Pelatihan

Program yang dilaksanakan adalah:

1. Program Pengembangan Kompetensi ASN

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

Program diarahkan pada: Penyelenggaraan Diklat Aparatur Sipil Negara; Pengembangan dan Peningkatan Mutu Diklat; Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

f. Penelitian dan Pengembangan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sistem Inovasi, Kreativitas dan Litbang

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Program diarahkan pada: Penguatan Sistem Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Kabupaten Banyumas (SABERINA); Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian;

2. Program Kajian Strategis Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi pelaksanaan kajian strategis daerah. Program diarahkan pada Pendukung Penelitian. Pengembangan dan Penerapan IPTEK.

g. Pengawasan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase LHP terbit tepat waktu; Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan; Kapabilitas APIP; Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan .

Program diarahkan pada: peningkatan sumberdaya apip; pelaksanaan pengawasan internal; tindak lanjut hasil temuanpengawasan; saber pungli; survei penilaian integritas.

h. Program Semua SKPD

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (di 28 SKPD dan 27 Kecamatan)

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase realisasi keuangan program; Persentase realisasi fisik program.

Program diarahkan pada: penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah; penyediaan bahan logistic kantor perangkat daerah; penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan perangkat daerah; rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas perangkat daerah; pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah; pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah; pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas perangkat daerah; pemeliharaan rutin/ berkala dinas/operasional kendaraan perangkat daerah; pengendalian dan penatausahaan keuangan daerah perangkat daerah.

2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (di 28 SKPD dan 27 Kecamatan)

Untuk mencapai indikator program yaitu: Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah; Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah.

Program diarahkan pada Penyusunan Perencanaan. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Perangkat Daerah; Pemutakhiran data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah.

II. Periode Tahun 2021-2023

A. Urusan Wajib Berkaitan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan nonformal/kesetaraan melalui Program Prioritas sebagai berikut:

1. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase formasi pendidik dan tenaga kendidikan yang terpenuhi.

Fokus kegiatan yaitu Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Untuk mencapai indikator program yaitu: APK SD; APK SMP; APK PAUD.

Fokus kegiatan yaitu pemenuhan sarana prasarana dan utilitas sekolah baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; maupun Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

b. Kesehatan

Dari 4 program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan; Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM UKP di Dinas Kesehatan; Persentase Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi; Persentase Rumah sakit yang berijin; Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Banyumas; Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD (RSUD Banyumas); Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Ajibarang; Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD (RSUD Ajibarang).

Fokus yaitu: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pengadaan sarana pelayanan; Pengadaan alat kesehatan; Insentif tenaga kesehatan ASN dan Non ASN dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19; Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, fokus pada Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase tenaga kesehatan yang berijin; Persentase Rasio kebutuhan tenaga kesehatan yang terpenuhi; Persentase peningkatan SDM tenaga kesehatan; Persentase Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar;

Fokus pada 3 kegiatan yaitu: Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota; Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota; Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Untuk mencapai indikator program yaitu : Persentase toko obat, apotek, Alkes dan Optikal yang berijin; Persentase sertifikasi produksi Sarana Produksi Alat Kesehatan; Persentase sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga; Persentase sertifikasi Laik Hygine Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan; Persentase stiker pembinaan makanan dan sentra makanan; Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan post market.

Fokus pada : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga; Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS; dan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang sesuai Standar.

Fokus pada Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; serta Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dari 6 program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Untuk mencapai indikator program yaitu Tingkat kemantapan jalan kab/kota.

Fokus pada Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Untuk mencapai indikator program yaitu : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kab/kota; Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Fokus pada : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, melalui Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya; Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan untuk menambah Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik.

Fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Penataan Bangunan Gedung

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola.

Fokus pada Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase luas kawasan yang dilakukan penataan.

Fokus pada penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase realisasi penyedia jasa konstruksi yang dibina.

Fokus pada penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil); Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dari 8 program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota.

Fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase rumah tinggal berakses sanitasi. Fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah

Kabupaten/Kota, melalui Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.

3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik. Fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pengembangan Permukiman

Untuk mencapai indikator program yaitu Rasio Permukiman Layak Huni. Fokus pada Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis.

5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Untuk mencapai indikator program yaitu Presentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan.

Fokus pada Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani.

Fokus pada Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

7. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan ketersediaan rumah layak huni.

Fokus pada Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, dengan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh.

8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU.

Fokus pada Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, yaitu Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan serta Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dari 3 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan; Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat; Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Fokus pada Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Penyediaan Logistik Penanggulangan Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan Persentase penanganan pelanggaran PERDA.

Fokus pada patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan pembinaan dan bintek bagi anggota Satpol PP dan Linmas.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Untuk mencapai indikator program yaitu: Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK).

Fokus pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

f. Sosial

Dari 5 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif.

Fokus pada Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT); Fasilitasi penerbitan ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang bagi dunia usaha/lembaga; pembinaan TKSK, masyarakat/keluarga, LKS/PSKS serta petugas/pendamping sosial.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase PMKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlantar diluar panti; pemberian pelayanan, bimbingan, fasilitasi dibidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase PMKS yang menerima perlindungan Sosial.

Fokus pada pemantauan Anak-Anak Terlantar; fasliltasi pendataan, bantuan pengembangan ekonomi, dan bantuan sosial bagi Fakir Miskin.

4. Program Penanganan Bencana

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat.

Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan evakuasi dan pelayanan psikososial bagi korban bencana; pembinaan untuk kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk mencapai indikator program yaitu Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional.

Fokus pada Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase perencanaan tenaga kerja yang tersedia. Fokus pada Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi cluster; Persentase LPK yang mendapatkan perijinan; 3.Presentase produktivitas pada perusahaan kecil.

Fokus pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil; Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota.

Fokus pada Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan); Penerbitan Perpanjangan IMTA.

4. Program Hubungan Industrial

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP, PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan).

Fokus pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan; dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dari 6 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG; dan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.

Fokus pada Pembinaan Organisasi Perempuan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Untuk mencapai indikator program yaitu Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

Fokus pada pencegahan dan koordinasi dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan; pendampingan dan pelaporan korban kekerasan terhadap perempuan; Advokasi Kebijakan, Pendampingan, Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, fasilitasi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga.

Fokus pada pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Fokus pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten.

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan).

Fokus pada Sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Gugus Tugas KLA Pembinaan dan Fasilitasi Kabupaten Layak Anak dan Hari Anak Nasional.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Untuk mencapai indikator program yaitu: Rasio anak korban kekerasan yang tertangani.

Fokus pada kegiatan Pencegahan dan pendampingan kasus Kekerasan Terhadap Anak; dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

c. Pangan

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Untuk mencapai indikator program yaitu Tingkat ketersediaan energi.

Fokus pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Untuk mencapai indikator program yaitu Konsumsi protein dan Stabilitas harga dan pasokan pangan.

Fokus pada Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan jumlah desa rawan pangan yang ditangani.

Fokus pada Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

Fokus pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pertanahan

Dari 1 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Penatagunaan Tanah

Untuk mencapai indikator program yaitu Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat).

Fokus kegiatan melalui Pensertifikatan Tanah Milik Pemkab.

e. Lingkungan Hidup

Dari 8 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup.

Fokus pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase kegiatan pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Fokus pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase RTH publik.

Fokus pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase ijin pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan.

Fokus pada Penyimpanan Sementara Limbah B3; Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda.

Fokus pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ata yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase jumlah SDM yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.

Fokus pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sengketa dan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani.

Fokus pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

8. Program Pengelolaan Persampahan

Untuk mencapai indikator program yaitu: Persentase sampah yang terkurangi melalui 3R. Fokus pada Pengelolaan Sampah.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Untuk mencapai indikator program yaitu : Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, maka fokus pada peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

2. Program Pencatatan Sipil

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pelayanan pencatatan sipil sesuai SOP, maka fokus kegiatan pada peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan pencatatan sipil.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Untuk mencapai indikator program yaitu ketersediaan data dan informasi kependudukan, maka fokus kegiatan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Untuk mencapai indikator program yaitu ketersediaan Profil Kependudukan, maka fokus kegiatan pada peningkatan kualitas penyusunan Profil Kependudukan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase desa dengan penataan baik.

Fokus pada Penyelenggaraan Penataan Desa melalui Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa.

Fokus pada Fasilitasi Kerja sama antar Desa melalui Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase desa dengan administrasi baik.

Fokus pada Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa serta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif.

Fokus pada Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/

Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari 3 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk

Untuk mencapai indikator program yaitu Rata-rata jumlah anak per keluarga 2.

Fokus pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pezmerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Untuk mencapai indikator program yaitu Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan; Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Presentase Kampung KB yang terfasilitasi.

Fokus pada Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan meningkatkan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal yang menjangkau semua desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas, dengan mengoptimalkan peran Balai penyuluhan KB; Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan mengoptimalkan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) melalui penyuluhan; Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Untuk mencapai indikator program yaitu: Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan.

Fokus pada Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; Pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Lomba Kesatuan Gerak PKK Pemberian Nutrisi Ibu Hamil Resiko Tinggi, sert Lomba Generasi Berencana dan Harganas serta Pendukung DAK Fisik Penugasan.

i. Perhubungan

Upaya memenuhi sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Banyumas adalah dengan program prioritas sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase ketersediaan kelengkapan jalan dengan target dan Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan dengan target; dan Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan.

Fokus pada Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dan Masterplan Angkutan Perkotaan; Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Untuk mencapai indikator program yaitu Presentanse keterjangkauan angkutan sungai.

Fokus pada Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Sungai.

j. Komunikasi dan Informatika

Untuk meningkatkan tingkat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Banyumas maka program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik.

Fokus pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan melakukan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, mengoptimalkan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, meningkatkan Pengelolaan Media Komunikasi Publik serta Pelayanan Informasi Publik, melaksanakan penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

2. Program Aplikasi Informatika

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi; Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda.

Fokus pada pengelolaan Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan mengoptimalkan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, mengoptimalkan Pelayanan Virtual Meeting/Streaming dan penyempurnaan Smart Room; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengembangan jaringan Fiber Optik dan pengadaan sarana pendukungnya; membangun, mengembangkan serta memelihara Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik,

serta mengoptimalkan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

k. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Dari 7 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Untuk mencapai indikator program yaitu Presentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin koperasi usaha simpan pinjam.

Fokus pada Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan.

Fokus pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang dinilai kesehatannya.

Fokus pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan.

Fokus pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha.

Fokus pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha.

Fokus pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentinga.

7. Program Pengembangan UMKM

Untuk mencapai indikator program yaitu Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan.

Fokus pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

l. Penanaman Modal

Dari 5 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal.

Fokus pada Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota; Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal.

Fokus pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP).

Fokus pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase investor yang wajib Laporan Penanaman Modal (LKPM).

Fokus pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Untuk mencapai indikator program yaitu persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal.

Fokus pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Dari 3 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase wirausahawan muda.

Fokus pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan Pelatih Olahraga yang bersertifikasi.

Fokus pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase kepramukaan aktif.

Fokus pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

n. Statistik

Dari 1 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah.

Fokus pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

o. Persandian

Dari 1 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Untuk mencapai indikator program yaitu Tingkat keamanan informasi pemerintah.

Fokus pada Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

p. Kebudayaan

Dari 5 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi.

Fokus pada Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pembinaan kesenian tradional.

Fokus pada Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pembinaan Sejarah

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pembinaan sejarah lokal.

Fokus pada Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati dan Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Fokus pada Penetapan Cagar Budaya dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Fokus pada Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

q. Perpustakaan

Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Untuk mencapai indikator program yaitu danIndek Kepuasan Masyarakat IKM Layanan Perpustakaan; dan Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan.

Fokus pada Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Naskah Kuno milik masyarakat yang dialihmediakan.

Fokus pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

r. Kearsipan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik; dan Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar.

Fokus pada Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota; Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan.

Fokus pada Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun; Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota; Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan; Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota; Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.

3. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase arsip tertutup yang diizinkan untuk digunakan.

Fokus pada Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan (6 Urusan Bidang)

a. Kelautan dan Perikanan

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Untuk mencapai indikator program yaitu Produksi Perikanan Tangkap.

Fokus pada Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Untuk mencapai indikator program yaitu Produksi Perikanan Budidaya.

Fokus pada Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 4.Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Perairan Umum Yang Ter Re-Stocking Ikan.

Fokus pada Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Untuk mencapai indikator program yaitu Produksi olahan hasil perikanan; Peningkatan angka konsumsi ikan.

Fokus pada Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

b. Pariwisata

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase tingkat layanan destinasi wisata.

Fokus pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota; dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Pemasaran pariwisata.

Fokus pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi; dan Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi.

Fokus pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar; dan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

c. Pertanian

Dari 4 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan jumlah sarana pertanian; dan Peningkatan Populasi Ternak.

Fokus pada Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian; dan Persentase kawasan ternak yang dikelola.

Fokus pada Pembangunan Prasarana Pertanian.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Untuk mencapai indikator program yaitu Dokumen Peta sebaran penyakit hewan 1 dokumen.

Fokus pada Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner; Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.

4. Program Perizinan Usaha Pertanian

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase usaha peternakan yang berizin.

Fokus pada Penerbitan Izin Usaha Pertanian yan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.

d. Perdagangan

Dari 6 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan.

Fokus pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar; dan Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan.

Fokus pada Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Untuk mencapai indikator program yaitu Koefisien variasi harga barang.

Fokus pada Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

4. Program Pengembangan Ekspor

Untuk mencapai indikator program yaitu Nilai Ekspor Bersih Perdagangan.

Fokus pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang.

Fokus pada Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pelaku usaha yang dipromosikan.

Fokus pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

e. Perindustrian

Dari 3 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembagunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK.

Fokus pada Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Fokus pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase data informasi industri yang tersedia.

Fokus pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

f. Transmigrasi

Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase transmigran yang ditempatkan.

Fokus pada pengiriman dan penempatan peserta transmigran.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable; Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil; Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu.

Fokus pada Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Untuk mencapai indikator program yaitu Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD); Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang disusun; Persentase kerjasama Daerah dan pengembangan potensi daerah yang tersusun; Persentase kasus kasus hukum yang ditangan.

Fokus pada Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan; Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Fasilitasi Kerjasama Daerah; Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

b. Sekretariat DPRD

Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah; Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES; Persentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu; Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda.

Fokus pada Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Fasilitasi Tugas DPRD.

E. Unsur Kewilayahan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik.

Fokus pada Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Fokus pada Koordinas Pemberdayaan Desa.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Foku pada Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES.

Fokus pada Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

F. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Dari 5 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase masyarakat yang terlatih / terbina pada penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Fokus pada penyelenggaraan kegiatan talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan; serta kegiatan orientasi ketahanan bangsa, nilai-nilai nasionalisme, wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ormas yang terlibat dalam kegiatan wawasan kebangsaan.

Fokus pada Pelibatan ormas dalam kegiatan wawasan kebangsaan.

3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase peserta pembinaan yang memahami materi Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama.

Fokus pada pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial; Test Urin pencegahan penggunaan narkoba; fasilitasi

kegiatan FKUB dan kegiatan pembinaan aliran kepercayaan dan umat beragama.

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase Penanganan Potensi Konflik Ipoleksosbud hankam dengan baik.

Fokus pada Fasilitasi forkompinda, Fasilitasi kegiatan Operasional Crisis Centre, deteksi dini dan analisis kejadian yang ada di masyarakat.

5. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Parpol yang aktif dala Pendidikan Politik.

Fokus pada Fasilitasi Partai Politik dalam kegiatan sarasehan demokrasi serta kegiatan komunikasi dan konsultasi partai politik.

G. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD.

Fokus pada Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah secara rutin dan berkala; Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan sesuai prioritas pembangunan; Melaksanakan dan menyusun Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Fokus pada Koordinasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dan pusat baik di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

b. Keuangan

Dari 2 Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu.

Fokus pada Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah serta pelaksanaan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase perangkat daerah yang mengelola administrasi barang milik daerah dengan baik.

Fokus pada Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Kepegawaian

Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan.

Fokus pada Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN; Pengembangan Kompetensi ASN; Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai indikator program yaitu Prosentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan.

Fokus pada penyelenggaraan diklat teknis bagi jabatan administrasi; serta penyelenggaraan diklat manajerial dan fungsional.

e. Penelitian dan Pengembangan

Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase implementasi kelitbangan.

Fokus pada publikasi inovasi daerah, penyelenggaraan lomba Krenova; dan penyusunan kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan dan Bidang Ekonomi Pembangunan.

f. Pengawasan

Dari Program yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Untuk mencapai indikator program yaitu Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan, dan Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan.

Fokus pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			URUSAN BIDANG PENDIDIKAN						**267.742.000.000**		**276.790.000.000**		**1.409.271.000.000**	**DINDIK**
1	1		Pendidikan						267.742.000.000		276.790.000.000		1.409.271.000.000	DINDIK
1	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						4.825.000.000		5.200.000.000		28.535.000.000	DINDIK
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINDIK
				Persentase realisasi keuangan program	%	83	96	100		100		100		DINDIK
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat						11.161.212.000		14.485.000.000		60.036.212.000	DINDIK
				Rasio Guru terhadap murid PAUD		NA	NA	19.3		18.0		15.0		DINDIK
				APK PAUD/RA/ Sederajat	%	77.23	77.25	77.5		77.75		78.50		DINDIK
				Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				kondisi baru tiap semester										
				Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	%	12.30	15.00	16.00		18.00		25.00		DINDIK
				Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat						187.894.286.000		138.502.000.000		758.612.286.000	DINDIK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Sekolah Dasar dan Sederajat											
				Angka Kelulusan (AL) SD / MI / Paket A	%	100	100	100		100		100		DINDIK
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	99.71	99.75	99.80		99.85		99.70		DINDIK
				Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi	%	10	17	14		13		100		DINDIK
				Persentase Peningkatan Siswa SD Berprestasi	%	10	11	10		9		67		DINDIK
				Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi	%	98.30	99.00	100		100		100		DINDIK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Angka rata-rata Nilai UASBN SD		65.00	68.27	70.00		72.00		78.00		DINDIK
				Rasio Guru terhadap murid SD		19.17	19.17	19.17		19.17		19.17		DINDIK
				Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A	%	0.0004	0.0004	0.00035		0.00032		0.00025		DINDIK
				APK SD/MI/Paket A	%	108.82	103.59	103.59		103.00		101.00		DINDIK
				APM SD/MI/paket A	%	98.75	98.80	98.85		98.90		98.95		DINDIK
				Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	84.84	85.55	86.00		86.50		88.00		DINDIK
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	%	104.39	104.48	100		100		100		DINDIK
1	1	17	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat						21.696.752.000		71.750.675.000		318.147.427.000	DINDIK
				Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester										
				Persentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi	%	10.00	16.67	14.29		12.50		51.43		DINDIK
				Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs / Paket B (13-15 tahun)	%	95.26	95.27	95.28		95.29		95.32		DINDIK
				Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	87.61	88.05	88.5		89.00		90.50		DINDIK
				APM SMP/MTs/Paket B	%	81.41	81.45	81.50		81.60		81.75		DINDIK
				Angka rata-rata Nilai UN SMP		52.78	55.58	57.00		59.00		65.00		DINDIK
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP / MTs/ Paket B ke SMA/SMK/MA/ Paket B	%	92.47	96.10	96.30		96.40		97.00		DINDIK
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs / Paket B	%	0.0020	0.0029	0.0027		0.0025		0.0020		DINDIK
				Persentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi	%	10	20	17		14		100		DINDIK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs / Paket B	%	99.99	100	100		100		100		DINDIK
				Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi	%	92.27	93.00	94.00		95.00		100		DINDIK
				Rasio Guru terhadap murid SMP		19.57	19.57	19.57		19.57		19.57		DINDIK
				APK SMP/MTs/Paket B	%	86.79	89.00	91.00		93.00		99.00		DINDIK
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						38.504.675.000		39.707.325.000		210.782.000.000	DINDIK
				Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki sertifikat pendidik	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga	%	5.26	10.00	9.09		8.33		6.83		DINDIK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kependidikan PAUD/Dikmas Berprestasi										
				Pesentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki sertifikat pendidik	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki tenaga penunjang lainnya	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase kepala satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki jasah minimal S1/DIV	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase pendidik SMP memiliki ijazah minimal S1DIV	%	96.11	96.50	100		100		100		DINDIK
				Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi	%	10.41	10.00	9.09		9.09		7.14		DINDIK
				Persentase satuan pendidikan SMP memiliki tenaga penunjang lainnya	%	100	100	100		100		100		DINDIK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik	%	63.78	65.00	100		100		100		DINDIK
				Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase pendidik SD memiliki sertifikat pendidik	%	55.83	60.00	100		100		100		DINDIK
				Persentase pendidik SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	94.48	95.00	100		100		100		DINDIK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki sertifikat pendidik	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
				Persentase pendidik PAUD memiliki sertifikat profesi guru PAUD	%	20.96	22.00	100		100		100		DINDIK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase pendidik PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	%	51.77	52.00	100		100		100		DINDIK
				Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	%	NA	NA	100		100		100		DINDIK
1	1	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						690.075.000		4.040.000.000		16.958.075.000	DINDIK
				Tingkat capaian nilai LKJiP	Angka	80	81	82		83		86		DINDIK
1	1	23	Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan						2.970.000.000		3.105.000.000		16.200.000.000	DINDIK
				Tingkat capaian koordinasi Koordinator Pendidikan Kecamatan	%	100	100	100		100		100		DINDIK
			URUSAN BIDANG						**255.607.000.000**		**268.758.471.000**		**1.343.727.471.000**	**DINKES**

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			KESEHATAN											
1	2		Kesehatan						255.607.000.000		268.758.471.000		1.343.727.471.000	DINKES
1	2	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2.282.920.000		2.440.000.000		12.817.920.000	DINKES
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Persentase realisasi keuangan program	%	83	60	100		100		100		DINKES
1	2	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						150.000.000		175.000.000		860.000.000	DINKES
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINKES
1	2	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						7.024.655.000		7.915.445.000		40.437.022.000	DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%	65	65	65		65		95		DINKES
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	65	65	65		65		95		DINKES
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar	%	85	85	85		85		95		DINKES
				Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	80	80	80		100		100		DINKES
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						30.242.000.000		31.875.364.000		165.662.660.000	DINKES
				Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100%	%	100	100	100		100		100		DINKES
1	2	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat						1.145.000.000		1.200.000.000		6.225.000.000	DINKES
				Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga	%	18.5	18.5	20.0		22.5		35.0		DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Kecamatan yang mencapai Rumah Tangga sehat 76,5%	%	79.60	79.60	80.00		80.00		80.00		DINKES
				Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	%	50	50	60		70		100		DINKES
				Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	10.0	10.0	11.0		11.5		13.0		DINKES
				Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat 10 %	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	NA	NA	100		100		100		DINKES
				Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa 10% untuk Bidang Kesehatan	%	5	5	10		15		30		DINKES
				Rasio posyandu per satuan balita		20.29	20.90	20.30		20.50		20.70		DINKES
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	%	NA	NA	100		100		100		DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				kesehatan sesuai standar										
1	2	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						6.092.990.000		2.330.000.000		14.172.990.000	DINKES
				Prevalensi gizi kurang	%	7.60	7.60	7.80		7.70		7.40		DINKES
				Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Prevalensi balita stunting	%	24.5	20.4	18.0		17.0		14.0		DINKES
				Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100		100		100		DINKES
1	2	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit						7.387.198.000		7.070.000.000		38.227.198.000	DINKES
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	52.31	100		100		100		DINKES
				Prevalensi HIV / AIDS (%) dari total populasi	%	0.17	0.22	0.14		0.14		0.14		DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase orang terdeteksi dini infeksi Hepatitis B	%	1.82	0.90	1.00		1.00		1.00		DINKES
				Case Fatality Rate DBD (%)	%	1.47	3.63	< 1		< 1		< 1		DINKES
				Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100.000 penduduk)		3	3	3		3		2		DINKES
				Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Persentase pasien TBC yang mengetahui status HIV	%	NA	NA	60		65		75		DINKES
				Angka (notifikasi semua kasus TBC yang diobati (Case Notification Rate/ CNR) per seratus ribu penduduk		174	200	249		252		252		DINKES
				Prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun	%	13.31	12.29	12.20		12.10		11.80		DINKES
				Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat antimalaria yang tepat	%	100	100	100		100		100		DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Prevalensi tekanan darah tinggi	%	26.3	38.9	38.7		38.5		37.9		DINKES
				Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	70.10	70.10	72.52		75.00		82.50		DINKES
				Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Tingkat kematian akibat malaria	%	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		DINKES
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	NA	39.6	100		100		100		DINKES
				Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	17.69	100		100		100		DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	16.64	100		100		100		DINKES
				Persentase orang usia 15 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	11.58	100		100		100		DINKES
				Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Cakupan pengobatan semua kasus TBC (% Case Detection Rate / CDR) yang diobati	%	70.1	70.02	89		97		97		DINKES
				Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)		168	168	166		164		158		DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Non AFP rate per 100.000 penduduk		>= 2	>= 2	>= 2		>= 2		>= 2		DINKES
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	NA	64.24	100		100		100		DINKES
				Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk)		< 0.05	< 0.05	< 0.05		< 0.05		< 0.05		DINKES
				Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO	%	70	70	75		75		75		DINKES
1	2	25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya						21.772.161.000		33.056.000.000		173.894.150.000	DINKES
				Rasio Puskesmas persatuan penduduk		0.02	0.02	0.02		0.02		0.02		DINKES
				Cakupan Puskesmas Pembantu	%	11.78	11.78	11.78		11.78		11.78		DINKES
				Cakupan Puskesmas	%	144	144	148		151		151		DINKES
1	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah						10.000.000.000		11.000.000.000		29.000.000.000	DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata											
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit)	%	100	100	100		100		100		DINKES
1	2	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak						9.421.450.000		16.050.000.000		67.481.450.000	DINKES
				Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Cakupan pelayanan balita sesuai standar	%	100	100	100		100		100		DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Cakupan kunjugan ibu hamil K4	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Angka kematian balita		9.81	8.94	8.90		8.80		8.20		DINKES
				Angka Kematian Bayi		8.43	7.84	8.03		8.01		7.90		DINKES
				Angka Kelangsungan Hidup bayi		991.57	992.16	991.97		991.98		992.10		DINKES
				Angka Kematian Neonatal		5.84	5.81	5.50		5.25		4.50		DINKES
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	%	100	100	100		100		100		DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				kesehatan bayi baru lahir										
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Cakupan pelayanan ibu hamil K1	%	100	100	100		100		100		DINKES
1	2	33	Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat						350.000.000		650.000.000		3.120.000.000	DINKES
				Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat	%	25	35	43		53		100		DINKES
				Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	%	5	21	46		66		100		DINKES
				Persentase puskesmas melaksanakan STBM	%	100	100	100		100		100		DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	34	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan						950.000.000		4.060.000.000		17.680.000.000	DINKES
				Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.14	0.15	0.19		0.20		0.2		DINKES
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	0.35	0.35	0.38		0.40		0.40		DINKES
1	2	35	Program Pelayanan Kesehatan						158.513.626.000		150.636.662.000		772.534.081.000	DINKES
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Indeks	NA	NA	77.0		77.5		79.0		DINKES
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN	%	95	95	95		95		95		DINKES
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah	%	100	100	100		100		100		DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Sakit)										
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK	%	NA	NA	100		100		100		DINKES
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Persentase Fasyankes primer / sekunder yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	NA	NA	100		100		100		DINKES
				Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	95	100	100		100		100		DINKES
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0.01	0.01	0.01		0.01		0.01		DINKES
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada pondok pesantren	%	NA	NA	100		100		100		DINKES
				Persentase Jaminan Kesehatan Nasional	%	71.21	79.98	100		100		100		DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	36	Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan						275.000.000		300.000.000		1.615.000.000	DINKES
				Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100	100	100		100		100		DINKES
				Persentase SIK Fasyankes yang terintegrasi	%	32.82	32.82	32.82		35.11		35.11		DINKES
1	2		Kesehatan						186.582.000.000		195.610.000.000		1.007.187.000.000	RSUD BANYUMAS
1	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata						6.582.000.000		10.610.000.000		57.187.000.000	RSUD BANYUMAS
				Persentase sarana prasarana rumah sakit sesuai standar	%	NA	NA	80.5		81		82.5		RSUD BANYUMAS
1	2	37	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan						180.000.000.000		185.000.000.000		950.000.000.000	RSUD BANYUMAS

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Kesehatan BLUD											
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Medis	%	NA	NA	77.27		77.27		86.36		RSUD BANYUMAS
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Medis		NA	NA	75		76		85		RSUD BANYUMAS
				Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Bagian Administrasi		NA	NA	75		76		85		RSUD BANYUMAS
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Penunjang		NA	NA	75		76		85		RSUD BANYUMAS
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Administrasi	%	NA	NA	77.27		77.27		86.36		RSUD BANYUMAS
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal SPM Bagian Keuangan	%	NA	NA	77.27		77.27		86.36		RSUD BANYUMAS
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu	%	NA	NA	77.27		77.27		86.36		RSUD BANYUMAS

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Penunjang	%	NA	NA	77.27		77.27		86.36		RSUD BANYUMAS
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perawatan	%	NA	NA	77.27		77.27		86.36		RSUD BANYUMAS
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu		NA	NA	75		76		85		RSUD BANYUMAS
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Keuangan		NA	NA	75		76		85		RSUD BANYUMAS
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perawatan		NA	NA	75		76		85		RSUD BANYUMAS
1	2		Kesehatan						76.750.000.000		80.000.000.000		446.571.000.000	RSUD AJIBARANG
1	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata						10.400.000.000		12.700.000.000		66.599.700.000	RSUD AJIBARANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase sarana prasarana rumah sakit sesuai standar	%	NA	NA	50		55		70		RSUD AJIBARANG
1	2	37	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD						66.350.000.000		67.300.000.000		379.971.300.000	RSUD AJIBARANG
				Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	79	80	81		82		85		RSUD AJIBARANG
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan	%	75	80	82		83		85		RSUD AJIBARANG
				Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti dibidang penunjang	%	75	80	82		83		85		RSUD AJIBARANG
				Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti di Bidang Pelayanan	%	75	80	82		83		85		RSUD AJIBARANG
				Persentase pencapaian SPM Penunjang	%	75	80	82		83		85		RSUD AJIBARANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Administrasi dan Keuangan	%	75	80	82		83		85		RSUD AJIBARANG
			URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM						**311.699.000.000**		**425.900.000.000**		**2.072.389.000.000**	**DPU**
1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						311.699.000.000		425.900.000.000		2.072.389.000.000	DPU
1	3	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						6.800.000.000		8.150.000.000		39.400.000.000	DPU
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DPU
				Persentase realisasi keuangan program	%	75	85	100		100		100		DPU
1	3	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						625.000.000		625.000.000		3.125.000.000	DPU
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DPU

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DPU
1	3	15	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan						182.629.300.000		209.029.000.000		1.045.083.300.000	DPU
				Persentase panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya	%	NA	NA	17.34		34.75		86.87		DPU
				Persentase panjang jalan yang terbangun	%	NA	NA	0.02		0.03		0.08		DPU
1	3	17	Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong						4.500.000.000		5.625.000.000		27.000.000.000	DPU
				Persentase Panjang bangunan pengaman di daerah kritis di badan sungai	%	0.52	0.63	0.63		0.74		1.07		DPU
1	3	18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan						11.417.700.000		21.450.000.000		128.467.700.000	DPU
				Persentase panjang jalan yang dipelihara	%	NA	41.48	46.48		51.48		66.48		DPU

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	3	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya						18.602.000.000		30.336.000.000		159.648.000.000	DPU
				Persentase luas irigasi kabupaten yang dilakukan rehabilitasi	%	19.56	19.56	19.56		19.56		100		DPU
				Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%	80	85	80		85		100		DPU
1	3	25	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku						1.750.000.000		2.400.000.000		17.850.000.000	DPU
				Persentase jumlah embung dalam kondisi baik	%	73.68	78.95	78.95		84.21		100		DPU
1	3	26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya						2.200.000.000		1.300.000.000		11.400.000.000	DPU
				Persentase jumlah kelompok	%	41.18	52.94	52.94		64.71		100		DPU

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				masyarakat peduli sungai yang aktif										
1	3	31	Program Pembinaan Jasa Konstruksi						775.000.000		875.000.000		4.275.000.000	DPU
				Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina / Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.	%	NA	10.90	15.74		20.58		35.11		DPU
1	3	32	Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan						14.900.000.000		20.250.000.000		111.900.000.000	DPU
				Persentase penambahan jumlah jembatan	%	NA	99.24	99.35		99.46		100		DPU
1	3	33	Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan						6.200.000.000		10.000.000.000		53.200.000.000	DPU
				Persentase jembatan kabupaten yang dipelihara	%	NA	77.02	78.21		79.21		83.59		DPU
1	3	34	Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan						17.500.000.000		17.600.000.000		93.200.000.000	DPU

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase penambahan panjang trotoar dan drainase	%	NA	96.79	97.43		98.07		100		DPU
1	3	35	Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan						3.000.000.000		4.400.000.000		20.600.000.000	DPU
				Persentase panjang drainase kondisi baik	%	NA	66.31	67.64		68.97		72.94		DPU
1	3	36	Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung						800.000.000		860.000.000		4.240.000.000	DPU
				Persentase bangunan pemerintah yang ber-IMB	%	NA	30	50		70		100		DPU
1	3	37	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung						38.000.000.000		88.500.000.000		331.000.000.000	DPU
				Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang tertangani	%	NA	60.70	63.7		66.7		75.7		DPU
1	3	38	Program Peningkatan Perencanaan Teknis						1.000.000.000		3.000.000.000		14.000.000.000	DPU

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase kegiatan strategis yang dilengkapi perencanaan teknis	%	100	100	100		100		100		DPU
1	3	43	Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase						1.000.000.000		1.500.000.000		8.000.000.000	DPU
				Persentase panjang drainase yang dibangun	%	NA	NA	20		40		100		DPU
			URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**78.730.000.000**		**84.680.000.000**		**429.450.000.000**	**DINPERKIM**
1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						750.000.000		1.250.000.000		6.700.000.000	DINPERKIM
1	3	41	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang						750.000.000		1.250.000.000		6.700.000.000	DINPERKIM
				Persentase advice planning yang dikeluarkan sesuai tata ruang	%	100	100	100		100		100		DINPERKIM
1	4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						75.080.000.000		77.130.000.000		399.450.000.000	DINPERKIM
1	4	1	Program Peningkatan						1.875.000.000		2.325.000.000		11.175.000.000	DINPERKIM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pelayanan Perkantoran											
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINPERKIM
				Persentase realisasi keuangan program	%	85	91	100		100		100		DINPERKIM
1	4	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						150.000.000		175.000.000		850.000.000	DINPERKIM
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINPERKIM
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINPERKIM
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan						950.000.000		5.160.000.000		21.950.000.000	DINPERKIM
				Rasio rumah layak huni	%	NA	76.30	76.56		78.34		83.95		DINPERKIM
				Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	NA	51.36	51.93		53.77		59.84		DINPERKIM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	NA	76.30	76.55		76.81		77.58		DINPERKIM
				Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	NA	NA	74.07		81.48		96.30		DINPERKIM
1	4	16	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan						38.245.976.000		42.550.000.000		220.190.555.000	DINPERKIM
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	NA	69.51	71.94		73.37		77.08		DINPERKIM
				Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	75.33	82.88	84.00		86.00		92.00		DINPERKIM
				Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	%	NA	NA	11.43		11.48		11.63		DINPERKIM
1	4	17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan						200.000.000		350.000.000		2.000.000.000	DINPERKIM
				Persentase Asosiasi Pengelola Sarana Air Minum dan Sarana Air Limbah	%	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		DINPERKIM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				yang aktif										
1	4	21	Program Pengembangan Kawasan Permukiman						33.659.024.000		26.570.000.000		143.284.445.000	DINPERKIM
				Persentase lingkungan pemukiman kumuh kawasan perkotaan	%	NA	8.69	8.26		8.16		7.84		DINPERKIM
				Persentase areal kawasan kumuh	%	NA	20.30	20.24		20.23		20.19		DINPERKIM
				Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	NA	1.95	1.73		1.34		0.00		DINPERKIM
				Persentase penanganan permukiman kumuh	%	NA	4.65	4.87		6.09		9.75		DINPERKIM
				Rasio permukiman layak huni	%	NA	79.70	79.76		79.82		80.10		DINPERKIM
				Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		NA	34.67	37.07		39.42		46.18		DINPERKIM
2	4		Pertanahan						2.900.000.000		6.300.000.000		23.300.000.000	DINPERKIM
2	4	16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan						2.900.000.000		6.300.000.000		23.300.000.000	DINPERKIM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pemanfaatan Tanah											
				Persentase luas tanah milik Pemkab yang bersertifikat	%	NA	NA	38.18		38.51		39.47		DINPERKIM
			URUSAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						**5.575.000.000**		**6.800.000.000**		**40.525.000.000**	**BPBD**
1	5		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						5.575.000.000		6.800.000.000		40.525.000.000	BPBD
1	5	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1.030.000.000		1.225.000.000		6.955.000.000	BPBD
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		BPBD
				Persentase realisasi keuangan program	%	66	77	100		100		100		BPBD
1	5	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						50.000.000		25.000.000		150.000.000	BPBD

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		BPBD
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		BPBD
1	5	23	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam						3.995.000.000		5.050.000.000		30.670.000.000	BPBD
				Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100		100		100		BPBD
				Rasio pengurangan resiko bencana		NA	NA	30		35		50		BPBD
				Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat	%	100	100	100		100		100		BPBD
1	5	24	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana						500.000.000		500.000.000		2.750.000.000	BPBD

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Informasi peta rawan bencana	%	NA	NA	100		100		100		BPBD
				Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	%	NA	NA	18.52		37.04		100		BPBD
1	5		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						7.406.470.000		8.874.700.000		46.353.370.000	SATPOL PP
1	5	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2.677.870.000		2.805.000.000		14.117.870.000	SATPOL PP
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		SATPOL PP
				Persentase realisasi keuangan program	%	83	79	100		100		100		SATPOL PP
1	5	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah								40.000.000			SATPOL PP
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100		100		100		100		SATPOL PP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		SATPOL PP
1	5	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal						1.259.130.000		1.471.700.000		9.496.130.000	SATPOL PP
				Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100		100		100		SATPOL PP
				Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	%	NA	NA	100		100		100		SATPOL PP
				Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP	%	NA	NA	100		100		100		SATPOL PP
				Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100		100		100		SATPOL PP
1	5	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk						548.870.000		948.000.000		4.340.870.000	SATPOL PP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Menjaga Ketertiban dan Keamanan											
				Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	%	100	100	100		100		100		SATPOL PP
1	5	20	Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum						1.300.600.000		1.310.000.000		6.840.600.000	SATPOL PP
				Persentase penanganan pelanggaran PERDA	%	90	95	100		100		100		SATPOL PP
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan Perkada	%	100	100	100		100		100		SATPOL PP
1	5	22	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran						1.620.000.000		2.300.000.000		11.397.900.000	SATPOL PP
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100		100		100		SATPOL PP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	53	53	55		60		75		SATPOL PP
				Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100	100	100		100		100		SATPOL PP
			URUSAN BIDANG SOSIAL						**9.635.000.000**		**12.038.400.000**		**65.106.400.000**	**DINSOSPERMASDES**
1	6		Sosial						6.595.000.000		8.038.400.000		43.685.400.000	DINSOSPERMASDES
1	6	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2.665.000.000		2.896.400.000		15.468.400.000	DINSOSPERMASDES
				Persentase realisasi keuangan program	%	73	92	100		100		100		DINSOSPERMASDES
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINSOSPERMASDES
1	6	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30.000.000		35.000.000		185.000.000	DINSOSPERMASDES
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINSOSPERMASDES
1	6	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil						1.350.000.000		1.700.000.000		9.250.000.000	DINSOSPERMASDES
				Persentase Fakir Miskin (FM) yang telah berusaha bekerja	%	NA	25	50		50		50		DINSOSPERMASDES
				Persentase Lanjut Usia Miskin/ terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	NA	18.72	37.53		37.53		37.53		DINSOSPERMASDES
1	6	16	Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial						1.500.000.000		2.092.000.000		11.502.000.000	DINSOSPERMASDES
				Persentase PMKS yang mendapat perlindungan	%	100	100	100		100		100		DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	9.44	9.44	9.44		39.58		60.18		DINSOSPERMASDES
				Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	NA	NA	8.33		8.33		41.67		DINSOSPERMASDES
				Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100		100		100		DINSOSPERMASDES
				Persentase PMKS yang tertangani	%	43.49	47.78	52.05		52.15		52.33		DINSOSPERMASDES
				Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	NA	100		100		100		DINSOSPERMASDES
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi	%	NA	NA	100		100		100		DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				kebutuhan dasarnya di luar panti										
				Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0	1.00	13.04		21.74		100		DINSOSPERMASDES
				Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	43.19	47.55	51.41		51.50		51.66		DINSOSPERMASDES
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	43.19	47.55	51.42		51.51		51.67		DINSOSPERMASDES
				Persentase PMKS non potensial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	NA	1.33	7.00		9.31		56.43		DINSOSPERMASDES
				Persentase PMKS potensial yang telah berusaha/ bekerja	%	NA	25	25		25		25		DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	NA	NA	100		100		100		DINSOSPERMASDES
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	NA	NA	100		100		100		DINSOSPERMASDES
				Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100		100		100		DINSOSPERMASDES
				Persentase penyandang disabilitas yang meningkat fungsi fisiknya	%	NA	100	100		100		100		DINSOSPERMASDES
				Persentase PMKS yang berubah sikap perilakunya	%	NA	25	25		25		25		DINSOSPERMASDES
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi	%	NA	NA	100		100		100		DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				kebutuhan dasarnya di luar panti										
				Persentase anak yatim dan berkebutuhan khusus/difabel yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	NA	NA	0		26.95		26.95		DINSOSPERMASDES
1	6	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						850.000.000		1.065.000.000		5.880.000.000	DINSOSPERMASDES
				Persentase lembaga masyarakat yang aktif berperan dalam pembangunan	%	NA	75	83		83		92		DINSOSPERMASDES
				Persentae Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	0	0		0		100		DINSOSPERMASDES
1	6	22	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan						200.000.000		250.000.000		1.400.000.000	DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase masyarakat dan generasi muda yg sadar akan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	NA	50	50		50		50		DINSOSPERMASDES
				Nilai kondisi TMP terhadap standar nasional	%	81	81	85		85		90		DINSOSPERMASDES
				Persentase keluarga pahlawan perintis/veteran yang mampu berusaha secara layak	%	NA	50	50		50		50		DINSOSPERMASDES
			URUSAN BIDANG TENAGA KERJA						**7.673.870.000**		**8.098.830.000**		**42.848.740.000**	**DINAKERKOPUKM**
2	1		Tenaga Kerja						5.816.873.999		6.198.830.000		32.942.448.999	DINAKERKOPUKM
2	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						3.401.190.000		3.401.192.000		17.532.398.580	DINAKERKOPUKM
				Persentase realisasi keuangan program	%	83	79	100		100		100		DINAKERKOPUKM
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINAKERKOPUKM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						100.000.000		100.000.000		534.304.000	DINAKERKOP UKM
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINAKERKOP UKM
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINAKERKOP UKM
2	1	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						1.575.683.999		1.772.638.000		8.898.321.999	DINAKERKOP UKM
				Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	49.58	66.64	55.00		57.00		63.00		DINAKERKOP UKM
2	1	16	Program Peningkatan Kesempatan kerja						325.000.000		325.000.000		2.198.749.420	DINAKERKOP UKM
				Persentase lowongan kerja yang terpenuhi	%	NA	NA	55		57		63		DINAKERKOP UKM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	1	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						100.000.000		200.000.000		1.176.678.000	DINAKERKOP UKM
				Persentase perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI) yang prosedural	%	NA	NA	75		80		95		DINAKERKOP UKM
2	1	18	Program Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja						315.000.000		400.000.000		2.601.997.000	DINAKERKOP UKM
				Persentase perusahaan yang melaksanakan ketentuan UMK	%	86	87	70		72		80		DINAKERKOP UKM
				Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	NA	NA	60		80		100		DINAKERKOP UKM
				Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun		NA	NA	6.16		6.16		6.16		DINAKERKOP UKM
			URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN						**12.695.000.000**		**13.202.800.000**		**68.631.100.000**	**DPPKBP3A**

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			PERLINDUNGAN ANAK											
2	2		Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						1.400.000.000		1.500.000.000		8.505.000.000	DPPKBP3A
2	2	16	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender						300.000.000		350.000.000		1.945.000.000	DPPKBP3A
				Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
				Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
				Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
2	2	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						600.000.000		650.000.000		3.460.000.000	DPPKBP3A

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Orang	18	18	24		24		24		DPPKBP3A
				Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
				Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49	49	49		49		49		DPPKBP3A
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				mendapatkan layanan bantuan hukum										
				Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
				Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit										
				Rasio KDRT	%	0.0019	0.0018	0.0017		0.0016		0.0013		DPPKBP3A
				Rasio perempuan korban kekerasan	%	NA	0.50	0.49		0.48		0.45		DPPKBP3A
				Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
2	2	20	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak						500.000.000		500.000.000		3.100.000.000	DPPKBP3A
				Jumlah kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan)	Kelompok	30	31	31		32		35		DPPKBP3A

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Preferensi kekerasan pada anak perempuan	%	36.89	35.63	34.37		33.11		29.32		DPPKBP3A
				Rasio anak korban kekerasan	%	0.011	0.0110	0.010		0.009		0.006		DPPKBP3A
2	6		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						2.275.000.000		2.380.000.000		12.506.000.000	DPPKBP3A
2	6	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2.250.000.000		2.350.000.000		12.331.000.000	DPPKBP3A
				Persentase realisasi keuangan program	%	79	92	100		100		100		DPPKBP3A
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
2	6	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						25.000.000		30.000.000		175.000.000	DPPKBP3A
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
			URUSAN BIDANG PANGAN											
2	3		Pangan						4.775.000.000		5.173.032.000		27.803.006.812	DINPERTANKP
2	3	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						3.125.000.000		3.358.000.000		17.729.642.812	DINPERTANKP
				Persentase realisasi keuangan program	%	75	83	100		100		100		DINPERTANKP
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINPERTANKP
2	3	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						250.000.000		275.032.000		1.526.274.000	DINPERTANKP
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINPERTANKP
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan	%	100	100	100		100		100		DINPERTANKP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				perangkat daerah										
2	3	15	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan						500.000.000		550.000.000		3.052.500.000	DINPERTANKP
				Konsumsi protein	gram/kapita/hari	45.17	45.20	48.15		50.35		57.00		DINPERTANKP
				Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	70.00	92.43	93.43		94.43		97.43		DINPERTANKP
				Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2391	2396	2401		2406		2421		DINPERTANKP
2	3	16	Program Penguatan Cadangan Pangan						900.000.000		990.000.000		5.494.590.000	DINPERTANKP
				Tingkat ketersediaan energi	%	91	91	92		93		96		DINPERTANKP
				Persentase Penanganan daerah rawan pangan	%	62	62	63		64		100		DINPERTANKP
				Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	95	95	96		97		100		DINPERTANKP
				Tingkat ketersediaan protein (%)	%	91	91	92		93		96		DINPERTANKP
			URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						**42.050.000.000**		**49.042.000.000**		**200.234.000.000**	**DLH**

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	5		Lingkungan Hidup						42.050.000.000		49.042.000.000		200.234.000.000	DLH
2	5	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						3.600.000.000		4.300.000.000		21.463.200.000	DLH
				Persentase realisasi keuangan program	%	84	82	100		100		100		DLH
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DLH
2	5	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						50.000.000		50.000.000		250.000.000	DLH
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DLH
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DLH
2	5	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						19.200.000.000		22.480.900.000		66.780.900.000	DLH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	NA	22	20		22		27		DLH
				Persentase cakupan area pelayanan persampahan	%	NA	NA	50		52		58		DLH
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	54	60	100		97		99		DLH
				Timbulan sampah yang ditangani	%	54	60	100		97		99		DLH
2	5	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						325.000.000		600.000.000		3.025.000.000	DLH
				Persentase ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan	%	NA	100	70		70		70		DLH
				Persentase kegiatan monitoring/pengawasan kegiatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	%	NA	NA	20		40		100		DLH
2	5	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						255.000.000		500.000.000		2.355.000.000	DLH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan biomassa	%	42	47	10		20		50		DLH
				Persentase pembangunan sumur resapan dan pengadaan alat biopori	%	NA	NA	10		15		30		DLH
2	5	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						445.000.000		750.000.000		3.545.000.000	DLH
				Persentase sengketa lingkungan hidup yang ditangani	%	100	100	100		100		100		DLH
				Persentase dokumen lingkungan yang diterbitkan	%	100	100	100		100		100		DLH
				Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah KabupatenKota	%	NA	NA	100		100		100		DLH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupatenkota										
2	5	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						7.500.000.000		7.000.000.000		38.480.999.000	DLH
				Persentase RTH publik	%	NA	20.000	20.012		20.024		20.052		DLH
				Persentase RTH layak anak	%	NA	20.000	20.012		20.024		20.052		DLH
2	5	25	Program Penataan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan						200.000.000		-		200.000.000	DLH
				Persentase kegiatan monitoring pengawasan kegiatan pelaku usaha dan atau kegiatan	%	NA	NA	20		0		20		DLH
				Persentase sengketa lingkungan hidup yang ditangani	%	100	100	100		0		100		DLH
2	5	26	Program Peningkatan Pelayanan						550.000.000		550.000.000		2.750.000.000	DLH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup											
				Persentase realisasi keuangan program	%	99.8	97	100		100		100		DLH
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DLH
2	5	27	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA / TPST						903.285.000		1.500.000.000		6.851.086.000	DLH
				Persentase realisasi keuangan program	%	87.9	90.9	100		100		100		DLH
				Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		74	73	72		72		72		DLH
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DLH
2	5	28	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto						4.234.900.000		6.311.100.000		29.746.000.000	DLH
				Persentase jumlah sampah di wilayah Purwokerto yang ditangani	%	100	100	100		100		100		DLH
2	5	29	Program Peningkatan Pelayanan						1.076.200.000		1.000.000.000		5.076.200.000	DLH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Persampahan Wilayah Banyumas											
				Persentase jumlah sampah di wilayah Banyumas yang ditangani	%	100	100	100		100		100		DLH
2	5	30	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajibarang						985.000.000		1.000.000.000		4.985.000.000	DLH
				Persentase jumlah sampah di wilayah Ajibarang yang ditangani	%	100	100	100		100		100		DLH
2	5	31	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wanggon						928.150.000		1.000.000.000		4.928.150.000	DLH
				Persentase jumlah sampah di wilayah Wangon yang ditangani	%	100	100	100		100		100		DLH
2	5	32	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpiuh						831.150.000		1.000.000.000		4.831.150.000	DLH
				Persentase jumlah sampah di wilayah	%	100	100	100		100		100		DLH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Sumpiuh yang ditangani										
2	5	33	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran						966.315.000		1.000.000.000		4.966.315.000	DLH
				Persentase jumlah sampah di wilayah Kembaran yang ditangani	%	100	100	100		100		100		DLH
			URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**11.716.900.000**		**12.865.600.000**		**67.546.700.000**	**DINDUKCAPIL**
2	6		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						11.716.900.000		12.865.600.000		67.546.700.000	DINDUKCAPIL
2	6	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1.445.000.000		1.838.662.000		9.484.624.000	DINDUKCAPIL
				Persentase realisasi keuangan program	%	87	90	100		100		100		DINDUKCAPIL
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	6	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						75.000.000		75.000.000		430.000.000	DINDUKCAPIL
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL
2	6	15	Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan						8.021.938.000		8.621.938.000		44.127.114.000	DINDUKCAPIL
				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	94	95	96		97		100		DINDUKCAPIL
				Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL
				Persentase pemohon KTP-Elektronik yang terlayani	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	81.5	83.4	85.0		87.0		95.0		DINDUKCAPIL
				Persentase pemohon Kartu Identitas Anak yang terlayani	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL
				Persentase pemohon Kartu Keluarga yang terlayani	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL
2	6	16	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil						475.000.000		500.000.000		4.325.000.000	DINDUKCAPIL
				Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	80	95	96		97		100		DINDUKCAPIL
				Persentase pemohon akta perkawinan yang terlayani	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL
				Persentase pemohon akta kematian yang terlayani	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL
				Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL
				Persentase pemohon akta kelahiran yang terlayani	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Rasio bayi berakte kelahiran	%	86.0	90.0	92.0		93.0		98.7		DINDUKCAPIL
2	6	17	Program Pengelolaan Informasi Adminduk						1.400.000.000		1.500.000.000		7.400.000.000	DINDUKCAPIL
				Persentase kecamatan yang update database kependudukan	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL
				Persentase ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL
2	6	18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan						299.962.000		330.000.000		1.779.962.000	DINDUKCAPIL
				Persentase instansi pengguna data kependudukan yang melakukan perjanjian kerja sama	%	100	100	100		100		100		DINDUKCAPIL
			URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**3.040.000.000**		**4.000.000.000**		**21.421.000.000**	**DINSOSPERMASDES**

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	7		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						3.040.000.000		4.000.000.000		21.421.000.000	DINSOSPERMASDES
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat						1.100.000.000		1.450.000.000		7.155.000.000	DINSOSPERMASDES
				Persentase desa yang menghasilkan produk unggulan	%	NA	NA	50		60		57		DINSOSPERMASDES
				Ratarata jumlah kelompok binaan PKK	%	17.94	17.94	17.94		17.94		89.70		DINSOSPERMASDES
				Persentase LPM aktif	%	100	100	100		100		100		DINSOSPERMASDES
				Persentase desa yg terpelihara kelestarian adatnya	%	NA	NA	4		5		23		DINSOSPERMASDES
				Persentase PKK aktif	%	100	100	100		100		100		DINSOSPERMASDES
				Persentase LPM berprestasi	%	0.91	1.81	0.30		0.30		1.81		DINSOSPERMASDES
				Ratarata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM	%	17.94	17.94	17.94		17.94		89.70		DINSOSPERMASDES
2	7	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan						390.000.000		500.000.000		2.740.000.000	DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Pasar Desa yang terbangun	%	NA	28.77	14.00		14.00		71.00		DINSOSPERMASDES
				Persentase Bumdes yg meningkat stratanya	%	NA	14.62	7.00		7.00		37.00		DINSOSPERMASDES
				Persentase petani tembakau/cengkih yang dapat meningkatkan kuantitas/kualitas produksi	%	NA	50	50		50		50		DINSOSPERMASDES
				Persentase desa yg membentuk Bumdes	%	NA	73.09	5.00		5.00		28.00		DINSOSPERMASDES
2	7	17	Program Peningkatan Partisispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa						600.000.000		750.000.000		4.085.000.000	DINSOSPERMASDES
				Persentase desa yang meningkat prasarananya	%	NA	1.99	2.66		2.66		13.29		DINSOSPERMASDES
				Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 86 Th. 2017)	%	0	0.23	1.67		5.06		5.06		DINSOSPERMASDES
2	7	18	Program Peningkatan						70.000.000		100.000.000		540.000.000	DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa											
				Persentase aparatur desa yg meningkat kapasitasnya dalam membentuk kawasan perdesaan	%	NA	100	100		100		100		DINSOSPERMASDES
2	7	19	Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa						150.000.000		225.000.000		1.491.000.000	DINSOSPERMASDES
				Persentase kecamatan yg telah membentuk posyantek antar desa	%	NA	NA	8.70		8.70		43.46		DINSOSPERMASDES
				Persentase desa yg telah membentuk Posyantek desa	%	NA	NA	0.66		0.66		3.32		DINSOSPERMASDES
				Persentase desa yg telah mengembangkan/memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk usaha perdesaan	%	NA	NA	0.66		0.66		3.32		DINSOSPERMASDES
				Persentase desa yg telah mengembangkan potensi sumber daya alam utk	%	NA	NA	0.66		0.66		3.32		DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				kesejahteraan masy desa										
2	7	20	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa						460.000.000		575.000.000		3.260.000.000	DINSOSPERMASDES
				Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 86 Th. 2017)	%	NA	0.23	0.12		0.12		0.11		DINSOSPERMASDES
				Raperda kawasan perdesaan yang tersusun	Dokumen	0	0	1		0		1		DINSOSPERMASDES
				Persentase kader pemberdayaan masyarakat desa yang meningkat kapasitasnya	%	NA	90	90		90		90		DINSOSPERMASDES
				Kelulusan sarjana per desa	Orang	NA	NA	0		0		3		DINSOSPERMASDES
				Kelembagaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang terbentuk	lembaga	0	1	2		2		10		DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	7	21	Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa						270.000.000		400.000.000		2.150.000.000	DINSOSPERMASDES
				Persentase aparatur desa yang terbina	%	100	100	100		100		100		DINSOSPERMASDES
				Persentase desa dengan administrasi baik	%	NA	NA	100		100		100		DINSOSPERMASDES
			URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**9.020.000.000**		**9.322.800.000**		**47.620.100.000**	**DPPKBP3A**
2	8		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						9.020.000.000		9.322.800.000		47.620.100.000	DPPKBP3A
2	8	15	Program Pelayanan Keluarga Berencana						1.200.000.000		1.350.000.000		7.193.000.000	DPPKBP3A
				Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	%	75.25	75.39	75.89		76.39		76.89		DPPKBP3A
				Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19 tahun) per 1000 perempuan usia 15	%	0.41	0.32	0.30		0.28		0.24		DPPKBP3A

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				- 19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)										
				Rasio Akseptor KB	%	73	74	70		70		74		DPPKBP3A
				Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	57	68	68		69		70		DPPKBP3A
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	%	78.81	80.31	80.81		81.31		82.81		DPPKBP3A
				Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Orang	5770	5720	5663		5606		5550		DPPKBP3A
				Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	57	58	58		59		60		DPPKBP3A
				Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	70	70	70		70		74		DPPKBP3A
				Angka Kelahiran Total TFR	Orang	2.31	2.30	2.29		2.28		2.25		DPPKBP3A
				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	36.75	37.38	38.00		39.00		42.00		DPPKBP3A
				Persentase Keluarga Prasejahtera dan	%	47.00	47.00	46.90		46.80		46.50		DPPKBP3A

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Keluarga Sejahtera 1										
2	8	25	Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB						7.820.000.000		7.972.800.000		40.427.100.000	DPPKBP3A
				Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
				Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	17	20	23		25		35		DPPKBP3A
				Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB	%	100	100	100		100		100		DPPKBP3A
				Rata-rata jumlah anak perkeluarga	anak	2.80	2.72	2.60		2.50		2.30		DPPKBP3A
				Rasio Ketergantungan	%	49.8	49.0	49.0		49.0		49.0		DPPKBP3A

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	6	6	6		8		10		DPPKBP3A
			URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN						**20.000.000.000**		**28.500.000.000**		**116.000.000.000**	**DINHUB**
2	9		Perhubungan						20.000.000.000		28.500.000.000		116.000.000.000	DINHUB
2	9	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						3.950.000.000		3.700.000.000		19.500.000.000	DINHUB
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINHUB
				Persentase realisasi keuangan program	%	92	92	92		92		93		DINHUB
2	9	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						225.000.000		225.000.000		1.300.000.000	DINHUB
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	NA	NA	50		50		50		DINHUB

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	NA	NA	100		100		100		DINHUB
2	9	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						2.450.000.000		2.550.000.000		13.300.000.000	DINHUB
				Persentase berfungsinya fasilitas kelengkapan jalan dengan baik	%	89	90	90		90		92		DINHUB
2	9	17	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						650.000.000		1.000.000.000		5.450.000.000	DINHUB
				Rasio ijin trayek		0.064	0.066	0.068		0.071		0.077		DINHUB
2	9	18	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						7.050.000.000		9.500.000.000		41.200.000.000	DINHUB
				Persentase pemasangan rambu-rambu	%	36	39	41		43		48		DINHUB
				Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan	%	41	44	47		50		59		DINHUB

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase ketersediaan terminal	%	37.5	37.5	37.5		50.0		62.5		DINHUB
2	9	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas						3.550.000.000		3.425.000.000		17.975.000.000	DINHUB
				Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	%	95	96	96		97		100		DINHUB
				Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	%	100	100	100		100		100		DINHUB
2	9	20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor						675.000.000		6.700.000.000		9.825.000.000	DINHUB
				Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor	%	92	93	94		94		96		DINHUB
2	9	21	Program Peningkatan						1.450.000.000		1.400.000.000		7.450.000.000	DINHUB

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan											
				Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	%	100	100	100		100		100		DINHUB
			URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**7.750.000.000**		**8.500.000.000**		**44.750.000.000**	**DINKOMINFO**
2	10		Komunikasi dan Informatika						7.350.000.000		7.775.000.000		40.800.000.000	DINKOMINFO
2	10	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1.850.000.000		2.175.000.000		11.450.000.000	DINKOMINFO
				Persentase realisasi keuangan program	%	76	89	100		100		100		DINKOMINFO
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINKOMINFO
2	10	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						100.000.000		100.000.000		500.000.000	DINKOMINFO
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINKOMINFO

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINKOMINFO
2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						275.000.000		350.000.000		1.850.000.000	DINKOMINFO
				Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas	%	11	22	37		51		100		DINKOMINFO
2	10	17	Program Peningkatan SDM Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						100.000.000		-		100.000.000	DINKOMINFO
				Persentase peningkatan SDM TIK dn aparatur	%	NA	NA	100		0		100		DINKOMINFO
2	10	19	Program Pengembangan E Government						925.000.000		1.375.000.000		6.800.000.000	DINKOMINFO
				Persentase Perangkat Daerah yang mengelola sistem informasi secara baik	%	35	40	75		80		100		DINKOMINFO

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	10	20	Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika						3.000.000.000		2.500.000.000		13.300.000.000	DINKOMINFO
				Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic	%	11	11	18		36		100		DINKOMINFO
2	10	21	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik						1.100.000.000		1.275.000.000		6.800.000.000	DINKOMINFO
				Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	%	100	100	100		100		100		DINKOMINFO
				Rasio Lapak aduan publik berbasis IT	%	NA	NA	100		100		100		DINKOMINFO
			URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2	11		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						1.606.996.001		1.650.000.000		8.656.291.001	DINAKERKOP UKM
2	11	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif						605.000.000		-		605.000.000	DINAKERKOP UKM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina	%	NA	NA	2		0		2		DINAKERKOP UKM
2	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						349.996.001		-		349.996.001	DINAKERKOP UKM
				Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina	%	NA	NA	2		3		6		DINAKERKOP UKM
2	11	17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						652.000.000		350.000.000		2.186.000.000	DINAKERKOP UKM
				Persentase koperasi aktif	%	76.00	76.00	76.25		76.50		77.25		DINAKERKOP UKM
2	11	18	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah						-		1.300.000.000		5.515.295.000	DINAKERKOP UKM
				Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina	%	NA	NA	2		3		6		DINAKERKOP UKM
			URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL						**4.810.000.000**		**5.502.400.000**		**30.147.210.000**	**DPMPTSP**

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	12		Penanaman Modal						4.810.000.000		5.502.400.000		30.147.210.000	DPMPTSP
2	12	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						3.485.000.000		3.910.000.000		22.704.810.000	DPMPTSP
				Persentase realisasi keuangan program	%	86	90	100		100		100		DPMPTSP
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DPMPTSP
2	12	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						50.000.000		100.000.000		450.000.000	DPMPTSP
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DPMPTSP
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DPMPTSP
2	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						275.000.000		280.000.000		1.455.000.000	DPMPTSP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Jumlah Investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	Loi	NA	5	2		3		20		DPMPTSP
2	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						100.000.000		100.000.000		500.000.000	DPMPTSP
				Nilai realisasi tersier	Milyar Rupiah	443	417	230		234		1181		DPMPTSP
2	12	17	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah						400.000.000		300.000.000		1.050.000.000	DPMPTSP
				Jumlah sektor potensi investasi yang tergali potensi peluang investasi	sektor potensi	NA	NA	2		2		10		DPMPTSP
2	12	18	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan						275.000.000		362.400.000		1.762.400.000	DPMPTSP
				Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	%	NA	90	90		90		90		DPMPTSP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	12	19	Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan						225.000.000		450.000.000		2.225.000.000	DPMPTSP
				Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100		100		100		DPMPTSP
			URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**23.305.000.000**		**24.217.200.000**		**125.205.300.000**	**DINPORABUDPAR**
2	13		Kepemudaan dan Olah Raga						10.250.000.000		10.975.000.000		54.248.060.000	DINPORABUDPAR
2	13	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2.050.000.000		2.150.000.000		11.698.060.000	DINPORABUDPAR
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINPORABUDPAR
				Persentase realisasi keuangan program	%	86	84	100		100		100		DINPORABUDPAR
2	13	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	DINPORABUDPAR
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINPORABUDPAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINPORABUD PAR
2	13	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan						900.000.000		950.000.000		5.450.000.000	DINPORABUD PAR
				Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	NA	NA	51		56		71		DINPORABUD PAR
2	13	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda						250.000.000		250.000.000		1.750.000.000	DINPORABUD PAR
				Persentase pertumbuhan wirausaha muda	%	NA	NA	20		20		100		DINPORABUD PAR
2	13	18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan						1.400.000.000		1.525.000.000		6.250.000.000	DINPORABUD PAR
				Persentase sarana prasarana kepemudaan yang tersedia	%	59.26	66.67	70.37		74.07		85.19		DINPORABUD PAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	13	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga						175.000.000		200.000.000		1.125.000.000	DINPORABUD PAR
				Cakupan pelatih bersertifikasi level dasar	%	23	23	43		63		100		DINPORABUD PAR
				Cakupan pelatih bersertifikasi level 2	%	NA	10	0		0		30		DINPORABUD PAR
2	13	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						2.200.000.000		2.300.000.000		11.650.000.000	DINPORABUD PAR
				Persentase peningkatan perolehan medali tingkat Provinsi dan Nasional	%	NA	NA	19.06		19.35		100		DINPORABUD PAR
				Persentase cabang olahraga yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional	%	NA	36	80		50		80		DINPORABUD PAR
				Cakupan pembinaan atlet muda/pelajar	%	NA	3.63	3.75		3.75		18.75		DINPORABUD PAR
2	13	21	Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana						2.550.000.000		3.400.000.000		14.800.000.000	DINPORABUD PAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Olahraga											
				Persentase jumlah venue olahraga yang sesuai standart	%	100	100	100		100		100		DINPORABUD PAR
2	13	23	Program Pengelolaan GOR Satria						525.000.000		-		525.000.000	DINPORABUD PAR
				Realisasi keuangan program pengelolaan GOR Satria	%	NA	NA	100		0		100		DINPORABUD PAR
				Realisasi fisik program pengelolaan GOR Satria	%	NA	NA	100		0		100		DINPORABUD PAR
			URUSAN BIDANG STATISTIK											
2	14		Statistik						100.000.000		350.000.000		1.675.000.000	DINKOMINFO
2	14	15	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah						100.000.000		350.000.000		1.675.000.000	DINKOMINFO
				Persentase keterisian Daftar Informasi Publik	%	100	100	100		100		100		DINKOMINFO
				Persentase ketersediaan data informasi dan	%	100	100	100		100		100		DINKOMINFO

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				statistik daerah										
			URUSAN BIDANG PERSANDIAN											
2	15		Persandian						300.000.000		375.000.000		2.275.000.000	DINKOMINFO
2	15	15	Program Peningkatan Keamanan Informasi						300.000.000		375.000.000		2.275.000.000	DINKOMINFO
				Standarisasi Keamanan Data ISO 27001	anek	3	7	17		17		17		DINKOMINFO
			URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN											**DINPORABUD PAR**
2	16		Kebudayaan						4.950.000.000		4.950.000.000		26.600.000.000	DINPORABUD PAR
2	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya						300.000.000		350.000.000		1.850.000.000	DINPORABUD PAR
				Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	NA	63.64	63.64		72.73		100		DINPORABUD PAR
2	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya						2.350.000.000		2.050.000.000		11.150.000.000	DINPORABUD PAR
				Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati	%	NA	2	28		44		100		DINPORABUD PAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya						2.300.000.000		2.550.000.000		13.600.000.000	DINPORABUD PAR
				Persentase jenis kesenian yang dipentaskan	%	NA	33.96	37.7		41.51		52.83		DINPORABUD PAR
			URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN						**4.975.000.000**		**5.096.000.000**		**27.346.590.000**	**DINARPUSDA**
2	17		Perpustakaan						717.000.000		790.000.000		4.257.000.000	DINARPUSDA
2	17	15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan						717.000.000		790.000.000		4.257.000.000	DINARPUSDA
				Indek Kepuasan Masyarakat IKM Layanan Perpustakaan	Nilai	79.98	81.89	81.95		82.00		82.15		DINARPUSDA
				Persentase jumlah perpustakaan terbina	%	5.55	12.50	19.44		26.38		47.22		DINARPUSDA
				Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah	%	4.80	4.90	5.39		5.93		7.89		DINARPUSDA
			URUSAN BIDANG KEARSIPAN											**DINARPUSDA**
2	18		Kearsipan						4.258.000.000		4.306.000.000		23.089.590.000	DINARPUSDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	18	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						3.846.000.000		3.851.000.000		20.572.590.000	DINARPUSDA
				Persentase realisasi keuangan program	%	87	88	100		100		100		DINARPUSDA
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINARPUSDA
2	18	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						35.000.000		40.000.000		275.000.000	DINARPUSDA
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINARPUSDA
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINARPUSDA
2	18	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah						377.000.000		415.000.000		2.242.000.000	DINARPUSDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase unit kerja/ OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar	%	NA	5.5	9.1		14.5		36.4		DINARPUSDA
				Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas	%	NA	10	25		40		90		DINARPUSDA
			URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						**7.480.420.475**		**7.779.840.000**		**41.859.500.475**	**DINKANNAK**
3	1		Kelautan dan perikanan						4.095.654.000		4.167.840.000		22.421.124.000	DINKANNAK
3	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2.408.232.000		2.592.840.000		12.801.072.000	DINKANNAK
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINKANNAK
				Persentase realisasi keuangan program	%	83	88	100		100		100		DINKANNAK
3	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						387.497.000		400.000.000		2.087.497.000	DINKANNAK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINKANNAK
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINKANNAK
3	1	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan						724.925.000		425.000.000		3.949.925.000	DINKANNAK
				Peningkatan jumlah kelompok yang naik kelas	Kelompok	NA	3	10		10		50		DINKANNAK
				Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10162	10249	10403		10559		53597		DINKANNAK
				Persentase Kelompok Budidaya bersertifikat	%	30	30	20		20		20		DINKANNAK
3	1	23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan						275.000.000		400.000.000		1.882.630.000	DINKANNAK
				Produksi olahan hasil perikanan	Ton	170.2	173.6	173.6		177.1		903.4		DINKANNAK
				Peningkatan angka konsumsi ikan	Kg	0.05	0.05	0.10		0.10		0.50		DINKANNAK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Kelompok Usaha Perikanan bersertifikat	%	NA	NA	20		20		20		DINKANNAK
				Persentase kelompok pengolah dan pemasaran Poklahsar hasil perikanan yang terbina	%	80	100	20		20		100		DINKANNAK
3	1	24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar						100.000.000		150.000.000		700.000.000	DINKANNAK
				Jumlah Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	Lokasi	27	21	20		20		100		DINKANNAK
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton	839	872	885		898		4560		DINKANNAK
3	1	25	Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar						200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	DINKANNAK
				Persentase peningkatan produksi benih ikan	%	NA	11.12	10.00		10.00		10.00		DINKANNAK
				Produksi calon induk gurame	Ekor	NA	NA	400		400		2000		DINKANNAK
			URUSAN BIDANG PARIWISATA											**DINPORABUD PAR**
3	2		Pariwisata						8.105.000.000		8.292.200.000		44.357.240.000	DINPORABUD PAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	2	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						1.400.000.000		1.250.000.000		6.850.000.000	DINPORABUD PAR
				Persentase peningkatan promosi pariwisata	%	9	8	20		40		100		DINPORABUD PAR
3	2	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						4.680.000.000		6.142.200.000		30.682.240.000	DINPORABUD PAR
				Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%	NA	16.7	16.7		16.7		83.5		DINPORABUD PAR
3	2	17	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata						725.000.000		900.000.000		5.525.000.000	DINPORABUD PAR
				Persentase peningkatan SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	NA	257	20		40		100		DINPORABUD PAR
3	2	18	Program Pengelolaan Lokawisata Baturaden						1.300.000.000		-		1.300.000.000	DINPORABUD PAR
				Realisasi keuangan program pengelolaan Lokawisata Baturraden	%	100	100	100		0		100		DINPORABUD PAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Realisasi fisik program pengelolaan Lokawisata Baturaden	%	100	100	100		0		100		DINPORABUD PAR
			URUSAN BIDANG PERTANIAN											
3	3		Pertanian						3.384.766.475		3.612.000.000		19.438.376.475	DINKANNAK
3	3	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak						625.000.000		1.125.000.000		6.110.000.000	DINKANNAK
				Persentase penurunan Angka kematian ternak ayam	%	NA	0.20	0.05		0.05		0.02		DINKANNAK
				Persentase penurunan Angka kesakitan ternak ayam	%	NA	3.0	0.1		0.1		0.1		DINKANNAK
				Persentase penurunan Angka kematian ternak Kambing dan Domba	%	NA	0.30	0.01		0.01		0.01		DINKANNAK
				Persentase penurunan Angka kesakitan ternak Kambing dan Domba	%	NA	4.0	0.1		0.1		0.1		DINKANNAK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase penurunan Angka kematian ternak Ternak Besar	%	NA	0.70	0.03		0.03		0.03		DINKANNAK
				Persentase penurunan Angka kesakitan Ternak Besar	%	NA	4.3	0.1		0.1		0.1		DINKANNAK
3	3	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						2.034.766.475		1.425.000.000		7.116.376.475	DINKANNAK
				Populasi Ayam Buras	Ekor	1134568	1135135	1085558		1118125		1221805		DINKANNAK
				Populasi Domba	Ekor	24721	24746	15646		16115		17609		DINKANNAK
				Populasi Itik	Ekor	183473	183565	146323		150713		164688		DINKANNAK
				Populasi Ayam Petelur	Ekor	1408776	1409199	1438247		1481394		1618759		DINKANNAK
				Populasi ayam Pedaging	Ekor	7537900	8208000	8454240		8707867		9515322		DINKANNAK
				Populasi Kambing	Ekor	248489	248613	170165		175734		192092		DINKANNAK
				Populasi Sapi Perah	Ekor	2435	2453	2347		2418		2642		DINKANNAK
				Populasi Sapi Potong	Ekor	14361	14577	14781		15224		16636		DINKANNAK
3	3	23	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi						150.000.000		185.000.000		935.000.000	DINKANNAK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Peternakan											
				Produksi olahan hasil peternakan	Ton	NA	500.00	510.00		520.21		2654.06		DINKANNAK
				Persentase kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) hasil peternakan yang terlatih	%	16	12	16		16		16		DINKANNAK
				Persentase kelompok usaha peternakan berijin	%	NA	NA	10		10		10		DINKANNAK
3	3	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan						75.000.000		100.000.000		475.000.000	DINKANNAK
				Persentase kelompok ternak terlatih yang menerapkan teknologi	%	30	30	10		10		50		DINKANNAK
3	3	25	Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT						200.000.000		477.000.000		3.152.000.000	DINKANNAK
				Persentase kenaikan ketersediaan bibit hijauan pakan ternak yang unggul	%	NA	NA	100		100		100		DINKANNAK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase kenaikan ketersediaan bibit sapi perah	%	NA	NA	100		100		100		DINKANNAK
3	3	26	Prpgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan						150.000.000		150.000.000		900.000.000	DINKANNAK
				Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Pelayanan Kesehatan Hewan	Nilai	76	76	76		77		80		DINKANNAK
3	3	27	Program Penyediaan Daging Ternak ASUH						150.000.000		150.000.000		750.000.000	DINKANNAK
				Persentase pengawasan pemotongan ternak di RPH	%	100	100	100		100		100		DINKANNAK
3	3		Pertanian						20.171.700.000		23.571.568.000		123.325.893.188	DINPERTANKP
3	3	11	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian						10.078.374.000		12.078.374.000		61.991.870.000	DINPERTANKP
				Persentase kelompok tani terlatih yang menerapkan	%	20	20	20		20		100		DINPERTANKP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				tekhnologi (%)										
3	3	14	Program Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kelembagaan Petani						2.418.326.000		-		2.418.326.000	DINPERTANKP
				Cakupan bina kelompok petani	%	74.00	74.00	76.05		0		76.05		DINPERTANKP
3	3	15	Program Perlindungan Tanaman						350.000.000		385.000.000		2.136.785.000	DINPERTANKP
				Persentase penurunan serangan OPT (%)	%	2	2	2		2		10.00		DINPERTANKP
3	3	16	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan						1.700.000.000		2.620.000.000		13.026.120.000	DINPERTANKP
				Produksi tanaman pala	Ton	25.97	36.35	38.97		41.62		221.60		DINPERTANKP
				Produksi tanaman lada	Ton	58.77	59.36	59.95		60.55		305.81		DINPERTANKP
				Produksi tanaman kelapa deres	Ton	54731.00	53408.86	54830.58		55388.89		279792.09		DINPERTANKP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Rasio jumlah petani pengguna safety belt	%	NA	NA	0.00		0.25		1.00		DINPERTANKP
				Produksi tanaman kopi	Ton	142.00	143.00	144.90		146.34		739.11		DINPERTANKP
				Produksi tanaman tembakau	Ton	14.00	14.00	14.41		14.56		73.53		DINPERTANKP
				Produksi tanaman cengkeh	Ton	310.00	484.16	486.81		489.97		2950.17		DINPERTANKP
				Produksi tanaman kelapa dalam	Ton	13284.00	13905.12	14039.02		14174.53		71563.81		DINPERTANKP
3	3	17	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian						500.000.000		550.000.000		3.052.550.000	DINPERTANKP
				Jumlah Produksi Hasil olahan produk pertanian	Ton	NA	NA	120		122		128		DINPERTANKP
3	3	18	Program Penyediaan Benih Pertanian						500.000.000		500.000.000		2.500.000.000	DINPERTANKP
				Jumlah komoditas pertanian yang dibuat perbenihan	Jenis	3	3	3		3		15		DINPERTANKP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	3	19	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura						4.400.000.000		4.790.000.000		25.060.000.000	DINPERTANKP
				Produktivitas tanaman Jagung	ton / ha	5.92	6.30	6.36		6.46		6.60		DINPERTANKP
				Produksi tanaman Padi	Ton	375000	390000	400000		425000		22500000		DINPERTANKP
				Produktivitas tanaman Padi	ton / ha	5.57	5.63	5.77		5.89		6.25		DINPERTANKP
				Produksi tanaman Jagung	Ton	13006	13136	13267		13400		67677		DINPERTANKP
				Produksi tanaman Kedelai	Ton	1562.01	1578.00	1593.41		1609.34		8128.00		DINPERTANKP
				Produktivitas tanaman Kedelai	ton / ha	1.53	1.34	1.36		1.38		1.43		DINPERTANKP
				Produksi tanaman Cabai	Ton	1570.00	1800.10	1816.45		1832.50		9244.05		DINPERTANKP
				Produksi tanaman Durian	Ton	4862.40	9780.30	9829.41		9879.02		49648.07		DINPERTANKP
				Produksi tanaman Pisang	Ton	20510.80	27183.40	27390.56		27599.79		139066.13		DINPERTANKP
3	3	20	Program Pemberdayaan Penyuluh						225.000.000		-		225.000.000	DINPERTANKP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pertanian											
				Persentase penyuluh pertanian terlatih	%	100	100	100		0		100		DINPERTANKP
3	3	28	Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian						-		2.648.194.000		12.915.242.188	DINPERTANKP
				Cakupan bina petani	%	74.00	74.00	0		78.16		100		DINPERTANKP
				Persentase penyuluh pertanian terlatih	%	100	100	0		100		100		DINPERTANKP
			URUSAN BIDANG PERDAGANGAN						**18.352.400.000**		**18.878.500.000**		**98.254.600.000**	**DINPERINDAG**
3	6		Perdagangan						12.405.408.000		12.797.655.000		66.686.300.000	DINPERINDAG
3	6	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri						490.000.000		509.600.000		2.637.153.000	DINPERINDAG
				Persentase usaha perdagangan yang dibina dan	%	10.86	22.82	22.90		23.00		25.00		DINPERINDAG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				diawasi										
				Persentase Industri Kecil dan Menengah yang diikutkan dalam pameran	%	0.11	0.23	0.24		0.25		0.28		DINPERINDAG
3	6	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan						615.880.000		640.515.000		3.514.640.000	DINPERINDAG
				Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan	%	30.02	46.13	47.00		48.00		52.00		DINPERINDAG
3	6	20	Program Penigkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan						8.045.147.809		8.262.985.000		42.919.573.809	DINPERINDAG
				Persentase pasar yang sudah direvitalisasi	%	16	32	44		56		80		DINPERINDAG
				Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar	%	118.23	94.49	100		100		100		DINPERINDAG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	6	21	Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian						1.629.500.000		1.694.680.000		8.869.898.000	DINPERINDAG
				Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	%	97.55	97.94	98.30		98.66		100		DINPERINDAG
3	6	22	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I						425.000.000		442.000.000		2.287.332.000	DINPERINDAG
				Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I	%	100	100	100		100		100		DINPERINDAG
				Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I	%	93.35	92.90	100		100		100		DINPERINDAG
3	6	23	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah						420.000.000		436.800.000		2.260.422.000	DINPERINDAG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Purwokerto II											
				Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II	%	89.35	94.85	100		100		100		DINPERINDAG
				Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II	%	100	100	100		100		100		DINPERINDAG
3	6	24	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat						400.000.000		416.000.000		2.152.783.000	DINPERINDAG
				Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat	%	95.88	89.00	100		100		100		DINPERINDAG
				Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat	%	100	100	100		100		100		DINPERINDAG
3	6	25	Program Pengelolaan						379.880.191		395.075.000		2.044.498.191	DINPERINDAG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur											
				Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur	%	96.24	96.32	100		100		100		DINPERINDAG
				Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur	%	100	100	100		100		100		DINPERINDAG
#			**URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**1,079,849,000**	**1,079,849,000**		**1,280,795,000**	**1,280,795,000**	**DINPERINDAG**	**1**	
3	7		perindustrian						5.946.992.000		6.080.845.000		31.568.300.000	DINPERINDAG
3	7	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						4.675.831.000		4.862.838.000		25.165.163.000	DINPERINDAG
				Persentase realisasi keuangan program	%	79	84	100		100		100		DINPERINDAG
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		DINPERINDAG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	7	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						175.000.000		182.000.000		941.842.000	DINPERINDAG
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINPERINDAG
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		DINPERINDAG
3	7	16	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						646.161.000		672.007.000		3.477.610.000	DINPERINDAG
				Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina	%	0.34	1.05	1.20		1.50		1.80		DINPERINDAG
3	7	17	Peningkatan Kemampuan Teknologi						100.000.000		52.000.000		319.098.000	DINPERINDAG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Industri											
				Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menguasai teknologi industri	%	0.05	0.09	0.14		0.19		0.33		DINPERINDAG
3	7	18	Penataan Struktur Industri						350.000.000		312.000.000		1.664.587.000	DINPERINDAG
				Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai daya saing	%	NA	4.91	5.00		5.20		5.60		DINPERINDAG
#			**URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI**											
3	8		transmigrasi						250.000.000		250.000.000		1.250.000.000	DINAKERKOPUKM
3	8	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi						250.000.000		-		250.000.000	DINAKERKOPUKM
				Persentase transmigran yang ditempatkan	%	100	100	100		100		100		DINAKERKOPUKM
3	8	16	Program Pengembangan dan Penempatan						-		250.000.000		1.000.000.000	DINAKERKOPUKM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Transmigrasi											
				Persentase transmigran yang ditempatkan	%	100	100	100		100		100		DINAKERKOP UKM
			SEKRETARIAT DAERAH						**20.408.000.000**		**22.731.000.000**		**114.696.200.000**	**SETDA**
4	1		Administrasi Pemerintahan						20.408.000.000		22.731.000.000		114.696.200.000	SETDA
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						10.342.400.000		10.764.000.000		54.199.720.000	SETDA
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		SETDA
				Persentase realisasi keuangan program	%	79	76	100		100		100		SETDA
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah								90.000.000			SETDA
				Kesesuaian program antar dokumen	%	100	100	100		100		100		SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				perencanaan perangkat daerah										
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		SETDA
4	1	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan						168.000.000		525.600.000		2.309.528.000	SETDA
				Persentase rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan sesuai SOP	%	100	100	100		100		100		SETDA
4	1	27	Program Informasi dan Layanan Hukum						450.000.000		972.000.000		4.410.360.000	SETDA
				Persentase kasus-kasus hukum yang ditangani	%	100	100	100		100		100		SETDA
				Persentase produk hukum daerah yang	%	100	100	100		100		100		SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				disampaikan kepada masyarakat										
4	1	28	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah						990.000.000		810.000.000		4.290.300.000	SETDA
				Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja	Indeks	6.41	NA	6.45		6.75		7.15		SETDA
				Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dilaksanakan secara efektif	%	56	80	20		40		100		SETDA
				Persentase Kinerja Setda yang berkinerja baik	%	NA	NA	90		90		95		SETDA
				Persentase perangkat daerah yang mempunyai pelayanan publik	%	32	NA	40		45		70		SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				berkualitas										
4	1	29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						90.000.000		-		90.000.000	SETDA
				Persentase PNS Setda yang berkinerja baik	%	NA	NA	90		0		90		SETDA
4	1	30	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan						1.050.000.000		1.311.750.000		6.429.240.000	SETDA
				Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media spanduk sambutan Bupati dan media relasi lainnya	%	100	100	100		100		100		SETDA
4	1	31	Program Pelayanan Keprotokolan						240.000.000		544.000.000		2.859.383.000	SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase terlaksananya penyelenggaraan acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/Wa Bupati/Sekretaris Daerah yang sesuai dengan SOP	%	100	100	100		100		100		SETDA
4	1	32	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah						396.000.000		365.000.000		1.868.800.000	SETDA
				Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu	%	100	100	100		100		100		SETDA
				Persentase jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunannya	%	100	100	100		100		100		SETDA
4	1	33	Program Fasilitasi						1.440.000.000		-		1.440.000.000	SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Penyelenggaraan Pembangunan											
				Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik	%	100	100	100		0		100		SETDA
4	1	34	Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian						630.000.000		965.250.000		4.567.525.000	SETDA
				Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100		100		100		SETDA
				Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable	%	100	100	100		100		100		SETDA
4	1	35	Program Sosial Keagamaan						3.558.000.000		-		3.558.000.000	SETDA
				Persentase perumusan	%	100	100	100		0		100		SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi										
4	1	36	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan						729.600.000		967.500.000		4.812.625.000	SETDA
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	NA	NA	100		100		100		SETDA
				Penyampaian LKPJ LPPD yang tepat waktu	%	90	80	100		100		100		SETDA
				Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindak lanjuti	%	90	80	100		100		100		SETDA
				Persentase jumlah fasilitasi kegiatan otonomi daerah yang sesuai dengan ketentuan	%	NA	NA	100		100		100		SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				yang berlaku										
				Persentase jumlah titik toponimi yang diusulkan pembakuan nama ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	%	NA	NA	100		100		100		SETDA
4	1	37	Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa						324.000.000		135.000.000		1.426.050.000	SETDA
				Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014	%	100	100	100		100		100		SETDA
4	1	39	Program Pembinaan Keagamaan								2.970.000.000			SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya	%	NA	NA	0		70		100		SETDA
				Persentase jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	%	NA	NA	100		100		100		SETDA
4	1	40	Program Kesra						-		655.000.000		2.710.250.000	SETDA
				Persentase perumusan kebijakan di bidang pendidikan kepemudaan dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang difasilitasi	%	NA	NA			100		100		SETDA
				Persentase jumlah fasilitasi dan layanan kebijakan daerah di bidang kesra yang sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100			100		100		SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Perumusan kebijakan di bidang sosial kesehatan keluarga berencana penanganan bencana alam dan kecelakaan kerja yang difasilitasi	%	NA	NA			100		100		SETDA
4	1	41	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						-		1.655.900.000		6.839.569.000	SETDA
				Persentase Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik	%	NA	NA	NA		17.8		19.10		SETDA
				Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil	%	NA	NA	NA		85		100		SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadaan barang jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyumas	Skor	NA	NA	NA		3.05		3.10		SETDA
			SEKRETARIAT DPRD						**31.560.100.000**		**34.822.500.000**		**175.198.100.000**	**SETWAN**
4	1		Administrasi Pemerintahan						31.560.100.000		34.822.500.000		175.198.100.000	SETWAN
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						4.293.000.000		4.620.000.000		23.939.880.000	SETWAN
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		SETWAN
				Persentase realisasi keuangan program	%	64	66	100		100		100		SETWAN
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan						200.020.000		252.500.000		1.286.140.000	SETWAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Perangkat Daerah											
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		SETWAN
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	NA	NA	100		100		100		SETWAN
4	1	15	Program Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat						4.700.000.000		4.700.000.000		24.100.000.000	SETWAN
				Persentase materi bintek yang di aplikasikan dalam tusi anggota dewan	%	NA	NA	100		100		100		SETWAN
4	1	16	Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan						1.080.000.000		1.100.000.000		5.840.000.000	SETWAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi	%	NA	NA	70		75		90		SETWAN
4	1	17	Program Peningkatan Fasilitasi Produk Hukum						9.387.080.000		-		9.387.080.000	SETWAN
				Persentase persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	%	NA	NA	70		NA		70		SETWAN
4	1	18	Program Peningkatan Fasilitasi Rapat dan Alat Kelengkapan DPRD						7.900.000.000		-		7.900.000.000	SETWAN
				Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	%	NA	NA	60		NA		60		SETWAN
				Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu	%	NA	NA	90		NA		90		SETWAN
4	1	19	Program Fasilitasi Aspirasi						4.000.000.000		-		4.000.000.000	SETWAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase fasilitasi pengkajian aspirasi masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi hukum	%	NA	NA	100		NA		100		SETWAN
4	1	44	Program Fasilitasi Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum								9.550.000.000			SETWAN
				Persentase persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda tepat waktu	%	NA	NA	NA		75		80		SETWAN
4	1	45	Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD						-		14.600.000.000		59.400.000.000	SETWAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	NA	NA	NA		85		88		SETWAN
				Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	%	NA	NA	NA		85		88		SETWAN
			PERENCANAAN						**6.051.445.125**		**6.908.540.000**		**36.212.285.125**	**BAPPEDA LITBANG**
4	2		Perencanaan						5.561.445.125		6.308.540.000		32.022.285.125	BAPPEDA LITBANG
4	2	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1.952.000.000		2.423.540.000		10.892.530.000	BAPPEDA LITBANG
				Persentase realisasi keuangan program	%	83	86	100		100		100		BAPPEDA LITBANG
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		BAPPEDA LITBANG
4	2	6	Program Peningkatan Kualitas						453.280.000		860.000.000		3.523.590.000	BAPPEDA LITBANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah											
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		BAPPEDA LITBANG
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		BAPPEDA LITBANG
4	2	21	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah						551.165.125		400.000.000		2.851.165.125	BAPPEDA LITBANG
				Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang perencanaan	%	NA	NA	100		100		100		BAPPEDA LITBANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				umum pembangunan daerah										
4	2	22	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi						450.000.000		450.000.000		2.550.000.000	BAPPEDA LITBANG
				Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang ekonomi	%	NA	NA	100		100		100		BAPPEDA LITBANG
4	2	23	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial						550.000.000		500.000.000		2.850.000.000	BAPPEDA LITBANG
				Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang	%	NA	NA	100		100		100		BAPPEDA LITBANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				pemerintahan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial										
4	2	24	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah						1.155.000.000		1.425.000.000		7.155.000.000	BAPPEDA LITBANG
				Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang infrastruktur dan prasarana wilayah	%	NA	NA	100		100		100		BAPPEDA LITBANG
				Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	NA	NA	90		91		95		BAPPEDA LITBANG
4	2	26	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						350.000.000		100.000.000		1.550.000.000	BAPPEDA LITBANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD	%	61.51	62.76	65.00		70.00		85.00		BAPPEDA LITBANG
4	2	27	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan						100.000.000		150.000.000		650.000.000	BAPPEDA LITBANG
				Persentase ketersediaan sistem informasi profil daerah yang lengkap	%	NA	NA	75		77		85		BAPPEDA LITBANG
			KEUANGAN						**39.423.700.000**		**42.256.100.000**		**219.729.300.000**	**BKAD**
4	3		Keuangan						39.423.700.000		42.256.100.000		219.729.300.000	BKAD
4	3	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2.431.000.000		2.640.000.000		14.076.000.000	BKAD
				Persentase realisasi keuangan program	%	70	72	100		100		100		BKAD
				Persentase realisasi fisik	%	100	100	100		100		100		BKAD

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				program										
4	3	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						50.000.000		55.000.000		310.500.000	BKAD
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		BKAD
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		BKAD
4	3	15	Program Peningkatan Pendapatan Daerah						1.370.000.000		1.507.000.000		8.417.987.000	BKAD
				Persentase realisasi jumlah pendapatan daerah yang meliputi PAD,	%	100	100	100		100		100		BKAD

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang sah										
				Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	5.79	6.06	6.46		6.86		8.06		BKAD
4	3	16	Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah						4.242.000.000		5.472.600.000		30.495.205.000	BKAD
				Persentase perangkat daerah yang administrasi asetnya baik	%	75	75	75		80		95		BKAD
4	3	17	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah						525.000.000		577.500.000		3.205.178.000	BKAD
				Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	100	100		100		100		BKAD
				Realisasi anggaran kas OPD sesuai target	%	NA	NA	85		90		94		BKAD

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		0.37	0.35	0.37		0.37		0.41		BKAD
4	3	18	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah						740.700.000		780.000.000		4.085.700.000	BKAD
				Persentase obyek pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pajak Daerah	%	100	100	100		100		100		BKAD
				Persentase Wajib Pajak yang memiliki NPWPD.	%	100	100	100		100		100		BKAD
4	3	19	Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran						1.150.000.000		1.220.000.000		6.481.530.000	BKAD
				Persentase DPA OPD yang sesuai ketentuan yang berlaku.	%	100	100	100		100		100		BKAD

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100	100		100		100		BKAD
				Persentase belanja kesehatan (10%)	%	12	12	12		12		12		BKAD
				Persentase belanja pendidikan (20%)	%	29	29	29		29		29		BKAD
4	3	20	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah						775.000.000		850.000.000		4.455.000.000	BKAD
				Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu	%	75	75	75		80		100		BKAD
4	3	21	Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keuangan Daerah						28.140.000.000		29.154.000.000		148.202.200.000	BKAD
				Persentase tingkat kepatuhan pembayaran tagihan LPJU imbal jasa PD BPR BKK	%	100	100	100		100		100		BKAD

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase tingkat kepatuhan penyampaian LPJ keuangan	%	95	95	95		95		95		BKAD
			KEPEGAWAIAN						**9.073.560.000**		**11.423.500.000**		**57.252.560.000**	**BKPSDM**
4	4		Kepegawaian						3.783.565.186		4.963.500.000		24.507.565.186	BKPSDM
4	4	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2.273.565.186		2.473.500.000		12.526.565.186	BKPSDM
				Persentase realisasi keuangan program	%	68	79	95		95		95		BKPSDM
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		BKPSDM
4	4	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						10.000.000		10.000.000		70.000.000	BKPSDM
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan	%	100	100	100		100		100		BKPSDM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				dokumen penganggaran perangkat daerah										
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		BKPSDM
4	4	18	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN						310.000.000		780.000.000		2.845.000.000	BKPSDM
				Persentase ASN yang memperoleh hukuman disiplin tingkat berat	%	0.0018	0.0015	0.0024		0.0022		0.0019		BKPSDM
				Persentase ASN yang berkinerja baik	%	90.8	90.0	91.0		93.0		96		BKPSDM
4	4	19	Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN						725.000.000		980.000.000		5.235.000.000	BKPSDM
				Persentase data ASN yang akurat	%	100	100	100		100		100		BKPSDM
				Persentase pemenuhan kebutuhan ASN	%	100	98	50		50		50		BKPSDM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				sesuai formasi										
4	4	20	Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN						465.000.000		720.000.000		3.831.000.000	BKPSDM
				Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	40	23	90		91		95		BKPSDM
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
4	5		Pendidikan dan Pelatihan						5.289.994.814		6.460.000.000		32.744.994.814	BKPSDM
4	5	15	Program Pengembangan Kompetensi ASN						5.289.994.814		6.460.000.000		32.744.994.814	BKPSDM
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0.083	0.120	0.090		0.064		0.378		BKPSDM
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	6		Penelitian dan Pengembangan						490.000.000		600.000.000		4.190.000.000	BAPPEDA LITBANG
4	6	15	Program Kajian Strategis Daerah						290.000.000		350.000.000		2.940.000.000	BAPPEDA LITBANG
				Persentase realisasi pelaksanaan kajian strategis daerah	%	NA	NA	75		77		85		BAPPEDA LITBANG
4	6	16	Program Pengembangan Sistem Inovasi, Kreativitas dan Litbang						200.000.000		250.000.000		1.250.000.000	BAPPEDA LITBANG
				persentase perangkat daerah yg difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	NA	NA	18.18		20.00		30.91		BAPPEDA LITBANG
			INSPEKTORAT						**4.387.000.000**		**4.562.480.000**		**24.926.500.000**	**INSPEKTORAT**
4	7		Pengawasan						4.387.000.000		4.562.480.000		24.926.500.000	INSPEKTORAT
4	7	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1.606.480.000		1.495.000.000		8.381.480.000	INSPEKTORAT

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase realisasi keuangan program	%	72	89	100		100		100		INSPEKTORAT
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		INSPEKTORAT
4	7	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30.520.000		17.480.000		115.020.000	INSPEKTORAT
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		INSPEKTORAT
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		INSPEKTORAT
4	7	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan						2.750.000.000		3.050.000.000		16.430.000.000	INSPEKTORAT

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah											
				Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan	%	60	65	70		72		78		INSPEKTORAT
				Persentase LHP terbit tepat waktu	%	75	78	80		85		100		INSPEKTORAT
				Kapabilitas APIP	level	2.0	NA	3.0		3.2		3.7		INSPEKTORAT
				Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan	%	NA	70	75		78		85		INSPEKTORAT
			KECAMATAN						**1.120.988.000**		**1.199.460.000**		**6.361.118.000**	**KEC. AJIBARANG**
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.120.988.000		1.199.460.000		6.361.118.000	KEC. AJIBARANG
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						762.988.000		817.550.000		4.347.018.000	KEC. AJIBARANG
				Persentase realisasi keuangan	%	87	86	96		97		100		KEC. AJIBARANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				program										
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. AJIBARANG
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						75.000.000		76.000.000		385.000.000	KEC. AJIBARANG
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. AJIBARANG
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. AJIBARANG
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						283.000.000		305.910.000		1.629.100.000	KEC. AJIBARANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Linmas terbina	%	90	90	100		100		100		KEC. AJIBARANG
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. AJIBARANG
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	90	90	95		95		100		KEC. AJIBARANG
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	64	70	80		85		100		KEC. AJIBARANG
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. AJIBARANG
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki	%	80	90	95		100		100		KEC. AJIBARANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				dokumen perencanaan yang baik										
									1.268.840.000		1.357.660.000		7.071.690.000	KEC. BANYUMAS
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.268.840.000		1.357.660.000		7.071.690.000	KEC. BANYUMAS
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						868.842.000		912.660.000		4.667.042.000	KEC. BANYUMAS
				Persentase realisasi keuangan program	%	83	94	92		93		94		KEC. BANYUMAS
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. BANYUMAS
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						10.000.000		15.000.000		95.000.000	KEC. BANYUMAS
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen	%	100	100	100		100		100		KEC. BANYUMAS

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				penganggaran perangkat daerah										
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. BANYUMAS
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						389.998.000		430.000.000		2.309.648.000	KEC. BANYUMAS
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. BANYUMAS
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. BANYUMAS

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Linmas terbina	%	100	100	100		100		100		KEC. BANYUMAS
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	83	84	85		86		89		KEC. BANYUMAS
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. BANYUMAS
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	88	89	90		90		92		KEC. BANYUMAS
									924.000.000		988.680.000		5.462.040.000	KEC. BATURRADEN
4	1		Administrasi Pemerintahan						924.000.000		988.680.000		5.462.040.000	KEC. BATURRADEN
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						600.000.000		660.000.000		3.677.250.000	KEC. BATURRADEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. BATURRADEN
				Persentase realisasi keuangan program	%	86	96	100		100		100		KEC. BATURRADEN
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30.000.000		33.000.000		193.000.000	KEC. BATURRADEN
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. BATURRADEN
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. BATURRADEN
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan						294.000.000		295.680.000		1.591.790.000	KEC. BATURRADEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			kelurahan											
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. BATURRADEN
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	75	78	80		82		90		KEC. BATURRADEN
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. BATURRADEN
				Persentase Linmas terbina	%	100	100	100		100		100		KEC. BATURRADEN
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang	%	100	100	100		100		100		KEC. BATURRADEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				terlayani secara baik										
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	75	78	80		82		90		KEC. BATURRADEN
									1.117.180.000		1.195.380.000		6.229.590.000	KEC. CILONGOK
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.117.180.000		1.195.380.000		6.229.590.000	KEC. CILONGOK
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						678.180.000		722.930.000		3.767.450.768	KEC. CILONGOK
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. CILONGOK
				Persentase realisasi keuangan program	%	87	95	100		100		100		KEC. CILONGOK
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat						30.000.000		33.000.000		182.153.000	KEC. CILONGOK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Daerah											
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. CILONGOK
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. CILONGOK
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						409.000.000		439.450.000		2.279.986.232	KEC. CILONGOK
				Persentase Linmas terbina	%	85	85	85		85		90		KEC. CILONGOK
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. CILONGOK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	85	85	85		85		90		KEC. CILONGOK
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	80	80	80		85		90		KEC. CILONGOK
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	85	85	85		85		90		KEC. CILONGOK
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. CILONGOK
									867.000.000		927.690.000		5.414.690.000	KEC. GUMELAR
4	1		Administrasi Pemerintahan						867.000.000		927.690.000		5.414.690.000	KEC. GUMELAR
4	1	1	Program Peningkatan						615.000.000		655.550.000		3.779.207.063	KEC. GUMELAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pelayanan Perkantoran											
				Persentase realisasi keuangan program	%	77	78	100		100		100		KEC. GUMELAR
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. GUMELAR
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						9.000.000		10.000.000		55.000.000	KEC. GUMELAR
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. GUMELAR
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. GUMELAR
4	1	43	Program Peningkatan						243.000.000		262.140.000		1.580.482.937	KEC. GUMELAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Peran Kecamatan dan kelurahan											
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	84	84	85		86		90		KEC. GUMELAR
				Persentase Linmas terbina	%	100	100	100		100		100		KEC. GUMELAR
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. GUMELAR
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	94	94	94		95		98		KEC. GUMELAR
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. GUMELAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. GUMELAR
									850.000.000		909.500.000		5.379.500.000	KEC. JATILAWANG
4	1		Administrasi Pemerintahan						850.000.000		909.500.000		5.379.500.000	KEC. JATILAWANG
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						561.500.000		621.000.000		3.656.350.000	KEC. JATILAWANG
				Persentase realisasi keuangan program	%	78	82	100		100		100		KEC. JATILAWANG
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. JATILAWANG
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan						-		-		-	KEC. JATILAWANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Perangkat Daerah											
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. JATILAWANG
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. JATILAWANG
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						288.500.000		288.500.000		1.723.150.000	KEC. JATILAWANG
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	70	80	100		100		100		KEC. JATILAWANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Linmas terbina	%	50	60	70		80		100		KEC. JATILAWANG
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	70	80	100		100		100		KEC. JATILAWANG
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	70	80	95		95		100		KEC. JATILAWANG
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	65	83	90		90		100		KEC. JATILAWANG
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. JATILAWANG
									772.015.000		826.056.000		5.213.071.000	KEC. KALIBAGOR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	1		Administrasi Pemerintahan						772.015.000		826.056.000		5.213.071.000	KEC. KALIBAGOR
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						497.035.000		536.327.000		3.493.000.000	KEC. KALIBAGOR
				Persentase realisasi keuangan program	%	82	93	100		100		100		KEC. KALIBAGOR
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. KALIBAGOR
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						20.000.000		22.000.000		134.300.000	KEC. KALIBAGOR
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. KALIBAGOR
				Kesesuaian program antar dokumen	%	100	100	100		100		100		KEC. KALIBAGOR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				perencanaan perangkat daerah										
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						254.980.000		267.729.000		1.585.771.000	KEC. KALIBAGOR
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	80	80	100		100		100		KEC. KALIBAGOR
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. KALIBAGOR
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	70	70	70		80		100		KEC. KALIBAGOR
				Persentase Linmas terbina	%	70	75	80		80		80		KEC. KALIBAGOR
				Persentase kelompok swadaya	%	70	75	80		80		80		KEC. KALIBAGOR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				masyarakat di kecamatan yang aktif										
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. KALIBAGOR
									1.032.500.000		1.104.780.000		5.808.540.000	KEC. KARANGLEWAS
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.032.500.000		1.104.780.000		5.808.540.000	KEC. KARANGLEWAS
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						760.000.000		815.250.000		4.278.417.000	KEC. KARANGLEWAS
				Persentase realisasi keuangan program	%	76	83	100		100		100		KEC. KARANGLEWAS
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. KARANGLEWAS

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						7.500.000		15.000.000		91.000.000	KEC. KARANGLEWAS
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. KARANGLEWAS
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. KARANGLEWAS
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						265.000.000		274.530.000		1.439.123.000	KEC. KARANGLEWAS
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang	%	100	100	100		100		100		KEC. KARANGLEWAS

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				terlayani secara baik										
				Persentase Linmas terbina	%	80	80	85		85		90		KEC. KARANGLEWAS
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. KARANGLEWAS
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	75	80	80		85		90		KEC. KARANGLEWAS
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	75	80	80		85		90		KEC. KARANGLEWAS

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	77.31	80.52	85		85		90		KEC. KARANGLEWAS
									1.008.820.000		1.079.440.000		5.645.180.000	KEC. KEBASEN
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.008.820.000		1.079.440.000		5.645.180.000	KEC. KEBASEN
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						737.490.000		739.440.000		3.946.440.000	KEC. KEBASEN
				Persentase realisasi keuangan program	%	87	96	100		100		100		KEC. KEBASEN
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. KEBASEN
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah								10.000.000			KEC. KEBASEN
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen	%	100	100	100		100		100		KEC. KEBASEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				penganggaran perangkat daerah										
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. KEBASEN
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						271.330.000		330.000.000		1.646.740.000	KEC. KEBASEN
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. KEBASEN
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. KEBASEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Linmas terbina	%	100	100	100		100		100		KEC. KEBASEN
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	90	90	93		91		95		KEC. KEBASEN
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. KEBASEN
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	100	100	100		100		100		KEC. KEBASEN
									850.000.000		909.500.000		5.374.500.000	KEC. KEDUNGBANTENG
4	1		Administrasi Pemerintahan						850.000.000		909.500.000		5.374.500.000	KEC. KEDUNGBANTENG
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						525.868.125		564.000.000		3.272.368.125	KEC. KEDUNGBANTENG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. KEDUNGBANTENG
				Persentase realisasi keuangan program	%	77	83	85		86		100		KEC. KEDUNGBANTENG
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						26.078.125		27.800.000		185.778.125	KEC. KEDUNGBANTENG
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. KEDUNGBANTENG
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. KEDUNGBANTENG
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan						298.053.750		317.700.000		1.916.353.750	KEC. KEDUNGBANTENG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			kelurahan											
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	75	80	80		85		90		KEC. KEDUNGBANTENG
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	85	85	86		87		90		KEC. KEDUNGBANTENG
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. KEDUNGBANTENG
				Persentase Linmas terbina	%	50	60	85		85		90		KEC. KEDUNGBANTENG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. KEDUNGBANTENG
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	80	80	87		88		89		KEC. KEDUNGBANTENG
									1.282.370.000		1.372.140.000		6.845.470.000	KEC. KEMBARAN
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.282.370.000		1.372.140.000		6.845.470.000	KEC. KEMBARAN
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						957.370.000		1.003.140.000		4.843.970.000	KEC. KEMBARAN
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMBARAN
				Persentase realisasi keuangan program	%	75	93	87		88		92		KEC. KEMBARAN
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan						10.000.000		12.500.000		80.000.000	KEC. KEMBARAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			dan Pelaporan Perangkat Daerah											
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMBARAN
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMBARAN
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						315.000.000		356.500.000		1.921.500.000	KEC. KEMBARAN
				Persentase Linmas terbina	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMBARAN
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMBARAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMBARAN
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	70	71	71		72		75		KEC. KEMBARAN
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	80	80	81		82		85		KEC. KEMBARAN
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMBARAN
									1.353.000.000		1.447.710.000		7.478.210.000	KEC. KEMRANJEN
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.353.000.000		1.447.710.000		7.478.210.000	KEC. KEMRANJEN
4	1	1	Program Peningkatan						1.085.402.000		1.139.441.000		5.853.723.600	KEC. KEMRANJEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pelayanan Perkantoran											
				Persentase realisasi keuangan program	%	69	88	100		100		100		KEC. KEMRANJEN
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMRANJEN
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah								40.000.000			KEC. KEMRANJEN
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMRANJEN
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMRANJEN
4	1	43	Program Peningkatan						267.598.000		268.269.000		1.464.486.400	KEC. KEMRANJEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Peran Kecamatan dan kelurahan											
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	80	85	85		85		95		KEC. KEMRANJEN
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMRANJEN
				Persentase Linmas terbina	%	90	95	100		100		100		KEC. KEMRANJEN
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	80	85	85		85		95		KEC. KEMRANJEN
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	95	100	100		100		100		KEC. KEMRANJEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. KEMRANJEN
									1.027.100.000		1.099.000.000		5.964.220.000	KEC. LUMBIR
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.027.100.000		1.099.000.000		5.964.220.000	KEC. LUMBIR
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						752.000.000		812.295.000		4.434.416.450	KEC. LUMBIR
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. LUMBIR
				Persentase realisasi keuangan program	%	92	85	100		100		100		KEC. LUMBIR
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						20.000.000		22.000.000		122.102.000	KEC. LUMBIR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. LUMBIR
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. LUMBIR
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						255.100.000		264.705.000		1.407.701.550	KEC. LUMBIR
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. LUMBIR
				Persentase permohonan administrasi kependudukan	%	100	100	100		100		100		KEC. LUMBIR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				dan PATEN yang terlayani secara baik										
				Persentase Linmas terbina	%	100	100	100		100		100		KEC. LUMBIR
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. LUMBIR
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	100	100	100		100		100		KEC. LUMBIR
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	74	75	76		77		80		KEC. LUMBIR
									1.357.020.000		1.452.010.000		7.475.530.000	KEC. PATIKRAJA
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.357.020.000		1.452.010.000		7.475.530.000	KEC. PATIKRAJA
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						932.404.000		986.820.000		5.073.076.600	KEC. PATIKRAJA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase realisasi keuangan program	%	82	74	100		100		100		KEC. PATIKRAJA
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. PATIKRAJA
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						5.000.000		20.000.000		85.000.000	KEC. PATIKRAJA
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PATIKRAJA
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PATIKRAJA
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan						419.616.000		445.190.000		2.317.453.400	KEC. PATIKRAJA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			kelurahan											
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. PATIKRAJA
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	55	60	63		65		80		KEC. PATIKRAJA
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	65	70	75		80		90		KEC. PATIKRAJA
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. PATIKRAJA
				Persentase Linmas terbina	%	65	70	75		80		100		KEC. PATIKRAJA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. PATIKRAJA
									1.214.600.000		1.299.620.000		6.761.120.000	KEC. PEKUNCEN
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.214.600.000		1.299.620.000		6.761.120.000	KEC. PEKUNCEN
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						838.700.000		904.925.000		4.684.035.405	KEC. PEKUNCEN
				Persentase realisasi keuangan program	%	91	86	100		100		100		KEC. PEKUNCEN
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. PEKUNCEN
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						15.000.000		15.750.000		82.884.469	KEC. PEKUNCEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PEKUNCEN
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PEKUNCEN
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						360.900.000		378.945.000		1.994.200.126	KEC. PEKUNCEN
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	95	95	95		95		95		KEC. PEKUNCEN
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100	100	100		100		100		KEC. PEKUNCEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				pengelolaan APBDES/ADK										
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. PEKUNCEN
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. PEKUNCEN
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	100	100	100		100		100		KEC. PEKUNCEN
				Persentase Linmas terbina	%	90	90	90		90		90		KEC. PEKUNCEN
									860.000.000		920.200.000		5.645.200.000	KEC. PURWOJATI
4	1		Administrasi Pemerintahan						860.000.000		920.200.000		5.645.200.000	KEC. PURWOJATI
4	1	1	Program Peningkatan						550.000.000		590.200.000		3.595.796.500	KEC. PURWOJATI

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pelayanan Perkantoran											
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. PURWOJATI
				Persentase realisasi keuangan program	%	84	91	100		100		100		KEC. PURWOJATI
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						10.000.000		13.000.000		118.000.000	KEC. PURWOJATI
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PURWOJATI
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PURWOJATI
4	1	43	Program Peningkatan						300.000.000		317.000.000		1.931.403.500	KEC. PURWOJATI

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Peran Kecamatan dan kelurahan											
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. PURWOJATI
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. PURWOJATI
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	90	90	100		100		100		KEC. PURWOJATI
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	NA	NA	100		100		100		KEC. PURWOJATI
				Persentase Linmas terbina	%	NA	NA	100		100		100		KEC. PURWOJATI

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	100	100	100		100		100		KEC. PURWOJATI
									14.000.000.000		14.500.000.000		73.756.700.000	KEC. PWT BARAT
4	1		Administrasi Pemerintahan						14.000.000.000		14.500.000.000		73.756.700.000	KEC. PWT BARAT
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						902.000.000		1.270.000.000		7.003.700.000	KEC. PWT BARAT
				Persentase realisasi keuangan program	%	76	98	100		100		100		KEC. PWT BARAT
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT BARAT
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						25.000.000		30.000.000		175.000.000	KEC. PWT BARAT

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT BARAT
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT BARAT
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						13.073.000.000		13.200.000.000		66.578.000.000	KEC. PWT BARAT
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT BARAT
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100		100		100		KEC. PWT BARAT

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Linmas terbina	%	85	80	85		85		100		KEC. PWT BARAT
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%			100		100		100		KEC. PWT BARAT
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	80	85	90		90		100		KEC. PWT BARAT
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT BARAT
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	80	80	85		90		100		KEC. PWT BARAT
									14.000.000.000		14.500.000.000		73.756.700.000	KEC. PWT SELATAN
4	1		Administrasi Pemerintahan						14.000.000.000		14.500.000.000		73.756.700.000	KEC. PWT SELATAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1.050.731.000		1.305.000.000		6.908.020.000	KEC. PWT SELATAN
				Persentase realisasi keuangan program	%	83	92	100		100		100		KEC. PWT SELATAN
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT SELATAN
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						10.000.000		25.000.000		124.531.000	KEC. PWT SELATAN
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT SELATAN
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT SELATAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						12.939.269.000		13.170.000.000		66.724.149.000	KEC. PWT SELATAN
				Persentase Linmas terbina	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT SELATAN
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT SELATAN
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT SELATAN
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT SELATAN
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	75	80	85		90		100		KEC. PWT SELATAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%			100		100		100		KEC. PWT SELATAN
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	90	90	95		95		100		KEC. PWT SELATAN
									11.798.000.000		12.300.000.000		63.069.700.000	KEC. PWT TIMUR
4	1		Administrasi Pemerintahan						11.798.000.000		12.300.000.000		63.069.700.000	KEC. PWT TIMUR
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						597.000.000		762.100.000		3.911.590.000	KEC. PWT TIMUR
				Persentase realisasi keuangan program	%	81	94	100		100		100		KEC. PWT TIMUR
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT TIMUR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						20.000.000		34.000.000		185.464.000	KEC. PWT TIMUR
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT TIMUR
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT TIMUR
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						11.181.000.000		11.503.900.000		58.972.646.000	KEC. PWT TIMUR
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	96	98	95		95		95		KEC. PWT TIMUR
				Persentase Linmas terbina	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT TIMUR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100		100		100		KEC. PWT TIMUR
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT TIMUR
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT TIMUR
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	85	85	85		85		85		KEC. PWT TIMUR
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di	%	85	85	85		85		85		KEC. PWT TIMUR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				kecamatan yang aktif										
									14.000.000.000		14.500.000.000		74.338.100.000	KEC. PWT UTARA
4	1		Administrasi Pemerintahan						14.000.000.000		14.500.000.000		74.338.100.000	KEC. PWT UTARA
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1.019.300.000		1.130.000.000		6.239.640.625	KEC. PWT UTARA
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT UTARA
				Persentase realisasi keuangan program	%	84	88	100		100		100		KEC. PWT UTARA
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						25.000.000		35.000.000		177.266.875	KEC. PWT UTARA
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT UTARA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				penganggaran perangkat daerah										
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT UTARA
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						12.955.700.000		13.335.000.000		67.921.192.500	KEC. PWT UTARA
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	82	83	85		85		95		KEC. PWT UTARA
				Persentase Linmas terbina	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT UTARA
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT UTARA
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di	%	90	95	95		95		100		KEC. PWT UTARA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				kecamatan yang aktif										
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100		100		100		KEC. PWT UTARA
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT UTARA
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. PWT UTARA
									737.500.000		790.406.000		4.985.406.000	KEC. RAWALO
4	1		Administrasi Pemerintahan						737.500.000		790.406.000		4.985.406.000	KEC. RAWALO
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan						410.000.000		460.406.000		3.018.406.000	KEC. RAWALO

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Perkantoran											
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. RAWALO
				Persentase realisasi keuangan program	%	88	81	100		100		100		KEC. RAWALO
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						-		-		-	KEC. RAWALO
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. RAWALO
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. RAWALO
4	1	43	Program Peningkatan						327.500.000		330.000.000		1.967.000.000	KEC. RAWALO

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Peran Kecamatan dan kelurahan											
				Persentase Linmas terbina	%	81	81	81		82		85		KEC. RAWALO
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. RAWALO
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	81	81	81		82		85		KEC. RAWALO
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. RAWALO
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	81	81	81		82		85		KEC. RAWALO

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. RAWALO
									1.066.070.000		1.131.418.686		5.969.093.063	KEC. SOKARAJA
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.066.070.000		1.131.418.686		5.969.093.063	KEC. SOKARAJA
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						765.070.000		791.418.686		4.232.523.063	KEC. SOKARAJA
				Persentase realisasi keuangan program	%	89	92	90		90		100		KEC. SOKARAJA
				Persentase realisasi fisik program	%	95	95	95		95		100		KEC. SOKARAJA
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						60.000.000		60.000.000		335.000.000	KEC. SOKARAJA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	95	95	95		95		95		KEC. SOKARAJA
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	95	95	95		100		100		KEC. SOKARAJA
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						241.000.000		280.000.000		1.401.570.000	KEC. SOKARAJA
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. SOKARAJA
				Persentase permohonan administrasi kependudukan	%	100	100	100		100		100		KEC. SOKARAJA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				dan PATEN yang terlayani secara baik										
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	95	95	100		100		90		KEC. SOKARAJA
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	80	80	80		81		80		KEC. SOKARAJA
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	80	80	90		90		90		KEC. SOKARAJA
				Persentase Linmas terbina	%	80	80	80		81		90		KEC. SOKARAJA
									2.570.920.000		802.500.000		6.861.110.000	KEC. SOMAGEDE
4	1		Administrasi Pemerintahan						2.570.920.000		802.500.000		6.861.110.000	KEC. SOMAGEDE
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						755.800.000		511.500.000		3.644.030.000	KEC. SOMAGEDE

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase realisasi keuangan program	%	84	96	90		100		98		KEC. SOMAGEDE
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. SOMAGEDE
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						-		10.000.000		55.000.000	KEC. SOMAGEDE
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	10	10	10		10		10		KEC. SOMAGEDE
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. SOMAGEDE
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan						1.815.120.000		281.000.000		3.162.080.000	KEC. SOMAGEDE

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			kelurahan											
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. SOMAGEDE
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	90	90	90		90		95		KEC. SOMAGEDE
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	75	75	80		85		95		KEC. SOMAGEDE
				Persentase Linmas terbina	%	75	75	80		85		100		KEC. SOMAGEDE
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. SOMAGEDE

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. SOMAGEDE
									993.377.000		1.062.910.000		5.646.247.000	KEC. SUMBANG
4	1		Administrasi Pemerintahan						993.377.000		1.062.910.000		5.646.247.000	KEC. SUMBANG
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						675.900.000		728.940.000		3.842.613.000	KEC. SUMBANG
				Persentase realisasi keuangan program	%	89	96	100		100		100		KEC. SUMBANG
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. SUMBANG
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						40.000.000		42.000.000		218.000.000	KEC. SUMBANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. SUMBANG
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. SUMBANG
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						277.477.000		291.970.000		1.585.634.000	KEC. SUMBANG
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. SUMBANG
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang	%	80	80	80		80		80		KEC. SUMBANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				aktif										
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	100	100	100		100		100		KEC. SUMBANG
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. SUMBANG
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	80	81.50	82		82.50		100		KEC. SUMBANG
				Persentase Linmas terbina	%	80	80	80		80		80		KEC. SUMBANG
									6.754.530.000		7.227.340.000		37.849.530.000	KEC. SUMPIUH
4	1		Administrasi Pemerintahan						6.754.530.000		7.227.340.000		37.849.530.000	KEC. SUMPIUH
4	1	1	Program Peningkatan						1.112.530.000		1.345.790.000		6.972.698.000	KEC. SUMPIUH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Pelayanan Perkantoran											
				Persentase realisasi keuangan program	%	81	94	100		100		100		KEC. SUMPIUH
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. SUMPIUH
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						15.000.000		19.000.000		104.999.500	KEC. SUMPIUH
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. SUMPIUH
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. SUMPIUH
4	1	43	Program Peningkatan						5.627.000.000		5.862.550.000		30.771.832.500	KEC. SUMPIUH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Peran Kecamatan dan kelurahan											
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	76	78	100		100		100		KEC. SUMPIUH
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100		100		100		KEC. SUMPIUH
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	76	78	100		100		100		KEC. SUMPIUH
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang	%	76	78	80		82		86		KEC. SUMPIUH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				aktif										
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	88	89	90		91		94		KEC. SUMPIUH
				Persentase Linmas terbina	%	100	100	100		100		100		KEC. SUMPIUH
									1.072.300.000		1.147.360.000		6.144.740.000	KEC. TAMBAK
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.072.300.000		1.147.360.000		6.144.740.000	KEC. TAMBAK
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						790.700.000		841.760.000		4.463.540.000	KEC. TAMBAK
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. TAMBAK
				Persentase realisasi keuangan program	%	85	84	100		100		100		KEC. TAMBAK
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat						20.000.000		25.000.000		150.000.000	KEC. TAMBAK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Daerah											
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. TAMBAK
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. TAMBAK
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						261.600.000		280.600.000		1.531.200.000	KEC. TAMBAK
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. TAMBAK
				Persentase Linmas terbina	%			100		100		100		KEC. TAMBAK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%	89	90	90		93		100		KEC. TAMBAK
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	80	81	80		83		100		KEC. TAMBAK
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	90	91	90		93		100		KEC. TAMBAK
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	92	95	100		100		100		KEC. TAMBAK
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	100	100	100		100		100		KEC. TAMBAK
									1.198.700.000		1.282.610.000		6.724.700.000	KEC. WANGON

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	1		Administrasi Pemerintahan						1.198.700.000		1.282.610.000		6.724.700.000	KEC. WANGON
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						909.720.000		963.000.000		5.023.370.000	KEC. WANGON
				Persentase realisasi keuangan program	%	80	84	100		100		100		KEC. WANGON
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KEC. WANGON
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						11.980.000		16.000.000		105.980.000	KEC. WANGON
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KEC. WANGON
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen	%	100	100	100		100		100		KEC. WANGON

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				penganggaran perangkat daerah										
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						277.000.000		303.610.000		1.595.350.000	KEC. WANGON
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	65	70	75		80		95		KEC. WANGON
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100		100		100		KEC. WANGON
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	90	90	95		100		100		KEC. WANGON
				Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan	%	100	100	100		100		100		KEC. WANGON

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK										
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	80	90	100		100		100		KEC. WANGON
				Persentase Linmas terbina	%	100	100	100		100		100		KEC. WANGON
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**2.955.000.000**		**3.073.200.000**		**20.246.460.000**	**KESBANGPOL**
1	5		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						2.955.000.000		3.073.200.000		20.246.460.000	KESBANGPOL
1	5	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1.050.000.000		1.065.000.000		6.671.400.000	KESBANGPOL
				Persentase realisasi keuangan program	%	73	89	100		100		100		KESBANGPOL

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		KESBANGPOL
1	5	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						20.000.000		20.000.000		170.000.000	KESBANGPOL
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KESBANGPOL
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		KESBANGPOL
1	5	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat						825.000.000		908.200.000		6.185.060.000	KESBANGPOL

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100		100		100		KESBANGPOL
				Persentase wilayah kecamatan/desa yang kondisinya aman	%	100	100	100		100		100		KESBANGPOL
1	5	17	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan						780.000.000		850.000.000		5.230.000.000	KESBANGPOL
				Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	%	NA	NA	25		30		45		KESBANGPOL
				Persentase lembaga keagamaan aktif	%	NA	52	55		60		70		KESBANGPOL
1	5	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat						280.000.000		230.000.000		1.990.000.000	KESBANGPOL

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD
								Tahun2019		Tahun2020		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada	%	74	74	75		75		75		KESBANGPOL
			TOTAL SEMUA SKPD						**1.584.437.395.600**		**1.782.990.031.686**		**8.980.025.981.663**	

Tabel 7.3

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
101			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				281.528.543.961		283.055.240.540		284.968.462.940		849.552.247.441	DINDIK
101	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				243.725.503.961		245.116.469.540		246.712.618.940		735.554.592.441	DINDIK
101	2	1		APK SD	%	102.30	147.625.693.087	101.70	148.579.746.400	101.00	149.822.005.000	101.00	446.027.444.487	DINDIK
101	2	2		APK SMP	%	95.00	63.389.278.674	97.00	63.640.866.140	99.00	63.719.829.940	99.00	190.749.974.754	DINDIK
101	2	3		APK PAUD	%	78.00	32.710.532.200	78.25	32.895.857.000	78.50	33.170.784.000	78.50	98.777.173.200	DINDIK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
101	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				37.803.040.000		37.938.771.000		38.255.844.000		113.997.655.000	DINDIK
101	4	1		Persentase formasi pendidik dan tenaga kendidikan yang terpenuhi	%	1	37.803.040.000	1	37.938.771.000	1	38.255.844.000	1	113.997.655.000	DINDIK
102			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				258.969.467.558		220.647.576.221		263.502.818.134		743.119.861.913	
102	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				239.543.919.008		204.875.601.931		245.979.124.821		690.398.645.760	
102	2	1		Prosentase Jenis UKM UKP sesuai standar yang terpenuhi	%	100	139.936.733.968	100	117.543.784.255	100	145.178.846.821	100	402.659.365.044	DINKES
102	2	5		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM UKP di RSUD Ajibarang	%		13.339.585.000		13.387.474.676		13.499.366.000		40.226.425.676	RSUD AJIBARANG
102	2	6		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM	%		86.267.600.040		73.944.343.000		87.300.912.000		247.512.855.040	RSUD BANYUMAS

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				UKP di RSUD Banyumas										
102	2	11		Prosentase Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit Khusus Mata (RSKM) Purwokerto yang Terpenuhi	%		0		0		0		0	DINKES
102	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				18.370.645.500		13.893.615.740		15.334.730.803		47.598.992.043	
102	3	1		Prosentase Unsur Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	%	100	7.770.645.500	100	8.817.615.740	100	15.334.730.803	100	31.922.992.043	DINKES
102	3	5		Persentase Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar RSUD Banyumas	%		6.195.000.000		5.076.000.000		0		11.271.000.000	RSUD BANYUMAS

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
102	3	6		Persentase Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar RSUD Ajibarang	%		4.405.000.000		0		0		4.405.000.000	RSUD AJIBARANG
102	4		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				313.937.000		393.007.000		385.114.000		1.092.058.000	DINKES
102	4	1		Prosentase Sarana Produksi, Distribusi dan Sediaan, Farmasi, Alat Kesehatan , Makanan, Minuman yang sesuai standard	%	100	67.420.600	100	90.737.000	100	90.737.000	100	248.894.600	DINKES
102	4	2		Persentase sertifikasi produksi Sarana Produksi Alat Kesehatan	%	100	0	100	20.000.000	100	20.000.000	100	40.000.000	DINKES
102	4	3		Persentase sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga	%	100	122.892.400	100	128.203.000	100	129.274.000	100	380.369.400	DINKES
102	4	4		Persentase sertifikasi Laik Hygine Sanitasi Tempat	%	100	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	DINKES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Pengelolaan Makanan										
102	4	5		Persentase stiker pembinaan makanan dan sentra makanan	%	100	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	20.000.000	DINKES
102	4	6		Persentase pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan post market	%	100	123.624.000	100	134.067.000	100	125.103.000	100	382.794.000	DINKES
102	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				740.966.050		1.485.351.550		1.803.848.510		4.030.166.110	DINKES
102	5	1		Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	12	610.966.050	12.5	1.235.351.550	13	1.503.848.510	13	3.350.166.110	DINKES
102	5	2		Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	%	100	130.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	680.000.000	DINKES
103			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				332.175.634.291		237.003.409.350		241.201.730.250		810.380.773.891	
103	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR				31.940.584.955		37.318.060.500		30.986.355.000		100.245.000.455	DPU

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			(SDA)											
103	2	1		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kab/kota		50	10.961.001.575	60	16.412.028.000	75	11.216.576.000	75	38.589.605.575	DPU
103	2	2		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		80	20.979.583.380	82	20.906.032.500	84	19.769.779.000	84	61.655.394.880	DPU
103	3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				10.552.932.000		11.082.972.000		10.721.837.000		32.357.741.000	DINPERKIM
103	3	1		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan	%	74.46	10.552.932.000	75.58	11.082.972.000	77.08	10.721.837.000	77.08	32.357.741.000	DINPERKIM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota										
103	4		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				10.688.047.351		12.337.418.850		12.685.910.250		35.711.376.451	DLH
103	4	1		persentase peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah	%	5	10.688.047.351	5	12.337.418.850	5	12.685.910.250	5	35.711.376.451	DLH
103	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				16.407.707.677		17.447.828.000		16.834.726.000		50.690.261.677	DINPERKIM
103	5	1		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	88	16.407.707.677	90	17.447.828.000	92	16.834.726.000	92	50.690.261.677	DINPERKIM
103	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				3.772.826.263		7.125.544.000		3.853.576.000		14.751.946.263	DINPERKIM | DPU
103	6	1		Persentase panjang drainase	%	70.29	2.489.861.263	71.62	5.317.973.000	72.94	2.555.244.000	72.94	10.363.078.263	DPU

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				perkotaan kondisi baik										
103	6	2		Persentase panjang drainase lingkungan kondisi baik	%	11.53	1.282.965.000	11.58	1.807.571.000	11.63	1.298.332.000	11.63	4.388.868.000	DINPERKIM
103	7		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				12.525.070.000		13.323.709.000		12.595.095.000		38.443.874.000	DINPERKIM
103	7	1		Rasio Permukiman Layak Huni	%	79.90	12.525.070.000	79.99	13.323.709.000	80.10	12.595.095.000	80.10	38.443.874.000	DINPERKIM
103	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				114.280.814.130		40.942.853.000		34.678.052.000		189.901.719.130	DPU
103	8	1		Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola	%	69.7	114.280.814.130	72.7	40.942.853.000	75.7	34.678.052.000	75.7	189.901.719.130	DPU
103	9		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				47.984.714.250		13.251.250.000		18.335.383.000		79.571.347.250	DPU
103	9	1		Persentase luas kawasan yang dilakukan penataan	%	50	47.984.714.250	65	13.251.250.000	80	18.335.383.000	80	79.571.347.250	DPU
103	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				82.963.260.535		82.568.865.000		99.396.654.000		264.928.779.535	DPU
103	10	1		Tingkat kemantapan jalan kab/kota		40	82.963.260.535	50	82.568.865.000	60	99.396.654.000	60	264.928.779.535	DPU

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
103	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				405.195.130		927.487.000		431.059.000		1.763.741.130	DPU
103	11	1		Persentase realisasi penyedia jasa konstruksi yang dibina	%	65.09	405.195.130	76.35	927.487.000	100	431.059.000	100	1.763.741.130	DPU
103	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				654.482.000		677.422.000		683.083.000		2.014.987.000	DINPERKIM
103	12	1		Presentase Dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang diterbitkan	%	100	654.482.000	100	677.422.000	100	683.083.000	100	2.014.987.000	DINPERKIM
104			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.851.360.400		7.931.326.000		10.486.964.000		25.269.650.400	
104	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				0		80.000.000		80.000.000		160.000.000	DINPERKIM
104	2	1		Persentase ketersediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%		0		80.000.000		80.000.000		160.000.000	DINPERKIM
104	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				6.782.712.650		4.466.900.000		7.021.950.000		18.271.562.650	DINPERKIM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
104	3	1		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang ditangani	%	7.31	6.782.712.650	8.53	4.466.900.000	9.75	7.021.950.000	9.75	18.271.562.650	DINPERKIM
104	4		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				0		3.314.176.000		3.314.176.000		6.628.352.000	DINPERKIM
104	4	1		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	77.07	0	77.33	3.314.176.000	77.58	3.314.176.000	77.58	6.628.352.000	DINPERKIM
104	5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				68.647.750		70.250.000		70.838.000		209.735.750	DINPERKIM
104	5	1		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	88.89	68.647.750	92.59	70.250.000	96.30	70.838.000	96.30	209.735.750	DINPERKIM
105			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.396.014.775		5.450.845.000		5.958.846.625		16.805.706.400	

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
105	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.720.478.275		2.098.703.875		2.219.383.000		6.038.565.150	SATPOL PP
105	2	1		Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	1.535.695.000	100	1.888.713.875	100	2.058.665.000	100	5.483.073.875	SATPOL PP
105	2	2		Persentase penanganan pelanggaran PERDA	%	100	184.783.275	100	209.990.000	100	160.718.000	100	555.491.275	SATPOL PP
105	3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.376.846.200		2.415.528.625		2.415.528.625		7.207.903.450	BPBD
105	3	1		Persentase mitigasi bencana yang dilaksanakan	%		560.370.325		578.563.875		578.563.875		1.717.498.075	BPBD
105	3	2		Persentase jumlah korban bencana alam yang selamat	%		1.816.475.875		1.836.964.750		1.836.964.750		5.490.405.375	BPBD
105	3	3		Persentase masyarakat yang mendapatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%		0		0		0		0	BPBD

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
105	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.298.690.300		936.612.500		1.323.935.000		3.559.237.800	SATPOL PP
105	4	1		Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)		100	1.298.690.300	100	936.612.500	100	1.323.935.000	100	3.559.237.800	SATPOL PP
106			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.107.465.206		4.052.873.450		4.206.361.000		12.366.699.656	
106	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				584.436.475		662.236.750		603.983.000		1.850.656.225	DINSOSPERMASDES
106	2	1		Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif	%	30	584.436.475	39	662.236.750	40	603.983.000	50	1.850.656.225	DINSOSPERMASDES
106	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.606.507.194		1.514.566.000		1.676.951.000		4.798.024.194	DINSOSPERMASDES
106	4	1		Persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	92	1.606.507.194	92	1.514.566.000	92	1.676.951.000	92	4.798.024.194	DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
106	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.674.267.537		1.626.878.700		1.719.321.000		5.020.467.237	DINSOSPERMASDES
106	5	1		Persentase PPKS yang menerima perlindungan Sosial	%	100	1.674.267.537	100	1.626.878.700	100	1.719.321.000	100	5.020.467.237	DINSOSPERMASDES
106	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA				90.072.350		122.784.000		118.391.000		331.247.350	DINSOSPERMASDES
106	6	1		Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100	90.072.350	100	122.784.000	100	118.391.000	100	331.247.350	DINSOSPERMASDES
106	7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				152.181.650		126.408.000		87.715.000		366.304.650	DINSOSPERMASDES
106	7	1		Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional		1	152.181.650	1	126.408.000	1	87.715.000	1	366.304.650	DINSOSPERMASDES
207			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				784.310.213		864.860.100		903.825.000		2.552.995.313	
207	2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				0		10.000.000		10.000.000		20.000.000	DINAKERKOPUKM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
207	2	1		Persentase perencanaan tenaga kerja yang tersedia	%	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	1	20.000.000	DINAKERKOP UKM
207	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				537.006.000		438.012.100		474.730.000		1.449.748.100	DINAKERKOP UKM
207	3	1		Persentase Alumni Pelatihan Bersertifikat Kompetensi	%	59.00	0	61.00	0	63.00	0	63.00	0	DINAKERKOP UKM
207	3	2		Persentase Penerapan Program PBK dengan kualifikasi Klaster	%		515.756.000		387.923.100		424.431.000		1.328.110.100	DINAKERKOP UKM
207	3	3		Persentase Penyerapan Lulusan	%		0		0		0		0	DINAKERKOP UKM
207	3	4		Persentase LPK yang mendapatkan Perijinan	%		21.250.000		29.089.000		29.299.000		79.638.000	DINAKERKOP UKM
207	3	5		Persentase Produktivitas pada Perusahaan Kecil	%		0		21.000.000		21.000.000		42.000.000	DINAKERKOP UKM
207	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				46.276.600		117.638.000		118.095.000		282.009.600	DINAKERKOP UKM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
207	4	1		Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	60	46.276.600	62	117.638.000	64	118.095.000	64	282.009.600	DINAKERKOP UKM
207	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				201.027.613		299.210.000		301.000.000		801.237.613	DINAKERKOP UKM
207	5	1		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP, PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	70	201.027.613	70	299.210.000	70	301.000.000	70	801.237.613	DINAKERKOP UKM
208			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				760.528.800		782.630.375		789.110.000		2.332.269.175	

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
208	2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				187.000.000		187.669.000		189.237.000		563.906.000	DPPKBP3A
208	2	1		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	10	32.000.000	11	32.114.000	12	32.382.000	12	96.496.000	DPPKBP3A
208	2	2		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	%	22	155.000.000	22	155.555.000	22	156.855.000	22	467.410.000	DPPKBP3A
208	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				251.395.000		268.475.125		270.823.000		790.693.125	DPPKBP3A
208	3	2		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	251.395.000	100	268.475.125	100	270.823.000	100	790.693.125	DPPKBP3A
208	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				20.000.000		20.071.000		20.239.000		60.310.000	DPPKBP3A

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
208	4	1		Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	%	0.008	20.000.000	0.01	20.071.000	0.05	20.239.000	0.05	60.310.000	DPPKBP3A
208	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				0		5.017.000		5.059.000		10.076.000	DPPKBP3A
208	5	1		Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	28.57	0	35.71	5.017.000	42.86	5.059.000	42.86	10.076.000	DPPKBP3A
208	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				20.948.800		21.024.000		21.199.000		63.171.800	DPPKBP3A
208	6	1		Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%	100	20.948.800	100	21.024.000	100	21.199.000	100	63.171.800	DPPKBP3A
208	7		PROGRAM PERLINDUNGAN				281.185.000		280.374.250		282.553.000		844.112.250	DPPKBP3A

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			KHUSUS ANAK											
208	7	1		Rasio anak korban kekerasan	Angka	0.011	281.185.000	0.009	280.374.250	0.007	282.553.000	0.007	844.112.250	DPPKBP3A
209			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				766.508.999		2.439.636.000		777.190.000		3.983.334.999	
209	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				638.621.000		1.942.297.000		647.664.000		3.228.582.000	DINPERTANKP
209	2	1		Tingkat ketersediaan energi	%	94	638.621.000	95	1.942.297.000	96	647.664.000	96	3.228.582.000	DINPERTANKP
209	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				87.888.000		363.311.000		89.050.000		540.249.000	DINPERTANKP
209	3	1		Konsumsi protein	gram/kapita/hari	52.55	55.000.000	54.80	330.195.000	57.00	55.657.000	57.00	440.852.000	DINPERTANKP
209	3	2		Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	98	32.888.000	99	33.116.000	100	33.393.000	100	99.397.000	DINPERTANKP
209	4		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				29.999.999		80.106.000		30.358.000		140.463.999	DINPERTANKP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
209	4	1		Persentase peningkatan jumlah desa rawan pangan yang ditangani	%	65	29.999.999	66	80.106.000	67	30.358.000	67	140.463.999	DINPERTANKP
209	5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				10.000.000		53.922.000		10.118.000		74.040.000	DINPERTANKP
209	5	1		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	95.43	10.000.000	96.43	53.922.000	97.43	10.118.000	97.43	74.040.000	DINPERTANKP
210			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				212.500.000		250.897.000		252.994.000		716.391.000	
210	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				212.500.000		250.897.000		252.994.000		716.391.000	DINPERKIM
210	10	1		Presentase Luas Petak Tanah yang tertata (bersertifikat)	%	38.83	212.500.000	39.16	250.897.000	39.47	252.994.000	39.47	716.391.000	DINPERKIM
211			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				53.570.665.650		11.438.329.500		13.534.000.000		78.542.995.150	
211	2		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				85.000.000		725.000.000		1.265.000.000		2.075.000.000	DLH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
211	2	1		Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	%	100	85.000.000	100	725.000.000	100	1.265.000.000	100	2.075.000.000	DLH
211	3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				622.000.000		675.000.000		825.000.000		2.122.000.000	DLH
211	3	1		Persentase kegiatan pengendalian, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	70	622.000.000	100	675.000.000	100	825.000.000	100	2.122.000.000	DLH
211	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				35.355.130.000		6.245.299.000		7.088.000.000		48.688.429.000	DLH
211	4	1		Persentase RTH publik	%	20.048	35.355.130.000	2.005	6.245.299.000	20.052	7.088.000.000	20.052	48.688.429.000	DLH
211	5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				0		150.000.000		225.000.000		375.000.000	DLH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
211	5	1		Persentase Rincian Teknis (Rintek) pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	%	100	0	100	150.000.000	100	225.000.000	100	375.000.000	DLH
211	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				109.800.000		375.000.000		400.000.000		884.800.000	DLH
211	6	1		Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda	%	60	109.800.000	70	375.000.000	80	400.000.000	80	884.800.000	DLH
211	8		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				60.000.000		200.000.000		255.000.000		515.000.000	DLH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
211	8	1		Persentase jumlah SDM yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	60.000.000	100	200.000.000	100	255.000.000	100	515.000.000	DLH
211	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				90.000.000		100.000.000		125.000.000		315.000.000	DLH
211	10	1		Persentase sengketa dan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100	90.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	315.000.000	DLH
211	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				17.248.735.650		2.968.030.500		3.351.000.000		23.567.766.150	DLH
211	11	1		Persentase sampah yang terkurangi melalui 3R	%	24	17.248.735.650	26	2.968.030.500	27	3.351.000.000	27	23.567.766.150	DLH
212			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.402.569.625		900.991.625		942.598.000		3.246.159.250	
212	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				831.818.525		255.000.000		330.000.000		1.416.818.525	DINDUKCAPIL

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
212	2	1		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		90	831.818.525	91	255.000.000	92	330.000.000	92	1.416.818.525	DINDUKCAPIL
212	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL				89.560.050		135.500.000		106.627.000		331.687.050	DINDUKCAPIL
212	3	1		Persentase pelayanan pencatatan sipil sesuai SOP	%	100	89.560.050	100	135.500.000	100	106.627.000	100	331.687.050	DINDUKCAPIL
212	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				396.236.500		380.500.000		404.775.000		1.181.511.500	DINDUKCAPIL
212	4	1		Persentase ketersediaan data dan informasi kependudukan	%	100	396.236.500	100	380.500.000	100	404.775.000	100	1.181.511.500	DINDUKCAPIL
212	5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				84.954.550		129.991.625		101.196.000		316.142.175	DINDUKCAPIL
212	5	1		Persentase ketersediaan Profil Kependudukan	%	100	84.954.550	100	129.991.625	100	101.196.000	100	316.142.175	DINDUKCAPIL
213			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6.156.931.241		6.111.268.561		6.223.499.000		18.491.698.802	

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
213	2		PROGRAM PENATAAN DESA				493.549.993		495.321.000		499.461.000		1.488.331.993	DINSOSPERMASDES
213	2	1		Persentase peningkatan status desa mandiri	%	30	493.549.993	30	495.321.000	40	499.461.000	100	1.488.331.993	DINSOSPERMASDES
213	3		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				31.702.500		31.815.000		32.081.000		95.598.500	DINSOSPERMASDES
213	3	1		Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	%	2	31.702.500	2	31.815.000	2	32.081.000	2	95.598.500	DINSOSPERMASDES
213	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				4.504.939.508		4.460.463.561		4.558.897.000		13.524.300.069	DINSOSPERMASDES
213	4	1		Persentase desa dengan administrasi baik	%	30	4.504.939.508	30	4.460.463.561	40	4.558.897.000	100	13.524.300.069	DINSOSPERMASDES
213	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.126.739.240		1.123.669.000		1.133.060.000		3.383.468.240	DINSOSPERMASDES
213	5	1		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	100	1.126.739.240	100	1.123.669.000	100	1.133.060.000	100	3.383.468.240	DINSOSPERMASDES

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
214			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.613.509.805		9.147.179.000		9.187.304.000		27.947.992.805	
214	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				82.545.000		82.832.000		83.532.000		248.909.000	DPPKBP3A
214	2	1		Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2.50	82.545.000	2.40	82.832.000	2.30	83.532.000	2.30	248.909.000	DPPKBP3A
214	3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				8.610.658.905		8.104.652.000		8.172.446.000		24.887.756.905	DPPKBP3A
214	3	1		Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	4.332.696.000	100	3.811.386.000	100	3.843.244.000	100	11.987.326.000	DPPKBP3A
214	3	2		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	40.00	2.943.947.905	41.00	2.954.466.000	42.00	2.979.209.000	42.00	8.877.622.905	DPPKBP3A
214	3	3		Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	50	1.334.015.000	65	1.338.800.000	80	1.349.993.000	80	4.022.808.000	DPPKBP3A
214	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				920.305.900		959.695.000		931.326.000		2.811.326.900	DPPKBP3A

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
214	4	1		Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	7.41	920.305.900	18.52	959.695.000	25.93	931.326.000	25.93	2.811.326.900	DPPKBP3A
215			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				10.337.188.031		14.126.465.025		14.309.905.000		38.773.558.056	
215	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				10.337.188.031		13.771.465.025		13.739.905.000		37.848.558.056	DINHUB
215	2	1		Persentase implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	%	100	0	100	300.000.000	100	25.000.000	100	325.000.000	DINHUB
215	2	2		Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	%	53	8.306.507.000	56	11.161.209.000	59	10.856.208.000	59	30.323.924.000	DINHUB
215	2	3		Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	%	66.67	623.528.500	83.3	836.971.000	100	836.971.000	100	2.297.470.500	DINHUB
215	2	4		Persentase perparkiran yang beroperasi sesuai ketentuan	%	100	227.500.000	100	180.897.000	100	182.994.000	100	591.391.000	DINHUB

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
215	2	5		Persentase kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan	%	95	333.673.875	95	393.966.000	96	667.259.000	96	1.394.898.875	DINHUB
215	2	6		Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalulintas	%	98	42.496.281	99	50.175.000	100	50.594.000	100	143.265.281	DINHUB
215	2	8		Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot, angkutdes, taksi, lainnya) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ	%	100	144.500.000	100	55.610.025	100	322.036.000	100	522.146.025	DINHUB
215	2	9		Persentase pelaksanaan MRLL	%	100	658.982.375	100	792.637.000	100	798.843.000	100	2.250.462.375	DINHUB
215	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				0		355.000.000		570.000.000		925.000.000	DINHUB
215	3	1		Persentase ketersediaan prasarana angkutan sungai	%	66.66	0	100	355.000.000	0	570.000.000	100	925.000.000	DINHUB

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
216			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2.018.263.375		2.375.590.000		2.660.103.000		7.053.956.375	
216	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				393.468.375		470.773.000		470.773.000		1.335.014.375	DINKOMINFO
216	2	1		Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	%	100	393.468.375	100	470.773.000	100	470.773.000	100	1.335.014.375	DINKOMINFO
216	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				1.624.795.000		1.904.817.000		2.189.330.000		5.718.942.000	DINKOMINFO
216	3	1		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	%	30	18.120.000	35	25.825.000	40	25.825.000	40	69.770.000	DINKOMINFO
216	3	2		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Pemda	%	45	1.606.675.000	50	1.878.992.000	55	2.163.505.000	55	5.649.172.000	DINKOMINFO
217			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				585.071.450		1.266.746.500		1.237.002.370		3.088.820.320	
217	2		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN				0		27.728.000		28.392.000		56.120.000	DINAKERKOPUKM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			PINJAM											
217	2	1		Presentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin koperasi usaha simpan pinjam	%	0	0	0	27.728.000	0	28.392.000	1	56.120.000	DINAKERKOP UKM
217	3		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				16.881.800		35.500.000		35.500.000		87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	3	1		Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang dilakukan	%	76.5	16.881.800	76.8	35.500.000	77	35.500.000	77	87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	4		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				16.881.800		35.500.000		35.500.000		87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	4	2		Persentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang dinilai kesehatannya	%		16.881.800		35.500.000		35.500.000		87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				16.881.800		35.500.000		35.500.000		87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	5	1		Persentase koperasi yang	%	80	16.881.800	81	35.500.000	82	35.500.000	82	87.881.800	DINAKERKOP UKM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				mengikuti pelatihan										
217	6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				16.881.800		35.500.000		35.500.000		87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	6	1		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	10	16.881.800	11	35.500.000	12	35.500.000	12	87.881.800	DINAKERKOP UKM
217	7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				427.544.250		811.408.500		826.144.000		2.065.096.750	DINAKERKOP UKM
217	7	1		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	20	427.544.250	30	811.408.500	40	826.144.000	40	2.065.096.750	DINAKERKOP UKM
217	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				90.000.000		285.610.000		240.466.370		616.076.370	DINAKERKOP UKM
217	8	1		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,5	90.000.000	0.75	285.610.000	1	240.466.370	1.2	616.076.370	DINAKERKOP UKM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
218			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				658.966.680		1.031.526.000		1.032.251.000		2.722.743.680	
218	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				46.206.500		125.196.000		125.658.000		297.060.500	DPMPTSP
218	2	1		Persentase pemberian fasilitasi/ insentif penanaman modal	%		46.206.500	75	125.196.000	80	125.658.000	80	297.060.500	DPMPTSP
218	3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				76.381.930		140.320.000		141.074.000		357.775.930	DPMPTSP
218	3	1		Persentase peningkatan jumlah investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	%	75	76.381.930	80	140.320.000	85	141.074.000	85	357.775.930	DPMPTSP
218	4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				140.749.125		315.644.000		315.153.000		771.546.125	DPMPTSP
218	4	1		Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	%	90	140.749.125	90	315.644.000	90	315.153.000	90	771.546.125	DPMPTSP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
218	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				395.629.125		400.366.000		400.366.000		1.196.361.125	DPMPTSP
218	5	1		Persentase investor yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	85	395.629.125	88	400.366.000	90	400.366.000	90	1.196.361.125	DPMPTSP
218	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				0		50.000.000		50.000.000		100.000.000	DPMPTSP
218	6	1		Persentase penyajian data pada sistem informasi penanaman modal	%		0	80	50.000.000	85	50.000.000	85	100.000.000	DPMPTSP
219			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6.294.729.350		8.445.209.000		8.515.789.000		23.255.727.350	
219	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				85.429.350		95.340.000		96.137.000		276.906.350	DINPORABU DPAR
219	2	1		Persentase organisasi pemuda yang	%		0		10.000.000		10.000.000		20.000.000	DINPORABU DPAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				aktif										
219	2	2		Persentase peningkatan wirausaha muda	%		85.429.350		85.340.000		86.137.000		256.906.350	DINPORABUDPAR
219	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				4.709.300.000		6.844.484.000		6.901.686.000		18.455.470.000	DINPORABUDPAR
219	3	1		Persentase peningkatan Pelatih Olahraga yang bersertifikasi	%		4.709.300.000		6.844.484.000		6.901.686.000		18.455.470.000	DINPORABUDPAR
219	4		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.500.000.000		1.505.385.000		1.517.966.000		4.523.351.000	DINPORABUDPAR
219	4	1		Persentase kepramukaan aktif	%		1.500.000.000		1.505.385.000		1.517.966.000		4.523.351.000	DINPORABUDPAR
220			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				42.500.000		70.179.000		70.179.000		182.858.000	
220	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				42.500.000		70.179.000		70.179.000		182.858.000	DINKOMINFO
220	2	1		Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	%	100	42.500.000	100	70.179.000	100	70.179.000	100	182.858.000	DINKOMINFO

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
221			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				166.996.500		167.595.000		167.595.000		502.186.500	
221	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				166.996.500		167.595.000		167.595.000		502.186.500	DINKOMINFO
221	2	1		Tingkat keamanan informasi pemerintah		3	166.996.500	3	167.595.000	3	167.595.000	3	502.186.500	DINKOMINFO
222			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.481.173.000		1.601.487.000		1.619.871.000		4.702.531.000	
222	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				521.410.000		637.038.000		642.362.000		1.800.810.000	DINPORABUDPAR
222	2	1		Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	81,82	521.410.000	90.91	637.038.000	100	642.362.000	100	1.800.810.000	DINPORABUDPAR
222	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				265.000.000		265.951.000		268.174.000		799.125.000	DINPORABUDPAR
222	3	1		Persentase Jenis Kesenian yang dilestarikan	%	77,36	265.000.000	90.57	265.951.000	100	268.174.000	100	799.125.000	DINPORABUDPAR
222	4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				0		5.000.000		5.000.000		10.000.000	DINPORABUDPAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
222	4	1		Persentase pembinaan sejarah lokal	%	33,3	0	66.7	5.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	DINPORABU DPAR
222	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				54.763.000		56.201.000		56.670.000		167.634.000	DINPORABU DPAR
222	5	1		Persentase cagar budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	%	60	54.763.000	80	56.201.000	100	56.670.000	100	167.634.000	DINPORABU DPAR
222	6		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				640.000.000		637.297.000		647.665.000		1.924.962.000	DINPORABU DPAR
222	6	1		Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas	%	50	640.000.000	50	637.297.000	66.7	647.665.000	66.7	1.924.962.000	DINPORABU DPAR
223			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				484.098.500		612.043.000		616.825.000		1.712.966.500	
223	2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				484.098.500		572.043.000		576.825.000		1.632.966.500	DINARPUSDA
223	2	1		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan	Nilai	82.25	246.083.500	82.27	291.039.000	82.3	293.472.000	82.3	830.594.500	DINARPUSDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
223	2	2		Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan per /tahun	Orang	202	238.015.000	225	281.004.000	250	283.353.000	250	802.372.000	DINARPUSDA
223	3		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				0		40.000.000		40.000.000		80.000.000	DINARPUSDA
223	3	1		Persentase Naskah Kuno milik masyarakat yang dialihmediakan	%	NA	0	20	40.000.000	40	40.000.000	40	80.000.000	DINARPUSDA
224			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				182.750.000		295.769.000		297.573.000		776.092.000	
224	2		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				182.750.000		215.769.000		217.573.000		616.092.000	DINARPUSDA
224	2	1		Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas	%	52	121.750.000	65	125.537.000	77	126.795.000	77	374.082.000	DINARPUSDA
224	2	2		Persentase unit kerja / OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar	%	20	61.000.000	27	90.232.000	35	90.778.000	35	242.010.000	DINARPUSDA
224	3		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				0		60.000.000		60.000.000		120.000.000	DINARPUSDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
224	3	1		Prosentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan	%	NA	0	0.3	60.000.000	0.6	60.000.000	0.6	120.000.000	DINARPUSDA
224	4		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				0		20.000.000		20.000.000		40.000.000	DINARPUSDA
224	4	1		Prosentase arsip tertutup yang diizinkan untuk digunakan	%	NA	0	0.02	20.000.000	0.04	20.000.000	0.04	40.000.000	DINARPUSDA
325			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.369.464.250		1.350.000.000		1.300.598.000		4.020.062.250	
325	3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				42.800.000		75.000.000		75.598.000		193.398.000	DINKANNAK
325	3	1		Produksi Perikanan Tangkap	Ton		42.800.000		75.000.000		75.598.000		193.398.000	DINKANNAK
325	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.234.982.500		1.100.000.000		1.050.000.000		3.384.982.500	DINKANNAK
325	4	1		Produksi Perikanan Budidaya	Ton		1.234.982.500		1.100.000.000		1.050.000.000		3.384.982.500	DINKANNAK
325	5		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000	DINKANNAK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
325	5	1		Persentase Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	%		50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000	DINKANNAK
325	6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				41.681.750		125.000.000		125.000.000		291.681.750	DINKANNAK
325	6	1		Produksi olahan hasil perikanan	Ton		41.681.750		75.000.000		75.000.000		191.681.750	DINKANNAK
325	6	2		Peningkatan angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun		0		50.000.000		50.000.000		100.000.000	DINKANNAK
326			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				26.588.175.000		2.769.432.000		2.632.031.500		31.989.638.500	
326	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				25.528.475.000		1.035.414.000		944.256.250		27.508.145.250	DINPORABUDPAR
326	2	1		Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%	50	25.528.475.000	66.7	1.035.414.000	100	944.256.250	100	27.508.145.250	DINPORABUDPAR
326	3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				839.700.000		903.230.000		910.776.000		2.653.706.000	DINPORABUDPAR
326	3	1		Persentase Capaian Pemasaran dan Promosi Pariwisata	%	33,3	419.850.000	66.7	451.615.000	100	455.388.000	100	1.326.853.000	DINPORABUDPAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
326	3	1		Persentase Capaian Pemasaran dan Promosi Pariwisata	%	25	419.850.000	50	451.615.000	100	455.388.000	100	1.326.853.000	DINPORABU DPAR
326	5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				220.000.000		830.788.000		776.999.250		1.827.787.250	DINPORABU DPAR
326	5	1		Persentase SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%	60	220.000.000	80	780.788.000	100	626.999.250	100	1.627.787.250	DINPORABU DPAR
326	5	2		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi	%		0		50.000.000		150.000.000		200.000.000	DINPORABU DPAR
327			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				9.650.480.650		13.216.195.609		15.104.305.364		37.970.981.623	
327	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				1.397.753.300		2.291.684.000		904.490.000		4.593.927.300	DINKANNAK | DINPERTAN KP
327	2	1		Persentase peningkatan jumlah sarana pertanian	%		647.753.300		1.646.684.000		379.490.000		2.673.927.300	DINPERTAN KP
327	2	2		Peningkatan Populasi Ternak	%		750.000.000		645.000.000		525.000.000		1.920.000.000	DINKANNAK
327	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN				5.964.943.000		8.074.995.625		11.234.123.000		25.274.061.625	DINKANNAK | DINPERTAN KP

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			PRASARANA PERTANIAN											
327	3	1		Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian	%		5.930.387.500		7.487.436.525		11.009.123.000		24.426.947.025	DINPERTANKP
327	3	2		Persentase kawasan ternak yang dikelola	%		34.555.500		587.559.100		225.000.000		847.114.600	DINKANNAK
327	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				228.650.300		422.701.000		426.098.364		1.077.449.664	DINKANNAK
327	4	1		Dokumen Peta sebaran penyakit hewan	Dokumen		228.650.300		422.701.000		426.098.364		1.077.449.664	DINKANNAK
327	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				241.328.800		375.987.000		278.293.000		895.608.800	DINPERTANKP
327	5	1		Persentase kasus bencana Pertanian yang tertangani	%		241.328.800		375.987.000		278.293.000		895.608.800	DINPERTANKP
327	6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				0		50.000.000		75.000.000		125.000.000	DINKANNAK
327	6	1		Persentase usaha peternakan yang berizin	%		0		50.000.000		75.000.000		125.000.000	DINKANNAK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
327	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.817.805.250		2.000.827.984		2.186.301.000		6.004.934.234	DINPERTANKP
327	7	1		Cakupan bina kelompok petani	%		1.817.805.250		2.000.827.984		2.186.301.000		6.004.934.234	DINPERTANKP
330			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.473.663.230		9.907.978.000		9.428.955.000		28.810.596.230	
330	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				92.900.000		100.357.000		101.197.000		294.454.000	DINPERINDAG
330	2	1		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	23.50	92.900.000	24.00	100.357.000	25.00	101.197.000	25.00	294.454.000	DINPERINDAG
330	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				8.685.763.230		8.950.667.000		8.452.522.000		26.088.952.230	DINPERINDAG
330	3	1		Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar	%	64	8.613.913.230	72	8.275.398.000	80	8.376.624.000	80	25.265.935.230	DINPERINDAG
330	3	2		Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan	%	49.00	71.850.000	50.00	675.269.000	52.00	75.898.000	52.00	823.017.000	DINPERINDAG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
330	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				70.000.000		80.250.000		80.837.000		231.087.000	DINPERINDAG
330	4	1		Koefisien variasi harga barang	%	98	70.000.000	99	80.250.000	100	80.837.000	100	231.087.000	DINPERINDAG
330	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				150.000.000		300.000.000		313.711.000		763.711.000	DINPERINDAG
330	5	1		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	USD	0.26	150.000.000	0.27	300.000.000	0.28	313.711.000	0.28	763.711.000	DINPERINDAG
330	6		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				350.000.000		351.256.000		354.191.000		1.055.447.000	DINPERINDAG
330	6	1		Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	%	99.03	350.000.000	99.51	351.256.000	100	354.191.000	100	1.055.447.000	DINPERINDAG
330	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				125.000.000		125.448.000		126.497.000		376.945.000	DINPERINDAG
330	7	1		Persentase pelaku usaha yang dipromosikan	%	0.26	125.000.000	0.27	125.448.000	0.28	126.497.000	0.28	376.945.000	DINPERINDAG
331			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				1.079.849.000		1.280.795.000		1.661.740.000		4.022.384.000	

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			PERINDUSTRIAN											
331	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				946.899.500		1.110.257.000		1.489.945.000		3.547.101.500	DINPERINDAG
331	2	1		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembagunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	1.60	946.899.500	1.70	1.110.257.000	1.80	1.489.945.000	1.80	3.547.101.500	DINPERINDAG
331	3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				42.949.500		60.179.000		60.598.000		163.726.500	DINPERINDAG
331	3	1		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan	%	0,2	42.949.500	0.25	60.179.000	0.3	60.598.000	0.3	163.726.500	DINPERINDAG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terk										
331	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				90.000.000		110.359.000		111.197.000		311.556.000	DINPERINDAG
331	4	1		Persentase data informasi industri yang tersedia	%	0,5	90.000.000	0.6	110.359.000	0.7	111.197.000	0.7	311.556.000	DINPERINDAG
332			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				0		2.000.000		2.000.000		4.000.000	
332	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				0		2.000.000		2.000.000		4.000.000	DINAKERKOP UKM
332	3	1		Persentase transmigran yang ditempatkan	%	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	1	4.000.000	DINAKERKOP UKM
401			SEKRETARIAT DAERAH				13.305.770.045		13.742.097.081		13.558.763.986		40.606.631.112	

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
401	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				9.552.038.495		9.602.350.095		9.682.871.000		28.837.259.590	SETDA
401	2	1		Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	4,21	297.960.350	4.22	299.027.375	4.23	301.529.000	4.23	898.516.725	SETDA
401	2	2		Persentase kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang disusun	%	100	8.561.887.400	100	8.600.248.000	100	8.672.269.000	100	25.834.404.400	SETDA
401	2	3		persentase kasus kasus hukum yang ditangani	%	100	642.190.970	100	652.895.720	100	658.475.000	100	1.953.561.690	SETDA
401	2	4		Persentase kerjasama Daerah dan pengembangan potensi daerah yang tersusun	%	100	49.999.775	100	50.179.000	100	50.598.000	100	150.776.775	SETDA
401	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.753.731.550		4.139.746.986		3.875.892.986		11.769.371.522	SETDA
401	3	1		Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable	%	100	199.999.325	100	250.717.000	100	252.394.000	100	703.110.325	SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
401	3	2		Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu	%		126.796.375		200.487.979		401.746.000		729.030.354	SETDA
401	3	3		Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil	%	100	610.587.750	100	953.341.775	100	961.309.000	100	2.525.238.525	SETDA
401	3	4		Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	2.816.348.100	100	2.735.200.232	100	2.260.443.986	100	7.811.992.318	SETDA
402			SEKRETARIAT DPRD				12.648.647.625		14.865.680.300		15.395.571.531		42.909.899.456	
402	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				12.648.647.625		14.865.680.300		15.395.571.531		42.909.899.456	SETWAN
402	2	2		Persentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	1.053.008.175	100	1.238.838.000	100	1.238.838.000	100	3.530.684.175	SETWAN
402	2	3		Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	%	100	1.495.854.250	100	2.593.839.500	100	2.595.230.500	100	6.684.924.250	SETWAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
402	2	4		Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	4.477.006.000	100	3.851.670.700	100	3.851.670.831	100	12.180.347.531	SETWAN
402	2	5		Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES	%	100	980.410.000	100	1.521.628.900	100	2.050.128.900	100	4.552.167.800	SETWAN
402	2	8		Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	%	80	4.642.369.200	81	5.659.703.200	82	5.659.703.300	83	15.961.775.700	SETWAN
501			PERENCANAAN				2.029.349.310		2.575.770.593		2.675.701.606		7.280.821.509	
501	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				840.453.900		1.106.579.593		1.206.510.606		3.153.544.099	BAPPEDA LITBANG
501	2	1		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	%	100	689.134.400	100	930.952.593	100	930.952.593	100	2.551.039.586	BAPPEDA LITBANG
501	2	2		Rata-rata Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	%		151.319.500		175.627.000		275.558.013		602.504.513	BAPPEDA LITBANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
501	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.188.895.410		1.469.191.000		1.469.191.000		4.127.277.410	BAPPEDA LITBANG
501	3	1		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	%	100	1.188.895.410	100	1.469.191.000	100	1.469.191.000	100	4.127.277.410	BAPPEDA LITBANG
502			KEUANGAN				687.375.669.483		719.792.473.642		802.110.177.978		2.209.278.321.103	
502	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				680.148.542.258		709.520.100.542		791.486.976.946		2.181.155.619.746	BKAD
502	2	1		Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD	%	100	679.032.095.508	100	708.226.004.542	100	790.176.731.946	100	2.177.434.831.996	BKAD
502	2	2		Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu	%	100	1.116.446.750	100	1.294.096.000	100	1.310.245.000	100	3.720.787.750	BKAD
502	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				4.267.974.500		4.820.090.000		4.860.373.000		13.948.437.500	BKAD
502	3	1		Persentase perangkat daerah yang mengelola administrasi barang milik daerah dengan baik	%	95	4.267.974.500	95	4.820.090.000	98	4.860.373.000	98	13.948.437.500	BKAD

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
502	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2.959.152.725		5.452.283.100		5.762.828.032		14.174.263.857	BAPENDA
502	4	1		Persentase Sub Komponen PAD yang realisasinya melebihi target pendapatan	%	53	2.959.152.725	55	5.452.283.100	56	5.762.828.032	56	14.174.263.857	BAPENDA
503			KEPEGAWAIAN				7.959.187.500		7.613.679.000		6.769.038.000		22.341.904.500	
503	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				7.959.187.500		7.613.679.000		6.769.038.000		22.341.904.500	BKPSDM
503	2	1		Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	90	7.959.187.500	90	7.613.679.000	90	6.769.038.000	90	22.341.904.500	BKPSDM
504			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.200.000.000		1.304.308.000		1.244.373.000		3.748.681.000	
504	2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.200.000.000		1.304.308.000		1.244.373.000		3.748.681.000	BKPSDM
504	2	2		Prosentase ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan kebutuhan	%	100	1.200.000.000	100	1.304.308.000	100	1.244.373.000	100	3.748.681.000	BKPSDM

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
505			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.151.726.000		1.534.863.000		1.425.476.992		4.112.065.992	
505	2		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.151.726.000		1.534.863.000		1.425.476.992		4.112.065.992	BAPPEDA LITBANG
505	2	1		Persentase implementasi kelitbangan	%	100	1.151.726.000	100	1.534.863.000	100	1.425.476.992	100	4.112.065.992	BAPPEDA LITBANG
601			INSPEKTORAT DAERAH				1.459.853.300		1.471.961.525		1.624.007.000		4.555.821.825	
601	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				960.607.300		971.094.000		1.118.785.000		3.050.486.300	INSPEKTORAT
601	2	1		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan	%	45	210.000.000	50	325.094.000	55	340.000.000	55	875.094.000	INSPEKTORAT
601	2	2		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan	%	80	750.607.300	83	646.000.000	85	778.785.000	85	2.175.392.300	INSPEKTORAT
601	3		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				499.246.000		500.867.525		505.222.000		1.505.335.525	INSPEKTORAT

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
601	3	1		Persentase Capaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah)	%		499.246.000		500.867.525		505.222.000		1.505.335.525	INSPEKTORAT
701			KECAMATAN				12.550.023.684		9.627.873.681		9.891.494.513		32.069.391.878	
701	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				986.104.240		1.140.773.600		1.089.004.000		3.215.881.840	
701	2	1		Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	85	10.102.000	85	11.500.000	85	12.000.000	85	33.602.000	KEC. PWT TIMUR
701	2	1		Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	4.500.000	100	10.200.000	100	10.250.000	100	24.950.000	KEC. PWT BARAT
701	2	1		Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan	%	100	6.910.500	100	8.145.000	100	8.227.000	100	23.282.500	KEC. PWT SELATAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
701	2	1		Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	13.500.000	100	14.067.500	100	15.179.000	100	42.746.500	KEC. PWT UTARA
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	189.400.000	100	237.402.000	100	226.682.000	100	653.484.000	KEC. BANYUMAS
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	15.550.000	100	17.561.000	100	17.708.000	100	50.819.000	KEC. WANGON
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	29.024.000	100	29.124.000	100	29.370.000	100	87.518.000	KEC. TAMBAK

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	22.800.000	100	22.880.000	100	23.072.000	100	68.752.000	KEC. SUMPIUH
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	13.077.000	100	13.111.000	100	13.232.000	100	39.420.000	KEC. SUMBANG
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	12.600.000	100	16.250.000	100	12.750.000	100	41.600.000	KEC. SOMAGEDE
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	20.070.200	100	20.894.000	100	21.068.000	100	62.032.200	KEC. SOKARAJA
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	8.550.000	100	8.565.000	100	8.652.000	100	25.767.000	KEC. RAWALO

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	42.500.000	100	51.342.500	100	43.008.000	100	136.850.500	KEC. PWT UTARA
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	10.625.000	100	12.725.000	100	13.089.000	100	36.439.000	KEC. PWT TIMUR
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	90.481.140	100	112.390.000	100	107.723.000	100	310.594.140	KEC. PWT SELATAN
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	40.144.500	100	40.700.000	100	40.800.000	100	121.644.500	KEC. PWT BARAT
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	13.580.000	100	13.725.000	100	14.400.000	100	41.705.000	KEC. PURWOJATI

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	24.690.000	100	26.470.000	100	24.985.000	100	76.145.000	KEC. PEKUNCEN
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	17.114.900	100	50.000.000	100	50.000.000	100	117.114.900	KEC. PATIKRAJA
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	31.752.000	100	35.000.000	100	32.131.000	100	98.883.000	KEC. LUMBIR
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	5.000.000	100	5.017.000	100	5.059.000	100	15.076.000	KEC. KEMRANJEN
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	49.300.000	100	50.840.000	100	49.888.000	100	150.028.000	KEC. KEMBARAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	106.894.000	100	126.295.400	100	104.174.000	100	337.363.400	KEC. KEDUNGBANTENG
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	28.200.000	100	28.300.000	100	28.536.000	100	85.036.000	KEC. KEBASEN
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	9.900.000	100	9.900.000	100	10.018.000	100	29.818.000	KEC. KARANGLEWAS
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	17.500.000	100	16.000.000	100	17.708.000	100	51.208.000	KEC. KALIBAGOR
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	35.000.000	100	35.089.200	100	35.416.000	100	105.505.200	KEC. JATILAWANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	72.500.000	100	70.560.000	100	73.368.000	100	216.428.000	KEC. GUMELAR
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	15.600.000	100	16.450.000	100	15.785.000	100	47.835.000	KEC. CILONGOK
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	16.514.000	100	11.850.000	100	11.850.000	100	40.214.000	KEC. BATURRADEN
701	2	2		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	12.725.000	100	18.420.000	100	12.876.000	100	44.021.000	KEC. AJIBARANG
701	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				7.496.239.149		7.747.651.601		7.696.204.014		22.940.094.764	
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	18.825.000	100	20.205.000	100	19.049.000	100	58.079.000	KEC. BANYUMAS

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	42.083.200	100	43.038.000	100	43.038.000	100	128.159.200	KEC. BATURRADEN
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	30.850.000	100	30.850.000	100	31.217.000	100	92.917.000	KEC. CILONGOK
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	64.100.000	100	74.445.000	100	64.866.000	100	203.411.000	KEC. GUMELAR
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	46.135.740	100	46.300.000	100	46.687.000	100	139.122.740	KEC. JATILAWANG
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	44.300.000	100	43.000.000	100	44.829.000	100	132.129.000	KEC. KALIBAGOR
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	9.900.000	100	9.900.000	100	10.018.000	100	29.818.000	KEC. KARANGLEWAS

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	32.925.000	100	39.800.000	100	33.318.000	100	106.043.000	KEC. AJIBARANG
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	24.150.000	100	34.243.000	100	24.438.000	100	82.831.000	KEC. KEBASEN
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	59.998.800	100	58.838.000	100	60.717.000	100	179.553.800	KEC. KEMRANJEN
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	50.000.000	100	66.000.000	100	50.597.000	100	166.597.000	KEC. LUMBIR
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	10.706.000	100	58.025.000	100	50.000.000	100	118.731.000	KEC. PATIKRAJA
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	38.999.000	100	104.099.000	100	39.465.000	100	182.563.000	KEC. PEKUNCEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	40.000.000	100	40.400.000	100	40.477.000	100	120.877.000	KEC. KEMBARAN
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	64.000.000	100	49.165.000	100	64.000.000	100	177.165.000	KEC. PURWOJATI
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	14.845.000	100	20.134.000	100	15.021.000	100	50.000.000	KEC. RAWALO
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	37.422.600	100	39.450.000	100	39.779.000	100	116.651.600	KEC. SOKARAJA
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	32.710.000	100	41.875.000	100	33.100.000	100	107.685.000	KEC. SOMAGEDE
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	20.120.000	100	20.153.000	100	20.359.000	100	60.632.000	KEC. SUMBANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	34.200.000	100	34.320.000	100	34.608.000	100	103.128.000	KEC. SUMPIUH
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	57.576.000	100	57.689.000	100	58.264.000	100	173.529.000	KEC. TAMBAK
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	60.618.750	100	69.246.000	100	69.825.000	100	199.689.750	KEC. WANGON
701	3	1		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	88	31.100.000	89	38.325.000	90	31.471.000	90	100.896.000	KEC. KEDUNGBANTENG
701	3	2		Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	1.554.500.700	100	1.526.795.500	100	1.563.113.000	100	4.644.409.200	KEC. PWT UTARA
701	3	2		Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	660.000.000	100	662.223.000	100	652.902.000	100	1.975.125.000	KEC. SUMPIUH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	3	2		Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	85	1.342.634.700	85	1.350.572.771	85	1.342.387.000	85	4.035.594.471	KEC. PWT TIMUR
701	3	2		Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	1.543.167.654	100	1.463.241.030	100	1.485.596.014	100	4.492.004.698	KEC. PWT BARAT
701	3	2		Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	1.530.371.005	100	1.527.874.300	100	1.548.563.000	100	4.606.808.305	KEC. PWT SELATAN
701	3	3		Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan	%		0		30.000.000		30.000.000		60.000.000	KEC. PWT TIMUR
701	3	3		Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan	%		0		62.450.000		45.000.000		107.450.000	KEC. PWT UTARA
701	3	3		Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan	%		0		15.000.000		15.000.000		30.000.000	KEC. SUMPIUH

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	3	3		Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan	%		0		34.995.000		52.000.000		86.995.000	KEC. PWT BARAT
701	3	3		Prosentase Pelaksanaan PPKM Mikro Tingkat Kelurahan	%		0		35.000.000		36.500.000		71.500.000	KEC. PWT SELATAN
701	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.345.525.295		391.843.980		405.934.499		4.143.303.774	
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	14.662.000	100	12.905.000	100	12.905.000	100	40.472.000	KEC. BATURRADEN
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	14.000.000	100	14.425.000	100	14.167.000	100	42.592.000	KEC. CILONGOK
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	15.000.000	100	11.958.200	100	15.177.000	100	42.135.200	KEC. GUMELAR
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	7.000.000	100	7.125.000	100	7.083.000	100	21.208.000	KEC. JATILAWANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	4.950.000	100	4.950.000	100	5.009.000	100	14.909.000	KEC. KARANGLEWAS
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	11.700.000	100	11.375.000	100	11.839.000	100	34.914.000	KEC. KEBASEN
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	21.205.000	100	25.875.000	100	26.458.000	100	73.538.000	KEC. KEMBARAN
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	327.000.000	100	27.096.000	100	27.322.000	100	381.418.000	KEC. SUMPIUH
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	12.100.300	100	12.671.000	100	12.776.000	100	37.547.300	KEC. SOKARAJA
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	11.855.000	100	11.800.000	100	11.995.000	100	35.650.000	KEC. SUMBANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	85	11.200.000	90	17.400.000	90	11.334.000	90	39.934.000	KEC. KEDUNGBANTENG
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	85	604.175.650	85	6.223.980	85	14.427.500	85	624.827.130	KEC. PWT TIMUR
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	80	12.575.000	80	12.750.000	80	12.725.000	80	38.050.000	KEC. KALIBAGOR
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	13.500.000	100	15.052.000	100	15.178.000	100	43.730.000	KEC. WANGON
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	20.000.000	100	20.050.000	100	20.239.000	100	60.289.000	KEC. TAMBAK
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	5.250.000	100	10.000.000	100	5.312.000	100	20.562.000	KEC. SOMAGEDE

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	35.350.000	100	33.093.000	100	35.722.000	100	104.165.000	KEC. LUMBIR
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	5.037.920	100	25.000.000	100	25.000.000	100	55.037.920	KEC. PATIKRAJA
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	11.700.000	100	11.700.000	100	11.839.000	100	35.239.000	KEC. PEKUNCEN
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	6.000.000	100	6.550.000	100	7.000.000	100	19.550.000	KEC. PURWOJATI
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	719.804.425	100	30.600.000	100	30.750.000	100	781.154.425	KEC. PWT BARAT
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	711.135.000	100	13.137.800	100	13.256.000	100	737.528.800	KEC. PWT SELATAN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	707.500.000	100	8.275.000	100	7.589.000	100	723.364.000	KEC. PWT UTARA
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	6.350.000	100	6.370.000	100	6.425.000	100	19.145.000	KEC. RAWALO
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	15.000.000	100	25.070.000	100	15.178.000	100	55.248.000	KEC. AJIBARANG
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	8.975.000	100	5.375.000	100	9.081.000	100	23.431.000	KEC. BANYUMAS
701	4	1		Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	12.500.000	100	5.017.000	100	20.147.999	100	37.664.999	KEC. KEMRANJEN
701	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				722.155.000		347.604.500		700.352.000		1.770.111.500	

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	36.359.900	100	25.000.000	100	15.000.000	100	76.359.900	KEC. PATIKRAJA
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	11.475.000	100	11.850.000	100	11.612.000	100	34.937.000	KEC. CILONGOK
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	39.000.000	100	39.135.000	100	54.466.000	100	132.601.000	KEC. AJIBARANG
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	35.600.000	100	9.620.000	100	36.025.000	100	81.245.000	KEC. BANYUMAS
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100	34.220.000	100	8.200.000	100	8.200.000	100	50.620.000	KEC. BATURRADEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				pengelolaan APBDES										
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	7.075.000	100	10.035.000	100	25.119.000	100	42.229.000	KEC. WANGON
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	46.000.000	100	20.050.000	100	40.239.000	100	106.289.000	KEC. TAMBAK
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	37.394.000	100	11.440.000	100	37.841.000	100	86.675.000	KEC. SUMPIUH
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	40.000.000	100	8.025.000	100	28.095.000	100	76.120.000	KEC. SUMBANG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	44.450.100	100	44.700.000	100	44.982.000	100	134.132.100	KEC. SOMAGEDE
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	37.800.100	100	5.996.000	100	38.429.000	100	82.225.100	KEC. SOKARAJA
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	5.200.000	100	5.210.000	100	5.262.000	100	15.672.000	KEC. RAWALO
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	36.485.000	100	10.485.000	100	11.000.000	100	57.970.000	KEC. PURWOJATI
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100	47.600.000	100	25.500.000	100	48.169.000	100	121.269.000	KEC. PEKUNCEN

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				pengelolaan APBDES										
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	51.400.000	100	21.607.500	100	52.015.000	100	125.022.500	KEC. LUMBIR
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	10.000.000	100	8.410.000	100	25.119.000	100	43.529.000	KEC. KEMRANJEN
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	54.999.900	100	19.600.000	100	35.239.000	100	109.838.900	KEC. KEMBARAN
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	14.600.000	100	22.400.000	100	15.774.000	100	52.774.000	KEC. KEDUNGBANTENG

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	38.650.000	100	13.440.000	100	42.801.000	100	94.891.000	KEC. KEBASEN
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	40.850.000	100	14.850.000	100	41.338.000	100	97.038.000	KEC. KARANGLEWAS
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	9.500.000	100	4.525.000	100	9.613.000	100	23.638.000	KEC. KALIBAGOR
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	33.500.000	100	7.526.000	100	33.900.000	100	74.926.000	KEC. JATILAWANG
701	6	1		Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	%	100	9.996.000	100	0	100	40.114.000	100	50.110.000	KEC. GUMELAR

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				pengelolaan APBDES										
801			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.653.675.915		4.873.061.225		4.911.266.753		14.438.003.893	
801	2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				98.205.000		98.205.000		128.722.000		325.132.000	KESBANGPOL
801	2	1		Prosentase peserta pembinaan yang paham tentang penguatan nilai ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	35	98.205.000	40	98.205.000	45	128.722.000	45	325.132.000	KESBANGPOL
801	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				3.007.014.800		3.032.414.800		3.055.058.753		9.094.488.353	KESBANGPOL
801	3	1		Persentase Parpol yang aktif dalam Kegiatan	%	75	3.007.014.800	75	3.032.414.800	75	3.055.058.753	75	9.094.488.353	KESBANGPOL

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Pendidikan Politik										
801	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				84.399.800		102.076.800		101.197.000		287.673.600	KESBANGPOL
801	4	1		Persentase Ormas yang terlibat dalam kegiatan wawasan kebangsaan	%	100	84.399.800	100	102.076.800	100	101.197.000	100	287.673.600	KESBANGPOL
801	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				365.006.750		430.371.750		406.184.000		1.201.562.500	KESBANGPOL
801	5	1		Prosentase peserta pembinaan yang memahami materi Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	%	100	365.006.750	100	430.371.750	100	406.184.000	100	1.201.562.500	KESBANGPOL

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
801	6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.099.049.565		1.209.992.875		1.220.105.000		3.529.147.440	KESBANGPOL
801	6	1		Prosentase Penanganan Potensi Konflik Ipoleksosbudhankam dengan baik	%	100	1.099.049.565	100	1.209.992.875	100	1.220.105.000	100	3.529.147.440	KESBANGPOL
XXX			NON URUSAN				2.075.118.124.833		2.201.837.826.928		2.244.349.028.647		6.521.304.980.408	
XXX	1		X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.075.118.124.833		2.201.837.826.928		2.244.349.028.647		6.521.304.980.408	
XXX	1	1		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	3.217.594.749	100	3.722.467.940	100	3.834.130.321	100	10.774.193.010	Seluruh PD
XXX	1	2		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.455.904.752.995	100	1.547.578.567.196	100	1.589.887.745.629	100	4.593.371.065.820	Seluruh PD

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
XXX	1	3		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	29.724.204.894	100	37.153.353.618	100	37.615.775.849	100	104.493.334.361	Seluruh PD
XXX	1	4		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	127.125.554.970	100	151.094.106.074	100	152.514.204.328	100	430.733.865.372	Seluruh PD
XXX	1	5		Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD	%		195.000.000.000		195.700.144.000		197.335.708.000		588.035.852.000	RSUD BANYUMAS
XXX	1	5		Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD	%	84	95.125.000.000	85	95.466.544.000	85	95.112.565.000	85	285.704.109.000	RSUD AJIBARANG
XXX	1	5		Indeks Kepuasan Pelayanan BLUD	%	77	122.803.424.000	83	124.713.644.830	89	121.586.924.420	89	369.103.993.250	DINKES
XXX	1	6		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaa n Pimpinan Daerah	%	100	4.922.844.265	100	4.912.305.760	100	4.953.532.000	100	14.788.682.025	SETDA
XXX	1	7		Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja		7	423.436.500	7.15	501.794.000	7.15	505.987.000	7.15	1.431.217.500	SETDA
XXX	1	8		Persentase terlaksananya penyelenggaraan acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/Wa	%	100	848.903.360	100	904.085.410	100	911.642.000	100	2.664.630.770	SETDA

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								OPD
						Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Bupati/Sekretaris Daerah yang sesuai dengan SOP										
XXX	1	11		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum DPRD	%	75	40.022.409.100	80	40.090.814.100	85	40.090.814.100	85	120.204.037.300	SETWAN

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Banyumas dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran (impact) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1.

8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana tertuang pada tabel 8.2 merupakan indikator tujuan perangkat daerah pada setiap perangkat daerah di Kabupaten Banyumas.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target Kinerja RPJMD Murni (T) dan Target RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
1	Indek Reformasi Birokrasi		63.79	NA	66.00	66.00	68.00	68.00	70.00	70.00	73.00	73.00	75.00	75.00	75.00	75.00
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70.75	71.35	71.95	71.95	72.55	72.55	73.15	72.18	73.75	72.38	74.35	72.58	74.35	72.58
3	Persentase penduduk miskin	%	17.05	13.5	12.51	12.51	11.53	11.53	10.54	12.51	9.55	11.76	8.56	11.00	8.56	11.00
4	Persentase Pertumbuhan PDRB / Pertumbuhan Ekonomi	%	6.34	6.35	6.40	6.40	6.45	6.45	6.50	4.1	6.60	4.5	6.65	5.0	6.65	5.0
5	PDRB per Kapita	juta rupiah	27.380	29.230	31.115	31.115	33.000	33.000	34.885	32.332	36.770	33.725	38.655	35.513	38.655	35.513
6	Indeks Ketahanan Pangan		NA	73.99	74.00	74.00	74.01	74.01	74.02	74.02	74.03	74.03	74.04	74.04	74.04	74.04
7	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4.62	4.49	4.36	4.36	4.23	4.23	4.06	5,75	3.93	5.00	3.76	4.50	3.76	4.50
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		NA	64.81	63.79	63.79	63.88	63.88	63.97	63.97	64.06	64.06	64.15	64.15	64.15	64.15
10	Persentase Kinerja Infrastruktur	%	NA	NA	-	NA	-	NA	-	73.75	-	83.46	-	88.01	-	88.01
11	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	NA	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	7	-	7
12	Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	599 (kasus)	677 (kasus)	731 (kasus)	NA	792 (kasus)	NA	823 (kasus)	1,656	891 (kasus)	1,586	950 (kasus)	1,516	950 (kasus)	1,516

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	DINAS PENDIDIKAN															
1.	Harapan Lama Sekolah *TPB 4	Tahun	12.63	12.78	12.93	12.63	13.08	12,85	13.23	12.87	13.38	12.89	13.53	12.91	13.53	12.91
2.	Rata-rata Lama Sekolah *TPB 4	Tahun	7.40	7.45	7.50	7.4	7.55	7.52	7.60	7.53	7.65	7.54	7.70	7.55	7.70	7.55
	DINAS KESEHATAN															
3.	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 Kelahiran Hidup	54.16	67.87	67.80	54.16	67.50	41.8	67.25	67,25	67.00	67	66.50	66,5	66.50	66,5
4.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.33	73.43	73.53	73.33	73.63	73.72	73.73	73.73	73.83	73.83	73.93	73.93	73.93	73.93
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS															
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit		76.78	74.89	75.00	76.78	76.00	79	78.00	80	80.00	85	85.00	85	85.00	85
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG															
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit		76.78	79.00	82.00	76.78	83.00	82.58	84.00	84	85	85	85	85	85	85
7.	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	75	79	82	75	83	88,47	84	84	85	85	85	85	85	85
	DINAS PEKERJAAN UMUM															
8.	Persentase Kinerja	%	-	-	-	-	-	-	-	72.77	-	76.21	-	82.13	-	82.13

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
9.	Persentase Penanganan Rumah Korban Bencana	%	-	-	-		-		-	100	-	100	-	100	-	100
10.	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni *TPB 11	%	NA	83.17	84.17	NA	85.17	85.2	86.17	86.17	87.17	87.17	88.17	88.17	88.17	88.17
11.	Persentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	-	-	-	-	-	-	-	73,80	-	74,96	-	76,19	-	76,19
12.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99.979	99.980	99.981	99.979	99.982	99.982	99.983	99.983	99.984	99.984	99.985	99.985	99.985	99.985
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															
13.	Indeks Resiko Bencana		-	-	-	-	-	-	-	189	-	185	-	181	-	181
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
14.	Persentase Penurunan Potensi Koflik IPOLEKSOSBUDHANKAM *TPB 16	%	NA	NA	5	NA	5	-0	5	5	5	5	5	5	25	15
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA															
15.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	ketenteraman, keindahan)															
16.	Persentase penegakan Perda	%	90	95	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
17.	Indeks Desa Membangun	%	0.660 (Nilai)	0.663 (Nilai)	0.668 (Nilai)	0.66	0.674 (Nilai)	0.6988	0.681 (Nilai)	0.681	0.688 (Nilai)	0.688	0.694 (Nilai)	0.694	0.694 (Nilai)	0.694
18.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya *TPB 1	%	43.19	47.55	51.41	-	51.50	-	51.57	50	51.62	50	51.66	50	51.66	50
	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH															
19.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro *TPB 8	%	0.34	1.05	0.47	0.34	0.47	0.615	0.47	0.244	0.47	0.249	0.47	0.254	0.47	0.254
20.	Persentase Koperasi Sehat	%	29.12	29.71	30.00	29.12	30.25	22.4	30.50	28.88	30.75	30	31.00	31.11	31.00	31.11
21.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja *TPB 8	%	65.19	65.70	66.09	65.19	66.49	-	66.89	66.66	67.30	66.67	67.71	66.68	67.71	66.68
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP															
22.	Persentase cakupan layanan persampahan *TPB 11	%				NA		52		54		100		100		100
23.	Persentase peningkatan	%	-	-	-	-	-	-	-	2		2		2		2

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	RTH publik															
24.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		NA	73.94	56.50	NA	56.50	70.04	56.50	56.50	56.50	42.50	56.50	42.60	56.50	42.60
25.	Persentase peningkatan rekomendasi persetujuan lingkungan	%	-	-	-	-	-	-	-	5		5		5		5
26.	Indeks Kualitas Air (IKA)		46.94	34.67	54.20	46.94	54.40	59.33	54.60	54.60	54.80	53.85	55.00	53.92	55.00	53,92
27.	Indeks Kualitas Udara (IKU) *TPB 13		85.72	82.78	83.10	85.72	83.20	85.07	83.30	83.30	83.40	85.20	83.50	85.30	83.50	85,3
28.	Persentase jumlah sampah yang tertangani *TPB 11	%				54		97		98		99		99		99
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
29.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan *TPB 1	Skor	-	-	-	-	-	-	-	88		88,55		89		89
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA															
30.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) *TPB 3	%	0.87	NA	0.86	0.87	0.85	0	0.84	1.79	0.83	1.78	0.82	1.77	0.82	1.77
31.	Nilai Kabupaten Layak Anak *TPB 16		426	514	550	426	600	528	650	600	700	625	750	650	750	650
32.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) *TPB 16		67.32	NA	67.45	67.32	67.50	68,12*	67.55	71.92	67.57	71.93	67.60	71.94	67.60	71.94
	DINAS PERHUBUNGAN															
33.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	0,6865		0,8275		0,89		0,89
	DINAS KOMUNIKASI															

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	DAN INFORMATIKA															
34.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *TPB 16		NA	2.63	2.80	NA	2.90	3.09	3.20	3.10	3.30	3.20	3.50	3.30	3.50	3.30
35.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) *TPB 16		-	-	-	-	-	-	-	95		96		97		97
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU															
36.	Nilai investasi daerah	Milyar Rupiah	583	625	255	583	260	1087	265	500	270	545	275	600	275	600
37.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		77.23	83.60	86.00	77.23	87.00	89.5	88.00	88.00	89.00	89.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA															
38.	Persentase jenis kesenian daerah yang dilestarikan	%	NA	NA	37.74	NA	50.94	100	77.36	77,36	90.57	90,57	100	100	100	100
39.	Persentase Pengembangan Daya Tarik wisata di Destinasi wisata yang dikelola Pemda *TPB 8	%	-	-	-	-	-	-	-	10		11,36		10,2		10,2
40.	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	NA	35.50	35.50	NA	1.31	-23.33	2.59	2.59	2.94	2.94	3.27	3.27	45.61	3.27
41.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	-	-	-	NA		-61.85		4,17		20,00		16,67		16,67
	DINAS ARSIP DAN															

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	PERPUSTAKAAN															
42.	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	53		54		55		55
43.	Nilai Pengawasan Kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	60		61		62		62
	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN															
44.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan *TPB 14	%	1.38	1.09	1.50	1.38	1.50	2.07	1.50	1,5	1.50	1.5	1.50	1.5	7.50	1,5
45.	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	6.19	3.07	3.00	6.19	3.00	4.99	3.00	3	3.00	3	3.00	3	15.00	3
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN															
46.	Coefisien of Variant (CoV)	%	-	-	-	-	-	-	-	25.17		24.83		24		24
47.	Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang dikembangkan *TPB 2	%	-	-	-	-	-	-	-	3,5		4		4,5		4,5
48.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	%	NA	NA	1	NA	1	-1.39	1	1	1	1	1	1	5	5
49.	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) *TPB 2	%	90	94	94	90	95	109.12	96	96	96	96	97	97	97	97
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN															
50.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB *TPB 17	%	-	-	-	-	-	-	-	15,23		15,24		15,25		15,25

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
51.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	-	-	-	-	-	-	-	24,32		24,33		24,34		24,34
	SEKRETARIAT DAERAH															
52.	Nilai Maturitas SPIP	level								2		2		3		3
53.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	86.9		86.9		87		87
	SEKRETARIAT DPRD															
54.	Indeks Kepuasan Dewan	%	80	80	80	80	81	100	82	100	83	100	84	100	84	100
	INSPEKTORAT DAERAH															
55.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		-	-	-	-	-	-	-	1		1		1		1
56.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		-	-	-	-	-	-	-	3		3		3		3
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
57.	Manajemen Resiko Indek (MRI) level 3		-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
58.	Nilai Penghargaan Perencanaan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	7.76	-	7.65	-	7.7	-	7.7
59.	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	%	-	-	-	-	-	-	-	75	-	80	-	85	-	85
	BADAN PENDAPATAN															

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD / *TPB	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target RPJMD Murni (T) dan RPJMD Perubahan (P)					Target Akhir	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Perubahan
	DAERAH															
60.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	-	-	-	-	-	-	-	19,3	-	19,4	-	19,5		19,5
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH															
61.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah *TPB 16	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
62.	Indeks Profesionalitas ASN.	%	82.79	82.80	83.10	82.79	83.40	67.48	83.60	71	83.60	71	83.70	71	83.70	71
	KECAMATAN															
63.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		52.39	53.28	82.00		82.94		83.89	83.93	84.87	84.87	85.81	85.81	85.93	85.81

8.3 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas tertuang pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat															
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,78	12,93	12,63	13,08	12,85	13,23	12.87	13,38	12.89	13,53	12.91	13,53	12.91
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,4	7,45	7,5	7,4	7,55	7,52	7,6	7.53	7,65	7.54	7,7	7.55	7,7	7.55
3.	Indeks Ketahanan Pangan		-	-	-	-	-	-	-	74.02	-	74.03	-	74.04	-	74.04
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,75	71,35	71,95	70,75	72,55	71,98	73,15	72.18	73,75	72.38	74,35	72.58	74,35	72.58
5.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	7	-	7
6.	Nilai Maturitas SPIP	level	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	3
7.	PDRB per Kapita	juta rupiah	27,38	29,23	31,115	27,38	33	31,87	34,885	32.332	36,77	33.725	38,655	35.513	38,655	35.513
8.	Persentase penduduk miskin	%	17,05	13,5	12,51	12,53	11,53	13,26	10,54	12.51	9,55	11,76	8,56	11	8,56	11
9.	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	-	-	-	-	-	-	-	5		10		15		15
10.	Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6,34	6,35	6,4	6,34	6,45	NA	6,5	4.1	6,6	4.5	6,65	5.0	6,65	5.0
11.	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,78	5,8	5,81	5,78	5,82	NA	5,83	5.83	5,85	5.85	5,86	5.86	5,86	5.86
12.	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	4,44	4,45	4,47	4,44	4,48	NA	4,49	4.49	4,51	4.51	4,52	4.52	4,52	4.52
13.	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	%	3,17	3,28	3,36	3,17	3,58	NA	3,72	2.26	3,85	3.11	4,03	3.91	4,03	3.91
14.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,19	65,7	66,09	65,19	66,49	0	66,89	66.66	67,3	66.67	67,71	66.68	67,71	66.68

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,62	4,49	4,36	4,62	4,23	6	4,06	5,75	3,93	5.00	3,76	4.50	3,76	4.50
16.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,33	73,43	73,53	73,33	73,63	73,72	73,73	73.73	73,83	73.83	73,93	73.93	73,93	73.93
	B. Aspek Daya Saing															
17.	Angka Kriminalitas	per 10.000 pendu-duk	599 (kasus)	677 (kasus)	731 (kasus)	599 (kasus)	792 (kasus)	2480 (kasus)	823 (kasus)	1,656	891 (kasus)	1,586	950 (kasus)	1,516	950 (kasus)	1,516
18.	Indek Reformasi Birokrasi		63,79	NA	66	63,79	68	68,76	70	70.00	73	73.00	75	75.00	75	75.00
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		NA	64.81	63.79	64.62	63.88	70.04	63.97	63.97	64.06	64.06	64.15	64.15	64.15	64.15
20.	Persentase Kinerja Infrastruktur	%	-	-	-	-	-	-	-	73.75	-	83.46	-	88.01	-	88.01
21.	Persentase kriminalitas yang tertangani	%	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5	-	25
22.	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	10
	C. Aspek Pelayanan Umum															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
23.	APM PAUD	%	-	-	-	-	-	-	-	75.05	-	75.10	-	75.15	-	75.15
24.	APM SD/MI	%	98,75	98,8	98,85	98,75	98,9	98,54	98,95	98.05	98,95	98.10	98,95	98.15	98,95	98.15
25.	APM SMP/MTs	%	81,41	81,45	81,5	81,41	81,6	81,23	81,65	81.55	81,7	81.60	81,75	81.65	81,75	81.65
26.	Peningkatan Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terakreditasi	%	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
27.	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 Kelahiran Hidup	54,16	67,87	67,8	54,16	67,5	41,8	67,25	67,25	67	67	66,5	66,5	66,5	66,5
28.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit		76,78	74,89	75	76,78	76	79	78	80	80	85	85	85	85	85
29.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit		76,78	79	82	76,78	83	82,58	84	84	85	85	85	85	85	85
30.	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	68,18	72,73	77,27	68,18	77,27	80	81,82	81,82	81,82	85	86,36	85	86,36	85
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
31.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan permukaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	%	-	-	-	-	-	-	-	74.46	-	75.58	-	77.08	-	77.08
32.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	-	-	-	-	-	-	-	98	-	99	-	99	-	99
33.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	99,979	99,98	99,981	99,979	99,982	99,982	99,983	99.983	99,984	99.984	99,985	99.985	99,985	99.985
34.	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	-	-	-	-	-	-	-	70.19	-	72.43	-	75.84	-	75.84
35.	Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	%	0,021	0,02	0,019	0,021	0,018	0,018	0,017	0.017	0,016	0.016	0,015	0.015	0,015	0.015

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
36.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	75,33	82,88	84	75,33	86	88,45	88	88	90	90	92	92	92	92
37.	Presentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	-	-	-	-	-	-	-	73,80	-	74,96	-	76,19	-	76,19
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
38.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	NA	76,3	76,55	NA	76,81	78,76	77,07	77.07	77,33	77.33	77,58	77.58	77,58	77.58
39.	Persentase Kinerja Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	-	-	-	-	-	-	-	84.40	-	86.29		88.20	-	88.20
40.	Persentase Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	%	NA	83,17	84,17	NA	85,17	85,2	86,17	86.17	87,17	87.17	88,17	88.17	88,17	88.17
41.	Prosentase Jumlah Rumah Layak Huni Untuk Korban Bencana	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
42.	Indeks Resiko Bencana		-	-	-	-	-	-	-	189	-	185	-	181	-	181
43.	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	0,45		0,49		0,53		0,53
44.	Persentase penanganan korban bencana	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
45.	Persentase penegakan Perda	%	90	95	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
46.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
47.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
48.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
49.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	43,19	47,55	51,41		51,5		51,57	51.57	51,62	51.62	51,66	51.66	51,66	51.66
50.	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
51.	Prosentase Angkatan Kerja	%	-	-	-	-	-	-	-	66.66	-	66.66	-	66.66	-	66.66
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
52.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87,62	NA	87,63	88,20	87,64	88,27	87,65	87.65	87,66	87.66	87,67	87.67	87,67	87.67
53.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67,32	NA	67,45	67,32	67,5	68,12	67,55	71.92	67,57	71.93	67,6	71.94	67,6	71.94
54.	Nilai Kabupaten Layak Anak		426	514	550	426	600	528	650	600	700	625	750	650	750	650

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
55.	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	-	-	-	-	-	-	-	96	-	96	-	97	-	97
56.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	90	94	94	90	95	109,12	96	96	96	96	97	97	97	97
57.	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	%	-	-	-	-	-	-	-	65	-	66	-	67	-	67
58.	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	%	70	75	75	70	80	81,97	82	82	84	84	86	86	86	86
59.	Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
60.	Indeks Kualitas Air (IKA)		46,94	34,67	54,2	46,94	54,4	59,33	54,6	54.60	54,8	53.85	55	53.92	55	53,92
61.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		NA	73,94	56,5	NA	56,5	70,04	56,5	56.50	56,5	42.50	56,5	42.60	56,5	42.60
62.	Indeks Kualitas Udara (IKU)		85,72	82,78	83,1	85,72	83,2	85,07	83,3	83.30	83,4	85.20	83,5	85.30	83,5	85,3
63.	Persentase cakupan layanan persampahan	%	NA	NA	50	NA	52	52	54	54	56	100	58	100	58	100
64.	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	%	-	-	-	-	-	-	-	24	-	26	-	27	-	27
65.	Persentase peningkatan rekomendasi persetujuan lingkungan	%	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5	-	5

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
66.	Persentase peningkatan RTH publik	%	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
67.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Administrasi Kependudukan	Skor	-	-	-	-	-	-	-	88	-	88,55	-	89	-	89
68.	Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang terlayani sesuai SOP	%	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
69.	Indeks Desa Membangun	%	0,66	0,663	0,668	0,66	0,674	0,6988	0,681	0.681	0,688	0.688	0,694	0.694	0,694	0.694
70.	Persentase desa yang meningkat statusnya	%	-	-	-	-	-	-	-	60	-	80	-	100	-	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
71.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.87	NA	0.86	0.87	0.85	0.83	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82
72.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	-	-	-	-	-	-	-	0.01		0.01		0.01		0.01
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
73.	Indeks konektivitas angkutan jalan		-	-	-	-	-	-	-	0,78		0,8		0,8		0,8
74.	Indeks konektivitas angkutan sungai		-	-	-	-	-	-	-	0,125		0,375		0,5		0,5

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
75.	Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan	%	-	-	-	-	-	-	-	66.67		91.67		100		100
76.	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	-	-	0,686 5		0,827 5		0,89		0,89
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
77.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		NA	2,63	2,8	NA	2,9	3,09	3,2	3.10	3,3	3.20	3,5	3.30	3,5	3.30
78.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		-	-	-	-	-	-	-	95		96		97		97
79.	Persentase OPD yang memanfaatkan TIK dalam tata kelola pemerintahan daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	80		90		100		100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
80.	Persentase Koperasi Aktif	%	76	76	76,25	76	76,5	80,6	76,75	81.18	77	81.54	77,25	82.07	77,25	82.07
81.	Persentase Koperasi Sehat	%	29,12	29,71	30	29,12	30,25	22,4	30,5	28.88	30,75	30	31	31.11	31	31.11
82.	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	0,39	1,15	1,25	0,39	1,34	1,73	1,69	1,73	1,84	1,74	1,98	1,75	1,98	1,75
83.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,34	1,05	0,47	0,34	0,47	0,615	0,47	0.244	0,47	0.249	0,47	0.254	0,47	0.254
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
84.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		77,23	83,6	86	77,23	87	89,5	88	88.00	89	89.00	90	90.00	90	90.00
85.	Nilai investasi daerah	Milyar Rupiah	583	625	255	583	260	1087	265	500	270	545	275	600	275	600

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
86.	Persentase penyelesaian aduan masyarakat terhadap pelayanan publik	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
87.	Pertumbuhan proyek investasi daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	1		1		1		7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
88.	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%	NA	35,5	35,5	NA	1,31	-23,33	2,59	2.59	2,94	2.94	3,27	3.27	45,61	3.27
89.	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	%								2.59		2.94		3.27		3.27
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
90.	Persentase Data Statistik Sektoral yang dikelola dengan baik	%	-	-	-	-	-	-	-	90		100		100		100
91.	Persentase Jenis Informasi Publik yang dikelola	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
92.	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	%	0	0	21	0	43	43	64	64	86	86	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
93.	Persentase jenis kesenian daerah yang dilestarikan	%	NA	NA	37,74	NA	50,94	100	77,36	77,36	90,57	90,57	100	100	100	100
94.	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	NA	NA	32,87	NA	47,47	72,72	68,68	68.68	85,29	85.29	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
95.	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	53		54		55		55
96.	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	NA	NA	0,053	NA	0,053	0,48	0,053	0.48	0,053	0.48	0,053	0.48	0,053	0.48
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
97.	Nilai Pengawasan Kearsipan		-	-	-	-	-	-	-	60		61		62		62
98.	Persentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	NA	5,5	9,1	NA	14,5	14,5	20	20	27,3	27	36,4	35	36,4	35
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
99.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1.38	1.09	1.50	1,38	1.50	2,07	1.50	1,5	1.50	1.5	1.50	1.5	7.50	1,5
100.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	NA	NA	1.5	NA	1.5	1,52	1.5	1,5	1.5	1.5	1.5	1.5	7.5	1,5
101.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	NA	NA	1.5	NA	1.5	2,63	1.5	1,5	1.5	1.5	1.5	1.5	7.5	1,5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
102.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	NA	11.91	25.36	NA	5.86	-61,85	5.48	5.48	5.48	5.48	6.35	6.35	48.48	6.35
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
103.	Coefisien of Variant (CoV)	%	-	-	-	-	-	-	-	25.17		24.83		24		24
104.	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana	%	-	-	-	-	-	-	-			2		2		4

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
	pendukung produksi pertanian															
105.	Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian	%	-	-	-	-	-	-	-			2		2		4
106.	Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan	%	-	-	-	-	-	-	-			25		30		30
107.	Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang dikembangkan	%	-	-	-	-	-	-	-	3,5		4		4,5		4,5
108.	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	6.19	3.07	3.00	6,19	3.00	4,99	3.00	3	3.00	3	3.00	3	15.00	3
109.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	%	NA	NA	1	NA	1	-1,39	1	1	1	1	1	1	5	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
110.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	Kelom-pok	1118	718	54	1118	54	96	54	54	54	54	54	54	270	54
111.	Jumlah Gula Kelapa Terekspor	Ton	6000	7200	10000	6000	12000	12.233,82	18000	13000	24000	14000	30000	15000	30000	15000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
112.	Cakupan bina kelompok disektor perindustrian	Kelom-pok	-	-	-	-	-	-	-	67		68		69		204

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
113.	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%								1,73		1,74		1,75		1,75
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
	SEKRETARIAT DAERAH															
114.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	.	-	-	-	-	-	-	-	81		82		83		83
115.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		60,22	70,95	72	73,84	74	74,96	76	76.00	78	78.00	80	80.00	80	80.00
116.	Capaian kinerja instansi lingkup asisten Pemerintahan dan Kesra	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
117.	Capaian kinerja instansi lingkup asisten Administrasi Umum	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
118.	Capaian kinerja instansi lingkup asisten ekonomi dan pembangunan	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
119.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah			-	-	-	-	-	-	86.9		86.9		87		87
120.	Nilai Maturitas SPIP	level								2		2		3		3
	SEKRETARIAT DPRD															
121.	Indeks Kepuasan Dewan	%	80	80	80	80	81	100	82	100	83	100	84	100	84	100
122.	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
	PERENCANAAN															
123.	Manajemen Resiko Indek (MRI) level 3		-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
124.	Nilai Penghargaan Perencanaan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	7.76		7.65		7.7		7.7

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
125.	Persentase kesesuaian prioritas daerah dan nasional	%	-	-	-	-	-	-	-	60		70		80		80
	KEUANGAN															
126.	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
127.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
128.	Persentase atas pengamanan aset daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	90		95		95		95
129.	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-	-	-	-	-	-	-	6,1		6,6		6,8		6,8
130.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	-	-	-	-	-	-	-	19,3		19,4		19,5		19,5
131.	Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai ketentuan	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
132.	Persentase penyerapan APBD	%	-	-	-	-	-	-	-	90		90		95		95
	KEPEGAWAIAN															
133.	Indeks Profesionalitas ASN.	%	82.79	82.80	83.10	82,79	83.40	67,48	83.60	71	83.60	71	83.70	71	83.70	71
134.	Persentase ASN yang mendapatkan penilaian kinerja kategori BAIK	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
135.	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatan nya	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target (T) dan Realisasi (R) RPJMD Murni					Target (T) RPJMD Murni dan (P) RPJMD Perubahan					Kondisi Akhir RPJMD	
			2017	2018	2019 T	2019 R	2020 T	2020 R	2021 T	2021 P	2022 T	2022 P	2023 T	2023 P	Murni	Peru-bahan
136.	Persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan	%	-	-	-	-	-	-	-	75		80		85		85
137.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	NA	60	NA	62	66,67	65	65	67	67	70	70		70
	PENGELOLAAN PERBATASAN															
	INSPEKTORAT DAERAH															
138.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		-	-	-	-	-	-	-	1		1		1		1
139.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		-	-	-	-	-	-	-	3		3		3		3
140.	Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi		-	-	-	-	-	-	-	3.86		3.87		3.88		3.88
	KECAMATAN															
141.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		51,33	52,26	82	38,5	82,98	83,14	83,96	83.93	84,94	84.87	85,92	85.81	85,92	85.81
142.	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
143.	Persentase Penurunan Potensi Konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM	%	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	5	-	15
144.	Persentase wilayah kecamatan yang kondisinya aman	%	-	-	-	-	-	-	-	70	-	75	-	80	-	80
145.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam bidang politik	%	-	-	-	-	-	-	-	75	-	75	-	75	-	75

BAB IX
PENUTUP

Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan nasional terutama dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Perubahan ini juga sebagai penyesuaian kebijakan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 berupa penyesuaian program kegiatan dalam RPJMD, perbaikan indikator dan target, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta perbaikan pengukuran kinerja daerah dan OPD.

Melalui perubahan RPJMD ini diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas semakin realistis untuk dicapai melalui penajaman berbagai program dan kegiatan yang dalam implementasinya didukung oleh seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat Kabupaten Banyumas. Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perubahan RPJMD ini dapat diwujudkan dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan dan peran serta masyarakat.

Agar pelaksanaan Perubahan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Sedangkan Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ditekankan pada perubahan untuk perencanaan tahun 2022 dan 2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2023-2028 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.

Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Bupati Banyumas berkewajiban menyebarluaskan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 kepada masyarakat;
b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program Perubahan RPJMD dengan sebaik-baiknya yang mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023;
c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022-2023;
d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan RPJMD.

BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN